



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan daerah, dan keterkaitan antara Pemerintah Pusat dengan daerah serta antar daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, badan dan dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Ngawi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

- (1) RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ngawi untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, yang menggambarkan:
 - a. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan
 - b. Tujuan yang disertai Indikator Tujuan, Sasaran yang disertai Indikator Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra-PD, dan Renja-PD.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan mulai dari dokumen perencanaan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, maupun tahunan daerah dengan dokumen perencanaan menengah Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

Pasal 3

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun sebagai berikut:

- a. bab I berisi mengenai pendahuluan;
- b. bab II berisi mengenai gambaran umum daerah;
- c. bab III berisi mengenai visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
- d. bab IV berisi mengenai program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- e. bab V berisi mengenai penutup.

Pasal 4

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
 - d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra-PD.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan target indikator sasaran tetapi tidak merubah target akhir sasaran RPJMD, maka perubahan RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada RPJMD ini selama RPJMD periode berikutnya belum ditetapkan.

Pasal 8

Program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025 sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dilakukan perubahan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2030 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2030–2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (2) Pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran teknis pada masa transisi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09) dinyatakan berakhir periodesasinya;
- (2) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 2025 Nomor 13) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dilakukan perubahan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 02
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR:
(175-2)/(2025)

Pemerintah
Kabupaten Ngawi



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGAWI
2025-2029



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-10
1.4 Maksud dan Tujuan	I-14
1.4.1 Maksud	I-14
1.4.2 Tujuan	I-14
1.5 Sistematika Penulisan	I-14
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-18
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-18
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah.....	II-19
2.1.2 Luas, Letak, dan Batas Wilayah Administrasi .	II-20
2.1.3 Potensi Sumber Daya Alam	II-28
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-85
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	II-86
2.2.2 Kesehatan Untuk Semua.....	II-98
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-103
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif.....	II-108
2.2.5 Indeks Ketentraman dan Ketertiban	II-109
2.2.6 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-113
2.2.7 Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-113
2.2.8 Indeks Kerukunan Umat Beragama	II-125
2.2.9 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-128
2.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-139
2.3.1 Jumlah Tamu Wisatawan.....	II-140
2.3.2 Jumlah Pelaku Ekraf Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual.....	II-144
2.3.3 Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-145
2.3.4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	II-150
2.3.5 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	II-176
2.3.6 Transformasi Digital.....	II-177
2.3.7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.....	II-180
2.3.8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-193
2.3.9 Kepuasan Layanan Infrastruktur	II-203
2.3.10 Persentase Desa Mandiri	II-216
2.3.11 Stabilitas Ekonomi Makro	II-216
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-220





2.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-220
2.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	II-225
2.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-228
2.4.4	Kinerja Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM)	II-229
2.4.5	Hasil Kerjasama Daerah	II-242
2.4.6	Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi Jawa Timur ..	II-242
2.4.7	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Kabupaten Ngawi	II-245
2.5	Gambaran Keuangan Daerah	II-250
2.5.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	II-251
2.5.2	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	II-251
2.5.3	Neraca Daerah	II-268
2.5.4	Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030	II-272
2.6	Permasalahan dan Isu Strategis	II-291
2.6.1	Identifikasi Permasalahan Pembangunan.....	II-294
2.6.2	Isu Strategis	II-303
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-398		
3.1	Visi	III-398
3.2	Misi	III-401
3.3	Tujuan dan Sasaran	III-410
3.3.1	Tujuan	III-410
3.3.2	Sasaran.....	III-411
3.4	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas	III-417
3.4.1	Pembangunan Daerah.....	III-417
3.4.2	Pentahapan Pembangunan RPJMD	III-417
3.4.3	Arah Kebijakan	III-418
3.4.4	Arah Kebijakan Tahun 2025-2029	III-424
3.4.5	Program Prioritas Daerah	III-455
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH IV-480		
4.1	Program Perangkat Daerah 2026-2030.....	IV-482
4.2	Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	IV-616
BAB V PENUTUP.....V-699		
5.1	Kaidah Pelaksanaan	V-699
5.2	Pedoman Transisi	V-700
5.3	Kesimpulan Penting Substansial	V-701
5.4	Pedoman Pengendalian dan Evaluasi.....	V-702





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan .	II-22
Tabel 2.2	Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	II-30
Tabel 2.3	Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan	II-32
Tabel 2.4	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Ngawi Tahun 2024.....	II-34
Tabel 2.5	Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Ngawi (Ekor) Tahun 2024.....	II-36
Tabel 2.6	Luas Area Tanaman Hutan Rakyat di Kabupaten Ngawi	II-39
Tabel 2.7	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.....	II-41
Tabel 2.8	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Golongan Tarif di Kabupaten Ngawi Tahun 2023.....	II-45
Tabel 2.9	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024.....	II-47
Tabel 2.10	Jumlah Sambungan Rumah Penerima Bantuan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Ngawi Tahun 2024	II-48
Tabel 2.11	Produksi Padi Setara Beras Menurut Kecamatan di Kabupaten Ngawi (Ton) Tahun 2024	II-51
Tabel 2.12	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Ngawi Tahun 2024	II-53
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-77
Tabel 2.14	Distribusi Persebaran Penduduk menurut Kecamatan pada Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-79
Tabel 2.15	Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024 ...	II-80
Tabel 2.16	Distribusi persebaran Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024.....	II-80
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk Menurut Agama yang dianut di Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024.....	II-81
Tabel 2.18	Permasalahan Sosial Menurut Jenisnya di Kabupaten Ngawi Tahun 2024.....	II-111
Tabel 2.19	Angka Konflik di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-128





Tabel 2.20	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-129
Tabel 2.21	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ngawi Tahun 2024	II-133
Tabel 2.22	Hasil Kinerja Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-150
Tabel 2.23	Kondisi Ekosistem Riset Inovasi Daerah Prioritas Kabupaten Ngawi Tahun 2023-2026.....	II-153
Tabel 2.24	Perkembangan Ekspor dan Impor Non Migas di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024.....	II-180
Tabel 2.25	Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-203
Tabel 2.26	Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-205
Tabel 2.27	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, Korban, dan Kerugian di Kabupaten Ngawi Tahun 2024	II-210
Tabel 2.28	Kondisi Jalan Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024.....	II-213
Tabel 2.29	Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-216
Tabel 2.30	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Ngawi	II-220
Tabel 2.31	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024.....	II-221
Tabel 2.32	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-222
Tabel 2.33	Opini BPK Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024..	II-223
Tabel 2.34	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-224
Tabel 2.35	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024.....	II-226
Tabel 2.36	Realisasi Indikator Kinerja SPM Pemerintah Kabupaten Ngawi Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024.....	II-230
Tabel 2.37	Realisasi Indikator Kinerja SPM Pemerintah Kabupaten Ngawi Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024	II-232
Tabel 2.38	Realisasi Indikator Kinerja SPM Pemerintah Kabupaten Ngawi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024	II-235
Tabel 2.39	Realisasi Indikator Kinerja SPM Pemerintah Kabupaten Ngawi Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024	II-236
Tabel 2.40	Realisasi Indikator Kinerja SPM Pemerintah Kabupaten Ngawi Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024	II-239





Tabel 2.41	Realisasi Indikator Kinerja SPM Pemerintah Kabupaten Ngawi Urusan Sosial Tahun 2020-2024	II-241
Tabel 2.42	Realisasi APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi 2020-2024	II-252
Tabel 2.43	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024.....	II-259
Tabel 2.44	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024....	II-260
Tabel 2.45	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024	II-262
Tabel 2.46	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024.....	II-263
Tabel 2.47	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024.....	II-265
Tabel 2.48	Defisit Anggaran Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-266
Tabel 2.49	Neraca Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024.....	II-270
Tabel 2.50	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026-2030	II-274
Tabel 2.51	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026-2030	II-278
Tabel 2.52	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026-2030	II-282
Tabel 2.53	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah	II-286
Tabel 2.54	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	II-289
Tabel 2.55	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Urusan Pembangunan.....	II-295
Tabel 2.56	Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis dan Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Ngawi berdasarkan Urusan Pembangunan.....	II-332
Tabel 2.57	Skala Penilaian Metode Rating.....	II-376
Tabel 2.58	Pembobotan Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Ngawi.....	II-377
Tabel 3.1	Penjelasan Pokok-Pokok Visi Pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029	III-399
Tabel 3.2	Penyandingan Visi dan Misi RPJMD	III-407
Tabel 3.3	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ngawi 2025-2030	III-412
Tabel 3.4	Pentahapan Pembangunan RPJMD.....	III-418
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029	III-426





Tabel 3.6	Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029.....	III-457
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi.....	IV-482
Tabel 4.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029	IV-617
Tabel 4.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Ngawi.....	IV-618
Tabel 4.4	Definisi Operasional Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Ngawi	IV-665





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lain.....	I-11
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Ngawi.....	II-21
Gambar 2.2	Produksi Padi dan Jagung Kabupaten Ngawi	II-27
Gambar 2.3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Daerah Kabupaten Ngawi	II-50
Gambar 2.4	Jumlah Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Ngawi	II-55
Gambar 2.5	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ngawi	II-57
Gambar 2.6	Nilai IKLH Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-63
Gambar 2.7	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah.....	II-64
Gambar 2.8	Timbulan Sampah Yang Ditangani.....	II-65
Gambar 2.9	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Ngawi.....	II-67
Gambar 2.10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Ngawi	II-69
Gambar 2.11	Penurunan Emisi GRK Kumulatif.....	II-71
Gambar 2.12	Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Ngawi.....	II-72
Gambar 2.13	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Ngawi....	II-73
Gambar 2.14	Perkembangan Jumlah Penduduk.....	II-74
Gambar 2.15	Kepadatan Penduduk Kabupaten Ngawi.....	II-76
Gambar 2.16	Proyeksi Penduduk Kabupaten Ngawi	II-82
Gambar 2.17	Persentase Pemukiman yang Sehat dan Aman Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-85
Gambar 2.18	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi	II-87
Gambar 2.19	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-88
Gambar 2.20	Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-91
Gambar 2.21	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-92
Gambar 2.22	Indeks Gini Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-93
Gambar 2.23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-97
Gambar 2.24	Angka Harapan Hidup Kabupaten Ngawi	II-98
Gambar 2.25	Prevalensi Balita Gizi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-100
Gambar 2.26	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Ngawi	II-102
Gambar 2.27	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Ngawi.....	II-104





Gambar 2.28	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-106
Gambar 2.29	Kepesertaan Jamsostek Ketenagakerjaan pada Sektor Formal dan Pekerja Rentan Buruh Tani Tembakau	II-108
Gambar 2.30	Jumlah Jenis Seni Budaya yang Aktif	II-116
Gambar 2.31	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-130
Gambar 2.32	Nilai LHE AKIP Kabupaten Ngawi	II-136
Gambar 2.33	Persentase Penurunan PPKS Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-138
Gambar 2.34	Jumlah Tamu Wisatawan Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-140
Gambar 2.35	Jumlah Tamu Wisatawan Asing	II-142
Gambar 2.36	Jumlah Pelaku Ekraf yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024	II-144
Gambar 2.37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-145
Gambar 2.38	TPAK Perempuan Kabupaten Ngawi 2020-2024	II-147
Gambar 2.39	Pertumbuhan PDRB Per Kapita	II-156
Gambar 2.40	Realisasi PDRB Kabupaten Ngawi	II-158
Gambar 2.41	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-161
Gambar 2.42	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024 ...	II-162
Gambar 2.43	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-163
Gambar 2.44	Angka Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-167
Gambar 2.45	Garis Kemiskinan Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-171
Gambar 2.46	Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024	II-178
Gambar 2.47	Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024	II-179
Gambar 2.48	Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024	II-182
Gambar 2.49	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpustakaan	II-185
Gambar 2.50	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024	II-186
Gambar 2.51	Indeks Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-188





Gambar 2.52 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024	II-190
Gambar 2.53 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024	II-191
Gambar 2.54 Persentase Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi yang Menyelenggarakan Arsip secara baku Tahun 2020-2024	II-193
Gambar 2.55 Persentase UMKM yang Naik Kelas/Status Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-194
Gambar 2.56 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi 2020-2024	II-195
Gambar 2.57 Jumlah Perkembangan Koperasi di Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2024	II-197
Gambar 2.58 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-199
Gambar 2.59 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024	II-204
Gambar 2.60 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024	II-207
Gambar 2.61 Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2024	II-212
Gambar 2.62 Persentase Luas Sawah Beririgasi di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024	II-215
Gambar 2.63 Tingkat Inflasi Kabupaten Ngawi dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2022-2024	II-217
Gambar 2.64 Capaian Aksi HAM Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2023	II-227
Gambar 2.65 Pembentukan Isu-Isu Strategis Kabupaten Ngawi	II-293
Gambar 2.66 Kesesuaian Isu Strategis KLHS RPJMD terhadap Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029	II-388
Gambar 2.67 Kesesuaian Isu KLHS dan Kondisi Daerah Kabupaten Ngawi	II-390
Gambar 3.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD	III-406



BAB I

PENDAHULUAN

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGAWI
2025-2029





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pondasi dasar yang menjadi pijakan daerah dalam melakukan akselerasi serta transformasi pembangunan daerah yang lebih maju serta mampu melakukan pencapaian yang lebih baik serta mampu menysasar seluruh aspek dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Arah serta strategi daerah yang diakumulasikan dalam rancangan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Perumusan dokumen RPJMD prinsipnya adalah memproses rekaman dari problematika daerah serta keinginan masyarakat terhadap perubahan di berbagai sektor menjadi lebih baik seperti halnya dalam layanan publik, pemenuhan aspek dasar serta berprinsip terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang pada Pasal 5 Ayat (2) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 150 Ayat (2a) yang mengamanatkan RPJMD adalah Penjabaran dari Visi Misi dan program kepala daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman dengan dokumen RPJPD serta memperhatikan dokumen RPJM Nasional.

Oleh karenanya Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut telah





diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat (3) dan juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 Ayat (1). Perencanaan pembangunan yang disusun secara sinergi oleh semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama kedua undang-undang tersebut diharapkan bisa menjadi arah bagi cita-cita pembangunan beserta strategi dan cara pencapaiannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 Ayat (2), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD juga memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas serta indikator kinerja daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, oleh karena itu harus mengacu dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten/kota pada saat pergantian kepala daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah selama lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam penyusunan Dokumen RPJMD dibutuhkan sinergi peran dari seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam konteks perencanaan



pembangunan daerah bidang urusan yang diampu. Dokumen perencanaan pemerintah yang dilakukan tidak hanya sebagai arsip belaka, sehingga dokumen ini akan dimuat secara detail dalam proses pertanggungjawaban dari hasil perencanaan yang telah dibuat dan disusulkan serta diimplementasikan dengan selaras serta sesuai tujuan awal.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 Ayat (1) selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 7 bahwa dalam menyusun RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu : 1) politis; 2) teknokratik; 3) Partisipatif; 4) atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan teknokratis yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan teknokratis ini dilakukan diawali dengan penyusunan rencana pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan dilanjutkan dengan penyajian pada rancangan RPJMD. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dirumuskan permasalahan dan isu strategis. Isu strategis digunakan sebagai dasar untuk menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Pendekatan teknokratis juga dilakukan untuk menyusun proyeksi keuangan daerah dan target capaian indikator untuk masing-masing ukuran.

Setelah tersusun Rancangan Teknokratik RPJMD, selanjutnya Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan :

- a. Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan dokumen RPJMD;
- b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;





- c. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan utamanya terkait gender;
- e. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- f. Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pendekatan politis dalam penyusunan RPJMD adalah upaya untuk menerjemahkan program-program pembangunan yang ditawarkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Rancangan RPJMD, melalui tahapan :

- a. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- b. Melakukan konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- c. Melakukan pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pendekatan yang terakhir digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah perpaduan antara pendekatan bottom-up dan top-down, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Didasarkan Permendagri Nomor 86





Tahun 2017 tersebut juga mengatur bahwa dalam RPJMD harus memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), bertujuan untuk menjaga sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan Daerah. Konsistensi antar dokumen perencanaan ini akan berdampak saat dilakukan evaluasi pada akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa periodisasi RPJMD.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029 ini dilaksanakan sebagai penjabaran visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun Kepala Daerah Kabupaten Ngawi, yaitu Bupati Ony Anwar Harsono, S.T., M.H. dan Wakil Bupati Dr. Dwi Rianto Jatmiko, M.H., M.Si yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

RPJMD Kabupaten Ngawi menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai landasan utama dalam setiap arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Hal ini diwujudkan melalui integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ngawi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan risiko bencana, mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta memastikan adanya pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Ngawi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan





ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara holistik.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);





7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;





13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah;





20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil erifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lebaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 4);





28. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 130.A Tahun 2023 tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023–2026, sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah.
29. Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJM Nasional, RTRW Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RTRW Provinsi Jawa Timur, dan RTRW Kabupaten Ngawi. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

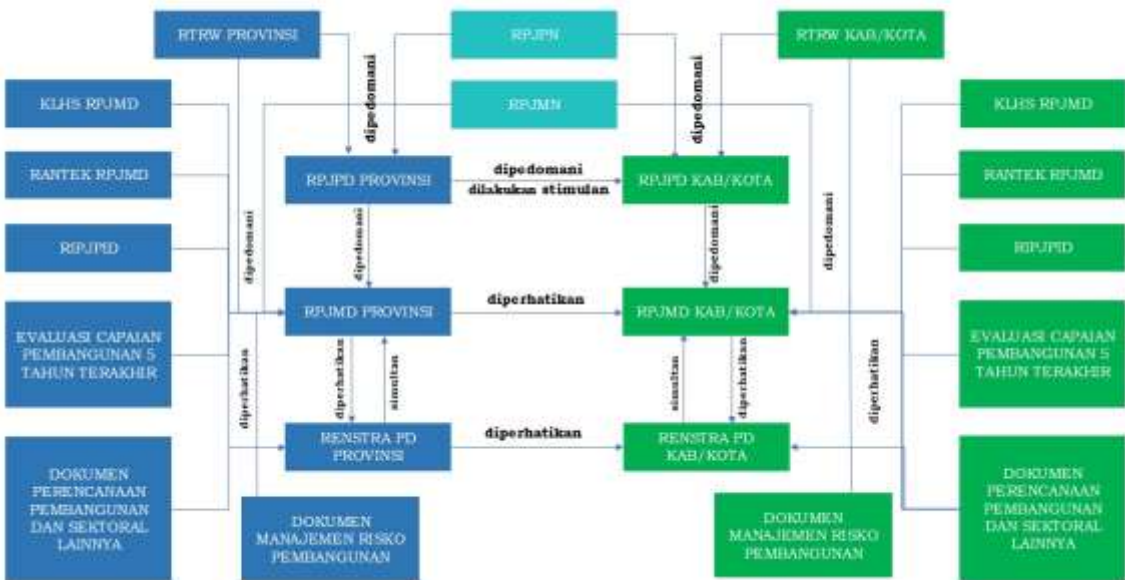
Sebagai bagian dari integrasi kebijakan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi, RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Tahun 2023–2026, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Ngawi Nomor 130.A Tahun 2023. Dokumen ini menjadi pedoman strategis dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah agar berbasis riset, pengembangan teknologi, dan inovasi (litbang dan iptek) serta sebagai pengarusutamaan



dalam perencanaan sektor-sektor strategis, sesuai mandat Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021.

Dengan demikian, RIPJPID menjadi bagian keselarasan dokumen RPJMD 2025-2029 yang sudah ditambahkan dalam landasan hukum penyusunan RPJMD sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menjadikan inovasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 sudah disesuaikan dengan keterkaitan dokumen perencanaan lainnya dengan berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2025-2025, RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025. RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan tahunan.



Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain
Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN



RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas kepala daerah terpilih dalam satu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun. Sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, salah satu aspek penting dalam Bab I Pendahuluan adalah penyajian hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Secara hierarkis, RPJMD memiliki keterkaitan langsung dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) sebagai pedoman utama arah pembangunan daerah selama 20 tahun. Dokumen RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029 merupakan RPJMD periode keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2005–2025 dan sekaligus menjadi landasan transisi menuju RPJPD baru untuk periode 2025–2045. Dengan demikian, dokumen RPJMD ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan program lima tahunan, tetapi juga menjembatani kesinambungan dan keberlanjutan kebijakan pembangunan jangka panjang di daerah.

Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berperan sebagai dokumen strategis utama yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah untuk periode lima tahun. Sebagai instrumen perencanaan komprehensif, RPJMD menjabarkan arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan di berbagai sektor untuk mencapai target kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini menjadi pedoman fundamental bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja strategis (Renstra) dan rencana kerja tahunan (RKPD).

Seiring dengan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan, peran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi sangat krusial. Untuk mengintegrasikan iptek secara sistematis ke dalam agenda pembangunan, setiap daerah menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu



Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID). RIPJPID merupakan dokumen kebijakan yang bersifat data-driven, berfungsi sebagai panduan spesifik untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan iptek guna mendukung pencapaian visi pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

Keterkaitan antara RPJMD dan RIPJPID bersifat sinergis dan hierarkis, bukan sekadar pelengkap, tetapi saling memperkuat.

1. RPJMD sebagai landasan strategis makro. Visi dan sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD, seperti peningkatan daya saing ekonomi, kualitas sumber daya manusia, atau optimalisasi pelayanan publik, menjadi tujuan utama yang harus dicapai oleh pemerintah daerah.
2. RIPJPID sebagai instrumen implementasi strategis mikro. RIPJPID kemudian berfungsi sebagai peta jalan teknis yang memetakan bagaimana riset, inovasi, dan iptek dapat dioperasionalkan untuk mencapai sasaran RPJMD secara lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, jika RPJMD menargetkan peningkatan produk unggulan daerah, maka RIPJPID akan mengidentifikasi jenis riset dan inovasi yang diperlukan, serta merancang ekosistem pendukungnya.
3. Integrasi perencanaan dan penganggaran. Penyusunan RIPJPID harus berlandaskan pada analisis mendalam terhadap potensi dan permasalahan daerah yang berbasis data. Hasil dari kajian ini kemudian menjadi masukan teknokratis yang vital dalam perumusan RPJMD, sehingga memastikan bahwa rencana pembangunan jangka menengah telah terintegrasi dengan pendekatan berbasis inovasi. Sebaliknya, program-program prioritas dalam RPJMD menjadi acuan bagi penyusunan program indikatif dalam RIPJPID, sehingga tercipta keselarasan antara kebijakan makro dan mikro.



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 antara lain untuk :

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan;
2. Pedoman pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan daerah;
3. Pedoman bagi *stakeholders* untuk ikut memberikan kontribusi sebesar-besarnya dalam pembangunan daerah.

1.4.2 Tujuan

Tujuan disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 antara lain :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan. Dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, dan pembangunan daerah;
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja tahunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :



BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan memuat informasi terkait latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum yang relevan, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (RPJPD, RPJMN, RTRW, KLHS, serta rencana sektoral lainnya), maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Daerah

Gambaran umum daerah menyajikan data-data dan informasi hasil capaian pembangunan daerah lima tahun terakhir. Penyajian pada bab ini memuat enam aspek antara lain aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis.

Aspek geografi dan demografi memuat terkait posisi dan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, lingkungan hidup berkualitas, dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, serta demografi. Aspek kesejahteraan memuat terkait kesejahteraan ekonomi, Kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif, beragama maslahat dan berkebudayaan maju, serta keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.

Aspek daya saing memuat terkait daya saing sumber daya manusia; iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; penerapan ekonomi hijau dan biru; transformasi digital; integrasi ekonomi domestik dan global, perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi makro. Aspek pelayanan umum memuat terkait regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif; hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi substansial; ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan; serta kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.



Gambaran keuangan daerah memuat terkait realisasi APBD tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan tahun 2026-2030. Permasalahan dan isu strategis memuat permasalahan yang bersifat dominan serta identifikasi isu strategis daerah sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, regional) yang mempengaruhi daerah secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisi tentang penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas daerah. Visi dan Misi pada dokumen RPJMD merupakan visi misi kepala daerah terpilih. Visi merupakan rumusan umum mengenai kondisi daerah yang ingin diwujudkan pada tahun 2030 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi. Visi dan misi kemudian diturunkan dalam rumusan tujuan dan sasaran daerah, serta mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah secara lebih operasional. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja (bukan cascading indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.





BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam BAB VI Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat pada Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat indikasi kerangka pendanaan yang berasal dari hasil analisis pada BAB II perihal gambaran keuangan daerah.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat terkait indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD). IKU merupakan indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang terseleksi. Sedangkan IKD merupakan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025-2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

RPJMD
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGAWI
2025-2029



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum daerah menjadi analisis yang krusial serta mendasar bagi daerah, sehingga hasil analisis dalam melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan serta mampu memberikan hasil identifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum daerah adalah basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi, demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Proses pembangunan daerah tentunya tidak lepas dengan analisa hasil aspek geografis dan aspek demografi yang merupakan hal penting dalam pembangunan suatu daerah yang digunakan dalam memastikan tujuan serta target perencanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan dalam melakukan sebuah perencanaan pembangunan perlu diketahui terlebih dahulu kondisi geografi dan kondisi demografi wilayah tersebut agar tepat sasaran dan tepat tujuan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029. Pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi geografis daerah, seperti letak strategis, topografi, iklim, dan sumber daya alam, memberikan dasar yang kuat untuk merancang kebijakan yang relevan dan efektif. Kabupaten Ngawi, dengan posisinya yang strategis sebagai penghubung antar wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai sektor berdasarkan aspek geografis daerah. Selain itu, karakteristik geografis seperti keberadaan lahan pertanian subur dan sistem irigasi yang baik juga menjadi modal utama untuk memperkuat sektor agraris sebagai pilar ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengintegrasian analisis geografis dalam dokumen



RPJMD tidak hanya mendukung perumusan program pembangunan yang berorientasi pada keunggulan wilayah, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global maupun lokal. Analisis pada aspek geografi Kabupaten Ngawi perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi Kabupaten Ngawi dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Karakteristik lokasi dan batas wilayah administrasi merupakan aspek-aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan infrastruktur masih menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Ngawi. Sebagai salah satu kawasan pertanian yang ditetapkan menjadi lumbung pangan nasional, membutuhkan penyediaan infrastruktur dalam menunjang aktifitas sehari-hari, dalam hal ini infrastruktur keciptakaryaannya seperti penyediaan air minum, air limbah, dan persampahan. Kabupaten Ngawi memiliki kekayaan sumber daya air yang potensial dalam pelayanan penyediaan air, seperti sumber mata air, waduk, serta dilalui oleh 2 sungai besar. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Pelayanan penyediaan air minum di Kabupaten Ngawi yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kertonegoro, pada Tahun 2024 pelayanan distribusi air baru mencapai 18,13%. Sedangkan untuk non-perumda pelayanan distribusi air baru mencapai 12,13%.

Penyediaan infrastruktur air limbah yang memadai adalah kunci untuk menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem air limbah yang





berkelanjutan. Terdapat 2 jenis pengolahan air limbah di Kabupaten Ngawi yaitu pengolahan air limbah setempat berupa tangki septik dan pengolahan air limbah terpusat berupa IPAL komunal serta tersedianya instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang layanannya berupa layanan lumpur tinja terjadwal. Capaian untuk penyediaan pengolahan air limbah setempat berupa tangki septik individual yang terbangun sampai dengan tahun 2024 sebanyak 5.142 unit, capaian untuk pengolahan air limbah terpusat berupa IPAL komunal terbangun sampai dengan tahun 2024 sebanyak 3.507 unit, serta capaian layanan lumpur tinja terjadwal sampai dengan tahun 2024 terlayani 582 unit.

Penyediaan infrastruktur layanan persampahan berupa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah meliputi konsep 3R (Reduce-Reuse-Recycle) sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Adapun infrastruktur layanan persampahan yang ada di Kabupaten Ngawi terdiri dari TPA sebanyak 3, TPS3R sebanyak 12, TPS sebanyak 24, dan TPST sebanyak 1. Timbulan sampah di Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 sebanyak 135.732,55 ton, sedangkan timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah sebesar 36.180,03 ton, sedangkan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah sebesar 37,26%. Oleh karena itu di bawah ini akan disajikan unsur-unsur yang termasuk dalam karakteristik lokasi dan batas wilayah administrasi.

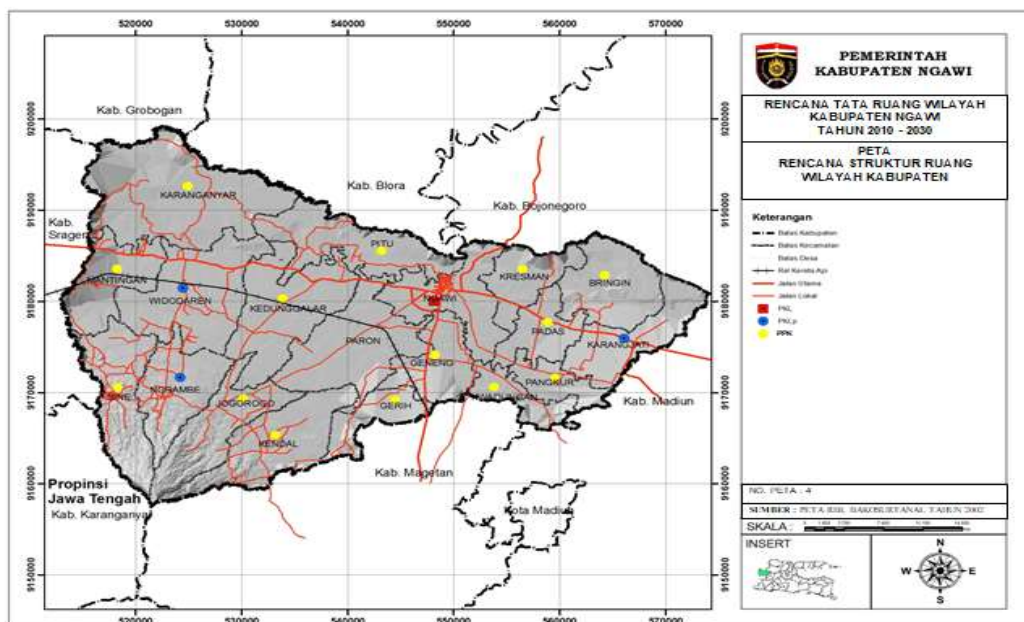
2.1.2 Luas, Letak, dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Ngawi adalah salah satu Kabupaten yang secara geografis berada di Provinsi Jawa Timur bagian barat. Kabupaten Ngawi adalah daerah penghubung dengan Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jakarta yang mempunyai aksesibilitas transportasi cukup ramai. Secara astronomis, Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan



dan $111^{\circ}07'-111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Sedangkan secara administratif Kabupaten Ngawi merupakan salah satu dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan batas administratif sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan (Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur);
2. Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah);
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun (Provinsi Jawa Timur);
4. Sebelah Timur : Kabupaten Madiun (Provinsi Jawa Timur)



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Ngawi

Sumber : RTRW Kab Ngawi Tahun 2010–2030

Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.395,80 kilometer persegi. Berdasarkan ketentuan tentang pembagian wilayah, Kabupaten Ngawi secara administratif terbagi menjadi 19 (Sembilan Belas) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 4 kelurahan dan 213 desa. Adapun rincian data kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Ngawi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :





Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan
se-Kabupaten Ngawi Tahun 2024

No	Kecamatan	Area (Km ²)	Terhadap Luas Kabupaten (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Sine	80,22	6,19	36	Gendol	15
					Girikerto	
					Hargosari	
					Jagir	
					Kauman	
					Ketanggung	
					Kuniran	
					Ngrendeng	
					Pandansari	
					Pocol	
					Sine	
					Sumbersari	
					Sumberejo	
					Tulakan	
					Wonosari	
2	Ngrambe	57,49	4,44	30	Babadan	14
					Cepoko	
					Giriharjo	
					Hargomulyo	
					Krandegan	
					Manisharjo	
					Mendiro	
					Ngrambe	
					Pucangan	
					Samberejo	
					Setono	
					Sidomulyo	
					Wakah	
					Tawangrejo	
3	Jogorogo	65,84	5,08	24	Brubuh	12
					Dawung	
					Girimulyo	
					Jaten	
					Jogorogo	
					Kletekan	
					Macanan	
					Ngrayudan	
					Soco	
					Talang	
					Tanjungsari	
					Umbulrejo	
4	Kendal	84,56	6,53	32	Dadapan	10
					Gayam	





No	Kecamatan	Area (Km ²)	Terhadap Luas Kabupaten (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan
					Karanggupito	
					Karangrejo	
					Kendal	
					Majasem	
					Patalan	
					Ploso	
					Sidorejo	
					Simo	
5	Geneng	52,52	4,05	12	Baderan	13
					Dempel	
					Geneng	
					Kasreman	
					Kenitren	
					Keras Wetan	
					Kersikan	
					Kersoharjo	
					Klampisan	
					Klitik	
					Sidorejo	
					Tambakromo	
					Tepas	
6	Gerih	34,52	2,66	20	Gerih	5
					Guyung	
					Keras Kulon	
					Randusongo	
					Widodaren	
7	Kwadungan	30,3	2,34	21	Banget	14
					Budug	
					Dinden	
					Jenangan	
					Karangsono	
					Kendung	
					Kwadungan	
					Mojomanis	
					Purwosari	
					Pojok	
					Simo	
					Sumengko	
					Tirak	
					Warukalong	
8	Pangkur	29,41	2,27	16	Babadan	9
					Gandri	
					Ngompro	
					Pangkur	
					Paras	





No	Kecamatan	Area (Km ²)	Terhadap Luas Kabupaten (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan
					Pleset	
					Pohkonyal	
					Sumber	
					Waruk Tengah	
9	Karangjati	66,67	5,14	20	Brangol	17
					Campur Asri	
					Danguk	
					Dungmiri	
					Gempol	
					Jatipuro	
					Karangjati	
					Legundi	
					Ploso Lor	
					Puhti	
					Rejomulyo	
					Rejuno	
					Ringin Anom	
					Sawo	
					Sembung	
					Sidokerto	
					Sidorejo	
10	Bringin	62,62	4,83	17	Bringin	10
					Dampit	
					Dero	
					Gandong	
					Kenongorejo	
					Krompol	
					Lego Wetan	
					Mojo	
					Sumber Bening	
					Suruh	
11	Padas	50,22	3,88	11	Banjaransari	12
					Bendo	
					Bintoyo	
					Kedung prahu	
					Kwadungan Lor	
					Munggut	
					Pacing	
					Padas	
					Sambiroto	
					Sukowiyono	
					Tambakromo	
					Tungkulrejo	
12	Kasreman	31,49	2,43	8	Cangkalan	8
					Gunungsari	





No	Kecamatan	Area (Km ²)	Terhadap Luas Kabupaten (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan
					Jatirejo	
					Karang Malang	
					Kasreman	
					Kiyonten	
					Lego Kulon	
					Tawun	
13	Ngawi	70,56	5,45		Ketanggi	16
					Pelem	
					Grudo	
					Jururejo	
					Beran	
					Margomulyo	
					Banyu Urip	
					Kandangan	
					Karang Tengah	
					Karang Tengah Prandon	
					Karangasri	
					Kartoharjo	
					Kerek	
					Mangunharjo	
					Ngawi	
					Watualang	
14	Paron	101,14	7,8	6	Babadan	14
					Dawu	
					Gelung	
					Gentong	
					Jambangan	
					Jeblogan	
					Kebon	
					Kedung Putri	
					Ngale	
					Paron	
					Semen	
					Sirigan	
					Teguhan	
					Tempuran	
15	Kedunggalan	129,65	10	12	Bangunrejo	12
					Kidul	
					Begal	
					Gemarang	
					Jati Gembol	
					Jenggrik	
					Katikan	
					Kawu	

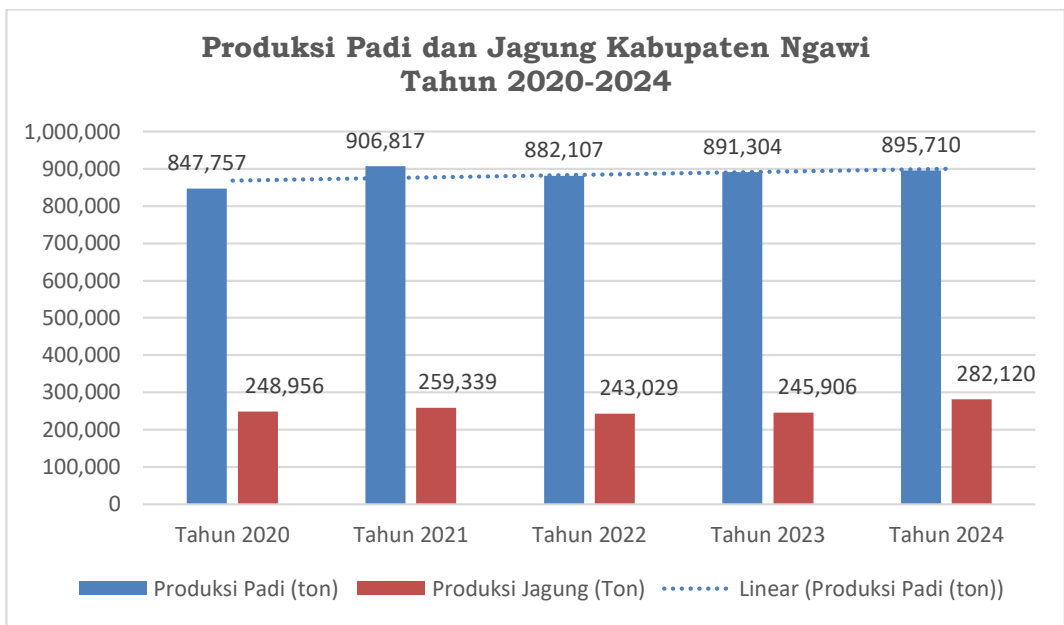




No	Kecamatan	Area (Km ²)	Terhadap Luas Kabupaten (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan
					Kedunggalar	
					Pelang Kidul	
					Pelang Lor	
					Wonokerto	
					Wonorejo	
16	Pitu	56,01	4,32	17	Bangunrejo Lor	10
					Banjarbanggi	
					Cantel	
					Dumplengan	
					Kalang	
					Karanggeneng	
					Ngancar	
					Papungan	
					Pitu	
					Selopuro	
17	Widodaren	92,26	7,12	30	Banyu Biru	12
					Gendingan	
					Karang Banyu	
					Kauman	
					Kayutreja	
					Kedunggudel	
					Sekar Alas	
					Sekar Putih	
					Sidolaju	
					Sidomakmur	
					Walikukun	
					Widodaren	
18	Mantingan	62,21	4,8	36	Jatimulyo	7
					Kedungharjo	
					Mantingan	
					Pakah	
					Pengkol	
					Sambirejo	
					Tambak Boyo	
19	Karanganya r	138,29	10,67	33	Bangunrejo	7
					Gembol	
					Karang Anyar	
					Mengger	
					Pandean	
					Sekarjati	
					Sri Wedari	
	Jumlah	12395,80	100			217

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025





**Gambar 2.2 Produksi Padi dan Jagung Kabupaten Ngawi
Tahun 2020-2024**

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Ngawi, 2025*

Berdasarkan data produksi padi dan jagung Kabupaten Ngawi tahun 2020–2024, terlihat bahwa Kabupaten Ngawi secara konsisten menunjukkan kinerja sebagai salah satu sentra produksi pangan utama di Jawa Timur, bahkan di tingkat nasional.

Produksi padi selama lima tahun terakhir tetap tinggi, dengan rata-rata mendekati 885.000 ton per tahun. Produksi tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 906.817 ton, sedangkan pada tahun 2024 tetap terjaga pada angka 895.710 ton, menandakan ketahanan produksi yang stabil meskipun di tengah dinamika iklim dan tantangan pertanian. Garis tren linier pada grafik menunjukkan kecenderungan stabil bahkan sedikit meningkat.

Sementara itu, produksi jagung juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar dengan tren cenderung meningkat dari 248.956 ton pada tahun 2020 menjadi 282.120 ton pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan pengembangan lahan jagung serta dukungan pemerintah daerah dalam mendorong diversifikasi tanaman pangan.

Kinerja ini memperkuat peran strategis Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan bagi wilayah Mataraman, Jawa Timur bagian barat, dan provinsi sekitar seperti Jawa Tengah. Ngawi tidak



hanya menyuplai kebutuhan konsumsi dalam kabupaten, tetapi juga menjadi daerah penyangga distribusi pangan regional, termasuk bagi industri pengolahan dan stok cadangan pangan nasional.

Secara geografis, posisi Ngawi yang berada pada jalur utama logistik nasional (Tol Trans Jawa dan jalur kereta api Surabaya–Solo) turut mendukung kelancaran distribusi hasil produksi pertanian ke wilayah lain. Oleh karena itu, keberlanjutan produktivitas padi dan jagung di Ngawi tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan lokal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas pangan regional dan nasional.

Dengan pencapaian ini, penguatan infrastruktur irigasi, akses pasar, dan regenerasi petani menjadi penting untuk memastikan Ngawi tetap menjadi motor penggerak sektor pangan di Jawa Timur dalam jangka panjang.

2.1.3 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Ngawi memiliki potensi sumber daya alam yang sangat mendukung dalam pembangunan ekonomi daerah, dengan sektor pertanian sebagai sektor utama yang dapat dioptimalkan. Sebagai daerah agraris, Kabupaten Ngawi sangat cocok untuk mempertahankan dan mengembangkan sektor unggulan pertanian. Potensi pertanian di Kabupaten Ngawi meliputi kawasan tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan perkebunan. Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Ngawi memiliki luas sekitar 50.715 Ha, yang menghasilkan berbagai komoditas seperti padi, jagung, dan kedelai. Kawasan hortikultura meliputi buah-buahan dan sayuran yang memiliki pasar yang luas di wilayah lokal dan regional. Sementara itu, kawasan perkebunan di Ngawi juga menyumbang hasil dari komoditas seperti teh dan tebu.

Selain sektor pertanian, Kabupaten Ngawi juga memiliki potensi di sektor perikanan, terutama dalam budidaya perikanan. Potensi kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Ngawi tersebar di beberapa kecamatan, dengan luas area sekitar 50 Ha. Komoditas utama dalam sektor perikanan budidaya adalah ikan lele, gurami,





patin, dan nila, yang banyak dikembangkan oleh masyarakat setempat. Potensi lain yang tak kalah penting adalah perikanan tangkap di daerah perairan umum darat Ngawi yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.



Tabel 2.2 Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Ngawi (Ha) Tahun 2024

Kecamatan	Bawang Merah	Cabai Besar/TW/teropong	Cabai keriting	Cabai Rawit	Kentang	Kubis	Tomat	Bawang Putih	Bawang Daun	Buncis	Kacang Panjang	Kangkung	Ketimun	Labu Siam
Sine	12	5	5	4	-	4	5	-	6	-	4	10	-	3
Ngrambe	66	153	26	28	-	13	26	-	19	15	19	29	-	-
Jogorogo	21	12	13	16	-	-	24	-	-	-	19	34	-	-
Kendal	13	12	10	13	-	-	-	-	-	-	2	15	5	-
Geneng	44	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerih	14,2	-	-	2	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-
Kwadungan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Pangkur	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Karangjati	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bringin	9	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5	3	2	-
Padas	23	-	1	6	-	-	-	-	-	-	5	12	-	-
Kasreman	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Ngawi	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paron	33	8	19	15	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Kedunggalar	7	5	8	12	-	-	6	-	-	-	6	12	12	-
Pitu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	-	-



Kecamatan	Bawang Merah	Cabai Besar/TW/teropong	Cabai keriting	Cabai Rawit	Kentang	Kubis	Tomat	Bawang Putih	Bawang Daun	Buncis	Kacang Panjang	Kangkung	Ketimun	Labu Siam
Widodaren	48	119	47	44	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Mantingan	-	6	-	5	-	-	7	-	-	-	7	12	-	-
Karanganyar	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
Kabupaten Ngawi	400,2	320	129	161	-	17	75	-	25	15	78	154	20	3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025



Luas panen tanaman sayuran di Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan berdasarkan kecamatan dan jenis tanaman. Di Kecamatan Sine, terdapat 12 Ha untuk bawang merah, 5 Ha untuk cabai besar, serta 5 ha untuk cabai rawit. Sementara itu, di Kecamatan Ngrambe, luas panen tanaman sayuran terdiri dari 66 Ha bawang merah, 153 Ha cabai besar/terpongan, dan 26 Ha cabai keriting. Kecamatan Jogorogo memiliki 21 Ha untuk bawang merah dan 13 Ha untuk cabai besar, sementara Kecamatan Kendal memiliki luas panen 13 Ha untuk bawang merah dan 12 Ha untuk cabai besar, dengan 10 Ha cabai keriting. Di kecamatan lainnya seperti Geneng, luas panen bawang merah mencapai 44 Ha, di Gerih 14 Ha, serta di Kwadungan yang memiliki 1 Ha bawang merah dan 2 Ha cabai besar. Kecamatan Pangkur mencatatkan luas panen 1 Ha untuk bawang merah dan 2 Ha cabai rawit, sedangkan Karangjati mencatatkan 64 Ha untuk cabai besar dan 9 Ha untuk cabai keriting. Kecamatan Padas memiliki luas panen cabai rawit sebanyak 5 Ha, dan Kasreman yang tercatat memiliki luas 39 Ha untuk bawang merah serta 5 Ha untuk cabai besar.

Secara keseluruhan, Kabupaten Ngawi menunjukkan distribusi yang relatif merata dalam hal luas lahan untuk tanaman sayuran, dengan Kecamatan Sine, Ngrambe, dan Jogorogo menjadi kecamatan dengan luas panen tanaman sayuran terbesar.

Tabel 2.3 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Ngawi (Ha) Tahun 2024

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Teh
Sine	-	147,22	544,57	182,00	431,50	60,80	409,76
Ngrambe	-	142,00	-	123,55	320,50	80,00	-
Jogorogo	-	-	-	180,25	315,80	154,77	-
Kendal	-	63,96	-	606,40	300,50	17,00	-
Geneng	-	-	-	-	-	74,50	-
Gerih	-	-	-	-	-	40,25	-
Kwadungan	-	9,22	-	-	-	100,50	-
Pangkur	-	4,85	-	-	-	16,00	-
Karangjati	-	2,00	-	-	-	881,00	-

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Teh
Bringin	-	-	-	-	-	55,00	-
Padas	-	-	-	-	-	15,50	-
Kasreman	-	-	-	-	-	127,00	-
Ngawi	-	-	-	-	-	292,50	-
Paron	-	68,00	-	-	-	35,20	-
Kedunggalar	-	-	-	-	-	43,00	-
Pitu	-	25,25	-	-	-	1.147,00	-
Widodaren	-	13,50	-	-	-	48,95	-
Mantingan	-	-	-	-	-	62,00	-
Karanganyar	-	-	-	-	-	778,00	-
Kabupaten Ngawi	-	476,00	544,57	1.092,20	1.350,30	4.028,97	409,76

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Berdasarkan data luas areal perkebunan tahun 2024, struktur komoditas di Kabupaten Ngawi menunjukkan dominasi mutlak dari Tebu, yang luasnya mencapai 4.028,97 Ha. Sebaran tebu ini terkonsentrasi di wilayah dataran rendah hingga menengah, dengan tiga kecamatan yang menjadi lumbung utamanya yaitu Kecamatan Pitu (1.147,00 Ha), Karangjati (881,00 Ha), dan Karanganyar (778,00 Ha). Konsentrasi geografis ini menegaskan peran vital kecamatan-kecamatan tersebut sebagai tulang punggung pasokan bahan baku bagi industri gula, serta menjadikan komoditas tebu sebagai pilar utama ekonomi perkebunan di sebagian besar wilayah Ngawi.

Berbeda dengan tebu, komoditas perkebunan bernilai tinggi lainnya menunjukkan spesialisasi geografis yang sangat kuat di kawasan dataran tinggi, khususnya di lereng Gunung Lawu. Kopi (total 1.092,20 Ha) dan Kakao (total 1.350,30 Ha) berkembang pesat di ekosistem yang sama, dengan Kecamatan Kendal menjadi sentra terbesar untuk kopi (606,40 Ha) dan Kecamatan Ngrambe sebagai pusat kakao (320,50 Ha), didukung oleh Kecamatan Jogorogo. Lebih unik lagi, Kecamatan Sine memegang monopoli untuk dua komoditas spesifik, yaitu Karet (544,57 Ha) dan Teh (409,76 Ha), yang tidak ditemukan di kecamatan lain. Pola ini membuktikan adanya klusterisasi komoditas yang sangat jelas berdasarkan kondisi topografi dan agroklimat daerah.



Peta sebaran komoditas yang presisi ini memberikan implikasi strategis yang tajam untuk perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan pengembangan dapat dirumuskan secara spesifik berbasis lokasi: intervensi untuk tebu difokuskan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi rantai pasok di Kecamatan Pitu dan sekitarnya, sementara untuk Kendal dan Sine, fokusnya adalah pada pengolahan pascapanen kopi, kakao, dan teh serta integrasinya dengan program agrowisata. Di sisi lain, komoditas Kelapa (total 476,00 Ha) tersebar lebih merata sebagai tanaman pendukung pekarangan, dan ketiadaan Kelapa Sawit menunjukkan pilihan strategis daerah untuk tidak mengembangkan komoditas tersebut, sejalan dengan potensi pengembangan pertanian ramah lingkungan.

Tabel 2.4 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Ngawi Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Sine	7.592	47.368	6.24
2	Ngrambe	5.981	37.401	6.25
3	Jogorogo	7.729	47.475	6.14
4	Kendal	5.471	33.871	6.19
5	Geneng	9.936	64.441	6.49
6	Gerih	4.741	30.502	6.43
7	Kwadungan	6.273	44.579	7.11
8	Pangkur	6.921	46.561	6.73
9	Karangjati	6.824	44.481	6.52
10	Bringin	3.597	23.390	6.50
11	Padas	7.547	51.609	6.84
12	Kasreman	3.369	21.342	6.34
13	Ngawi	8.989	56.610	6.30
14	Paron	16.122	101.360	6.29
15	Kedunggalar	13.746	87.456	6.36
16	Pitu	2.259	14.589	6.46
17	Widodaren	12.909	83.650	6.48
18	Mantingan	7.025	45.732	6.51



No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
19	Karangayar	2.013	13.294	6.61
Kabupaten Ngawi		139.044	895.711	6.44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 secara gemilang menegaskan perannya sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan total produksi padi mencapai 895.711 ton dari luas panen 139.044 Ha, Ngawi tidak hanya mencapai swasembada tetapi juga menjadi pemasok vital bagi ketahanan pangan regional. Rata-rata produktivitas yang mencapai 6,44 Ton/Ha menunjukkan tingkat kapabilitas teknis pertanian yang sudah sangat baik secara umum. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras para petani serta dukungan kebijakan yang konsisten dalam menjaga stabilitas produksi pangan utama ini.

Kekuatan produksi padi Ngawi secara absolut ditopang oleh segelintir kecamatan yang berfungsi sebagai lumbung padi utama. Lima kecamatan dengan luas panen terbesar, yaitu Paron, Kedunggalar, Widodaren, Geneng, dan Ngawi (kecamatan kota), secara kolektif menyumbang hampir separuh dari total produksi kabupaten. Kecamatan Paron sendiri menjadi yang terdepan dengan luas panen mencapai 16.122 Ha dan produksi lebih dari 100 ribu ton. Konsentrasi produksi di wilayah-wilayah ini menjadikan mereka sebagai tulang punggung utama dan area paling strategis dalam menjaga volume produksi padi di Kabupaten Ngawi.

Namun, jika dilihat dari sisi efisiensi lahan, para "juara" produktivitas justru muncul dari kecamatan-kecamatan dengan luas panen yang lebih moderat. Kecamatan Kwadungan secara fenomenal mencatatkan produktivitas tertinggi sebesar 7,11 Ton/Ha, jauh di atas rata-rata kabupaten. Prestasi serupa juga ditunjukkan oleh Kecamatan Padas (6,84 Ton/Ha), Pangkur (6,73 Ton/Ha), dan Karangayar (6,61 Ton/Ha). Kecamatan-kecamatan ini layak menjadi etalase dan pusat pembelajaran (*center of excellence*) mengenai praktik pertanian terbaik, yang kemungkinan



besar didukung oleh sistem irigasi yang optimal, penerapan teknologi, dan kelembagaan petani yang kuat.

Di sisi lain, sebagian besar kecamatan lainnya berperan sebagai penyangga yang konsisten dengan tingkat produktivitas yang berada di sekitar rata-rata kabupaten, seperti Karangjati (6,52 Ton/Ha), Mantingan (6,51 Ton/Ha), dan Bringin (6,50 Ton/Ha). Sementara itu, kecamatan-kecamatan di wilayah dataran tinggi seperti Jogorogo (6,14 Ton/Ha), Kendal (6,19 Ton/Ha), dan Sine (6,24 Ton/Ha) secara alamiah menunjukkan angka produktivitas yang sedikit lebih rendah. Hal ini dapat dipahami mengingat karakteristik topografi dan ketersediaan air untuk tanaman padi di wilayah lereng gunung memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah dataran rendah yang subur.

Analisis komprehensif ini melahirkan sebuah implikasi strategis yang sangat tajam untuk masa depan pertanian Ngawi. Peluang terbesar untuk lonjakan produksi tidak terletak pada perluasan lahan, melainkan pada program intensifikasi yang menargetkan lumbung-lumbung padi utama. Jika produktivitas di Kecamatan Paron, Kedunggalar, dan Widodaren dapat ditingkatkan mendekati level Kecamatan Kwadungan, maka potensi penambahan produksi total akan sangat masif. Oleh karena itu, kebijakan ke depan harus fokus pada transfer teknologi dan praktik terbaik dari para juara produktivitas ke lumbung padi utama, sambil terus mendorong diversifikasi komoditas di wilayah dataran tinggi. Dengan strategi ini, posisi Ngawi sebagai pilar ketahanan pangan nasional akan semakin kokoh dan tak tergantikan.

Tabel 2.5 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Ngawi (Ekor) Tahun 2024

No	Kecamatan	Sapi Perah	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	Kelinci	Kuda
1	Sine	52	4.126	-	5.178	4.764	38	1.731	1
2	Ngrambe	-	3.747	-	4.621	2.434	123	4.005	-
3	Jogorogo	33	2.935	-	3.170	3.608	-	371	-
4	Kendal	29	6.393	19	6.796	4.426	30	3.644	-
5	Geneng	-	3.694	114	6.461	2.791	567	913	-
6	Gerih	-	1.867	-	2.617	823	-	85	2



No	Kecamatan	Sapi Perah	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	Kelinci	Kuda
7	Kwadungan	-	3.270	2	2.252	1.603	-	127	2
8	Pangkur	-	2.870	-	1.341	222	-	-	-
9	Karangjati	-	4.615	-	7.528	1.292	-	90	4
10	Bringin	-	4.673	-	10.885	918	-	535	2
11	Padas	-	3.076	4	1.940	1.103	-	593	-
12	Kasreman	-	4.645	6	3.700	1.420	-	845	2
13	Ngawi	-	2.787	-	4.867	1.764	-	593	-
14	Paron	-	2.750	-	2.672	2.587	-	573	-
15	Kedungalar	-	3.118	6	2.862	2.432	-	593	-
16	Pitu	-	2.852	-	4.803	5.079	-	-	-
17	Widodaren	-	2.278	477	3.091	1.433	29	432	4
18	Mantingan	-	1.619	62	4.233	3.141	12	215	-
19	Karanganyar	-	4.754	8	4.438	90	-	294	-
Kabupaten Ngawi		118	66.069	698	83.455	41.930	799	15.244	17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Data populasi ternak Kabupaten Ngawi tahun 2024 menunjukkan sebuah lanskap peternakan yang kokoh dan terdiversifikasi, dengan pilar utama pada ternak ruminansia. Secara keseluruhan, Kambing menjadi komoditas dengan populasi terbanyak mencapai 83.455 ekor, diikuti oleh Sapi potong dengan 66.069 ekor dan Domba sebanyak 41.930 ekor. Dominasi ketiga jenis ternak ini menandakan bahwa struktur peternakan di Ngawi sangat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan daging dan mendukung tradisi masyarakat seperti kurban, sekaligus menjadi aset ekonomi dan tabungan utama bagi para peternak di pedesaan.

Fokus pada ternak besar, Sapi potong menunjukkan adanya sentra-sentra produksi yang sangat kuat di beberapa kecamatan. Kecamatan Kendal secara meyakinkan memposisikan diri sebagai lumbung sapi utama di Ngawi dengan populasi mencapai 6.393 ekor. Posisi ini didukung oleh barisan kecamatan lain yang juga menjadi produsen sapi potong signifikan, yaitu Karanganyar (4.754 ekor), Bringin (4.673 ekor), Kasreman (4.645 ekor), dan Karangjati (4.615 ekor). Konsentrasi di wilayah-wilayah ini menandakan



adanya kesesuaian ekologis dan budaya beternak sapi yang sudah mengakar kuat.

Untuk kategori ruminansia kecil, sebarannya juga menunjukkan adanya spesialisasi wilayah yang jelas. Populasi Kambing yang menjadi ternak paling banyak, tersebar luas dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Karangjati (7.528 ekor) dan Kendal (6.796 ekor). Sementara itu, Kecamatan Pitu tampil sebagai pusat utama pengembangan ternak Domba dengan populasi terbesar mencapai 5.079 ekor. Keunggulan Pitu ini diikuti oleh kecamatan-kecamatan di wilayah dataran tinggi seperti Sine (4.764 ekor) dan Kendal (4.426 ekor), yang menunjukkan bahwa domba menjadi pilihan utama di beberapa klaster wilayah tertentu.

Analisis lebih lanjut mengungkap adanya ceruk-ceruk peternakan spesialis yang sangat unik dan terkonsentrasi. Populasi Sapi Perah yang sangat sedikit (118 ekor) secara eksklusif berada di dataran tinggi yang sejuk, yaitu Sine dan Ngrambe. Sebaliknya, ternak Kerbau (total 698 ekor) yang erat dengan aktivitas persawahan, terkonsentrasi di lumbung padi seperti Widodaren (477 ekor) dan Geneng (114 ekor). Lebih spesifik lagi, Kecamatan Geneng menjadi pusat utama ternak Babi dengan 567 ekor dari total 799 ekor di Ngawi. Sementara itu, budidaya Kelinci juga menunjukkan potensi besar dengan pusatnya berada di Ngrambe (4.005 ekor) dan Kendal (3.644 ekor).

Peta sebaran ini memberikan implikasi strategis bahwa kebijakan pengembangan peternakan di Kabupaten Ngawi harus dirancang secara spesifik berbasis lokasi (*location-specific*) dan komoditas. Upaya peningkatan populasi sapi potong dapat difokuskan di Kendal dan sekitarnya, sementara Karangjati dan Pitu dapat dikembangkan sebagai "kampung kambing" dan "kampung domba". Potensi agrowisata berbasis peternakan sapi perah sangat relevan untuk Sine, dan integrasi sistem ternak-tanaman (padi-kerbau) cocok untuk Widodaren. Dengan pendekatan berbasis klaster ini, pengembangan sektor peternakan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak secara lebih merata di seluruh wilayah.



**Tabel 2.6 Luas Area Tanaman Hutan Rakyat
di Kabupaten Ngawi**

No	Tahun	Luas Area Tanaman Hutan Rakyat
1	2020	15.402,93
2	2021	12.484,10
3	2022	15.402,93
4	2023	14.824,79
5	2024	14.700,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Luas area tanaman hutan rakyat di Kabupaten Ngawi mengalami variasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat luas area mencapai 15.402,93 Ha, yang menunjukkan upaya yang cukup signifikan dalam pengelolaan dan pengembangan hutan rakyat pada saat itu. Namun, pada tahun berikutnya, yaitu 2021, luas area mengalami penurunan menjadi 12.484,10 Ha, yang dapat mencerminkan adanya faktor-faktor seperti perubahan kebijakan, kendala dalam pengelolaan, atau bahkan perubahan alam yang mempengaruhi keberlanjutan program tanaman hutan rakyat.

Pada tahun 2022, luas area kembali meningkat dan mencapai angka yang setara dengan tahun 2020, yaitu 15.402,93 Ha. Peningkatan ini mungkin mencerminkan upaya perbaikan dan penguatan kembali sektor ini, serta adanya kebijakan yang lebih baik dalam mendukung pengembangan hutan rakyat. Selanjutnya, pada tahun 2023, tercatat sedikit penurunan menjadi 14.824,79 Ha, meskipun masih berada dalam rentang yang relatif stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Memasuki tahun 2024, luas area tanaman hutan rakyat di Kabupaten Ngawi sedikit menurun menjadi 14.700,00 Ha, yang masih cukup signifikan sebagai angka pencapaian meskipun terdapat penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi dalam angka luas area, sektor hutan rakyat tetap menjadi komponen penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Ngawi. Dengan perhatian yang lebih besar terhadap konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan, diharapkan angka



ini akan terus berkembang dengan cara yang lebih produktif di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, diketahui bahwa Kabupaten Ngawi memiliki luas kawasan hutan yang cukup signifikan. Total luas kawasan hutan di Ngawi mencakup dua kategori utama, yaitu :

- a) Hutan Produksi seluas 42.497 Hae, dan
- b) Hutan Lindung seluas 3.104 Hae.

Keberadaan kawasan hutan ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, mendukung sistem tata air, serta menjadi bagian dari ekosistem penyangga bagi berbagai sektor pembangunan, termasuk pertanian, pariwisata alam, dan mitigasi bencana. Dengan potensi tersebut, pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ngawi ke depan.

2.1.3.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Kabupaten Ngawi, dengan karakteristik wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar, menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya tersebut tetap berada dalam koridor keberlanjutan. Pemahaman terhadap daya dukung dan daya tampung menjadi landasan untuk mengukur sejauh mana lingkungan dapat menahan tekanan akibat aktivitas manusia, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.

Dalam konteks pembangunan daerah, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi indikator penting untuk menilai apakah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kapasitas alam yang ada. Jika kapasitas lingkungan terlampaui, maka potensi degradasi lingkungan, kerusakan

ekosistem, dan penurunan kualitas hidup masyarakat akan semakin besar. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di Kabupaten Ngawi perlu memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan ruang, ketersediaan sumber daya air, udara, tanah, serta keanekaragaman hayati.

Lebih jauh, penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Ngawi memerlukan langkah strategis, mulai dari pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, hingga pengelolaan ruang terbuka hijau. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan, karena keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup harus menjadi pijakan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi

No	Daya Dukung	Kondisi	Data Pendukung
1	Pangan (Beras)	Kabupaten Ngawi mampu melakukan swasembada pangan yang ditunjukkan dari nilai daya dukung lahan pertanian >1 pada tahun 2023 sampai dengan 2045, namun mengalami penurunan karena pertambahan jumlah penduduk dengan skenario luas panen dan produktivitas lahan tetap.	Daya Dukung Lahan Pertanian : - Luas panen 2023 : 138.402 ha - Proyeksi luas panen 2030 : 138.402 ha - Proyeksi luas panen 2045 : 138.402 hs - Ketersediaan Lahan Pertanian 2023 : 0,16 ha - Proyeksi ketersediaan lahan pertanian 2030 : 0,15 ha - Proyeksi ketersediaan lahan pertanian 2045 : 0,14 ha - DDL Pertanian 2023 : 2,09 (Surplus) - Proyeksi DDL Pertanian 2030 : 2,02 (Surplus) - Proyeksi DDL Pertanian 2045 : 1,90 (Surplus)

No	Daya Dukung	Kondisi	Data Pendukung
2	Fungsi Lindung	Secara keseluruhan daya dukung lingkungan untuk fungsi lindung di Kabupaten Ngawi termasuk dalam kategori sedang (0,48) sehingga dapat diartikan sebagai kemampuan kawasan dengan berbagai penggunaan lahan di dalamnya kurang mampu memberikan perlindungan dan menjaga keseimbangan ekosistem dan lebih cenderung menjadi kawasan budidaya.	Perhitungan Proyeksi Daya Tampung Wilayah Tahun 2030-2045 Luas lahan : 138.966,03 ha 2. Proyeksi jumlah penduduk : - 2030 : 908.318 - 2035 : 927.621 - 2040 : 946.925 - 2045 : 966.228 3. Proyeksi Daya tampung wilayah : - 2030 : 0,1530 - 2035 : 0,1498 - 2040 : 0,1468 - 2045 : 0,1438
3	Air	Daya dukung air Kabupaten Ngawi berstatus surplus pada tahun 2023 dengan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air berdasarkan sistem grid berdasarkan analisis DDDTLH yaitu 470430311 m3/tahun, sedangkan tahun 2030 dan 2045 mengalami defisit berdasarkan hasil proyeksi. Faktor yang meningkatkan kebutuhan air pada tahun 2030 dan 2045 adalah kenaikan jumlah penduduk, luas lahan pertanian, dan luas lahan industri.	Kebutuhan Air Kabupaten Ngawi Tahun 2023 : - Domestik : 105.755.124,1 L/Hari - Non Domestik : 31.726.537,23 L/Hari Peruntukan Lahan Pertanian : 9.712,78598 L/Hari Peruntukan Industri dan Komersil : 60,5599975 L/Hari Kebutuhan Air 2030 : Jumlah Penduduk : 39.784.311,16 Meter Kubik per Tahun - Peruntukan Pertanian : 1.599.222,096 Meter Kubik per Tahun - Peruntukan Industri : 41.072.486,4 Meter Kubik per Tahun Kebutuhan Air 2045 : - Jumlah Penduduk : 42.320.791,59 Meter Kubik per Tahun - Peruntukan Pertanian : 1.599.222,096 Meter Kubik per Tahun - Peruntukan Industri : 41.072.486,4 Meter Kubik per Tahun
4	Daya Dukung Lahan Permukiman	Daya dukung lahan untuk bangunan (DDLb) Kabupaten Ngawi bernilai 2,86 pada tahun 2023 yang termasuk dalam kategori sedang dan 4,25 pada tahun 2030 yang termasuk dalam kategori baik. Peningkatan tersebut disebabkan oleh faktor kenaikan luas kawasan untuk permukiman yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030.	- DDL Bangunan 2023 : 2,86 - proyeksi DDL Bangunan 2030 : 4,25

No	Daya Dukung	Kondisi	Data Pendukung
5	Daya Tampung Wilayah	Berdasarkan standar kriteria Yeates, daya tampung wilayah Kabupaten Ngawi sudah tidak mampu menampung jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yaitu pada tahun 2045.	Perhitungan Proyeksi Daya Tampung Wilayah Tahun 2030-2045 1. Luas lahan : 138.966,03 ha 2. Proyeksi jumlah penduduk: - 2030 : 908.318 - 2035 : 927.621 - 2040 : 946.925 - 2045 : 966.228 3. Proyeksi Daya tampung wilayah - 2030 : 0,1530 - 2035 : 0,1498 - 2040 : 0,1468 - 2045 : 0,1438

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi, 2024

Kabupaten Ngawi menunjukkan potensi yang cukup besar dalam hal daya dukung lingkungan hidup yang dapat menunjang keberlanjutan pembangunan daerah. Berdasarkan data yang ada, berbagai indikator menunjukkan kondisi daya dukung yang terus berkembang, meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Kabupaten Ngawi mampu melakukan swasembada pangan yang ditunjukkan dari nilai daya dukung lahan pertanian yang diprediksi dapat terus meningkat hingga tahun 2045. Dalam rangka menjaga keberlanjutan produksi pangan dan memperkuat posisi strategis Kabupaten Ngawi sebagai lumbung padi nasional, Pemerintah Daerah menunjukkan komitmen penuh terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Komitmen ini diwujudkan melalui kebijakan tegas untuk mengendalikan alih fungsi lahan, di mana luasan lahan pertanian produktif yang telah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi secara hukum dan **tidak dapat dialih fungsikan** untuk kepentingan non-pertanian. Langkah proteksi ini merupakan jaminan investasi jangka panjang bagi infrastruktur pertanian, menjaga skala ekonomi usaha tani, serta menjadi fondasi utama dalam menjamin ketersediaan pangan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Fungsi lindung di Kabupaten Ngawi, yang mencakup berbagai jenis kawasan lindung seperti hutan lindung dan kawasan



konservasi, masih dalam kondisi yang baik. Meskipun demikian, luas kawasan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan ekosistem di Kabupaten Ngawi menghadapi tantangan akibat alih fungsi lahan. Seiring dengan upaya pelestarian lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kawasan lindung menjadi bagian yang penting untuk dipertahankan guna menjaga keberagaman hayati dan kualitas lingkungan yang lebih baik.

Sumber daya air di Kabupaten Ngawi menunjukkan surplus pada tahun 2023, yang mencerminkan kondisi yang mendukung untuk keberlanjutan kebutuhan air masyarakat. Meskipun begitu, kebutuhan air yang terus meningkat berdasarkan proyeksi jumlah penduduk menunjukkan adanya risiko kelangkaan air di masa mendatang. Proyeksi ini perlu diimbangi dengan pengelolaan air yang lebih efisien dan upaya pelestarian sumber daya air agar tetap tersedia untuk kebutuhan masyarakat di masa depan.

Daya Dukung Lahan Permukiman dengan luas lahan yang tersedia untuk permukiman di Kabupaten Ngawi sebesar 2,86 juta Ha pada tahun 2023, daerah ini masih memiliki ruang untuk pembangunan yang dapat mendukung pertumbuhan jumlah penduduk. Namun, dengan adanya tekanan terhadap lahan yang semakin tinggi dan meningkatnya alih fungsi lahan, penting bagi Kabupaten Ngawi untuk merencanakan penggunaan lahan secara berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ada. Pengelolaan lahan permukiman harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan akan ruang hidup dengan kelestarian lingkungan. Daya Tampung Wilayah berdasarkan kriteria daya tampung wilayah, Kabupaten Ngawi telah menunjukkan bahwa kapasitasnya untuk menampung jumlah penduduk yang terus berkembang cukup memadai hingga tahun 2045. Namun, seiring dengan proyeksi peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, akan diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang lebih matang untuk mengoptimalkan daya tampung wilayah, baik dalam hal infrastruktur, sumber daya alam, maupun aspek sosial dan ekonomi.



Secara keseluruhan, Kabupaten Ngawi memiliki daya dukung yang cukup besar dalam bidang pangan, air, dan lahan permukiman, meskipun tantangan terhadap fungsi lindung dan daya tampung wilayah perlu diperhatikan secara seksama. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan Kabupaten Ngawi dapat mempertahankan daya dukung lingkungan hidup yang mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat di masa mendatang.

2.1.3.1 Berketahanan Energi, Air, dan Ketahanan Pangan

Ketahanan energi, air, dan pangan merupakan pondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Kabupaten Ngawi perlu memperkuat pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan air yang efisien, serta sistem pangan yang tangguh dan berbasis lokal. Upaya ini penting untuk menghadapi tekanan perubahan iklim, menjaga ketersediaan sumber daya alam, dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 2.8 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Golongan Tarif di Kabupaten Ngawi Tahun 2023

Golongan Tarif	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Golongan tarif di Kabupaten Ngawi 2023												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahunan
Rumah Tangga	182.619	182.735	183.045	183.751	183.751	184.342	184.735	185.525	186.332	186.332	186.547	186.840	
Industri	12.016	12.099	12.159	12.413	12.531	12.616	13.412	13.904	13.904	14.287	14.795	15.154	
Sosial PJU	8.843	8.861	8.894	8.936	8.936	9.023	9.043	9.175	9.175	9.255	9.294	9.862	
Usaha & Hotel	21.321	21.378	21.436	21.506	21.234	21.233	21.354	21.448	21.548	21.652	21.801	21.912	
Gedung/Kantor	541	551	552	552	556	558	570	570	571	577	579	577	
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	225.340	225.624	225.922	226.452	227.056	227.772	228.430	229.261	230.723	232.103	233.016	234.345	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2024
 Catatan: Data tahun 2024 belum rilis secara lengkap masih terbatas pada PLN ULP Mantingan





Pada tahun 2023, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Ngawi menunjukkan angka yang signifikan dengan rincian berdasarkan golongan tarif yang terbagi dalam beberapa kategori utama. Secara keseluruhan, jumlah pelanggan listrik untuk seluruh golongan tarif di Kabupaten Ngawi mengalami fluktuasi bulanan, dengan total jumlah pelanggan pada akhir tahun 2023 mencapai 234.345 pelanggan.

Golongan tarif rumah tangga mencatatkan jumlah pelanggan yang paling besar sepanjang tahun 2023. Pada bulan Januari, tercatat ada 182.619 pelanggan rumah tangga, dan angka ini terus meningkat hingga bulan Desember, mencapai 186.840 pelanggan. Secara umum, golongan rumah tangga menjadi kontributor utama terhadap jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Ngawi, dengan angka yang terus stabil dan menunjukkan sedikit peningkatan setiap bulannya. Golongan tarif industri mengalami fluktuasi yang relatif kecil dengan angka pelanggan mulai dari 12.016 pelanggan pada bulan Januari, dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 15.154 pelanggan pada bulan Desember. Pada bulan-bulan tertentu, seperti Juni dan Oktober, golongan industri mencatatkan angka yang sedikit lebih tinggi, mencerminkan adanya peningkatan aktivitas industri di Kabupaten Ngawi.

Untuk golongan tarif sosial PJU (Penerangan Jalan Umum), jumlah pelanggan juga tercatat cukup signifikan, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga dan industri. Di awal tahun 2023, tercatat ada 8.843 pelanggan, yang terus meningkat hingga mencapai 9.862 pelanggan pada bulan Desember. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerangan jalan umum untuk mendukung fasilitas infrastruktur di Kabupaten Ngawi.

Golongan tarif usaha dan hotel mencatatkan angka yang lebih stabil dengan sedikit fluktuasi sepanjang tahun. Di bulan Januari, tercatat 21.231 pelanggan, dan angka tersebut meningkat sedikit menjadi 21.912 pelanggan di bulan Desember, mencerminkan kebutuhan listrik yang stabil di sektor usaha dan hotel di Kabupaten Ngawi. Golongan tarif gedung/kantor mengalami



kenaikan yang relatif konsisten. Pada bulan Januari tercatat 541 pelanggan, dan terus meningkat hingga bulan Desember dengan total pelanggan mencapai 577. Ini menunjukkan adanya peningkatan penggunaan listrik di sektor perkantoran di Kabupaten Ngawi.

Secara keseluruhan, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Ngawi menunjukkan kecenderungan untuk meningkat, mencerminkan pertumbuhan sektor rumah tangga, industri, serta pelayanan publik yang semakin berkembang. Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu terus mengelola dan memperluas kapasitas pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, sekaligus memastikan bahwa distribusi listrik berjalan lancar di seluruh golongan tarif yang ada.

Tabel 2.9 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2023	2024
Tenaga Kerja/ Pegawai Workers	Orang	19	18	8
Daya Terpasang Installed Electricity Power	KVA	402.999	437.584	102.772
Produksi Listrik Electricity Production	KWh	348.891.830	416.896.584	-
Listrik Terjual Electricity Sold	KWh	82.178.512. 503	110.708.653. 029	115.473.560. 322
Listrik Dipakai Sendiri Electricity Own Usage	KWh	-	4.485.265	-
Susut/Hilang Shrinkage/Lo st	Kwh	-	*40.519.542	-
Nilai Penjualan Value of Sold	Juta Rp.	356.002	469.550	105.876

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2023	2024
Biaya Produksi Input Costs	Juta Rp	-	-	-
Rata Rata Tarip per Kwh Average of Fare	Rupiah	1.834	916	-
Jumlah Pelanggan Customer	Pelanggan	304.285	315.707	85.256
Jam Nyala Rata-Rata Average of Switch-on	Jam/Bulan	96,00	104,00	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Tabel 2.10 Jumlah Sambungan Rumah Penerima Bantuan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Ngawi Tahun 2024

Nama Kegiatan Name of activity	Lokasi Location	Sambungan Rumah Home Connection
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (Pamsimas APBN)	Desa Keras Kulon, Kec. Gerih	78
	Desa Krompol, Kec. Bringin	45
	Desa Bringin, Kec. Bringin	108
	Desa Gendol, Kec. Sine	60
	Desa Budug, Kec. Kwandungan	76
	Desa Sumber, Kec. Pangkur	73
	Desa Sambiroto, Kec. Padas	64
	Desa Sukowiyono, Kec. Padas	164
	Desa Sumber Bening, Kec. Bringin	118
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Jeblogan, Kec. Paron	64
	Desa Pandean, Kec. Karanganyar	114
	Desa Tambakboyo, Kec. Mantingan	64
	Desa Tawun, Kec. Kasreman	89
	Desa Kiyonten, Kec. Kasreman	126
	Desa Pitu, Kec. Pitu	158
	Desa Jati Gembol, Kec. Kedunggalar	105
	Desa Tirak, Kec. Kwandungan	105



Nama Kegiatan <i>Name of activity</i>	Lokasi <i>Location</i>	Sambungan Rumah <i>Home Connection</i>
	Desa Bintoyo, Kec. Padas	105
	Desa Gandri, Kec. Pangkur	105
	Desa Kersoharjo, Kec. Geneng	105
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Wonorejo, Kec. Kedunggalar	105
	Desa Rejuno, Kec. Karangjati	105
	Desa Karanggupito, Kec. Kendal	105
	Desa Ploso Lor, Kec. Karangjati	105
	Desa Padas, Kec. Padas	100
	Desa Jenggrik, Kec, Kedunggalar	59
	Desa Banjarbanggi, Kec. Pitu	50
	Desa Bangunrejo Lor, Kec. Pitu	62
Kabupaten Ngawi		1.538

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

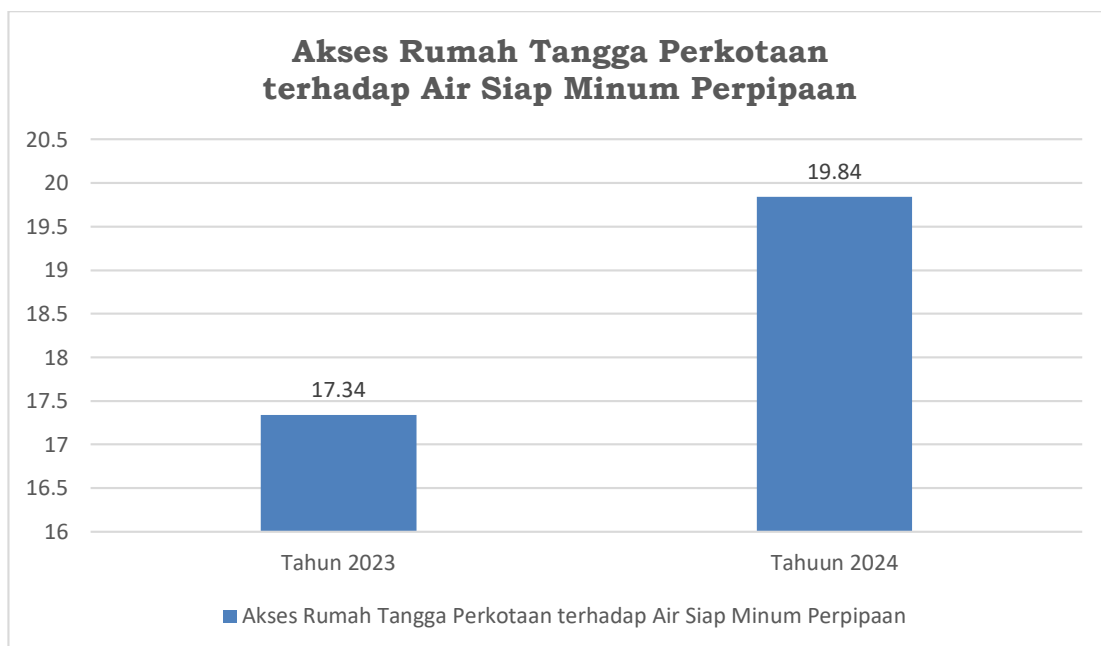
Data pada Tabel 2.10 menunjukkan jumlah sambungan rumah penerima bantuan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Ngawi tahun 2024. Dari tabel terlihat bahwa pembangunan SPAM di beberapa desa telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya di kawasan pedesaan yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses air minum layak. Misalnya, di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, tercatat 108 sambungan rumah baru yang menjadi penerima bantuan, sementara di Desa Keras Kulon, Kecamatan Gerih, terdapat 78 sambungan rumah.

Lebih lanjut, peningkatan jaringan perpipaan SPAM di berbagai desa menunjukkan cakupan yang cukup luas, dengan jumlah sambungan yang bervariasi mulai dari 59 sambungan di Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, hingga 164 sambungan di Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas. Secara keseluruhan, program ini berhasil menyalurkan sambungan rumah ke lebih dari 1.500 rumah tangga di berbagai desa, yang tersebar di Kecamatan Padas, Kedunggalar, Geneng, Pangkur, hingga Kendal. Angka ini mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam memperluas



layanan air minum aman melalui pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan.

Dengan total 1.538 sambungan rumah yang berhasil dibangun pada tahun 2024, Kabupaten Ngawi menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan akses air bersih. Keberadaan SPAM tidak hanya berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang air bersih dan sanitasi. Ke depan, keberlanjutan program ini akan sangat penting untuk memastikan seluruh masyarakat, khususnya di desa-desa terpencil, dapat menikmati akses air minum yang layak dan berkesinambungan.



Gambar 2.3 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Daerah Kabupaten Ngawi

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ngawi, 2025

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Ngawi menunjukkan capaian yang masih rendah. Pada tahun 2023 tercatat sebesar 17,34 persen, sementara pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 16,34 persen. Tidak tersedianya data pada tahun 2021 dan 2022 semakin menunjukkan bahwa pemantauan terhadap indikator ini masih



perlu diperkuat agar tren capaian lebih jelas terbaca dari waktu ke waktu.

Capaian yang terbatas ini salah satunya dipengaruhi oleh masih adanya desa yang memerlukan akses air bersih, khususnya air minum. Kondisi tersebut menjadi faktor pendorong agar pemerintah daerah terus meningkatkan pelayanan air siap minum perpipaan, baik melalui pembangunan infrastruktur baru maupun perluasan jaringan yang sudah ada. Upaya peningkatan akses ini menjadi penting, mengingat air minum yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Di sisi lain, terdapat faktor penghambat berupa biaya yang harus ditanggung masyarakat untuk memperoleh akses air siap minum perpipaan. Beban biaya ini menjadi kendala terutama bagi kelompok rumah tangga dengan kemampuan ekonomi terbatas, sehingga tidak semua rumah tangga dapat menikmati layanan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang tidak hanya memperluas cakupan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan aspek keterjangkauan biaya agar akses air siap minum dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.

Tabel 2.11 Produksi Padi Setara Beras Menurut Kecamatan di Kabupaten Ngawi (Ton) Tahun 2024

Kecamatan	Produksi Padi X (Ton GKG)	Produksi Padi Setara Beras (Ton)
Sine	47.368	26.157
Ngrambe	37.401	21.315
Jogorogo	47.475	26.121
Kendal	33.871	18.995
Geneng	64.441	36.441
Gerih	30.502	17.365
Kwadungan	44.579	25.156
Pangkur	46.561	26.503
Karangjati	44.481	25.341
Bringin	23.390	13.089
Padas	51.609	29.319
Kasreman	21.342	11.854
Ngawi	56.610	31.469
Paron	101.360	56.589
Kedunggalar	87.456	49.378
Pitu	14.589	8.056
Widodaren	83.650	46.467
Mantingan	45.732	25.852
Karangayar	13.294	7.361



Kecamatan	Produksi Padi X (Ton GKG)	Produksi Padi Setara Beras (Ton)
Kabupaten Ngawi	895.711	502.828

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Data produksi padi setara beras tahun 2024 secara gamblang menunjukkan kontribusi nyata Kabupaten Ngawi sebagai salah satu pilar utama ketahanan pangan nasional. Dengan total produksi gabah kering giling (GKG) sebesar 895.711 ton, Kabupaten Ngawi mampu menghasilkan 502.828 ton beras yang siap untuk dikonsumsi. Angka ini merepresentasikan hasil akhir dari seluruh rantai produksi pertanian yang tidak hanya mencukupi kebutuhan lokal, tetapi juga menghasilkan surplus yang signifikan untuk didistribusikan ke daerah lain, menegaskan status Ngawi sebagai lumbung pangan yang produktif dan andal.

Kekuatan produksi beras ini secara dominan disokong oleh kecamatan-kecamatan yang memiliki hamparan sawah terluas. Lima kecamatan yang menjadi "dapur utama" penghasil beras di Ngawi adalah Paron yang memimpin dengan kontribusi 56.589 ton beras, diikuti oleh Kedunggalar (49.378 ton), Widodaren (46.467 ton), Geneng (36.441 ton), dan Ngawi (31.469 ton). Gabungan dari kelima kecamatan ini saja sudah menyumbang hampir separuh dari total produksi beras di seluruh kabupaten, menandakan peran mereka yang sangat vital dalam rantai pasok pangan.

Meskipun tidak termasuk dalam produsen volume terbesar, beberapa kecamatan lain menunjukkan kontribusi beras yang sangat efisien berkat tingkat produktivitas lahan yang tinggi. Kecamatan seperti Padas, misalnya, mampu menghasilkan 29.319 ton beras dari lahan yang lebih terbatas, menunjukkan praktik pertanian yang sangat efektif. Begitu pula dengan Kwadungan (25.156 ton) dan Pangkur (26.503 ton), yang menjadi contoh nyata bahwa efisiensi dan intensifikasi lahan dapat memberikan sumbangan beras yang signifikan bagi kabupaten.

Seluruh kecamatan lain turut berperan sebagai penyangga yang konsisten dalam menjaga stabilitas pasokan beras. Wilayah seperti Karangjati (25.341 ton) dan Mantingan (25.852 ton)



memberikan kontribusi yang solid. Sementara itu, kecamatan di dataran tinggi seperti Sine (26.157 ton), Jogorogo (26.121 ton), dan Kendal (18.995 ton) juga memberikan sumbangan beras yang sangat berarti, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan di wilayah mereka masing-masing yang memiliki karakteristik agronomis berbeda.

Analisis ini memberikan pemahaman strategis bahwa untuk meningkatkan surplus beras di masa depan, fokus tidak hanya pada peningkatan produksi gabah, tetapi juga pada optimalisasi pascapanen. Kebijakan dapat diarahkan pada dua hal: pertama, menjaga stabilitas produksi di lumbung beras utama seperti Paron dan Kedunggalar; dan kedua, meningkatkan angka rendemen giling (konversi dari gabah ke beras) melalui modernisasi fasilitas penggilingan di seluruh wilayah. Dengan memahami peta kontribusi beras per kecamatan ini, intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi dapat dilakukan secara lebih presisi dan tepat sasaran.

Tabel 2.12 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Ngawi Tahun 2024

Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sine	1.197	9.368	7,83
Ngrambe	1.506	10.697	7,10
Jogorogo	1.372	10.030	7,31
Kendal	4.504	35.121	7,80
Geneng	6	43	7,17
Gerih	434	3.238	7,46
Kwadungan	11	79	7,18
Pangkur	44	307	6,98
Karangjati	1.382	10.870	7,87
Bringin	3.110	25.796	8,29
Padas	268	1.977	7,38
Kasreman	1.941	14.198	7,31
Ngawi	1.031	7.693	7,46
Paron	365	2.764	7,57
Kedunggalar	5.285	40.757	7,71
Pitu	2.180	15.591	7,15
Widodaren	2.780	22.211	7,99
Mantingan	2.942	22.623	7,69
Karangayar	6.242	48.757	7,81
Kabupaten Ngawi	36.600	282.120	7,71

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Pada tahun 2024, sektor pertanian di Kabupaten Ngawi, khususnya tanaman jagung, menunjukkan hasil yang signifikan dalam hal luas panen, produksi, dan produktivitas per Hanya. Total luas panen jagung di seluruh Kabupaten Ngawi mencapai 36.600 Ha, dengan total produksi mencapai 282.120 ton. Produktivitas jagung per Ha di Kabupaten Ngawi tercatat sebesar 7,71 ton per Ha, mencerminkan efisiensi yang relatif baik dalam pengelolaan lahan pertanian.

Secara lebih rinci, beberapa kecamatan di Kabupaten Ngawi menunjukkan kontribusi yang cukup besar terhadap angka total tersebut. Kecamatan Sine mencatatkan luas panen sebesar 1.197 Ha, dengan hasil produksi mencapai 8.83 ton per Ha, menjadikannya salah satu penghasil jagung yang cukup signifikan. Kecamatan Ngrambe dengan luas panen 1.506 Ha menghasilkan produksi jagung mencapai 10.697 ton, dengan produktivitas 7,08 ton per Ha, juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total produksi jagung di daerah tersebut.

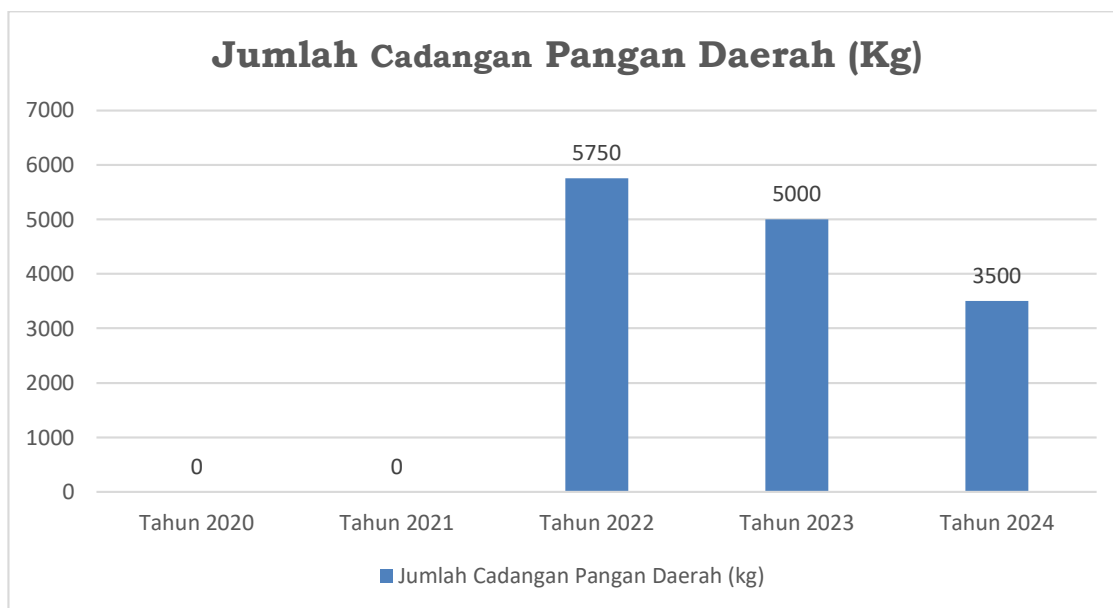
Kecamatan Jogorogo dengan luas panen 1.372 Ha berhasil menghasilkan 10.030 ton jagung, dengan produktivitas yang sedikit lebih rendah yaitu 7,31 ton per Ha. Di sisi lain, Kecamatan Kendal mencatatkan produktivitas yang cukup tinggi dengan hasil 7,17 ton per Ha dari luas panen 1.374 Ha, menghasilkan 9.835 ton jagung.

Selain itu, Kecamatan Gerih dengan luas panen 434 Ha menghasilkan 3.228 ton jagung dengan produktivitas mencapai 7,46 ton per Ha, sementara Kecamatan Kwadungan memiliki produktivitas jagung yang lebih tinggi dengan 7,68 ton per Ha, meski luas panennya hanya mencapai 44 Ha. Kecamatan Karangjati dengan luas panen 1.382 Ha menghasilkan 10.870 ton jagung, dengan produktivitas 7,87 ton per Ha, sementara Bringin yang memiliki luas panen 1.618 Ha berhasil menghasilkan 25,76 ton per Ha, meskipun sedikit lebih rendah produktivitasnya.

Secara keseluruhan, kecamatan-kecamatan di Kabupaten Ngawi menunjukkan keberagaman dalam hasil panen dan produktivitas jagung, dengan beberapa kecamatan berkontribusi lebih besar pada total produksi. Pemerintah daerah perlu terus



mendukung program peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian jagung, seperti melalui penyuluhan kepada petani dan penyediaan fasilitas pertanian yang lebih baik, untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan sektor pertanian di masa depan.



Gambar 2.4 Jumlah Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Ngawi
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Data pada grafik menunjukkan dinamika jumlah cadangan pangan daerah Kabupaten Ngawi pada periode 2020–2024. Pada tahun 2020 dan 2021, cadangan pangan daerah tercatat nihil, yang mengindikasikan bahwa upaya penyediaan cadangan pangan belum optimal atau belum terfokus dalam kebijakan daerah. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap risiko kerawanan pangan apabila terjadi kondisi darurat, seperti bencana alam atau gangguan distribusi pangan.

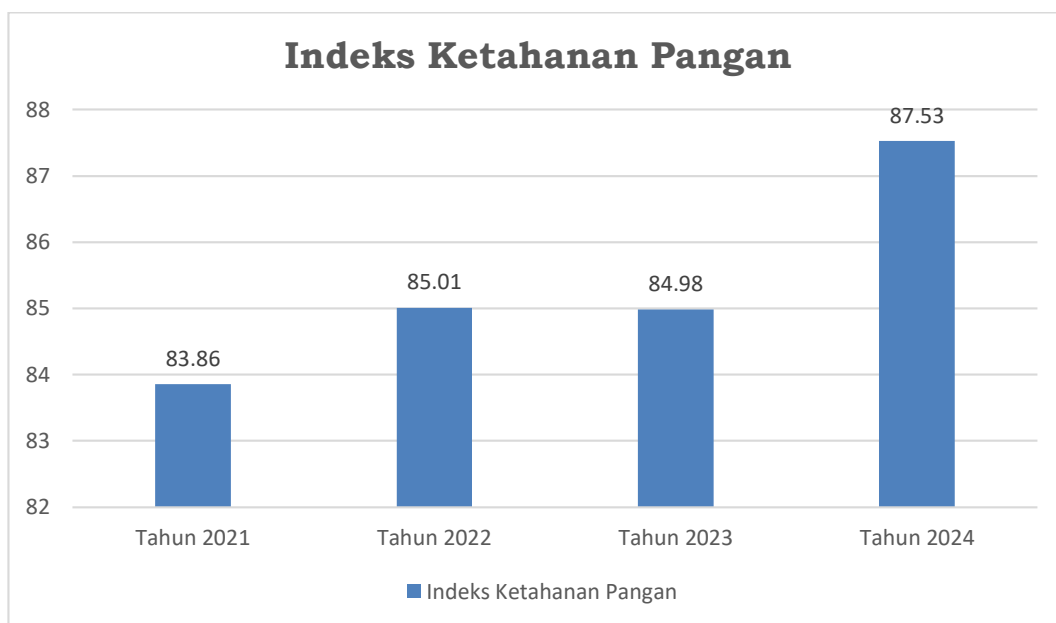
Mulai tahun 2022 terlihat adanya lonjakan signifikan dengan ketersediaan cadangan pangan mencapai 5.750 kg. Hal ini menandakan adanya kebijakan strategis dari pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan jaminan ketersediaan pangan masyarakat. Meskipun demikian, pada tahun-tahun berikutnya jumlah cadangan pangan justru mengalami tren penurunan, yakni 5.000 kg pada tahun 2023 dan turun lagi menjadi 3.500 kg pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya



keterbatasan alokasi anggaran, kapasitas penyimpanan, maupun tantangan dalam manajemen distribusi pangan.

Fenomena penurunan jumlah cadangan pangan tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah. Keberadaan cadangan pangan memiliki fungsi vital sebagai instrumen stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan. Oleh karena itu, diperlukan langkah penguatan kelembagaan pangan daerah, optimalisasi pemanfaatan lahan produktif, serta dukungan anggaran yang memadai untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan cadangan pangan. Dengan demikian, Kabupaten Ngawi dapat lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan pangan dan berbagai risiko krisis yang mungkin terjadi.

Selanjutnya, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ngawi selama kurun waktu 2020 hingga 2024 merepresentasikan suatu ukuran komprehensif terhadap kemampuan daerah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan, baik dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, maupun pemanfaatan pangan yang aman dan bergizi. Indikator ini disusun berdasarkan dimensi-dimensi strategis yang meliputi aspek produksi pangan lokal, distribusi pangan yang efisien dan merata, daya beli masyarakat, hingga kualitas konsumsi pangan rumah tangga. Sebagai instrumen evaluatif, Indeks Ketahanan Pangan berfungsi sebagai acuan dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan daerah, sekaligus sebagai tolok ukur efektivitas intervensi program di sektor pertanian, perdagangan, sosial, serta kesehatan masyarakat.



Gambar 2.5 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ngawi
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ngawi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024, merefleksikan progres signifikan dalam upaya menjaga ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat. Dimulai dari angka 83,86 pada tahun 2021, indeks ini menunjukkan perbaikan menjadi 85,01 pada tahun 2022. Meskipun terjadi sedikit stabilisasi atau penurunan minor menjadi 84,98 pada tahun 2023, capaian tertinggi tercatat pada tahun 2024 dengan Indeks Ketahanan Pangan mencapai 87,53. Data ini, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025, secara kuat mengindikasikan efektivitas kebijakan dan program yang telah diimplementasikan dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendukung visi Kabupaten Ngawi sebagai Lumbung Pangan.

Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan ini merefleksikan keberhasilan dalam memastikan ketersediaan pangan yang memadai, aksesibilitas yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat, serta pemanfaatan pangan yang optimal. Lonjakan signifikan pada tahun 2024 menjadi 87,53 mengindikasikan adanya intervensi kebijakan yang tepat sasaran atau kondisi yang kondusif, didukung oleh optimalisasi hasil produksi pertanian, perbaikan jaringan





irigasi, serta langkah-langkah pengendalian inflasi yang menjaga stabilitas harga dan pasokan. Capaian ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi melalui diversifikasi sektor pertanian dan penguatan kualitas sumber daya manusia melalui jaminan akses pangan yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Pemerintah Kabupaten Ngawi menerapkan strategi holistik yang mencakup tiga pilar utama ketahanan pangan secara simultan. Pilar pertama adalah penjaminan ketersediaan pangan yang memadai dan berkelanjutan. Aksi nyata pada pilar ini diwujudkan melalui program intensifikasi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis (padi, jagung, kedelai), serta pengembangan sektor perikanan dan peternakan untuk diversifikasi sumber protein. Fondasi dari pilar ini diperkokoh oleh komitmen hukum melalui implementasi Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang secara tegas melindungi lahan-lahan produktif dari ancaman alih fungsi lahan.

Pilar kedua adalah peningkatan keterjangkauan pangan dari sisi fisik maupun ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen, memastikan kelancaran dan efisiensi sistem distribusi, serta merevitalisasi lumbung pangan di tingkat masyarakat sebagai buffer stock lokal. Pilar ketiga, yaitu optimalisasi pemanfaatan pangan, melengkapi strategi ini dengan mendorong penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui promosi Pola Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Dengan memperkuat ketiga pilar ini secara sinergis, diharapkan seluruh komponen penyusun IKP dapat membaik, yang pada akhirnya akan meningkatkan skor IKP Kabupaten Ngawi secara signifikan.

Selain itu, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Ngawi selama periode 2020–2024 merupakan indikator krusial yang mencerminkan proporsi penduduk yang tidak memperoleh asupan energi sesuai dengan kebutuhan minimum harian, sebagaimana ditetapkan berdasarkan standar Angka





Kecukupan Energi Nasional. Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan pangan penduduk di suatu wilayah dalam dimensi ketersediaan dan keterjangkauan pangan secara langsung. Prevalensi ini menjadi ukuran kritis dalam evaluasi kebijakan pembangunan ketahanan pangan, karena secara operasional menggambarkan realitas ketimpangan akses pangan antar kelompok sosial dan wilayah geografis, yang dapat berdampak sistemik terhadap status gizi, kesehatan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia.

Selama rentang waktu 2020 hingga 2024, dinamika prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Ngawi menunjukkan respons fluktuatif terhadap berbagai tekanan eksternal maupun kebijakan internal yang memengaruhi sistem produksi, distribusi, dan akses pangan. Tahun 2020 ditandai sebagai periode dengan tingkat kerentanan relatif tinggi akibat gangguan multidimensional dari pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan daya beli, terganggunya rantai pasok pangan lokal dan nasional, serta keterbatasan mobilitas yang memperbesar kesenjangan distribusi pangan, terutama di wilayah perdesaan.

Memasuki tahun 2021 hingga 2022, Pemerintah Kabupaten Ngawi secara gradual melaksanakan berbagai program penanggulangan kerentanan pangan, antara lain melalui penyediaan bantuan pangan bersubsidi, peningkatan produksi pangan lokal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, serta penguatan sistem cadangan pangan masyarakat berbasis kelompok tani dan lembaga kemasyarakatan. Program intervensi ini mulai menunjukkan hasil pada penurunan tren prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, meskipun secara struktural tantangan masih tetap ada, terutama terkait ketergantungan konsumsi pada sumber pangan tunggal, seperti beras, serta kurangnya diversifikasi pangan berbasis potensi lokal.

Tahun 2023 dan 2024 ditandai dengan langkah-langkah lebih progresif yang diambil pemerintah daerah, di antaranya penguatan kapasitas kelembagaan pangan desa, pembangunan lumbung



pangan berkelanjutan, serta edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). Selain itu, sinergi antara sektor pertanian, perikanan, kesehatan, dan perlindungan sosial turut diperkuat guna menciptakan sistem pangan yang resilien terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar. Upaya ini turut berdampak positif dalam menurunkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di sebagian besar kecamatan, terutama yang sebelumnya masuk dalam kategori rawan pangan kronis.

Untuk menurunkan angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU), Pemerintah Kabupaten Ngawi memfokuskan strategi pada intervensi yang menyentuh langsung akar masalah, yaitu kesulitan akses pangan pada kelompok masyarakat miskin dan rentan. Upaya ini bertumpu pada penjaminan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Aksi yang menjadi ujung tombak adalah program stabilisasi harga komoditas pangan pokok, sehingga daya beli masyarakat berpendapatan rendah tetap terjaga, terutama saat terjadi gejolak harga.

Sebagai langkah intervensi paling langsung, program pemberian bantuan pangan akan secara spesifik ditargetkan kepada rumah tangga yang teridentifikasi rawan pangan dan miskin. Kebijakan ini diperkuat dengan pengembangan lumbung pangan masyarakat yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial di tingkat desa, memastikan ketersediaan cadangan pangan saat masa paceklik atau kondisi darurat. Upaya ini juga didukung dengan kampanye panganekaragaman konsumsi pangan, yang bertujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan sumber pangan lokal alternatif yang lebih murah sebagai sumber energi, sehingga tidak bergantung mutlak pada beras.

Melalui kombinasi intervensi langsung berupa bantuan pangan dan stabilisasi harga, serta program pendukung berupa diversifikasi konsumsi, diharapkan tidak ada lagi penduduk Ngawi yang mengalami kekurangan energi kalori. Target utamanya adalah penurunan angka PoU secara nyata, yang menandakan



keberhasilan pemerintah dalam memastikan hak setiap warga negara atas pangan yang cukup.

2.1.3.2 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang terdiri dari tiga komponen utama, yakni Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Lahan, yang selanjutnya digabungkan untuk menggambarkan kualitas lingkungan secara umum. Di Kabupaten Ngawi, perkembangan IKLH dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan kualitas lingkungan yang perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nilai IKLH Kabupaten Ngawi mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 68,01 pada tahun 2020 menjadi 63,85 pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan bahwa terdapat degradasi kualitas lingkungan secara umum, terutama disumbang oleh penurunan tajam pada kualitas lahan dan kualitas air.

2. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air mengalami fluktuasi, tetapi secara umum menurun, dari 58,57 pada tahun 2020 menjadi 51,38 pada tahun 2024. Rendahnya nilai indeks ini mengindikasikan menurunnya kualitas badan air, yang dapat disebabkan oleh pencemaran limbah domestik, limbah pertanian, serta keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

3. Indeks Kualitas Udara

Berbeda dengan komponen lainnya, Indeks Kualitas Udara relatif stabil dan tinggi, berkisar antara 85,37 pada tahun 2020 hingga 81,71 pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa kualitas udara di Kabupaten Ngawi secara umum masih tergolong baik dan menunjukkan bahwa emisi udara dari sektor industri dan transportasi masih dalam batas aman atau belum berdampak signifikan terhadap degradasi kualitas udara.

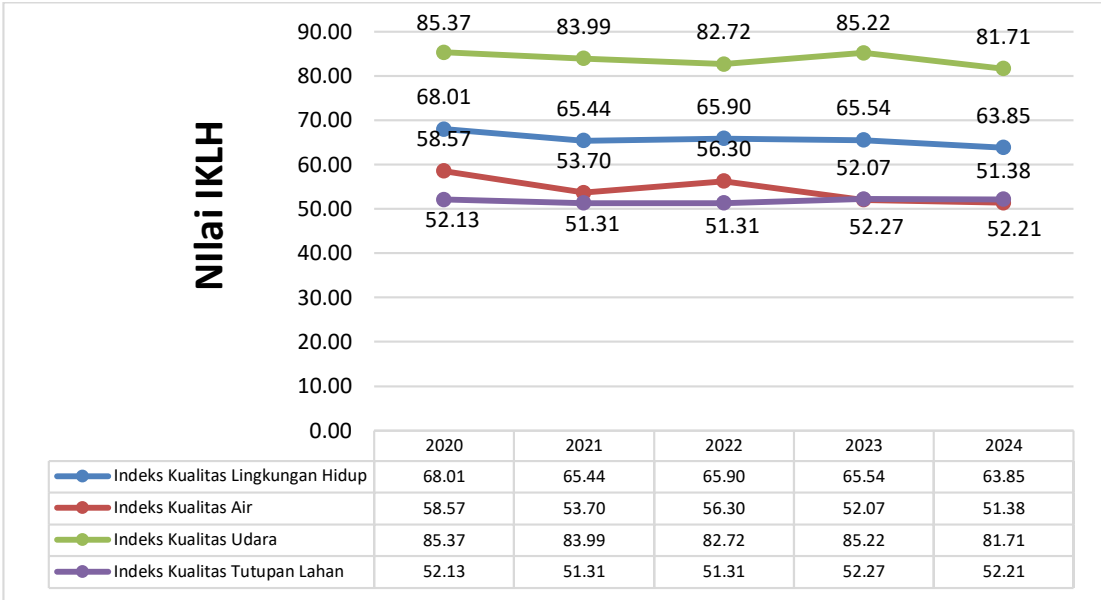


4. Indeks Kualitas Lahan

Berdasarkan grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Ngawi periode 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi pada empat komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Secara umum, nilai IKLH cenderung menurun dari 68,01 pada tahun 2020 menjadi 63,85 pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya penurunan kualitas lingkungan secara agregat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian pencemaran dan perbaikan kualitas lingkungan belum sepenuhnya optimal di semua sektor.

Komponen yang paling berfluktuasi adalah Indeks Kualitas Air, yang menurun cukup tajam dari 58,57 pada 2020 menjadi 51,38 pada 2024. Hal ini mengindikasikan masih adanya tekanan terhadap kualitas air permukaan, baik dari aktivitas domestik maupun kegiatan pertanian dan industri. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara relatif stabil namun juga menurun dari 85,37 menjadi 81,71, yang mungkin dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas pembangunan di kawasan perkotaan. Adapun Indeks Kualitas Tutupan Lahan menunjukkan kondisi yang cenderung stagnan di kisaran 51–52, menandakan bahwa laju perubahan penggunaan lahan terhadap kawasan hijau relatif tidak signifikan namun belum menunjukkan perbaikan berarti.

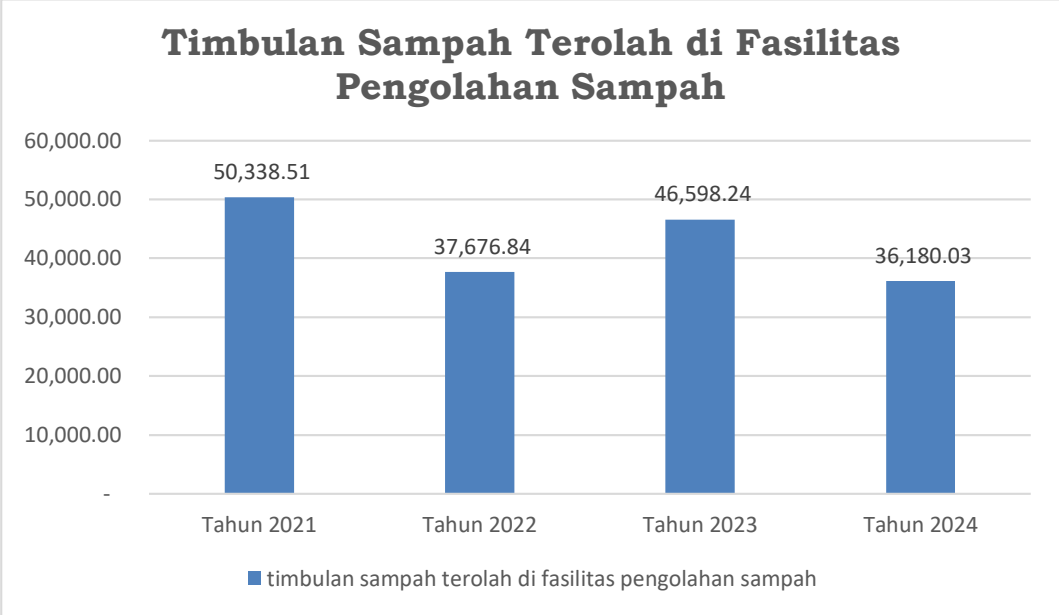
Secara keseluruhan, capaian IKLH Kabupaten Ngawi selama 2020–2024 menggambarkan perlunya penguatan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara lintas sektor. Fokus perhatian ke depan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas air melalui pengendalian pencemaran sumber domestik dan pertanian, serta pengendalian konversi lahan untuk menjaga daya dukung ekosistem. Selain itu, sinergi antara perangkat daerah teknis, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan.



Gambar 2.6 Nilai IKLH Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024
Sumber : Dokumen Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029

5. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan sampah

Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) melalui upaya pengolahan, pemilahan, daur ulang, maupun pemanfaatan kembali. Peningkatan capaian indikator ini tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah, tetapi juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan dalam meningkatkan timbulan sampah terolah akan berkontribusi besar terhadap pengurangan pencemaran, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pencapaian target pembangunan berwawasan lingkungan.



Gambar 2.7 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi, 2025

Realisasi timbulan sampah yang berhasil terolah di fasilitas pengolahan sampah dalam periode 2021–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, jumlah sampah yang terolah mencapai 50.338,51 ton, namun menurun pada tahun 2022 menjadi 37.676,84 ton. Capaian ini kembali meningkat di tahun 2023 dengan volume 46.598,24 ton, tetapi turun kembali pada tahun 2024 menjadi 36.180,03 ton. Perubahan ini mencerminkan adanya dinamika dalam sistem pengelolaan sampah yang dipengaruhi oleh kapasitas fasilitas, partisipasi masyarakat, serta konsistensi program yang dijalankan pemerintah daerah.

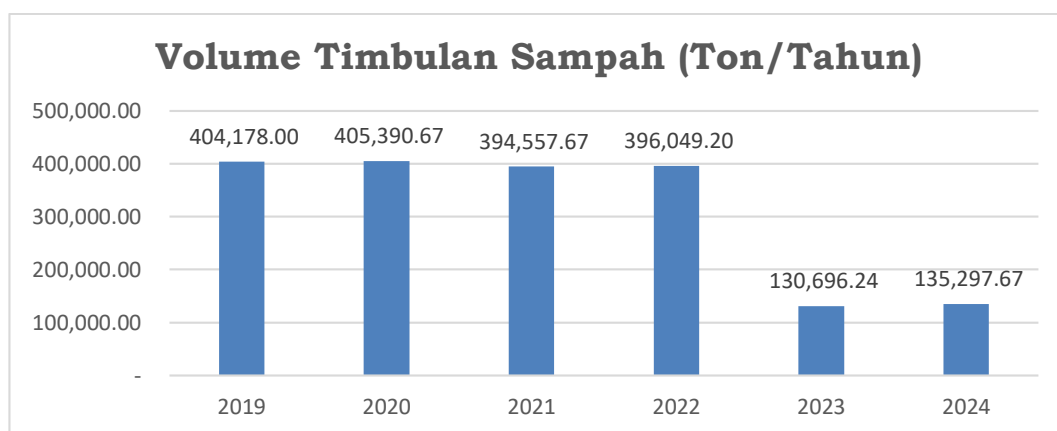
Salah satu faktor pendorong capaian pengolahan sampah adalah keberadaan bank sampah dan TPS3R yang mampu mengoptimalkan pemilahan serta pengolahan sampah di tingkat masyarakat. Kehadiran kedua fasilitas ini berperan penting dalam mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA, sekaligus mendorong perilaku masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan lingkungan. Partisipasi aktif warga dalam memanfaatkan bank sampah juga dapat memberikan manfaat ekonomi tambahan, sehingga menjadi daya tarik tersendiri dalam mendukung keberlanjutan program pengolahan sampah.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan besar yang menghambat peningkatan capaian, salah satunya adalah belum

meratanya ketersediaan bank sampah dan TPS3R di seluruh desa. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar sampah masih belum dapat diolah secara optimal, sehingga cenderung menumpuk di TPA. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu adanya perluasan pembangunan fasilitas pengolahan sampah, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan, serta dukungan anggaran yang memadai agar cakupan pengolahan sampah dapat menjangkau seluruh wilayah. Dengan langkah tersebut, diharapkan capaian pengolahan sampah dapat lebih stabil dan meningkat setiap tahunnya.

6. Volume Timbulan Sampah (m3)

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas adalah kemampuan daerah dalam mengelola timbulan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Pengelolaan sampah yang tidak efektif berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan estetika wilayah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki sistem pendataan yang akurat, kapasitas pengelolaan yang memadai, serta strategi pengurangan sampah dari sumbernya melalui prinsip 3R.



Gambar 2.8 Timbulan Sampah Yang Ditangani

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi, 2025

Berdasarkan data volume timbulan sampah Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2019–2024, terlihat bahwa jumlah timbulan sampah relatif stabil pada kisaran 394.000–405.000 m³ per tahun dari tahun 2019 hingga 2022.



Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan tajam menjadi hanya 130.696,24 m³. Penurunan signifikan ini dapat diinterpretasikan dalam dua arah: pertama, adanya peningkatan efektivitas kebijakan pengurangan sampah di hulu, termasuk pemanfaatan bank sampah, TPS3R, dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat; atau kedua, kemungkinan terdapat perubahan sistem pencatatan atau belum sepenuhnya terlaporkannya data volume timbulan sampah pada tahun tersebut.

Secara kontekstual, tren ini sejalan dengan meningkatnya persentase sampah yang berhasil dikurangi melalui pendekatan 3R dalam periode yang sama. Namun, rendahnya volume timbulan pada 2023 tetap perlu diverifikasi lebih lanjut, agar tidak terjadi kekeliruan dalam membaca capaian program. Kabupaten Ngawi sendiri masih menghadapi sejumlah kendala, seperti belum meratanya layanan pengumpulan sampah di wilayah non-perkotaan, terbatasnya infrastruktur pengolahan sampah modern, serta minimnya sumber daya manusia dan pembiayaan yang mendukung pengelolaan terpadu.

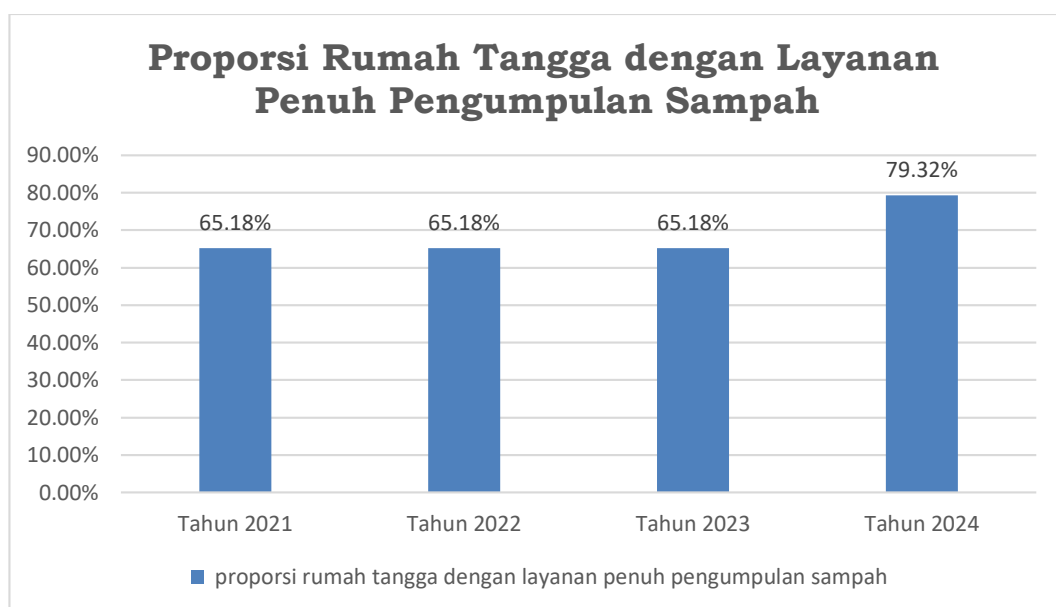
Oleh karena itu, dalam perumusan RPJMD 2025–2029, menjadi catatan dan penajaman arah kebijakan yang mencakup: penguatan sistem pendataan timbulan sampah secara elektronik dan terintegrasi, peningkatan kapasitas layanan pengumpulan dan pengolahan hingga ke tingkat desa, serta optimalisasi pemrosesan sampah melalui pendekatan berbasis komunitas dan teknologi ramah lingkungan. Penanganan yang tepat atas volume timbulan sampah menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan berkelanjutan dan cerminan dari kualitas pelayanan dasar lingkungan hidup.

7. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas layanan persampahan daerah. Akses terhadap layanan ini tidak hanya mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu menyediakan infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang



memadai, tetapi juga menjadi cerminan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Semakin tinggi proporsi rumah tangga yang terlayani, semakin baik pula potensi pengendalian timbulan sampah, pencegahan pencemaran, serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 2.9 Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Ngawi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi, 2025

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah menunjukkan tren yang relatif stagnan pada periode 2021 hingga 2023 dengan capaian sebesar 65,18%. Kondisi ini menggambarkan bahwa dalam tiga tahun berturut-turut belum ada peningkatan signifikan dalam perluasan cakupan layanan pengumpulan sampah. Namun, pada tahun 2024 terlihat adanya lonjakan yang cukup baik menjadi 79,32%, yang menunjukkan adanya perbaikan sistem layanan dan peningkatan peran masyarakat dalam mendukung program pengelolaan persampahan.

Faktor pendorong dari peningkatan ini adalah adanya peran serta bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (TPS3R) yang semakin berkembang di berbagai wilayah. Keterlibatan masyarakat dalam bank sampah tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, tetapi juga memberikan nilai ekonomi tambahan dari sampah yang dapat



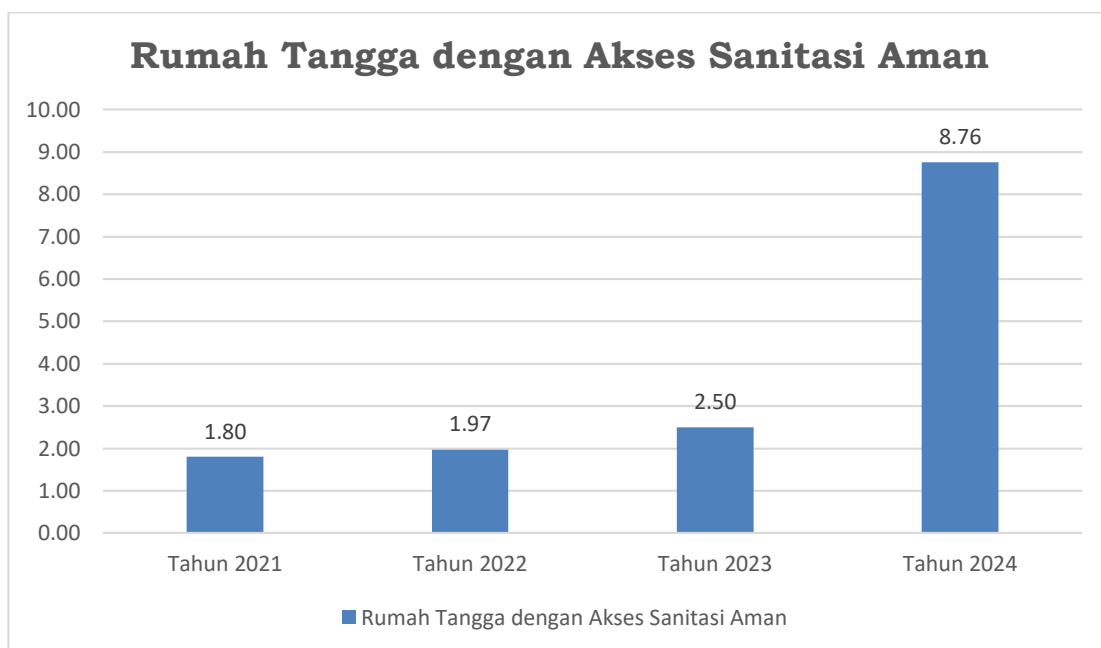
dipilah dan diolah kembali. Hal ini turut mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi mengingat belum semua desa memiliki bank sampah maupun TPS3R. Ketiadaan fasilitas ini menyebabkan sebagian wilayah belum dapat menikmati layanan penuh pengumpulan sampah secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lanjutan untuk memperluas pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di seluruh desa serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan persampahan, sehingga capaian layanan pengumpulan sampah dapat semakin merata dan berkesinambungan di masa mendatang.

8. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, karena berkaitan langsung dengan derajat kesehatan, lingkungan yang bersih, serta upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Akses sanitasi aman mencakup ketersediaan fasilitas buang air yang layak, terhubung dengan sistem pengelolaan limbah yang memadai, serta tidak mencemari sumber air maupun lingkungan sekitar. Tingginya capaian akses sanitasi aman menunjukkan keberhasilan pembangunan infrastruktur dasar dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, sementara rendahnya capaian menandakan masih adanya tantangan besar yang harus ditangani, baik dari sisi ketersediaan sarana, perilaku hidup bersih dan sehat, maupun dukungan kebijakan daerah.





**Gambar 2.10 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Ngawi**

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Ngawi, 2025*

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Ngawi (2025), capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman baru mencapai 1,80 persen, kemudian mengalami peningkatan bertahap menjadi 1,97 persen pada tahun 2022, dan 2,50 persen pada tahun 2023. Lonjakan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024, yaitu mencapai 8,76 persen, atau meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan mulai efektifnya berbagai intervensi kebijakan dan program peningkatan akses sanitasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngawi, seperti pembangunan jamban sehat, penyediaan sistem pengolahan air limbah domestik, serta dukungan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Meskipun demikian, capaian tersebut masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan target nasional dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang mengharuskan seluruh penduduk



memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dan aman pada tahun 2030. Oleh karena itu, dalam periode RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029, arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang permukiman dan sanitasi perlu difokuskan pada peningkatan cakupan layanan sanitasi aman secara merata di seluruh wilayah, terutama di kawasan perdesaan dan permukiman padat penduduk.

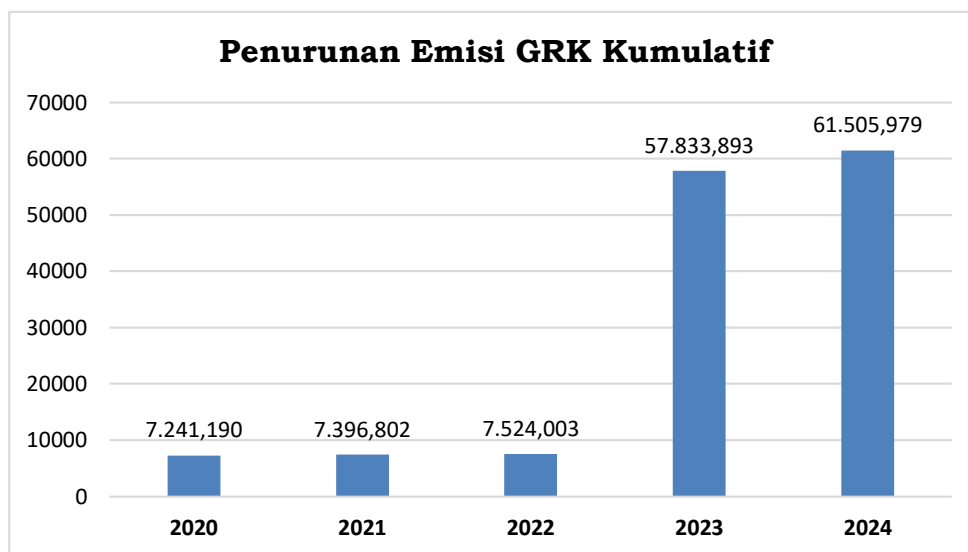
Proyeksi hingga tahun 2029 menargetkan peningkatan akses sanitasi aman secara bertahap dengan capaian minimal 30–40 persen rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi aman. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pembangunan IPAL Komunal, perluasan layanan pengelolaan air limbah domestik (SPALD), serta kolaborasi lintas sektor antara Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, serta Pemerintah Desa. Selain itu, dukungan regulasi daerah dan insentif bagi rumah tangga berpenghasilan rendah untuk membangun jamban sehat perlu diperkuat sebagai langkah strategis menuju Ngawi Sehat dan Berkelanjutan.

2.1.3.3 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan bagian dari komitmen Kabupaten Ngawi dalam mendukung agen dalam Pembangunan rendah karbon dan pengendalian perubahan iklim, sejalan dengan target *Nationally Determined Contribution (NDC)* Indonesia. Selama periode 2025–2029, Kabupaten Ngawi diarahkan untuk menurunkan emisi GRK secara kumulatif melalui berbagai aksi mitigasi di sektor kehutanan, energi, pertanian, dan pengelolaan limbah. Upaya ini mencakup perlindungan tutupan hutan dan lahan hijau, efisiensi energi pada fasilitas publik, pengurangan emisi dari limbah domestik, serta penerapan praktik pertanian ramah lingkungan. Berdasarkan estimasi konservatif, total potensi penurunan emisi GRK kumulatif di Kabupaten Ngawi selama lima tahun ke depan diperkirakan mencapai antara 35.000 hingga 52.500 ton CO₂ ekuivalen (tCO₂e). Capaian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan iklim daerah



serta memperkuat posisi Kabupaten Ngawi dalam agenda pembangunan berkelanjutan.



**Gambar 2.11 Penurunan Emisi GRK Kumulatif
Kabupaten Ngawi Tahun 2020–2024**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi, 2025

Grafik Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif Kabupaten Ngawi Tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan, terutama pada dua tahun terakhir periode pengamatan. Pada awalnya, capaian penurunan emisi GRK relatif stabil pada kisaran 7.200–7.500 ton CO₂e sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan yang sangat besar hingga mencapai 57.833,893 ton CO₂e, diikuti peningkatan lebih lanjut pada tahun 2024 menjadi 61.505,979 ton CO₂e. Perkembangan ini menandakan bahwa upaya pengendalian emisi di Kabupaten Ngawi mulai menunjukkan dampak yang lebih nyata dalam dua tahun terakhir, seiring dengan semakin masifnya penerapan kebijakan mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah.

Kenaikan tajam tersebut dapat dikaitkan dengan implementasi berbagai program strategis daerah dalam pengurangan emisi GRK, seperti peningkatan penggunaan energi terbarukan, optimalisasi pengelolaan limbah padat dan cair, serta peningkatan kegiatan penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah,

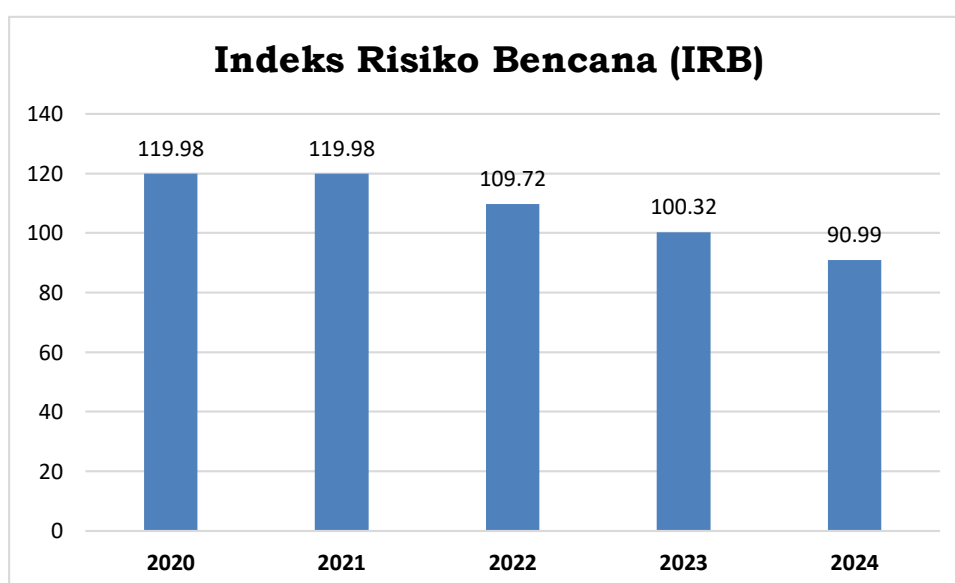


pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung program rendah karbon turut memperkuat capaian tersebut. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan data yang lebih baik juga memungkinkan perhitungan penurunan emisi dilakukan secara lebih akurat dan terukur.

Meskipun capaian penurunan emisi pada tahun 2023–2024 menunjukkan hasil yang positif, keberlanjutan tren ini tetap membutuhkan perhatian serius. Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu memastikan bahwa peningkatan tersebut tidak bersifat sementara, melainkan menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju pembangunan rendah karbon. Konsistensi dalam pelaporan, monitoring capaian sektor penyumbang emisi (seperti energi, transportasi, limbah, dan pertanian), serta dukungan pendanaan yang berkelanjutan akan menjadi faktor kunci dalam menjaga momentum positif ini.

2.1.3.4 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator penting dalam menilai tingkat potensi kerugian akibat bencana alam maupun non-alam yang mungkin terjadi di suatu wilayah, termasuk Kabupaten Ngawi. Indeks ini mencerminkan tiga komponen utama yaitu bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) dalam menghadapi risiko bencana.



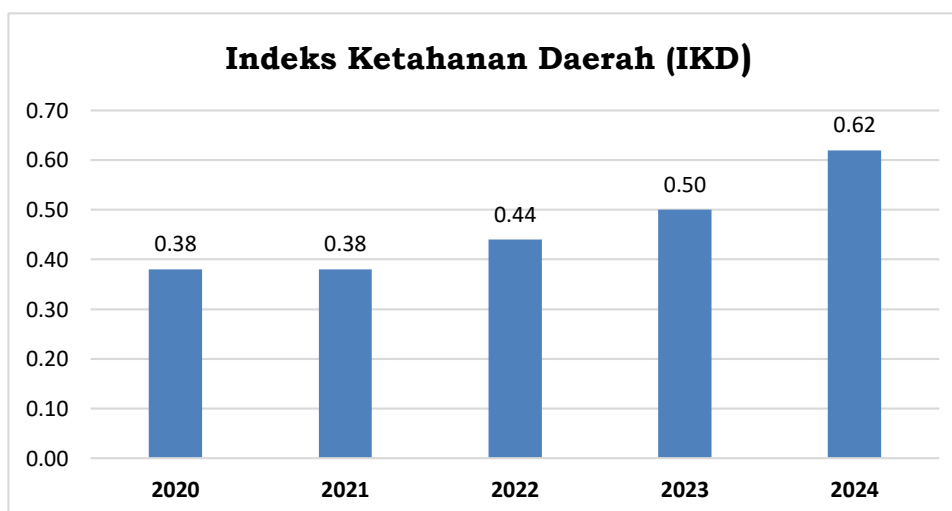
Gambar 2.12 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Ngawi

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Berdasarkan data IRB Kabupaten Ngawi tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren penurunan yang cukup signifikan dari 119,98 pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 90,99 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana, serta kemungkinan penurunan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana. Capaian tahun 2024 menunjukkan perbaikan signifikan, yang patut diapresiasi sebagai hasil dari berbagai upaya penanggulangan bencana seperti penguatan kelembagaan BPBD, peningkatan sistem peringatan dini, serta program edukasi dan pelatihan kebencanaan yang lebih intensif di tingkat desa. Namun, nilai IRB yang masih berada pada angka 90-an mengindikasikan bahwa risiko bencana masih tergolong moderat hingga tinggi, sehingga tetap diperlukan intervensi yang berkelanjutan dan lintas sektor untuk menurunkan indeks ini secara lebih progresif ke depan.

2.1.3.5 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menghadapi ancaman dan gangguan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.



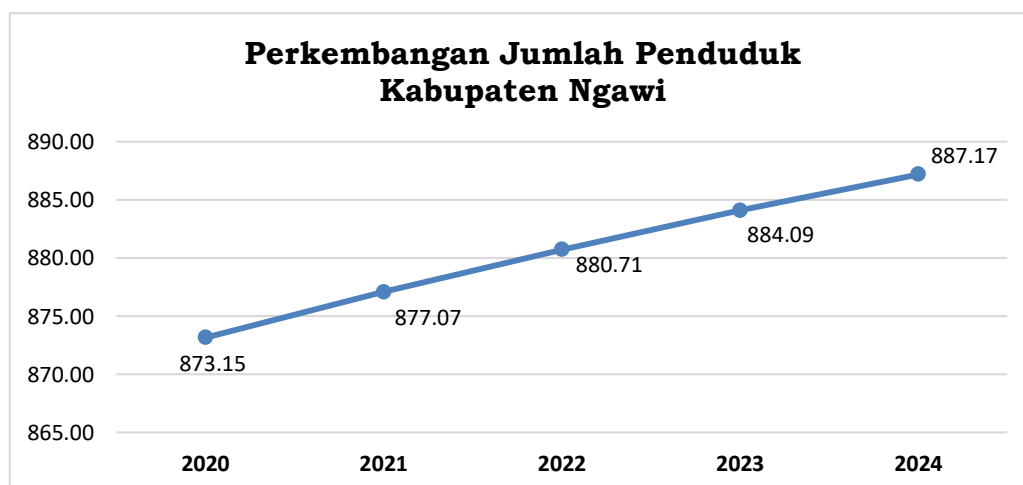
Gambar 2.13 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Ngawi

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Berdasarkan data IKD Kabupaten Ngawi tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang positif dan konsisten. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai IKD berada pada angka 0,38, yang mencerminkan tingkat ketahanan yang masih rendah. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, nilai ini mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 0,62 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam kapasitas kelembagaan, efektivitas kebijakan mitigasi risiko, serta keterlibatan masyarakat dalam membangun resiliensi daerah. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ngawi telah berhasil memperkuat fondasi ketahanannya melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan sistem perlindungan sosial, serta respon adaptif terhadap dinamika risiko yang berkembang.

2.1.3.6 Demografi

Aspek kependudukan (demografi) merupakan salah satu aspek penting dalam menggambarkan perkembangan suatu wilayah. Demografi dilihat meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Ngawi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :



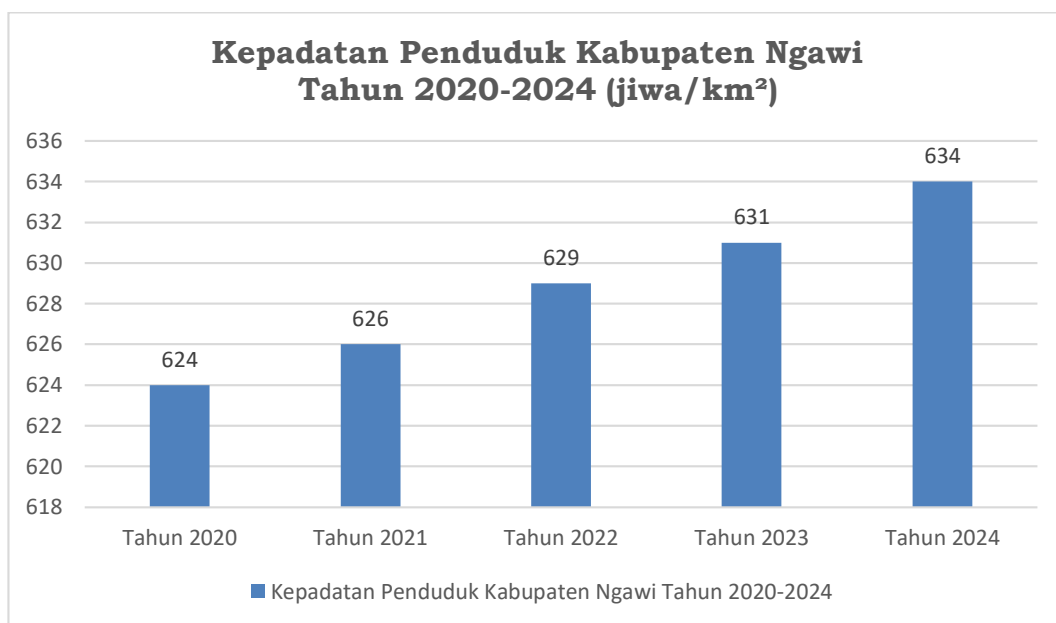
**Gambar 2.14 Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Perkembangan penduduk di Kabupaten Ngawi pada kurun waktu 5 tahun terakhir meningkat secara bertahap. Pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Ngawi sebanyak 873,15 jiwa. Tahun 2021 meningkat sehingga jumlah penduduk di Kabupaten Ngawi sebanyak 877,07 jiwa. Pada tahun 2022 penduduk di Kabupaten Ngawi tetap meningkat menjadi 880,71 jiwa. Pada tahun 2023 meningkat dengan jumlah penduduk 884,09 jiwa dan menjadi 887,17 pada tahun 2024. Jika dilihat berdasarkan fluktuasi peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Ngawi tentunya mempengaruhi proyeksi pembangunan yang perlu dilakukan oleh daerah dari segala aspek.

Peningkatan jumlah penduduk ini dapat dipengaruhi oleh jumlah kelahiran (natalitas) lebih banyak daripada jumlah kematian (mortalitas). Selain itu pertambahan penduduk di dapat pula terjadi karena adanya perpindahan (migrasi) penduduk. Pertambahan penduduk dalam beberapa kajian memang memiliki dampak positif dan negatif. Beberapa dampak positif dari adanya pertambahan penduduk seperti banyaknya usia produktif (yang selanjutnya disebut bonus demografi), meningkatnya sumber daya manusia dalam produksi (tenaga kerja), dan meningkatnya inovasi kerja serta kemampuan berwirausaha. Sedangkan dampak negatif dari pertambahan penduduk antara lain seperti semakin banyak pengangguran, tingkat kriminalitas tinggi, menurunnya kualitas lingkungan, serta berkembangnya permukiman tidak layak huni





**Gambar 2.15 Kepadatan Penduduk Kabupaten Ngawi
Tahun 2020-2024 (jiwa/km²)**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Ngawi menunjukkan sebuah tren peningkatan yang stabil dan berkelanjutan sepanjang periode 2020 hingga 2024. Dimulai dari 624 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2020, kepadatan penduduk terus bertambah secara gradual, mencapai 626 pada tahun 2021, kemudian 629 pada tahun 2022, dan 631 pada tahun 2023. Puncaknya, pada tahun 2024, kepadatan penduduk tercatat mencapai 634 jiwa per kilometer persegi. Data yang bersumber dari BPS Kabupaten Ngawi ini mengindikasikan adanya pertumbuhan populasi yang konsisten, yang berimplikasi pada peningkatan tekanan terhadap sumber daya dan ruang di wilayah tersebut.

Peningkatan kepadatan penduduk secara bertahap ini memiliki konsekuensi penting bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Ngawi. Pertumbuhan populasi akan secara langsung meningkatkan kebutuhan akan berbagai infrastruktur dasar dan pelayanan publik, seperti perumahan, akses air bersih dan sanitasi, fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga berpotensi memberikan tekanan pada ketersediaan lahan, termasuk lahan pertanian, sehingga menuntut perencanaan tata ruang yang cermat dan



berkelanjutan untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan permukiman, fasilitas umum, dan area produktif yang mendukung visi Lumbung Pangan Kabupaten Ngawi.

Dengan tren pertumbuhan kepadatan penduduk yang berkesinambungan, Kabupaten Ngawi dihadapkan pada urgensi untuk terus memperkuat strategi pembangunan yang adaptif dan inklusif. Hal ini mencakup investasi berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik, serta penciptaan lapangan kerja yang cukup untuk menopang pertumbuhan angkatan kerja. Pengelolaan kepadatan penduduk yang efektif, melalui kebijakan tata ruang yang bijaksana dan program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup, akan menjadi kunci dalam menjaga kondusifitas pembangunan dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Ngawi.

Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sine	0,81	0,78	0,67	-0,52	0,00
Ngrambe	0,84	0,82	0,71	-0,47	0,00
Jogorogo	0,85	0,82	0,70	-0,09	0,00
Kendal	1,20	1,30	1,06	-0,40	0,00
Geneng	0,47	0,32	0,33	-0,48	0,00
Gerih	1,14	1,22	1,00	-0,18	-0,08
Kwadungan	0,45	0,29	0,31	-0,29	0,15
Pangkur	0,37	0,19	0,23	-0,18	0,06
Karangjati	0,10	-0,17	-0,04	-0,44	0,15
Bringin	0,11	-0,15	-0,30	-0,31	0,31
Padas	0,56	0,44	0,42	-0,11	0,20
Kasreman	0,43	0,27	0,29	-0,40	0,30
Ngawi	0,41	0,25	0,28	-0,30	-0,18
Paron	0,63	0,53	0,49	-0,56	-0,27
Kedunggalar	0,68	0,60	0,54	-0,76	-0,19
Pitu	0,82	0,79	0,68	0,09	0,00
Widodaren	0,64	0,55	0,50	-0,95	-0,20
Mantingan	0,70	-0,22	-0,07	-0,95	-0,01
Karanganyar	0,79	0,74	0,64	-0,58	-0,04
Kabupaten Ngawi	0,60	0,50	0,47	-0,66	0,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025



Data menunjukkan tren penurunan laju pertumbuhan penduduk di hampir seluruh kecamatan Kabupaten Ngawi, terutama sejak 2023, dengan beberapa kecamatan bahkan mencatat angka negatif. Penyebab utama dari tren ini kemungkinan adalah meningkatnya migrasi keluar akibat terbatasnya peluang ekonomi lokal, rendahnya angka kelahiran, serta meningkatnya urbanisasi ke daerah lain yang lebih berkembang. Dampak dari penurunan ini bisa berujung pada berkurangnya tenaga kerja produktif, stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah, serta penurunan jumlah penduduk usia sekolah dalam jangka panjang.

Akibat dari penurunan laju pertumbuhan ini, ada potensi tantangan bagi pembangunan daerah, terutama dalam keberlanjutan ekonomi dan layanan publik. Jika tren negatif ini terus berlanjut, sektor pertanian dan industri kecil yang bergantung pada tenaga kerja lokal bisa mengalami penurunan produktivitas. Selain itu, berkurangnya jumlah penduduk usia produktif dapat menghambat daya saing daerah dalam menarik investasi baru. Di sisi lain, kondisi ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kesejahteraan dan layanan pendidikan.

Untuk proyeksi lima tahun ke depan dalam RPJMD 2025-2029, perlu strategi peningkatan daya tarik ekonomi daerah guna menahan laju migrasi keluar, seperti pengembangan industri berbasis lokal dan ekowisata. Selain itu, program peningkatan kualitas SDM, insentif bagi keluarga muda untuk menetap, serta kebijakan dukungan bagi UMKM harus diperkuat agar perekonomian daerah tetap tumbuh. Pemerintah juga perlu mendorong inovasi dalam sektor pertanian dan perikanan, mengingat sektor ini masih menjadi tulang punggung ekonomi di beberapa kecamatan. Dengan langkah strategis ini, Kabupaten Ngawi dapat menjaga keseimbangan demografi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Tabel 2.14 Distribusi Persebaran Penduduk menurut Kecamatan pada Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

No	Distribusi Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sine	%	5,23	4,97	4,96	4,95	5,12
2	Ngrambe	%	4,93	4,72	4,71	4,71	4,89
3	Jogorogo	%	4,77	4,82	4,83	4,84	4,88
4	Kendal	%	5,59	5,35	5,34	5,33	5,76
5	Geneng	%	6,02	5,69	5,65	5,6	5,93
6	Gerih	%	4,11	4,12	4,16	4,19	4,18
7	Kwadungan	%	3,12	3,11	3,11	3,11	3,1
8	Pangkur	%	3,2	3,22	3,22	3,22	3,19
9	Karangjati	%	5,33	5,77	5,78	5,78	5,41
10	Bringin	%	3,46	3,77	3,77	3,78	3,54
11	Padas	%	3,9	3,97	3,97	3,97	3,96
12	Kasreman	%	2,76	2,92	2,93	2,94	2,79
13	Ngawi	%	9,49	10,05	10,1	10,14	9,49
14	Paron	%	10,51	10,58	10,59	10,6	10,56
15	Kedunggalar	%	8,31	8,05	8,04	8,03	8,16
16	Pitu	%	3,37	3,38	3,39	3,4	3,4
17	Widodaren	%	8,37	7,96	7,93	7,91	8,2
18	Mantingan	%	4,3	4,63	4,63	4,63	4,22
19	Karanganyar	%	3,24	2,92	2,89	2,86	3,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Distribusi persebaran penduduk paling tinggi di Kabupaten Ngawi tahun 2020-2024 terdapat pada Kecamatan Karanganyar. Dimana setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dalam persebaran penduduk setiap tahunnya dan pada tahun 2022 persebaran penduduk di Kecamatan Ngrambe sebesar 992.552 kemudian kedua Kecamatan Karanganyar sebesar 83.831. Peningkatan persebaran penduduk di Kecamatan Karanganyar dan Ngrambe dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh aspek ekonomi, infrastruktur, sosial dan demografi.



Tabel 2.15 Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Laki-Laki	Jiwa	432.006	433.525	435.470	449.052	450.288
2	Jumlah Perempuan	Jiwa	438.087	439.821	441.962	455.042	456.714
3	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	Rasio	95,62	95,63	95,68	95,65	98,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin merupakan salah satu aspek dalam menggambarkan kondisi kependudukan. Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah perempuan di Kabupaten Ngawi dalam kurun 5 tahun terakhir cenderung tetap. Pada tahun 2024 jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Ngawi sebesar 450.288 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 456.714 jiwa. Sehingga *sex ratio* antara penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 98,59.

Topografi Kabupaten Ngawi terletak pada ketinggian yang bervariasi. Ketinggian Kabupaten Ngawi berada diantara 47-500 meter dpal meliputi Kecamatan Ngawi, Geneng, Gerih, Padas, Paron, Kasreman, Karangjati, Bringin, Pangkur, Mantingan, Widodaren, Kedunggalar, Pitu, Karanganyar, Kwadungan dan sebagian wilayah Kecamatan Sine, Jogorogo, Ngrambe, dan Kendal.

Tabel 2.16 Distribusi persebaran Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

No.	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
1.	0–4	56.149	55.510	55.162	43.392	47.046
2.	5–9	57.516	56.8767	56.170	55.848	55.747
3.	10–14	58.783	58.355	58.046	63.474	62.085
4.	15–19	60.160	59.404	58.768	61.243	62.468
5.	20–24	62.419	61.590	60.788	63.664	62.955
6.	25–29	59.816	59.279	58.814	60.479	60.952
7.	30–34	62.204	61.799	61.393	56.797	56.563
8.	35–39	63.602	63.249	63.043	62.100	59.930



No.	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
9.	40–44	64.260	64.061	63.727	69.230	68.980
10.	45–49	61.073	61.480	61.977	63.360	65.848
11.	50–54	61.763	62.365	62.873	65.708	62.914
12.	55–59	57.068	58.273	59.505	61.658	64.383
13.	60–64	51.332	52.784	54.257	56.272	55.798
14.	65+	93.912	98.321	102.909	114.869	121.333

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

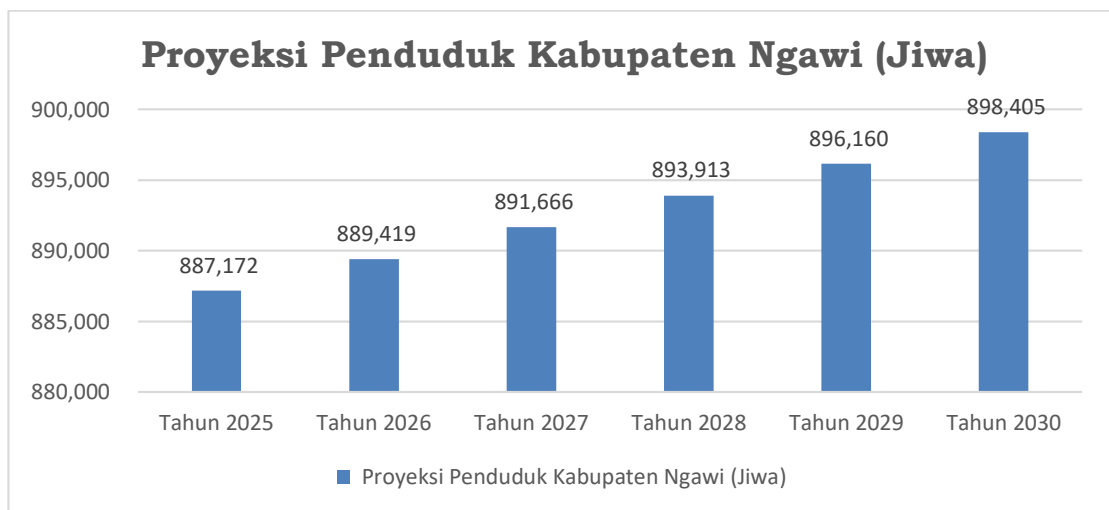
Distribusi persebaran penduduk menurut umur merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah, guna menggambarkan penduduk tersebut merata atau tidak. Distribusi penduduk menurut umur erat kaitannya dengan komposisi penduduk. Dari data diatas terlihat bahwa kelompok umur yang paling banyak dari tahun 2020-2024 di Kabupaten Ngawi adalah kelompok umur 65 tahun ke atas. Penduduk umur 65 tahun ke atas pada tahun 2024 mencapai 121.333 jiwa. Sedangkan kelompok umur yang paling sedikit di Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 adalah kelompok umur 60-64 tahun yang memiliki jumlah 55.798 jiwa. Umur penduduk 65 tahun ke atas memiliki porsi umur penduduk paling besar. Hal ini menunjukkan rendahnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ngawi.

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang dianut di Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024

Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut	2022	2023	2024
Islam	888.966	894.806	897.794
Protestan	5.707	5.677	5.621
Katolik	3.426	3.382	3.355
Hindu	61	61	56
Budha	102	100	114
Lainnya	68	68	62

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, 2025

Jumlah penduduk menurut agama merupakan salah satu komposisi penduduk yang menggambarkan kepercayaan yang dianut oleh penduduk suatu daerah. Di Kabupaten Ngawi sendiri dari tahun ke tahun mayoritas penduduknya menganut agama Islam, yakni dengan jumlah 897.794 jiwa (tahun 2024). Secara berurutan kepercayaan yang banyak dianut oleh masyarakat Kabupaten Ngawi adalah 1) Islam, 2) Protestan, 3) Katolik, 4) Budha, 4) Lainnya, dan 5) Hindu.



Gambar 2.16 Proyeksi Penduduk Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2030

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, 2025

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Ngawi tahun 2025–2030 menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil. Pada tahun 2025 jumlah penduduk tercatat sebesar 887.172 jiwa, dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 898.405 jiwa pada tahun 2030. Pertumbuhan ini menggambarkan adanya tambahan sekitar 11.233 jiwa dalam kurun lima tahun, atau rata-rata kenaikan sekitar 0,25% per tahun. Meskipun laju pertumbuhan relatif rendah, konsistensi kenaikan ini tetap menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kenaikan jumlah penduduk yang relatif moderat tersebut perlu dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan. Dari sisi peluang, peningkatan jumlah penduduk dapat memperkuat basis tenaga kerja produktif, memperbesar potensi pasar domestik, serta

meningkatkan daya dukung sosial-ekonomi masyarakat. Namun, dari sisi tantangan, Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu memastikan ketersediaan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur, agar mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.

Secara keseluruhan, proyeksi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ngawi 2025–2030. Perencanaan pembangunan perlu diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan, kesehatan, serta keterampilan kerja. Selain itu, dengan pertumbuhan penduduk yang cenderung stabil, Pemkab Ngawi memiliki kesempatan untuk lebih fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga pertumbuhan jumlah penduduk dapat benar-benar menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.7 Warisan Geologi atau Geoheritage

Kabupaten Ngawi memiliki karakter bentang alam yang khas dan kompleks, yang menjadi salah satu kekuatan dasar dalam pembangunan daerah. Secara geologis, wilayah ini berada di Zona Kendeng Timur, sebuah kawasan yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik dan tektonik sejak jutaan tahun lalu. Keberagaman bentang geologi tersebut tidak hanya membentuk morfologi wilayah yang unik, tetapi juga menyimpan nilai ilmiah dan sejarah alam yang tinggi, termasuk keberadaan jejak manusia purba di Situs Trinil yang telah dikenal secara internasional.

Hasil kajian ilmiah melalui Dokumen Usulan Geoheritage Kabupaten Ngawi (2024) menunjukkan bahwa Kabupaten Ngawi memiliki potensi warisan geologi (geoheritage) yang signifikan, dengan total teridentifikasi sebanyak 26 lokasi geosite. Beberapa di antaranya meliputi Gunung Api Purba Ngawi (Warak), Taman Lava Watu Jonggol, Goa Lawa Pitu, Sumber Lanang–Kebun Teh Jamus, Benteng Pendem Van den Bosch, dan Situs Trinil. Kawasan-kawasan ini merepresentasikan kekayaan geologi yang memiliki nilai ilmiah, edukatif, dan estetika tinggi, serta berpotensi besar



dikembangkan menjadi objek wisata edukatif berbasis konservasi alam.

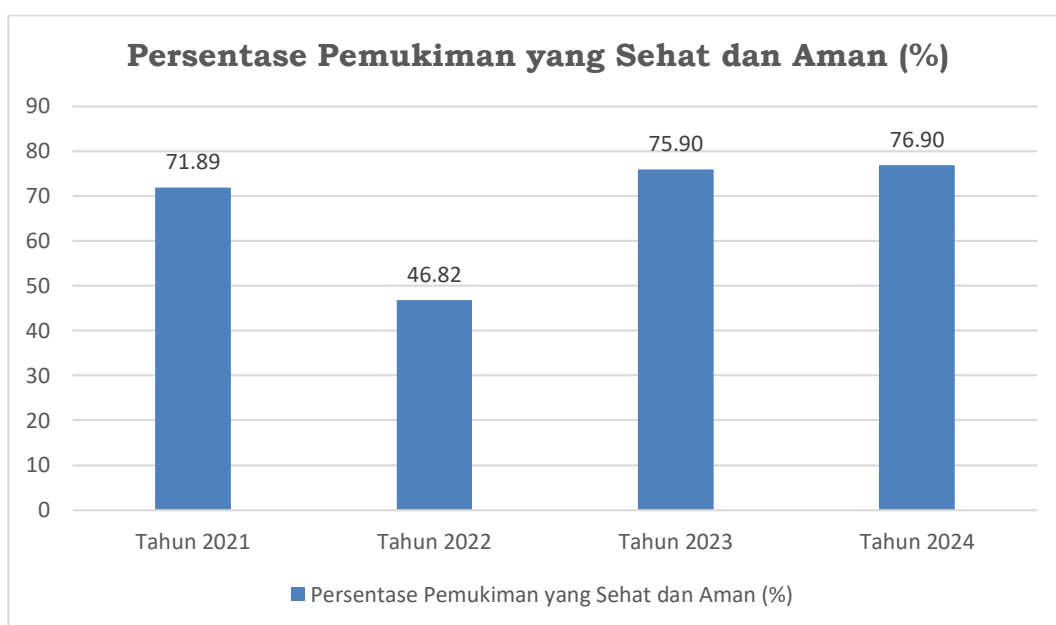
Potensi geoheritage ini memiliki arti strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan Kabupaten Ngawi. Keberadaannya dapat menjadi dasar pengembangan geowisata edukatif, sekaligus memperkuat ekonomi kreatif berbasis sumber daya alam dan budaya lokal. Selain itu, pengelolaan geoheritage juga memberikan manfaat dalam bidang pendidikan geologi, mitigasi bencana alam, serta konservasi lingkungan hidup, karena mendorong masyarakat untuk memahami proses alam dan pentingnya pelestarian sumber daya bumi.

Dalam konteks kebijakan, Pemerintah Kabupaten Ngawi berkomitmen untuk mengintegrasikan aspek perlindungan geoheritage ke dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Geoheritage, yang menekankan pentingnya pelestarian warisan geologi sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Pemerintah daerah juga mengupayakan pengusulan beberapa lokasi geosite untuk mendapatkan penetapan sebagai Geoheritage Nasional, serta mendorong integrasinya dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Dengan demikian, pengembangan geoheritage di Kabupaten Ngawi bukan hanya upaya konservasi alam, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat identitas daerah dan daya saing wilayah. Pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Ngawi sebagai kawasan yang seimbang antara kemajuan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan potensi warisan bumi paling kaya di Jawa Timur.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan pilar utama dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD, karena kesejahteraan menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah yang berpihak pada rakyat. Dalam konteks RPJMD, kesejahteraan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga mencakup kualitas hidup yang lebih luas, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan layak, pekerjaan yang memadai, serta lingkungan hidup yang sehat.



Gambar 2.17 Persentase Pemukiman yang Sehat dan Aman Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, 2025

Pemukiman yang sehat dan aman merupakan salah satu prasyarat mendasar dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, serta menjadi indikator penting dalam pembangunan lingkungan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, dan berketahanan. Di Kabupaten Ngawi, capaian indikator pemukiman sehat dan aman menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Meskipun pada tahun 2020 tidak tersedia data yang dapat dijadikan acuan kuantitatif, capaian pada tahun-tahun berikutnya memperlihatkan fluktuasi yang cukup mencolok.

Pada tahun 2021, persentase pemukiman yang memenuhi kriteria sehat dan aman tercatat sebesar 71,89%, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi 46,82%. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya tantangan dalam aspek pemenuhan sanitasi dasar, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta aspek tata ruang yang mendukung kesehatan lingkungan. Kendati demikian, intervensi strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah terbukti mampu membalikkan tren tersebut, ditunjukkan oleh peningkatan signifikan pada tahun 2023 menjadi 75,90%, dan terus berlanjut hingga mencapai 76,90% pada tahun 2024.

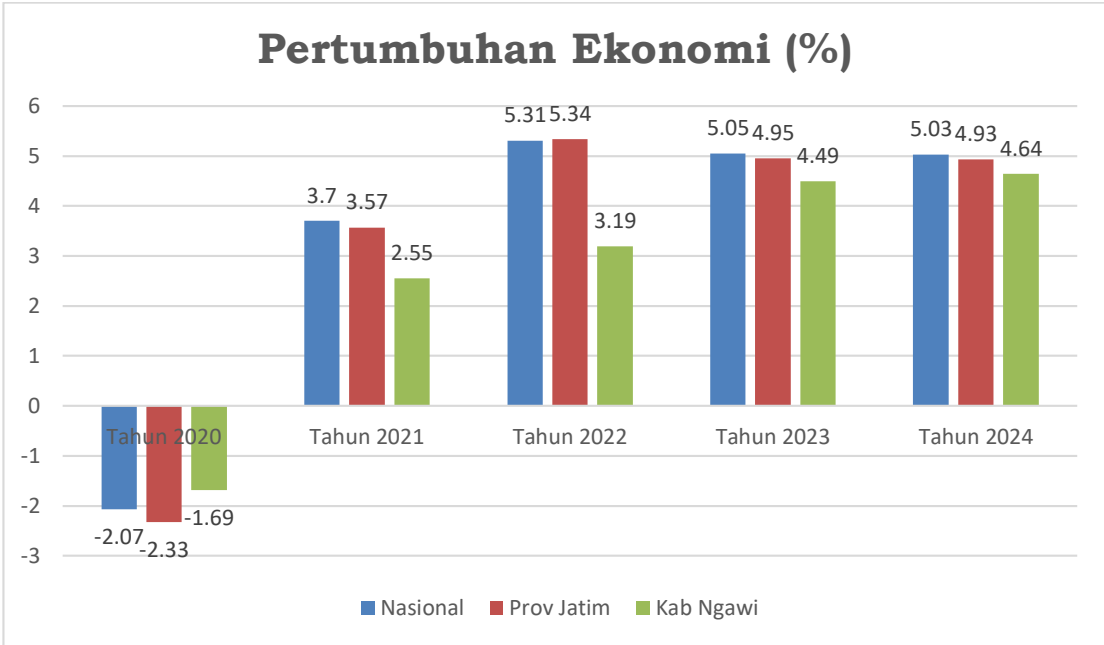
Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan substansial dalam upaya penataan lingkungan permukiman, yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan ekologis. Dengan demikian, indikator ini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kualitas hidup masyarakat dan ketahanan lingkungan jangka panjang.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu fokus strategis dalam RPJMD sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.



2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 2.18 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

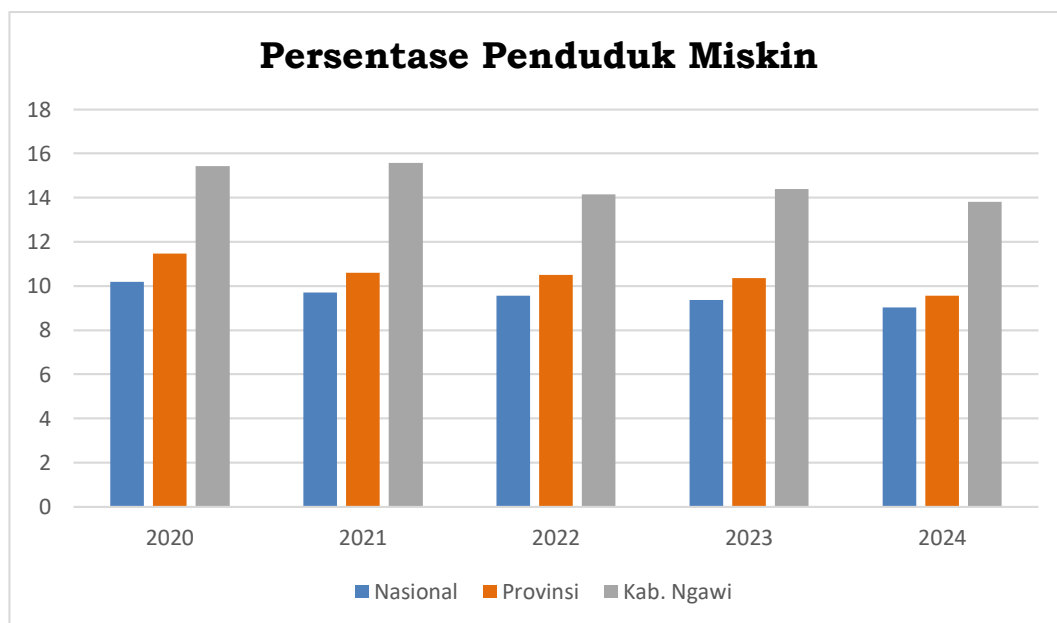
Data pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa Kabupaten Ngawi mengalami kontraksi signifikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, dengan pertumbuhan sebesar -2,39%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (-2,07%) dan provinsi (-2,33%). Namun, sejak 2021, pertumbuhan ekonomi mulai pulih seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan regional. Meskipun demikian, Kabupaten Ngawi masih tertinggal dari capaian nasional dan provinsi, dengan pertumbuhan yang lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur dan Indonesia, terutama pada tahun 2022 dan 2023.

Kondisi ini disebabkan oleh ketergantungan Kabupaten Ngawi pada sektor pertanian yang lebih rentan terhadap variabilitas cuaca dan fluktuasi harga komoditas. Selain itu, struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor primer membuat akselerasi pemulihan lebih lambat dibandingkan daerah dengan sektor industri dan jasa yang lebih berkembang. Keterbatasan investasi, infrastruktur ekonomi yang belum optimal, serta daya saing tenaga kerja juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan yang lebih cepat.

Untuk proyeksi lima tahun ke depan dalam RPJMD 2025-2029, diperlukan strategi penguatan ekonomi daerah yang lebih terarah. Diversifikasi ekonomi menjadi hal utama dengan mendorong hilirisasi produk pertanian, pengembangan sektor pariwisata berbasis lokal, serta peningkatan daya saing industri kecil dan menengah. Selain itu, optimalisasi infrastruktur pendukung investasi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan strategi ini, diharapkan Kabupaten Ngawi dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, mendekati bahkan melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk yang berada di bawah persentase penduduk miskin (GK). Seperti yang digambarkan tabel di bawah, persentase penduduk miskin di Kabupaten Ngawi dalam kurun 5 tahun terakhir menurun.



Gambar 2.19 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Dari tahun 2020 hingga 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Ngawi menunjukkan tren penurunan yang stabil. Walaupun terdapat fluktuasi ringan dari tahun ke tahun, angka

kemiskinan di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan yang konsisten. Ini mencerminkan adanya upaya dan kebijakan yang cukup efektif dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, meskipun tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan inflasi dan ketidakmerataan pembangunan antar wilayah.

Meskipun persentase kemiskinan di Kabupaten Ngawi lebih rendah dibandingkan dengan provinsi dan nasional pada tahun 2020 hingga 2024, angka kemiskinan Kabupaten Ngawi tetap menunjukkan kesenjangan yang signifikan dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional dan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan, kemiskinan masih menjadi masalah besar di Kabupaten Ngawi yang memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpendapatan rendah.

Pada tahun 2022 dan 2023, meskipun ada penurunan dalam persentase penduduk miskin, angka kemiskinan di Kabupaten Ngawi mengalami sedikit peningkatan dalam konteks relatif terhadap tahun sebelumnya. Penurunan kemiskinan yang tidak terlalu signifikan selama dua tahun tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti inflasi, kenaikan harga bahan pokok, dan ketidakstabilan ekonomi yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat, sehingga menghambat pengentasan kemiskinan secara lebih cepat.

Berdasarkan analisis persentase penduduk miskin di Kabupaten Ngawi yang menunjukkan penurunan stabil namun masih terdapat fluktuasi, hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada perbaikan, masih banyak tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, perlu dilakukan langkah-langkah pembangunan yang lebih terfokus dan terintegrasi, baik dalam pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta kebijakan sosial yang lebih inklusif.

Untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih signifikan, Kabupaten Ngawi harus memperkuat pemberdayaan ekonomi, terutama di sektor pertanian dan UMKM. Program



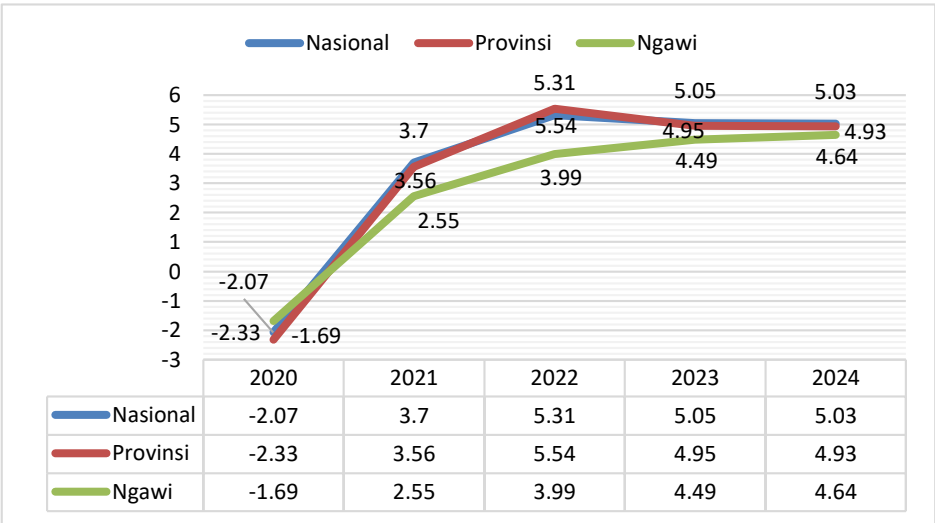
pelatihan keterampilan, bantuan modal, serta dukungan terhadap produk lokal akan meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin. Fokus pada peningkatan akses pasar dan pengembangan sektor-sektor ekonomi berbasis lokal akan membantu meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Infrastruktur yang merata menjadi salah satu kunci untuk menurunkan angka kemiskinan. Kabupaten Ngawi harus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pasar, dan fasilitas kesehatan, terutama di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dengan infrastruktur yang lebih baik, distribusi barang dan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain pemberdayaan ekonomi, kebijakan perlindungan sosial harus lebih terfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Program jaminan sosial yang lebih inklusif, seperti bantuan sosial yang tepat sasaran dan peningkatan akses ke layanan kesehatan gratis, akan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang paling rentan. Penguatan program-program bantuan yang menysasar kelompok miskin secara langsung akan mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketergantungan mereka pada sektor ekonomi yang rentan.



2.2.1.3 Pertumbuhan PDRB Per Kapita



Gambar 2.20 Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Ngawi mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, dengan penurunan sebesar -1,69%, lebih baik dibandingkan provinsi (-2,33%) namun masih lebih rendah dari nasional (-2,07%). Pemulihan ekonomi mulai terjadi sejak 2021 dengan pertumbuhan sebesar 2,55%, tetapi masih tertinggal dari nasional (3,7%) dan provinsi (3,56%). Pada 2022, pertumbuhan PDRB per kapita meningkat signifikan menjadi 3,99%, meskipun tetap lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional yang berada di atas 5%. Tren ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di Ngawi berjalan lebih lambat dibandingkan daerah lain, meskipun tetap mengalami perbaikan hingga tahun 2024 dengan pertumbuhan mencapai 4,64%.

Lambatnya pemulihan PDRB per kapita di Kabupaten Ngawi disebabkan oleh dominasi sektor pertanian dalam struktur ekonomi, yang cenderung memiliki nilai tambah rendah dibandingkan sektor industri dan jasa. Selain itu, keterbatasan investasi di sektor ekonomi produktif dan masih rendahnya daya saing tenaga kerja juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan. Jika tren ini terus berlanjut, kesenjangan ekonomi dengan daerah

lain akan semakin melebar, serta memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan PDRB per kapita harus menjadi prioritas. Diversifikasi ekonomi dengan mendorong industri pengolahan berbasis pertanian, pengembangan pariwisata lokal, serta peningkatan daya saing sektor jasa dapat menjadi solusi. Selain itu, perbaikan infrastruktur, kemudahan investasi, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja perlu dioptimalkan guna menarik investasi di sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan pertumbuhan PDRB per kapita Ngawi dapat lebih kompetitif dan mampu mengejar ketertinggalan dari provinsi dan nasional dalam lima tahun ke depan.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator yang cukup penting dalam masalah ketenagakerjaan yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran secara konseptual didefinisikan sebagai perbandingan antara penduduk usia kerja yang menganggur dengan total penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Perkembangan capaian tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ngawi pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



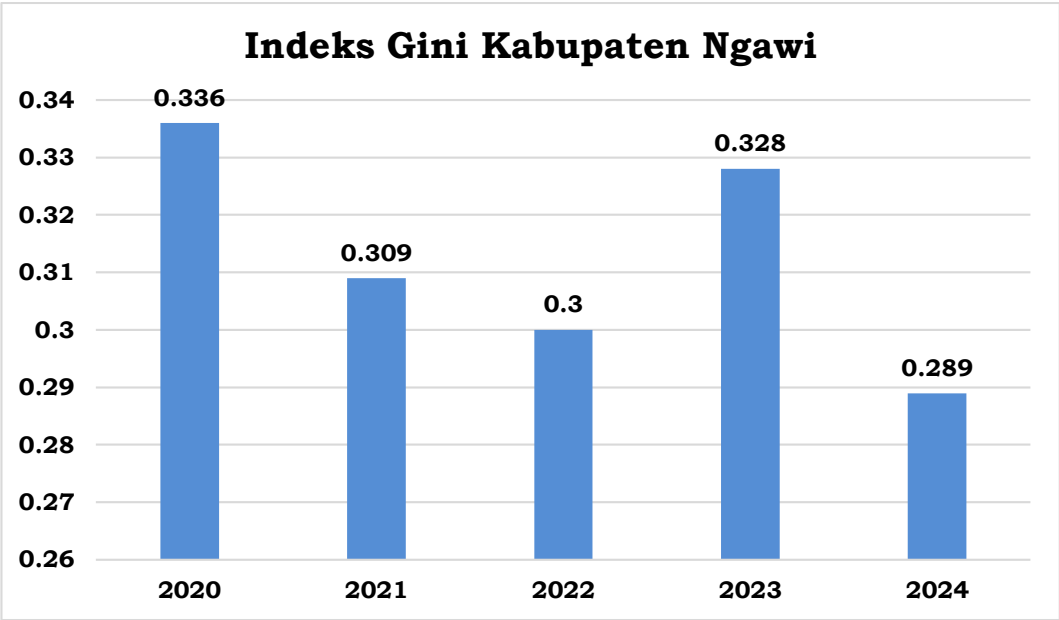
Gambar 2.21 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan signifikan, menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Jika dilihat data tersebut Stabilitas pada 2023–2024 mengindikasikan perlunya inovasi baru untuk mempercepat pertumbuhan.

Dalam proyeksi 5 tahun ke depan melihat tingkat pengangguran terbuka tentunya Kabupaten Ngawi harus konsisten dan memiliki program strategisnya, seperti halnya dalam Menjaga tren penurunan pengangguran di bawah 2%, Meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat, terutama generasi muda dan perempuan serta didukung program strategis yang dilakukan oleh dinas terkait seperti program Pelatihan Vokasi Berbasis Kompetensi, Peningkatan Kemitraan dengan Perusahaan Swasta, serta diversifikasi ekonomi lainnya untuk Kabupaten Ngawi 2025-2029.

2.2.1.5 Indeks Gini



Gambar 2.22 Indeks Gini Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Pada tahun 2020, Indeks Gini Kabupaten Ngawi tercatat cukup tinggi, menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin. Hal ini mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata, dengan sebagian besar

kekayaan terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu. Ini bisa disebabkan oleh ketidakmerataan dalam akses terhadap peluang ekonomi, baik dalam sektor pertanian maupun sektor industri.

Pada tahun 2021, terjadi penurunan Indeks Gini, yang menandakan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan di Kabupaten Ngawi. Penurunan ini bisa disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat, program bantuan sosial yang ditingkatkan, serta peningkatan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang lebih inklusif, seperti UMKM dan pertanian.

Indeks Gini sedikit stabil pada tahun 2022. Meskipun ada penurunan ketimpangan, angka ini masih menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan masih ada. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan pendapatan di beberapa sektor, namun belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Program-program peningkatan sektor pertanian dan UMKM mungkin telah memberikan manfaat, namun kesenjangan antara sektor-sektor tertentu masih terlihat.

Pada tahun 2023, terjadi sedikit lonjakan pada Indeks Gini, yang menunjukkan peningkatan ketimpangan ekonomi. Lonjakan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor eksternal atau internal, seperti inflasi yang tinggi atau ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya, seperti investasi di sektor-sektor yang lebih menguntungkan bagi sebagian kalangan saja. Meskipun ada upaya untuk menurunkan ketimpangan, beberapa sektor mungkin belum dapat mengakses manfaat dari kebijakan ekonomi.

Pada tahun 2024, Indeks Gini menunjukkan penurunan lagi, yang mencerminkan adanya upaya yang lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan distribusi hasil pembangunan, mulai memberikan hasil yang lebih merata, terutama di sektor-sektor yang sebelumnya kurang mendapat perhatian.

Berdasarkan data Indeks Gini yang menunjukkan fluktuasi ketimpangan pendapatan dari tahun 2020 hingga 2024, berikut



adalah langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh Kabupaten Ngawi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dalam lima tahun ke depan :

- a. Pemerintah Kabupaten Ngawi harus lebih fokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat yang lebih rentan, seperti petani kecil, UMKM, dan masyarakat di daerah terpencil. Melalui program-program pemberdayaan ekonomi yang meningkatkan akses kepada modal, pelatihan keterampilan, dan pemasaran produk, ketimpangan dapat dikurangi dengan memberi peluang yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkembang.
- b. Pembangunan infrastruktur harus lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi, dengan fokus pada daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian. Infrastruktur yang lebih baik, seperti akses jalan, pasar, dan fasilitas kesehatan, akan meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah dan mengurangi ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi.
- c. Mengingat bahwa sektor pertanian masih menjadi pilar utama ekonomi Kabupaten Ngawi, pemerintah daerah harus terus mengembangkan sektor ini dengan teknologi yang lebih modern dan ramah lingkungan. Selain itu, sektor industri lokal yang berbasis pada produk-produk unggulan daerah juga perlu didorong untuk memberikan nilai tambah dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- d. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang lebih merata sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ngawi. Program pelatihan yang terfokus pada keterampilan yang dibutuhkan oleh industri lokal dan sektor ekonomi unggulan akan membantu mengurangi ketimpangan, karena masyarakat akan lebih siap untuk bersaing di pasar kerja dengan pendapatan yang lebih baik.

Indeks Gini yang menunjukkan fluktuasi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Ngawi selama lima tahun terakhir

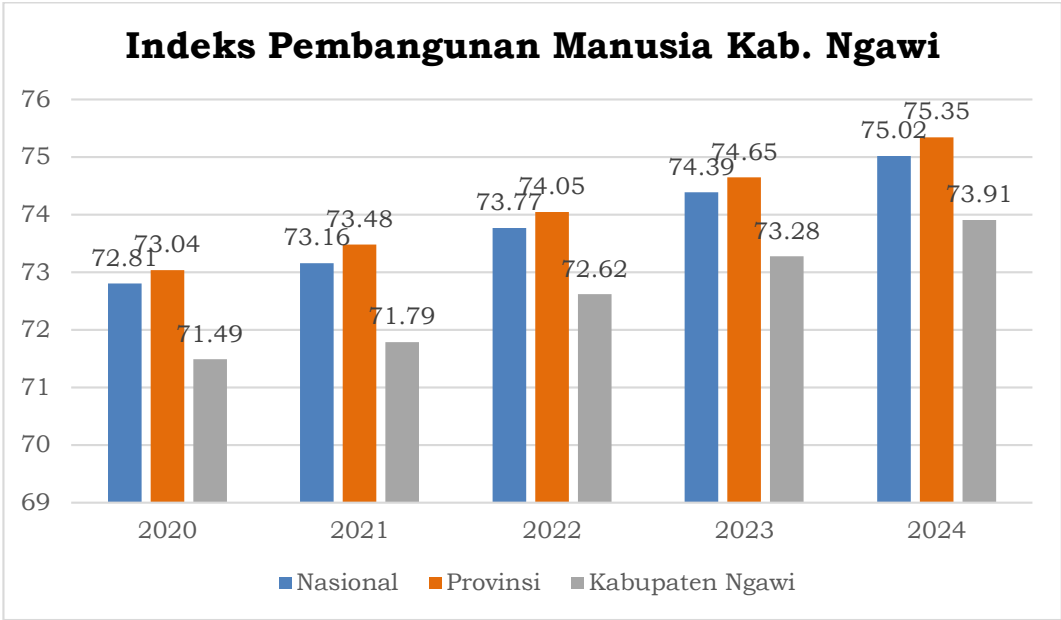
mengindikasikan bahwa meskipun ada perbaikan, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai pemerataan ekonomi. Melalui pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang merata, penguatan sektor-sektor ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pendidikan, Kabupaten Ngawi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi untuk mengetahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Indeks Pembangunan manusia dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu, Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada beberapa komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, yaitu harapan hidup, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut :





Gambar 2.23 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan dari 71,49 pada tahun 2020 menjadi 73,91 pada tahun 2024. Meskipun mengalami pertumbuhan yang positif, IPM Kabupaten Ngawi masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Ngawi, yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, masih membutuhkan percepatan dalam berbagai aspek.

Peningkatan IPM selama periode ini disebabkan oleh berbagai program pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, peningkatan angka partisipasi sekolah, dan program bantuan sosial yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan provinsi dan nasional menunjukkan bahwa tantangan masih ada, seperti keterbatasan fasilitas kesehatan dan pendidikan berkualitas, kesenjangan dalam akses layanan dasar, serta masih adanya kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Untuk proyeksi lima tahun ke depan dalam RPJMD 2025-2029, upaya peningkatan IPM harus difokuskan pada penguatan kualitas pendidikan dengan pemerataan akses hingga ke pelosok

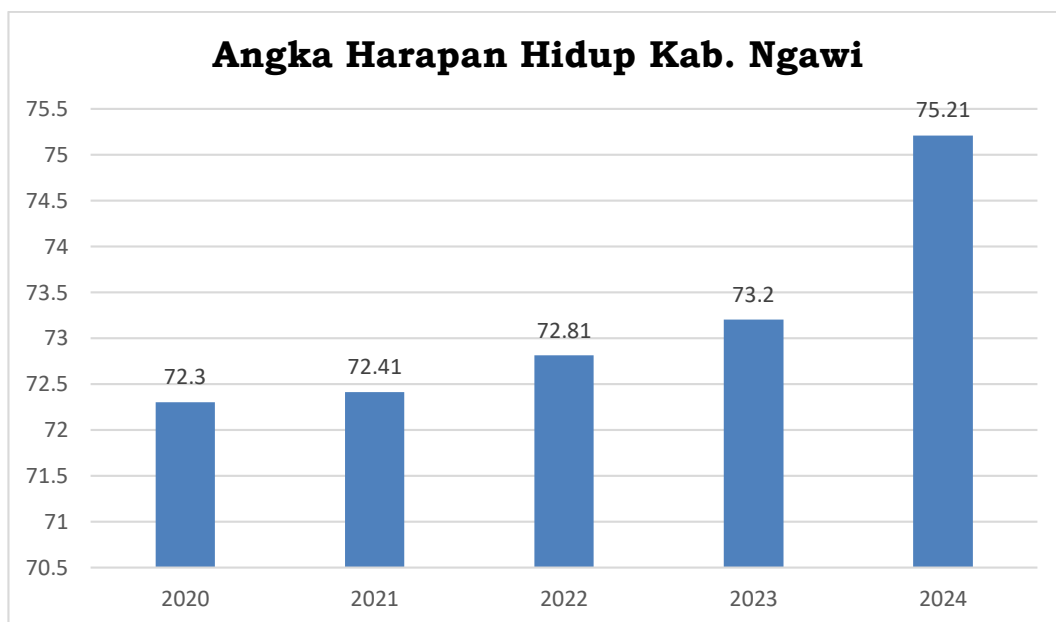


daerah, peningkatan layanan kesehatan melalui fasilitas yang lebih modern dan tenaga medis yang memadai, serta penguatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan daya beli dan taraf hidup. Selain itu, program pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan juga menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan IPM agar dapat mendekati atau bahkan melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Dengan kebijakan yang tepat dan sinergi antar sektor, diharapkan Kabupaten Ngawi dapat mencapai pertumbuhan pembangunan manusia yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

2.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas. Angka harapan hidup di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan capaian angka harapan hidup di Kabupaten Ngawi pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.24 Angka Harapan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Ngawi menunjukkan tren peningkatan dari 72,3 tahun pada 2020 menjadi



75,21 tahun pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam sektor kesehatan, termasuk akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, peningkatan kesadaran akan pola hidup sehat, serta program kesehatan masyarakat yang lebih efektif. Namun, meskipun mengalami peningkatan, AHH Kabupaten Ngawi masih perlu terus didorong agar semakin mendekati standar nasional dan provinsi.

Faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan AHH adalah meningkatnya layanan kesehatan dasar dan rujukan, penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, serta perbaikan gizi masyarakat. Selain itu, adanya program kesehatan preventif seperti imunisasi, peningkatan sanitasi, dan kampanye pola hidup sehat turut berperan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk. Namun, masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan fasilitas kesehatan di beberapa daerah terpencil, tingginya angka penyakit tidak menular akibat pola hidup yang kurang sehat, serta akses layanan kesehatan yang belum merata.

2.2.2.2 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Balita Gizi Buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Indikator yang digunakan adalah berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Selain berat dan tinggi badan, lingkaran lengan atas (LILA) juga masuk ke dalam pemeriksaan klinis gizi buruk pada balita. Kondisi gizi buruk pada balita tidak terjadi secara instan atau singkat. Artinya, balita yang masuk ke dalam kategori gizi buruk sudah mengalami kekurangan berbagai zat gizi dalam jangka waktu yang sangat lama. Kondisi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :





Gambar 2.25 Prevalensi Balita Gizi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, 2025

Prevalensi balita gizi stunting di Kabupaten Ngawi mengalami tren penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir, dari 15,20% pada tahun 2020 menjadi 9,60% pada tahun 2024. Meskipun sempat mengalami kenaikan kembali pada 2022 menjadi 13,42%, secara keseluruhan angka ini menunjukkan bahwa upaya intervensi penanggulangan stunting telah memberikan hasil positif. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah daerah dalam meningkatkan gizi ibu dan anak, penyediaan layanan kesehatan, serta edukasi tentang pola asuh dan pola makan sehat.

Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka stunting di awal periode adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, serta masih adanya kelompok rentan yang sulit mendapatkan pangan bergizi. Namun, dengan adanya program nasional dan daerah seperti bantuan pangan bergizi, edukasi ibu hamil, serta peningkatan layanan posyandu, angka stunting mulai menurun secara bertahap. Kendati demikian, tantangan masih ada, terutama dalam memastikan keberlanjutan program serta



menjangkau kelompok masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses ekonomi dan kesehatan.

Upaya percepatan eliminasi stunting harus terus diperkuat dengan strategi yang lebih sistematis. Pemerintah perlu meningkatkan cakupan program gizi bagi ibu hamil dan anak balita, memperkuat infrastruktur kesehatan seperti puskesmas dan posyandu di daerah terpencil, serta mengoptimalkan intervensi lintas sektor yang melibatkan pendidikan, sanitasi, dan kesejahteraan sosial. Penguatan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan komunitas lokal, juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak yang lebih sehat. Dengan langkah-langkah strategis ini, Kabupaten Ngawi dapat mencapai target penurunan stunting yang lebih optimal dan mendekati standar nasional dalam lima tahun mendatang.

Seiring dengan terbitnya berbagai regulasi terbaru, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, maka peran Posyandu mengalami perluasan fungsi. Posyandu tidak lagi hanya diposisikan sebagai sarana pelayanan kesehatan semata, melainkan juga menjadi pusat layanan terpadu yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini menunjukkan adanya paradigma baru bahwa Posyandu bertransformasi menjadi simpul layanan dasar masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

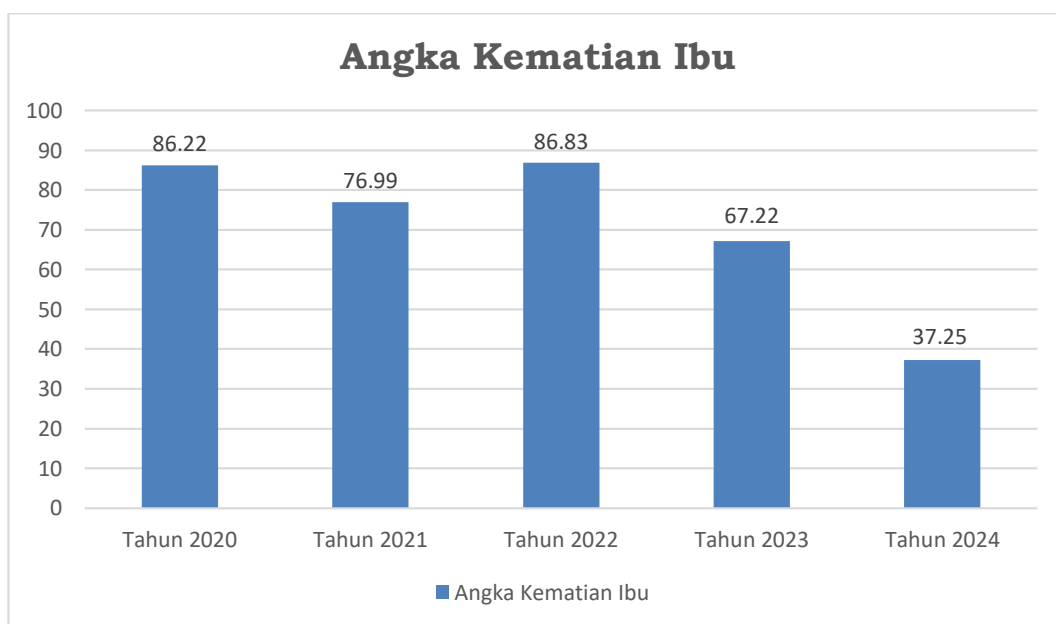
Untuk mendukung pemahaman yang sama terkait transformasi ini, maka diperlukan sinergi lintas sektor dan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah pengampu SPM. Setiap perangkat daerah harus memberikan dukungan sesuai dengan kewenangannya, sehingga pelaksanaan “new Posyandu” dapat berjalan optimal. Dengan demikian, Posyandu akan semakin kuat sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan dasar yang



komprehensif kepada masyarakat, serta berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Ngawi.

2.2.2.3 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu adalah satu indikator penting dalam pembangunan bidang kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak, adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu secara konseptual didefinisikan sebagai jumlah kematian ibu akibat kehamilan, persalinan, dan nifas per 100.000 kelahiran hidup. Perkembangan capaian Angka Kematian Ibu di Kabupaten Ngawi pada tahun 2020–2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.26 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Ngawi Tahun 2020–2024

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, 2025

Dalam lima tahun terakhir, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Ngawi menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, dari 86,22 pada tahun 2020 menjadi 37,25 pada tahun 2024, meskipun sempat meningkat pada tahun 2022 menjadi 86,83. Penurunan tajam AKI pada tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam layanan kesehatan ibu, termasuk peningkatan kualitas pelayanan persalinan, ketersediaan tenaga kesehatan, dan intervensi preventif

seperti skrining risiko kehamilan dan edukasi kesehatan reproduksi.

Melihat tren tersebut, ke depan Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu mempertahankan capaian positif ini dengan memperkuat program seperti Peningkatan Cakupan ANC (Antenatal Care), pemantauan kehamilan berisiko tinggi, serta penguatan sistem rujukan dan akses pelayanan di daerah terpencil, dalam rangka mewujudkan target nasional penurunan AKI menuju angka di bawah 30 per 100.000 kelahiran hidup pada periode RPJMD 2025–2029.

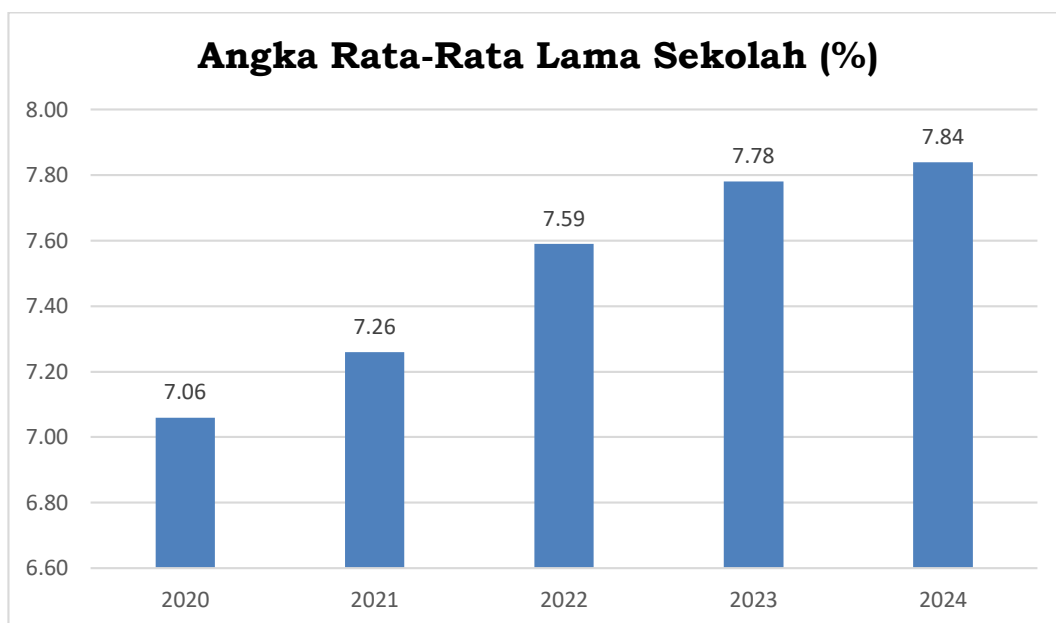
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kunci menuju kesejahteraan jangka panjang. Dalam kerangka RPJMD, upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata menjadi prioritas strategis guna menciptakan masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan inklusif.

2.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah juga merupakan indikator yang mempengaruhi nilai IPM. Perkembangan capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Ngawi 2020-2024 berikut ini :





Gambar 2.27 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Dari tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Ngawi menunjukkan tren positif dalam angka rata-rata lama sekolah, yang mengalami peningkatan bertahap setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam kualitas pendidikan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses pendidikan lebih lama, meskipun angka tersebut masih terbilang rendah dibandingkan dengan target nasional. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan kebijakan pendidikan daerah dalam memfasilitasi kesempatan pendidikan bagi masyarakat.

Meskipun ada kenaikan dalam rata-rata lama sekolah, tantangan terbesar adalah memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi, terutama di daerah-daerah terpencil. Meskipun beberapa wilayah menunjukkan peningkatan, angka tersebut masih dipengaruhi oleh ketidaksetaraan dalam distribusi layanan pendidikan dan kualitas fasilitas yang ada. Oleh karena itu, meskipun ada kemajuan, masih ada ketimpangan dalam hal akses pendidikan yang perlu diperbaiki.

Meskipun rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan yang stabil, laju peningkatannya masih perlu dipercepat untuk mengejar ketertinggalan dengan tingkat nasional. Meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat dasar dan menengah akan sangat





membantu mempercepat pencapaian ini. Program-program yang lebih fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta pencegahan putus sekolah, sangat penting untuk memastikan bahwa lebih banyak anak di Kabupaten Ngawi bisa menyelesaikan pendidikan lebih lama.

Berdasarkan analisis yang menunjukkan tren peningkatan rata-rata lama sekolah, untuk mempercepat laju perbaikan proyeksi pembangunan di Kabupaten Ngawi ke depan harus fokus pada pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan pengembangan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri untuk mendukung pencapaian tersebut.

Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, Kabupaten Ngawi harus fokus pada peningkatan infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Meningkatkan fasilitas sekolah dan transportasi akan mempermudah akses ke pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota, sehingga mereka dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa hambatan geografis.

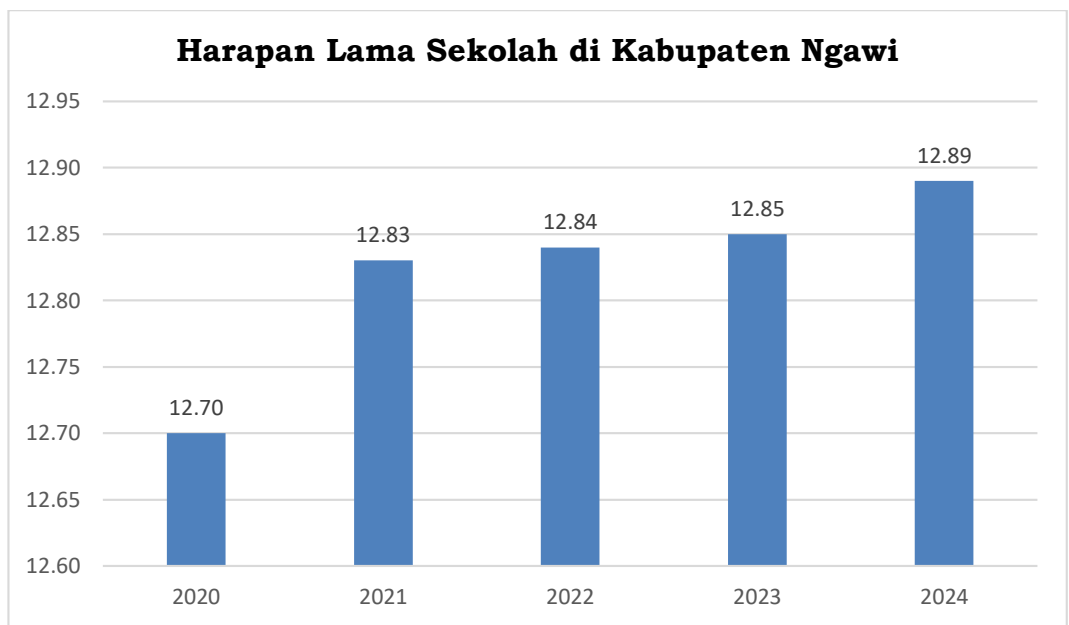
Kualitas pengajaran adalah faktor kunci dalam peningkatan lama sekolah. Kabupaten Ngawi perlu lebih fokus pada pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengajarkan siswa dengan lebih efektif. Guru yang berkualitas akan berperan langsung dalam meningkatkan motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah.

Untuk memastikan bahwa pendidikan memberikan dampak langsung pada peningkatan keterampilan dan daya saing, Kabupaten Ngawi perlu mengembangkan pendidikan vokasi yang lebih berorientasi pada industri dan teknologi. Dengan menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, terutama bagi mereka yang mungkin tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi, dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan lebih lanjut dan membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap bersaing.



2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perkembangan capaian harapan lama sekolah di Kabupaten Ngawi pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.28 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Dari tahun 2020 hingga 2024, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Ngawi menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang lebih lama. Meskipun ada peningkatan setiap tahun, angka harapan lama sekolah ini masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan target nasional yang lebih tinggi, yang mencerminkan kebutuhan untuk memperbaiki kualitas dan akses pendidikan lebih lanjut.

Peningkatan angka harapan lama sekolah dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam memastikan masyarakat memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan lebih lama, terutama pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Angka ini menunjukkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, namun tantangan besar tetap ada dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang



setara untuk menyelesaikan pendidikan dasar hingga jenjang lebih tinggi.

Meskipun angka harapan lama sekolah mengalami peningkatan, tantangan utama yang harus diatasi adalah memastikan kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak siswa yang mungkin kesulitan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi akibat keterbatasan akses, biaya, atau kurangnya fasilitas pendidikan yang mendukung. Meningkatkan angka kelulusan dan keberlanjutan pendidikan ke jenjang lebih tinggi perlu menjadi perhatian utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Ngawi.

Untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah, Kabupaten Ngawi perlu fokus pada pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih mengalami kesulitan dalam hal infrastruktur pendidikan. Pengembangan fasilitas pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di daerah ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk mengenyam pendidikan yang lebih lama dan berkualitas.

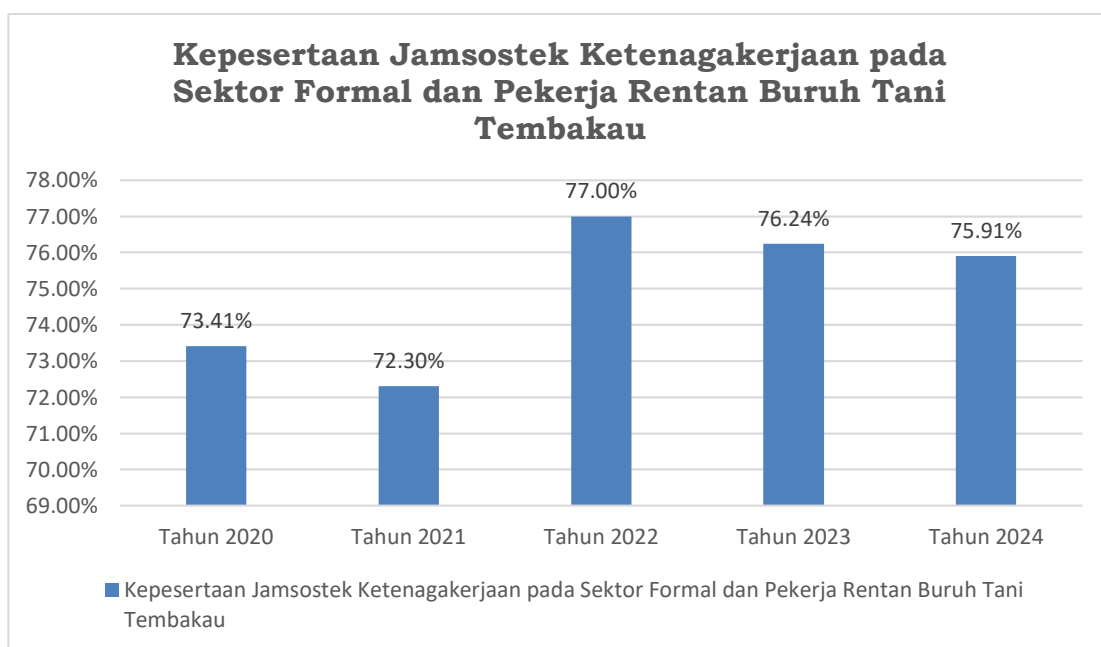
Mengingat pentingnya transisi yang lancar dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, Kabupaten Ngawi harus memperkuat pendidikan vokasi yang berbasis pada industri dan teknologi. Program pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja akan mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang relevan, sehingga mengurangi angka putus sekolah di jenjang yang lebih tinggi dan meningkatkan partisipasi dalam pendidikan lanjutan.

Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik adalah faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kabupaten Ngawi perlu mengimplementasikan program pelatihan dan sertifikasi untuk guru agar mereka dapat memberikan pendidikan yang lebih baik dan relevan bagi siswa. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru akan berkontribusi pada perbaikan capaian pendidikan di seluruh tingkat sekolah, yang pada gilirannya akan meningkatkan angka harapan lama sekolah di masa depan.



2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan skema perlindungan sosial yang komprehensif untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan membangun ketahanan individu, rumah tangga, dan komunitas akibat bencana dan perubahan iklim. Perlindungan Sosial yang adaptif akan membantu individu, rumah tangga, dan masyarakat dengan memadukan konsep dan instrumen utama perlindungan sosial, manajemen risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim. Tujuannya untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.



Gambar 2.29 Kepesertaan Jamsostek Ketenagakerjaan pada Sektor Formal dan Pekerja Rentan Buruh Tani Tembakau
Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, 2025

Tingkat kepesertaan Jamsostek Ketenagakerjaan pada sektor formal dan pekerja rentan buruh tani tembakau di Kabupaten Ngawi menunjukkan dinamika fluktuatif sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, kepesertaan tercatat sebesar 73,41%, namun mengalami penurunan menjadi 72,30% pada tahun 2021.



Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan perlindungan sosial bagi pekerja, khususnya kelompok rentan di sektor pertanian tembakau.

Meski demikian, pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan dengan tingkat kepesertaan mencapai 77,00%, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode tersebut. Peningkatan ini menunjukkan adanya langkah nyata pemerintah maupun pemangku kepentingan dalam memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja, baik melalui regulasi maupun dorongan program subsidi iuran bagi pekerja rentan. Akan tetapi, capaian positif ini tidak sepenuhnya bertahan, karena pada tahun 2023 dan 2024 persentase kepesertaan mengalami sedikit penurunan, masing-masing menjadi 76,24% dan 75,91%.

Secara keseluruhan, tren ini memperlihatkan bahwa meskipun tingkat kepesertaan Jamsostek bagi pekerja sektor formal dan buruh tani tembakau relatif tinggi di atas 70%, terdapat kebutuhan untuk memperkuat strategi keberlanjutan. Pemerintah daerah bersama lembaga terkait perlu fokus pada upaya memperluas cakupan peserta baru, mempertahankan kepesertaan yang sudah ada, serta memberikan perlindungan yang lebih inklusif bagi pekerja rentan. Dengan demikian, ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi buruh tani tembakau, dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

2.2.5 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Selama periode 2020 hingga 2024, tingkat ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Ngawi berada dalam kondisi yang relatif kondusif, sebagaimana tercermin dalam capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum yang secara konsisten menunjukkan tren positif. Stabilitas sosial ini merupakan hasil dari kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan mendorong penyelesaian konflik secara damai.

Upaya penegakan hukum yang terukur, peningkatan kapasitas aparaturnya dalam penanganan gangguan ketertiban umum,



serta pelaksanaan program pencegahan berbasis masyarakat, turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ngawi juga secara berkelanjutan mengimplementasikan kebijakan yang responsif terhadap potensi gangguan sosial, termasuk penguatan sistem deteksi dini dan penanganan konflik horizontal.

Kondisi ketentraman dan ketertiban yang terjaga ini menjadi landasan penting dalam mendukung stabilitas daerah, memperkuat kohesi sosial, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, pelayanan publik, dan pembangunan berkelanjutan.



Tabel 2.18 Permasalahan Sosial Menurut Jenisnya di Kabupaten Ngawi Tahun 2024

Kecamatan	*Anak Keluarga Miskin	Pengemis/G elandagan	PSK	Korban Narkoba	Anak Nakal	Mantan Napi	Penyandang Cacat	Korban Kekerasan	Korban Bencana Alam	*Wanita Sosial-Ekonomi	*Rumah Tangga Fakir Miskin	*Lanjut usia Keluarga Miskin	*Anak Balita Keluarga Miskin	Anak Jalanan	Lainnya
Sine	-	-	-	-	-	-	204	-	5	-	9.473	5.168	1.385	-	-
Ngrambe	-	-	-	-	-	-	238	-	-	-	9.027	4.970	1.343	-	-
Jogorogo	-	-	-	-	-	-	210	-	-	-	10.042	5.341	1.622	-	-
Kenda	-	-	-	-	-	-	190	-	-	-	12.151	6.572	1.849	-	-
Geneng	-	-	-	-	-	-	185	-	1	-	10.831	4.400	979	-	-
Gerih	-	-	-	-	-	-	338	-	-	-	8.211	5.582	1.134	-	-
Kwandungan	-	-	-	-	-	-	155	-	1	-	6.665	3.806	773	-	-
Pangkur	-	-	-	-	-	-	242	-	1	-	8.545	4.665	990	-	-
Karangjati	-	-	-	-	-	-	344	-	1	-	13.631	7.629	1.539	-	-
Bringin	-	-	-	-	-	-	285	-	-	-	10.413	5.130	1.152	-	-
Padas	-	-	-	-	-	-	250	-	5	-	10.450	5.008	1.389	-	-
Kasreman	-	-	-	-	-	-	152	-	-	-	6.927	3.415	820	-	-
Ngawi	-	-	-	-	-	-	290	-	290	-	14.262	6.836	1.937	-	-
Paron	-	-	-	-	-	-	471	-	4	-	20.881	10.443	2.584	-	-
Kedunggalar	-	-	-	-	-	-	382	-	3	-	15.804	8.531	1.691	-	-
Pitu	-	-	-	-	-	-	169	-	-	-	7.269	3.999	957	-	-



Kecamatan	*Anak Keluarga Miskin	Pengemis/G elandagan	PSK	Korban Narkoba	Anak Nakal	Mantan Napi	Penyandang Cacat	Korban Kekerasan	Korban Bencana Alam	*Wanita Sosial-Ekonomi	*Rumah Tangga Fakir Miskin	*Lanjut usia Keluarga Miskin	*Anak Balita Keluarga Miskin	Anak Jalanan	Lainnya
Widodaren	-	-	-	-	-	-	332	-	2	-	15.678	7.879	1.078	-	-
Mantingan	-	-	-	-	-	-	181	-	1	-	6.581	3.526	774	-	-
Karanganyar	-	-	-	-	-	-	159	-	1	-	7.878	4.429	1.144	-	-
Realisasi Tahun 2024	-	-	-	-	-	-	4.777	-	315	-	204.719	107.409	26.140	-	-
Realisasi Tahun 2023	111.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025



2.2.6 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

“Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju” mencerminkan pembangunan yang menyeimbangkan antara spiritualitas yang inklusif dan kemajuan peradaban lokal yang adaptif. Nilai-nilai agama dijadikan landasan untuk mendorong kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sementara kebudayaan dijadikan ruang ekspresi kolektif yang terus dikembangkan melalui inovasi, pelestarian warisan tradisi, dan penguatan identitas lokal. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya diajak untuk menjalankan ajaran agama secara kontekstual dan produktif, tetapi juga turut berperan dalam membangun peradaban yang terbuka, kreatif, dan berdaya saing, sehingga terwujud kehidupan berbangsa yang berakar pada nilai-nilai luhur namun mampu menjawab tantangan zaman.

2.2.7 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan secara terukur dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2022, IPK bertujuan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan bidang kebudayaan, sekaligus sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam memajukan kebudayaan. Indeks ini menegaskan bahwa kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai identitas dan warisan, tetapi juga sebagai sumber daya strategis dalam pembangunan manusia dan penguatan karakter bangsa.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan bidang kebudayaan secara lebih terukur, komprehensif, dan berkelanjutan. IPK berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai sejauh mana kebudayaan berkontribusi terhadap pembangunan manusia dan daerah, serta menjadi dasar perumusan kebijakan untuk memperkuat identitas, ketahanan, dan daya saing kebudayaan lokal. Dalam konteks Kabupaten Ngawi, IPK menjadi



indikator penting untuk menggambarkan kondisi dan dinamika kebudayaan daerah yang kaya akan nilai-nilai historis, kearifan lokal, tradisi masyarakat agraris, serta peninggalan sejarah yang menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Ngawi.

Sebagai indikator baru, IPK dibentuk oleh beberapa faktor utama yang mencerminkan dimensi pembangunan kebudayaan secara nasional, yaitu :

1. Dimensi Ekspresi dan Aktivitas Seni Budaya, yang diukur melalui jumlah kelompok seni budaya yang aktif (misalnya sanggar tari, karawitan, teater rakyat, dan musik tradisional), frekuensi pagelaran dan festival budaya yang diselenggarakan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan daerah.
2. Dimensi Pelestarian dan Warisan Budaya, yang mencakup jumlah situs cagar budaya, benda dan takbenda warisan budaya yang telah terdaftar atau ditetapkan, serta kegiatan pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, seperti revitalisasi situs sejarah, pemeliharaan makam leluhur, dan dokumentasi tradisi lisan.
3. Dimensi Pendidikan dan Literasi Budaya, yang dapat diukur melalui integrasi muatan lokal budaya Ngawi dalam kurikulum sekolah, jumlah sekolah atau komunitas yang melaksanakan program edukasi berbasis budaya, serta tingkat keterlibatan generasi muda dalam kegiatan kesenian dan tradisi lokal.
4. Dimensi Infrastruktur dan Akses Kebudayaan, yang diukur dari ketersediaan sarana kebudayaan seperti gedung kesenian, taman budaya, rumah budaya desa, museum daerah, serta aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas tersebut.
5. Dimensi Ketahanan Sosial dan Identitas Budaya, yang menggambarkan tingkat keberlanjutan nilai-nilai budaya dalam memperkuat karakter masyarakat, solidaritas sosial, dan toleransi antarkelompok.



Dengan demikian, pembangunan kebudayaan di Kabupaten Ngawi diarahkan untuk memperkuat ekosistem kebudayaan yang produktif dan berkelanjutan, di mana indikator IPK menjadi panduan dalam memantau capaian dan efektivitas program kebudayaan lintas sektor. Melalui optimalisasi peran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Ngawi menargetkan peningkatan skor IPK secara bertahap sepanjang periode 2025–2029, seiring dengan tumbuhnya aktivitas seni budaya, terjaganya warisan budaya lokal, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan daerah.

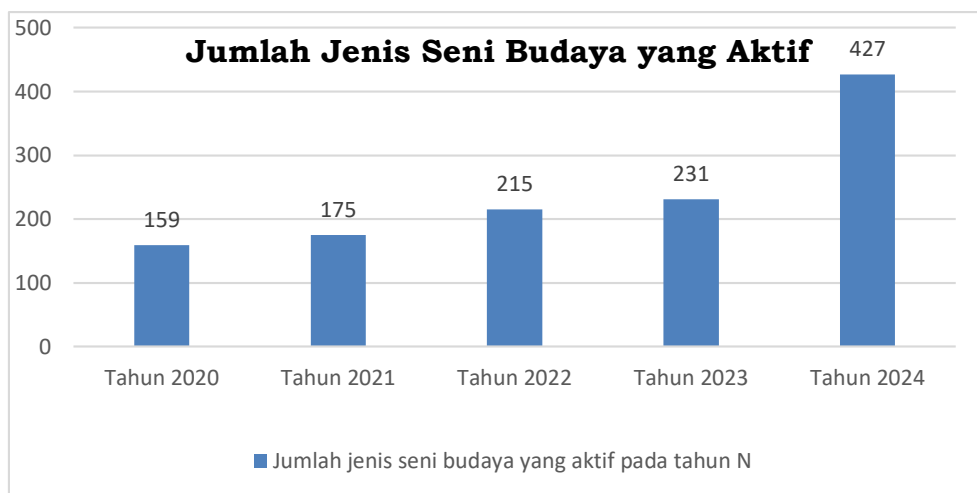
Dalam konteks implementasi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Ngawi, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah dimensi ekspresi budaya, yaitu aktivitas masyarakat dalam menciptakan, menampilkan, dan melestarikan karya seni dan tradisi. Dimensi ini menggambarkan tingkat vitalitas budaya lokal serta sejauh mana masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kesenian. Oleh karena itu, pengukuran terkait jumlah dan jenis seni budaya aktif menjadi indikator penting untuk memahami dinamika kehidupan budaya di daerah.

Jumlah jenis seni budaya aktif mencerminkan keberagaman dan keberlangsungan kegiatan seni yang tumbuh di masyarakat baik seni pertunjukan, seni rupa, musik, tari, teater, sastra, maupun ekspresi budaya lainnya. Indikator ini tidak hanya menunjukkan kekayaan warisan budaya daerah, tetapi juga menjadi tolok ukur produktivitas pelaku budaya dalam menghidupkan ruang-ruang kreatif. Semakin banyak jenis seni yang aktif dan difasilitasi oleh Kabupaten Ngawi, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan nilai dimensi ekspresi budaya dalam IPK.

Dengan demikian, data mengenai jumlah jenis seni budaya aktif memiliki peran strategis dalam memperkuat capaian IPK, khususnya dalam mewujudkan ekosistem kebudayaan yang dinamis, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui pemetaan dan



pembinaan terhadap komunitas seni aktif, pemerintah Kabupaten Ngawi dapat memastikan bahwa kebijakan pemajuan kebudayaan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar mendorong tumbuhnya kreativitas, pelestarian, serta regenerasi pelaku seni di tingkat daerah.



Gambar 2.30 Jumlah Jenis Seni Budaya yang Aktif Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, 2025

Berdasarkan data jumlah jenis seni budaya yang aktif di Kabupaten Ngawi selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah seni budaya yang aktif tercatat sebanyak 159 jenis, kemudian meningkat menjadi 175 jenis pada tahun 2021. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2022 dengan 215 jenis, dan naik lagi menjadi 231 jenis pada tahun 2023.

Kenaikan paling tajam terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah jenis seni budaya yang aktif melonjak hampir dua kali lipat menjadi 427 jenis. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelestarian dan pengaktifan kembali berbagai ekspresi budaya lokal di Kabupaten Ngawi mendapat perhatian yang semakin besar, baik dari masyarakat, komunitas budaya, maupun dukungan pemerintah daerah.

Tren ini mencerminkan semangat revitalisasi kebudayaan yang kuat, serta keberhasilan berbagai program fasilitasi, pembinaan, dan ruang ekspresi seni yang diberikan dalam beberapa



tahun terakhir. Lonjakan pada tahun 2024 juga dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Ngawi sebagai daerah yang kaya akan keberagaman seni budaya.

2.2.7.1 Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan

Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) merupakan dokumen strategis yang merumuskan kondisi, permasalahan, dan potensi pemajuan kebudayaan di Kabupaten Ngawi. Penyusunannya menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa kebudayaan ditempatkan sebagai hulu dari segala proses pembangunan. Melalui pemetaan objek kebudayaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang ada, PPKD memberikan arah yang jelas untuk melindungi warisan budaya, mengembangkan ekspresi seni kontemporer, dan memanfaatkan kekayaan budaya sebagai motor penggerak ekonomi kreatif dan pariwisata. Narasi pembangunan daerah yang bersumber dari PPKD memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki akar budaya yang kuat, relevan dengan konteks lokal, serta mampu memperteguh jati diri dan kebanggaan masyarakat Ngawi.

Dalam hal identifikasi kondisi permasalahan dan rekomendasi nya, maka terdapat penjabaran permasalahan dan rekomendasi PPKD Kabupaten Ngawi, yakni sebagai berikut :

PELINDUNGAN

- a. Pemda belum mengelola dengan baik dokumentasi, arsip, kajian, dan data-data tentang Objek Pemajuan Kebudayaan di Ngawi.
- b. Objek Diduga Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan banyak yang belum dapat diidentifikasi oleh masyarakat, sehingga keberadaan dan kondisi ODCB dan OPK tidak mudah dideteksi.
- c. Belum adanya kesepahaman dan koordinasi yang sistematis dan terintegrasi baik antar dinas, maupun dari desa hingga tingkat kabupaten, tentang upaya bersama dalam Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.





- d. Penghargaan kepada para pegiat atau para tenaga budaya senior yang telah menyokong objek pemajuan kebudayaan di Ngawi perlu ditingkatkan. Jika memungkinkan, Pemda atau Dewan Kesenian membantu mengajukan para maestro OPK di Ngawi, untuk mendapatkan Anugerah Kebudayaan Indonesia.
- e. Perubahan media dan gaya komunikasi generasi yang lebih muda, menjadikan beberapa Objek Pemajuan Kebudayaan rentan tidak bertahan tergerus zaman, karena belum dilakukan adaptasi media.
- f. Strategi regenerasi nilai-nilai luhur warisan budaya baik dalam lembaga maupun masyarakat luas perlu mendapat perhatian khusus dan dikaji secara mendalam oleh Pemerintah. Hal tersebut untuk menyiapkan generasi penerus dalam menghadapi tantangan derasnya bermacam arus komunikasi dan informasi melalui media baru, yang dapat mengikis keluhuran nilai-nilai dan kearifan lokal.
- g. Perlu ada peningkatan program ajar tentang pengenalan Objek-objek Kebudayaan Ngawi kepada generasi muda, baik secara formal di sekolah/universitas, maupun secara informal melalui media baru.

PEMANFAATAN

- a. Ketidaktahuan masyarakat tentang Objek Diduga Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan Ngawi menyebabkan kepedulian dan potensi pemanfaatan objek-objek tersebut belum optimal.
- b. Banyak diantara pelaku seni budaya yang belum mengetahui cara mendaftarkan baik hak cipta, maupun hak atas kekayaan intelektual atas karya-karya mereka, sehingga mereka belum mendapatkan manfaat yang layak bagi kesejahteraan.
- c. Koordinasi dan kerjasama antar pengampu bidang kebudayaan masih kurang. Hal tersebut karena kurangnya kesadaran tentang keterkaitan antar Objek Pemajuan





Kebudayaan dan kurangnya dorongan Pemda dalam menciptakan ekosistem kebudayaan yang lebih kuat.

PENGEMBANGAN

- a. Jumlah kajian dan riset mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan di Ngawi yang masih sedikit, mempengaruhi proses upaya pemanfaatan dan pengembangannya.
- b. Teknologi media komunikasi masih belum optimal digunakan dalam pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Ngawi.
- c. Adanya jarak antara generasi muda yang menguasai teknologi media baru dan para pengampu objek pemajuan kebudayaan, menyebabkan inovasi dengan media baru masih belum banyak dilakukan di bidang kebudayaan.

PEMBINAAN

- a. Lokakarya dan pembinaan bidang kebudayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Ngawi, perlu ditingkatkan.
- b. Banyak kelompok seni budaya kurang kuat dalam berorganisasi, maupun dalam tata kelola produksi pertunjukan/pameran seni budaya.
- c. Tenaga budaya pada beberapa bidang perlu mendapatkan pembinaan peningkatan keterampilan bersertifikasi secara berkala, misalnya tenaga budaya bidang audio sound system, pencahayaan, tata panggung, manajemen seni pertunjukan, fotografi, filmografi, tenaga ahli cagar budaya, dsb.
- d. Pelaksanaan ritus dan adat istiadat masih terbayangi oleh ajaran agama, cukup rentan terjadi konflik.
- e. Mekanisme seleksi dana hibah kepada seniman dan pelaku budaya perlu ditingkatkan dengan standar lebih baik dan transparan.

Rekomendasi Umum yang dapat dirumuskan selama proses pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :





- a. Melakukan sosialisasi lebih luas mengenai pentingnya identifikasi, pendataan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- b. Melakukan sosialisasi lebih gencar kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga Objek Diduga Cagar Budaya, Cagar Budaya, dan Objek Pemajuan Kebudayaan dan mengenal potensinya.
- c. Pemda perlu segera membuat program pengelolaan dokumentasi, arsip, kajian, dan data-data mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan di Ngawi untuk dapat diakses oleh publik luas.
- d. Pemda mengupayakan Dinas dan antar Desa dapat saling mengakses data kebudayaan bersama yang bermanfaat secara signifikan untuk mendorong lebih banyak program kolaborasi.
- e. Perlu ada koordinasi yang sistematis dari desa hingga tingkat kabupaten tentang upaya bersama dalam Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Ngawi.
- f. Mengadopsi program pemerintah pusat, seperti memberikan penghargaan kepada para maestro seni budaya, Pemda dapat pula memberikan perhatian dengan melakukan dokumentasi dan publikasi karya, pemberian piagam penghargaan dan bantuan kesejahteraan kepada para pegiat atau para tenaga budaya senior yang telah mendukung salah satu objek pemajuan kebudayaan di Ngawi. Perlu adanya sebuah program berkelanjutan untuk mengenalkan Objek Kebudayaan Ngawi kepada generasi muda, baik secara formal di sekolah/universitas, maupun secara informal dan melalui media baru.
- g. Pemerintah daerah bersama para budayawan dan tokoh masyarakat perlu secara mendalam melakukan kajian dan merumuskan strategi regenerasi nilai-nilai budaya baik dalam lembaga maupun masyarakat dalam menghadapi tantangan derasnya bermacam arus komunikasi dan



informasi melalui media baru, yang dapat mengikis nilai-nilai kearifan lokal.

PEMANFAATAN

- a. Diperlukan program sosialisasi dan penyebaran informasi lebih luas di berbagai lapisan masyarakat tentang ODCB dan OPK Ngawi.
- b. Diperlukan sosialisasi dan pendampingan mendaftarkan Hak Cipta atau Hak Kekayaan Intelektual atas karya-karya tenaga budaya.
- c. Perlu mengadakan lokakarya dan forum diskusi secara rutin, yang membahas keterkaitan antar Objek Pemajuan Kebudayaan dan perlunya memperkuat ekosistem kebudayaan Ngawi.

PENGEMBANGAN

- a. Perlu ada program fasilitasi yang mendukung terlaksananya kajian-kajian Objek Pemajuan Kebudayaan di Ngawi oleh para akademisi dan ahli bidang budaya.
- b. Perlu diselenggarakan lokakarya dan pelatihan teknologi media komunikasi dalam pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Ngawi, secara rutin dan berkelanjutan.
- c. Sosialisasi atau lokakarya kepada generasi muda mahir digital tentang Objek Pemajuan Kebudayaan, dan secara reguler mempertemukan generasi muda dengan para ahli pelaku budaya, dan memfasilitasi kolaborasi mereka untuk menggali potensi Objek Pemajuan Kebudayaan Ngawi, untuk menciptakan inovasi-inovasi produk ataupun karya budaya mereka.

PEMBINAAN

- a. Pemda sebagai salah satu pengampu kebudayaan perlu mendorong terciptanya sebuah wadah kolaborasi antar lembaga atau kelompok seni budaya yang mengutamakan inklusi, kolaborasi, dan kompetisi yang sehat dan berkelanjutan dari tingkat sekolah hingga umum.



- b. Perlu secara rutin dan berjenjang diadakan pelatihan keterampilan tenaga budaya dan sertifikasi. Misalnya tenaga budaya bidang audio visual, tata panggung, manajemen seni pertunjukan, fotografi, dsb.
- c. Perlu diadakan pelatihan kepada lembaga dan kelompok seni budaya untuk meningkatkan keterampilan berorganisasi dan tata kelola produksi seni/budaya.
- d. Perlu sebuah sistem seleksi dan penyaluran dana hibah atau bantuan kepada kelompok/lembaga seni yang dapat diakses masyarakat lebih luas, kompetitif, transparan, merata, dan tepat sasaran.
- e. Pemda perlu lebih memperhatikan para pelaku seni budaya yang telah sepuh/ lanjut usia dan para seniman yang berada di kondisi kurang sejahtera.
- f. Pemda perlu memfasilitasi forum komunikasi antar umat beragama dan kepercayaan sebagai upaya memperkecil potensi gesekan atas praktik ritus dan adat istiadat di masyarakat.

2.2.7.2 Persentase Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan

Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan di Kabupaten Ngawi mencerminkan keseriusan daerah dalam menjaga identitas, jati diri, serta kekayaan nilai-nilai luhur masyarakat. Upaya pelestarian ini meliputi warisan budaya berwujud seperti cagar budaya, situs sejarah, bangunan tradisional, serta warisan takbenda berupa kesenian, tradisi, dan praktik budaya masyarakat. Dengan meningkatnya persentase warisan budaya yang berhasil dilestarikan, Kabupaten Ngawi menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat mengenal, memahami, dan mewarisi kekayaan budaya daerah.

Pelestarian warisan budaya juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya tarik pariwisata daerah. Warisan budaya yang dijaga dan dikelola dengan baik dapat menjadi destinasi unggulan, baik untuk wisata edukasi maupun wisata budaya, sehingga memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.



Di sisi lain, proses pelestarian ini turut meningkatkan kebanggaan dan rasa memiliki masyarakat terhadap identitas budaya lokal, serta memperkuat kohesi sosial di tengah perkembangan modernisasi yang cepat.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam pelestarian warisan budaya masih cukup besar, antara lain minimnya pendanaan, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam konservasi, serta ancaman alih fungsi lahan terhadap situs-situs bersejarah. Oleh sebab itu, diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah, komunitas budaya, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pelestarian warisan budaya. Dengan kolaborasi yang kuat, Kabupaten Ngawi dapat memastikan bahwa persentase warisan budaya yang dilestarikan terus meningkat dan menjadi fondasi penting pembangunan berbasis kearifan lokal.

2.2.7.3 Persentase Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Didaftarkan

Persentase jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan di Kabupaten Ngawi menjadi indikator penting dalam upaya perlindungan serta pengakuan formal terhadap kekayaan budaya daerah. Proses pendaftaran ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalitas dan perlindungan hukum, tetapi juga memastikan bahwa aset budaya tersebut tercatat dalam basis data nasional maupun daerah sehingga keberadaannya dapat lebih terjamin. Dengan meningkatnya persentase pendaftaran, Kabupaten Ngawi memperlihatkan keseriusan dalam menjaga keberlanjutan identitas budaya sekaligus memperkuat posisi daerah dalam konteks pelestarian budaya nasional.

Selain memberikan perlindungan, pendaftaran cagar budaya dan warisan budaya tak benda juga membuka peluang untuk pengelolaan yang lebih sistematis. Aset budaya yang terdaftar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan, penelitian, maupun pariwisata budaya yang berkelanjutan. Hal ini tentu berdampak positif bagi masyarakat, baik dalam aspek ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisatawan, maupun dalam aspek



sosial melalui penguatan kebanggaan masyarakat terhadap identitas lokal. Dengan demikian, semakin tinggi persentase warisan budaya yang didaftarkan, semakin besar pula kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Namun, tantangan yang dihadapi adalah masih adanya warisan budaya yang belum terdokumentasi dengan baik serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya proses pendaftaran. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah bersama komunitas budaya, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam mendorong identifikasi, dokumentasi, serta pendaftaran aset budaya. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci agar persentase jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan terus meningkat, sekaligus memastikan bahwa kekayaan budaya Ngawi terlindungi dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

2.2.7.4 Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi di Bidang Kebudayaan

Persentase jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi di bidang kebudayaan menjadi indikator penting untuk menilai kualitas sumber daya manusia dalam sektor kebudayaan di Kabupaten Ngawi. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa tenaga kebudayaan memiliki kompetensi, keahlian, dan standar profesional yang diakui secara formal. Dengan semakin banyaknya tenaga kebudayaan yang tersertifikasi, maka pengelolaan, pengembangan, dan pelestarian kebudayaan dapat dilakukan secara lebih terarah, profesional, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Selain sebagai pengakuan kompetensi, sertifikasi profesi juga membuka peluang bagi tenaga kebudayaan untuk terlibat lebih aktif dalam berbagai program kebudayaan baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Hal ini sekaligus meningkatkan kredibilitas Kabupaten Ngawi dalam mengelola sektor kebudayaan serta memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pusat pengembangan budaya. Dengan demikian, peningkatan persentase



tenaga kebudayaan tersertifikasi akan memberikan dampak ganda, yakni peningkatan kualitas pengelolaan budaya sekaligus peningkatan kesejahteraan tenaga kebudayaan itu sendiri.

Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan akses terhadap lembaga sertifikasi, kurangnya informasi, serta keterbatasan biaya yang kerap menjadi hambatan bagi para tenaga kebudayaan untuk mengikuti uji kompetensi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis berupa fasilitasi, pendampingan, dan kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi agar jumlah tenaga kebudayaan tersertifikasi di Kabupaten Ngawi terus meningkat. Dengan langkah tersebut, keberlanjutan pembangunan kebudayaan yang berkualitas dapat semakin terjamin.

2.2.8 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat keharmonisan hubungan antarumat beragama di suatu wilayah. Indeks ini mengukur sejauh mana masyarakat mampu hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan bekerja sama lintas keyakinan dalam kehidupan sosial. Pengukuran KUB umumnya mencakup tiga dimensi utama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama. Ketiganya menjadi cerminan dari nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang menjadi landasan penting bagi stabilitas sosial dan pembangunan daerah yang inklusif.

Dalam Kabupaten Ngawi, yang secara sosial budaya dikenal memiliki masyarakat yang heterogen namun menjunjung tinggi nilai gotong royong, tepo seliro, dan toleransi antarkelompok, IKUB menjadi cerminan dari sejauh mana masyarakat mampu menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman agama dan keyakinan yang ada. Sebagai indikator baru, IKUB dibentuk oleh beberapa faktor utama yang mencerminkan dimensi sosial, budaya, dan keagamaan, yang secara umum diadaptasi dari pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI namun disesuaikan dengan



konteks daerah. Faktor-faktor pembentuk Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Ngawi antara lain :

1. Dimensi Toleransi, yang menggambarkan sejauh mana masyarakat menerima perbedaan keyakinan, menghargai praktik keagamaan umat lain, serta mampu hidup berdampingan tanpa diskriminasi. Indikator ini dapat diukur melalui survei persepsi masyarakat, frekuensi kegiatan lintas agama, serta keberadaan forum kerukunan di tingkat desa dan kecamatan.
2. Dimensi Kesenjangan, yang mengukur rasa keadilan antarumat beragama dalam memperoleh pelayanan publik, penggunaan fasilitas umum keagamaan, serta partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan tanpa adanya perlakuan diskriminatif.
3. Dimensi Kerjasama dan Solidaritas Sosial, yang menilai seberapa kuat kolaborasi antarumat beragama dalam kegiatan sosial, kebencanaan, pembangunan desa, hingga kegiatan gotong royong lintas komunitas keagamaan.
4. Dimensi Dialog dan Komunikasi Antarumat Beragama, yang diukur melalui aktivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kegiatan diskusi lintas iman, serta keterlibatan tokoh agama dalam penyelesaian potensi konflik sosial di tingkat lokal.

Dalam konteks Kabupaten Ngawi ke depan, keempat dimensi tersebut sangat relevan dengan karakter masyarakat yang terbuka dan adaptif terhadap perbedaan, serta memiliki tradisi kuat dalam menjaga hubungan sosial harmonis. Sejauh ini, tingkat konflik horizontal berbasis agama di Ngawi relatif rendah, namun tantangan ke depan tetap ada, terutama dalam menghadapi dinamika sosial dan pengaruh digital yang dapat memunculkan potensi intoleransi di ruang publik.

Peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Ngawi diarahkan melalui penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai lembaga koordinatif dan mediasi sosial dalam menjaga harmoni antar umat beragama.



FKUB didorong untuk lebih aktif dalam edukasi publik, fasilitasi dialog lintas iman, serta pencegahan potensi konflik berbasis keagamaan. Selain itu, Pemerintah Daerah mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama ke dalam kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan agar menjadi bagian dari pembentukan karakter masyarakat yang terbuka dan menghargai perbedaan.

Partisipasi generasi muda dan perempuan juga diperkuat melalui berbagai kegiatan lintas komunitas untuk membangun jejaring sosial yang inklusif dan damai. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen menyediakan ruang dialog publik dan fasilitas ekspresi keagamaan yang terbuka di tingkat desa dan kelurahan, sehingga setiap kelompok memiliki kesempatan setara untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Melalui langkah-langkah tersebut, Kabupaten Ngawi menargetkan peningkatan IKUB secara berkelanjutan menuju kategori “tinggi” pada akhir periode RPJMD 2025–2029, sejalan dengan cita-cita membangun masyarakat Ngawi yang rukun, toleran, dan harmonis dalam keberagaman.

2.2.8.1 Angka Konflik

Angka konflik merupakan salah satu indikator penting dalam mencerminkan kondisi stabilitas sosial dan keamanan suatu daerah. Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Ngawi mencatatkan angka *zero* konflik setiap tahunnya. Capaian ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, tidak terjadi konflik sosial yang signifikan atau tercatat secara resmi, yang mengganggu kehidupan masyarakat maupun proses pembangunan daerah. Hal ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat dialog antar kelompok, serta memperkuat peran forum-forum kemasyarakatan dalam deteksi dini dan resolusi konflik. Ke depan, kondisi ini perlu terus dipertahankan melalui strategi penguatan nilai toleransi, inklusivitas sosial, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam membangun ketahanan sosial yang berkelanjutan.



Tabel 2.19 Angka Konflik di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Konflik	0	0	0	0	0

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi, 2025

Angka konflik di Kabupaten Ngawi pada periode 2020–2024 tercatat sebesar 0 setiap tahunnya, yang menunjukkan tidak adanya konflik sosial yang signifikan atau tercatat secara resmi dalam lima tahun terakhir. Capaian ini mencerminkan situasi sosial yang relatif kondusif, stabilitas keamanan yang terjaga, serta efektivitas peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan potensi gesekan secara damai dan dialogis.

Untuk mempertahankan kondisi ini pada periode pembangunan 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu memperkuat sistem deteksi dini konflik, memperluas peran forum-forum komunikasi sosial, serta meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam mediasi konflik berbasis kearifan lokal. Selain itu, pengarusutamaan nilai toleransi, inklusivitas, dan keadilan sosial dalam program pembangunan serta peningkatan literasi digital guna menangkal disinformasi juga penting dilakukan guna mencegah potensi konflik baru yang bersifat laten maupun struktural. Dengan pendekatan ini, stabilitas sosial dapat terus dijaga sebagai prasyarat penting untuk keberlanjutan pembangunan daerah.

2.2.9 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.2.9.1 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender menunjukkan sejauh mana perempuan dan laki-laki mendapatkan akses yang setara terhadap hasil pembangunan. Nilainya berkisar antara 0 sampai 100, di



mana semakin tinggi nilainya, maka semakin kecil kesenjangan gender di suatu daerah.

Tabel 2.20 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,19	92,32	92,53	92,89	93,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Ngawi selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif dan stabil. Pada tahun 2020, IPG Kabupaten Ngawi tercatat sebesar 92,19, kemudian mengalami peningkatan berkelanjutan menjadi 92,32 pada tahun 2021, 92,53 pada tahun 2022, dan 92,89 pada tahun 2023. Capaian ini terus meningkat hingga 93,13 pada tahun 2024.

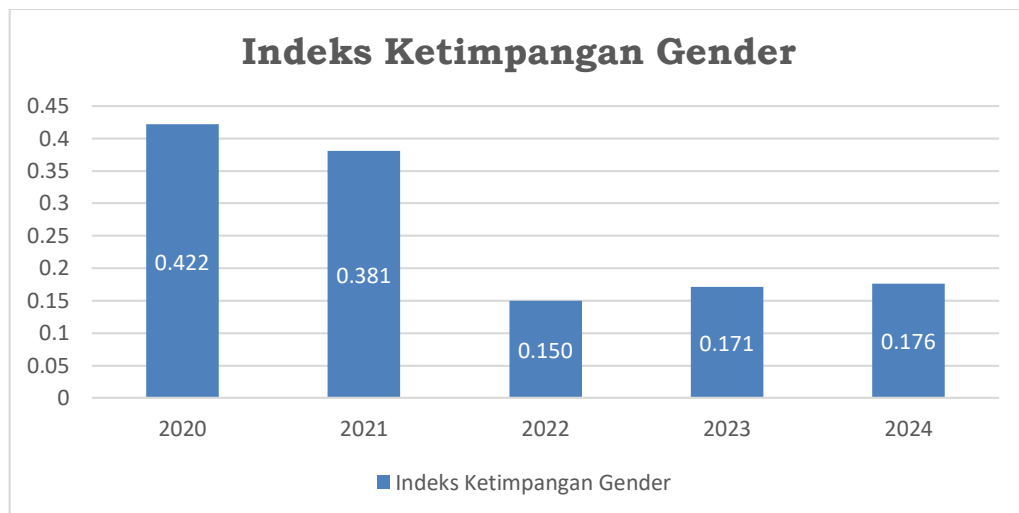
Secara kumulatif, Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan sebesar 0,94 poin selama lima tahun terakhir, mencerminkan komitmen daerah dalam mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan manusia. Nilai IPG Kabupaten Ngawi juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan rerata provinsi maupun nasional pada beberapa tahun terakhir, terutama dalam indikator pendidikan dan kesehatan bagi perempuan.

Pemerintah Kabupaten Ngawi secara konsisten melaksanakan program-program pembangunan yang responsif gender, khususnya dengan fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan, melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Inisiatif seperti beasiswa pendidikan untuk anak perempuan dari keluarga tidak mampu, pelatihan keterampilan kewirausahaan bagi ibu rumah tangga, serta akses layanan kesehatan ibu dan anak berbasis desa, menjadi pengungkit utama dalam mendukung perbaikan nilai IPG.

Sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Timur dan nasional, Pemerintah Kabupaten Ngawi akan terus memperkuat arus utama gender (*gender mainstreaming*) dalam dokumen



perencanaan dan penganggaran daerah, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.



Gambar 2.31 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Ngawi Tahun 2020–2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Berdasarkan data periode 2020-2024, Kabupaten Ngawi menunjukkan perbaikan yang baik dalam upaya mengurangi kesenjangan gender. Secara keseluruhan, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berhasil ditekan secara signifikan dari angka 0,422 pada tahun 2020 menjadi 0,176 pada tahun 2024. Perlu diingat bahwa semakin rendah nilai IKG, semakin kecil ketimpangan yang terjadi. Lompatan perbaikan paling drastis terjadi antara tahun 2021 ke 2022, di mana indeks anjlok dari 0,381 menjadi 0,150. Pencapaian ini merefleksikan keberhasilan program-program pemerintah daerah yang berfokus pada tiga dimensi utama : peningkatan kesehatan reproduktif, pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan dan politik, serta peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja.

Meskipun demikian, data dua tahun terakhir (2023-2024) menyajikan sebuah catatan penting yang perlu menjadi fokus dalam perencanaan ke depan. Setelah mencapai titik terendahnya pada tahun 2022, tren perbaikan IKG terlihat melambat bahkan sedikit berbalik arah dengan adanya kenaikan tipis menjadi 0,171 pada tahun 2023 dan 0,176 pada tahun 2024. Tren stagnasi ini



mengindikasikan bahwa tantangan untuk mempertahankan dan melanjutkan capaian kesetaraan gender tetap ada. Oleh karena itu, prioritas dalam RPJMD 2025-2029 adalah mengidentifikasi penyebab perlambatan ini dan merumuskan strategi intervensi yang lebih tajam untuk memastikan tren positif penurunan ketimpangan gender dapat kembali berlanjut secara berkelanjutan.

2.2.9.2 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kepemudaan dalam berbagai aspek strategis. IPP disusun untuk menggambarkan sejauh mana kualitas hidup, peran, dan potensi pemuda berkembang secara optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dalam pengukurannya, IPP mencakup lima dimensi utama, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kemandirian, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Dimensi pendidikan mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan pemuda yang dilihat dari indikator seperti angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dimensi ini penting untuk memastikan bahwa pemuda memiliki kapasitas dasar dalam menghadapi tantangan pembangunan. Selanjutnya, dimensi kesehatan dan kesejahteraan menggambarkan status kesehatan fisik dan mental pemuda, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan prevalensi perilaku berisiko, yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas dan keberlangsungan peran pemuda dalam pembangunan.

Dimensi ketenagakerjaan dan kemandirian menjadi cerminan keterlibatan pemuda dalam sektor ekonomi serta kemampuannya untuk hidup mandiri. Indikator dalam dimensi ini meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, serta distribusi pemuda dalam sektor formal dan informal. Adapun dimensi partisipasi dan kepemimpinan menunjukkan sejauh mana pemuda terlibat dalam kehidupan sosial, politik, dan organisasi



kemasyarakatan, termasuk peran kepemimpinan yang dijalankan dalam berbagai ruang publik.

Terakhir, dimensi gender dan diskriminasi mengukur kesetaraan akses dan perlakuan antara pemuda laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Dimensi ini menekankan pentingnya inklusivitas dan keadilan sosial dalam pembangunan kepemudaan, sehingga seluruh kelompok pemuda dapat berkembang tanpa hambatan struktural. Melalui penguatan kelima dimensi ini, IPP tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan pemuda di daerah.

Sebagai pijakan dalam perumusan kebijakan RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2025–2029, IPP diharapkan menjadi indikator kunci dalam menyusun strategi pembangunan kepemudaan yang lebih inklusif dan transformatif. Hal ini menuntut perumusan program yang terintegrasi lintas sektor guna mengoptimalkan bonus demografi secara berkelanjutan dan mendorong terwujudnya pemuda yang sehat, berpendidikan, berdaya saing, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

2.2.9.3 Jumlah Korban Kekerasan

Data pada Tabel 2.21 menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 mencapai 60 kasus, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 34 kasus. Peningkatan ini terjadi hampir di seluruh kelompok umur dan jenis kelamin, dengan korban laki-laki sebanyak 28 orang dan perempuan 32 orang. Berdasarkan kelompok umur, korban terbanyak berada pada kelompok anak di bawah 18 tahun yaitu 41 kasus, diikuti oleh kelompok remaja usia 18–25 tahun sebanyak 6 kasus, dan dewasa di atas 25 tahun sebanyak 13 kasus. Kecamatan dengan kasus tertinggi adalah Paron (10 kasus), Ngawi (9 kasus), serta Kedunggalar (7 kasus), yang menunjukkan konsentrasi



permasalahan di wilayah dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi.

Tren peningkatan kasus ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa dan kecamatan, termasuk mekanisme deteksi dini dan pelaporan kekerasan. Selain itu, tingginya kasus pada kelompok anak menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lembaga pendidikan, dan aparat desa untuk memperkuat edukasi pencegahan kekerasan berbasis keluarga dan sekolah. Dengan demikian, data ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program penanganan yang lebih komprehensif, baik dari sisi pencegahan maupun pendampingan korban.

Tabel 2.21 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ngawi Tahun 2024

Kecamatan	Jenis Kelamin		Kelompok Umur			Jumlah
	L	P	Anak 0<18 Tahun	Remaja 18<25 Tahun	25 Tahun ke atas	
Sine	2	1	3	-	-	3
Ngrambe	2	3	3	1	1	5
Jogorogo	-	-	-	-	-	-
Kendal	-	-	-	-	-	-
Geneng	2	3	4	-	1	5
Gerih	2	-	2	-	-	2
Kwadungan	-	-	-	-	-	-
Pangkur	-	1	-	1	-	1
Karangjati	-	-	-	-	-	-
Bringin	1	-	1	-	-	1
Padas	1	3	3	1	-	4
Kasreman	-	-	-	-	-	-
Ngawi	4	5	5	1	3	9
Paron	7	3	8	-	2	10
Kedunggalar	3	4	6	-	1	7
Pitu	1	3	2	-	2	4
Widodaren	2	4	3	2	1	6
Mantingan	-	2	-	-	2	2
Karangayar	1	-	1	-	-	1
Realisasi Tahun 2024	28	32	41	6	13	60
Realisasi Tahun 2023	7	27	20	8	6	34

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

2.2.9.4 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah menjamin, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak di wilayahnya. IPA tidak hanya berfokus pada upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas seperti pemenuhan kebutuhan dasar, partisipasi anak dalam pembangunan, serta keberpihakan kebijakan terhadap kepentingan terbaik anak. Melalui IPA, pemerintah daerah dapat memantau secara objektif kondisi aktual perlindungan anak serta menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan.

Secara umum, faktor pembentuk IPA terdiri dari beberapa aspek utama, yakni: (1) hak hidup, yang mencakup kesehatan dan gizi anak; (2) hak tumbuh kembang, yang meliputi akses pendidikan, lingkungan aman, serta kegiatan rekreatif yang mendukung perkembangan anak; (3) hak perlindungan, yang mencakup pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran; serta (4) hak partisipasi, yaitu ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Keempat faktor ini saling berkaitan dan menjadi fondasi untuk menilai keberhasilan daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung bagi anak.

Dalam konteks Kabupaten Ngawi, pengukuran IPA belum pernah dilakukan secara resmi, sehingga kondisi aktual mengenai tingkat perlindungan anak masih bersifat deskriptif berdasarkan kasus dan indikator sektoral. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai menunjukkan komitmen untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak melalui rencana pembentukan unit layanan perlindungan anak berbasis masyarakat, pengembangan *Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)*, serta peningkatan kapasitas tenaga pendamping sosial dan aparat desa dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.



Upaya ini diharapkan menjadi pondasi awal menuju penguatan tata kelola perlindungan anak yang lebih terukur.

Selanjutnya, penguatan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi wadah strategis untuk memastikan implementasi IPA berjalan konsisten dan terintegrasi. Melalui KLA, prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak diinternalisasi ke dalam seluruh sektor pembangunan daerah. Dengan demikian, pengembangan IPA dan KLA bukan hanya sekadar pemenuhan indikator nasional, tetapi merupakan komitmen moral Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang ramah anak, berperspektif masa depan, dan menjadikan anak sebagai subjek utama pembangunan daerah.

2.2.9.5 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

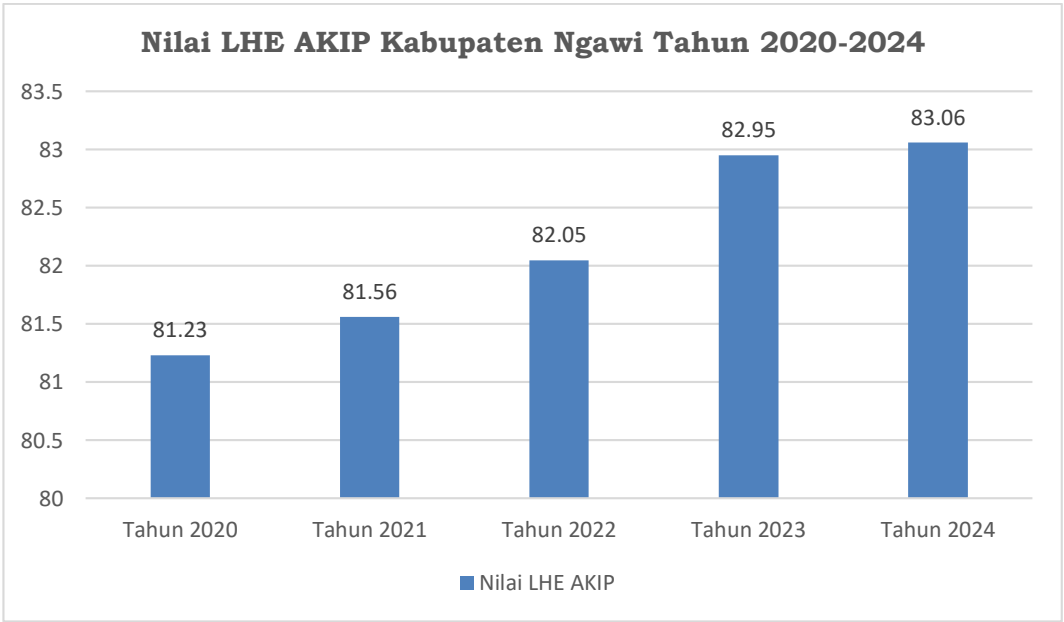
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 merupakan suatu sistem terpadu yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dikelolanya secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Melalui SAKIP, pemerintah mendorong perubahan paradigma dari sekadar menjalankan kegiatan (*output-based management*) menuju pada pencapaian hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat (*outcome-based management*). Sistem ini mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berkesinambungan.

Secara substansi, Perpres 29 Tahun 2014 menegaskan bahwa penerapan SAKIP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memperkuat budaya kinerja yang berorientasi pada hasil, serta mewujudkan transparansi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. SAKIP terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan



capaian kinerja. Kelima komponen ini saling terkait dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam implementasinya, SAKIP menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk menilai sejauh mana capaian sasaran strategis sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Hasil evaluasi SAKIP, yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, menjadi dasar dalam menilai tingkat efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas pelaksanaan program di setiap instansi. Dengan penerapan SAKIP yang konsisten dan berbasis pada prinsip *continuous improvement*, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat tata kelola yang berorientasi pada hasil (*performance-based governance*), meningkatkan kinerja pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi yang transparan dan berintegritas.



Gambar 2.32 Nilai LHE AKIP Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Kementerian PAN & RB Republik Indonesia, 2025

Grafik Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Kabupaten Ngawi Tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama lima

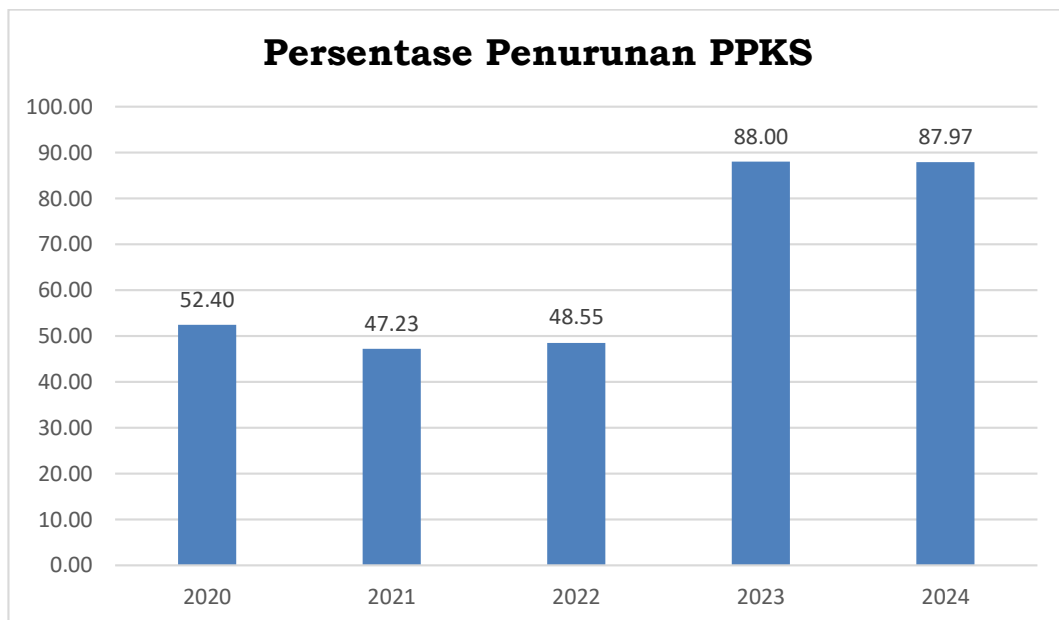
tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai LHE AKIP tercatat sebesar 81,23, kemudian meningkat berturut-turut menjadi 81,56 pada 2021, 82,05 pada 2022, 82,95 pada 2023, dan mencapai 83,06 pada 2024. Peningkatan yang stabil ini mencerminkan adanya kemajuan berkelanjutan dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Kenaikan nilai tersebut menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja di Kabupaten Ngawi semakin matang, terutama dalam hal perencanaan yang selaras dengan tujuan strategis, pelaporan kinerja yang transparan, serta pelaksanaan program yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 telah memberikan arah yang jelas bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun sasaran kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Selain itu, peningkatan nilai juga menandakan adanya penguatan fungsi evaluasi internal dan komitmen pimpinan daerah dalam mendorong budaya kinerja di seluruh jajaran birokrasi.

Dengan capaian nilai 83,06 pada tahun 2024, Kabupaten Ngawi telah berada pada kategori “A” (memuaskan) menurut standar evaluasi Kementerian PANRB, yang berarti sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik. Ke depan, tantangan utama bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah mempertahankan konsistensi tersebut sekaligus memperkuat kualitas kinerja pada level perangkat daerah. Upaya peningkatan kapabilitas aparatur, digitalisasi sistem pelaporan kinerja, dan integrasi perencanaan dengan penganggaran berbasis hasil menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa peningkatan nilai LHE AKIP sejalan dengan peningkatan kinerja substantif dalam pembangunan daerah.



2.2.9.6 Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)



Gambar 2.33 Persentase Penurunan PPKS Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, 2025

Berdasarkan data yang disajikan pada grafik "Presentase Penurunan PPKS Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024," dapat diidentifikasi bahwa program atau kebijakan terkait PPKS di Kabupaten Ngawi menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada periode awal, dari tahun 2020 hingga 2022, persentase penurunan PPKS bergerak di kisaran 47% hingga 52%. Angka ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan pada rentang waktu tersebut menghasilkan penurunan yang relatif stabil, meskipun fluktuasi kecil terjadi dari tahun ke tahun. Kestabilan ini menunjukkan adanya basis program yang konsisten dalam penanganan masalah PPKS pada periode tersebut.

Pergeseran signifikan terlihat pada periode 2022 menuju 2023, di mana terjadi peningkatan persentase penurunan yang sangat drastis, dari 48,55% menjadi 88%. Lonjakan ini menunjukkan adanya intervensi kebijakan, program, atau strategi baru yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ngawi yang jauh lebih efektif dan berdampak besar dalam menekan angka PPKS. Keberhasilan yang luar biasa ini kemungkinan didorong oleh



inovasi dalam pendekatan, alokasi sumber daya yang lebih optimal, atau kolaborasi lintas sektor yang kuat, sehingga menghasilkan efektivitas yang jauh melampaui kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, kinerja yang tinggi berhasil dipertahankan dengan persentase penurunan sebesar 87,97%, yang menunjukkan konsistensi kebijakan yang telah efektif pada tahun sebelumnya. Angka ini juga mengindikasikan bahwa program dan inisiatif yang dimulai pada tahun 2023 tidak hanya bersifat temporer, tetapi berhasil menciptakan dampak berkelanjutan. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menanggulangi isu PPKS.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Ngawi didorong oleh penguatan ekosistem riset dan inovasi yang telah diatur dalam Rencana Induk Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Daerah (RIPJPID) Tahun 2023–2026, yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. RIPJPID menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM riset, kelembagaan inovasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mendukung pemanfaatan IPTEK dalam pembangunan daerah. Dalam upaya tersebut, Kabupaten Ngawi telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 182 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, sebagai payung hukum penyelenggaraan inovasi.

Salah satu tema prioritas dalam pengembangan daya saing adalah penguatan produk hortikultura atau pengembangan komoditas pangan lokal berbasis pertanian, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pendekatan riset pertanian dan agroindustri berbasis lokal. Pengembangan ini sejalan dengan arah hilirisasi komoditas unggulan daerah.

Sementara itu, penanggulangan kemiskinan menjadi permasalahan utama daerah yang termasuk dalam program super prioritas kepala daerah. RIPJPID mendorong pemanfaatan inovasi sosial dan teknologi tepat guna untuk mendukung pemberdayaan

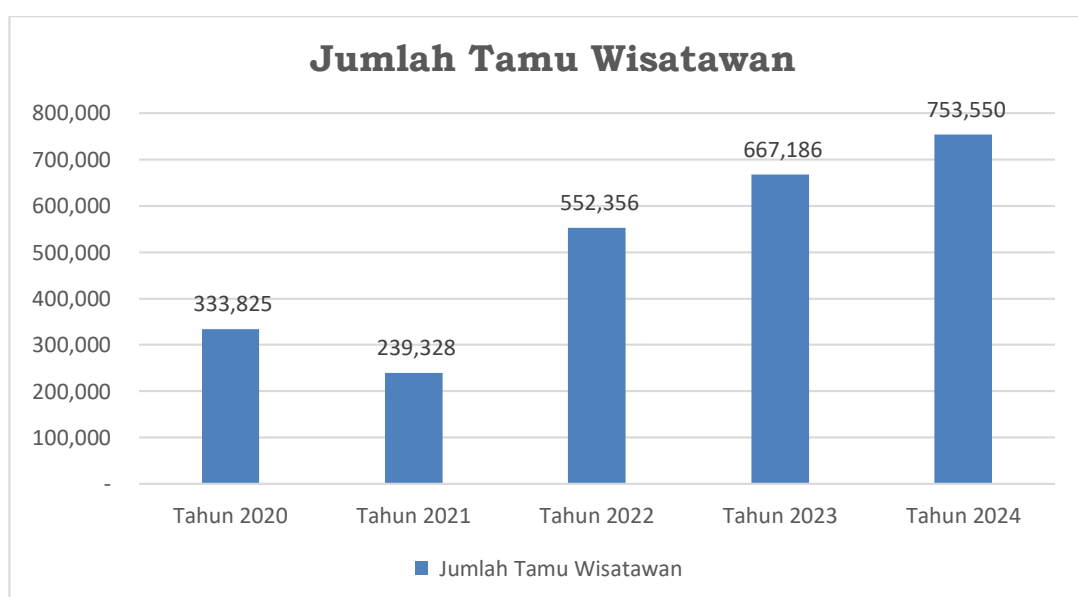


masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Serta peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah menjadi tema permasalahan utama daerah yang termasuk dalam program super prioritas kepala daerah tahun 2025–2029.

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Aspek ini menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam kerangka RPJMD, penguatan daya saing daerah menjadi prioritas untuk menghadapi tantangan pembangunan, perubahan global, serta kompetisi antar wilayah.

Dengan memperkuat peran riset dan inovasi daerah sebagai fondasi pengambilan kebijakan dan pembangunan program prioritas, Kabupaten Ngawi menargetkan peningkatan daya saing yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

2.3.1 Jumlah Tamu Wisatawan



Gambar 2.34 Jumlah Tamu Wisatawan Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Berdasarkan data pada Gambar 2.34 mengenai jumlah tamu wisatawan Kabupaten Ngawi tahun 2020–2024, terlihat adanya dinamika kunjungan wisata yang cukup fluktuatif namun cenderung meningkat pada periode akhir. Pada tahun 2020 jumlah wisatawan mencapai 333.825 orang, tetapi pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan menjadi 239.328 orang. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Memasuki tahun 2022, sektor pariwisata Ngawi mulai menunjukkan pemulihan dengan jumlah wisatawan melonjak tajam hingga 552.356 orang. Peningkatan ini menggambarkan adanya kepercayaan kembali masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata setelah adanya pelonggaran kebijakan pembatasan sosial serta meningkatnya promosi destinasi wisata oleh pemerintah daerah. Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan kebangkitan pariwisata sebagai salah satu sektor penting dalam mendukung ekonomi daerah.

Tren positif berlanjut pada tahun 2023, di mana jumlah wisatawan meningkat lagi menjadi 667.186 orang. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan pulihnya minat wisatawan, tetapi juga menunjukkan daya tarik destinasi wisata di Kabupaten Ngawi yang semakin berkembang. Faktor lain yang memengaruhi adalah semakin baiknya aksesibilitas dan infrastruktur pendukung wisata, seperti perbaikan jalan, fasilitas umum, serta promosi wisata yang lebih gencar di berbagai platform.

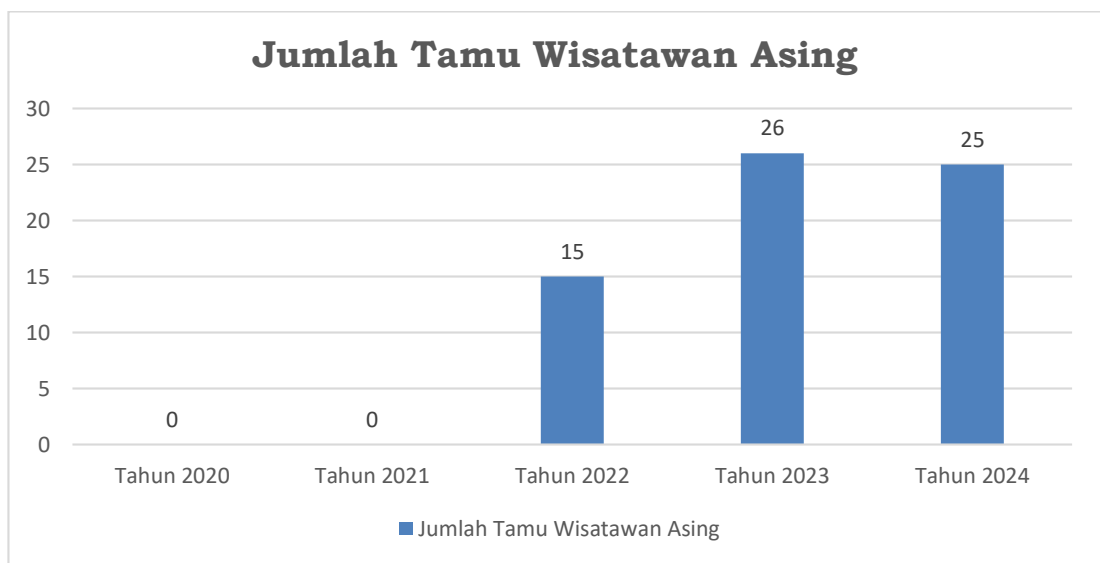
Pada tahun 2024, jumlah wisatawan mencapai 753.550 orang, angka tertinggi selama periode 2020–2024. Capaian ini memperlihatkan tren pertumbuhan yang konsisten setelah masa krisis pandemi. Peningkatan jumlah kunjungan tersebut sekaligus mempertegas potensi besar sektor pariwisata Ngawi sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Dengan semakin tingginya kunjungan,



tentu berdampak positif pada sektor lain seperti UMKM, kuliner, transportasi, dan jasa akomodasi.

Secara keseluruhan, perkembangan jumlah tamu wisatawan Kabupaten Ngawi menunjukkan adanya proses pemulihan yang kuat sekaligus prospek cerah untuk masa mendatang. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga keberlanjutan pertumbuhan ini melalui strategi diversifikasi destinasi, peningkatan kualitas layanan wisata, serta pelestarian lingkungan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pariwisata Ngawi berpotensi menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

Jumlah tamu wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Ngawi mencerminkan potensi daerah ini untuk semakin dikenal di kancah internasional. Kehadiran wisatawan mancanegara tidak hanya memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk memperkenalkan kekayaan budaya, sejarah, dan keindahan alam yang dimiliki Ngawi. Selain itu, wisatawan asing menjadi jembatan promosi tidak langsung, karena pengalaman positif mereka akan tersebar melalui jaringan global, sehingga mendorong peningkatan kunjungan di masa mendatang sekaligus memperkuat citra Kabupaten Ngawi sebagai destinasi wisata yang ramah, menarik, dan berdaya saing.



**Gambar 2.35 Jumlah Tamu Wisatawan Asing
Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025



Jumlah tamu wisatawan asing di Kabupaten Ngawi dalam periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup menarik. Pada tahun 2020 dan 2021, tercatat tidak ada wisatawan asing yang berkunjung, hal ini dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan perjalanan internasional. Namun, pada tahun 2022 mulai terjadi peningkatan dengan kedatangan 15 wisatawan asing, yang menandai awal pemulihan sektor pariwisata internasional di daerah tersebut.

Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah tamu asing mencapai 26 orang. Lonjakan ini menunjukkan mulai meningkatnya minat wisatawan mancanegara terhadap destinasi wisata di Ngawi, seiring dengan membaiknya aksesibilitas, promosi wisata, serta semakin terbukanya jalur perjalanan internasional. Meskipun pada tahun 2024 jumlah tamu asing sedikit menurun menjadi 25 orang, angka tersebut masih menunjukkan konsistensi dalam menarik perhatian wisatawan mancanegara.

Data ini memberikan gambaran bahwa sektor pariwisata Ngawi mulai memiliki daya tarik di tingkat internasional meskipun skalanya masih terbatas. Keberadaan wisatawan asing, meski jumlahnya relatif kecil, dapat menjadi indikator awal penting untuk mengembangkan strategi promosi wisata yang lebih luas. Dengan penguatan branding destinasi, peningkatan kualitas layanan wisata, serta kerja sama dengan agen perjalanan internasional, tren positif ini berpotensi terus ditingkatkan di masa mendatang.

Jumlah pelaku ekonomi kreatif (ekraf) yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kabupaten Ngawi menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesadaran dan perlindungan terhadap hasil karya kreatif masyarakat. Kepemilikan HKI tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi dan karya, tetapi juga meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk ekraf di pasar lokal, nasional, maupun internasional. Dengan semakin banyaknya pelaku ekraf yang mendaftarkan karyanya, diharapkan tercipta ekosistem kreatif yang berkelanjutan, mendorong pertumbuhan usaha, serta memperkuat



posisi Kabupaten Ngawi sebagai daerah yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat.

2.3.2 Jumlah Pelaku Ekraf Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual



Gambar 2.36 Jumlah Pelaku Ekraf yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Data mengenai jumlah pelaku ekonomi kreatif (ekraf) yang memiliki hak kekayaan intelektual (HKI) di Kabupaten Ngawi menunjukkan perkembangan yang signifikan pada tahun 2024. Dalam periode 2020 hingga 2023, tercatat belum dihitung pelaku ekraf yang mendaftarkan atau memiliki perlindungan HKI. Kondisi ini dapat mencerminkan kurangnya kesadaran maupun akses informasi terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di kalangan pelaku industri kreatif pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan yang sangat tajam dengan 160 pelaku ekraf tercatat memiliki HKI. Peningkatan drastis ini menunjukkan adanya pergeseran positif dalam pola pikir dan kesadaran pelaku ekraf terhadap pentingnya melindungi karya dan inovasi yang dihasilkan. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan semakin kuatnya dukungan pemerintah daerah maupun lembaga

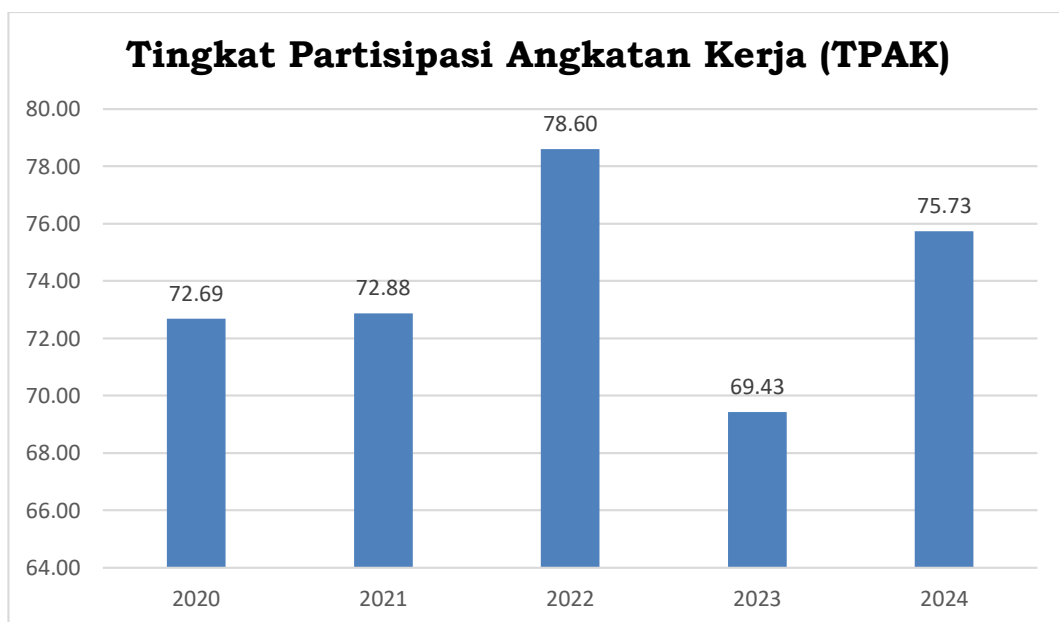


terkait dalam mendorong pendaftaran HKI, baik melalui sosialisasi, fasilitasi pendaftaran, maupun insentif bagi pelaku kreatif.

Lonjakan ini menjadi indikator penting bahwa sektor ekonomi kreatif di Ngawi mulai memasuki tahap lebih maju dengan adanya perlindungan hukum atas karya yang dihasilkan. Ke depan, kepemilikan HKI diharapkan tidak hanya memberikan keamanan hukum bagi pelaku ekraf, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar dalam aspek komersialisasi, branding, dan daya saing di pasar lokal maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem kreatif di Kabupaten Ngawi semakin siap berkembang secara berkelanjutan dan profesional.

2.3.3 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek fundamental dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. SDM yang unggul tidak hanya menjadi penggerak utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan globalisasi, transformasi digital, serta dinamika ketenagakerjaan yang semakin kompetitif.



Gambar 2.37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Ngawi Tahun 2020–2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

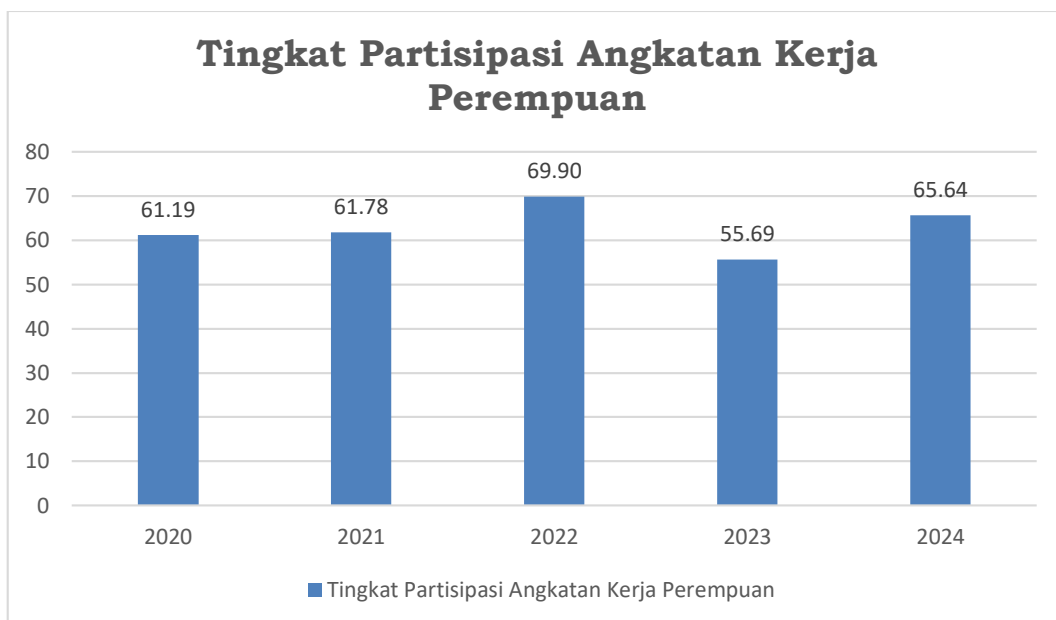


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator makro ketenagakerjaan yang merepresentasikan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini menjadi salah satu cerminan kapasitas ekonomi daerah dalam menyerap tenaga kerja serta responsivitas masyarakat usia kerja terhadap dinamika pasar tenaga kerja. Di Kabupaten Ngawi, perkembangan TPAK selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif, mencerminkan pengaruh dari berbagai faktor struktural dan kontekstual, termasuk perubahan iklim ekonomi nasional dan lokal, dampak pandemi COVID-19, serta efektivitas program ketenagakerjaan di tingkat daerah.

Pada tahun 2020, TPAK Kabupaten Ngawi tercatat sebesar 72,69%, yang mencerminkan tingkat keterlibatan tenaga kerja yang relatif stabil pada masa awal pandemi. Tahun berikutnya, yaitu 2021, TPAK mengalami sedikit peningkatan menjadi 72,88%, menunjukkan adanya pemulihan awal di sektor ketenagakerjaan seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial dan mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi yang lebih positif terjadi pada tahun 2022, di mana TPAK melonjak signifikan mencapai 78,60%, merupakan capaian tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Peningkatan ini dapat ditafsirkan sebagai hasil dari perbaikan kondisi ekonomi pasca pandemi serta meningkatnya kapasitas serapan tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal. Namun, pada tahun 2023, TPAK justru mengalami penurunan tajam menjadi 69,43%, mengindikasikan potensi pelemahan dalam dinamika pasar kerja lokal, yang mungkin disebabkan oleh faktor struktural seperti pergeseran sektor ekonomi dominan, atau berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor-sektor tertentu. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam perumusan strategi pembangunan ketenagakerjaan ke depan. Memasuki tahun 2024, TPAK kembali menunjukkan tren positif dengan peningkatan menjadi 75,73%, menandakan adanya proses pemulihan yang cukup cepat dan responsif terhadap intervensi



kebijakan yang telah diimplementasikan. Capaian ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memperkuat fondasi pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 2.38 TPAK Perempuan Kabupaten Ngawi 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Kabupaten Ngawi selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang sangat dinamis dan fluktuatif, yang merefleksikan adanya potensi besar sekaligus tantangan signifikan. Pada periode awal, terlihat adanya tren positif di mana partisipasi ekonomi perempuan meningkat secara konsisten dari 61,19% pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya di angka 69,90% pada tahun 2022. Peningkatan tajam ini mengindikasikan momentum pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang berhasil membuka lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk masuk atau kembali ke pasar kerja, sekaligus menunjukkan tingginya minat dan potensi angkatan kerja perempuan di Ngawi.

Namun, momentum positif tersebut mengalami guncangan hebat pada tahun 2023, di mana angka TPAK Perempuan anjlok secara drastis ke level 55,69%. Penurunan yang sangat tajam ini menandakan adanya kontraksi signifikan di sektor-sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan atau menunjukkan



keluarnya sebagian besar angkatan kerja perempuan dari pasar kerja. Kondisi ini menjadi sinyal penting mengenai tingginya tingkat kerentanan (vulnerability) pekerja perempuan terhadap perubahan kondisi ekonomi, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja.

Pasar tenaga kerja perempuan kemudian menunjukkan resiliensinya dengan adanya pemulihan yang kuat pada tahun 2024, di mana angka TPAK kembali melonjak ke 65,64%. Meskipun rebound ini sangat positif, capaian tersebut tercatat belum sepenuhnya kembali ke level puncak tahun 2022. Fluktuasi yang tajam ini memberikan implikasi strategis bagi RPJMD 2025-2029, bahwa tantangan utamanya bukan hanya mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi, tetapi lebih kepada menciptakan lapangan kerja yang stabil, berkualitas, dan berketahanan sehingga tingkat partisipasi yang tinggi dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

2.3.3.1 Koesiesien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kabupaten

Koesiesien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Kabupaten (KVH) merupakan indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat disparitas atau keragaman harga barang dan jasa antar kecamatan di dalam satu kabupaten. Indikator ini memberikan gambaran seberapa besar perbedaan harga antardaerah di tingkat lokal, yang dapat mencerminkan efisiensi distribusi barang, keterjangkauan akses pasar, serta stabilitas ekonomi wilayah.

Koesiesien variasi harga dihitung sebagai rasio antara simpangan baku (standard deviation) dari harga rata-rata antar wilayah terhadap rata-rata harga keseluruhan wilayah, kemudian dikalikan 100 persen. Secara matematis dirumuskan sebagai :

$$KVH = S/X \times 100$$



di mana :

- S = simpangan baku harga antar wilayah (misalnya antar kecamatan)
- X = rata-rata harga barang atau komoditas tertentu di seluruh wilayah pengamatan

Nilai KVH yang rendah menunjukkan bahwa harga antar wilayah relatif seragam atau stabil, menandakan keterjangkauan dan efisiensi sistem distribusi yang baik. Sebaliknya, KVH yang tinggi mengindikasikan adanya kesenjangan harga antar kecamatan yang dapat disebabkan oleh perbedaan akses transportasi, biaya distribusi, tingkat ketersediaan barang, maupun daya beli masyarakat. Indikator ini penting untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi daerah dan pemerataan ekonomi antar wilayah di tingkat kabupaten.

Dalam konteks Kabupaten Ngawi, arah kebijakan ke depan terhadap Koefisien Variasi Harga (KVH) sebaiknya difokuskan pada penurunan tingkat variasi harga antar kecamatan agar tercipta stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah. KVH yang rendah menandakan bahwa sistem distribusi barang dan jasa di Ngawi sudah efisien, akses terhadap kebutuhan pokok merata, serta tidak ada kesenjangan yang signifikan antara wilayah pusat (perkotaan) dan pinggiran (pedesaan). Dengan demikian, menjaga agar KVH tetap rendah menjadi indikator penting bagi efektivitas kebijakan pengendalian inflasi daerah dan perencanaan pembangunan berbasis keadilan wilayah.

Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu memperkuat konektivitas antar wilayah, khususnya antara sentra produksi dan pasar utama, melalui peningkatan infrastruktur jalan, transportasi, dan logistik. Selain itu, penguatan fungsi pasar rakyat dan distribusi bahan pangan strategis di setiap kecamatan perlu dilakukan agar harga kebutuhan pokok tidak berfluktuasi tajam akibat perbedaan pasokan. Dukungan terhadap digitalisasi informasi harga pasar juga penting untuk meningkatkan



transparansi dan meminimalkan asimetri informasi antara pelaku usaha dan konsumen.

Ke depan, KVH diharapkan dapat dijaga pada tingkat yang stabil dan rendah, menandakan bahwa kebijakan ekonomi daerah mampu menjamin keterjangkauan harga secara merata di seluruh kecamatan. Upaya ini tidak hanya mendukung pencapaian target inflasi daerah, tetapi juga memperkuat daya saing Ngawi sebagai daerah agraris yang mampu menyalurkan hasil produksinya secara efisien dan berkeadilan ke seluruh lapisan masyarakat.

2.3.4 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Dalam upaya memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menetapkan Rencana Induk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Tahun 2023–2026 sebagai kerangka strategis pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dokumen ini menjadi arah kebijakan daerah dalam memperkuat ekosistem inovasi, mendorong kolaborasi antara lembaga riset, dunia usaha, dan perguruan tinggi, serta memperluas adopsi teknologi di berbagai sektor pembangunan daerah.

Tabel 2.22 Hasil Kinerja Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	25	35	45	100	100
Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi Bahan Perencanaan Pembangunan	%	90	90	90	100	100

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Digunakan Sebagai pengambilan kebijakan pimpinan/policy brief	%	NA	NA	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi, 2025

Dalam kurun waktu 2020-2024, capaian kinerja Bidang Urusan Litbang di Pemerintah Kabupaten Ngawi menunjukkan progresivitas yang signifikan dalam aspek penerapan inovasi, pemanfaatan hasil penelitian untuk kebijakan publik, serta integrasi riset ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dalam konteks pemerintahan daerah berperan sebagai instrumen strategis dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti, mendorong inovasi daerah, serta meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan berbasis riset.

Kinerja Litbang Kabupaten Ngawi dalam memfasilitasi perangkat daerah untuk mengadopsi inovasi daerah telah mencapai tingkat optimal sepanjang periode evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah telah memiliki kapasitas yang cukup dalam menginternalisasi prinsip inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan dukungan yang berkelanjutan dari unit Litbang, inovasi tidak lagi hanya menjadi sekedar konsep, tetapi telah diterapkan dalam berbagai sektor strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada awal periode evaluasi, kebijakan inovasi yang diterapkan masih dalam tahap pengembangan secara bertahap, seiring dengan proses adaptasi birokrasi terhadap pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan. Namun, dalam dua tahun terakhir, terjadi peningkatan eksponensial dalam implementasi kebijakan inovasi, yang mencerminkan adanya akselerasi transformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan yang lebih adaptif, berbasis teknologi, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Kondisi ini



menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi telah berhasil melakukan perubahan paradigma birokrasi dari sistem yang konvensional menuju tata kelola yang lebih dinamis, responsif, dan berbasis data.

Peningkatan signifikan dalam integrasi hasil riset ke dalam perencanaan pembangunan mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis bukti telah menjadi bagian dari mekanisme perumusan kebijakan daerah. Integrasi ini tidak hanya mencerminkan efektivitas Litbang dalam menghasilkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, tetapi juga menunjukkan bahwa birokrasi daerah telah memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam menggunakan data dan kajian ilmiah sebagai landasan dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Seluruh hasil penelitian yang dihasilkan oleh unit Litbang telah dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi kebijakan atau policy brief bagi pimpinan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi penelitian tidak lagi sebatas menghasilkan dokumen akademik yang bersifat teknis, tetapi telah berkembang menjadi instrumen yang memberikan arah kebijakan secara lebih sistematis kepada pembuat keputusan di tingkat eksekutif. Pemanfaatan policy brief ini menjadi bukti konkret bahwa birokrasi di Kabupaten Ngawi telah mengalami pergeseran menuju pola pengambilan keputusan yang lebih berbasis data, mengurangi subjektivitas dalam kebijakan, serta meningkatkan efektivitas dalam merumuskan program strategis daerah.

Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa transformasi birokrasi menuju tata kelola yang lebih inovatif telah berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, optimalisasi Litbang dalam memastikan bahwa inovasi tidak hanya menjadi konsep tetapi benar-benar diimplementasikan dalam berbagai sektor juga menjadi indikator bahwa Kabupaten Ngawi telah memiliki pondasi yang kuat dalam mengembangkan ekosistem inovasi daerah yang lebih adaptif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.



Renduk IPTEK Kabupaten Ngawi secara strategis disusun untuk menjawab kebutuhan peningkatan produktivitas dan efisiensi layanan publik, pertanian modern, industri rumah tangga, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Dalam dokumen tersebut, dirumuskan berbagai program prioritas seperti pengembangan pusat inovasi daerah, pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik, serta fasilitasi riset terapan di sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

Tabel 2.23 Kondisi Ekosistem Riset Inovasi Daerah Prioritas Kabupaten Ngawi Tahun 2023-2026

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi yang Diharapkan (2026)
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Menginventarisasi basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb), data inventor dan invensi pertanian berkelanjutan dalam bentuk sistem informasi.	Terbangunnya sistem informasi terkait pelaku bisnis pertanian berkelanjutan
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Kajian mengenai pusat inovasi, untuk pengembangan pertanian berkelanjutan	Dihasilkannya perencanaan pembangunan pusat inovasi untuk pengembangan pertanian berkelanjutan
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Kajian mengenai penyediaan inkubasi dan layanan tenant untuk	Dibentuknya inkubator bisnis pendukung pengembangan pertanian berkelanjutan
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Kajian mengenai anggaran yang secara khusus digunakan untuk pengembangan pertanian berkelanjutan	Tersusunnya model penganggaran khusus untuk pengembangan pertanian berkelanjutan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Kajian inventarisasi kekayaan intelektual terkait dengan kegiatan pertanian berkelanjutan	Terinventarisasinya kekayaan intelektual terkait dengan pertanian berkelanjutan
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Kajian mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi, berupa Perbup atau Perda tentang pertanian berkelanjutan	Dihasilkannya kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi, berupa Perda atau Perbup tentang Pembangunan Pertanian Berkelanjutan
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Kajian mengenai perencanaan besar (masterplan) pengembangan pertanian berkelanjutan	Dihasilkannya perencanaan besar (masterplan) pengembangan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Ngawi

Sumber : Bappeda Kabupaten Ngawi, 2025

Sebagai bentuk komitmen dalam membangun ekosistem riset dan inovasi daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi baru, Rencana Induk IPTEK Kabupaten Ngawi Tahun 2023–2026 menetapkan prioritas utama berupa percepatan pemerataan pembangunan dan penguatan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian berkelanjutan. Prioritas ini menjadi respons

strategis atas kebutuhan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) yang terintegrasi dengan karakteristik wilayah serta potensi unggulan Kabupaten Ngawi.

Langkah pertama yang disusun dalam dokumen ini adalah penataan basis data riset dan inovasi, yang mencakup inventarisasi data investasi, kewirausahaan, tenaga kerja, hingga data inventor dan invensi sektor pertanian. Targetnya adalah terbentuknya sistem informasi yang dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti dan mempermudah akses informasi bagi pelaku bisnis pertanian berkelanjutan.

Selanjutnya, pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi menjadi agenda penting dengan fokus pada penyusunan kajian pembangunan pusat inovasi pertanian dan penyediaan inkubator bisnis serta layanan *tenant* inovasi. Langkah ini diharapkan akan mendorong terbentuknya ekosistem inovasi lokal yang mendukung hilirisasi teknologi pertanian serta meningkatkan nilai tambah produk dan usaha tani.

Renduk IPTEK ini juga menggarisbawahi pentingnya aspek pendanaan dengan menyusun model penganggaran khusus untuk riset dan inovasi pertanian berkelanjutan, sebagai upaya menghadirkan keberlanjutan kebijakan lintas tahun anggaran. Tidak kalah penting, disusun pula kajian inventarisasi kekayaan intelektual sebagai dasar untuk melindungi dan memanfaatkan hasil inovasi daerah agar memiliki nilai ekonomi dan hukum yang jelas.

Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah mendorong reformasi kebijakan riset dan inovasi melalui penyusunan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tentang pembangunan pertanian berkelanjutan. Hal ini disertai dengan penyusunan perencanaan besar (masterplan) pengembangan pertanian berbasis riset dan teknologi sebagai acuan jangka menengah dan panjang.

Secara keseluruhan, prioritas dalam Rencana Induk IPTEK ini tidak hanya menjadi dokumen teknokratis, melainkan sebagai instrumen transformasi kelembagaan dan kebijakan yang



mendukung pertumbuhan ekonomi lokal berbasis inovasi, serta memperkuat posisi Kabupaten Ngawi sebagai pionir dalam pengembangan pertanian berkelanjutan berbasis riset dan teknologi di tingkat regional.

Pengembangan Rencana Induk IPTEK Kabupaten Ngawi secara strategis akan difokuskan pada penguatan sektor-sektor unggulan daerah, yaitu pertanian, perkebunan, dan pariwisata (khususnya agrowisata). Fokus ini sejalan dengan visi Bupati Ngawi untuk mendorong Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan, yang akan menjadi pendorong utama inovasi. Melalui pendekatan ini, IPTEK diharapkan mampu menciptakan nilai tambah pada produk-produk unggulan daerah, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Ngawi. Penerapan teknologi tidak hanya akan menyentuh aspek produktivitas, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan daya tarik wisata.

Namun, implementasi Rencana Induk IPTEK ini menghadapi permasalahan utama yang perlu segera diatasi. Tantangan pertama adalah kebutuhan mendesak untuk melakukan upgrade teknologi ramah lingkungan di sektor pertanian dan perkebunan. Banyak praktik saat ini yang mungkin belum sepenuhnya efisien atau berkelanjutan, sehingga diperlukan inovasi teknologi yang memungkinkan pengurangan limbah, efisiensi sumber daya (air, energi), dan penggunaan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan. Tantangan kedua yang tak kalah krusial adalah menarik generasi muda untuk terlibat lebih lanjut di sektor pertanian. Dengan IPTEK, pertanian dapat bertransformasi menjadi sektor yang lebih modern, efisien, dan menarik, sehingga mampu memikat minat generasi milenial dan Gen Z untuk berinovasi dan berkarier di bidang ini, sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian di masa depan.

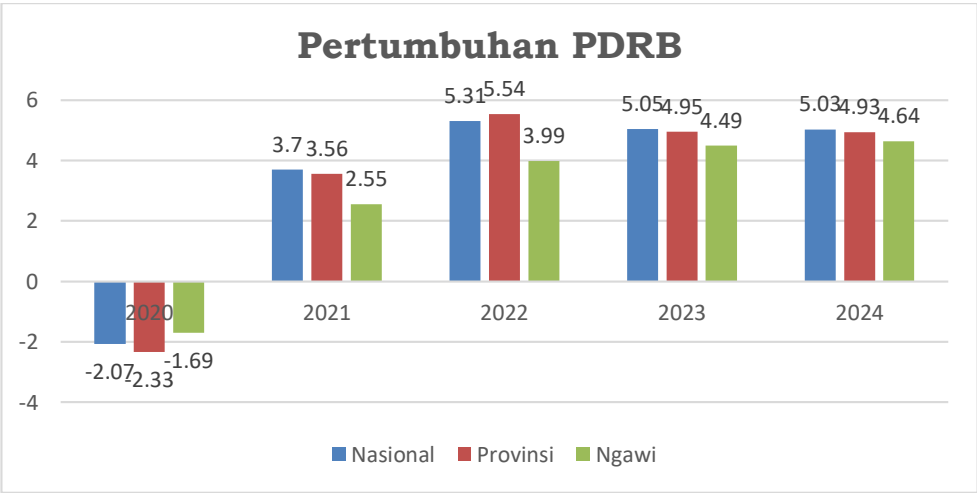
Dengan memprioritaskan peningkatan teknologi ramah lingkungan dan mendorong keterlibatan generasi muda dalam pertanian melalui IPTEK, Kabupaten Ngawi dapat mencapai tujuan pembangunan yang ambisius. Rencana Induk IPTEK akan menjadi



instrumen vital untuk mentransformasi sektor pertanian dan perkebunan menjadi lebih produktif, berkelanjutan, dan menarik, sekaligus memperkuat potensi agrowisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Ini akan mendukung Misi 2 (Produktivitas Ekonomi) dan Misi 1 (Kualitas SDM) secara langsung, dengan dampak positif pada misi-misi lainnya.

A. Pertumbuhan PDRB per Kapita

Pertumbuhan PDRB per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pertumbuhan PDRB per kapita didapatkan dari hasil pembagian produk domestik bruto daerah dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pertumbuhan PDRB per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.



Gambar 2.39 Pertumbuhan PDRB Per Kapita
Sumber : Badan Pusat Staistik Kabupaten Ngawi, 2025

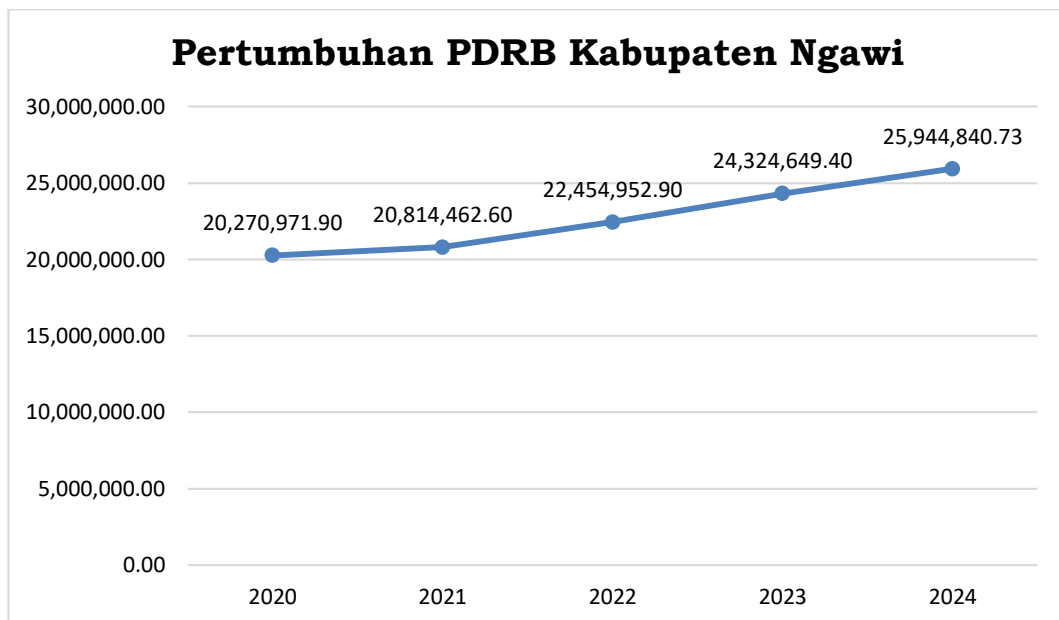
Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Ngawi mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, dengan penurunan sebesar -1,69%, lebih baik dibandingkan provinsi (-2,33%) namun masih lebih rendah dari nasional (-2,07%). Pemulihan ekonomi mulai terjadi sejak 2021 dengan pertumbuhan sebesar 2,55%, tetapi masih tertinggal dari nasional (3,7%) dan

provinsi (3,56%). Pada 2022, pertumbuhan PDRB per kapita meningkat signifikan menjadi 3,99%, meskipun tetap lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional yang berada di atas 5%. Tren ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di Ngawi berjalan lebih lambat dibandingkan daerah lain, meskipun tetap mengalami perbaikan hingga tahun 2024 dengan pertumbuhan mencapai 4,64%.

Lambatnya pemulihan PDRB per kapita di Kabupaten Ngawi disebabkan oleh dominasi sektor pertanian dalam struktur ekonomi, yang cenderung memiliki nilai tambah rendah dibandingkan sektor industri dan jasa. Selain itu, keterbatasan investasi di sektor ekonomi produktif dan masih rendahnya daya saing tenaga kerja juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan. Jika tren ini terus berlanjut, kesenjangan ekonomi dengan daerah lain akan semakin melebar, serta memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan PDRB per kapita harus menjadi prioritas. Diversifikasi ekonomi dengan mendorong industri pengolahan berbasis pertanian, pengembangan pariwisata lokal, serta peningkatan daya saing sektor jasa dapat menjadi solusi. Selain itu, perbaikan infrastruktur, kemudahan investasi, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja perlu dioptimalkan guna menarik investasi di sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan pertumbuhan PDRB per kapita Ngawi dapat lebih kompetitif dan mampu mengejar ketertinggalan dari provinsi dan nasional dalam lima tahun ke depan.





Gambar 2.40 Realisasi PDRB Kabupaten Ngawi

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten meskipun ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi antara lain :

- a. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi Kabupaten Ngawi. Aktivitas ekonomi yang terhenti, terutama di sektor perdagangan, industri, dan pariwisata, menyebabkan kontraksi ekonomi. PDRB pada tahun ini tercatat sebesar Rp 20.270.971,90 juta, menurun akibat penurunan daya beli masyarakat dan terbatasnya mobilitas yang berdampak pada konsumsi dan produksi. Penurunan ekonomi ini sejalan dengan kondisi yang terjadi di tingkat nasional dan provinsi.
- b. Tahun 2021, pemulihan ekonomi mulai terlihat meskipun dengan pertumbuhan yang lambat. PDRB pada tahun ini tercatat Rp 20.814.462,60 juta. Sektor-sektor ekonomi yang terdampak mulai pulih, namun daya beli masyarakat Kabupaten Ngawi masih lemah dan mobilitas terbatas akibat dampak pandemi yang belum sepenuhnya teratasi. Oleh karena itu, pertumbuhannya cenderung lebih lambat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan provinsi dan nasional.



- c. Tahun 2022, pemulihan ekonomi yang lebih kuat tercatat pada tahun ini dengan PDRB mencapai Rp 22.454.952,90 juta. Sektor pertanian dan industri pengolahan mulai mengalami akselerasi, berkat upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat. Meskipun ada peningkatan, sektor produktif seperti industri masih menghadapi tantangan besar terkait dengan minimnya investasi di sektor tersebut, yang menyebabkan Kabupaten Ngawi tertinggal dibandingkan dengan pertumbuhan nasional dan provinsi.
- d. Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi mulai mendekati angka pertumbuhan provinsi dan nasional dengan PDRB mencapai Rp 24.324.649,40 juta. Angka ini menunjukkan adanya penguatan ekonomi yang disebabkan oleh peningkatan investasi, perbaikan infrastruktur, serta adanya dukungan terhadap UMKM. Sektor industri dan perdagangan mulai berfungsi lebih optimal, berkontribusi signifikan terhadap PDRB Kabupaten Ngawi.
- e. Tahun 2024, PDRB Kabupaten Ngawi mencapai Rp 25.944.840,73 juta. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi terus meningkat dengan stabil. Meskipun sektor pertanian dan industri menunjukkan peningkatan yang signifikan, upaya diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor non-pertanian akan menjadi kunci keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan tren positif, berikut adalah proyeksi pembangunan yang perlu dilakukan dalam lima tahun ke depan (2025-2030) untuk Kabupaten Ngawi :

- a. Dalam lima tahun ke depan, Kabupaten Ngawi harus berfokus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 4,5% hingga 5% per tahun. Stabilitas ini dapat tercapai dengan meningkatkan investasi di sektor-sektor produktif dan memperkuat sektor-sektor unggulan seperti

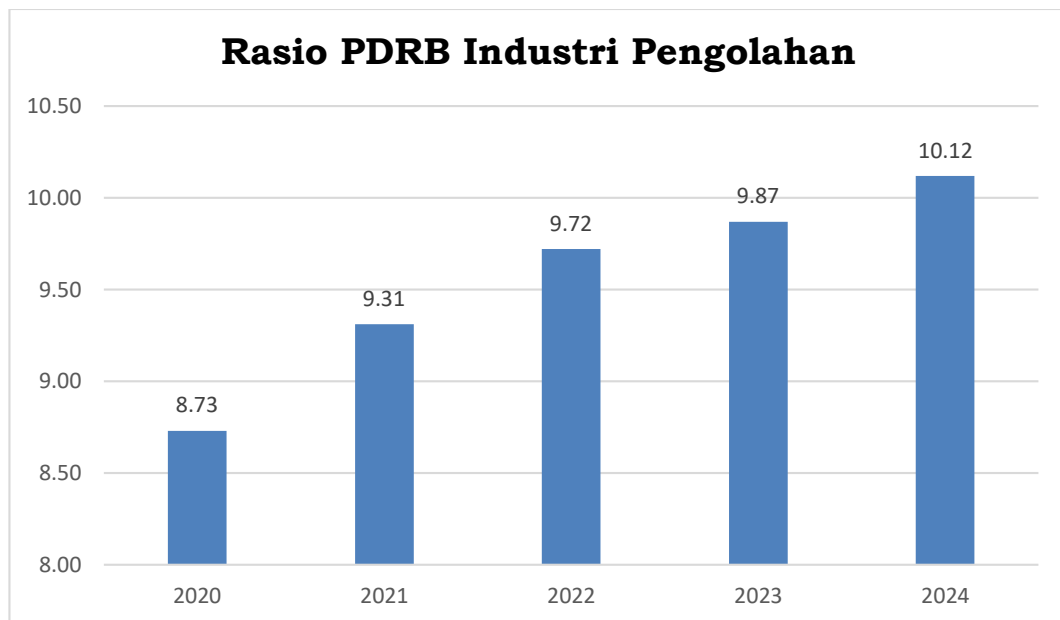


- pertanian dan industri pengolahan. Kebijakan peningkatan investasi akan sangat krusial dalam mendukung target ini.
- b. Mengingat sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Ngawi, perlu ada upaya untuk meningkatkan produktivitas dengan teknologi pertanian yang lebih modern. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung, seperti jaringan irigasi, jalan, dan fasilitas pengolahan hasil pertanian, harus menjadi prioritas utama. Investasi di bidang ini akan memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendorong sektor pertanian menuju swasembada yang lebih tinggi.
 - c. Untuk mendorong keberagaman ekonomi, Kabupaten Ngawi perlu memfokuskan pengembangan sektor pariwisata yang berbasis alam dan budaya lokal. Pengembangan objek wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan akan mendatangkan pendapatan daerah yang signifikan. Selain itu, sektor industri kreatif seperti kerajinan tangan, seni, dan budaya juga harus didorong untuk memberikan peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat.
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan global. Pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar, seperti keterampilan di sektor industri, teknologi, dan jasa, akan mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Ngawi. Program-program pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah dan sektor swasta harus sejalan dengan kebutuhan industri lokal.
 - e. Perkembangan UMKM yang kuat akan menjadi pilar penting dalam mendukung perekonomian Kabupaten Ngawi. Dukungan terhadap UMKM melalui akses pembiayaan, pemasaran, serta peningkatan kualitas produk akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, kemitraan antara UMKM dan sektor



industri besar harus diperkuat untuk menciptakan sinergi yang positif dalam perekonomian daerah.

B. Rasio PDRB Industri Pengolahan



Gambar 2.41 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan terhadap total PDRB Kabupaten Ngawi pada kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang menguat secara gradual dan konsisten. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini berada pada level 8,73 persen, kemudian mengalami kenaikan signifikan menjadi 9,31 persen di tahun 2021, serta terus meningkat menjadi 9,72 persen pada tahun 2022. Kecenderungan pertumbuhan ini berlanjut hingga tahun 2023 dengan capaian 9,87 persen, dan pada tahun 2024 berhasil menembus angka dua digit yakni sebesar 10,12 persen.

Kenaikan rasio tersebut mengindikasikan adanya pergeseran struktur ekonomi daerah menuju basis ekonomi yang lebih berbasis transformasi nilai tambah, khususnya dari sektor sekunder. Ini mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan industri pengolahan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam lima tahun terakhir, baik melalui penguatan kapasitas produksi, kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur



pendukung, maupun fasilitasi investasi sektor industri kecil, menengah, dan besar.

Secara normatif, pertumbuhan rasio ini memperlihatkan peran industri pengolahan yang semakin strategis dalam mendorong perekonomian daerah, sekaligus sebagai katalisator perluasan kesempatan kerja dan pengurangan ketergantungan pada sektor-sektor primer. Dengan tercapainya angka 10,12 persen pada tahun 2024, maka Pemerintah Daerah memiliki landasan yang kuat untuk mengakselerasi kebijakan hilirisasi industri berbasis potensi unggulan lokal dan integrasi rantai nilai regional, sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka menengah ke depan. Rasionalisasi dan keberlanjutan arah kebijakan ini menjadi krusial dalam rangka mengonsolidasikan daya saing wilayah berbasis industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 2.42 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

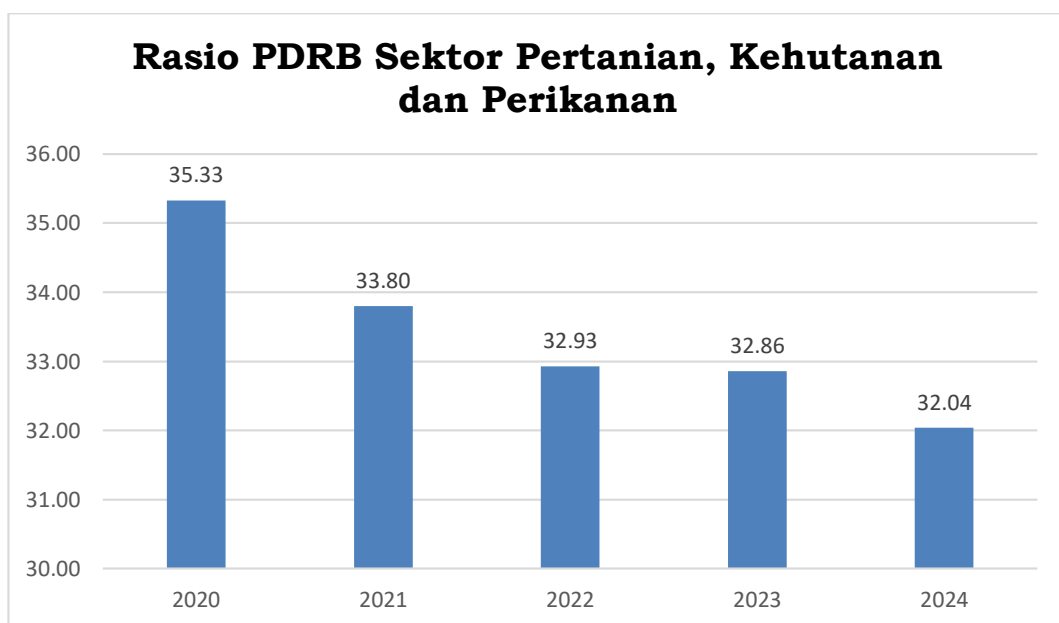
Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari sub sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum di Kabupaten Ngawi menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan positif selama kurun waktu lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, kontribusi subsektor ini terhadap total PDRB tercatat sebesar 2,47 persen. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 2,63 persen



pada tahun 2021, menunjukkan pemulihan ekonomi awal pasca perlambatan akibat pandemi COVID-19.

Pertumbuhan berlanjut secara progresif pada tahun-tahun berikutnya, dengan rasio mencapai 2,76 persen pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 2,81 persen pada tahun 2023. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan adanya penguatan fundamental pada sektor jasa pariwisata dan kuliner lokal, baik dari sisi permintaan domestik maupun peningkatan kapasitas penyediaan layanan.

Puncaknya, pada tahun 2024, rasio subsektor ini terhadap total PDRB daerah mencapai 2,94 persen, menandai penguatan struktur ekonomi daerah yang semakin inklusif terhadap sektor tersier. Kenaikan akumulatif sebesar 0,47 persen poin selama lima tahun mencerminkan transformasi ekonomi daerah menuju diversifikasi sektor unggulan yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan tren konsumsi masyarakat.



Gambar 2.43 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan salah satu pilar utama struktur perekonomian Kabupaten Ngawi yang secara historis memiliki kontribusi dominan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Namun,



dalam periode lima tahun terakhir (2020–2024), rasio sektor ini terhadap total PDRB mengalami tren penurunan secara gradual, yang mencerminkan proses transformasi struktural ekonomi daerah dari dominasi sektor primer menuju diversifikasi sektor sekunder dan tersier.

Pada tahun 2020, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap total PDRB tercatat sebesar 35,33 persen. Angka ini mengalami penurunan menjadi 33,80 persen pada tahun 2021, kemudian menurun lebih lanjut menjadi 32,93 persen pada tahun 2022. Tren penurunan ini berlanjut secara konsisten pada tahun 2023 dengan angka 32,86 persen, dan mencapai titik terendah pada periode ini sebesar 32,04 persen di tahun 2024.

Penurunan akumulatif sebesar 3,29 persen poin dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran orientasi ekonomi daerah yang semakin terkonsentrasi pada penguatan sektor industri pengolahan, perdagangan, serta jasa-jasa lainnya. Kendati demikian, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memegang peranan strategis dalam menjaga ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, serta sebagai basis utama bagi pembangunan ekonomi pedesaan.

Oleh karena itu, meskipun kontribusinya secara relatif terhadap PDRB mengalami penurunan, sektor ini tetap memerlukan intervensi kebijakan yang bersifat transformatif dan berorientasi pada peningkatan produktivitas, efisiensi lahan, serta diversifikasi komoditas berbasis potensi lokal. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menekankan pada pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan nilai tambah sektor pertanian dalam kerangka ekonomi modern.

C. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian

Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non-Pertanian di Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi rakyat yang berada di luar sektor pertanian, dengan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta penguatan struktur ekonomi lokal. UKM non-pertanian ini meliputi



berbagai subsektor seperti perdagangan, industri pengolahan, jasa, konstruksi, serta transportasi, yang kesemuanya memainkan peran sentral dalam menggerakkan roda perekonomian daerah secara lebih inklusif dan resilien.

Dalam periode tersebut, fluktuasi jumlah UKM non-pertanian tercatat cukup mencolok, yang tidak terlepas dari pengaruh eksternal seperti pandemi COVID-19 yang melanda pada awal dekade, serta transisi adaptasi teknologi dan digitalisasi yang turut memengaruhi struktur dan kapasitas pelaku usaha skala kecil dan menengah. Meski demikian, tren pemulihan ekonomi yang mulai menguat sejak tahun 2023 memperlihatkan arah positif terhadap stabilisasi dan peningkatan kembali jumlah pelaku UKM non-pertanian di daerah.

Proporsi UKM non-pertanian ini berperan sebagai salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja ekonomi kerakyatan dan sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan program pemberdayaan ekonomi lokal dalam dokumen RPJMD. Oleh sebab itu, penguatan ekosistem UKM melalui kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi dengan rantai pasok dan pasar digital menjadi bagian dari strategi intervensi kebijakan yang harus diurus utamakan pada periode perencanaan mendatang. Upaya ini krusial guna mendorong terwujudnya struktur ekonomi daerah yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif berbasis kewirausahaan rakyat.

D. Ekspor Barang dan Jasa PDRB

Indikator *Ekspor Barang dan Jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* Kabupaten Ngawi selama periode tahun 2020 hingga 2024 merupakan bagian yang integral dalam mengkaji kinerja sektor eksternal daerah dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Indikator ini merepresentasikan total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh wilayah Kabupaten Ngawi dan dijual ke luar wilayah administratifnya, baik ke daerah lain di dalam negeri (antar-daerah) maupun ke luar negeri, dalam suatu tahun tertentu. Nilai ini kemudian dibandingkan terhadap total PDRB atas dasar harga



berlaku untuk menggambarkan kontribusi sektor ekspor terhadap output ekonomi regional.

Secara operasional, indikator ini mencerminkan sejauh mana kapasitas produksi daerah mampu menembus pasar eksternal dan menciptakan nilai tambah ekonomi dari aktivitas perdagangan lintas batas wilayah. Peningkatan kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB mengindikasikan penguatan daya saing komoditas unggulan daerah, keberhasilan industrialisasi berbasis sumber daya lokal, serta efektifnya strategi promosi dan fasilitasi ekspor oleh pemerintah daerah.

Selama periode 2020–2024, dinamika ekspor barang dan jasa Kabupaten Ngawi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh makro eksternal, kebijakan nasional, serta kapabilitas internal daerah dalam mengelola rantai pasok dan memasarkan produk-produknya. Pada tahun 2020 dan 2021, terjadi tekanan yang cukup signifikan terhadap kinerja ekspor daerah akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan disrupsi pada aktivitas produksi, hambatan logistik, penurunan permintaan global, serta gangguan arus perdagangan antar wilayah. Dampaknya adalah menurunnya kontribusi ekspor terhadap PDRB, terutama pada sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian yang menjadi andalan utama Kabupaten Ngawi.

Namun demikian, sejak tahun 2022 hingga 2024, tren kontribusi ekspor terhadap PDRB menunjukkan pemulihan yang progresif. Hal ini ditopang oleh pulihnya permintaan pasar, peningkatan produktivitas sektor pertanian komersial dan industri kecil-menengah, serta upaya pemerintah daerah dalam mendorong ekspor antarwilayah domestik melalui penguatan jejaring distribusi, peningkatan kualitas produk, serta penyediaan sarana prasarana pendukung seperti infrastruktur jalan, kawasan industri, dan pusat logistik. Sektor pengolahan makanan dan minuman, hasil pertanian unggulan seperti jagung dan padi, serta sektor jasa berbasis digital dan transportasi mulai menunjukkan peran signifikan dalam struktur ekspor daerah.

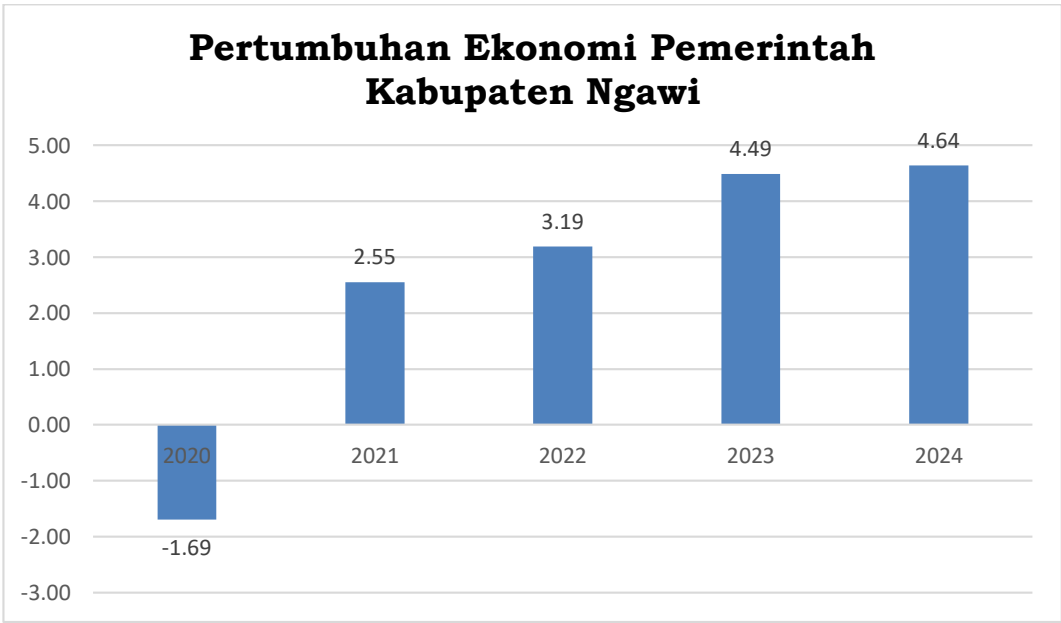
Oleh karena itu, dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Ngawi, indikator ekspor barang dan jasa terhadap PDRB



menjadi barometer utama dalam mengukur daya saing ekonomi daerah secara eksternal. Pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan dan program strategis yang mampu mengakselerasi produktivitas sektor-sektor eksporabel, meningkatkan konektivitas ekonomi antarwilayah, serta mendorong pelaku usaha lokal untuk berorientasi pasar luar melalui berbagai insentif, pelatihan, dan pendampingan. Dengan demikian, peningkatan indikator ini di masa mendatang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkualitas, dan inklusif, sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah daerah.

E. Angka Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per-kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



Gambar 2.44 Angka Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025



Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal ini terutama disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020, yang mengakibatkan kontraksi ekonomi di seluruh sektor.

- a. Pada tahun 2020, Kabupaten Ngawi mengalami kontraksi ekonomi yang cukup tajam akibat dampak langsung dari pandemi COVID-19. Aktivitas ekonomi yang terganggu, pembatasan sosial, serta penurunan konsumsi dan investasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi terperosok ke angka negatif. Kondisi ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh banyak daerah, termasuk Kabupaten Ngawi, dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis global.
- b. Tahun 2021, perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan meskipun dengan laju yang moderat. Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai melakukan berbagai langkah untuk merangsang pemulihan ekonomi, termasuk mengoptimalkan program bantuan sosial dan melanjutkan pembenahan infrastruktur. Meskipun lebih baik dibandingkan tahun 2020, laju pertumbuhannya masih terbatas oleh daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan ketidakpastian global yang menghambat sektor-sektor vital seperti industri dan perdagangan.
- c. Pada tahun 2022, perekonomian Kabupaten Ngawi mulai memperlihatkan tren yang lebih positif. Tumbuh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, berkat pemulihan sektor-sektor ekonomi utama seperti pertanian dan industri pengolahan. Meski demikian, Kabupaten Ngawi masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan investasi pada sektor-sektor strategis dan perlambatan pertumbuhan sektor yang lebih terdampak oleh pandemi.
- d. Pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan pada tahun 2023, dengan laju yang mendekati angka pertumbuhan provinsi dan nasional. Hal ini dipicu oleh adanya akselerasi dalam sektor-sektor seperti perdagangan,





industri pengolahan, dan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah daerah juga berfokus pada peningkatan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM yang dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi dan konsumsi.

- e. Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Ngawi terus menunjukkan peningkatan yang stabil. Program-program pemulihan ekonomi yang dijalankan sebelumnya mulai memberikan hasil yang positif, diiringi dengan peningkatan investasi dan dukungan terhadap sektor-sektor unggulan daerah. Proyeksi yang optimis menunjukkan bahwa Kabupaten Ngawi perlu fokus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan stabil dalam kisaran 4% hingga 5% per tahun, dengan upaya meningkatkan daya saing sektor-sektor utama, khususnya pertanian dan industri pengolahan. Kebijakan peningkatan investasi dan kemudahan berbisnis harus menjadi prioritas utama untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan.
- f. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik menjadi kunci penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi. Peningkatan akses transportasi, jaringan irigasi untuk pertanian, dan infrastruktur energi yang lebih efisien akan memperkuat sektor-sektor produktif dan meningkatkan daya tarik investasi.
- g. Kabupaten Ngawi harus berfokus pada diversifikasi ekonomi dengan menggali potensi sektor-sektor selain pertanian, seperti sektor pariwisata, industri kreatif, dan teknologi. Pengembangan pariwisata yang berbasis alam dan budaya lokal dapat memperkenalkan Kabupaten Ngawi sebagai destinasi wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- h. Fokus pada pengembangan SDM yang berkualitas sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Ngawi siap menghadapi tantangan perubahan ekonomi global. Pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, dan penguatan kapasitas SDM lokal akan menjadi pilar utama



- dalam mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing.
- i. UMKM harus menjadi fokus dalam proyeksi pembangunan Kabupaten Ngawi. Dukungan terhadap UMKM dalam bentuk akses pembiayaan, pemasaran, dan penguatan kualitas produk sangat penting. Selain itu, sektor industri kreatif harus diberdayakan sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi, menciptakan peluang baru di bidang seni, kerajinan tangan, dan digitalisasi.
 - j. perekonomian Kabupaten Ngawi telah kembali ke jalur pertumbuhan yang lebih stabil dan sehat, menciptakan fondasi yang baik untuk pembangunan ekonomi di masa mendatang.

F. Kondisi Kemiskinan

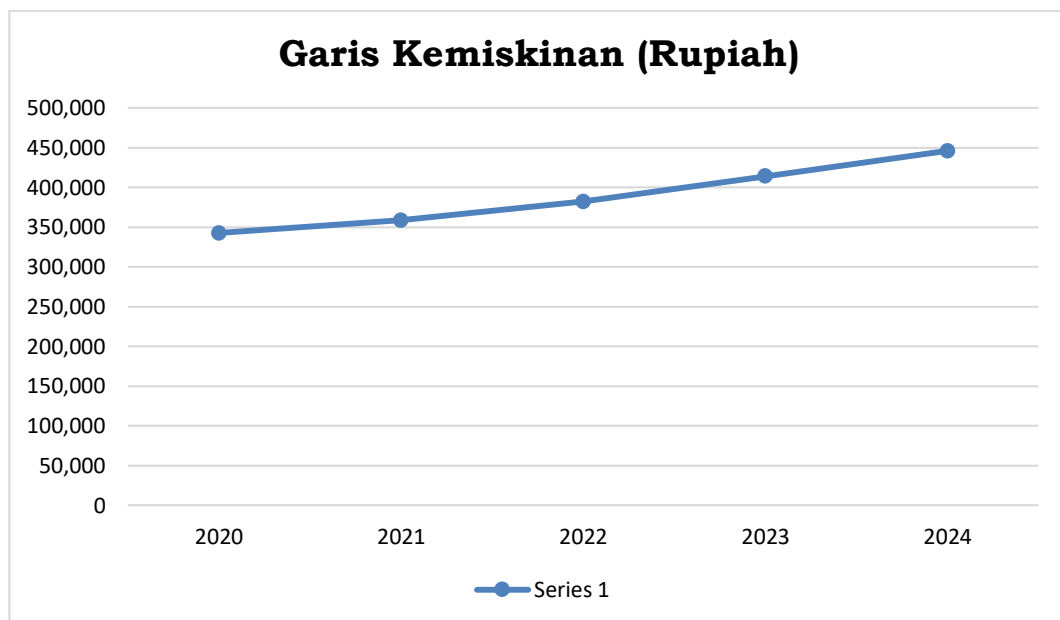
Kondisi Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Beberapa kondisi kemiskinan dapat dilihat melalui garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, dan angka kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Seperti yang digambarkan tabel dibawah ini, garis kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2020-2024 dalam kurun 5 tahun.

Garis Kemiskinan Kabupaten Ngawi dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan perubahan dalam daya beli masyarakat serta perkembangan ekonomi yang mempengaruhi standar kesejahteraan sosial di daerah tersebut. Berdasarkan data



yang tersedia, garis kemiskinan di Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :



Gambar 2.45 Garis Kemiskinan Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Pada tahun 2020, garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp 342.556. Angka ini mencerminkan tingkat kemiskinan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar untuk memenuhi pangan dan non-pangan bagi setiap individu. Memasuki tahun 2021, garis kemiskinan mengalami kenaikan menjadi Rp 358.663, mencerminkan adanya inflasi dan perubahan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Pada tahun 2022, garis kemiskinan kembali meningkat menjadi Rp 382.301, yang menandakan adanya penyesuaian lebih lanjut terhadap kondisi ekonomi yang berkembang. Kenaikan ini memperlihatkan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika sosial-ekonomi yang terus berubah. Selanjutnya, pada tahun 2023, garis kemiskinan tercatat mencapai Rp 413.947, yang menggambarkan penyesuaian lanjutan terhadap tingkat inflasi serta perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. Terakhir, pada tahun 2024, garis kemiskinan Kabupaten Ngawi diperkirakan mencapai Rp 445.865, menunjukkan peningkatan signifikan dalam nilai standar kemiskinan yang harus dipenuhi masyarakat. Hal ini



menggambarkan dinamika ekonomi yang terus berkembang serta upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Kabupaten Ngawi.

Dengan demikian, pergerakan garis kemiskinan dari tahun 2020 hingga 2024 di Kabupaten Ngawi menggambarkan upaya berkesinambungan dalam menanggulangi kemiskinan melalui penyesuaian yang responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Peningkatan garis kemiskinan ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Ngawi pada tahun-tahun mendatang.

- a. Dari tahun 2020 hingga 2024, garis kemiskinan di Kabupaten Ngawi terus mengalami kenaikan yang stabil setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya inflasi dan peningkatan harga barang-barang kebutuhan pokok yang menjadi acuan dalam menentukan garis kemiskinan. Kenaikan ini menunjukkan bahwa biaya hidup di Kabupaten Ngawi juga mengalami peningkatan, dan perluasan akses untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi tantangan yang harus dihadapi.
- b. Kenaikan garis kemiskinan yang bertahap ini juga mengindikasikan bahwa standar hidup di Kabupaten Ngawi harus terus disesuaikan dengan perubahan ekonomi dan daya beli masyarakat. Meskipun ada kenaikan, namun pendapatan masyarakat yang rendah masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi ketidakmampuan memenuhi standar hidup yang lebih tinggi.
- c. Dengan adanya kenaikan yang konsisten pada garis kemiskinan, ini mengindikasikan bahwa meskipun ada perbaikan dalam perekonomian daerah, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tetap menjadi masalah yang perlu diatasi. Ketidakmampuan sebagian besar masyarakat dalam mengikuti laju inflasi menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan.

Melihat kondisi di atas, berikut adalah langkah-langkah proyeksi pembangunan yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan yang ada :

- a. Berdasarkan analisis mengenai peningkatan garis kemiskinan, Kabupaten Ngawi perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin, terutama dengan meningkatkan akses terhadap modal, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Mengembangkan sektor pertanian lokal dan UMKM dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat berpendapatan rendah, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
- b. Selain itu, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengurangi ketimpangan yang tercermin dari garis kemiskinan, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Kabupaten Ngawi akan memperkuat sektor ekonomi lokal. Infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, pasar, dan fasilitas kesehatan, akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akses yang lebih mudah ke pasar dan fasilitas umum akan meningkatkan efisiensi ekonomi serta mengurangi ketimpangan pendapatan.
- c. Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang berkelanjutan, penting untuk meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Program yang meningkatkan kualitas pendidikan dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat berpendapatan rendah sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Peningkatan keterampilan kerja juga akan membantu masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik, yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan.

G. Kondisi Potensi Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata diposisikan sebagai salah satu motor penggerak utama dalam percepatan pembangunan dan peningkatan daya saing ekonomi Kabupaten Ngawi. Sebagai sektor



yang memiliki efek berganda (*multiplier effect*) yang luas, kemajuan pariwisata akan secara langsung mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait lainnya, terutama ekonomi kreatif, UMKM, dan pertanian lokal. Oleh karena itu, arah kebijakan pariwisata ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi pada penciptaan ekosistem pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan serta kearifan lokal. Sub bab ini akan menguraikan ragam potensi unik yang menjadi fondasi bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Ngawi yang berkarakter dan berdaya saing.

Potensi pariwisata Kabupaten Ngawi teridentifikasi bertumpu pada tiga pilar utama yang unik dan saling melengkapi : (1) Wisata Sejarah dan Purbakala berkelas dunia, (2) Wisata Alam dan Agrowisata di lereng Gunung Lawu, serta (3) Wisata Budaya dan Tradisi yang otentik. Kombinasi ketiganya memberikan Ngawi karakter destinasi yang kuat, yang mampu menawarkan pengalaman edukatif, rekreatif, sekaligus kultural.

Potensi wisata Sejarah dan Purbakala merupakan mahkota pariwisata Kabupaten Ngawi yang memberikan karakter unik dan daya saing di tingkat nasional bahkan internasional. Kekayaan ini menawarkan sebuah perjalanan waktu yang luar biasa, mulai dari jejak kehidupan manusia purba jutaan tahun yang lalu, warisan geologi yang membentuk bentang alam, hingga peninggalan era klasik dan masa kolonial. Pilar utama dari potensi ini adalah keberadaan Museum Trinil sebagai etalase peradaban dunia dan Benteng Van den Bosch sebagai saksi bisu sejarah kolonialisme. Didukung oleh berbagai situs geologi dan arkeologi lainnya, Kabupaten Ngawi memantapkan dirinya sebagai destinasi utama untuk wisata edukasi (*edu-tourism*) dan wisata warisan budaya (*heritage tourism*).

Lebih lanjut, Kabupaten Ngawi dianugerahi bentang alam yang subur dan menawan, terutama di kawasan lereng Gunung Lawu yang sejuk dan hijau. Potensi ini menjadi fondasi utama pengembangan Wisata Alam dan Agrowisata yang berfokus pada pengalaman rekreasi keluarga, petualangan ringan, dan



ketenangan. Keunggulan pada kategori ini ditopang oleh ikon agrowisata Kebun The Jamus serta berbagai destinasi air terjun dan waduk yang tidak hanya indah secara visual tetapi juga memberikan dampak ekologis dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pengembangan wisata alam ini diarahkan pada konsep ekowisata yang berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi. Adapun daftar destinasi nya sebagai berikut :

- a. Kebun I Jamus
- b. Srambang Park
- c. Air Terjun Pengantin
- d. Air Terjun Suwono
- e. Waduk Pondok
- f. Embung Kuniran
- g. Air Terjun Teleng Ngrayudan
- h. Mata Air Sumber Lanang, Koso, dan Cekok Mondol (sebagai potensi wisata alam berbasis air)

Selain itu, kekuatan pariwisata Kabupaten Ngawi juga terletak pada denyut kebudayaan dan tradisi masyarakatnya yang masih hidup dan terjaga hingga kini. Wisata Budaya dan Tradisi menawarkan pengalaman yang otentik dan mendalam, di mana wisatawan tidak hanya menjadi penonton tetapi dapat merasakan langsung kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Potensi ini berpusat pada penyelenggaraan ritus adat yang unik dan sakral, serta tempat-tempat yang memiliki nilai historis-spiritual yang kuat bagi masyarakat Jawa. Kategori ini memberikan dimensi spiritual dan kultural yang memperkaya pengalaman berwisata di Ngawi. Berikut destinasi wisatanya :

- a. Pemandian Tawun (dengan Ritual Keduk Beji) : Tradisi adat tahunan yang unik dan menjadi daya tarik utama.
- b. Palereman Alas Ketonggo Srigati : Destinasi wisata religi dan spiritual yang kental dengan mitologi dan sejarah kebudayaan Jawa.



- c. Event Kebudayaan Tahunan : Seperti Jamasan Pusaka, Festival Karawitan, dan Ngawi Specta Carnival yang menjadi atraksi budaya periodik.

2.3.5 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Ngawi menjadi salah satu arah transformasi pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan upaya nasional dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Sebagai daerah dengan basis ekonomi utama di sektor pertanian, kehutanan, dan sumber daya air, konsep ekonomi hijau di Ngawi dapat diartikan sebagai strategi untuk mendorong produktivitas ekonomi tanpa merusak lingkungan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam yang efisien, pengurangan emisi karbon dari aktivitas pertanian, peningkatan praktik ramah lingkungan dalam industri kecil, serta optimalisasi energi terbarukan di sektor publik dan rumah tangga.

Sementara itu, konsep ekonomi biru yang berfokus pada pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya air relevan diterapkan di Kabupaten Ngawi mengingat potensi besar yang dimiliki dari sungai-sungai utama seperti Bengawan Solo dan sistem irigasi pertanian yang luas. Melalui pendekatan ekonomi biru, pengelolaan sumber daya air diarahkan agar tidak hanya berfungsi untuk kebutuhan pertanian, tetapi juga mendukung ekosistem perikanan darat, konservasi daerah aliran sungai (DAS), dan pengembangan wisata air berbasis masyarakat. Upaya ini sejalan dengan peningkatan ketahanan pangan daerah serta mitigasi risiko bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan yang kerap terjadi akibat perubahan iklim.

Ke depan, penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Ngawi perlu diperkuat melalui sinergi lintas sektor dan kolaborasi multipihak, baik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas petani, maupun lembaga pendidikan. Pemerintah dapat memfasilitasi program insentif bagi pelaku usaha ramah lingkungan, memperluas praktik pertanian berkelanjutan



(*sustainable agriculture*), serta mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah dan energi. Dengan strategi yang terarah, Kabupaten Ngawi tidak hanya mampu meningkatkan daya saing ekonomi lokal, tetapi juga berperan sebagai contoh daerah agraris yang berhasil mewujudkan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan berbasis keseimbangan ekologi.

2.3.6 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan elemen krusial dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan daya saing ekonomi daerah di era revolusi industri 4.0. Dalam konteks RPJMD, transformasi digital dipandang sebagai akselerator pembangunan yang mampu mempercepat integrasi sistem, transparansi layanan, serta pemberdayaan masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

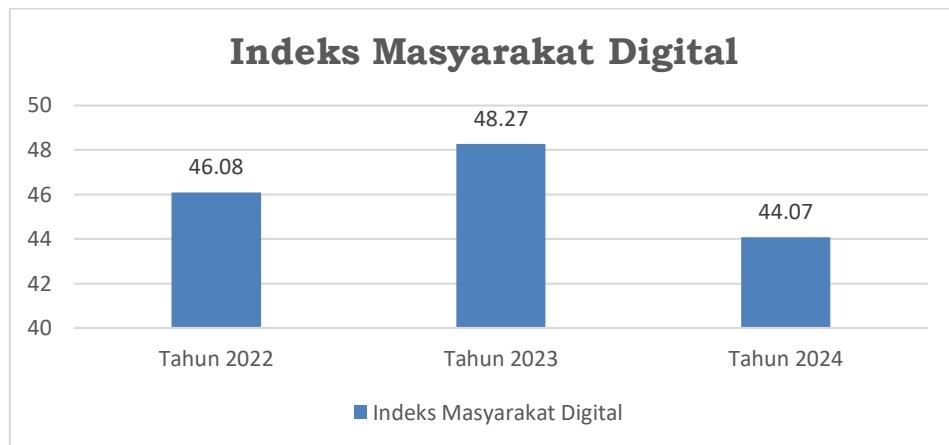
2.3.6.1 Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan, pemanfaatan, dan dampak transformasi digital di kalangan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana masyarakat mampu mengakses, memahami, dan menggunakan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, hingga interaksi sosial. Secara umum, indeks ini mencakup tiga komponen utama: akses digital (infrastruktur dan konektivitas), literasi digital (kemampuan dan keterampilan menggunakan teknologi), serta pemanfaatan digital (penggunaan teknologi dalam aktivitas produktif dan layanan).

Nilai indeks masyarakat digital yang tinggi menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki ekosistem digital yang inklusif, di mana masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap internet dan perangkat teknologi, tetapi juga mampu menggunakannya secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup. Sebaliknya, nilai indeks yang rendah mengindikasikan adanya kesenjangan digital (*digital*



divide), baik dari sisi infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia, maupun keterjangkauan layanan digital.



Gambar 2.46 Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024

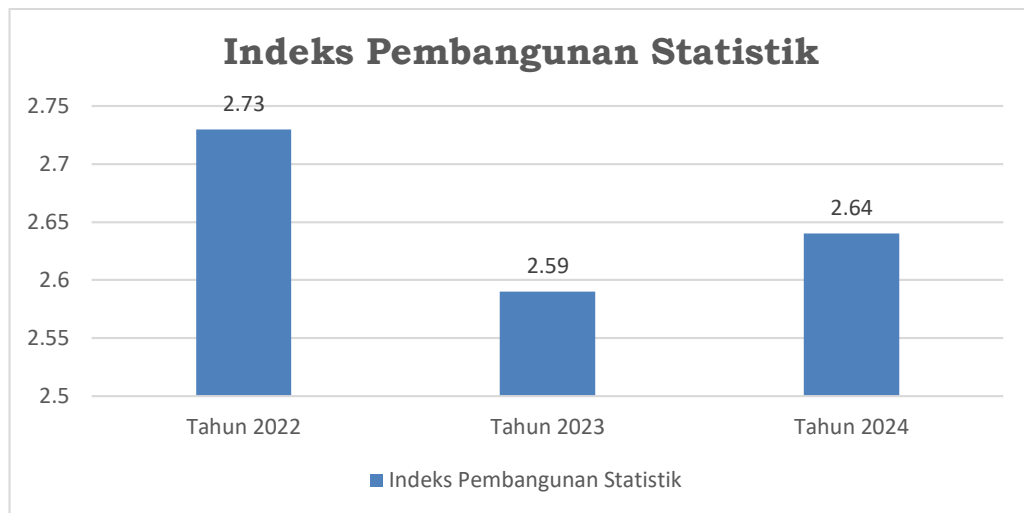
Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital RI, 2025

Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Ngawi menunjukkan fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, indeks berada pada angka 46,08, kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2023 mencapai 48,27. Peningkatan ini menggambarkan adanya perkembangan dalam pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat, baik dalam akses, penggunaan, maupun literasi digital.

Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 44,07, lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan, baik dari sisi keterjangkauan infrastruktur digital, kesenjangan literasi masyarakat, maupun faktor eksternal yang memengaruhi daya adopsi teknologi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian positif pada tahun 2023 belum dapat dipertahankan secara konsisten.

Secara keseluruhan, tren ini menegaskan pentingnya intervensi kebijakan untuk memperkuat ekosistem digital masyarakat. Pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan kualitas jaringan internet, memperluas akses teknologi yang merata hingga pedesaan, serta mengembangkan program literasi digital yang berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, diharapkan Indeks Masyarakat Digital dapat kembali meningkat dan memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing daerah.





Gambar 2. 47 Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi, 2025

Indeks Pembangunan Statistik pada tahun 2022 mencatat angka tertinggi selama periode pengamatan, yakni sebesar 2,73. Capaian ini mencerminkan adanya penguatan dalam kapasitas pengelolaan data dan statistik, baik dari sisi ketersediaan data maupun pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, koordinasi antarinstansi dalam mendukung sistem statistik berjalan lebih optimal.

Namun demikian, pada tahun 2023 indeks ini mengalami penurunan menjadi 2,59. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas dan kelengkapan data, serta keterbatasan sumber daya yang mungkin memengaruhi proses penyediaan dan pengolahan data statistik. Penurunan ini juga bisa mencerminkan masih adanya kesenjangan dalam pemanfaatan data statistik oleh perangkat daerah, sehingga pengambilan keputusan berbasis data belum sepenuhnya maksimal.

Pada tahun 2024, indeks kembali mengalami perbaikan menjadi 2,64 meskipun belum mampu melampaui capaian tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan sistem statistik, baik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia,



optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, maupun peningkatan koordinasi lintas sektor. Dengan tren tersebut, perlu terus dilakukan penguatan dalam pengelolaan data dan statistik agar indeks pembangunan statistik dapat terus meningkat dan berkontribusi lebih besar terhadap perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data.

2.3.7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global menjadi strategi penting dalam memperluas akses pasar, mendorong pertumbuhan investasi, serta memperkuat posisi daya saing daerah dalam perekonomian nasional maupun internasional. Dalam era globalisasi dan keterbukaan ekonomi, daerah tidak hanya dituntut untuk mampu mengelola potensi internal, tetapi juga harus adaptif dan responsif terhadap dinamika eksternal yang terus berkembang.

2.3.7.1 Ekspor dan Impor

Tabel 2.24 Perkembangan Eskpor dan Impor Non Migas di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan Unit	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ekspor						
Jumlah Komoditi	Komoditi	3	3	4	4	6
Jumlah Eksporthir	Orang	4	4	4	5	6
Nilai Ekspor	Juta Rp	325.899,1609	400.909	1.634268,93	1.325.328,209	2.090.603,281
Impor						
Jumlah Komoditi	Komoditi	N/A	4	3	3	4
Jumlah Importir	Orang	N/A	2	-	3	4
Nilai Impor	Juta Rp	40.661,6833	83.635,13988	548.484,4919	392.833,7114	199.867,1996

Sumber : Badan Pusat Staistik Kabupaten Ngawi, 2025

Perdagangan luar negeri, baik ekspor maupun impor, menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan dinamika perekonomian daerah dan daya saing komoditas lokal di pasar internasional. Data ekspor-impor Kabupaten Ngawi tahun 2020–



2024 menunjukkan peningkatan aktivitas perdagangan lintas negara yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah pelaku usaha maupun nilai transaksi.

Pada sektor ekspor, terjadi peningkatan jumlah komoditi yang diekspor dari 3 komoditi pada tahun 2020–2022 menjadi 6 komoditi pada tahun 2024. Jumlah eksportir juga meningkat dari 4 orang pada tahun 2020 menjadi 6 orang pada tahun 2024. Nilai ekspor tumbuh sangat pesat, dari Rp 325,9 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 2,09 triliun pada tahun 2024, mencerminkan adanya diversifikasi komoditas dan peningkatan daya saing produk Ngawi di pasar global.

Sementara itu, pada sektor impor, jumlah komoditi impor relatif stabil di angka 3–4 komoditi, dengan jumlah importir meningkat dari tidak tercatat pada 2020 menjadi 4 orang pada tahun 2024. Nilai impor sempat mengalami lonjakan pada tahun 2022 sebesar Rp 548,48 miliar, namun kemudian menurun menjadi Rp 199,87 miliar pada tahun 2024, yang dapat mengindikasikan peningkatan substitusi impor atau efisiensi kebutuhan bahan baku dari luar negeri.

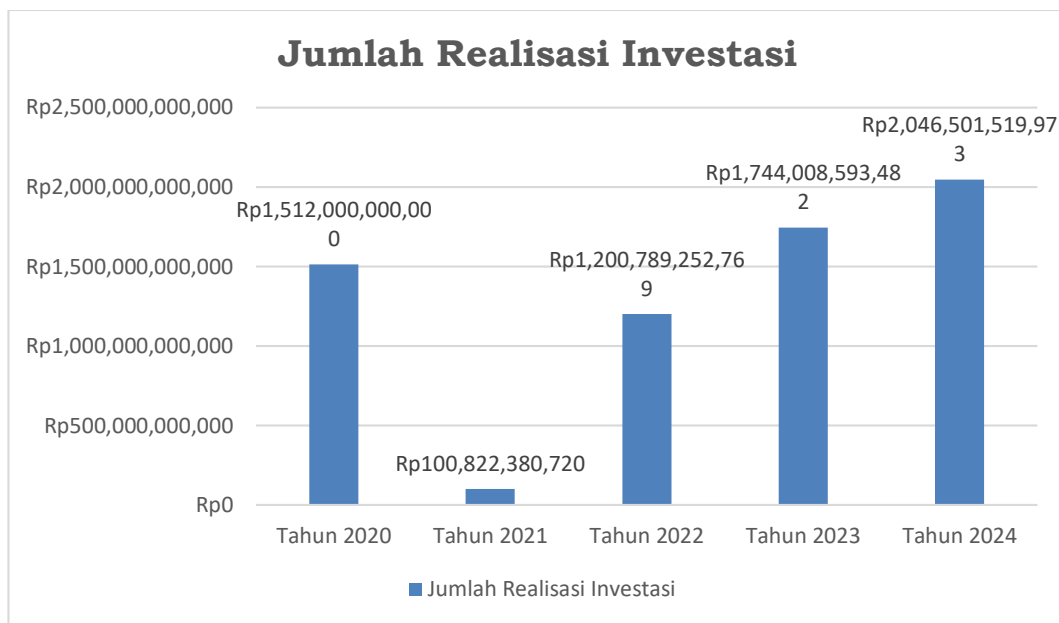
Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ngawi semakin aktif dan kompetitif dalam perdagangan internasional. Ke depan, upaya peningkatan kualitas produk, fasilitasi ekspor-impor, serta penguatan kelembagaan UMKM dan pelaku usaha eksportir perlu menjadi prioritas dalam strategi pembangunan ekonomi daerah.

2.3.7.2 Realisasi Investasi

Realisasi investasi di Kabupaten Ngawi selama kurun waktu 2020 hingga 2024 merupakan indikator utama yang merefleksikan kapasitas daerah dalam menarik dan mengelola aliran modal, baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Secara operasional, indikator ini digunakan untuk mengukur besaran aktual dari komitmen investasi yang terealisasi dalam kegiatan usaha,



pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sektor strategis lainnya, sebagai hasil dari iklim usaha yang kondusif serta efektivitas kebijakan fasilitasi dan promosi investasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah.



Gambar 2.48 Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Grafik Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Ngawi Tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang dinamis dengan tren kenaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi investasi tercatat sebesar Rp1,51 triliun, namun sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 menjadi hanya Rp100,82 miliar. Penurunan tersebut diduga dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi dan penundaan sejumlah proyek investasi. Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya, geliat investasi di Kabupaten Ngawi mulai kembali tumbuh secara progresif, menandakan pulihnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha daerah.

Mulai tahun 2022, nilai investasi meningkat signifikan menjadi Rp1,20 triliun, kemudian naik kembali menjadi Rp1,74 triliun pada tahun 2023, dan mencapai Rp2,04 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah



daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, penguatan infrastruktur pendukung, serta promosi potensi unggulan daerah. Beberapa sektor yang menjadi daya tarik investasi di Kabupaten Ngawi antara lain pertanian dan agroindustri, pariwisata alam, industri pengolahan hasil bumi, serta sektor properti dan perdagangan. Tren positif ini juga tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan dalam memperkuat ekosistem investasi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peningkatan realisasi investasi tersebut menjadi indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi yang semakin inklusif dan produktif. Ke depan, tantangan utama adalah menjaga kesinambungan pertumbuhan ini dengan memastikan kualitas investasi yang masuk berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat promosi investasi berbasis potensi wilayah, memperluas kemitraan publik-swasta, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat pelayanan perizinan dan transparansi informasi investasi. Dengan strategi tersebut, Kabupaten Ngawi berpotensi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Jawa Timur.

2.3.7.3 ICOR

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau Rasio Keluaran Modal Tambahan merupakan indikator ekonomi yang berfungsi untuk mengukur tingkat efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Melalui ICOR, dapat diketahui seberapa besar tambahan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit output atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan kata lain, ICOR membantu menilai sejauh mana modal yang ditanamkan baik oleh pemerintah maupun sektor swasta berhasil diubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang nyata.

Semakin rendah nilai ICOR, maka semakin efisien suatu daerah dalam memanfaatkan investasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR yang rendah menunjukkan



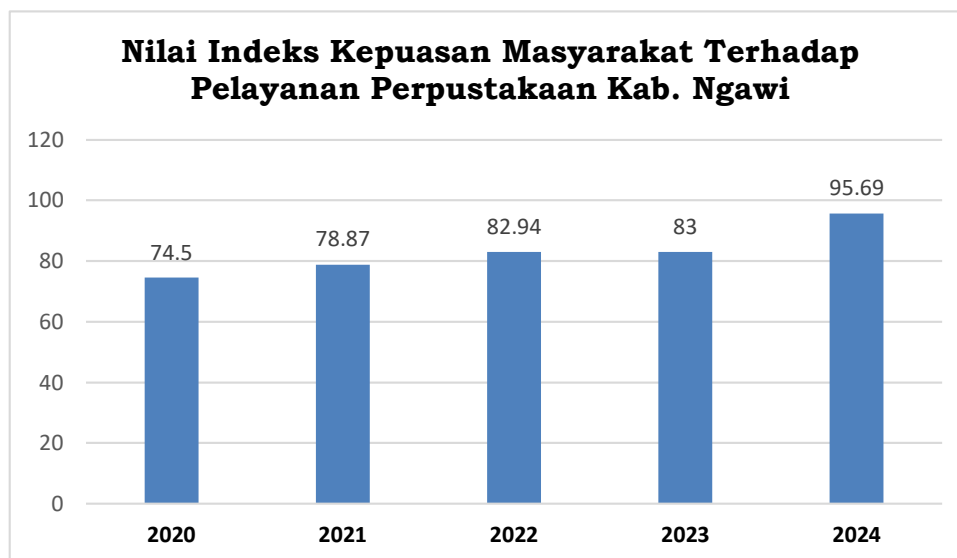
bahwa peningkatan output dapat dicapai dengan kebutuhan investasi yang relatif kecil, menandakan produktivitas modal yang tinggi dan efektivitas kebijakan pembangunan. Sebaliknya, ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih memerlukan investasi yang besar karena efisiensi penggunaan modal belum optimal, baik akibat hambatan infrastruktur, rendahnya produktivitas tenaga kerja, maupun keterbatasan teknologi dan inovasi.

Dalam konteks Kabupaten Ngawi, pengukuran ICOR memiliki arti strategis untuk menilai efektivitas investasi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan meningkatnya realisasi investasi dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pertumbuhan output yang dihasilkan sebanding dengan modal yang ditanamkan. Jika nilai ICOR Kabupaten Ngawi dapat dijaga pada level rendah dan stabil, hal ini akan menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan benar-benar produktif, mendukung transformasi ekonomi daerah, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan lapangan kerja.

2.3.7.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan

Pelayanan perpustakaan daerah merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan literasi, kualitas pendidikan nonformal, serta akses informasi publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan di Kabupaten Ngawi menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir.





Gambar 2.49 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpustakaan

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi, 2025

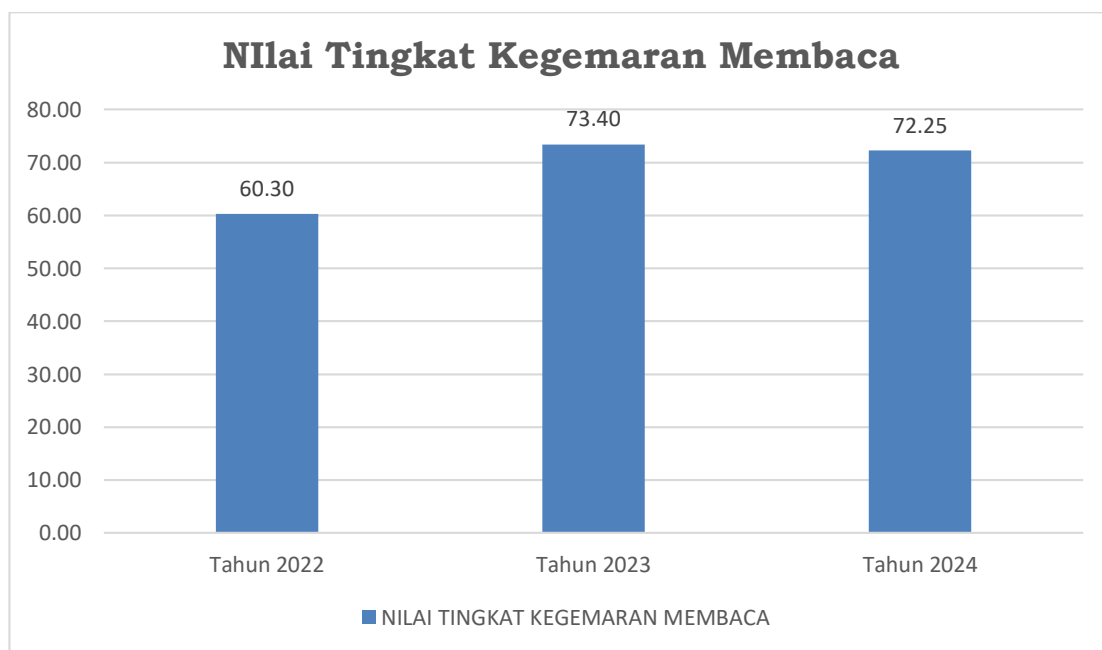
Dari Data di atas dapat dilihat adanya peningkatan dari 74 pada tahun 2020, menjadi 79 pada 2021, dan terus naik menjadi 83 pada 2022. Meskipun sempat stagnan di angka 83 pada tahun 2023, capaian ini kembali melonjak signifikan ke angka 95 pada tahun 2024. Lonjakan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan, fasilitas, atau akses yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Secara kontekstual, capaian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam meningkatkan layanan perpustakaan baik melalui digitalisasi, peningkatan koleksi, penyediaan ruang ramah anak, maupun kegiatan literasi—telah memberi dampak nyata terhadap kepuasan masyarakat. Namun, kestabilan kualitas layanan perlu dijaga agar capaian tinggi ini tidak bersifat sementara. Untuk itu, dalam RPJMD 2025–2029, target yang dapat ditetapkan adalah mempertahankan nilai indeks minimal pada angka 90–95 secara konsisten. Strategi pencapaiannya dapat diarahkan pada perluasan layanan digital perpustakaan, kolaborasi dengan sekolah dan komunitas literasi, serta peningkatan kapasitas SDM pustakawan dan sarana-prasarana berbasis inklusi sosial.



Berikutnya adalah mengenai perpustakaan daerah dimana Perpustakaan daerah memiliki peran strategis dalam membangun budaya literasi, akses informasi, dan pembelajaran sepanjang hayat. Jumlah pengunjung perpustakaan menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas layanan serta partisipasi masyarakat terhadap sarana edukasi publik.

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat mencerminkan seberapa besar minat dan kebiasaan masyarakat dalam membaca sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Indikator ini penting untuk melihat sejauh mana masyarakat memanfaatkan buku, media cetak, maupun sumber bacaan digital sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan wawasan. Tingkat kegemaran membaca yang tinggi akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat budaya literasi, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan dan masyarakat yang berpengetahuan di Kabupaten Ngawi



**Gambar 2.50 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca
Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024**

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi,
2025*

Data Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Kabupaten Ngawi pada periode 2022–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif. Pada tahun 2022, nilai kegemaran



membaca berada pada angka 60,30, kemudian mengalami kenaikan signifikan di tahun 2023 menjadi 73,40. Meskipun pada tahun 2024 sedikit menurun ke angka 72,25, capaian ini tetap lebih tinggi dibandingkan tahun awal pengukuran. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan budaya membaca mulai memberikan hasil yang terlihat.

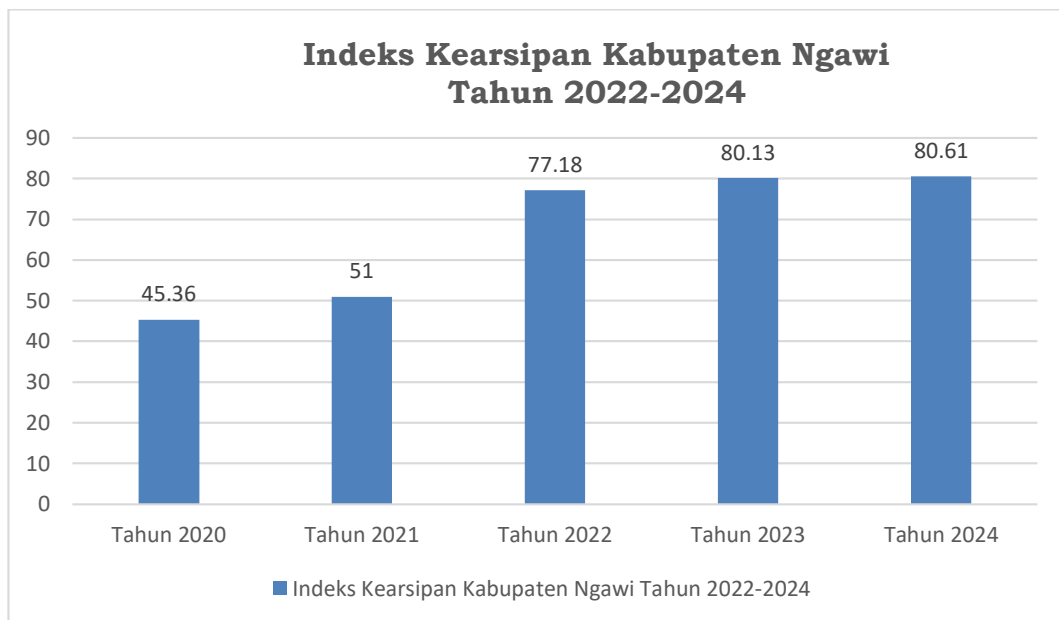
Peningkatan yang tajam antara tahun 2022 ke 2023 dapat diindikasikan sebagai dampak dari program penguatan literasi yang dijalankan pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas literasi. Adanya peningkatan akses terhadap bahan bacaan, baik melalui perpustakaan daerah, pojok baca digital, maupun kegiatan kampanye literasi kemungkinan besar menjadi faktor pendorong. Meski demikian, penurunan kecil pada tahun 2024 mengindikasikan adanya tantangan keberlanjutan, seperti kurangnya inovasi program, menurunnya motivasi masyarakat, atau faktor eksternal seperti persaingan dengan media digital non-literasi.

Secara umum, tren positif ini perlu dijaga dengan strategi yang konsisten, termasuk memperluas akses bahan bacaan yang relevan, mendorong program literasi berbasis keluarga dan komunitas, serta meningkatkan kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta. Jika dilakukan secara berkesinambungan, maka capaian nilai kegemaran membaca di Kabupaten Ngawi berpotensi meningkat lebih stabil dan berkontribusi pada peningkatan kualitas literasi masyarakat secara menyeluruh.

2.3.7.5 Indeks Kearsipan

Indeks Kearsipan merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas tata kelola arsip di lingkungan pemerintah daerah. Di Kabupaten Ngawi, indeks ini mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas, efisiensi, dan tertib administrasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.





**Gambar 2.51 Indeks Kearsipan Kabupaten Ngawi
Tahun 2020-2024**

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi,
2025*

Indeks Kearsipan Kabupaten Ngawi menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berdasarkan grafik Indeks Kearsipan Kabupaten Ngawi tahun 2020–2024, terlihat adanya peningkatan kinerja yang cukup signifikan dalam pengelolaan kearsipan daerah. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 45,36, kemudian naik menjadi 51 pada tahun 2021. Lonjakan besar terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 77,18, dan terus meningkat menjadi 80,13 pada tahun 2023 serta 80,61 pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan adanya komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Ngawi, khususnya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dalam memperbaiki tata kelola arsip dan memperkuat sistem dokumentasi pemerintahan. Kenaikan tajam pada tahun 2022 dapat dikaitkan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis digital serta penguatan peraturan internal tentang penyelenggaraan kearsipan daerah yang lebih sistematis.

Namun demikian, meskipun indeks terus meningkat, data tahun 2023–2024 menunjukkan stabilisasi nilai pada kisaran 80, yang menandakan bahwa perbaikan telah mencapai titik optimal pada aspek teknis, namun belum sepenuhnya bertransformasi ke arah pengelolaan arsip digital yang terintegrasi lintas organisasi



perangkat daerah (OPD). Kondisi di Ngawi masih menghadapi beberapa kendala mendasar, seperti keterbatasan SDM arsiparis profesional, minimnya infrastruktur digital dan server penyimpanan terpusat, serta belum optimalnya kesadaran OPD dalam menerapkan manajemen arsip elektronik (e-arsip). Di sisi lain, dinamika tata kelola pemerintahan daerah yang semakin kompleks, terutama dalam implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), menuntut pengelolaan arsip yang cepat, aman, dan transparan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

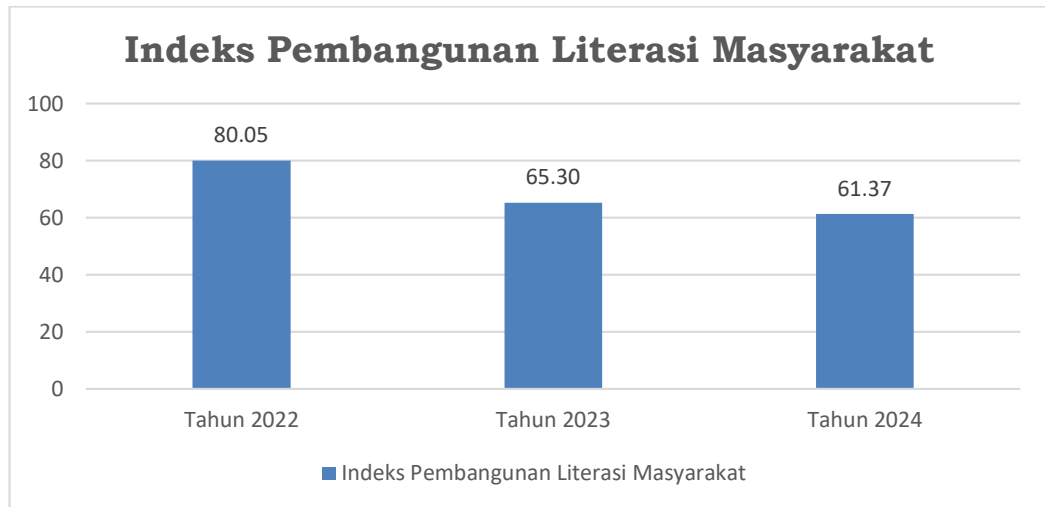
Sehingga kebijakan ke depan untuk tahun 2025–2029, Kabupaten Ngawi perlu difokuskan pada transformasi digital kearsipan yang menyeluruh, dengan menitikberatkan pada integrasi sistem antar Perangkat Daerah, peningkatan kapasitas arsiparis, dan pemanfaatan teknologi *cloud-based document management*. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat regulasi dan alokasi anggaran khusus untuk mendukung keamanan data dan standarisasi metadata arsip digital. Jika langkah-langkah ini dilaksanakan secara berkelanjutan, maka Kabupaten Ngawi berpotensi meningkatkan Indeks Kearsipan di atas 90 poin (kategori sangat baik) dan menjadi model tata kelola kearsipan digital daerah yang mampu mendukung transparansi, efisiensi birokrasi, serta akuntabilitas publik di era pemerintahan digital.

2.3.7.6 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat kemampuan, kebiasaan, serta akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan sumber pengetahuan di Kabupaten Ngawi. Semakin tinggi nilai IPLM, semakin menunjukkan bahwa masyarakat memiliki budaya membaca, menulis, dan memanfaatkan informasi secara produktif dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan literasi tidak hanya mendukung peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada tumbuhnya masyarakat yang lebih kritis,



inovatif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.



Gambar 2.52 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi, 2025

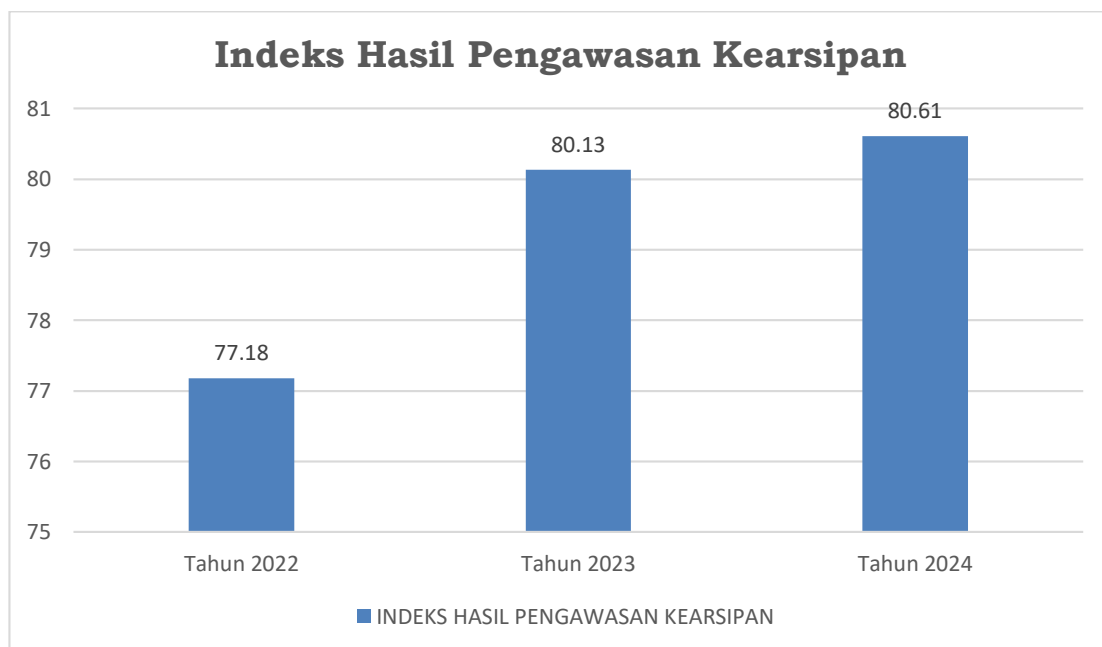
Data pada grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Ngawi tahun 2022–2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, indeks berada pada angka yang cukup tinggi, yaitu 80,05. Namun, pada tahun 2023 turun tajam menjadi 65,30, dan kembali menurun di tahun 2024 menjadi 61,37. Penurunan ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam kesinambungan program literasi, baik dalam hal ketersediaan fasilitas, kualitas program, maupun partisipasi masyarakat.

Penurunan yang cukup drastis dari tahun 2022 ke 2023 bisa mencerminkan adanya perubahan kebijakan, keterbatasan anggaran, atau berkurangnya intensitas kegiatan literasi di masyarakat. Faktor eksternal seperti perubahan gaya hidup masyarakat akibat perkembangan teknologi digital juga dapat mempengaruhi, di mana minat terhadap literasi konvensional menurun dan belum sepenuhnya terkonversi ke literasi digital yang produktif. Hal ini menunjukkan perlunya strategi adaptif agar pembangunan literasi tidak hanya mengandalkan pendekatan tradisional, tetapi juga mampu merespons perubahan zaman.



Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan program literasi, termasuk penguatan peran perpustakaan, komunitas literasi, dan integrasi literasi digital dalam kegiatan pendidikan formal maupun nonformal. Upaya peningkatan indeks literasi tidak hanya menasar pada peningkatan jumlah kegiatan, tetapi juga kualitas dan dampaknya terhadap kemampuan literasi fungsional masyarakat. Jika tidak segera diantisipasi, tren penurunan ini dapat berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

2.3.7.7 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan



**Gambar 2.53 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan
Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024**

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi,
2025*

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penyelenggaraan kearsipan di suatu daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks ini mencerminkan tingkat kepatuhan, keteraturan, serta kualitas pengelolaan arsip, baik dari aspek penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, maupun penyusutan arsip. Di Kabupaten Ngawi, capaian indeks ini menjadi indikator penting dalam mewujudkan



tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien, karena arsip berfungsi sebagai sumber informasi, bahan bukti akuntabilitas kinerja, serta memori kolektif daerah yang harus dijaga keberlangsungannya.

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Ngawi pada periode 2022–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2022, indeks tercatat sebesar 77,18 dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 80,13. Tren positif ini berlanjut di tahun 2024 dengan nilai 80,61. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola arsip, baik dari aspek penyimpanan, pengelolaan, maupun pengawasan internal yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Kenaikan nilai indeks ini juga mengindikasikan bahwa Kabupaten Ngawi semakin memperhatikan standar pengelolaan arsip sesuai ketentuan perundangan. Implementasi sistem kearsipan yang lebih baik, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip, diduga menjadi salah satu faktor yang mendukung pencapaian ini. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan melalui pelatihan dan supervisi rutin turut berkontribusi pada perbaikan nilai indeks.

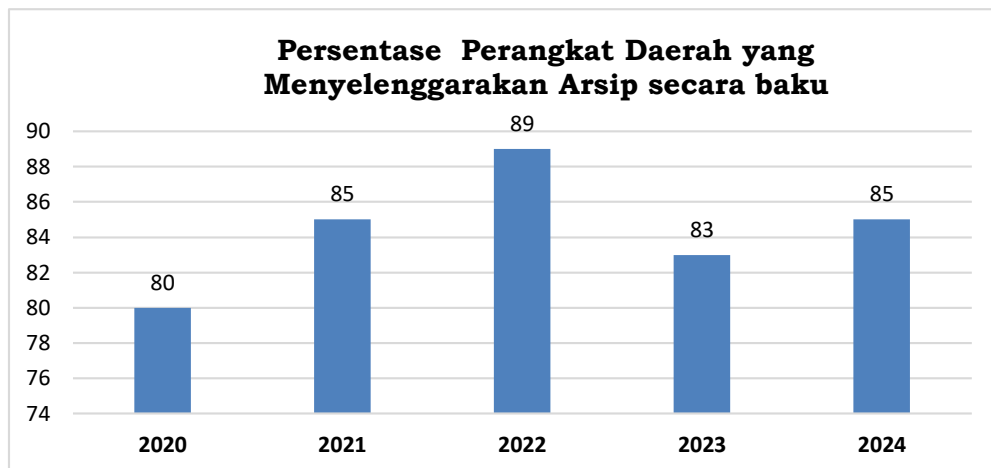
Dengan capaian indeks yang sudah berada di atas angka 80 pada tahun 2023 dan 2024, Kabupaten Ngawi telah menunjukkan progres positif menuju tata kelola kearsipan yang lebih profesional. Meski demikian, untuk menjaga konsistensi peningkatan, diperlukan inovasi berkelanjutan, penguatan regulasi internal, serta evaluasi berkala agar kualitas pengelolaan arsip tetap terjaga. Hal ini penting mengingat arsip merupakan sumber informasi dan data strategis yang mendukung akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah.

2.3.7.8 Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Arsip secara Baku

Persentase perangkat daerah di Kabupaten Ngawi yang menyelenggarakan arsip secara baku menjadi indikator penting



dalam menilai kepatuhan terhadap tata kelola kearsipan yang sesuai standar nasional.



Gambar 2.54 Persentase Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi yang Menyelenggarakan Arsip secara baku Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi, 2025

Data menunjukkan peningkatan dari 80% pada 2020 menjadi puncaknya 89% pada 2022, meskipun sempat menurun menjadi 83% pada 2023, lalu sedikit naik ke 85% di tahun 2024. Fluktuasi ini menandakan perlunya penguatan kelembagaan dan pengawasan kearsipan secara konsisten di seluruh Perangkat Daerah.

Kondisi ini merefleksikan capaian positif, namun sekaligus menunjukkan potensi ketimpangan implementasi antar-perangkat daerah. Untuk itu, dalam RPJMD 2025–2029, target yang realistis namun progresif perlu ditetapkan, yakni meningkatkan cakupan perangkat daerah yang menyelenggarakan arsip secara baku hingga minimal 95% pada akhir 2029. Strategi utama meliputi peningkatan pendampingan teknis, audit arsip berkala, digitalisasi berbasis SPBE, dan penguatan regulasi internal di masing-masing Perangkat Daerah.

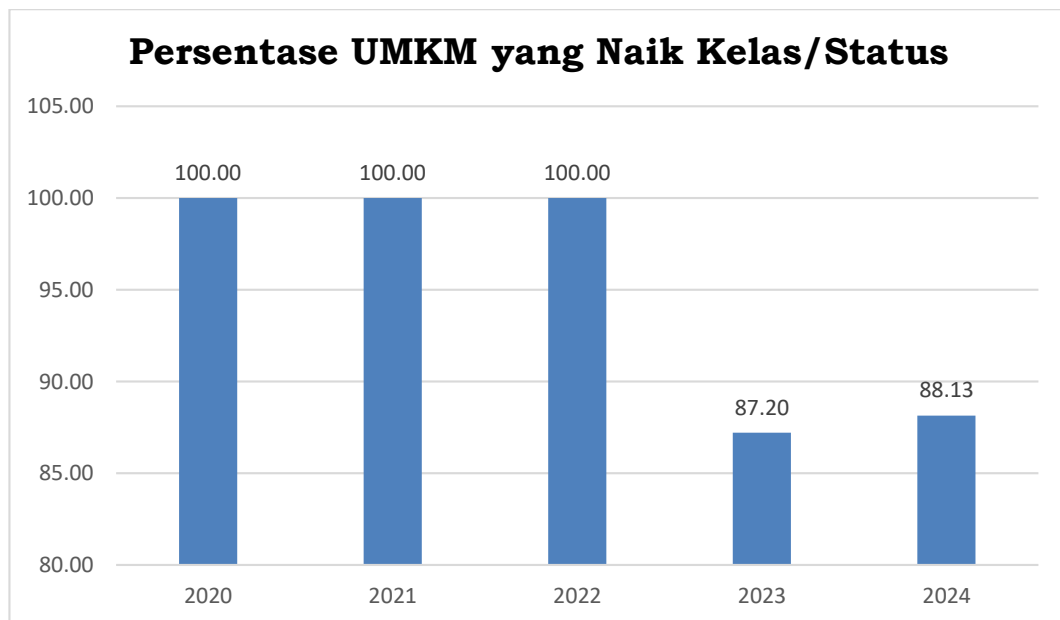
2.3.8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan yang seimbang antara wilayah perkotaan dan perdesaan menjadi strategi penting dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dalam



konteks RPJMD, kota dan desa tidak hanya dipandang sebagai wilayah administratif, tetapi sebagai simpul-simpul ekonomi yang saling terhubung dan berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan daerah secara keseluruhan.

2.3.8.1 UMKM yang Naik Kelas atau Status



Gambar 2.55 Persentase UMKM yang Naik Kelas/Status Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ngawi, 2025

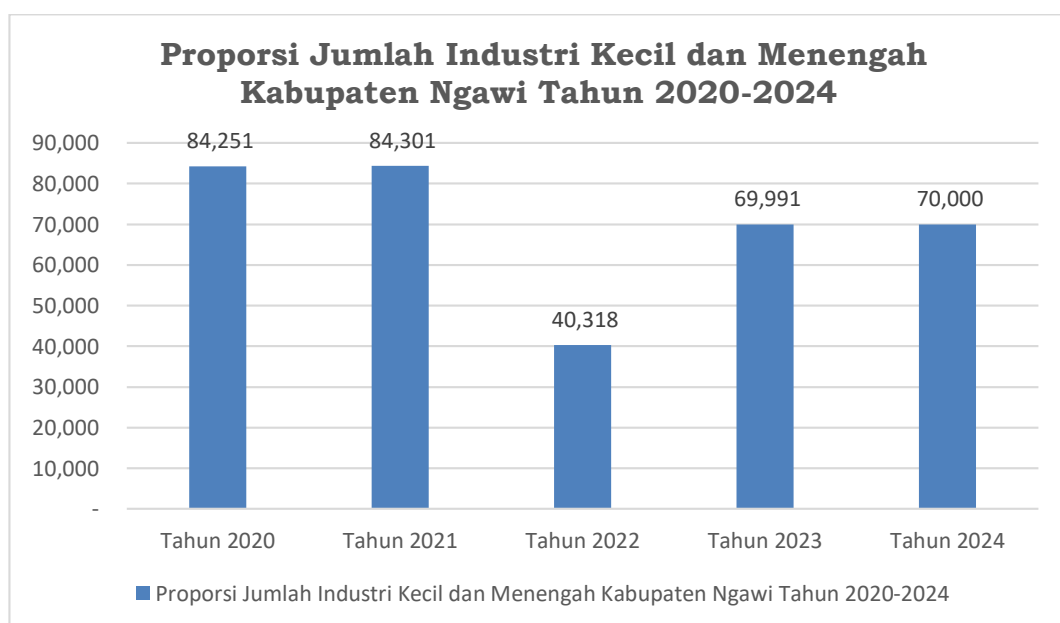
Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang naik kelas merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas ekosistem pengembangan ekonomi lokal serta keberhasilan intervensi pemerintah daerah dalam mendorong transformasi pelaku usaha dari sektor informal ke sektor formal yang lebih produktif dan berdaya saing. Di Kabupaten Ngawi, persentase UMKM yang mengalami peningkatan kelas/status selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang relatif tinggi dengan fluktuasi moderat pada dua tahun terakhir.

Pada tiga tahun pertama, yakni 2020 hingga 2022, capaian persentase UMKM yang naik kelas tercatat konsisten pada angka 100%, mengindikasikan bahwa seluruh target sasaran yang diintervensi berhasil mengalami peningkatan status, baik dari mikro ke kecil, maupun dari kecil ke menengah. Capaian tersebut



merefleksikan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan UMKM, seperti fasilitasi perizinan, pelatihan manajerial, akses permodalan, hingga perluasan pasar melalui digitalisasi dan kemitraan strategis.

Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan ke angka 87,20%, diikuti dengan sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 88,13%. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari penyesuaian mekanisme seleksi UMKM binaan, meningkatnya standar klasifikasi naik kelas, serta tantangan struktural seperti daya serap pasar dan keterbatasan akses terhadap modal lanjutan. Meskipun demikian, stabilitas capaian di atas 85% tetap menunjukkan bahwa ekosistem pengembangan UMKM di Kabupaten Ngawi telah berada pada jalur yang kondusif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pendampingan berkelanjutan, inovasi produk, dan integrasi ke dalam rantai pasok industri yang lebih luas. Dengan demikian, indikator ini menjadi refleksi penting atas arah kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan yang tidak hanya bertumpu pada kuantitas pelaku usaha, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis yang inklusif dan kompetitif.



Gambar 2. 56 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Perjalanan dinamika jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Ngawi dalam rentang waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan, mencerminkan sensitivitas sektor ini terhadap dinamika sosial-ekonomi dan arah kebijakan daerah. Pada tahun 2020, jumlah UKM tercatat sebesar 84.251 unit, kemudian mengalami peningkatan marginal menjadi 84.301 unit pada tahun 2021, yang dapat diartikan sebagai respons positif dari pelaku usaha terhadap iklim usaha pascapandemi serta stimulus yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Namun demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis dengan jumlah UKM yang tercatat hanya sebanyak 40.318 unit. Fenomena ini dapat ditafsirkan sebagai dampak residu dari pemulihan ekonomi yang belum merata, disrupsi terhadap rantai pasok, serta proses penyesuaian struktural di sektor informal dan sektor produktif mikro. Tahun 2023 menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan dengan jumlah UKM mencapai 69.991 unit, sebagai indikasi mulai pulihnya aktivitas ekonomi lokal dan meningkatnya adaptasi pelaku usaha terhadap transformasi digital serta pola konsumsi baru.

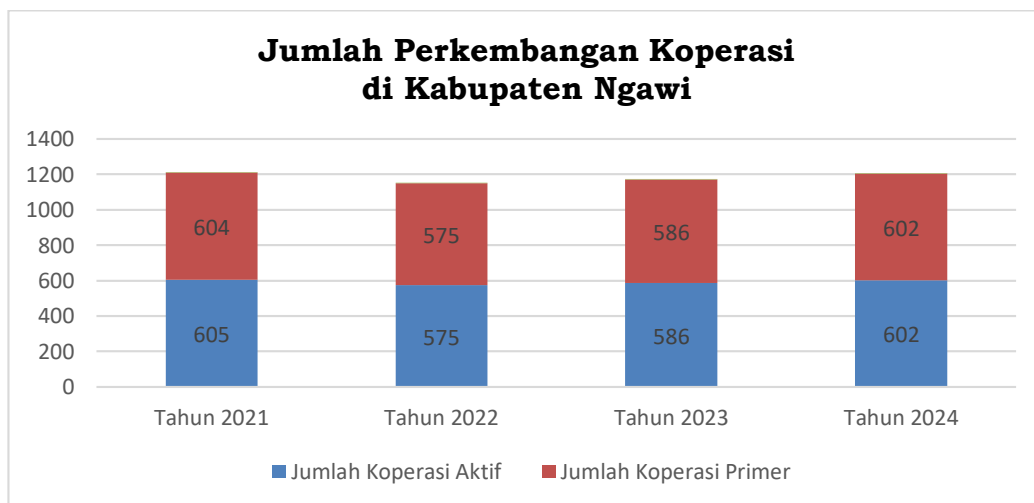
Pada tahun 2024, jumlah UKM tercatat relatif stagnan pada angka 70.000 unit. Stabilisasi ini menandakan bahwa sektor UKM di Kabupaten Ngawi mulai memasuki fase konsolidasi, di mana aspek keberlanjutan, peningkatan produktivitas, dan daya saing menjadi fokus utama, menggantikan pendekatan berbasis kuantitas semata.

Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), data ini memberikan sinyal penting tentang perlunya perumusan kebijakan yang tidak hanya mendorong penambahan jumlah UKM, tetapi juga memastikan adanya peningkatan kualitas, kapasitas manajerial, akses permodalan, serta integrasi ke dalam rantai nilai industri dan pasar yang lebih luas. Keberhasilan pembangunan sektor UKM dalam jangka menengah akan sangat menentukan ketahanan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta terwujudnya struktur ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.



2.3.8.2 Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan indikator yang menggambarkan kontribusi sektor koperasi dalam membentuk perekonomian daerah. Di Kabupaten Ngawi, indikator ini menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh koperasi mampu memberikan nilai tambah terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin besar proporsi volume usaha koperasi terhadap PDRB, semakin kuat pula peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat, terutama dalam mendukung sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Peningkatan kontribusi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan koperasi, mendorong efisiensi usaha anggota, serta memperluas akses koperasi terhadap pembiayaan dan pasar yang lebih kompetitif.



**Gambar 2.57 Jumlah Perkembangan Koperasi
di Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2024**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Ngawi mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 605 koperasi aktif, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 575 koperasi. Meskipun demikian, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi 586 koperasi, dan terus naik di tahun 2024 menjadi 602 koperasi aktif.



Jika dilihat berdasarkan jenisnya, koperasi di Kabupaten Ngawi didominasi oleh koperasi primer, dengan jumlah yang identik dengan total koperasi aktif di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh koperasi yang beroperasi adalah koperasi primer. Sementara itu, jumlah koperasi sekunder selama periode 2021 hingga 2024 tercatat tetap sebanyak 1 koperasi dan tidak mengalami perubahan.

Data ini mengindikasikan bahwa meskipun sempat menurun, dinamika gerakan koperasi di Ngawi menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan pada dua tahun terakhir. Namun demikian, keberadaan koperasi sekunder masih sangat terbatas dan dapat menjadi perhatian tersendiri dalam strategi pengembangan koperasi ke depan, khususnya untuk memperkuat jejaring antar koperasi dan skala usaha yang lebih luas.

Sejalan dengan peningkatan jumlah koperasi aktif dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan volume usaha koperasi di Kabupaten Ngawi juga menunjukkan dinamika yang mencerminkan proses pemulihan pasca penurunan signifikan pada tahun 2022. Meskipun nilai volume usaha sempat turun dari Rp323,3 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp259,6 miliar pada tahun 2024, tren ini mengindikasikan adanya pergeseran fokus koperasi dari ekspansi kuantitatif menuju penguatan kualitas manajemen dan efisiensi operasional. Kondisi ini memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi, melalui Dinas Koperasi dan UKM, untuk mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan, inovasi usaha, serta digitalisasi koperasi agar volume usaha dapat kembali tumbuh secara berkelanjutan pada periode 2025–2029.





Gambar 2.58 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ngawi, 2025

Data mengenai pertumbuhan usaha koperasi di Kabupaten Ngawi tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cenderung menurun. Pada tahun 2020, jumlah usaha koperasi berada di kisaran 310.000 unit, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sekitar 320.000 unit. Kenaikan ini mengindikasikan adanya optimisme pelaku usaha koperasi meskipun masih dalam masa pandemi, yang kemungkinan didorong oleh program bantuan pemerintah serta upaya penguatan sektor ekonomi kerakyatan.

Namun, setelah tahun 2021, jumlah usaha koperasi justru mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2022 jumlahnya turun menjadi sekitar 275.000 unit, dan berlanjut pada tahun 2023 sebesar 265.000 unit hingga 2024 yang mencapai titik terendah sekitar 260.000 unit. Tren penurunan ini dapat mencerminkan adanya tantangan yang dihadapi koperasi, antara lain masalah manajemen kelembagaan, keterbatasan akses permodalan, rendahnya inovasi usaha, serta persaingan dengan pelaku usaha lain termasuk UMKM non-koperasi.

Secara keseluruhan, meskipun koperasi tetap menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian daerah, penurunan yang terjadi dalam empat tahun terakhir perlu mendapatkan perhatian



serius. Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu memperkuat strategi pembinaan, meningkatkan literasi digital dan keuangan koperasi, serta memperluas akses pembiayaan. Dengan langkah-langkah tersebut, koperasi di Kabupaten Ngawi diharapkan dapat kembali tumbuh dan berperan lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.8.3 Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal

Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari sektor informal ke sektor formal di Kabupaten Ngawi merupakan indikator penting dalam menilai perkembangan iklim usaha dan perekonomian daerah. Transformasi ini menunjukkan adanya pergeseran pola usaha masyarakat dari aktivitas ekonomi tradisional tanpa pencatatan resmi menuju usaha yang lebih terstruktur dengan legalitas hukum yang jelas. Proses formalitas usaha tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi bukti meningkatnya kesadaran pelaku usaha kecil akan pentingnya akses terhadap fasilitas permodalan, perlindungan hukum, dan peluang pasar yang lebih luas.

Perubahan status usaha dari informal ke formal membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Usaha kecil yang telah memiliki legalitas formal dapat lebih mudah mengakses program pemerintah, memperoleh pinjaman perbankan, hingga menjalin kerja sama dengan sektor swasta yang lebih besar. Di Kabupaten Ngawi, upaya ini didukung melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendampingan UMKM, serta penyederhanaan perizinan yang diharapkan mampu mempercepat proses transformasi. Dengan meningkatnya jumlah usaha formal, maka kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat diperkuat melalui pajak dan retribusi.

Meski demikian, tantangan masih dihadapi dalam mendorong pelaku usaha informal untuk bertransformasi. Sebagian besar usaha kecil di Ngawi masih terkendala keterbatasan modal, rendahnya literasi digital dan keuangan, serta anggapan bahwa



proses perizinan rumit. Oleh karena itu, diperlukan strategi berkelanjutan berupa pendampingan intensif, digitalisasi layanan perizinan, dan penguatan jejaring usaha. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat dan dukungan masyarakat, transformasi usaha kecil menuju sektor formal di Kabupaten Ngawi dapat menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.

2.3.8.4 Pertumbuhan Wirausaha

Pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Ngawi merupakan salah satu indikator vital dalam menilai dinamika ekonomi lokal serta kemandirian masyarakat. Meningkatnya jumlah wirausaha baru menunjukkan adanya geliat kreativitas, keberanian mengambil risiko, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. Faktor pendorongnya meliputi perkembangan teknologi digital, dukungan program pemerintah daerah, serta tumbuhnya ekosistem kewirausahaan berbasis komunitas yang semakin memperkuat semangat masyarakat untuk membuka usaha mandiri.

Dampak pertumbuhan wirausaha ini sangat signifikan bagi perekonomian daerah. Selain mampu menyerap tenaga kerja lokal, kehadiran wirausaha baru juga mendorong diversifikasi sektor ekonomi, mulai dari perdagangan, kuliner, hingga industri kreatif. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Ngawi dalam memperkuat ketahanan ekonomi berbasis masyarakat. Kehadiran wirausaha yang terus tumbuh juga memperluas pasar produk lokal, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tahun 2024, tingkat pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Ngawi tercatat sebesar 0,92 persen, yang menggambarkan adanya peningkatan meski masih dalam skala moderat dibandingkan dengan potensi ekonomi daerah yang cukup besar. Angka ini menunjukkan bahwa geliat kewirausahaan di Ngawi mulai tumbuh, terutama di sektor-sektor produktif seperti



perdagangan, kuliner, ekonomi kreatif, dan jasa berbasis digital. Namun, pertumbuhan ini juga mencerminkan masih adanya tantangan dalam hal akses permodalan, kapasitas manajerial, serta literasi bisnis masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

Ke depan, dalam periode 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu memperkuat strategi pengembangan wirausaha dengan fokus pada tiga arah utama: pertama, penciptaan wirausaha baru melalui inkubasi bisnis dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal; kedua, penguatan ekosistem kewirausahaan dengan memperluas akses pembiayaan, kemitraan usaha, dan digitalisasi pemasaran; serta ketiga, pengembangan sentra kewirausahaan terpadu di setiap kecamatan yang dapat menjadi pusat kolaborasi, pelatihan, dan promosi produk lokal. Dengan langkah-langkah tersebut, pertumbuhan wirausaha di Ngawi diharapkan dapat meningkat secara signifikan dan berkontribusi langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan struktur ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Namun demikian, pertumbuhan wirausaha masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses permodalan, kurangnya keterampilan manajerial, serta rendahnya literasi digital pada sebagian pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih terarah melalui pelatihan kewirausahaan, fasilitasi pembiayaan inklusif, dan penguatan inkubator bisnis yang dapat menjadi wadah pengembangan usaha rintisan. Dengan dukungan tersebut, pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Ngawi tidak hanya sekadar meningkatkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga mendorong lahirnya wirausaha tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2.3.8.5 Indeks Pembangunan Infrastruktur

Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas, ketersediaan, dan aksesibilitas infrastruktur di suatu wilayah. Penilaian IPI mencakup berbagai sektor utama seperti transportasi (jalan, jembatan), energi



(listrik dan energi alternatif), air bersih dan sanitasi, serta teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan konektivitas dan pelayanan publik, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

**Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Infrastruktur
Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	0,28	0,47	0,62	0,74	0,85

Sumber : Laporan Akhir IPI Kabupaten Ngawi, 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan, Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Ngawi menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan selama lima tahun terakhir. IPI meningkat dari 0,28 pada tahun 2020 menjadi 0,85 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya akselerasi pembangunan infrastruktur yang cukup pesat, dengan rata-rata peningkatan sekitar 0,14 poin per tahun.

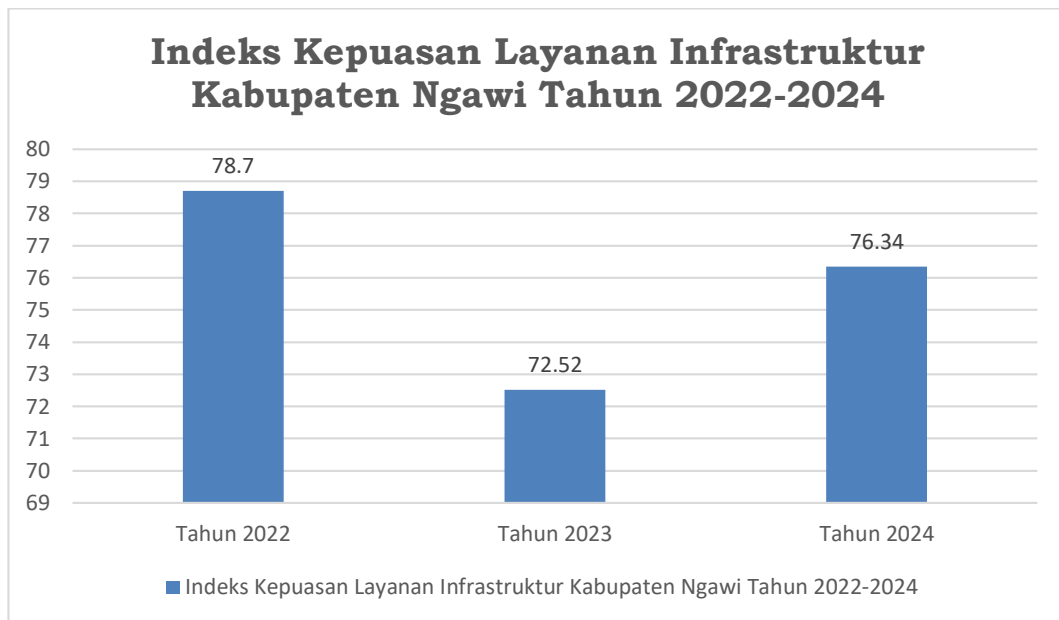
Peningkatan tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat layanan infrastruktur dasar dan strategis, seperti peningkatan kualitas jalan, distribusi listrik desa, pengelolaan air bersih, serta inisiatif digitalisasi layanan publik.

2.3.9 Kepuasan Layanan Infrastruktur

Ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing daerah serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai tidak hanya mendorong efisiensi ekonomi dan konektivitas antarwilayah, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas hidup, aksesibilitas layanan dasar, serta kemudahan berusaha. Oleh karena itu, dalam kerangka RPJMD, kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur menjadi



indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah.



Gambar 2.59 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi, 2025

Grafik Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Ngawi Tahun 2022–2024 menunjukkan dinamika persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2022, indeks kepuasan tercatat sebesar 78,70, mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas publik lainnya. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 72,52, yang dapat disebabkan oleh adanya gangguan proyek pembangunan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik, atau berkurangnya kualitas pelayanan akibat peralihan prioritas anggaran.

Kendati demikian, kondisi tersebut berhasil diperbaiki pada tahun 2024, di mana indeks kepuasan masyarakat kembali meningkat menjadi 76,34. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dan penyesuaian strategi oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, terutama dalam memperkuat kualitas dan



pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah. Beberapa kebijakan yang turut mendorong peningkatan ini antara lain percepatan pemeliharaan jalan kabupaten, pembangunan infrastruktur dasar di kawasan perdesaan, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penanganan infrastruktur strategis daerah.

Secara umum, tren fluktuatif ini menggambarkan bahwa meskipun pelayanan infrastruktur di Kabupaten Ngawi telah menunjukkan perbaikan signifikan, masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas dan keberlanjutan pelayanan. Oleh karena itu, ke depan pemerintah daerah perlu memperkuat sistem evaluasi dan pengawasan pembangunan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam monitoring layanan publik. Dengan langkah-langkah tersebut, peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur diharapkan dapat berlangsung lebih stabil dan berkelanjutan.

2.3.9.1 Rumah Layak Huni

Rumah tangga dengan akses hunian layak merujuk pada keluarga yang tinggal di rumah yang memenuhi standar kelayakan berdasarkan beberapa aspek utama, yaitu : luas bangunan, akses air bersih, sanitasi, dan keamanan.

Tabel 2.26 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Rumah Layak Huni	0,2900	0,3000	0,2814	0,2822	0,2830

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ngawi, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, rasio rumah layak huni di Kabupaten Ngawi menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 0,29, mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,3000 di tahun 2021. Namun, pada tahun



2022 terjadi penurunan cukup tajam menjadi 0,2814, yang kemudian stagnan di angka 0,2822 (2023) dan 0,2830 (2024).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya pembangunan atau perbaikan rumah, perkembangannya belum cukup signifikan dalam meningkatkan proporsi rumah yang memenuhi kriteria layak huni. Beberapa tantangan yang kemungkinan menjadi penyebab stagnasi tersebut adalah keterbatasan pembiayaan masyarakat, ketimpangan akses terhadap program perumahan, serta rendahnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman

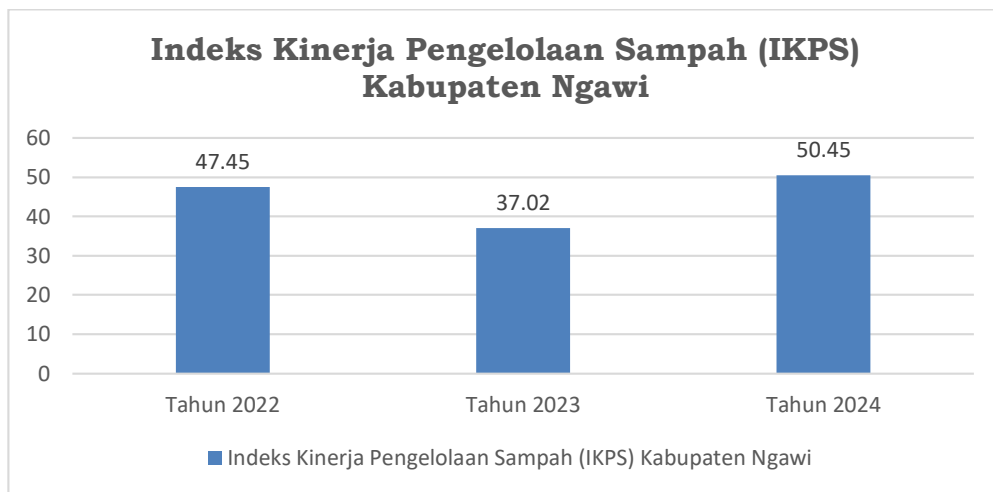
2.3.9.2 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah di suatu daerah. IKPS mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan, mulai dari pengurangan di sumber, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah secara ramah lingkungan.

Di tengah meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, IKPS menjadi alat ukur strategis dalam mendorong tata kelola persampahan yang lebih terintegrasi. Nilai IKPS yang tinggi menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan sampah serta kesadaran kolektif masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

Dalam konteks Kabupaten Ngawi, IKPS menjadi cerminan dari komitmen daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah, termasuk pelibatan masyarakat, pengembangan infrastruktur persampahan, dan penerapan kebijakan berbasis prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).





**Gambar 2.60 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi, 2025

Berdasarkan grafik Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Kabupaten Ngawi selama periode 2022 hingga 2024, terlihat adanya dinamika kinerja yang menunjukkan tantangan sekaligus perbaikan dalam pengelolaan persampahan daerah.

Pada tahun 2022, nilai IKPS Kabupaten Ngawi tercatat sebesar 47,45, yang menunjukkan capaian cukup baik dalam hal sistem pengelolaan sampah. Namun pada tahun 2023, indeks ini mengalami penurunan signifikan menjadi 37,02, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah, baik dari sisi infrastruktur, partisipasi masyarakat, maupun efektivitas layanan.

Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup tajam, dengan nilai IKPS mencapai 50,45. Ini menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah, termasuk optimalisasi layanan pengangkutan, peningkatan fasilitas TPS/TPA, serta penguatan kampanye dan edukasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) kepada masyarakat.

Peningkatan ini juga mencerminkan keberhasilan program pemulihan pasca-penurunan, serta menunjukkan bahwa Kabupaten Ngawi memiliki kapasitas untuk terus memperbaiki kualitas lingkungan hidupnya melalui pengelolaan sampah yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Untuk menjaga tren positif ini,



diperlukan konsistensi dalam pembiayaan, pengawasan, serta kolaborasi multipihak dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

2.3.9.3 Indeks Konektivitas Jalan

Indeks Konektivitas Jalan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterhubungan jaringan jalan antarwilayah dalam suatu daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana sistem transportasi darat mampu mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta akses terhadap pusat-pusat ekonomi dan pelayanan publik. Di Kabupaten Ngawi, indeks konektivitas jalan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas pembangunan infrastruktur transportasi yang berperan sebagai tulang punggung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Secara umum, peningkatan konektivitas jalan di Kabupaten Ngawi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik infrastruktur, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pemerataan pembangunan wilayah dapat tercapai. Indeks ini berperan penting dalam memperkuat integrasi ekonomi antar-kawasan, mengurangi kesenjangan akses antarwilayah, serta mendukung distribusi hasil pertanian dan pergerakan tenaga kerja. Dengan kata lain, capaian konektivitas jalan menjadi indikator strategis yang menunjukkan efektivitas kebijakan pembangunan daerah dalam menciptakan konektivitas yang inklusif dan berkeadilan. Untuk memahami capaian tersebut secara lebih mendalam, perlu diperhatikan beberapa faktor pembentuk yang memengaruhi peningkatan indeks konektivitas jalan di Kabupaten Ngawi. Berikut faktor-faktor pembentuk Indeks Konektivitas Jalan di Kabupaten Ngawi :

1. Kualitas dan kondisi jaringan jalan mantap, yaitu proporsi jalan dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jaringan jalan kabupaten, yang mencerminkan kelancaran arus transportasi dan efisiensi mobilitas;
2. Tingkat keterhubungan antarwilayah, meliputi kemampuan jaringan jalan menghubungkan pusat-pusat kegiatan



- ekonomi seperti pasar, kawasan industri, dan sentra pertanian dengan jalan provinsi dan nasional;
3. Ketersediaan infrastruktur pendukung transportasi, seperti jembatan, gorong-gorong, drainase, dan rambu lalu lintas yang menunjang keamanan dan kelancaran pergerakan barang serta orang;
 4. Kinerja pemeliharaan dan rehabilitasi jalan, yang mencakup efektivitas program peningkatan dan perawatan jalan secara berkala agar konektivitas tetap terjaga sepanjang tahun;
 5. Pemanfaatan data spasial dan teknologi transportasi, seperti sistem informasi jaringan jalan berbasis GIS, yang membantu perencanaan, pemantauan, dan evaluasi konektivitas wilayah secara akurat dan terintegrasi.

Hal lainnya yang perlu dilihat dalam indeks konektivitas jalan adalah Peningkatan nilai indeks konektivitas jalan menunjukkan bahwa jaringan jalan di wilayah Ngawi semakin baik, saling terhubung, dan mampu memperpendek waktu tempuh antar kecamatan maupun antara Ngawi dengan wilayah sekitarnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperluas aksesibilitas melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan strategis, baik jalan kabupaten, jalan provinsi, maupun konektivitas menuju jalan nasional. Ketersediaan infrastruktur jalan yang andal tidak hanya memperlancar arus logistik dan perdagangan, tetapi juga membuka peluang investasi serta memperkuat integrasi antar wilayah.

Lebih lanjut, keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya diukur dari kemantapan dan keterhubungannya, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu menjamin keselamatan pengguna jalan. Data mengenai jumlah kecelakaan lalu lintas, korban, dan kerugian menjadi indikator penting untuk menilai dampak sosial dari peningkatan konektivitas jalan di Kabupaten Ngawi. Tren kecelakaan yang meningkat dapat menjadi sinyal perlunya penguatan aspek keselamatan jalan, termasuk penataan rambu, perbaikan geometrik jalan, pengawasan



kecepatan, serta peningkatan kesadaran dan disiplin berlalu lintas masyarakat.

Tabel 2.27 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, Korban, dan Kerugian di Kabupaten Ngawi Tahun 2024

Bulan	Jumlah Kejadian	Korban			Kerugian (Rp)
		Mati	Luka Berat	Luka Ringan	
Januari	95	12	5	213	205.500.000
Februari	87	14	5	163	133.500.000
Maret	75	9	2	197	113.100.000
April	105	14	6	207	127.200.000
Mei	92	8	2	157	141.000.000
Juni	95	14	4	191	137.000.000
Juli	71	6	6	123	94.500.000
Agustus	143	13	10	258	191.000.000
September	86	6	9	136	121.500.000
Oktober	77	3	9	142	104.000.000
November	113	6	16	203	147.500.000
Desember	84	3	10	148	146.500.000
Tahun 2024	1123	108	84	2138	1.662.300.000
Tahun 2023	1018	142	55	1847	1.714.200.000

Sumber : Badan Pusat Statsitik Kabupaten Ngawi, 2025

Berdasarkan data jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Ngawi tahun 2024, tercatat sebanyak 1.123 kejadian yang mengakibatkan 108 korban meninggal dunia, 84 korban luka berat, dan 2.138 korban luka ringan. Selain dampak pada korban jiwa, total kerugian materiil akibat kecelakaan tersebut mencapai Rp1.662.300.000.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023), terdapat peningkatan jumlah kejadian kecelakaan dari 1.018 kasus menjadi 1.123 kasus. Namun demikian, jumlah korban meninggal dunia justru menurun signifikan dari 142 jiwa pada 2023 menjadi 108 jiwa pada 2024, serta korban luka berat juga turun dari 55 menjadi 84 orang. Hal ini dapat mengindikasikan adanya perbaikan pada aspek penanganan pascakecelakaan atau peningkatan dalam keselamatan kendaraan dan infrastruktur, meskipun tingkat kecelakaan secara keseluruhan masih cukup tinggi.

Peningkatan korban luka ringan yang mencapai lebih dari 2.100 kasus, menunjukkan bahwa meskipun tingkat fatalitas

menurun, intensitas kejadian kecelakaan masih menjadi perhatian serius, terutama dari sisi frekuensi dan dampaknya terhadap produktivitas masyarakat. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan pun tetap tinggi, meski sedikit menurun dari tahun 2023.

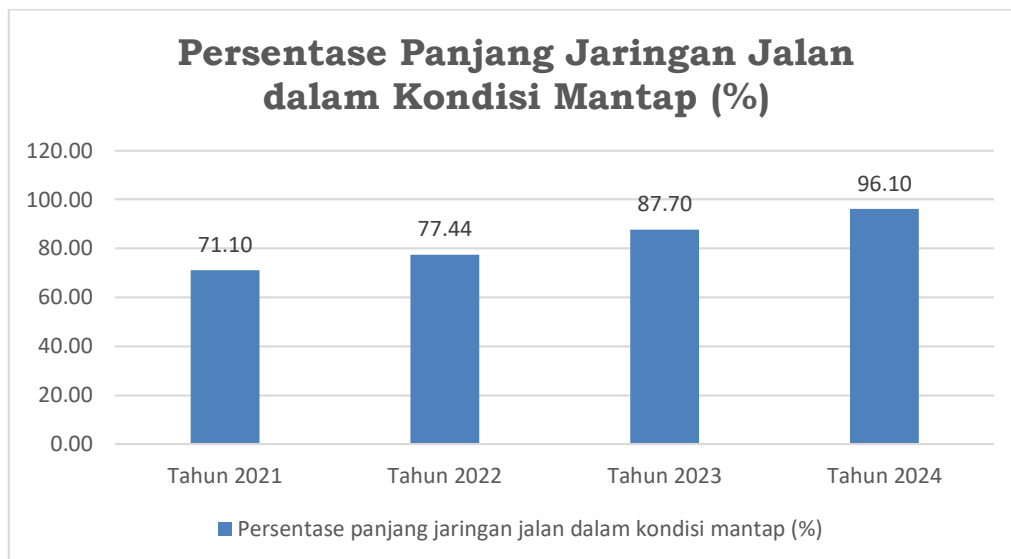
Oleh karena itu, hasil ini menekankan pentingnya upaya peningkatan keselamatan lalu lintas secara lebih menyeluruh, termasuk peningkatan kualitas jalan, manajemen lalu lintas, edukasi pengguna jalan, dan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas, guna menekan angka kecelakaan serta dampak negatif sosial-ekonominya di Kabupaten Ngawi.

2.3.9.4 Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap

Kondisi infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, indikator persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap menjadi tolok ukur penting untuk menilai kualitas pelayanan infrastruktur dasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Di Kabupaten Ngawi, pemantauan terhadap kondisi jalan secara rutin dilakukan guna memastikan bahwa jaringan jalan yang tersedia dapat berfungsi optimal sebagai tulang punggung konektivitas antarwilayah, baik untuk kawasan permukiman, sentra produksi pertanian, industri, maupun pusat-pusat layanan publik. Kinerja indikator ini juga mencerminkan efektivitas program pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan yang dilaksanakan setiap tahunnya.





Gambar 2.61 Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2024

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi, 2025

Berdasarkan data indikator persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Ngawi selama periode 2021 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dan konsisten dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2021, persentase jalan dalam kondisi mantap tercatat sebesar 71,10%, kemudian meningkat menjadi 77,44% di tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

Kinerja yang lebih progresif tampak pada tahun 2023, di mana persentase jaringan jalan mantap mencapai 87,70%, dan melonjak lebih tinggi lagi menjadi 96,10% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh jaringan jalan kabupaten telah berada dalam kondisi yang layak dan memadai untuk mendukung aktivitas masyarakat, distribusi logistik, serta konektivitas antar wilayah.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan implementasi program pembangunan dan rehabilitasi jalan yang didukung oleh alokasi anggaran infrastruktur yang tepat, perencanaan teknis yang matang, serta sinergi antarsektor. Dengan jaringan jalan yang semakin mantap, Kabupaten Ngawi semakin memperkuat peran strategisnya sebagai simpul logistik dan distribusi di wilayah barat



Jawa Timur, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan regional secara lebih inklusif.

2.3.7.5 Kondisi Jalan Kabupaten Ngawi

Kualitas infrastruktur jalan menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi. Kinerja pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas jalan diukur melalui persentase jalan dalam kondisi mantap (kondisi Baik dan Sedang). Capaian pada indikator strategis ini secara langsung menggambarkan efektivitas program pemeliharaan dan pembangunan dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam menunjang kelancaran distribusi sektor pertanian.

Tabel 2.28 Kondisi Jalan Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

KONDISI	2020		2021		2022		2023		2024	
	Km	(%)	Km	(%)	Km	(%)	Km	(%)	Km	(%)
Baik	185,69	25	193,69	26	229,11	30,79	262,52	35,28	289,52	38,68
Sedang	329,75	44,3	335,74	45,1	347,19	46,65	390,09	52,42	429,67	57,41
Rusak Ringan	143,74	19,3	137,75	18,5	126,3	16,97	83,4	11,21	21,69	2,9
Rusak Berat	84,99	11,4	76,99	10,3	41,57	5,59	8,16	1,1	7,53	1,01
Jumlah	744,17	100	744,17	100	744,17	100	744,17	100	748,41	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi, 2025

Data kondisi jalan Kabupaten Ngawi periode 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur yang sangat signifikan dan konsisten, yang menjadi salah satu capaian pembangunan paling menonjol. Hal ini dibuktikan dengan meroketnya persentase jalan dalam kondisi mantap (kategori Baik dan Sedang) dari 69,3% pada tahun 2020 menjadi 96,1% pada akhir tahun 2024. Keberhasilan ini didorong oleh strategi yang efektif, yaitu tidak hanya meningkatkan panjang jalan dalam kondisi “Baik” dari 185,69 Km menjadi 289,52 Km, tetapi juga secara agresif menekan angka jalan rusak. Secara khusus, proporsi jalan dalam



kondisi “Rusak Berat” berhasil ditekan secara drastis dari 11,4% menjadi hanya 1,01%, yang mengindikasikan keberhasilan program perbaikan dan rehabilitasi jalan secara masif.

Capaian impresif ini memiliki implikasi strategis yang luas bagi daya saing daerah. Dengan hampir seluruh jaringan jalan berada dalam kondisi mantap, kelancaran arus barang dan jasa, terutama untuk distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke pasar, dapat berjalan lebih efisien sehingga menekan biaya logistik. Selain itu, peningkatan kualitas jalan ini secara langsung meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pusat-pusat ekonomi. Perlu dicatat bahwa pencapaian 96,1% ini diraih bersamaan dengan adanya penambahan total panjang jalan pada tahun 2024, yang membuat prestasi ini semakin solid dan menjadi fondasi kuat untuk pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di periode selanjutnya.

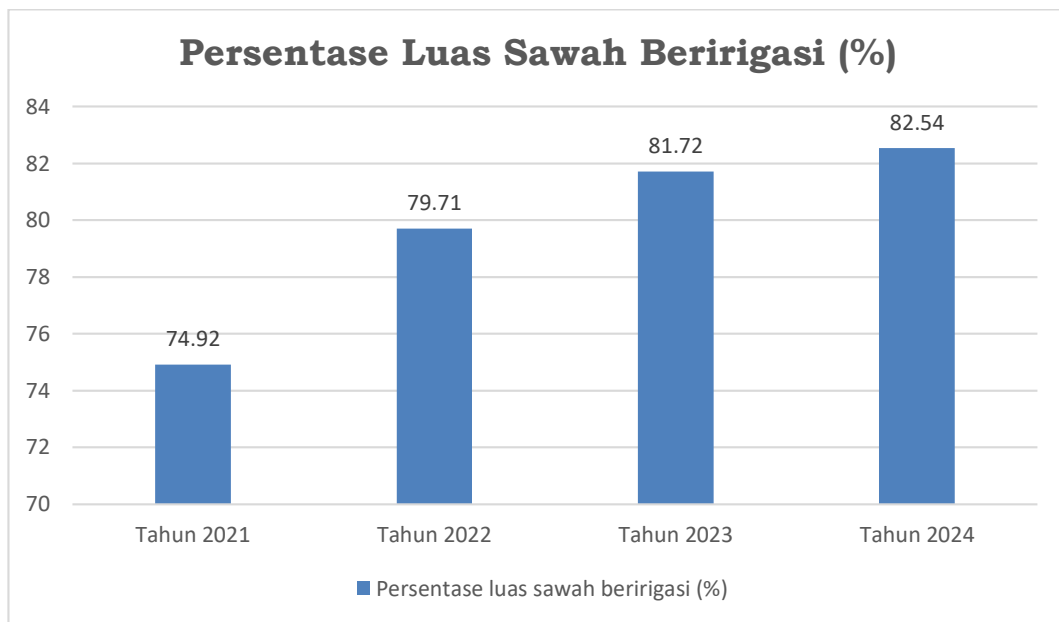
2.3.9.5 Persentase Luas Sawah Beririgasi

Irigasi merupakan komponen vital dalam sistem pertanian, khususnya untuk menjamin ketersediaan air pada lahan sawah dan meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, persentase luas sawah beririgasi menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat dukungan infrastruktur terhadap ketahanan pangan daerah.

Di Kabupaten Ngawi, yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur, ketersediaan jaringan irigasi yang memadai memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas produksi padi dan komoditas pertanian lainnya. Cakupan irigasi yang optimal tidak hanya berdampak pada peningkatan hasil panen, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha tani, efisiensi penggunaan air, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Indikator ini juga menjadi dasar perencanaan pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian, serta menjadi tolok ukur komitmen daerah dalam mendukung program nasional ketahanan pangan.





Gambar 2.62 Persentase Luas Sawah Beririgasi di Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2024

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi, 2025

Berdasarkan data persentase luas sawah beririgasi di Kabupaten Ngawi selama periode 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang stabil dan signifikan. Pada tahun 2021, sawah beririgasi tercatat sebesar 74,92%, kemudian meningkat menjadi 79,71% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam cakupan layanan irigasi, baik melalui pembangunan saluran baru maupun rehabilitasi jaringan irigasi yang telah ada.

Pada tahun 2023, angka tersebut kembali naik menjadi 81,72%, dan mencapai 82,54% pada tahun 2024. Konsistensi peningkatan ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mendukung sektor pertanian melalui penguatan infrastruktur irigasi sebagai fondasi utama produksi pertanian.

Peningkatan luas sawah beririgasi juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan air, stabilitas hasil panen, serta ketahanan pangan daerah. Secara keseluruhan, kinerja ini memperkuat posisi Kabupaten Ngawi sebagai sentra produksi pertanian yang strategis di wilayah Jawa Timur.



2.3.10 Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun ekologi. Penilaian status kemandirian desa dilakukan melalui Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencakup dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Desa Mandiri berada pada tingkat tertinggi dalam klasifikasi IDM, yang mencerminkan keberhasilan desa dalam mengelola potensi, pelayanan publik, dan kemandirian kelembagaan.

Tabel 2.29 Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Mandiri	14,08	14,55	7,51 (Desa Mandiri)	12,676	23,45

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi, 2025

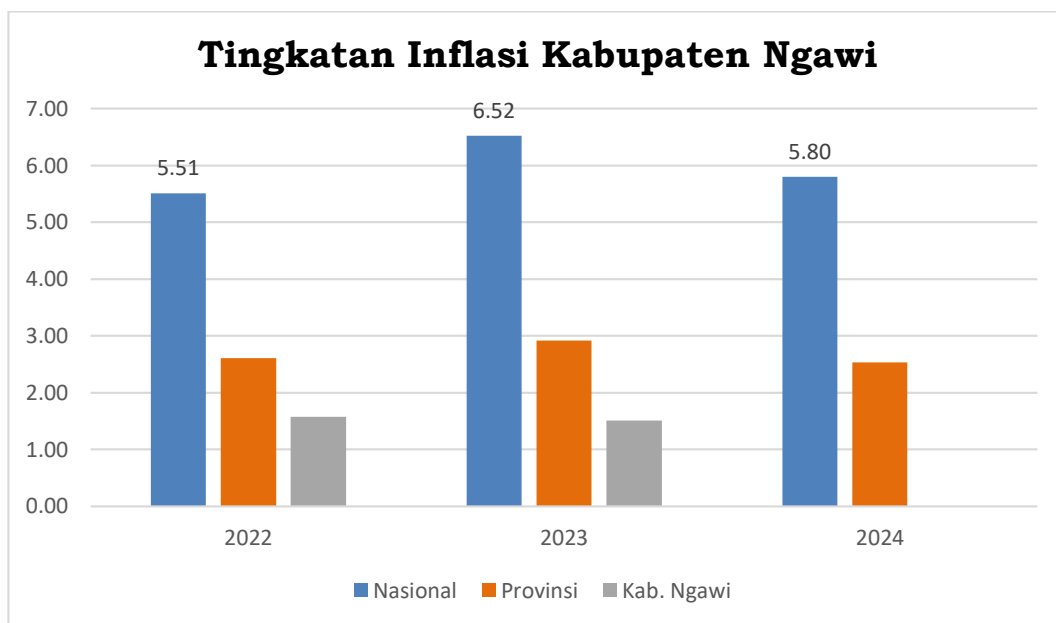
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi, capaian persentase desa mandiri menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, desa mandiri tercatat sebesar 14,08%, sedikit meningkat menjadi 14,55% pada 2021. Namun, terjadi penurunan signifikan pada 2022 menjadi hanya 7,51%, yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan metodologi IDM atau dampak pandemi terhadap indikator sosial-ekonomi desa. Pada tahun 2023, angka kembali meningkat secara perlahan menjadi 12,676%, dan melonjak tajam pada 2024 menjadi 23,45%, mencerminkan pemulihan dan keberhasilan program pemberdayaan desa.

2.3.11 Stabilitas Ekonomi Makro

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan harga secara umum, besarnya diperoleh dari perkembangan nilai indeks implisit, yaitu suatu indeks yang



menggambarkan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan. Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Ngawi sebagaimana grafik berikut :



Gambar 2.63 Tingkat Inflasi Kabupaten Ngawi dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2022-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Pada tahun 2022, inflasi di Kabupaten Ngawi cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di provinsi dan nasional. Inflasi yang tinggi ini dipengaruhi oleh lonjakan harga pangan dan energi yang disebabkan oleh ketidakpastian pasar global. Meskipun inflasi nasional juga meningkat, tingkat inflasi di Kabupaten Ngawi lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan ekonomi di Kabupaten Ngawi lebih berat dalam mengendalikan harga barang dan jasa dibandingkan dengan wilayah lain.

Tahun 2023, inflasi di Kabupaten Ngawi mulai menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun masih lebih tinggi dari inflasi di tingkat provinsi dan nasional. Penurunan ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk mengendalikan harga barang dan jasa di daerah, meskipun tantangan tetap ada. Di tingkat provinsi dan nasional, inflasi juga menurun, yang menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi lebih efektif dalam menstabilkan harga secara keseluruhan.



Untuk tahun 2024, meskipun data inflasi Kabupaten Ngawi belum tersedia, diperkirakan inflasi akan terus menurun. Ini seiring dengan kebijakan yang lebih fokus pada pengendalian harga barang dan penguatan sektor-sektor lokal. Secara keseluruhan, inflasi di tingkat nasional dan provinsi diperkirakan akan tetap lebih rendah, yang dapat membantu menstabilkan inflasi di Kabupaten Ngawi jika kebijakan yang diterapkan berhasil.

Berdasarkan tren inflasi yang ada, berikut adalah beberapa langkah yang perlu diambil untuk mengelola inflasi dan mencapai stabilitas ekonomi di Kabupaten Ngawi dalam lima tahun ke depan :

- 1) Pemantauan Harga dan Stok secara Berkala : Langkah ini melibatkan pengawasan ketat terhadap pergerakan harga dan ketersediaan stok bahan pokok serta barang penting di pasar. Pemantauan yang rutin dan akurat memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi gejolak harga sejak dini dan merumuskan langkah intervensi yang cepat dan tepat.
- 2) Menjaga Pasokan Bahan Pokok dan Barang Penting : Pemerintah Kabupaten Ngawi memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok serta barang penting di seluruh wilayah. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan produsen, distributor, dan pedagang untuk mencegah kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga secara signifikan.
- 3) Pencanangan Gerakan Menanam melalui Gema-Parut (Gerakan Masyarakat Produktif dan Unggul Tingkat Rumah Tangga) : Inisiatif ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menanam komoditas pangan di lingkungan masing-masing, baik di lahan pekarangan maupun lahan tidur. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pangan rumah tangga, mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal, serta mendukung visi Lumbung Pangan dari tingkat terkecil.





- 4) Melaksanakan Operasi Pasar Murah : Operasi pasar murah merupakan intervensi langsung pemerintah untuk menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau kepada masyarakat. Kegiatan ini efektif dalam menstabilkan harga pasar, membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, serta mengendalikan laju inflasi secara langsung.
- 5) Melaksanakan Sidak ke Pasar dan Distributor untuk Mencegah Penahanan Barang : Inspeksi mendadak ke pasar dan gudang distributor dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan atau penahanan barang oleh oknum yang bertujuan spekulatif. Tindakan tegas terhadap praktik semacam ini esensial untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mencegah kenaikan harga yang tidak wajar.
- 6) Menjaga Ketersediaan Pangan melalui Optimalisasi Hasil Produksi Pertanian : Memanfaatkan potensi pertanian yang besar, Kabupaten Ngawi berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi hasil pertanian lokal. Ini mencakup dukungan untuk petani, penggunaan teknologi tepat guna, serta manajemen panen dan pasca-panen yang efektif, sehingga pasokan pangan dari dalam daerah tetap terjaga dan berkontribusi signifikan pada visi Lumbung Pangan.
- 7) Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) : Kabupaten Ngawi mengaktifkan dan mengintensifkan koordinasi antarlembaga yang tergabung dalam TPID. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, statistik, dan pemangku kepentingan terkait lainnya memastikan respons yang terintegrasi dan multi-sektoral dalam menganalisis penyebab inflasi, merumuskan kebijakan, dan mengimplementasikan program pengendalian inflasi secara efektif.

Setelah menguraikan berbagai upaya strategis yang dilakukan Kabupaten Ngawi dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, sebuah indikator vital bagi daya beli dan stabilitas ekonomi makro maka terdapat aspek fundamental lain



dari pembangunan berkelanjutan : pemerataan kesejahteraan. Indikator ekonomi tidak hanya mencakup stabilitas harga, melainkan juga distribusi hasil pembangunan itu sendiri.

Dalam konteks ini, Indeks Gini memegang peranan krusial sebagai alat ukur ketimpangan pengeluaran atau pendapatan di masyarakat. Angka Indeks Gini memberikan gambaran sejauh mana distribusi kesejahteraan telah tercapai atau masih terdapat disparitas yang signifikan antar individu maupun antar kelompok. Pemantauan dan upaya perbaikan Indeks Gini menjadi esensial bagi Kabupaten Ngawi, karena kesejahteraan yang merata adalah pilar utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan kondusifitas sosial, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor Lumbung Pangan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif merupakan pondasi utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka RPJMD, penguatan tata kelola diarahkan untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang profesional, akuntabel, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.

2.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Tabel 2.30 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Ngawi

Indikator Kinerja Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum	NA	NA	NA	69,85	98,06

Sumber : Laporan Hasil Reformasi Birokrasi Kabupaten Ngawi, 2024

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Ngawi menunjukkan tren positif, dari 69,85 pada 2023 menjadi 98,06 pada 2024, yang menandakan adanya peningkatan efektivitas tata kelola hukum, pelayanan keadilan, dan kualitas regulasi daerah. Untuk lima



tahun ke depan (2025–2029), arah pembangunan difokuskan pada penyederhanaan regulasi, akses bantuan hukum bagi masyarakat rentan, penguatan peran aparatur penegak hukum, serta digitalisasi layanan hukum. Dengan strategi tersebut, Kabupaten Ngawi ditargetkan dapat mencapai indeks di atas 75, menuju sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 2.31 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	NA	2,65	NA	3,23	3,61

Sumber : Laporan Hasil Reformasi Birokrasi Kabupaten Ngawi, 2024

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kematangan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Indeks SPBE menggambarkan sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik serta pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang tersedia, Indeks SPBE Kabupaten Ngawi menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun tidak tersedia data pada tahun 2020 dan 2022, nilai indeks tercatat sebesar 2,65 pada tahun 2021, meningkat menjadi 3,23 pada tahun 2023, dan kembali meningkat signifikan menjadi 3,61 pada tahun 2024. Capaian ini mengindikasikan adanya komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mendorong transformasi digital, melalui pengembangan aplikasi layanan publik, integrasi data antar-perangkat daerah, dan penguatan infrastruktur digital. Untuk mempertahankan dan meningkatkan skor SPBE ke depannya, diperlukan strategi lanjutan seperti percepatan interoperabilitas sistem, peningkatan kapasitas SDM digital, serta optimalisasi tata kelola data yang akuntabel dan berbasis kebutuhan masyarakat.

2.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan instrumen evaluatif yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan layanan publik oleh instansi pemerintah, baik dari aspek input, proses, hingga output layanan kepada masyarakat. Indeks ini mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang diberikan, mencakup dimensi aksesibilitas, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang tersedia. Di Kabupaten Ngawi, pengukuran Indeks Pelayanan Publik menjadi bagian penting dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepuasan warga. Melalui penguatan sistem pelayanan publik yang adaptif dan berbasis digital, Pemerintah Kabupaten Ngawi terus berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan inklusif sebagai bagian dari transformasi menuju birokrasi berkelas dunia.

Tabel 2.32 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	NA	NA	3,725	3,21	4,23

Sumber : Laporan Hasil Reformasi Birokrasi Kabupaten Ngawi, 2024

2.4.1.4 Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan empat kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Opini ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Di Kabupaten Ngawi, opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak hanya mencerminkan transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan, tetapi



juga menjadi dasar pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis data akurat. Keberlanjutan capaian opini terbaik menjadi komitmen daerah dalam mendorong reformasi birokrasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Tabel 2.33 Opini BPK Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Ngawi oleh BPK, 2025

Selama lima tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Ngawi berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Opini WTP merupakan bentuk tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah, yang menandakan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak mengandung kesalahan yang material.

Konsistensi capaian opini WTP selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Ngawi dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Hal ini mencerminkan keberhasilan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan, serta komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan disiplin anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Opini WTP yang konsisten ini juga menjadi indikator penting dalam penguatan reformasi birokrasi, khususnya pada area penguatan akuntabilitas dan pengawasan, serta dapat digunakan sebagai dasar pengajuan insentif daerah seperti Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.

2.4.1.5 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, melaksanakan agenda *reformasi birokrasi* sesuai dengan kebijakan nasional. IRB menggambarkan tingkat kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan birokrasi yang :

1. Bersih dan akuntabel
2. Efektif dan efisien,
3. Serta memiliki pelayanan publik yang prima.

Tabel 2.34 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	68,94	69,40	69,85	72,57	90,37

Sumber : Laporan Hasil Reformasi Birokrasi Kabupaten Ngawi, 2025

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Ngawi menunjukkan tren yang konsisten meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IRB berada di angka 68,94, kemudian mengalami kenaikan bertahap menjadi 69,40 pada tahun 2021 dan 69,85 pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya progres awal dalam penerapan delapan area perubahan reformasi birokrasi, meskipun masih berada pada kategori sedang. Percepatan peningkatan kualitas birokrasi mulai terlihat lebih nyata pada tahun 2023, ketika capaian IRB naik menjadi 72,57, menandakan perbaikan sistem tata kelola, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mulai terasa.

Puncaknya terjadi pada tahun 2024, dengan capaian 90,37, sebuah lompatan signifikan yang menunjukkan transformasi menyeluruh dalam tata kelola birokrasi daerah. Nilai ini mencerminkan tingkat birokrasi yang hampir mendekati ideal, ditopang oleh implementasi sistem merit ASN, digitalisasi layanan, serta penguatan budaya kinerja dan akuntabilitas publik.



Capaian tahun 2024 ini dapat menjadi baseline strategis untuk menetapkan target dan arah reformasi birokrasi dalam RPJMD 2025–2029, sekaligus menjadi bukti keseriusan Kabupaten Ngawi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan adaptif terhadap perubahan.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan fondasi hukum yang berkeadilan, sistem keamanan yang tangguh, serta demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial. Dalam konteks RPJMD, penguatan pilar-pilar ini menjadi sangat penting untuk menjamin stabilitas sosial, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

2.4.2.1 Persentase Penegakan Perda

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi untuk mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Efektivitas penegakan Perda menjadi cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan supremasi hukum, menjamin rasa keadilan, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara berkelanjutan.

Persentase penegakan Perda mengindikasikan proporsi regulasi daerah yang telah dijalankan secara nyata dan berdampak, dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Perda yang telah ditetapkan. Indikator ini menjadi penting dalam mengukur sejauh mana Perda tidak hanya bersifat normatif di atas kertas, tetapi juga dapat diimplementasikan secara operasional di lapangan.



Tabel 2.35 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	75	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi, 2025

Data menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 ke 2021. Pada tahun 2020, persentase penegakan tercatat sebesar 75%, yang kemudian meningkat menjadi 100% pada tahun 2021 dan berhasil dipertahankan secara konsisten hingga tahun 2024.

Capaian tersebut mencerminkan adanya komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam memastikan seluruh regulasi daerah dijalankan secara efektif dan konsisten. Kinerja ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem pengawasan, koordinasi antar perangkat daerah, serta peran aparatur penegak perda telah berjalan optimal selama periode RPJMD 2020–2024.

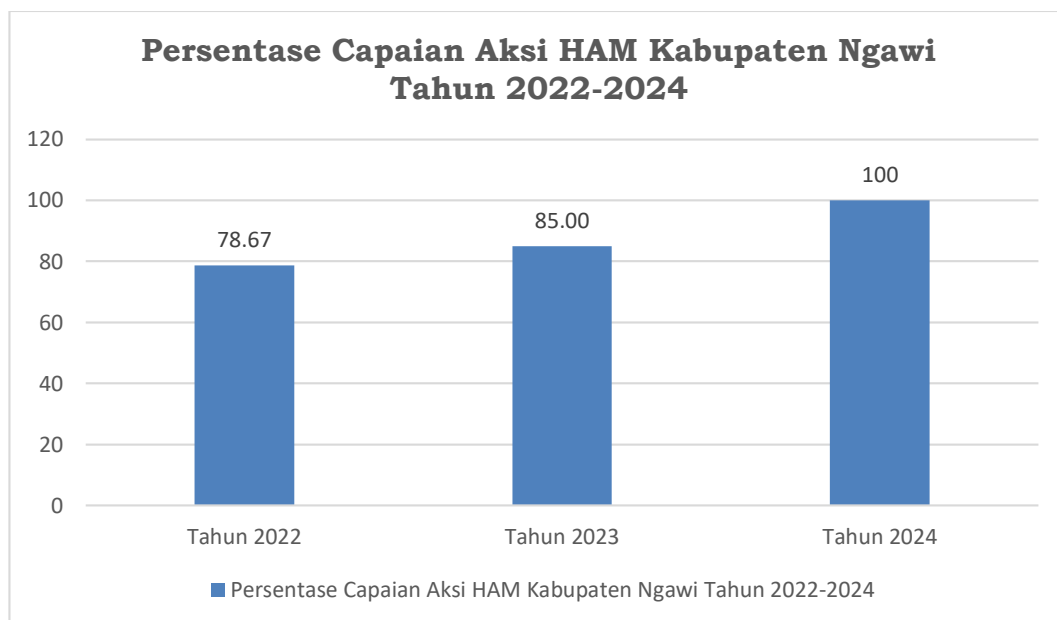
2.4.2.3 Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat komitmen dan efektivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan program serta kegiatan yang mendukung penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di wilayahnya. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan, pelayanan publik, dan kegiatan berbasis inklusivitas sosial.

Di Kabupaten Ngawi, capaian aksi HAM menjadi cerminan dari keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berpihak pada kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Persentase capaian yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah konsisten melaksanakan berbagai



langkah nyata, seperti penyediaan layanan publik ramah HAM, penguatan kapasitas aparatur, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 2.64 Capaian Aksi HAM Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2023

Sumber : Kementerian Hukum & HAM RI, 2025

Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Kabupaten Ngawi menunjukkan perkembangan yang positif dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, capaian Aksi HAM tercatat sebesar 78,67 poin. Angka ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi di lapangan.

Pada tahun 2023, capaian Aksi HAM Kabupaten Ngawi meningkat signifikan menjadi 85,00 poin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai langkah perbaikan, baik dari sisi regulasi, koordinasi antarinstansi, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik, mampu memberikan dampak nyata terhadap pemajuan dan perlindungan HAM. Lonjakan capaian ini juga selaras dengan komitmen nasional dalam memperkuat agenda pembangunan berbasis HAM di tingkat daerah.



Secara keseluruhan, tren peningkatan capaian Aksi HAM ini menjadi indikator bahwa Kabupaten Ngawi semakin konsisten dalam menempatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan daerah. Ke depan, konsistensi dan keberlanjutan program menjadi kunci agar capaian ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan merupakan refleksi dari upaya strategis suatu negara atau daerah dalam memperkuat posisinya di tengah dinamika geopolitik regional dan global. Ketangguhan diplomasi menekankan pada kemampuan membangun hubungan luar negeri yang adaptif, berprinsip, dan berorientasi pada kepentingan nasional melalui dialog, kerja sama, dan aliansi yang saling menguntungkan. Sementara itu, pertahanan yang berdaya gentar mencerminkan kesiapsiagaan sistem pertahanan yang mampu mencegah dan merespons ancaman, baik militer maupun non-militer, dengan efisiensi dan presisi. Dalam konteks ini, sinergi antara kekuatan diplomasi yang cerdas dan sistem pertahanan yang tangguh menjadi modal utama dalam menjaga kedaulatan, melindungi kepentingan nasional, serta menciptakan stabilitas kawasan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Ngawi, konsep ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan dapat dimaknai sebagai kemampuan daerah untuk membangun stabilitas sosial, politik, dan ekonomi melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta sinergi antarwilayah. Letak geografis Ngawi yang strategis sebagai daerah perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadikan wilayah ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, kelancaran distribusi logistik, dan kohesi sosial masyarakat lintas daerah. Diplomasi daerah diwujudkan dalam



bentuk kerja sama antar kabupaten, penguatan hubungan dengan pemerintah provinsi, dan partisipasi aktif dalam forum regional untuk memperkuat posisi Ngawi sebagai wilayah yang aman, kondusif, dan terbuka bagi investasi serta kerja sama pembangunan.

Selain itu, ketangguhan pertahanan daerah juga dapat dilihat dari upaya Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam membangun sistem kesiapsiagaan terhadap potensi ancaman non-militer, seperti bencana alam, konflik sosial, dan ancaman keamanan siber. Penguatan kapasitas aparatur, sinergi dengan TNI/POLRI, serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan menjadi bagian integral dari sistem pertahanan daerah yang adaptif dan responsif. Dengan demikian, ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan di Kabupaten Ngawi bukan hanya tentang aspek keamanan, tetapi juga tentang menciptakan ruang kolaboratif yang mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

2.4.4 Kinerja Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah kepada seluruh warga negara sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional masyarakat. Penerapan SPM menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Di Kabupaten Ngawi, pelaksanaan SPM terus diupayakan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Ngawi berkomitmen untuk meningkatkan capaian indikator SPM melalui penguatan kelembagaan,



pemenuhan anggaran, penyediaan SDM yang kompeten, serta sistem pengawasan dan pelaporan yang transparan.

2.4.5.1 Capaian SPM Urusan Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Ngawi berkomitmen untuk memenuhi indikator-indikator SPM pendidikan, khususnya terkait akses layanan pendidikan dasar yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan bagi seluruh anak usia sekolah. Pelaksanaan SPM pendidikan menjadi fondasi penting dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tabel 2.36 Realisasi Indikator Kinerja SPM Pemerintah Kabupaten Ngawi Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja SPM	Satuan	Realisasi					
		2020	2021	2022	2023		2024
					Permendagri 100 Tahun 2018	Permendagri 59 Tahun 2021	
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Jumlah	19.212	22.582	22.088	21.855	NA	22230
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Jumlah	97.853	105.235	106.763	107.535	NA	37890
Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Jumlah	5.474	8.760	8.765	7.071	NA	30.971

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, 2025





Berdasarkan data indikator kinerja SPM pendidikan di Kabupaten Ngawi, terlihat adanya tren peningkatan jumlah warga negara usia sekolah yang berpartisipasi dalam pendidikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada kelompok usia 5–6 tahun, partisipasi meningkat dari 19.212 anak pada tahun 2020 menjadi 22.230 anak pada tahun 2024, meskipun sempat menurun pada tahun 2023 sesuai penghitungan menggunakan acuan Permendagri 100 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dinamika metode penghitungan, secara umum tingkat partisipasi anak usia dini dalam pendidikan cenderung membaik.

Pada kelompok usia 7–15 tahun yang merupakan usia pendidikan dasar, jumlah partisipasi juga menunjukkan tren positif. Dari 97.853 anak pada tahun 2020 meningkat signifikan menjadi 107.535 anak pada tahun 2023 dan mencapai 37.890 anak pada tahun 2024. Lonjakan di tahun terakhir ini patut dicermati lebih lanjut, kemungkinan besar terkait dengan penyesuaian metode penghitungan ataupun integrasi data baru. Namun demikian, secara keseluruhan angka tersebut menegaskan bahwa akses pendidikan dasar semakin menjangkau lebih banyak anak usia sekolah.

Sementara itu, pada kelompok usia 7–18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan, jumlah partisipasi juga mengalami peningkatan tajam. Dari 5.474 peserta pada tahun 2020, angka ini sempat stagnan pada 2021–2022, lalu menurun di 2023, sebelum melonjak signifikan menjadi 30.971 pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan nonformal, terutama bagi anak-anak yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam jalur pendidikan formal. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan komitmen Kabupaten Ngawi dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga usia sekolah, baik pada jalur pendidikan formal maupun kesetaraan.



2.4.5.2 Capaian SPM Urusan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang menyeluruh dan bermutu. Pemerintah Kabupaten Ngawi berkomitmen untuk memenuhi indikator-indikator SPM kesehatan yang mencakup pelayanan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita, remaja, usia produktif, lanjut usia, serta penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.

Pelaksanaan SPM kesehatan menjadi fondasi penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menekan angka kesakitan maupun kematian yang dapat dicegah. Capaian SPM kesehatan juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan publik yang adil, merata, dan berkelanjutan

Tabel 2.37 Realisasi Indikator Kinerja SPM Pemerintah Kabupaten Ngawi Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja SPM	Satuan	Realisasi					
		2020	2021	2022	2023		2024
					Permendagri 100 Tahun 2018	Permendagri 59 Tahun 2021	
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil,	%	89,35	88,19	100	96,97	97,17	100
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin,	%	95,93	93,51	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir,	%	97,18	95,85	100	98.97	99,04	100
Pelayanan kesehatan Balita,	%	94,52	86,22	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar,	%	84,47	93,78	100	100	99,46	100
Pelayanan kesehatan Pada Usia Produktif,	%	64,22	87,60	100	100	100	97,35
Pelayanan kesehatan Pada Usia Lanjut,	%	60,08	70,92	100	100	97,78	100
Pelayanan kesehatan	%	28,75	50,79	100	100	100	100

Indikator Kinerja SPM	Satuan	Realisasi					
		2020	2021	2022	2023		2024
					Permendagri 100 Tahun 2018	Permendagri 59 Tahun 2021	
Penderita Hipertensi,							
Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus,	%	88,64	94,43	100	100	98,33	100
Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat,	%	119,85	142,10	100	100	96,00	100
Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis,	%	43,60	53,30	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	69,70	67,30	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, 2025

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan Kabupaten Ngawi tahun 2020–2024, terlihat adanya peningkatan signifikan dan konsistensi capaian pada seluruh jenis pelayanan kesehatan dasar. Sebagian besar indikator mengalami perbaikan yang sangat nyata pada tahun 2022 dan seterusnya, menunjukkan keberhasilan intervensi sistematis oleh pemerintah daerah, khususnya dalam hal perluasan cakupan layanan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, serta optimalisasi peran fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas).

Pada awal periode, beberapa layanan seperti untuk usia produktif, lanjut usia, dan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan tuberkulosis menunjukkan angka capaian yang masih rendah. Namun seiring berjalannya waktu, indikator-indikator tersebut mengalami perbaikan yang drastis hingga mencapai standar yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis



komunitas dan program skrining kesehatan semakin efektif menjangkau kelompok sasaran.

Layanan kesehatan untuk ibu, bayi, balita, serta penderita diabetes dan gangguan jiwa juga menunjukkan konsistensi capaian maksimal, yang menjadi refleksi dari penguatan layanan promotif dan preventif di tingkat dasar. Bahkan dalam beberapa indikator, kinerja layanan melebihi target standar minimum pada awal periode.

Secara umum, capaian ini mencerminkan bahwa pemerintah Kabupaten Ngawi berhasil mengonsolidasikan sistem pelayanan kesehatan dasar yang inklusif dan merata, dengan dukungan regulasi, SDM, dan infrastruktur yang semakin membaik. Keberhasilan pemenuhan SPM kesehatan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara luas dan menjadi landasan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan.

2.4.5.3 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dalam akses terhadap infrastruktur publik yang aman, layak, dan berfungsi optimal. Dalam konteks ini, pelayanan minimal difokuskan pada penyediaan akses terhadap air minum dan sanitasi yang memenuhi standar teknis, serta penyediaan dan pemeliharaan prasarana jalan yang mendukung konektivitas wilayah dan mobilitas masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ngawi secara bertahap terus berupaya meningkatkan capaian indikator SPM PUPR, baik melalui penguatan sistem pengelolaan infrastruktur, penyediaan anggaran yang memadai, maupun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Pelaksanaan SPM ini menjadi landasan penting dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Keberhasilan dalam pemenuhan SPM PUPR juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah, termasuk dalam aspek pelayanan dasar, daya saing ekonomi lokal, dan keberlanjutan lingkungan permukiman

Tabel 2.38 Realisasi Indikator Kinerja SPM Pemerintah Kabupaten Ngawi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja SPM	Satuan	Realisasi					
		2020	2021	2022	2023		2024
					Permendagri 100 Tahun 2018	Permendagri 59 Tahun 2021	
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	93,14	98,01	87	89,91	86,44	88,05
Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	%	82,21	86	86,67	87,58	90,06	87,25

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, 2025

Berdasarkan data realisasi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Ngawi tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa capaian layanan infrastruktur dasar telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun terdapat beberapa fluktuasi pada aspek tertentu.

Kinerja pelayanan penyediaan air minum bagi kebutuhan pokok sehari-hari secara umum menunjukkan capaian yang cukup stabil, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun-tahun tertentu. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan pelayanan air bersih, baik dari sisi infrastruktur, kualitas sumber air, maupun distribusi layanan, terutama pada wilayah-wilayah dengan akses terbatas.

Sementara itu, pada aspek pengelolaan air limbah domestik, capaian terus mengalami perbaikan secara bertahap. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya yang konsisten dari pemerintah



daerah dalam memperluas cakupan layanan sanitasi yang layak dan aman, serta mengurangi risiko pencemaran lingkungan permukiman.

Secara keseluruhan, capaian indikator SPM urusan PUPR menunjukkan arah yang positif, meskipun masih dibutuhkan penguatan sistem pengelolaan infrastruktur, dukungan pembiayaan, serta inovasi pelayanan agar pemenuhan standar pelayanan dasar dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

2.4.5.4 Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat atas hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang sehat. Fokus layanan ini mencakup penyediaan akses terhadap air minum, sanitasi, dan pengelolaan kawasan permukiman yang mendukung kehidupan yang aman, bersih, dan manusiawi.

Tabel 2.39 Realisasi Indikator Kinerja SPM Pemerintah Kabupaten Ngawi Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja SPM	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio rumah layak huni	Rasio	0,29	0,3000	0,2814	0,2822	0,283
Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	96,80	97,00	95,98	96,27	95,527
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,66	0,66	0,66	0,66	0.243
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	%	60,36	71,89	25,00	NA	NA
Cakupan layanan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin	%	83,85	87,00	87,79	NA	NA
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	73,25	74.20	83,80	NA	NA
Persentase Kawasan Permukiman Layak	%	NA	NA	NA	44,06	73,07
Luas Kawasan Kumuh	%	NA	NA	NA	24,88	100
Persentase Rumah Layak Huni	%	NA	NA	NA	42	72,27
Persentase Tanah Yang Dikelola Dengan Baik	%	NA	NA	NA	83	87,5
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	89,1	87,34	86,81	87,58	87,25



Indikator Kinerja SPM	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase permukiman tertata	%	99	99	99	99	99
Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	%	81,25	84,04	99,20	99,20	88,05
Persentase Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	81,25	84,04	86,87	89,91	88,05
Persentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	89,1	87,34	86,67	87,58	87,25
Jumlah Penyelesaian Sertifikat	Sertifikat	35.729	52.984	39.753	39.753	NA
Jumlah Pembuatan akta tanah	Kasus	1.588	1.330	982	982	NA
Persentase luas lahan bersertifikat	%	3,57	4,91	3,72	3,72	NA
Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	NA	100	0	0	0
Persentase Berkurangnya jumlah unit RLTH (rumah tidak layak huni)	%	3,20	3,00	4,00	3,70	3.73
Persentase penduduk berakses air minum	%	94,13	85,72	85,00	89,91	88,05
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	94,13	85,72	85,00	89,91	88,05
Rasio tempat Permakaman umum persatuan penduduk	Rasio	2.344: 6.791	2.344: 7.244	2.344: 7.244	2.344: 7.293	0.324
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	%	81,25	84,04	85,03	89,91	88,05
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	89,10	87,34	86,81	87,58	87,25
jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Unit	NA	NA	943	2089	2343

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, 2025

Catatan : Untuk data realisasi yang masih NA, pada tahun tersebut belum dilakukan pendataan dan perhitungan

Berdasarkan hasil kinerja bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi tahun 2020–2024, secara umum terlihat adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam pemenuhan indikator-indikator pembangunan permukiman yang layak dan berkelanjutan.

Capaian rasio rumah dan permukiman layak huni menunjukkan stabilitas yang terjaga, mencerminkan kualitas



hunian masyarakat yang semakin membaik. Di sisi lain, cakupan ketersediaan rumah layak huni dan layanan rumah layak huni bagi kelompok rentan, seperti rumah tangga miskin dan wilayah terjangkau, mengalami perkembangan positif meskipun sempat mengalami variasi dari tahun ke tahun.

Kemajuan penting juga terlihat dari perluasan kawasan permukiman layak dan pengurangan luas kawasan kumuh yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan keberhasilan program penanganan permukiman kumuh, didukung oleh intervensi fisik melalui pembangunan infrastruktur dasar serta penguatan tata kelola kawasan.

Indikator terkait akses sanitasi dan air minum, baik yang bersifat individual maupun melalui jaringan SPAM, mencerminkan upaya serius dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Ketersediaan air bersih, pengolahan air limbah domestik, serta penyediaan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum) turut memperkuat kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan jumlah sertifikasi tanah dan layanan penyapuan lumpur tinja menunjukkan keberpihakan terhadap legalitas dan keberlanjutan permukiman. Meskipun terdapat beberapa indikator yang belum terisi pada tahun-tahun tertentu, secara keseluruhan tren menunjukkan arah penguatan terhadap pembangunan perumahan yang layak, sehat, dan manusiawi.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menunjukkan komitmen dalam mendukung terciptanya kawasan permukiman yang tertata, aman, dan inklusif, sebagai bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

2.4.5.5 Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman dan perlindungan kepada seluruh warga. Pelayanan ini



mencakup upaya deteksi dini, pencegahan gangguan ketertiban, serta penanganan kedaruratan secara cepat dan tepat.

Di Kabupaten Ngawi, pelaksanaan SPM pada urusan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kesiapsiagaan petugas, dan membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta unsur keamanan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan tanggap terhadap bencana atau situasi darurat lainnya.

Tabel 2.40 Realisasi Indikator Kinerja SPM Pemerintah Kabupaten Ngawi Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja SPM	Satuan	Realisasi					
		2020	2021	2022	2023		2024
					Permen dagri 100 Tahun 2018	Permen dagri 59 Tahun 2021	
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM),	%	84,69	90,00	100,00	100,00	100,00	100
Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN),	%	78,00	17,73	100,00	100,00	95,00	100,00
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN),	%	100,00	100,00	100,00%	100,00	95,00	100,00
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	%	79,55	60,00	100,00	100,00	100,00	100
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN),	%	78,00	0,61	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Satpol PP dan BPBD Kabupaten Ngawi, 2025

Berdasarkan data realisasi indikator SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Ngawi tahun 2020–2024, terlihat bahwa kinerja pelayanan pada bidang ini mengalami perbaikan yang signifikan dan mencapai tingkat optimal dalam beberapa tahun terakhir.

Pelayanan ketertiban umum menunjukkan peningkatan yang stabil dari waktu ke waktu hingga mencapai pemenuhan penuh terhadap standar yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas penegakan ketertiban, peningkatan kapasitas aparat Satpol PP, serta kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Sementara itu, pada aspek kebencanaan, peningkatan kinerja paling mencolok terjadi pada indikator pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan kesiapsiagaan. Setelah sempat mengalami capaian yang sangat rendah, kedua indikator tersebut menunjukkan pemulihan yang sangat kuat dan berhasil mencapai target secara penuh dalam waktu singkat. Ini menunjukkan keberhasilan dalam perbaikan sistem informasi, pelatihan kebencanaan, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi.

Untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban, baik dalam konteks bencana maupun kebakaran, capaian juga menunjukkan performa optimal, menandakan kesiapsiagaan yang tinggi dari tim tanggap darurat dan dukungan sarana prasarana yang memadai.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ngawi telah mampu membangun sistem pelayanan publik yang tanggap, responsif, dan adaptif terhadap potensi gangguan ketertiban dan bencana, serta berkomitmen menjaga keberlanjutan kinerja layanan yang langsung berdampak pada perlindungan keselamatan warga.

2.4.5.6 Capaian SPM Urusan Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), khususnya kelompok rentan seperti lansia terlantar, anak terlantar, penyandang disabilitas, dan korban bencana sosial.



Melalui pelaksanaan SPM ini, Pemerintah Kabupaten Ngawi berupaya memastikan setiap warga yang membutuhkan mendapatkan akses layanan sosial secara adil dan manusiawi. Pemenuhan SPM urusan sosial tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap kelompok rentan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif dan sejahtera.

Tabel 2.41 Realisasi Indikator Kinerja SPM Pemerintah Kabupaten Ngawi Urusan Sosial Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja SPM	Satuan	Realisasi					
		2020	2021	2022	2023		2024
					Permen dagri 100 Tahun 2018	Permen dagri 59 Tahun 2021	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	%	86,46	100,00	100,00	100,00	96,92	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	%	84,46	100,00	100,00	100,00	93,33	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	%	97,94	100,00	100,00	100,00	96,92	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00	100
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, 2025

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja SPM Urusan Sosial di Kabupaten Ngawi tahun 2020–2024, terlihat bahwa capaian pelayanan terhadap kelompok rentan menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten. Seluruh jenis layanan rehabilitasi sosial dasar, baik untuk penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, tuna sosial, hingga korban bencana, menunjukkan performa yang hampir sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan.

Capaian pada awal periode sempat menunjukkan variasi, terutama dalam pelayanan terhadap penyandang disabilitas dan anak telantar. Namun, sejak tahun berikutnya hingga 2024, terjadi peningkatan yang signifikan dan stabilitas capaian yang sangat baik. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada beberapa indikator di tahun 2023, capaian tersebut tetap berada dalam kategori tinggi dan mampu kembali mencapai target secara penuh pada tahun 2024.

Hal ini mencerminkan adanya sistem pelayanan sosial yang responsif dan adaptif di Kabupaten Ngawi, didukung oleh koordinasi antarinstansi, ketersediaan SDM sosial yang kompeten, serta mekanisme tanggap darurat dan perlindungan sosial yang berjalan dengan baik. Kinerja ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga keberlanjutan pelayanan terhadap kelompok rentan secara konsisten, serta menempatkan urusan sosial sebagai bagian integral dari agenda pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

2.4.5 Hasil Kerjasama Daerah

2.4.6 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi Jawa Timur

Dalam upaya mengakselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Kabupaten Ngawi secara proaktif mengoptimalkan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Alokasi dana ini diarahkan untuk serangkaian proyek strategis yang tidak hanya memperkuat infrastruktur dasar, namun juga secara langsung mendukung visi Kabupaten Ngawi. Berbagai inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan inklusif.

Berikut adalah rincian proyeksi proyek yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ngawi dengan dukungan pendanaan dari APBD Provinsi dan/atau APBN :





1. Pembangunan Tanggul Penahan Banjir di Kali Madiun : Proyek ini merupakan langkah mitigasi bencana yang krusial untuk melindungi permukiman warga, infrastruktur vital, dan lahan pertanian produktif di sepanjang Sungai Madiun dari ancaman banjir. Keberadaan tanggul ini akan menciptakan kondisi yang lebih aman dan kondusif bagi aktivitas masyarakat serta menjaga stabilitas produksi pangan, sejalan dengan Misi 5: Meningkatkan kondusifitas yang mendukung keberlanjutan pembangunan dan mendukung visi Lumbung Pangan.
2. Pembangunan *Exit* Tol Walikukun : Pengembangan *exit* tol di Walikukun akan secara signifikan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah Kabupaten Ngawi bagian barat. Proyek ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal dengan mempermudah akses logistik untuk hasil pertanian dan industri, serta membuka potensi pengembangan kawasan baru.
3. Penanganan Kemiskinan Ekstrem (Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, RTLH) : Program ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan infrastruktur dasar yang layak. Perbaikan jalan lingkungan akan mempermudah mobilitas, pembangunan drainase lingkungan mencegah genangan dan penyakit, sementara Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) memastikan hunian yang layak.
4. Penanganan Kawasan Kumuh (Kecamatan Ngawi, meliputi 4 Kelurahan dan 1 Desa Beran) : Proyek ini bertujuan untuk menata ulang dan meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan permukiman padat penduduk. Penanganan kawasan kumuh melibatkan perbaikan infrastruktur, sanitasi, dan penataan ruang agar menjadi lebih layak huni, sehat, dan produktif.
5. Program 3 Juta Rumah : Sebagai bagian dari program nasional, inisiatif ini mendukung pemenuhan kebutuhan dasar akan hunian layak bagi masyarakat. Ketersediaan perumahan yang memadai merupakan elemen esensial dalam meningkatkan kualitas hidup dan jaminan sosial bagi masyarakat, sesuai



dengan Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bagi masyarakat.

6. Sistem Air Minum dan Sanitasi (SPAM Pedesaan) : Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di pedesaan adalah upaya vital untuk memastikan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Ini merupakan fondasi kesehatan masyarakat dan kualitas hidup yang lebih baik, sejalan dengan Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bagi masyarakat dan Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
7. IPAL Komunal dan Individual (Septitank) : Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dan penyediaan septitank individual merupakan investasi strategis dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan publik. Pengelolaan limbah domestik yang baik akan mencegah pencemaran sumber air dan tanah, mendukung keberlanjutan lingkungan hidup secara umum.
8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Perbaikan Jaringan Irigasi) : Proyek ini memiliki relevansi langsung dengan visi Lumbung Pangan Kabupaten Ngawi. Perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi akan memastikan pasokan air yang optimal dan efisien untuk lahan pertanian, sehingga meningkatkan produktivitas, efisiensi penggunaan air, dan mendukung praktik pertanian berkelanjutan. TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*): Pembangunan TPS3R menunjukkan komitmen Ngawi terhadap pengelolaan sampah berbasis *Reduce, Reuse, Recycle*. Inovasi ini tidak hanya mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA, tetapi juga mendorong ekonomi sirkular dan kesadaran lingkungan masyarakat. IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja): IPLT adalah fasilitas esensial untuk mengelola dan mengolah lumpur tinja dari septitank, mencegah pencemaran lingkungan, dan melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit berbasis air.



2.4.7 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Kabupaten Ngawi

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diposisikan sebagai instrumen strategis Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Untuk periode 2025-2029, BUMD mengemban misi ganda yang saling memperkuat: pertama, sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang berperan aktif dalam penyediaan layanan dasar dan penguatan ekonomi kerakyatan; dan kedua, sebagai entitas bisnis yang dikelola secara profesional untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejalan dengan upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah, BUMD akan terus didorong untuk meningkatkan kinerja keuangannya secara profesional dan berkelanjutan. Peningkatan efisiensi operasional, inovasi produk layanan, dan tata kelola perusahaan yang transparan menjadi agenda utama. Tujuannya adalah agar BUMD tidak hanya sehat secara korporasi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi dividen yang semakin signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi.

Berikut ini beberapa BUMD di Kabupaten Ngawi yang turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi.

A. Perumda Air Minum Tirta Kertonegoro

Perumda Air Minum Tirta Kertonegoro adalah BUMD vital yang mengemban tugas pelayanan dasar penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Hingga akhir tahun 2024, perusahaan ini telah melayani lebih dari 52.198 sambungan pelanggan yang tersebar di 16 kecamatan, mencakup kebutuhan rumah tangga, industri, dan komersial. Sebagai perusahaan yang sebelumnya berstatus PDAM, Tirta Kertonegoro memiliki sejarah panjang dalam operasional pelayanan air di wilayah tersebut.

Perusahaan ini memiliki rekam jejak kinerja yang fluktuatif. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada awal masa kepemimpinan



direksi sebelumnya, PDAM Ngawi berada di peringkat 38 atau paling buncit di Jawa Timur dengan nilai kinerja 2,295 dan predikat “kurang sehat”. Namun, melalui serangkaian pembenahan, perusahaan berhasil menunjukkan tren positif yang signifikan. Puncaknya adalah keberhasilan meraih penghargaan TOP BUMD Awards 2022 dengan predikat Bintang 4, yang menandakan status kinerja “sehat”.

Meskipun demikian, keberhasilan ini dibayangi oleh tantangan operasional yang fundamental, yaitu kondisi infrastruktur yang menua. Banyak sumur produksi yang usianya sudah puluhan tahun, bahkan sumur di kawasan Beran telah berusia 40 tahun. Kondisi ini menuntut adanya peremajaan dan investasi modal yang besar untuk menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air. Untuk meningkatkan citra publik dan keterlibatan sosial, perusahaan juga aktif menggelar kegiatan seperti bakti sosial dan penghijauan di area sumber mata air, serta merencanakan peluncuran logo baru

Kinerja Perumda Air Minum dievaluasi secara berkala berdasarkan 18 indikator yang mencakup empat aspek : keuangan (bobot 25%), pelayanan (25%), operasional (35%), dan sumber daya manusia (15%), sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR dan PERPAMSI. Dari sisi keuangan, Laporan Keuangan BUMD Tahun 2023 menunjukkan kinerja yang cukup solid. Perusahaan berhasil mencatatkan Laba Kotor Usaha sebesar Rp 9,51 miliar dan Laba Operasional sebesar Rp 9,11 miliar. Angka ini mengindikasikan bahwa secara operasional, perusahaan mampu menghasilkan profit dari kegiatan utamanya.

B. PT BPR Syariah Ngawi (Perseroda)

PT BPR Syariah Ngawi (Perseroda) adalah BUMD berbentuk perseroan terbatas yang beroperasi di bawah payung hukum Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2023. Sebagai lembaga keuangan syariah, bank ini





menawarkan serangkaian produk yang komprehensif, meliputi produk tabungan (seperti Tabungan Simpel untuk pelajar, Tabungan Syariah-Q, serta Tabungan Haji & Kurban), produk deposito, dan beragam produk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil (mudharabah), jual beli (murabahah), dan sewa (ijarah). Target pasarnya mencakup masyarakat umum, pelaku usaha, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).

PT BPR Syariah Ngawi secara konsisten menunjukkan kinerja yang unggul dan diakui di tingkat nasional. Bank ini berhasil meraih penghargaan bergengsi TOP BUMD Awards pada tahun 2023 dan kembali mempertahankannya pada tahun 2024. Keberhasilan ini tidak terlepas dari serangkaian inovasi strategis yang diluncurkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung program pemerintah daerah.

Inovasi andalannya adalah program “BINTANG UMI” (Berantas Rentenir, Inovasi Tangguh Ultra Mikro). Program ini dirancang khusus untuk memberantas praktik rentenir dengan menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro tanpa margin (bunga) dan tanpa agunan. Program ini merupakan contoh nyata bagaimana sebuah BUMD dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang efektif. Selain itu, dalam rangka transformasi digital, BPRS Ngawi telah meluncurkan aplikasi mobile “KLUNTINK App” untuk mempermudah nasabah dalam mengakses layanan perbankan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, PT BPR Syariah Ngawi merupakan kontributor utama dividen BUMD bagi PAD Kabupaten Ngawi, menunjukkan kesehatan finansial yang sangat baik. Kinerja perusahaan secara rutin dievaluasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana salah satu fokus utamanya adalah peningkatan peran bank dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Ngawi.



Untuk memperkuat kapasitas operasional dan jangkauan layanannya, PT BPR Syariah Ngawi telah menjalin kerja sama strategis dengan Bank Jatim Cabang Ngawi. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini, yang turut disaksikan oleh Bupati Ngawi, bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara sinergis.

Keberhasilan BPRS Ngawi bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari hubungan simbiosis yang kuat antara manajemen BUMD yang profesional dengan kepemimpinan daerah yang visioner. Bupati Ngawi, selaku Pembina BUMD, juga menerima penghargaan “TOP Pembina BUMD” pada ajang yang sama. Hal ini mengindikasikan adanya kemauan politik (*political will*) dan arahan yang jelas dari pemerintah daerah, yang kemudian dieksekusi dengan baik oleh BUMD melalui inovasi yang relevan. Model ini membuktikan bahwa tujuan komersial dan kewajiban pelayanan publik tidak harus bertentangan, bahkan dapat saling memperkuat jika strategi bisnis BUMD selaras dengan prioritas pembangunan regional.

C. Perumda Sumber Sarana Sentosa

Perumda Sumber Sarana Sentosa merupakan salah satu BUMD tertua di Ngawi, didirikan pada tahun 1975 dengan nama awal Perusahaan Daerah (PD) Sumber Bhakti. Seiring dengan perubahan regulasi, namanya diubah menjadi Perumda Sumber Sarana Sentosa. Sesuai mandatnya, perusahaan ini diharapkan dapat berkontribusi pada PAD dengan menjalankan bisnis di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Di masa lalu, perusahaan ini menjalankan beberapa program, termasuk penjaminan pemasaran padi organik melalui kerja sama dengan BUMDes dan program pengadaan beras bagi ASN di lingkungan Pemkab Ngawi



Fokus utama analisis terhadap Perumda Sumber Sarana Sentosa adalah krisis kinerja yang sangat parah. Terjadi penurunan kontribusi laba yang katastrofal. Jika pada APBD Perubahan 2023 perusahaan ini masih ditargetkan menyetor dividen sebesar Rp 47,8 juta, realisasi laba bersih pada tahun 2024 anjlok menjadi hanya sekitar Rp 4,4 juta hingga Rp 5 juta.

Penyebab utama dari keruntuhan finansial ini telah diidentifikasi secara eksplisit oleh Bupati Ngawi. Menurutnya, penurunan drastis ini terjadi karena Perumda Sumber Sarana Sentosa tidak lagi mengelola aset lahan milik pemerintah di kawasan Ngudal, Desa Karangtengah Prandon. Pengalihan status pengelolaan aset ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menegakkan aturan pengelolaan aset daerah yang benar. Akibatnya, jika Perumda ingin memanfaatkan lahan tersebut, mereka harus menyewanya seperti pihak ketiga lainnya. Kejadian ini mengekspos kelemahan fundamental dalam model bisnis perusahaan. Pendapatan perusahaan kini hampir sepenuhnya bergantung pada penjualan beras, sebuah bisnis dengan margin keuntungan yang tipis dan tingkat persaingan yang tinggi. Bahkan program penyediaan beras untuk ASN yang pernah dijalankan sebelumnya sempat dihentikan dan dilaporkan menimbulkan kerugian harian sebesar Rp 60 juta, yang mengindikasikan adanya inefisiensi operasional yang parah bahkan di pasar yang bersifat captive.

Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menghentikan penyertaan modal kepada perusahaan ini sejak tahun 2021. Sebelumnya, pada periode 2016–2017, perusahaan sempat menerima kucuran dana sebesar Rp 1,5 miliar untuk menyelesaikan masalah internal. Bupati telah memberikan sinyal tegas bahwa jika tidak ada perkembangan yang berarti, masa depan perusahaan ini akan dipertimbangkan kembali. Kasus Perumda Sumber Sarana Sentosa merepresentasikan



sebuah dilema klasik dalam administrasi publik. Intervensi BPK untuk menegakkan tata kelola aset yang benar adalah langkah yang tepat dari sisi akuntabilitas. Namun, tindakan yang benar ini secara tidak langsung melumpuhkan BUMD dengan menghilangkan sumber pendapatan utamanya.

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang terintegrasi atau tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan keuangan Negara, sehingga prinsip yang terkandung di dalam pengelolaan keuangan daerah masih terintegrasi dengan keberadaan Undang-undang di bidang keuangan Negara, salah satunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut merupakan pengaturan komprehensif yang mampu mengakomodir serta mensinkronkan seluruh pengaturan mengenai aspek pengelolaan keuangan daerah yang telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian serta memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Gambaran pengelolaan keuangan membahas mengenai analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selain itu, gambaran pengelolaan keuangan juga menganalisis perkembangan neraca daerah yang meliputi aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Kapasitas keuangan daerah perlu diketahui sebagai dasar mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku





atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien.

2.5.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan sebagai bentuk realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Pengelolaan keuangan mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

2.5.2 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada pembahasan ini akan menguraikan aspek-aspek dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi aspek pendapatan dan aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Berikut di bawah ini realisasi APBD Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024 :



Tabel 2.42 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Uraian	REALISASI TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
PENDAPATAN	2.129.605.045.925,80	2.226.087.473.199,80	2.212.970.866.504,26	2.404.142.925.300,75	2.513.620.937.395,22	4,23%
A. Pendapatan Asli Daerah	269.979.788.588,80	283.608.932.666,80	309.326.829.397,26	307.633.055.130,75	329.632.703.731,22	5,11%
Pajak Daerah	66.002.901.096,00	67.294.146.283,00	75.993.698.837,00	94.719.239.898,00	99.110.161.250,80	96,85%
Retribusi Daerah	8.498.930.664,00	8.767.064.094,00	10.246.461.230,63	10.738.076.524,00	212.831.049.475,27	15,50%
Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	10.543.243.298,00	11.232.094.612,75	12.227.517.924,45	13.026.056.073,55	14.048.781.126,05	7,44%
Lain-lain PAD yang sah	184.934.713.530,80	196.315.627.677,05	210.859.151.405,18	189.149.682.635,20	3.642.711.879,10	2,12%
B. Pendapatan Transfer	1.760.104.651.225,00	1.845.537.180.747,00	1.882.559.467.566,00	2.085.683.745.170,00	2.183.088.233.664,00	5,53%
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	99.520.606.112,00	96.941.359.786,00	21.084.569.541,00	10.826.125.000,00	900.000.000.000,00	-42,68%
Pendapatan Hibah	90.224.627.273,00	91.164.980.786,00	21.016.385.541,00	10.826.125.000,00	900.000.000.000,00	-41,14%
Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Lainnya	9.295.978.839,00	5.776.379.000,00	68.184.000,00	0	0	-100%
BELANJA	2.146.482.441.055,79	2.205.164.128.244,39	2.294.020.887.866,25	2.441.875.395.917,78	2.557.696.825.920,45	4,48%
Belanja Operasi	1.447.742.335.406,45	1.515.319.677.345,23	1.567.067.976.225,89	1.630.215.803.449,20	1.772.426.968.625,42	5,18%
Belanja Modal	281.006.234.646,10	257.951.168.618,07	293.444.250.053,36	332.746.904.351,58	323.152.440.095,03	3,56%
Belanja Tak Terduga	50.039.048.782,00	3.970.478.475,00	987.732.715,00	1.460.551.500,00	833.750.000,00	-64,07%
Belanja Transfer	367.694.822.221,24	427.922.803.806,09	432.520.928.872,00	477.452.136.617,00	461.283.667.200,00	5,83%
Jumlah Belanja	2.146.482.441.055,79	2.205.164.128.244,39	2.294.020.887.866,25	2.441.875.395.917,78	2.557.696.825.920,45	4,48%



Uraian	REALISASI TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Surplus/Defisit	-16.877.395.129,99	20.923.344.955,41	-81.050.021.361,99	-37.732.470.617,03	-44.075.888.525,23	
PEMBIAYAAN	209.819.900.569,41	186.942.505.439,42	200.365.850.394,83	110.315.829.032,84	72.583.358.415,81	-53,09%
Penerimaan Pembiayaan	216.069.900.569,41	192.942.505.439,42	207.865.850.394,83	119.315.829.032,84	72.583.358.415,81	-23,86%
Pengeluaran Pembiayaan	6.250.000.000,00	6.000.000.000,00	7.500.000.000,00	9.000.000.000,00	0	-100%
Pembiayaan NETTO	209.819.900.569,41	186.942.505.439,42	200.365.850.394,83	110.315.829.032,84	72.583.358.415,81	-23,30%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	192.942.505.439,42	207.865.850.394,83	119.315.829.032,84	72.583.358.415,81	28.507.469.890,58	-65,18%

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, 2020-2025



A. Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup stabil dan positif. Total pendapatan daerah tercatat meningkat dari Rp2,13 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,51 triliun pada tahun 2024. Meski sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022, tren secara umum tetap menunjukkan peningkatan yang konsisten, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi antara tahun 2023 dan 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah terus menguat, sekaligus mencerminkan keberhasilan dalam mengelola berbagai sumber pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator kemandirian fiskal juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dalam lima tahun, PAD meningkat dari Rp269,97 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp329,57 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan komponen utama PAD seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya. Pajak daerah, misalnya, tumbuh dari Rp66 miliar menjadi Rp99 miliar, sedangkan retribusi daerah meningkat hampir dua kali lipat, mencerminkan upaya intensifikasi pemungutan dan penguatan basis penerimaan daerah.

Meski demikian, struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Sepanjang periode 2020–2024, pendapatan transfer terus mendominasi dengan nilai yang terus meningkat, dari Rp1,76 triliun menjadi Rp2,18 triliun. Hal ini memperlihatkan bahwa ketergantungan fiskal terhadap dana transfer masih tinggi, meskipun upaya peningkatan PAD sudah mulai terlihat.

Hal menarik terjadi pada pos pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, terutama pada tahun 2022 dan 2023, yang mengalami lonjakan signifikan. Pendapatan hibah yang sebelumnya relatif kecil melonjak menjadi Rp821 miliar pada tahun 2022 dan mencapai Rp900 miliar pada 2023, sebelum menurun drastis pada 2024. Demikian pula, kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah mencatat angka sangat tinggi di 2023, mencapai Rp900 miliar, yang jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya.



Lonjakan ini mengindikasikan adanya penerimaan tidak rutin atau bersifat *one-off*, yang perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketimpangan fiskal antar tahun.

Secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah menunjukkan arah yang progresif dan cukup menjanjikan. Pemerintah daerah berhasil menjaga pertumbuhan pendapatan, memperkuat PAD, dan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan. Meski demikian, tantangan besar masih terletak pada upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer serta menjaga konsistensi pertumbuhan PAD secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, strategi peningkatan kapasitas fiskal, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta penguatan ekonomi lokal menjadi prioritas yang perlu terus diperkuat di masa mendatang.

Inovasi *financing* atau pembiayaan daerah menjadi salah satu pendekatan strategis yang penting bagi Kabupaten Ngawi dalam upaya menggenjot pendapatan daerah, terlebih dalam menghadapi keterbatasan fiskal dan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks. Beberapa pendekatan inovatif yang bisa diterapkan, sesuai konteks dan potensi Kabupaten Ngawi, antara lain :

1. **Optimalisasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)** Kabupaten Ngawi dapat mendorong skema *Public Private Partnership* (PPP/KPBU) dalam sektor-sektor strategis seperti pengelolaan pasar daerah, penyediaan infrastruktur energi terbarukan, instalasi air bersih pedesaan, dan pengembangan kawasan pariwisata. Dengan KPBU, daerah tidak perlu mengandalkan belanja langsung, tetapi cukup menyediakan dukungan regulasi dan lahan, sementara swasta menanggung investasi awal.
2. **Pendirian dan Penguatan BUMD yang Berorientasi Laba**
Pemerintah Kabupaten Ngawi dapat memperluas peran BUMD tidak hanya sebagai operator layanan dasar, tetapi juga sebagai unit usaha yang produktif dan menyeter deviden ke kas daerah. Contoh pengembangan: BUMD energi untuk pengelolaan PJU berbasis energi surya, BUMD logistik pertanian, dan unit bisnis jasa konstruksi. Skema pemodalan bisa bersumber dari



penyertaan modal daerah, mitra strategis swasta, atau kemitraan BUMDes.

3. **Digitalisasi Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah**

Dengan membangun ekosistem *digital revenue management system*, pemda dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meminimalkan kebocoran, dan memperluas basis pajak daerah seperti pajak restoran, hotel, reklame, parkir, dan air tanah. Pelaporan mandiri via aplikasi dan insentif berbasis integritas pelaku usaha menjadi bagian dari strategi ini.

4. **Penerbitan Obligasi Daerah (Municipal Bonds)** Jika kapasitas fiskal dan kelayakan proyek memungkinkan, Kabupaten Ngawi bisa mengeksplorasi penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan proyek besar seperti sistem pengelolaan air bersih atau pembangunan kawasan industri pangan. Hal ini memerlukan sinergi dengan Kemenkeu, OJK, dan perbankan nasional, serta manajemen risiko fiskal yang ketat.

5. **Skema Blended Finance untuk Program Prioritas** Kabupaten Ngawi dapat mengakses *blended finance* dari kombinasi hibah internasional, CSR korporasi, dana filantropi, dan APBD. Program-program seperti penurunan stunting, pengembangan UMKM perempuan, dan transisi energi pedesaan berpeluang dibiayai secara kolaboratif melalui pendanaan campuran dengan dukungan teknis dari mitra pembangunan.

6. **Pemanfaatan Aset Daerah melalui Skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)** Aset tidak produktif milik daerah dapat dikelola melalui KSP, baik dalam bentuk *build-operate-transfer*, sewa jangka panjang, atau *joint venture* dengan pihak ketiga. Ini membuka peluang pendapatan pasif jangka panjang tanpa menjual aset milik daerah.

7. **Inovasi Layanan Berbasis Retribusi** Peningkatan kualitas layanan publik seperti parkir elektronik, pemakaman terpadu, laboratorium lingkungan, dan pengolahan sampah mandiri bisa dijadikan basis retribusi baru yang tidak membebani masyarakat namun berorientasi pelayanan dan pendapatan daerah.



Selain itu, terdapat program Kolaborasi Pihak Ke-3 Penanggulangan Kemiskinan BAZNAS Kabupaten Ngawi Tahun 2024, yakni sebagai berikut :

1. **NGAWI PEDULI** (330 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) – Rp 1.253.400.000)

Program Ngawi Peduli hadir untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat miskin dhuafa melalui santunan yang dapat meringankan beban ekonomi mereka. Selain itu, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan agar warga miskin dapat hidup di tempat yang lebih layak dan sehat. Di samping itu, bantuan tanggap bencana serta dukungan kemanusiaan lainnya menjadi wujud kepedulian sosial agar masyarakat yang terdampak bencana bisa segera pulih.

2. **NGAWI CERDAS** (131 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) – Rp 581.350.400)

Program Ngawi Cerdas bertujuan mencetak generasi muda yang unggul melalui berbagai skema beasiswa, seperti Beasiswa SKSS, Tahfidz, maupun Beasiswa Santri. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Selain itu, dukungan tenaga Latker juga diperkuat agar kualitas pembelajaran dan pengembangan SDM di lingkungan masyarakat semakin meningkat.

3. **NGAWI TAKWA** (76 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) – Rp 380.443.200)

Ngawi Takwa merupakan program yang berfokus pada penguatan aspek spiritual dan keagamaan di masyarakat. Bantuan diberikan kepada marbot masjid, guru ngaji, serta penyelenggara kegiatan keagamaan, sehingga mereka dapat lebih tenang dalam menjalankan peran sosial dan keagamaan. Selain itu, BAZNAS juga mendukung distribusi paket kurban untuk memastikan nilai solidaritas umat dan kebersamaan dapat dirasakan hingga ke lapisan masyarakat bawah.



4. **NGAWI MAKMUR** (48 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) – Rp 160.200.000)

Program Ngawi Makmur diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan santripreneur. Mustahik juga mendapat bantuan modal usaha serta alat kerja agar bisa memulai atau mengembangkan kegiatan produktifnya. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya diberi bantuan konsumtif, tetapi juga difasilitasi agar mampu bangkit secara ekonomi.

5. **NGAWI SEHAT** (38 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) – Rp 102.975.700)

Ngawi Sehat menitikberatkan pada akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan diberikan dalam bentuk layanan ambulance, biaya berobat mustahik, serta penyediaan layanan kesehatan langsung di masyarakat. Selain itu, program khitan massal juga dilaksanakan untuk mendukung kesehatan anak-anak sekaligus meringankan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan medis.

B. Belanja Daerah

Kinerja belanja daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan pola peningkatan yang konsisten, baik dari sisi total belanja maupun komposisinya. Total belanja daerah mengalami kenaikan dari Rp2,15 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,55 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengakselerasi pembangunan melalui penguatan alokasi anggaran untuk belanja operasional, belanja modal, dan belanja transfer. Puncak tertinggi belanja terjadi pada tahun 2024, yang sekaligus mencerminkan dorongan ekspansif fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi serta penyelesaian berbagai program prioritas.



Tabel 2.43 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Belanja Pegawai	942.393.458.865,19	981.738.467.818,58	934.800.656.798,16	921.281.488.850,50	1.024.404.862.919,36	2,29%
Belanja Barang dan Jasa	422.768.797.002,50	474.415.049.957,45	541.379.850.269,16	570.058.604.540,91	605.519.711.912,67	9.46%
Belanja Hibah	80.121.611.538,76	53.486.844.569,20	82.426.825.158,57	129.508.610.057,79	131.588.753.793,39	19,90%
Belanja Bantuan Sosial	2.458.468.000,00	5.679.315.000,00	8.460.644.000,00	9.367.100.000,00	10.913.640.000,00	51,80%
Belanja Peralatan dan Mesin	86.095.523.779,45	81.613.181.733,80	85.055.553.829,92	69.709.570.708,00	41.127.487.179,60	-15,01%
Belanja Gedung dan Bangunan	96.215.809.537,72	78.414.133.713,99	23.733.716.491,97	80.344.731.323,55	44.333.176.668,86	26,37%
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.557.441.823,00	8.561.504.532,00	8.078.794.119,00	12.543.761.608,00	8.137.390.759,00	6,95%

Sumber : LRA APBD Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Selama periode 2022 hingga 2024, belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif moderat namun stabil. Belanja pegawai mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,29% per tahun, mencerminkan konsistensi dalam pemenuhan kewajiban terhadap gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan bagi ASN. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap menjaga komitmen terhadap kesejahteraan aparatur.

Belanja barang dan jasa juga mengalami pertumbuhan yang sejalan, yakni sebesar 9,46% per tahun, yang mengindikasikan peningkatan aktivitas operasional seperti perjalanan dinas, penyediaan perlengkapan kantor, hingga konsumsi kegiatan. Sementara itu, belanja hibah menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 19,90% per tahun, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh peningkatan dukungan kepada lembaga eksternal atau kelompok masyarakat melalui skema hibah aparat

Belanja bantuan sosial juga tumbuh sebesar 51,80% per tahun, yang bisa jadi mengakomodasi pemberian bantuan kepada ASN pensiun, kelompok rentan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Di sisi lain, belanja peralatan dan mesin justru mengalami penurunan, hingga -15,01% per tahun, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mungkin telah melakukan pengadaan besar pada tahun sebelumnya atau sedang menerapkan kebijakan efisiensi dengan memaksimalkan aset yang sudah ada.

Secara keseluruhan, arah belanja kebutuhan aparatur daerah menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas belanja wajib, meskipun terdapat tekanan efisiensi pada belanja modal yang bersifat pendukung seperti peralatan kerja.

Tabel 2.44 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
1	Tahun 2020	2.146.482.441.055,79	2.152.732.441.055,79	99,71%
2	Tahun 2021	2.205.164.128.244,39	2.211.164.128.244,39	99,73%



No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
3	Tahun 2022	2.294.020.887.866,25	2.301.520.887.866,25	99,67%
4	Tahun 2023	2.441.875.395.917,78	2.450.875.395.917,78	99,63%
5	Tahun 2024	2.557.696.825.920,45	2.557.696.825.920,45	100,00%

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, 2025

Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah Kabupaten Ngawi selama periode 2020-2024 menunjukkan sebuah struktur anggaran yang sangat rigid dan didominasi oleh belanja operasional. Data menunjukkan bahwa porsi belanja untuk aparatur secara konsisten berada pada level yang sangat tinggi, berkisar antara 99,71% hingga 99,63% dari tahun 2020 hingga 2023. Angka ini mencapai puncaknya pada tahun 2024, di mana data menunjukkan proporsi sebesar 100,00%, yang mengindikasikan bahwa seluruh pengeluaran daerah pada tahun tersebut dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Kondisi ini mencerminkan bahwa mayoritas sumber daya keuangan daerah terserap untuk membiayai belanja rutin yang bersifat wajib dan mengikat.

Implikasi strategis dari tingginya proporsi ini adalah sangat terbatasnya ruang fiskal (*fiscal space*) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk mendanai program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan porsi belanja aparatur yang mendekati 100%, kapasitas anggaran untuk belanja modal seperti pembangunan infrastruktur baru, program pemberdayaan ekonomi, atau investasi strategis lainnya menjadi sangat minim. Kondisi ini menjadi tantangan fundamental dalam perencanaan periode berikutnya, di mana upaya efisiensi belanja operasi dan optimalisasi pendapatan menjadi agenda prioritas untuk secara bertahap menciptakan ruang fiskal yang lebih leluasa bagi belanja pembangunan yang produktif.



Tabel 2.45 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Realisasi pendapatan Daerah	2.129.605.045.925,80	2.226.087.473.199,80	2.212.970.866.504,26	2.404.142.925.300,75	2.513.620.937.395,22
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	2.146.482.441.055,79	2.205.164.128.244,39	2.294.020.887.866,25	2.441.875.395.917,78	2.557.696.825.920,45
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.250.000.000,00	6.000.000.000,00	7.500.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
A	Defisit riil	-23.127.395.129,99	14.923.344.955,41	-88.550.021.361,99	-46.732.470.617,03	-44.075.888.525,23
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	216.069.900.569,41	192.942.505.439,42	207.865.850.394,83	119.315.829.032,84	72.583.358.415,81
5	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	216.069.900.569,41	192.942.505.439,42	207.865.850.394,83	119.315.829.032,84	72.583.358.415,81
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	192.942.505.439,42	207.865.850.394,83	119.315.829.032,84	72.583.358.415,81	28.507.469.890,58

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, 2025



Analisis penutup anggaran periode 2020-2024 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi secara konsisten menerapkan strategi pengelolaan fiskal yang prudent dan mandiri. Dalam menghadapi defisit riil selisih antara realisasi belanja yang lebih tinggi dari pendapatan pemerintah daerah secara penuh mengandalkan sumber pembiayaan internal. Data menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan untuk menutup defisit anggaran setiap tahunnya dipenuhi melalui Penerimaan Pembiayaan yang sumbernya 100% berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pola ini mengindikasikan sebuah komitmen yang kuat untuk tidak bergantung pada sumber pembiayaan dari utang atau pinjaman daerah, yang merupakan cerminan dari kesehatan dan kemandirian fiskal daerah.

Meskipun demikian, data tersebut juga menyoroti adanya tren yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan ke depan, yaitu menipisnya bantalan fiskal (*fiscal buffer*). Angka Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan—yang menjadi SiLPA untuk tahun berikutnya—menunjukkan tren penurunan yang signifikan, dari puncaknya sebesar Rp 207,8 miliar pada tahun 2021 menjadi hanya Rp 28,5 miliar pada akhir tahun 2024. Penurunan drastis ini menandakan bahwa laju pertumbuhan belanja cenderung lebih cepat daripada kemampuan pendapatan dan pembiayaan yang ada. Kondisi ini menjadi sinyal penting untuk lebih mengintensifkan upaya optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja agar keberlanjutan fiskal daerah dapat tetap terjaga.

Tabel 2.46 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)
	Defisit Riil	- 23.127.395.12 9,99	14.923.344.9 55,41	- 88.550.021.3 61,99	- 46.732.470.6 17,03	- 44.075.888.52 5,23
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	216.069.900.5 69,41	192.942.505. 439,42	207.865.850. 394,83	119.315.829. 032,84	72.583.358.41 5,81
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	192.942.505.439,42	207.865.850.394,83	119.315.829.032,84	72.583.358.415,81	28.507.469.890,58

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, 2025

Analisis komposisi penutup defisit riil anggaran periode 2020-2024 secara tegas memperlihatkan struktur pembiayaan daerah Kabupaten Ngawi yang sangat konservatif dan mandiri. Data secara konsisten menunjukkan bahwa 100% dari total penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran setiap tahunnya bersumber dari satu instrumen tunggal, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Ketidadaan realisasi pada pos-pos penerimaan pembiayaan lain seperti pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah, maupun penerimaan pinjaman, menegaskan bahwa pemerintah daerah selama periode ini tidak mengandalkan utang atau sumber eksternal lainnya untuk mendanai belanja.

Meskipun menunjukkan prinsip kehati-hatian, komposisi yang sangat bergantung pada SiLPA ini juga menyoroti adanya tantangan keberlanjutan fiskal di masa depan. Ketergantungan total pada SiLPA menjadi rentan ketika data Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (yang akan menjadi SiLPA tahun berikutnya) menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini mengimplikasikan bahwa kemampuan daerah untuk menutup defisit di masa mendatang akan semakin terbatas jika tidak ada perbaikan fundamental pada sisi pendapatan dan efisiensi belanja. Oleh karena itu, strategi ke depan harus diarahkan untuk mengurangi defisit struktural agar tidak terus-menerus menggerus cadangan kas daerah.

**Tabel 2.47 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024**

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
	Jumlah SiLPA	192.942.505.43 9,42	207.865.850.3 94,83	119.315.829.03 2,84	72.583.358.415, 81	28.507.469.890 ,58
1	Pelampauan penerimaan PAD	37.962.549.321, 54	- 3.981.141.924 ,20	6.700.094.265,2 6	12.340.671.815, 75	- 1.795.930.575,7 8
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	- 4.132.204.345,0 0	40.487.450.50 2,00	- 65.405.300.986, 00	- 31.848.689.385, 00	- 58.786.096.343, 00
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	15.379.872.112, 00	11.859.781.97 5,00	8.269.569.541,0 0	- 12.202.078.000, 00	- 9.600.000.000,0 0
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	143.499.543.35 0,88	159.514.759.8 41,61	169.751.466.21 2,75	104.293.453.98 5,22	98.689.496.809, 55
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-
6	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, 2022-2024

Analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Ngawi periode 2020-2024 menunjukkan sebuah temuan krusial mengenai sumber utama terbentuknya surplus anggaran. Data secara konsisten memperlihatkan bahwa komponen “Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya” menjadi kontributor terbesar dan paling dominan dalam pembentukan SiLPA setiap tahunnya, dengan nilai mencapai Rp 169,7 miliar pada tahun 2022 dan Rp 98,6 miliar pada tahun 2024. Sebaliknya, komponen dari sisi pendapatan seperti PAD dan dana perimbangan justru seringkali mengalami realisasi di bawah target (*pelampauan negatif*), terutama pada periode 2021-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA yang selama ini menjadi sumber utama pembiayaan defisit, pada dasarnya tidak terbentuk dari kinerja pendapatan yang melampaui target, melainkan lebih disebabkan oleh adanya belanja yang tidak terserap secara optimal.

Kondisi ini memiliki implikasi strategis ganda yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan. Di satu sisi, adanya SiLPA yang besar dari sisa belanja memberikan bantalan

fiskal atau cadangan kas yang dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Namun di sisi lain, sisa belanja yang besar secara terus-menerus juga dapat menjadi sinyal adanya tantangan dalam fase eksekusi anggaran, seperti keterlambatan proses pengadaan barang/jasa, kendala implementasi program di lapangan, atau perencanaan yang kurang matang. Oleh karena itu, prioritas ke depan bukan hanya mengelola SiLPA, tetapi juga meningkatkan kapasitas penyerapan anggaran agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat terealisasi menjadi program dan kegiatan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

C. Pembiayaan Daerah

Selama periode 2020 hingga 2024, pembiayaan daerah menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika kebutuhan fiskal dan strategi pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2020, pembiayaan netto mencapai Rp209,82 miliar dan mengalami penurunan bertahap pada tahun-tahun berikutnya, menjadi Rp186,94 miliar di tahun 2021 dan kembali meningkat di 2022 menjadi Rp200,36 miliar. Namun, tahun 2023 mencatatkan angka yang cukup besar yakni Rp110,32 miliar, sebelum akhirnya turun drastis menjadi Rp72,58 miliar pada tahun 2024. Penurunan pembiayaan netto dalam dua tahun terakhir dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk memperkuat efisiensi fiskal dan mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan tambahan.

Tabel 2.48 Defisit Anggaran Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

N o	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.129.605.045.925,80	2.226.087.473.199,80	2.212.970.866.504,26	2.404.142.925.300,75	2.513.620.937.395,22
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	2.146.482.441.055,79	2.205.164.128.244,39	2.294.020.887.866,25	2.441.875.395.917,78	2.557.696.825.920,45
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.250.000.000,00	6.000.000.000,00	7.500.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
	Defisit Riil	-23.127.395.129,99	14.923.344.955,41	-88.550.021.361,99	-46.732.470.617,03	-44.075.888.525,23

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024



Analisis data defisit anggaran Kabupaten Ngawi periode 2020-2024 menunjukkan dinamika fiskal yang ditandai oleh pertumbuhan kapasitas anggaran namun dengan neraca yang fluktuatif. Secara konsisten, baik Realisasi Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, menggambarkan skala perekonomian dan pelayanan publik yang terus berkembang. Neraca anggaran mengalami volatilitas yang signifikan, di mana pada tahun 2021 sempat mencatatkan surplus riil sebesar Rp 14,9 miliar, namun kemudian mengalami defisit terbesar pada tahun 2022 yang mencapai Rp 88,5 miliar. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya kebijakan belanja yang ekspansif pada periode tertentu, kemungkinan besar untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan pembangunan pasca-pandemi.

Hal paling signifikan yang perlu dicermati adalah adanya tren perbaikan dan konsolidasi fiskal pada dua tahun terakhir. Setelah mencapai puncaknya di tahun 2022, defisit riil anggaran berhasil ditekan secara progresif menjadi Rp 46,7 miliar pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi Rp 44,0 miliar pada tahun 2024. Tren positif ini menunjukkan adanya peningkatan disiplin dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran, di mana laju pertumbuhan belanja mulai diselaraskan dengan kapasitas pendapatan. Kemampuan untuk mengendalikan defisit ini menjadi modal yang sangat penting bagi perencanaan periode 2025-2029, yang menandakan komitmen untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal daerah dalam mendanai program-program pembangunan prioritas.

Pelajaran utama dari data keuangan periode sebelumnya adalah bahwa stabilitas fiskal Kabupaten Ngawi selama ini terjaga melalui sebuah mekanisme yang unik namun sekaligus rapuh. Di satu sisi, pemerintah daerah menunjukkan kehati-hatian dengan berhasil menutup defisit anggaran tanpa menambah utang, yaitu dengan mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Namun di sisi lain, data secara gamblang menunjukkan bahwa SiLPA tersebut sebagian besar tidak terbentuk



dari kinerja pendapatan yang melampaui target, melainkan dari rendahnya penyerapan anggaran belanja. Hal ini menciptakan sebuah siklus di mana sisa dana dari program pembangunan yang tidak terlaksana di satu tahun, digunakan untuk menopang anggaran operasional di tahun berikutnya, menandakan adanya tantangan dalam fase perencanaan dan eksekusi program.

Tantangan terbesar ke depan untuk periode RPJMD 2025-2029 adalah menghadapi menyempitnya ruang fiskal secara drastis. Ada dua ancaman utama: pertama, struktur anggaran yang sangat rigid di mana hampir 100% pengeluaran terserap untuk kebutuhan aparatur, sehingga tidak menyisakan ruang untuk program pembangunan yang inovatif. Kedua, yang lebih mendesak, adalah tren menipisnya bantalan SiLPA yang terus menurun setiap tahun. Ketergantungan pada SiLPA untuk menutup defisit menjadi strategi yang tidak berkelanjutan, dan jika tren ini terus berlanjut, Kabupaten Ngawi berisiko menghadapi kesulitan dalam membiayai bahkan kebutuhan belanja wajibnya di masa depan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan solusi konkret melalui strategi ganda yang fundamental. Pertama adalah meningkatkan kapasitas fiskal, yang harus ditempuh melalui: (a) program intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara agresif, terutama melalui digitalisasi dan penggalan potensi baru; serta (b) melakukan efisiensi dan rasionalisasi belanja operasi untuk mengurangi dominasinya. Solusi kedua adalah memperbaiki kualitas penyerapan anggaran, dengan memastikan perencanaan lebih matang dan menghilangkan hambatan dalam proses pengadaan serta pelaksanaan kegiatan, sehingga anggaran pembangunan benar-benar tersalurkan secara produktif dan tidak hanya menjadi sisa anggaran di akhir tahun.

2.5.3 Neraca Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Peraturan



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Keuangan Daerah menjelaskan bahwa neraca adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi keuangan atas aset, utang dan ekuitas. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.



Tabel 2.49 Neraca Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	
1	ASET						
	A. Aset Lancar	228.531.483.167,76	307.876.808.353,85	191.964.824.542,83	120.681.892.604,07	67.285.768.058,51	-26,37%
	B. Investasi Jangka Panjang	121.622.409.202,11	125.150.218.614,78	133.888.132.073,05	144.889.806.860,38	151.471.588.763,38	5,19%
	C. Aset Tetap	3.746.518.140.825,28	3.779.600.063.157,72	3.763.791.068.488,30	3.802.157.028.249,02	3.946.569.992.936,32	1,30%
	D. Aset Lainnya	3.423.385.928,97	2.092.384.566,46	98.692.269.991,50	121.209.635.732,19	87.751.030.027,31	125,00%
	JUMLAH ASET	4.100.095.419.124,12	4.214.719.474.692,82	4.188.336.295.095,68	4.188.938.363.445,65	4.256.903.032.245,52	0,92%
2	KEWAJIBAN						
	A. Kewajiban Jangka Pendek	7.748.970.547,96	9.882.786.762,14	10.642.577.823,64	10.673.243.549,41	58.027.229.338,31	58,85%
	B. Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	7.748.970.547,96	9.882.786.762,14	10.642.577.823,64	10.673.243.549,41	58.027.229.338,31	58,85%
3	EKUITAS						
	Ekuitas	4.092.346.448.576,16	4.204.836.687.930,69	4.177.693.717.272,04	4.178.265.119.896,25	4.198.875.802.907,21	0,67%
	JUMLAH EKUITAS	4.092.346.448.576,16	4.204.836.687.930,69	4.177.693.717.272,04	4.178.265.119.896,25	4.198.875.802.907,21	0,67%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.100.095.419.124,12	4.214.719.474.692,82	4.188.336.295.095,68	4.188.938.363.445,65	4.256.903.032.245,52	0,92%

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, 2020-2024



Berdasarkan data neraca keuangan Kabupaten Ngawi tahun 2020–2024, terlihat bahwa jumlah aset mengalami pertumbuhan yang relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,92%. Aset tetap menjadi komponen terbesar dan konsisten meningkat dari Rp3,74 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,94 triliun pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 1,30%. Investasi jangka panjang juga tumbuh positif sebesar 5,19%, menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat penanaman modal jangka panjang. Namun, aset lancar justru mengalami penurunan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan negatif -26,37%, yang mengindikasikan adanya penurunan likuiditas daerah.

Di sisi kewajiban, kewajiban jangka pendek meningkat cukup tajam dari Rp7,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp58,0 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 58,85%. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan beban kewajiban yang harus segera dipenuhi dalam jangka pendek. Sementara itu, kewajiban jangka panjang tercatat tidak ada, yang berarti struktur kewajiban daerah lebih banyak ditopang oleh kewajiban jangka pendek. Kondisi ini menuntut perhatian khusus agar pengelolaan kewajiban tidak membebani kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.

Pada sisi ekuitas, jumlah ekuitas relatif stabil dan menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,67%. Ekuitas meningkat dari Rp4,09 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,19 triliun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tekanan dari sisi aset lancar dan peningkatan kewajiban, kemampuan daerah dalam menjaga ekuitas tetap terjaga. Secara keseluruhan, kondisi neraca keuangan Kabupaten Ngawi mencerminkan adanya stabilitas, namun dengan catatan penting terkait menurunnya aset lancar dan melonjaknya kewajiban jangka pendek yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan.



2.5.4 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Proyeksi keuangan daerah periode 2026-2030 disusun sebagai kerangka fiskal yang mengintegrasikan tiga komponen utama yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk menjamin pendanaan program prioritas RPJMD secara realistis dan berkelanjutan. Dari sisi pendapatan, kebijakan difokuskan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pilar kemandirian fiskal, sambil memproyeksikan pendapatan transfer secara rasional berdasarkan kebijakan nasional. Di sisi belanja, alokasi anggaran akan diarahkan secara efisien dan efektif untuk mendanai program-program unggulan yang mendukung pencapaian visi dan misi daerah, dengan tetap menjaga disiplin anggaran.

Untuk menyeimbangkan dinamika antara kapasitas pendapatan dan kebutuhan belanja prioritas, kebijakan pembiayaan daerah akan dikelola secara cermat dan terukur. Proyeksi pembiayaan dirancang untuk menutup potensi defisit anggaran yang direncanakan, dengan sumber penerimaan pembiayaan utama diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Kebijakan defisit akan diarahkan secara produktif, terutama untuk mendanai belanja





modal yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Melalui sinergi ketiga komponen ini, diharapkan postur APBD Kabupaten Ngawi dapat terjaga secara sehat dan mampu mendukung seluruh agenda pembangunan yang telah ditetapkan.



Tabel 2.50 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN DAERAH	2.397.250.767.762,00	2.787.397.283.010,00	3.022.868.764.733,00	3.304.505.029.329,00	3.650.852.789.975,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	403.175.550.632,00	479.325.468.680,00	610.098.304.513,00	779.839.809.912,00	1.000.514.713.035,00
1.1.1.	Pajak Daerah	167.701.849.617,00	198.093.562.021,00	251.826.360.026,00	321.343.065.508,00	411.613.239.149,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	94.279.972.299,00	264.664.563.427,00	341.703.101.255,00	441.926.401.172,00	572.329.630.654,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.247.936.927,00	14.260.604.232,00	14.260.604.232,00	14.260.604.232,00	14.260.604.232,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	126.945.791.789,00	2.306.739.000,00	2.308.239.000,00	2.309.739.000,00	2.311.239.000,00
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.994.075.217.130,00	2.308.071.814.330,00	2.412.770.460.220,00	2.524.665.219.417,00	2.650.338.076.940,00
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.875.124.427.051,00	2.189.937.803.430,00	2.294.636.449.320,00	2.406.531.208.517,00	2.532.204.066.040,00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	118.950.790.079,00	118.134.010.900,00	118.134.010.900,00	118.134.010.900,00	118.134.010.900,00

Berdasarkan tabel proyeksi, total pendapatan daerah Kabupaten Ngawi diperkirakan terus meningkat dari Rp2,397 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp3,651 triliun pada tahun 2030. Pertumbuhan ini menunjukkan rata-rata kenaikan sekitar 10–12% per tahun, yang mencerminkan optimisme terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah baik dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah. Dengan tren tersebut, maka struktur fiskal daerah berpotensi semakin kuat untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ngawi diproyeksikan tumbuh signifikan dari Rp403,1 miliar pada 2026 menjadi Rp1,000,5 triliun pada 2030. Kenaikan hampir dua kali lipat ini mengindikasikan adanya strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan, khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi.

- a. Pajak Daerah meningkat dari Rp167,7 miliar (2026) menjadi Rp411,6 miliar (2030). Hal ini menandakan kontribusi besar dari penguatan basis pajak, baik Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan, maupun pajak perizinan usaha.
- b. Retribusi Daerah bahkan tumbuh lebih cepat, dari Rp94,2 miliar menjadi Rp572,3 miliar. Pertumbuhan ini diperkirakan terkait dengan penguatan pengelolaan layanan publik yang menghasilkan retribusi, seperti perizinan, pasar daerah, parkir, dan pelayanan jasa lain.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan relatif stagnan pada kisaran Rp14,2 miliar, menunjukkan kontribusi yang masih terbatas dari BUMD.
- d. Lain-lain PAD yang sah relatif kecil, sekitar Rp2,3 miliar per tahun, sehingga tidak menjadi motor utama peningkatan PAD.

Pendapatan transfer tetap menjadi tulang punggung penerimaan daerah. Pada 2026, transfer mencapai Rp1,994 triliun (83,2% dari total pendapatan), dan meningkat hingga Rp2,650 triliun pada 2030.

- a. Transfer Pemerintah Pusat naik dari Rp1,875 triliun (2026) menjadi Rp2,532 triliun (2030). Pertumbuhan ini mencerminkan



asumsi stabilnya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan untuk Kabupaten Ngawi.

- b. Transfer Antar Daerah relatif stagnan di sekitar Rp118 miliar per tahun. Artinya, potensi kerjasama antardaerah belum banyak memberikan kontribusi signifikan bagi fiskal Ngawi.

Dengan proporsi pendapatan transfer yang masih di atas 70% dari total pendapatan, terlihat bahwa ketergantungan pada dana pusat tetap tinggi, meskipun tren peningkatan PAD memberi sinyal kemandirian fiskal secara perlahan.

Dari perkembangan tersebut, terdapat beberapa implikasi strategis :

- a. Penguatan PAD : Pertumbuhan PAD yang tajam perlu diikuti dengan kebijakan optimalisasi pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat. Digitalisasi perpajakan, perbaikan sistem pendataan objek pajak, serta intensifikasi retribusi berbasis layanan dapat menjadi prioritas.
- b. Peran BUMD : Pos hasil pengelolaan kekayaan daerah masih stagnan. Ini menunjukkan perlunya revitalisasi BUMD agar bisa memberikan kontribusi lebih besar, misalnya melalui sektor industri, pariwisata, atau perdagangan hasil pertanian.
- c. Ketergantungan pada Transfer : Meski transfer pusat meningkat, hal ini menandakan kerentanan fiskal bila kebijakan nasional berubah. Diversifikasi sumber PAD menjadi keharusan untuk menjaga stabilitas APBD.
- d. Perencanaan Pembangunan : Dengan meningkatnya total pendapatan hingga Rp3,6 triliun pada 2030, Pemerintah Kabupaten Ngawi memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk pembiayaan program prioritas, terutama pada pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pengurangan stunting, serta peningkatan kualitas SDM.





- e. Keadilan Fiskal : Pertumbuhan penerimaan perlu disertai dengan peningkatan belanja publik yang proporsional dan tepat sasaran, agar manfaat fiskal dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Ngawi tahun 2026–2030 menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan di atas 10% per tahun. Kemandirian fiskal mulai terlihat dari meningkatnya PAD, meskipun dominasi pendapatan transfer tetap tinggi. Tantangan utama adalah bagaimana memastikan peningkatan pendapatan ini benar-benar dapat dialokasikan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat pelayanan dasar, dan mengurangi ketimpangan. Optimalisasi pajak daerah, pengembangan BUMD, serta penguatan kerjasama antardaerah dapat menjadi strategi untuk memperkuat struktur pendapatan jangka panjang.



Tabel 2.51 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
2	BELANJA DAERAH	2.407.250.767.762,00	2.787.397.283.010,00	2.997.368.764.733,00	3.248.805.029.329,00	3.634.552.789.975,00
2.1.	BELANJA OPERASI	1.737.843.536.492,00	1.766.029.003.299,00	1.881.641.232.335,00	2.008.018.072.205,00	2.211.314.618.786,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.145.870.353.602,00	780.573.020.194,00	838.279.855.915,00	909.440.409.634,00	997.876.739.440,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	543.585.711.890,00	929.427.293.863,00	982.599.541.116,00	1.033.302.486.929,00	1.140.408.896.402,00
2.1.3.	Belanja Hibah	23.428.831.000,00	27.128.648.476,00	29.420.400.388,00	31.605.724.106,00	35.360.056.315,00
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	24.958.640.000,00	28.900.040.766,00	31.341.434.916,00	33.669.451.536,00	37.668.926.629,00
2.2.	BELANJA MODAL	203.731.274.370,00	527.154.038.134,00	579.961.988.462,00	655.585.498.130,00	772.414.882.195,00
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	36.687.920.000,00	42.481.576.866,00	46.070.300.982,00	49.492.365.946,00	55.371.389.093,00
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.011.904.649,00	33.593.385.980,00	36.431.260.732,00	39.137.345.526,00	43.786.332.412,00
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.377.568.029,00	138.003.957.337,00	174.833.040.906,00	235.219.737.061,00	275.872.651.576,00
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	92.056.989.891,00	306.594.380.170,00	315.599.173.564,00	324.185.787.355,00	388.937.377.916,00
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.080.891.801,00	4.725.335.171,00	5.124.518.194,00	5.505.163.290,00	6.159.102.172,00
2.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	1.516.000.000,00	1.755.402.610,00	1.903.694.084,00	2.045.098.952,00	2.288.029.026,00
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	63.000.000.000,00	28.000.000.000,00	31.000.000.000,00	42.000.000.000,00	43.000.000.000,00
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	63.000.000.000,00	28.000.000.000,00	31.000.000.000,00	42.000.000.000,00	43.000.000.000,00
2.4.	BELANJA TRANSFER	402.675.956.900,00	466.214.241.577,00	504.765.543.936,00	543.201.458.994,00	607.823.288.994,00
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	16.820.018.900,00	19.474.051.580,00	21.084.362.857,00	22.689.854.336,00	25.389.147.361,00
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	385.855.938.000,00	446.740.189.997,00	483.681.181.079,00	520.511.604.658,00	582.434.141.633,00



Proyeksi belanja daerah Kabupaten Ngawi periode 2026–2030 menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, sejalan dengan pertumbuhan pendapatan daerah. Total belanja meningkat dari Rp2,407 triliun pada 2026 menjadi Rp3,635 triliun pada 2030. Rata-rata pertumbuhan belanja sekitar 10%–12% per tahun, yang mengindikasikan upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal antara pendapatan dan pengeluaran untuk mendukung prioritas pembangunan.

Belanja daerah terdiri atas tiga komponen utama : belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi mendominasi struktur belanja dengan kisaran Rp1,374 triliun pada 2026 dan meningkat menjadi Rp2,211 triliun pada 2030. Komponen terbesar adalah :

- a. Belanja Pegawai, yang meski cukup besar pada 2026 (Rp1,145 triliun), justru menurun drastis pada 2027 menjadi Rp780 miliar, lalu kembali naik hingga Rp997 miliar di 2030. Fluktuasi ini bisa jadi mencerminkan penyesuaian kebijakan gaji, efisiensi aparatur, atau rasionalisasi pegawai.
- b. Belanja Barang dan Jasa meningkat konsisten dari Rp543 miliar (2026) menjadi Rp1,140 triliun (2030). Kenaikan signifikan ini menunjukkan fokus daerah pada penguatan pelayanan publik, operasional pemerintahan, serta penyediaan barang/jasa yang mendukung pembangunan.
- c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial juga mengalami peningkatan dari Rp23,8 miliar (2026) menjadi Rp35,3 miliar (2030) untuk hibah, serta dari Rp24,9 miliar menjadi Rp37,6 miliar untuk bantuan sosial. Hal ini mengindikasikan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat jaring pengaman sosial.



2. Belanja Modal

Belanja modal menunjukkan tren kenaikan yang lebih tajam, dari Rp703 miliar pada 2026 menjadi Rp1,376 triliun pada 2030. Hal ini positif karena mengindikasikan orientasi pembangunan daerah ke arah peningkatan infrastruktur dan aset produktif. Beberapa pos penting adalah :

- a. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi naik pesat dari Rp92 miliar (2026) menjadi Rp388 miliar (2030). Ini menegaskan prioritas pembangunan infrastruktur dasar sebagai penopang pertumbuhan ekonomi lokal.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan meningkat signifikan dari Rp40 miliar (2026) menjadi Rp275 miliar (2030). Kenaikan ini menunjukkan penguatan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.
- c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya juga tumbuh dari Rp4 miliar (2026) menjadi Rp6,1 miliar (2030), menandakan adanya investasi tambahan untuk pengadaan sarana/prasarana pendukung.

Dengan porsi belanja modal yang terus meningkat, terlihat adanya keseimbangan antara belanja rutin dengan belanja pembangunan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga relatif fluktuatif, dari Rp63 miliar (2026) turun ke Rp28 miliar (2027), lalu meningkat hingga Rp43 miliar (2030). Pos ini penting untuk menjaga kesiapan fiskal menghadapi kondisi darurat atau bencana, meski porsinya sangat kecil dibanding total belanja.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer juga cukup signifikan, dari Rp402 miliar (2026) meningkat hingga Rp607 miliar (2030). Komponen utamanya adalah bantuan keuangan kepada desa yang tumbuh dari Rp385 miliar menjadi Rp582 miliar. Hal ini menegaskan pentingnya peran desa dalam pembangunan daerah dan pemerataan fiskal.



Beberapa implikasi fiskal adalah sebagai berikut :

- 1) Efisiensi Belanja Pegawai – meski masih dominan, tren menurunnya porsi belanja pegawai menunjukkan arah kebijakan menuju efisiensi aparatur dan pergeseran ke belanja produktif.
- 2) Peningkatan Belanja Modal – tren kenaikan belanja modal, khususnya di bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan bangunan publik, akan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memperbaiki kualitas layanan publik.
- 3) Penguatan Perlindungan Sosial – peningkatan belanja bantuan sosial dan hibah mengindikasikan perhatian pemerintah daerah terhadap kelompok rentan, sejalan dengan agenda pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.
- 4) Desentralisasi Fiskal ke Desa – porsi belanja transfer yang besar mencerminkan strategi memperkuat desa sebagai basis pembangunan, sekaligus mendorong pemerataan antarwilayah.
- 5) Kesiapsiagaan Fiskal – keberadaan belanja tidak terduga, meski kecil, tetap penting untuk memastikan daerah memiliki fleksibilitas menghadapi risiko bencana atau keadaan darurat.

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Ngawi 2026–2030 menunjukkan arah kebijakan fiskal yang lebih berimbang dan produktif. Dominasi belanja operasi tetap terjaga untuk keberlangsungan layanan publik, tetapi belanja modal meningkat pesat, menandakan fokus pada pembangunan infrastruktur. Peningkatan belanja bantuan sosial dan transfer ke desa memperkuat agenda pemerataan dan keadilan sosial. Dengan pola seperti ini, diharapkan belanja daerah dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah.



Tabel 2.52 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	-	(25.500.000.000,00)	(55.700.000.000,00)	(16.300.000.000,00)
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	10.000.000.000,00	35.500.000.000,00	65.700.000.000,00	26.300.000.000,00
3.2.1.	Penyertaan Modal Daerah	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
3.2.2.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	25.500.000.000,00	55.700.000.000,00	16.300.000.000,00

Pembiayaan daerah merupakan instrumen penting untuk menutup defisit APBD atau memanfaatkan surplus anggaran tahun sebelumnya. Berdasarkan proyeksi, posisi pembiayaan Kabupaten Ngawi pada periode 2026–2030 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada awal periode (2026), pembiayaan daerah masih positif sebesar Rp10 miliar, tetapi mulai 2028 hingga 2030 terlihat muncul angka negatif, menandakan adanya potensi defisit pembiayaan yang harus diantisipasi. Komponen utama penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang konsisten berada di angka Rp10 miliar setiap tahun. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan anggaran yang relatif hati-hati, di mana selalu terdapat sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan kembali pada tahun berikutnya. Namun, nominal yang stagnan membuat SiLPA hanya berperan sebagai buffer kecil, tidak cukup untuk menutup kebutuhan pembiayaan yang meningkat pada tahun-tahun tertentu.

Pengeluaran pembiayaan meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Dua komponen utama adalah :

- a. Penyertaan Modal Daerah – dimulai dari Rp10 miliar pada 2027 dan terus dipertahankan hingga 2030. Hal ini mencerminkan adanya kebijakan daerah untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pendapatan daerah.
- b. Pembentukan Dana Cadangan – muncul pertama kali pada 2028 dengan Rp25,5 miliar, kemudian melonjak menjadi Rp55,7 miliar pada 2029, dan tetap ada di Rp16,3 miliar pada 2030. Pos ini menunjukkan strategi jangka panjang daerah dalam mengantisipasi kebutuhan pendanaan besar di masa depan, misalnya untuk pembangunan infrastruktur strategis atau pembiayaan pemilu kepala daerah.

Beberapa implikasi fiskal diantaranya sebagai berikut :

- 1) Risiko Defisit – Defisit pembiayaan pada 2028–2030 perlu diantisipasi dengan strategi penyesuaian anggaran, agar tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah.



- 2) Penguatan BUMD – Alokasi penyertaan modal daerah yang konsisten perlu dikawal agar menghasilkan return signifikan dan tidak menjadi beban jangka panjang.
- 3) Manajemen Dana Cadangan – Pembentukan dana cadangan adalah kebijakan strategis, namun perlu dipastikan tujuannya jelas, misalnya untuk mendukung program prioritas atau menghadapi agenda pembangunan yang memerlukan biaya besar.
- 4) Keterbatasan SiLPA – Stagnannya penerimaan pembiayaan dari SiLPA menunjukkan bahwa ruang fiskal dari sisa anggaran relatif kecil. Pemerintah daerah perlu memastikan pengelolaan belanja lebih efisien agar menghasilkan sisa anggaran yang lebih besar di masa depan

Proyeksi keuangan Kabupaten Ngawi ke depan menunjukkan komitmen kuat terhadap inovasi pendanaan guna mengakselerasi pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari inisiatif strategis seperti skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Salah satu proyek KPBU yang signifikan adalah pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Dinas Perhubungan yang mencakup 5000 titik, dan saat ini sedang dalam tahap persiapan menunggu rekomendasi Gubernur. Inovasi pendanaan melalui KPBU ini memungkinkan Kabupaten Ngawi untuk mengimplementasikan proyek infrastruktur berskala besar tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD, sehingga kapasitas fiskal daerah dapat dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas lainnya seperti Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain KPBU, Kabupaten Ngawi juga memanfaatkan sumber pendanaan eksternal lainnya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa pinjaman. Mekanisme pinjaman PEN ini memberikan fleksibilitas tambahan bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program strategis yang bertujuan memulihkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Dengan adanya akses terhadap pendanaan PEN, Kabupaten Ngawi dapat mempercepat realisasi berbagai inisiatif pembangunan yang berdampak langsung pada





masyarakat, seperti dukungan bagi sektor pertanian, pengembangan UMKM, dan penguatan layanan publik, yang semuanya sejalan dengan misi-misi pembangunan daerah.

Melalui kombinasi KPBU dan pinjaman PEN, Kabupaten Ngawi menunjukkan pendekatan yang progresif dan multidimensional dalam pengelolaan keuangannya. Diversifikasi sumber pendanaan ini bukan hanya meringankan beban APBD, tetapi juga membuka peluang lebih besar untuk investasi infrastruktur dan program-program yang mendukung keberlanjutan pembangunan. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa visi dan misi pembangunan Kabupaten Ngawi, termasuk fokus pada pertanian ramah lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Tabel 2.53 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	2.397.250.767.762,00	2.787.397.283.010,00	3.022.868.764.733,00	3.304.505.029.329,00	3.650.852.789.975,00
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Total Penerimaan	2.407.250.767.762,00	2.797.397.283.010,00	3.032.868.764.733,00	3.314.505.029.329,00	3.660.852.789.975,00
	Dikurangi :					
1	Pengeluaran Pembiayaan		10.000.000.000,00	35.500.000.000,00	65.700.000.000,00	26.300.000.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.407.250.767.762,00	2.787.397.283.010,00	2.997.368.764.733,00	3.248.805.029.329,00	3.634.552.789.975,00

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah mencerminkan jumlah sumber daya fiskal bersih yang benar-benar tersedia untuk membiayai pembangunan daerah setelah memperhitungkan pendapatan, sisa lebih anggaran, pencairan cadangan, serta dikurangi pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi Kabupaten Ngawi menunjukkan tren peningkatan kapasitas fiskal yang konsisten, dari Rp2,407 triliun pada 2026 menjadi Rp3,634 triliun pada 2030. Artinya, daerah memiliki ruang fiskal yang semakin luas untuk mendukung agenda pembangunan.

Komponen utama penerimaan adalah pendapatan daerah yang terus meningkat, dari Rp2,397 triliun pada 2026 menjadi Rp3,650 triliun pada 2030. Tambahan penerimaan juga datang dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp10 miliar setiap tahun. Meski relatif kecil dibanding total pendapatan, SiLPA menjadi buffer penting yang menjaga kesinambungan fiskal.

Menariknya, pos Pencairan Dana Cadangan tidak digunakan dalam periode 2026–2030. Hal ini berarti pemerintah daerah lebih mengandalkan peningkatan pendapatan murni dibanding menarik cadangan, yang menunjukkan kehati-hatian dalam mengelola dana darurat dan stabilitas jangka panjang.

Komponen ini menjadi faktor pengurang kapasitas fiskal :

- a. Pada 2026 tidak ada pengeluaran pembiayaan, sehingga kapasitas keuangan sama dengan total penerimaan (Rp2,407 triliun).
- b. Tahun 2027 mulai dialokasikan Rp10 miliar untuk pengeluaran pembiayaan.
- c. Tahun 2028 melonjak menjadi Rp35,5 miliar, dan 2029 bahkan Rp65,7 miliar.
- d. Tahun 2030 menurun kembali menjadi Rp26,3 miliar.

Meski angka tersebut relatif kecil dibanding total penerimaan, tren kenaikan pada 2028–2029 menunjukkan adanya tekanan dari kebijakan pembiayaan, misalnya penyertaan modal daerah atau pembentukan dana cadangan.



Oleh karena itu, kebijakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngawi akan memberikan dampak sebagai berikut :

- 1) Stabilitas Fiskal – Kapasitas riil yang terus meningkat menandakan kondisi fiskal daerah yang sehat dan berdaya untuk membiayai prioritas pembangunan.
- 2) Ruang Fiskal untuk Investasi Publik – Dengan kapasitas di atas Rp3,6 triliun pada 2030, pemerintah daerah memiliki peluang besar meningkatkan alokasi ke sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 3) Pengendalian Pembiayaan – Kenaikan pengeluaran pembiayaan pada 2028–2029 harus dikendalikan agar tidak menekan kapasitas riil. Perencanaan penggunaan dana cadangan dan penyertaan modal BUMD perlu dilakukan secara selektif dan produktif.
- 4) Optimalisasi Pendapatan – Kenaikan pendapatan daerah menjadi faktor utama penguat kapasitas riil. Strategi intensifikasi pajak daerah, optimalisasi retribusi, serta pengembangan sumber PAD baru sangat penting untuk menjaga tren ini.



Tabel 2.54 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2026	2027	2028	2029	2030
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.407.250.767.762,00	2.787.397.283.010,00	2.997.368.764.733,00	3.248.805.029.329,00	3.634.552.789.975,00
1	Prioritas I	372.108.120.444,00	719.511.662.233,00	762.259.922.094,00	778.146.800.976,00	846.824.635.027,00
2	Prioritas II	169.786.030.231,00	264.920.881.702,00	264.335.270.215,00	277.658.060.755,00	318.371.703.576,00
3	Prioritas III	1.865.356.617.087,00	1.802.964.739.075,00	1.970.773.572.424,00	2.193.000.167.598,00	2.469.356.451.372,00
	TOTAL	2.407.250.767.762,00	2.787.397.283.010,00	2.997.368.764.733,00	3.248.805.029.329,00	3.634.552.789.975,00

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngawi periode 2026–2030 menunjukkan tren meningkat, dari Rp2,407 triliun pada 2026 menjadi Rp3,634 triliun pada 2030. Dana tersebut dialokasikan untuk tiga kelompok prioritas pembangunan sesuai Permendagri 86/2017, yaitu :

- a. Prioritas I : Kewajiban yang harus dipenuhi daerah (mandatory spending dan pelayanan dasar).
- b. Prioritas II : Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan yang strategis.
- c. Prioritas III : Urusan pendukung pembangunan, penunjang, dan prioritas tambahan sesuai kebutuhan daerah.

Prioritas I dialokasikan untuk membiayai kewajiban daerah sesuai amanat regulasi, antara lain :

- a. Belanja Pegawai (gaji, tunjangan, dan hak ASN).
- b. Belanja pendidikan minimal 20% dari APBD.
- c. Belanja kesehatan minimal 10% dari APBD di luar gaji.
- d. Belanja infrastruktur pelayanan dasar minimal 25% dari APBD.
- e. Kebutuhan belanja yang sifatnya wajib, termasuk kewajiban hukum daerah.

Berdasarkan data, alokasi untuk prioritas I meningkat dari Rp372,1 miliar pada 2026 menjadi Rp846,8 miliar pada 2030. Kenaikan ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Ngawi dalam memastikan layanan dasar publik berjalan baik dan memenuhi ketentuan mandatory spending.

Prioritas II mencakup pembiayaan urusan wajib non pelayanan dasar (misalnya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, perumahan dan kawasan permukiman) serta urusan pilihan yang sesuai dengan potensi unggulan daerah, misalnya pertanian, pariwisata, atau perdagangan.

Alokasinya relatif stabil, yaitu Rp169,7 miliar pada 2026 dan meningkat menjadi Rp318,3 miliar pada 2030. Walaupun posnya lebih kecil dibanding prioritas I dan III, pos ini penting untuk mendorong pembangunan sektor-sektor unggulan yang akan memperkuat basis ekonomi Kabupaten Ngawi.



Prioritas III dialokasikan untuk urusan pendukung dan tambahan, misalnya perencanaan, penelitian, statistik, kearsipan, serta program pembangunan lain yang menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, prioritas III seringkali menjadi ruang fiskal untuk inovasi daerah dan pembangunan infrastruktur yang lebih besar.

Dari data terlihat bahwa alokasinya sangat dominan, naik dari Rp1,865 triliun pada 2026 menjadi Rp2,469 triliun pada 2030. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kapasitas riil keuangan diarahkan untuk mendukung pembangunan umum dan investasi jangka panjang, yang diharapkan berdampak pada peningkatan daya saing daerah.

Proyeksi alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Ngawi tahun 2026–2030 menunjukkan pola distribusi yang konsisten dengan Permendagri 86/2017. Prioritas I menjamin pemenuhan layanan dasar masyarakat, prioritas II menjaga keberlanjutan urusan strategis daerah, sedangkan prioritas III menyediakan ruang fiskal yang luas untuk pembangunan penunjang dan investasi jangka panjang. Tantangan utama adalah memastikan keseimbangan, agar porsi prioritas II bisa diperkuat tanpa mengorbankan kebutuhan dasar dan investasi pembangunan. Dengan demikian, alokasi kapasitas keuangan daerah diharapkan dapat mendukung visi pembangunan Ngawi yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan adalah bagian penting daerah dalam mengidentifikasi sumber sumber permasalahan daerah yang umumnya menjadi faktor penghambat dan jika mampu dilakukan indentifikasi secara menyeluruh dan jelas mampu memberikan akselerasi potensi daerah secara signifikan, sehingga kesenjangan dalam pembangunan daerah mampu diminimalisir secara bertahap sesuai dengan target capaian pembangunan. Sedangkan isu analisis isu-isu strategis Kabupaten Ngawi merupakan kondisi atau pokok pokok utama yang seharusnya diutamakan dan diperhatikan dalam skala prioritas perencanaan pembangunan daerah, pokok ini



menjadi sub bagian penting tak terpisahkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi 2025-2029 yang mempengaruhi dampak dari konsekuensi jauh serta pertimbangan matang perencanaan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara hal yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Proses perumusan permasalahan dilakukan dengan menelaah faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan dari implementasi program pembangunan sebelumnya. Proses ini dilaksanakan secara menyeluruh terhadap semua urusan pemerintahan daerah, baik secara individual per bidang maupun terintegrasi lintas sektor. Hasil dari proses ini menjadi dasar untuk menetapkan arah dan strategi pembangunan jangka menengah daerah.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan melalui serangkaian identifikasi, evaluasi dan analisis berbagai faktor yang akan menjadi tantangan dan hambatan pembangunan yang harus dipecahkan dan dicapai melalui program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan. Proses analisis isu strategis dimulai dari identifikasi permasalahan menurut urusan pemerintahan dan dilanjutkan dengan analisis lingkungan strategis baik internasional, regional maupun daerah. Hasil proses identifikasi isu-isu strategis ini selanjutnya dilakukan konsultasi publik untuk memberikan tambahan bobot/urgensi setiap isu strategis yang disusun, sehingga akan dapat dihasilkan daftar isu strategis setiap urusan pemerintahan.

Pembentukan isu-isu strategis di Kabupaten Ngawi dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil pembangunan periode sebelumnya; telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Ngawi 2005-2025; telaah terhadap dokumen RPJPN 2025-2045; telaah terhadap RPJM Provinsi Jawa Timur 2019-2024; telaah terhadap isu internasional; telaah terhadap Platform Bupati Terpilih; telaah terhadap dokumen Kualitas Lingkungan Hidup; analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan.



Salah satu isu penting yang juga menjadi perhatian strategis Kabupaten Ngawi adalah keberadaan dan perlindungan kawasan hutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, luas kawasan hutan di Kabupaten Ngawi tercatat sebesar 56.028,44 Hae, yang terdiri dari :

- Hutan Konservasi : 13.020,00 ha
- Hutan Lindung : 6.498,91 ha
- Hutan Produksi Tetap : 34.671,10 ha
- Hutan Produksi Terbatas : 1.838,43 ha

Kawasan hutan ini memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, ketersediaan sumber daya air, pengendalian bencana hidrometeorologi, serta mendukung pengembangan sektor pariwisata dan pertanian berkelanjutan. Namun, di sisi lain, tantangan berupa alih fungsi lahan, degradasi hutan, dan tekanan pembangunan infrastruktur juga menjadi permasalahan yang perlu dikelola secara bijak. Oleh karena itu, isu pelestarian lingkungan dan perlindungan kawasan hutan menjadi bagian krusial dari arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ngawi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penjelasan dalam bentuk skematik disajikan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 2.65 Pembentukan Isu-Isu Strategis Kabupaten Ngawi

Sumber : Diolah oleh Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Ngawi

2.6.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan konsekuensi dari adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kesenjangan ini dapat diidentifikasi melalui perbandingan capaian indikator kinerja pembangunan terhadap berbagai standar yang berlaku, antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Standar Nasional, serta target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. Selain itu, perbedaan capaian antar tahun juga menjadi indikator dalam mengukur konsistensi dan efektivitas kebijakan pembangunan yang telah diterapkan.

Dalam konteks Kabupaten Ngawi, permasalahan pembangunan yang muncul dalam periode perencanaan 2025-2029 dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial, kualitas layanan publik, serta ketahanan lingkungan. Permasalahan tersebut mencerminkan tantangan yang perlu segera diatasi agar pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan untuk Kabupaten Ngawi 5 tahun mendatang, sehingga kesenjangan yang perlu diatasi mampu strategi dan kebijakan yang lebih adaptif dan solutif agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal, sebagaimana telah dibahas secara rinci di BAB II (Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Selanjutnya identifikasi serta penyajian Permasalahan pembangunan di Kabupaten Ngawi dijabarkan melalui indikator di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang ditetapkan berdasarkan perbandingan dengan standar internasional, nasional ataupun regional. Berikut ini adalah identifikasi permasalahan berdasarkan urusan pembangunan daerah.

**Tabel 2.55 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Urusan Pembangunan**

No	Urusan	Masalah
1	Pendidikan	Capaian IPM Kabupaten Ngawi Masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional
		Perubahan Kurikulum tiap tahunnya
		Mutu Pendidikan yang masih belum memenuhi standar
		Kurangnya ketersediaan guru sesuai kualifikasi dan bersertifikasi
		Minimnya keterbatasan fasilitas sekolah dasar
		Minimnya Pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan
		Capaian Harapan Lama Sekolah masih dibawah capaian provinsi dan nasional
		Menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan SD
		APM SD/MI dan SMP/MTS masih kurang dari 100%
		Masih rendahnya Jumlah Tenaga Pendidik yang bersertifikasi
		Meningkatnya Angka Putus Sekolah SMP Kabupaten Ngawi
2	Kesehatan	Angka Kematian Ibu yang masih fluktuatif
		Peran lintas sektor yang belum optimal dalam penanganan stunting
		Sistem Informasi Kesehatan (SIK) belum berbasis elektronik terintegrasi untuk layanan informasi kesehatan yang lebih cepat, valid, dan resiurce sharing
		Banyak JFT yang merangkap pekerjaan JFU
		Tingkat pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan masih rendah
		Kasus komplikasi kebidanan tinggi dan kurangnya kompetensi petugas dalam penanganan komplikasi
		Tren Kematian Bayi meningkat dan tingginya masalah medis
		Kasus komplikasi neonatal tinggi
		Pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam merespon kejadian KIPI di masyarakat masih kurang
		Sensitifitas surveilans kasus Non Polio AFP pada anak < 15 tahun tinggi yang disebabkan pelaporan kasus Non Polio AFP dari Faskes rendah
		Masih tingginya masalah status gizi pada balita
		rendahnya cakupan KB aktif
		Tingginya kematian pada wanita karena kanker serviks dan payudara
		Angka penemuan kasus TBC masih rendah
		Angka Bebas Jentik masih di bawah 95%
		Cakupan Poskestren yang berstrata purnama mandiri masih rendah

No	Urusan	Masalah
3	RSUD	Masih terdapat kasus khusus yang tidak tercover BPJS
		Rasio Dokter Spesialis dan tenaga kesehatan belum ideal dan masih rendah
		Penderita Penyakit kanker, Jantung, Stroke, Urologi, KIA meningkat
		Masih perlunya inovasi pengembangan pelayanan untuk mempermudah akses layanan dengan memotong prosedur khususnya pelayanan rujukan
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya jaringan irigasi dalam kondisi baik untuk peningkatan produksi padi
		Masih kurangnya kualitas infrastruktur jalan dalam kondisi baik. Hal ini dikarenakan umur rencana jalan telah melampaui umur rencana jalan sehingga kondisi jalan menjadi tidak stabil dan cenderung rusak akibat faktor cuaca dan lalu lintas (baik repetisi/ jumlah lalu lintas yang lewat maupun beban lalu lintas yang melebihi tonase)
		Masih rendahnya sistem drainase secara terpadu
5	Perkim	Belum optimalnya rumah tinggal layak huni
		Belum optimalnya rumah tinggal bersanitasi
		Belum optimalnya penataan permukiman
		Masih rendahnya rumah tinggal pengguna air bersih
6	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Masih rendahnya jumlah desa/kelurahan/ kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana
		Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana
		Masih terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat menjaga ketertiban umum yang menyebabkan tingginya gangguan ketertiban umum
		Kurangnya integrasi data Perda tentang Keamanan dan Ketertiban setiap tahunnya
		Belum maksimalnya desa/kelurahan yang memiliki perlindungan masyarakat melalui pos kamling
		Belum adanya kepastian kelembagaan yang menyebabkan keterbatasan fungsi dari Kesbangpol
7	Sosial	Penanganan PMKS yang belum tepat sasaran karena belum adanya pendataan yang valid
		Masih tingginya PMKS yang belum mandiri
		Rendahnya jumlah peningkatan derajat kesejahteraan bagi Fakir Miskin dan rentan
		Sinergitas PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial menurun



No	Urusan	Masalah
		Rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga miskin
		Rendahnya PSKS Kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		Kurangnya SDM yang berkompeten dalam Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
8	Tenaga Kerja	Masih belum maksimalnya pencari kerja yang ditempatkan
		Belum optimalnya norma kerja (BPJS, Upah, Cuti, Lembur)
		Belum adanya instruktur tetap untuk Balai Tenaga Kerja
		Tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rendahnya Partisipasi perempuan dalam pengarusutamaan gender
		Rendahnya kesadaran kualitas pola asuh keluarga
		Tingkat ekonomi yang kurang/kemiskinan
		Masih rendahnya perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan karena pengetahuan masyarakat serta kurangnya keterbukaan komunikasi antar lingkungan
		Kurangnya pemenuhan hak anak
		Unmet need masih di atas 5 %
		Pemahaman Stunting yang masih rendah
10	Pangan	Menurunnya Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah disebabkan karena adanya tradisi atau perspektif perempuan yang hanya sebagai ibu rumah tangga (kodrat perempuan)
		Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
		Menurunnya skor PPH Konsumsi
		Penanganan untuk desa rentan rawan pangan belum optimal
		Masih tingginya desa rawan pangan
		Peran dan Fungsi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) belum optimal
		Pola Pangan Harapan Konsumsi belum ideal karena Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan
12	Lingkungan Hidup	Ketersediaan pangan bagi masyarakat masih belum optimal
		Kurang optimalnya tanah yang memiliki sertifikat, sehingga dapat menimbulkan potensi konflik pertanahan
12	Lingkungan Hidup	Volume sampah yang semakin meningkat
		Belum optimalnya pengelolaan sampah melalui 3R

No	Urusan	Masalah
		Pencemaran limbah domestik (sampah) akibat sarana dan prasarana sanitasi persampahan yang kurang memadai
		Masih rendahnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
		Menurunnya indeks kualitas lahan
		Pelestarian keanekaragaman hayati belum menjadi perhatian utama dalam pembangunan
		Kurang optimalnya pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan
		belum optimalnya proses pembuatan persetujuan teknis (rincian teknis) penyimpanan sementara Limbah B3
		Belum optimalnya kinerja dalam peningkatan kualitas air
13	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih rendahnya penduduk yang memiliki akte kematian
		Pemanfaatan Data Kependudukan belum optimal
		Belum tersedianya profil perkembangan kependudukan secara Lengkap
		Transformasi digital pada pelayanan adminduk tidak terintegrasi
		Masih adanya masyarakat yang belum memiliki dokumen
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan adminduk menurun
		Masih lamanya rata-rata waktu penyelesaian KTP
14	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya klasifikasi desa kategori swasembada
		Kurangnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kerjasama desa
		Minimnya akses informasi dan komunikasi Masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
		Berkurangnya lembaga ekonomi yang Aktif
		Minimnya pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan kemandirian masyarakat
		Masih belum efektifnya penggunaan dana bantuan keuangan desa
15	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana menyebabkan tingginya TFR
		Masih rendahnya prevalensi peserta KB aktif
		Belum optimalnya rasio petugas lapangan KB/PKB
16	Perhubungan	Masih rendahnya rasio sarana prasarana perhubungan yang ada dalam kondisi baik
		Jumlah penumpang dan angkutan darat semakin menurun
		Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas
17	Komunikasi dan Informasi	Belum optimalnya penggunaan aplikasi e-Government yang terintegrasi

No	Urusan	Masalah
		Implementasi SPBE belum optimal
		Belum optimalnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang mengaplikasikan TIK dalam aktivitasnya
		Masih rendahnya IKM terhadap pelayanan digital masyarakat
		Belum optimalnya tata kelola statistik sektoral Skala Kabupaten/Kota
		Masih rendahnya kapabilitas SDM aparatur dalam mengoperasikan internet
18	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Kurangnya variasi jenis usaha
		Usaha mikro tidak mengalami kenaikan omset dan aset
		Adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT disebabkan Tingkat kesadaran SDM KSP/USP koperasi yang rendah terhadap penilaian kesehatan koperasi
		Belum tersedianya data usaha mikro yang up to date dan akurat
		Kelembagaan koperasi belum optimal
		Belum optimalnya jumlah usaha mikro yang mengalami perubahan status menjadi kecil karena standarisasi produk yang masih kurang
		Menurunnya jumlah usah mikro dan kecil
19	Penanaman Modal	Belum optimalnya rasio daya serap tenaga kerja karena Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem OSS
		Integrasi aplikasi perizinan yang masih belum lancar
		Proses pelayanan penanaman modal masih kurang efektif
		Sosialisasi, Informasi, dan promosi penanaman modal masih kurang, media promosi yang masih kurang (kurang menarik)
		Belum optimalnya investor karena validitas dan akses data investasi terkait dengan OSS kurang optimal
20	Kepemudaan dan Olahraga	Minimnya prestasi pemuda di tingkat Provinsi dan Nasional
		Minimnya Prestasi atlet, Sedikitnya atlet yang dapat mengikuti event multi event tingkat provinsi maupun nasional
		Kurangnya event penjurangan atlet berbakat usia dini (<17 th)
		Menurunnya persentase lapangan olahraga per jumlah penduduk
		Organisasi kepemudaan bersifat pasif
		Rendahnya sarana-prasaran penunjang bidang olahraga
21	Statistik	Data statistik sektoral yang diperoleh dari Perangkat Daerah masih belum terjamin kevalidan datanya dan belum terintegrasi

No	Urusan	Masalah
		Data belum konsisten karena adanya perbedaan konsep dan metodologi. Mekanisme pengumpulan data statistik sektoral menggunakan metode yang tidak baku
22	Persandian	Masih rendahnya operasionalisasi sandi pemerintah daerah Penyediaan pelayanan keamanan informasi masih rendah
23	Kebudayaan	Terkikisnya nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal di masyarakat Kab Ngawi Pelestarian Kebudayaan yang menurun dan tidak optimal Masih adanya pelaku seni yang enggan beradaptasi dengan kemajuan teknologi Minimnya minat masyarakat dalam pelestarian budaya
24	Perpustakaan	Belum maksimalnya kualitas perpustakaan baik perpustakaan sekolah, perpustakaan desa sehingga masih banyak yang belum ber-SNP Ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan yang kurang representatif Rendahnya pelestarian koleksi naskah kuno Masih rendahnya koleksi budaya etnis nusantara
25	Kearsipan	Menurunnya jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku disebabkan rendahnya kualitas arsiparis Masih rendahnya Perangkat Daerah yang menyelenggarakan arsip secara baku Masih rendahnya arsip yang terjamin keamanannya
26	Perikanan dan Kelautan	Kurangnya masyarakat untuk konsumsi ikan Masih rendahnya kuantitas dan kualitas produksi perikanan tangkap Akses permodalan belum optimal Sumber daya ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) semakin berkurang Produktifitas Perikanan Budidaya belum optimal
27	Pariwisata	Masih rendahnya destinasi wisata yang berkembang dan promosi wisata yang masih rendah Kurangnya kemampuan SDM dalam pengelolaan usaha wisata Minimnya ketersediaan akomodasi wisata Belum optimalnya pengembangan desa wisata
28	Ekonomi Kreatif	Minimnya sarana prasarana untuk menunjang kegiatan ekonomi kreatif Masih minimnya media promosi
29	Pertanian	Kurangnya ketersediaan air untuk irigasi pertanian Kurangnya pemanfaatan teknologi di bidang pertanian Belum optimalnya produktivitas pertanian

No	Urusan	Masalah
		Belum optimalnya intensifikasi pertanian
		Menurunnya capaian produksi pertanian
		Nilai tambah produksi pertanian masih kurang
		Menurunnya capaian produksi pertanian
		Penyusutan lahan produktif pertanian diakibatkan alih fungsi lahan untuk pemukiman, tol, dan industri
30	Perindustrian	Penurunan jumlah industri baru disebabkan oleh faktor jumlah pelatihan yang berkurang
		Pengembangan sentra industri belum maksimal
		UKM belum memaksimalkan informasi dan teknologi
		Legalisasi izin usaha yang masih rendah
		Belum maksimalnya pekerja/buruh yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan
31	Perdagangan	Belum maksimalnya distribusi/pemasaran produk lokal Ngawi
		Produk ekspor belum berkembang
		Belum adanya fasilitasi dari pemerintah untuk pembentukan asosiasi eksportir
		Penggunaan produk dalam negeri masih kurang
		Masih rendahnya pengawasan mutu dagang PKL dan asongan disebabkan oleh faktor data PKL masih mencakup kota saja
32	Transmigrasi	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama pembangunan transmigrasi
		Masih rendahnya pengetahuan transmigrasi lokal
33	Perencanaan	Penggunaan indikator kinerja belum sepenuhnya mencerminkan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan konsep Kinerja Berjenjang
		Belum optimalnya pengelolaan Satu Data Kabupaten Ngawi
		Minimnya pemahaman internal Perangkat Daerah terkait penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja yang baik
		Belum optimalnya konsistensi antara Dokumen Perencanaan Daerah dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Pelaksanaan Progran Prioritas Daerah yang belum optimal sesuai Dokumen Perencanaan Daerah karena kendala Kemampuan Keuangan Daerah
34	Keuangan	Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam memahami peraturan perundang-undangan yang baru tentang penyusunan anggaran daerah
		Aplikasi Pengelolaan Keuangan (SP2D dengan Bank, SISMIOP di kecamatan) belum terlaksana secara online

No	Urusan	Masalah
		Penyampaian laporan BMD yang tidak tepat waktu
35	Kepegawaian	Kualitas penataan ASN yang tidak sesuai Standar
		ASN yang tersedia tidak sesuai kompetensi dan kualifikasi kebutuhan jabatan
		Belum optimalnya PNS mengikuti uji kompetensi
		Masih adanya pelanggaran disiplin ASN
		Ketidakakuratan data kepegawaian terutama PNS yang telah mengikuti diklat
36	Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi Bahan Perencanaan Pembangunan
		Masih minimnya agenda-agenda penelitian dan pengembangan yang menunjang pembangunan daerah
		Belum optimalnya kajian penelitian yang berada pada setiap urusan di Perangkat Daerah
37	Pengawasan	Belum optimalnya evaluasi internal secara berkala
		Perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah Kabupaten Ngawi belum memberikan kinerja secara optimal
		Belum tercapainya pemerintahan yang bersih melalui pendekatan SPIP
		Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum optimal
		Jumlah APIP yang belum memadai
		Mekanisme monev kinerja belum memperlihatkan hasil yang ingin dicapai
38	Sekretariat Daerah	Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi
		Data Capaian Indeks Reformasi Hukum belum mampu meningkatkan kualitas kebijakan daerah serta belum mewujudkan diregulasi peraturan perundang-undangan secara maksimal
		Implementasi Standar Pelayanan Publik belum dilaksanakan secara maksimal
		Masih tumpang tindihnya tugas fungsi dalam Perangkat Daerah sehingga kinerja belum maksimal
39	Sekretariat DPRD	Kurang optimalnya peningkatan kapasitas anggota DPRD
		Ketidakefektifan mekanisme pengawasan
40	Kecamatan	Masih rendahnya status desa
		Minimnya tingkat pemahaman SDM aparatur desa
		Minimnya jaringan akses internet di wilayah desa
		Masih rendahnya budaya kinerja

2.6.2 Isu Strategis

Isu strategis daerah merupakan pemetaan yang penting dalam mengetahui kondisi, atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan dan prioritas khusus dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya menyikapi proyeksi dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini, disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Ngawi. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

2.6.2.1 Isu Internasional

Isu-isu strategis global yang menjadi perhatian utama dalam perkembangan dunia saat ini tercermin dalam megatren global yang dirumuskan dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045 serta menjadi topik utama dalam berbagai forum internasional, termasuk KTT G20 dan World Economic Forum 2025. Perubahan dinamika global yang terus berkembang mencakup berbagai aspek berikut :

- a. Perkembangan demografi global yang dimaksudkan bahwa Jumlah penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) diprediksi akan terus meningkat secara global seiring dengan menurunnya angka kematian dan meningkatnya harapan hidup. Fenomena ini memunculkan tantangan baru bagi kebijakan kesehatan, ketenagakerjaan, serta sistem jaminan sosial di berbagai negara.
- b. Geopolitik dan Geoekonomi Ketegangan geopolitik dunia semakin meningkat, terutama akibat perang Rusia-Ukraina yang masih berlanjut dan konflik yang terus memanas di Timur Tengah, khususnya di Gaza. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi eskalasi konflik di kawasan lain, termasuk Indo-Pasifik yang memiliki posisi strategis bagi



Indonesia. Selain itu, kebangkitan proteksionisme ekonomi serta meningkatnya polarisasi ideologi menjadi faktor yang dapat menghambat kerja sama internasional. Di sisi lain, negara-negara berkembang diproyeksikan akan berkontribusi hingga 71% terhadap ekonomi global pada tahun 2050. Transformasi ekonomi yang berbasis inovasi dan teknologi menjadi kunci bagi negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju.

- c. Perkembangan Teknologi Perkembangan Teknologi Kemajuan kecerdasan buatan (AI) dan digitalisasi mengubah lanskap ekonomi, regulasi, serta keamanan global, menuntut kesiapan negara dalam mengelola disrupsi teknologi.
- d. Peningkatan Urbanisasi Dunia Urbanisasi yang pesat memerlukan solusi infrastruktur dan keberlanjutan. Perubahan pola perdagangan akibat proteksionisme dan pergeseran rantai pasok mendorong negara untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik.
- e. Kontelasi perdagangan Global.
- f. Perubahan iklim dan Sumber Daya Alam Fenomena cuaca ekstrem dan transisi energi hijau menjadi fokus utama dunia, sementara persaingan dalam pemanfaatan sumber daya alam, energi, dan pangan semakin meningkat.

Tidak dapat disangkal bahwa globalisasi membawa berbagai dampak bagi setiap negara, baik positif maupun negatif. Respons terhadap tekanan globalisasi sangat bergantung pada kesiapan dan strategi masing-masing negara. Jika tidak mampu beradaptasi dengan dinamika global yang terus berubah, suatu negara dapat mengalami tekanan ekonomi maupun instabilitas politik. Oleh karena itu, penguatan kebijakan domestik yang adaptif dan kerja sama internasional yang strategis menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Globalisasi mempengaruhi isu-isu internasional di setiap negara di dunia.



A. Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* / SDGs) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Berikut ini adalah 17 tujuan dari SDGs.

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;



13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

B. Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 yang hadir seiring dengan perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah lanskap industri secara signifikan. Internet yang awalnya hanya digunakan untuk kemudahan informasi dan komunikasi, kini telah berkembang menjadi Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), *big data analytics*, robotika, dan *cloud computing*. Perkembangan ini membawa perubahan besar dalam dunia ketenagakerjaan, di mana disrupsi terhadap tenaga kerja manusia semakin nyata akibat otomatisasi dan teknologi berbasis kecerdasan buatan.

Meskipun otomatisasi dan kecerdasan buatan berpotensi meningkatkan efisiensi dan produktivitas, kekhawatiran mengenai pengurangan tenaga kerja manusia tetap menjadi isu utama. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru, Revolusi Industri 4.0 dapat menggeser beberapa jenis pekerjaan yang bersifat repetitif dan administratif. Namun di sisi lain, munculnya ekonomi digital, industri kreatif, serta transformasi berbasis teknologi membuka



peluang bagi tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital dan adaptif.

Bagi Indonesia, Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang besar untuk merevitalisasi sektor manufaktur dan mempercepat transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan data terkini, sektor manufaktur masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus berfluktuasi akibat berbagai tantangan global, termasuk dampak pandemi COVID-19, perubahan rantai pasok global, serta peningkatan kompetisi dari negara lain.

Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB mengalami pergeseran akibat transformasi ekonomi dari sektor berbasis sumber daya alam menuju sektor berbasis digital dan jasa. Tanpa intervensi strategis, tren penurunan kontribusi manufaktur diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2030. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah memperbarui kebijakan “Making Indonesia 4.0” sebagai peta jalan untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Peta jalan “Making Indonesia 4.0” memberikan arah dan strategi yang jelas dalam penguatan industri, dengan fokus pada sektor industri prioritas seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronik. Selain itu, terdapat 10 strategi utama yang terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing industri nasional, yaitu :

1. Penguatan rantai pasok dan integrasi logistik;
2. Pengembangan kawasan industri berbasis teknologi tinggi;
3. Peningkatan standar industri berkelanjutan (sustainability);
4. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam ekosistem digital;
5. Pembangunan dan ekspansi infrastruktur digital nasional;
6. Peningkatan daya tarik investasi asing dan dalam negeri;
7. Pengembangan keterampilan tenaga kerja berbasis teknologi;
8. Penciptaan ekosistem inovasi yang kondusif;
9. Pemberian insentif bagi adopsi teknologi industri 4.0;



10. Harmonisasi regulasi dan kebijakan untuk mendukung transformasi industri;
11. Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia berkomitmen untuk mengakselerasi transformasi digital dan industri guna meningkatkan daya saing global serta mencapai target sebagai salah satu dari 10 ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045.

C. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pada tahun 2016, Indonesia memberlakukan kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC). MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian dikawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2015. MEA menjadi peluang dan tantangan bagi Indonesia satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.

MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) atau Investasi Langsung Luar Negeri yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan Sumber Daya Manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

Berdasarkan aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan



yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun demikian hal ini dapat memunculkan Indonesia ketenagakerjaan bagi Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu uji kompetensi bagi setiap calon tenaga kerja yang akan bersaing. Bagi mereka yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat sesuai tingkat ketrampilan dan keahliannya.

D. Transformasi Digital

Transformasi Digital Pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global. Menurut data terkini dari berbagai lembaga ekonomi internasional, pandemi menyebabkan kontraksi ekonomi global hingga 3,0% hingga 6,0% pada tahun 2020. Meskipun pemulihan ekonomi mulai terlihat pada tahun 2021 dan seterusnya, ketidakpastian ekonomi global, termasuk disrupsi rantai pasok, inflasi, dan ketegangan geopolitik, masih menjadi tantangan utama.

Perdagangan global juga mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi, dengan dampak yang sangat besar terhadap negara berkembang yang bergantung pada ekspor dan impor. Krisis ini mempercepat adopsi teknologi digital sebagai solusi untuk menjaga aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan dan investasi.

Transformasi digital kini menjadi faktor kunci dalam pemulihan ekonomi, terutama bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global pascapandemi. Melalui digitalisasi, berbagai sektor ekonomi dapat beradaptasi dan bertumbuh dengan lebih cepat. Salah satu aspek utama dari transformasi digital adalah integrasi teknologi dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Digitalisasi UMKM memungkinkan peningkatan akses pasar, efisiensi operasional, serta peningkatan daya saing di era ekonomi digital.

Pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi digital melalui berbagai inisiatif, termasuk pengembangan infrastruktur



digital, penguatan literasi digital, serta peningkatan investasi di sektor teknologi dan inovasi. Dengan strategi ini, transformasi digital diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemulihan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing Indonesia dalam perekonomian global.

E. Penggunaan Teknologi

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, dari ekonomi hingga tata kelola pemerintahan. Namun, inovasi ini juga menimbulkan tantangan global yang harus diantisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Beberapa isu strategis utama yang muncul dalam skala internasional antara lain :

1. Ketergantungan terhadap Teknologi dan Keberlanjutan Sumber Daya

Teknologi berperan dalam mitigasi perubahan iklim dan efisiensi energi, tetapi ketergantungan yang berlebihan dapat meningkatkan eksploitasi sumber daya langka dan limbah elektronik. Daerah perlu memastikan pemanfaatan teknologi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.

2. Keamanan Siber dan Ancaman Digital

Ancaman serangan siber terhadap infrastruktur digital terus meningkat, mengancam stabilitas ekonomi dan pemerintahan. Investasi dalam keamanan siber menjadi keharusan bagi daerah yang mengadopsi sistem digitalisasi layanan publik.

3. Artificial Intelligence (AI) dan Disrupsi Pasar Kerja

AI meningkatkan efisiensi tetapi juga menggeser kebutuhan tenaga kerja. Kesenjangan keterampilan akibat otomatisasi dapat memperburuk ketimpangan ekonomi jika tidak diimbangi dengan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang adaptif.

4. Digitalisasi Kesehatan dan Aksesibilitas

Teknologi kesehatan seperti telemedicine dan AI telah meningkatkan layanan medis global. Namun, kesenjangan akses, ketergantungan pada teknologi asing, serta risiko

kebocoran data kesehatan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

5. Teknologi dan Hak Privasi

Penggunaan teknologi pengawasan seperti facial recognition memunculkan dilema antara keamanan dan perlindungan privasi. Regulasi yang jelas diperlukan untuk memastikan teknologi tidak disalahgunakan dan tetap menghormati hak asasi manusia.

Teknologi menawarkan peluang besar dalam pembangunan, tetapi tanpa strategi yang tepat, ia juga dapat memperburuk ketimpangan dan kerentanan sosial. Oleh karena itu, daerah perlu mengadopsi kebijakan yang seimbang, inovatif, dan berkelanjutan dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif.

2.6.2.2 Isu Nasional

Isu nasional merupakan permasalahan yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat berdampak negatif pada stabilitas negara dan memicu krisis. Sehingga sangat penting isu nasional menjadi prioritas penyalarsan dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara, dalam pelaksanaannya penyelesaian isu nasional dibantu oleh daerah dengan target target yang ditetapkan seperti kemiskinan, produktivitas sektor pertanian rendah serta yang lainnya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ngawi, beberapa isu nasional yang relevan menjadi perhatian utama. Isu nasional dipengaruhi oleh isu dari negara lain ataupun dalam negara itu sendiri. Beberapa isu nasional pada RPJMD Kabupaten Ngawi antara lain :

- a. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
- c. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;
- d. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan;



- e. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas;
- f. Tata kelola pemerintahan belum optimal;
- g. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat.

2.6.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun ketiga dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, sekaligus menjadi RPJMN pertama dalam kerangka RPJPN Tahun 2025–2045. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan nasional sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

RPJMN Tahun 2025–2029 dirancang dengan mengacu pada visi “Indonesia Emas 2045” yang menempatkan pembangunan manusia, transformasi ekonomi, serta penguatan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama. Dalam konteks tersebut, RPJMN Tahun 2025–2029 mengedepankan agenda transformasi struktural, peningkatan produktivitas, pembangunan berkelanjutan yang inklusif, serta penguatan ketahanan sosial dan lingkungan.

Adapun sasaran utama yang diusung dalam RPJMN ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pembangunan antar wilayah, serta pemantapan infrastruktur dasar dan digital. Seluruh arah kebijakan ini dirancang untuk mendorong daya saing nasional dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan berdaya saing tinggi. Sebagai dokumen yang bersifat strategis, RPJMN Tahun 2025–2029 menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Ngawi, dalam menyelaraskan kebijakan dan program



pembangunan daerah agar sinergis dengan arah pembangunan nasional. Sinkronisasi ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan.

Sebagai pedoman utama pembangunan nasional lima tahunan, RPJMN Tahun 2025–2029 disusun untuk menjawab tantangan global dan domestik sekaligus menyiapkan fondasi menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Dalam konteks tersebut, pemerintah menetapkan delapan agenda prioritas nasional yang dikenal sebagai Asta Cita.

Asta Cita ini menjadi arah strategis dalam mewujudkan transformasi menyeluruh di bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Setiap cita mencerminkan komitmen negara dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan berkelanjutan.

Adapun delapan Asta Cita dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) Meneguhkan nilai-nilai dasar negara sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa Melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru.
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja berkualitas Mendorong kewirausahaan, industri kreatif, dan agromaritim melalui peran aktif koperasi.
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) Meliputi sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam Untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.



- 6) Membangun dari desa dan dari bawah Untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi Serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya Serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mengoperasionalkan arah pembangunan dalam Asta Cita, pemerintah pusat merumuskannya ke dalam 17 Program Prioritas Nasional yang lebih konkret dan terukur. Program-program ini mencakup berbagai sektor strategis yang menjadi pengungkit utama pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan.

Program prioritas ini tidak hanya menjadi panduan bagi kementerian/lembaga di tingkat pusat, tetapi juga menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang sinergis dengan agenda nasional.

Adapun ke-17 Program Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
- 2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
- 3) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
- 4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- 5) Pemberantasan kemiskinan;
- 6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
- 7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
- 8) Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
- 9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;



- 10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
- 11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
- 12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
- 13) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
- 14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
- 15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
- 16) Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
- 17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menetapkan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) sebagai langkah strategis untuk memberikan dampak nyata dan cepat bagi masyarakat. Program-program ini dirancang untuk menjawab permasalahan mendesak dengan solusi yang tepat dan terukur, serta membangun fondasi yang kuat bagi pelaksanaan program pembangunan nasional lainnya.

Berikut adalah 8 (delapan) program tersebut :

- 1) Pemberian Makanan dan Susu Gratis di Sekolah dan Pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak serta ibu hamil, yang merupakan investasi penting bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan;



- 2) Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, penuntasan kasus TBC, dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Langkah ini diambil untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dan memastikan akses layanan kesehatan yang merata;
- 3) Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian, dengan mencetak lahan baru dan membangun lumbung pangan di desa, daerah, dan nasional. Tujuannya adalah mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani;
- 4) Pembangunan Sekolah Unggul Terintegrasi di Setiap Kabupaten, serta perbaikan sekolah-sekolah yang rusak. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif;
- 5) Penambahan dan Pemberian Program Kartu-Kartu Kesejahteraan, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Program ini dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial;
- 6) Kenaikan Gaji ASN (TNI/Polri, Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh), serta pensiunan, dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan mendorong pelayanan publik yang lebih baik;
- 7) Pembangunan dan keberlanjutan Infrastruktur Desa dan Kota, termasuk infrastruktur transportasi, teknologi, dan perumahan murah bersubsidi bagi masyarakat miskin, generasi muda, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tujuannya adalah mempercepat pembangunan wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- 8) Peningkatan Rasio Penerimaan Negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%, melalui pembentukan Badan Penerimaan Negara. Ini merupakan langkah untuk memperkuat fiskal negara dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional.



2.6.2.4 Isu Regional

Isu regional adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar daerah yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap daerah. Isu regional dipengaruhi oleh isu internasional dan nasional. Beberapa isu regional pada RPJMD Kabupaten Ngawi antara lain :

2.6.2.5 RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029

A. Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi 2025-2029. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah daerah untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat. Fokus peningkatan kualitas SDM diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Ngawi. Point-point dalam mendukung proses tersebut sebagai bagian isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM yang berkualitas melalui pengembangan pendidikan vokasi, pendidikan inklusi, dan Transformasi layanan kesehatan;
2. Peningkatan SDM dalam penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan di segala bidang;
3. Peningkatan Pelayanan kesehatan;
4. Tingkat prevalensi stunting di Jawa Timur (32,7%) secara nasional berada di posisi ke-11 (sebelas) dan di atas angka nasional.

B. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional selama 2019-2023 mengalami fluktuasi, dengan Jawa Timur umumnya



berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan update perkembangan data melalui BPS Jatim Pada 2019, Jawa Timur tumbuh 5,52% (yoy), melambat dari 5,73% sementara pandemi COVID-19 pada 2020 menyebabkan kontraksi -2,39% (yoy) dibandingkan nasional -2,07% (yoy). Pemulihan mulai terjadi pada 2021 dengan pertumbuhan 3,57% (yoy), diikuti peningkatan pada 2022 menjadi 5,34% (yoy), sedikit di atas nasional 5,31%. Pada 2023, Jawa Timur tumbuh 4,95% (c-to-c), didorong sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan tertinggi 23,70%. Dalam RPJMD Kabupaten Ngawi 2025-2029, yang merujuk pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029, fokus diarahkan pada pengembangan infrastruktur, SDM, sektor industri dan pertanian, serta ekonomi digital dan kreatif, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, diharapkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dapat memberikan manfaat merata bagi masyarakat.

1. Pengentasan kemiskinan masih menjadi isu penting yang belum dapat terselesaikan sampai dengan saat ini. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan.
2. Jawa Timur juga masih menghadapi isu disparitas, meskipun mengalami perubahan yang lebih baik hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Desa PDTT No. 400 Tahun 2024, status kemajuan dan kemandirian desa di Jawa Timur menunjukkan peningkatan signifikan. Dari 7.721 desa, tercatat 4.019 desa berstatus Mandiri, 2.448 desa Maju, dan 1.254 desa Berkembang, tanpa desa yang termasuk kategori Tertinggal atau Sangat Tertinggal. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program pembangunan pedesaan yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur hingga 9,79% per Maret 2024. Jawa Timur juga konsisten menjadi provinsi dengan jumlah desa Mandiri tertinggi di Indonesia, mencerminkan komitmen kuat dalam mendorong kemajuan dan kemandirian desa yang



berkelanjutan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen PPMD Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

3. Peningkatan upaya penyiapan tenaga kerja yang kompetitif agar tantangan bonus demografi dan revolusi industri 4.0 dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

C. Tata Kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelayan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Adanya peraturan ini mengatur PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat mutlak diperlukan. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pembangunan daerah memiliki tantangan kepada pemerintah dalam beberapa hal, antara lain :

1. Pengelolaan dan Penataan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien;
2. Pengembangan kapasitas ASN dalam memberikan layanan, peningkatan kedisiplinan dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih; dan
3. Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi. Kepala Daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi hasil. Adapun arahan Presiden RI terkait permasalahan efisiensi birokrasi :

1. *E-Government*, dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah, dan semua



hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik;

2. *Money Follow Program*, alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya : infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan (pemerintahan berorientasi hasil);
3. Stop Pemborosan Anggaran, seberapa pun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai; dan
4. Fokus Kinerja bukan SPJ, ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurus SPJ.

D. Demokrasi Kewargaan

Demokrasi kewargaan berhubungan hak demokrasi dan kewajiban warga Negara dalam menjalankan aktifitasnya dengan mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum dan pemerintahan. Berikut ini isu strategis Provinsi Jawa Timur dalam demokrasi kewargaan:

1. Kebebasan sipil;
2. Hak-hak politik dan;
3. Partispasi politik;
4. Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak;
5. Rendahnya Komitmen dan Pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang;
6. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur;
7. Masih rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan;
8. Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019 sudah harus serentak diberlakukan;
9. Peningkatan Pelayanan dengan Go-Digital-Tanda Tangan Elektronik (TTE).



E. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur masih menjadi isu strategis dalam rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur. Berikut ini isu strategis di bidang infrastruktur Provinsi Jawa Timur :

1. Tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur adalah aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi di Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbang kertosusila, Koridor Maritim Jawa Madura, dan Koridor Maritim Selatan Jawa;
2. Pemenuhan cakupan layanan dasar perumahan dan permukiman antara lain penyediaan air minum regional, penyediaan system pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional;
3. Tantangan pembangunan berwawasan lingkungan, perubahan iklim, dan kejadian bencana;
4. Rendahnya kesadaran terhadap resiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

F. Lingkungan Hidup

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengatasi dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan terus meningkat, berdampak pada kesehatan masyarakat, perekonomian, serta keseimbangan ekosistem. Selain itu, tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali turut memperparah kondisi lingkungan hidup. Isu strategis utama yang harus diantisipasi meliputi :

1. Perubahan Iklim dan Dampaknya

Peningkatan suhu global telah menyebabkan perubahan pola cuaca ekstrem, memperburuk risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan. Berdasarkan data BMKG, suhu rata-rata Indonesia meningkat hingga 1,3°C pada tahun 2020, yang berkontribusi pada penurunan produktivitas pertanian, krisis air bersih, serta meningkatnya



risiko kebakaran hutan. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi keharusan untuk mengurangi dampak negatif terhadap pembangunan nasional dan daerah.

2. Pencemaran Lingkungan yang Semakin Serius

Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi. Salah satu tantangan utama adalah pencemaran plastik, lebih dari 3,2 juta ton sampah plastik masuk ke laut, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan polusi laut terbesar kedua di dunia. Selain itu, polusi udara dari industri dan kendaraan bermotor semakin memperburuk kualitas udara, sementara pencemaran air mengancam ketersediaan air bersih. Penguatan kebijakan pengelolaan limbah dan upaya rehabilitasi ekosistem menjadi langkah penting dalam mengatasi masalah ini.

3. Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Degradasi Lingkungan

Sumber daya alam Indonesia menghadapi tekanan akibat eksploitasi yang berlebihan dari sektor industri dan pertambangan. Laju degradasi lahan yang mencapai sekitar 1 juta Ha per tahun mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan. Peningkatan konservasi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian lingkungan.

4. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030, yang memerlukan langkah konkret dalam pengurangan emisi di sektor energi, transportasi, dan industri. Transisi menuju energi terbarukan, efisiensi energi, serta penerapan teknologi ramah lingkungan menjadi faktor kunci dalam mencapai target ini. Selain itu, peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim perlu diperkuat untuk menjaga ketahanan lingkungan dan ekonomi.

Isu strategis dalam lingkungan hidup memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan lingkungan



harus mengedepankan prinsip keberlanjutan agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan ekosistem dan kesejahteraan generasi mendatang.

G. Strategi Penguatan Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Petani

Sebagai salah satu wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap ketahanan pangan nasional, Jawa Timur memainkan peran kunci dalam produksi dan distribusi komoditas pertanian strategis. Dengan potensi sumber daya alam yang luas, dukungan infrastruktur yang cukup baik, serta sumber daya manusia yang kompeten, provinsi ini mampu memenuhi hampir seluruh kebutuhan pangannya secara mandiri.

Pada tahun 2024, produksi padi di Jawa Timur mencapai 9,27 juta ton, menyumbang sekitar 17,4% dari total produksi nasional. Selain padi, Jawa Timur juga menjadi produsen utama untuk berbagai komoditas strategis seperti jagung, kacang hijau, cabai rawit, daging sapi, telur ayam, susu, tebu, serta hasil perikanan seperti garam dan rumput laut. Namun, meskipun memiliki surplus pangan, tantangan dalam distribusi dan manajemen stok masih sering terjadi, menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah pada waktu tertentu. Fenomena ini disebabkan oleh tingginya permintaan dari provinsi lain yang menyerap hasil produksi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem logistik pangan untuk menjaga stabilitas stok dan harga.

Dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat, Jawa Timur memiliki peluang besar untuk menjadi pemasok utama bahan pangan. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada keberlanjutan produksi pangan yang stabil serta dukungan terhadap petani sebagai produsen utama. Regenerasi petani menjadi tantangan penting ke depan untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan nasional.

Dari sisi kesejahteraan petani, tren Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh meningkatnya harga komoditas pertanian



serta perbaikan kondisi ekonomi pedesaan. Namun, untuk memastikan kesejahteraan petani tetap meningkat secara berkelanjutan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, seperti :

1. Menjaga stabilitas harga komoditas pertanian agar petani tidak mengalami kerugian akibat fluktuasi pasar;
2. Meningkatkan efisiensi produksi melalui intensifikasi pertanian dengan pemanfaatan teknologi dan akses terhadap sarana produksi yang lebih baik;
3. Menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi produk pangan agar petani tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah, tetapi juga dapat memperoleh keuntungan lebih besar melalui pengolahan hasil pertanian.

Kedaulatan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketahanan pangan nasional, tetapi juga erat dengan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, strategi pembangunan pertanian ke depan harus memastikan bahwa sektor ini tetap berdaya saing, inklusif, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi petani sebagai produsen utama pangan nasional.

Menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengidentifikasi sejumlah isu strategis daerah yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Isu-isu tersebut mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat kualitas SDM, memperluas kesempatan kerja, menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup di tengah dinamika perubahan global dan regional.

Sebagai respon terhadap isu-isu strategis tersebut, serta dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang menuju Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan sembilan agenda prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan dalam Nawa Bhakti Satya Jilid II.



Adapun sembilan misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 tersebut adalah sebagai berikut :

1) Jatim Sejahtera

Memperkuat perlindungan sosial, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program inklusif dan berkelanjutan.

2) Jatim Kerja

Mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, serta pengembangan industri kreatif dan ekonomi digital.

3) Jatim Akses

Memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, transportasi, serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

4) Jatim Cerdas

Meningkatkan kualitas pendidikan, akses terhadap teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.

5) Jatim Sehat

Memperkuat sistem kesehatan daerah, meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas, serta mendorong pola hidup sehat di masyarakat.

6) Jatim Berkah Amanah

Menumbuhkan kehidupan sosial yang harmonis, toleransi antarumat beragama, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal.

7) Jatim Harmoni

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

8) Jatim Lestari

Melestarikan lingkungan hidup, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.



9) Jatim Unggul

Mewujudkan Jawa Timur sebagai provinsi yang unggul dalam berbagai sektor, berdaya saing tinggi, dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam pembangunan yang berkelanjutan.

2.6.2.6 Isu Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031. Petaan ruang wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki keterkaitan dengan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi. Berikut ini keterkaitan Petaan ruang wilayah Provinsi Jawa Timur dengan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi :

1. Dalam Rencana Sistem Perkotaan RTRW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi masuk kedalam Pusat Kegiatan Lokal. Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau melayani kegiatan beberapa Kecamatan.
2. Kabupaten Ngawi dalam wilayah pengembangan masuk ke dalam wilayah pengembangan Madiun dengan Pusat di Kota Madiun. Wilayah Pengembangan adalah adalah suatu kesatuan wilayah yang terdiri atas satu dan/atau beberapa kabupaten/kota yang membentuk kesatuan struktur pelayanan secara berhierarki yang di dalamnya terdapat pusat pertumbuhan dan wilayah pendukung. Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ngawi dengan fungsi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan industri.
3. Rencana pengembangan jalan bebas hambatan di sekitar Kabupaten Ngawi.
4. Rencana pengembangan jaringan irigasi dalam rangka mendukung air baku pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pengembangan air baku pada wilayah sungai. Bendung Gerak Karangnongko, Waduk Kedung Bendo,



- Waduk Sonde, Waduk Pakulon, Waduk Alastuwo, dan Bendungan Genen di Kabupaten Ngawi.
5. Pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air di wilayah provinsi serta mendukung pengelolaan sumber daya air lintas provinsi. Rencana pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud termasuk dalam pengaturan sungai dan sistem pompa banjir DAS Kali Madiun tersebar di Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo.
 6. Situs Purbakala Trinil di Kabupaten Ngawi masuk ke dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa lingkungan non bangunan.
 7. Benteng Pendem Van den Bosch di Kabupaten Ngawi sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa lingkungan bangunan gedung.
 8. Situs geologi–arkeologi (geoarkeologi) Trinil dan kedungbrubus di timur laut Ngawi, lokasi penemuan fosil vertebrata sebagai kawasan keunikan batuan dan fosil.
 9. Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Ngawi Hutan Surya, Pemandian Talun, dan Waduk Pondok.
 10. Kabupaten Ngawi masuk ke dalam kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gempa bumi.
 11. Di Kabupaten Ngawi terdapat 3 kawasan yang masuk dalam PKL Provinsi Jawa Timur, yaitu Perkotaan Ngawi, Perkotaan Widodaren, dan Perkotaan Karangjati.
 12. Terdapat rencana Pembangunan dan pengembangan jalan tol pada Kabupaten Ngawi yaitu pada jalur Solo – Mantingan – Ngawi, Ngawi – Kertosono, dan Ngawi – Bojonegoro, dan terdapat rencana pengembangan Terminal Tipe A yaitu Terminal Kertonegoro.
 13. Kabupaten Ngawi termasuk dalam Kawasan Strategis Ekonomi Unggulan, yaitu Sistem Agropolitan Wilis (Lawu – Wilis).



2.6.2.7 Isu berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi

A. Isu Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Isu-isu strategis yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2045 menjadi pijakan utama dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 2025–2029. Sebagai bagian dari 20 tahun visi pembangunan jangka panjang, RPJMD lima tahunan pertama diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan. Fokus kebijakan RPJMD 2025–2029 diorientasikan pada pencapaian *quick wins* pembangunan, peningkatan daya saing daerah, serta penciptaan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung target jangka panjang tersebut, RPJMD 2025–2029 akan memprioritaskan upaya penurunan jumlah penduduk miskin agar berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional melalui kebijakan penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi produktif, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Upaya ini akan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia, termasuk melalui penguatan pendidikan vokasional, peningkatan layanan kesehatan dasar dan rujukan, serta penyediaan infrastruktur sosial yang menunjang kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, arah pembangunan ekonomi lima tahun ke depan difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan nilai tambah sektor pertanian berbasis pertanian berkelanjutan, sekaligus memperkuat transformasi struktural melalui pengembangan kawasan industri sebagai sektor ekonomi unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Ngawi juga akan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi dan teknologi informasi, termasuk percepatan pelayanan publik digital, peningkatan efisiensi infrastruktur berbasis prioritas pembangunan, serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup. Secara keseluruhan, RPJMD 2025–2029 diarahkan untuk



menciptakan daerah yang kondusif, stabil, inklusif, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menjadi landasan kuat bagi pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Ngawi menuju masyarakat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan pada tahun 2045.

B. Isu Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan aspek fundamental dalam memastikan keserasian antara pertumbuhan wilayah, perlindungan lingkungan, dan penguatan sektor unggulan daerah. Dari dokumen RTRW Kabupaten Ngawi terbaru di mana telah menetapkan visi penataan ruang yaitu : *“Mewujudkan tata ruang Kabupaten Ngawi yang berbudaya, kompetitif, dan inovatif dalam kegiatan pertanian, industri, dan lingkungan berkelanjutan.”*

Visi tersebut mencerminkan keberlanjutan fungsi utama Kabupaten Ngawi sebagai basis ketahanan pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian dan didukung oleh perkembangan sektor industri dan tata kelola lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika spasial. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030. Penataan ruang wilayah Kabupaten Ngawi bertujuan :

“Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi sebagai Lumbung Pertanian Jawa - Bali yang Didukung oleh Industri dan Perdagangan”

Sedangkan kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Ngawi meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Peningkatan fungsi kawasan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan;
2. Pengembangan kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah;
3. Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Pengembangan sistem agropolitan dan perikanan pada kawasan potensial;



5. Peningkatan fungsi wilayah perdesaan melalui pengembangan produk unggulan perdesaan; dan
6. Pengoptimalan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghindari dampak dan resiko bencana
7. Pengembangan kawasan batuan dan fosil untuk meningkatkan nilai ekonomi lokal melalui produk kreatif, edukasi geologi, dan promosi terpadu yang menonjolkan keunikan fosil sebagai daya tarik wisata unggulan

Ke depan, RPJMD Kabupaten Ngawi perlu secara fleksibel menyesuaikan diri dengan arah kebijakan tata ruang hasil revisi RTRW agar perencanaan pembangunan sektoral dan spasial dapat berjalan secara terpadu, inklusif, dan efisien.

2.6.2.8 Isu Strategis Kabupaten Ngawi

Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Ngawi. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Adapun tahapan perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2025-2029 melalui tahapan Penentuan dan Pembobotan. Secara teknis, proses Tahapan Penentuan isu strategis diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan pembangunan Kabupaten Ngawi, yang ditinjau dari kebijakan-kebijakan terkait mengenai pembangunan Kabupaten Ngawi serta hasil FGD yang dilaksanakan dengan perwakilan PERANGKAT DAERAH terkait dan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi.



Penentuan isu tersebut terasaji dalam Daftar Panjang identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Ngawi berdasarkan Urusan Pembangunan Kabupaten Ngawi.

Tabel 2.56 Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis dan Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Ngawi berdasarkan Urusan Pembangunan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pendidikan	Kualitas dan pemerataan akses pendidikan belum optimal	Capaian IPM Kabupaten Ngawi Masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional	a. Kualitas tenaga pendidik belum merata antar wilayah. b. Pemerataan sarana prasarana pendidikan belum berbasis kebutuhan riil dan data spasial. c. Alokasi anggaran pendidikan belum sepenuhnya diarahkan untuk pemerataan kualitas layanan dasar. d. Masih lemahnya perencanaan dan monitoring mutu pendidikan pada satuan pendidikan di daerah.
	Relevansi dan adaptabilitas kurikulum belum mendukung peningkatan kompetensi peserta didik	Perubahan Kurikulum tiap tahunnya	a. Kurangnya kesiapan daerah dalam adaptasi terhadap kebijakan kurikulum nasional yang dinamis. b. Minimnya pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum bagi tenaga pendidik. c. Belum terintegrasinya muatan lokal ke dalam kurikulum daerah.
	Mutu layanan pendidikan belum memenuhi standar nasional	Mutu Pendidikan yang masih belum memenuhi standar	a. Belum optimalnya sistem evaluasi mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. b. Keterbatasan pengawasan terhadap implementasi standar nasional pendidikan. c. Masih lemahnya kapasitas kepala sekolah dan guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi.
	Ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik belum mencukupi kebutuhan	Kurangnya ketersediaan guru sesuai kualifikasi dan bersertifikasi	a. Distribusi tenaga pendidik antar wilayah belum proporsional. b. Minimnya tenaga pendidik berkualifikasi S1 sesuai bidang ajar.

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			c. Rekrutmen dan mutasi guru belum berbasis analisis kebutuhan.
	Kualitas infrastruktur pendidikan dasar belum memadai	Minimnya keterbatasan fasilitas sekolah dasar	a. Kualitas pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan belum seragam antar wilayah. b. Masih terbatasnya fasilitas penunjang seperti laboratorium dan perpustakaan di sekolah dasar.
	Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan formal dan non-formal masih rendah	Minimnya Pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan	a. Masih terbatasnya sosialisasi dan edukasi pentingnya pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. b. Faktor sosial ekonomi keluarga yang belum mendukung keberlanjutan pendidikan anak. c. Kurangnya sinergi lintas sektor dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dasar.
	Kualitas layanan pendidikan belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia kerja	Capaian Harapan Lama Sekolah masih dibawah capaian provinsi dan nasional	a. Lemahnya integrasi antara pendidikan formal dan dunia industri. b. Keterbatasan program pelatihan vokasi berbasis kebutuhan lokal. c. Belum optimalnya kerja sama dunia pendidikan dengan sektor swasta dan dunia usaha (DUDI).
	Akses dan pemerataan pendidikan dasar masih rendah	Menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan SD	a. Rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. b. Keterbatasan lembaga PAUD dan SD di wilayah pedesaan. c. Kualitas layanan PAUD belum merata antar wilayah. d. Kurangnya intervensi kebijakan daerah dalam memperluas akses pendidikan dasar.





Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pemerataan dan keberlanjutan pendidikan dasar belum optimal	APM SD/MI dan SMP/MTS masih kurang dari 100%	a. Ketimpangan akses antar wilayah dan jenjang pendidikan. b. Masih adanya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi dan sosial. c. Belum maksimalnya peran sekolah dan dinas pendidikan dalam mendeteksi serta mencegah anak putus sekolah. d. Belum efektifnya program afirmasi untuk peningkatan angka partisipasi murni.
	Profesionalitas dan kompetensi tenaga pendidik belum sepenuhnya tercapai	Masih rendahnya Jumlah Tenaga Pendidik yang bersertifikasi	a. Program sertifikasi guru belum menjangkau seluruh jenjang dan wilayah. b. Keterbatasan dana pelatihan dan peningkatan kompetensi profesional guru. c. Belum optimalnya sistem insentif bagi guru bersertifikat.
	Keberlanjutan pendidikan menengah masih belum stabil	Meningkatnya Angka Putus Sekolah SMP Kabupaten Ngawi	a. Faktor ekonomi keluarga dan rendahnya kemampuan membiayai pendidikan lanjutan. b. Rendahnya motivasi belajar dan dukungan keluarga. c. Keterbatasan program intervensi dini bagi siswa berisiko putus sekolah. d. Minimnya koordinasi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam pencegahan putus sekolah.
Kesehatan	Derajat kesehatan ibu belum optimal	Angka Kematian Ibu yang masih fluktuatif	a. Kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin belum merata antar wilayah. b. Rendahnya deteksi dini komplikasi kehamilan. c. Kurangnya tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan dasar.

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			d. Akses terhadap fasilitas kesehatan rujukan masih terbatas di wilayah terpencil.
	Sinergi lintas sektor dalam penanganan stunting belum optimal	Peran lintas sektor yang belum optimal dalam penanganan stunting	a. Koordinasi antarperangkat daerah terkait intervensi stunting belum efektif. b. Keterbatasan data terintegrasi mengenai keluarga berisiko stunting. c. Belum optimalnya pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam upaya pencegahan stunting.
	Sistem informasi dan manajemen kesehatan belum terintegrasi	Sistem Informasi Kesehatan (SIK) belum berbasis elektronik terintegrasi untuk layanan informasi kesehatan yang lebih cepat, valid, dan resource sharing	a. Belum terbangunnya infrastruktur teknologi informasi kesehatan yang memadai. b. Kapasitas SDM pengelola data kesehatan masih terbatas. c. Kurangnya koordinasi antar fasilitas pelayanan dalam pelaporan dan pemanfaatan data kesehatan.
	Efisiensi dan distribusi tenaga kesehatan belum optimal	Banyak JFT yang merangkap pekerjaan JFU	a. Kekurangan tenaga kesehatan pada formasi tertentu. b. Penataan organisasi dan beban kerja belum proporsional. c. Kurangnya rekrutmen dan redistribusi tenaga kesehatan berbasis kebutuhan wilayah.
	Pengetahuan kesehatan masyarakat masih rendah	Tingkat pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan masih rendah	a. Kurangnya edukasi kesehatan reproduksi di tingkat keluarga dan masyarakat. b. Keterbatasan tenaga penyuluh kesehatan masyarakat. c. Minimnya program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu dan anak.
	Penanganan komplikasi kebidanan belum optimal	Kasus komplikasi kebidanan tinggi dan kurangnya kompetensi	a. Kurangnya tenaga bidan dengan kompetensi kegawatdaruratan obstetri.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		petugas dalam penanganan komplikasi	b. Ketersediaan peralatan medis untuk komplikasi obstetri belum memadai. c. Rujukan kasus komplikasi belum berjalan cepat dan efektif.
	Kesehatan bayi baru lahir belum tertangani secara menyeluruh	Tren Kematian Bayi meningkat dan tingginya masalah medis	a. Keterlambatan penanganan kasus neonatal kritis. b. Kurangnya tenaga medis anak dan perinatologi di fasilitas dasar. c. Kurangnya pemantauan pasca kelahiran oleh tenaga kesehatan.
	Penanganan kesehatan neonatal belum maksimal	Kasus komplikasi neonatal tinggi	a. Keterbatasan sarana neonatal intensive care unit (NICU). b. Belum semua fasilitas kesehatan memiliki tenaga dengan kompetensi neonatal emergency. c. Minimnya program kunjungan rumah untuk bayi risiko tinggi.
	Kapasitas tenaga kesehatan dalam pengendalian penyakit dan imunisasi belum merata	Pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam merespon kejadian KIPI di masyarakat masih kurang	a. Kurangnya pelatihan teknis dan refreshment bagi tenaga imunisasi. b. Keterbatasan SOP penanganan KIPI di fasilitas pelayanan dasar. c. Belum optimalnya komunikasi risiko kepada masyarakat.
	Pengawasan epidemiologi dan surveilans kesehatan belum efektif	Sensitifitas surveilans kasus Non Polio AFP pada anak < 15 tahun tinggi yang disebabkan pelaporan kasus Non Polio AFP dari Faskes rendah	a. Pelaporan kasus dari fasilitas kesehatan belum tepat waktu. b. Kurangnya petugas surveilans epidemiologi di tingkat puskesmas. c. Keterbatasan sistem pemantauan digital kesehatan masyarakat.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Status gizi masyarakat belum optimal	Masih tingginya masalah status gizi pada balita	a. Pola asuh dan konsumsi gizi keluarga belum seimbang. b. Belum optimalnya program pemantauan tumbuh kembang balita. c. Kurangnya edukasi masyarakat terkait pola makan bergizi seimbang.
	Pelayanan kesehatan reproduksi belum merata	Rendahnya cakupan KB aktif	a. Kurangnya tenaga penyuluh KB dan bidan lapangan. b. Persepsi negatif masyarakat terhadap program KB. c. Belum optimalnya distribusi alat kontrasepsi di daerah pedesaan.
	Pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular masih terbatas	Tingginya kematian pada wanita karena kanker serviks dan payudara	a. Program deteksi dini IVA dan SADANIS belum menjangkau seluruh wilayah. b. Keterbatasan alat pemeriksaan dan tenaga medis terlatih. c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan rutin.
	Pengendalian penyakit menular belum maksimal	Angka penemuan kasus TBC masih rendah	a. Stigma masyarakat terhadap penderita TBC masih tinggi. b. Kurangnya pelacakan kasus aktif di lapangan. c. Belum optimalnya sistem pelaporan TBC berbasis elektronik (SITB).
	Pemberantasan vektor penyakit belum efektif	Angka Bebas Jentik masih di bawah 95%	a. Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk masih rendah. b. Kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) belum berkelanjutan. c. Pengawasan dan evaluasi lapangan belum rutin.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pelayanan kesehatan berbasis komunitas belum merata	Cakupan Poskestren yang berstrata purnama mandiri masih rendah	d. 1. Pembinaan dan pendampingan Poskestren belum berjalan optimal; 2. Kurangnya tenaga kesehatan pembina di wilayah pesantren; 3. Keterbatasan dukungan anggaran untuk kegiatan Poskestren mandiri.
RSUD	Akses dan cakupan layanan rumah sakit belum menyeluruh	Masih terdapat kasus khusus yang tidak tercover BPJS	a. Keterbatasan kebijakan pembiayaan kesehatan bagi kasus non-BPJS. b. Belum optimalnya mekanisme subsidi silang untuk pasien non-JKN. c. Koordinasi antara Dinas Kesehatan dan RSUD dalam perluasan layanan JKN belum maksimal.
	Ketersediaan tenaga medis dan spesialis belum memadai	Rasio Dokter Spesialis dan tenaga kesehatan belum ideal dan masih rendah	a. Keterbatasan rekrutmen dan distribusi tenaga spesialis. b. Kurangnya insentif dan fasilitas penunjang bagi dokter spesialis. c. Tingginya beban kerja akibat kekurangan tenaga medis di bidang prioritas.
	Tren penyakit tidak menular semakin meningkat	Penderita Penyakit kanker, Jantung, Stroke, Urologi, KIA meningkat	a. Peningkatan gaya hidup tidak sehat di masyarakat. b. Deteksi dini penyakit tidak menular masih terbatas. c. Keterbatasan peralatan diagnostik dan tenaga ahli di RSUD daerah. d. Minimnya edukasi publik tentang pencegahan penyakit kronis.
	Efisiensi layanan rujukan belum optimal	Masih perlunya inovasi pengembangan pelayanan untuk mempermudah akses layanan dengan memotong prosedur khususnya pelayanan rujukan	a. Sistem rujukan berjenjang belum sepenuhnya terintegrasi antar fasilitas kesehatan. b. Administrasi layanan rujukan masih manual dan lambat.

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			c. Keterbatasan pemanfaatan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) secara maksimal.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja jaringan irigasi belum optimal	Belum optimalnya jaringan irigasi dalam kondisi baik untuk peningkatan produksi padi	a. Keterbatasan anggaran pemeliharaan jaringan irigasi. b. Infrastruktur irigasi banyak mengalami kerusakan akibat usia teknis. c. Kurangnya tenaga teknis dalam pengelolaan irigasi berbasis wilayah. d. Belum optimalnya koordinasi antara dinas teknis dan kelompok tani pengguna air.
	Kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan belum memadai	Masih kurangnya kualitas infrastruktur jalan dalam kondisi baik. Hal ini dikarenakan umur rencana jalan telah melampaui umur rencana jalan sehingga kondisi jalan menjadi tidak stabil dan cenderung rusak akibat faktor cuaca dan lalu lintas (baik repetisi/ jumlah lalu lintas yang lewat maupun beban lalu lintas yang melebihi tonase)	a. Umur teknis banyak ruas jalan telah melampaui batas rencana. b. Beban lalu lintas berat tidak sebanding dengan kapasitas konstruksi jalan. c. Keterbatasan dana pemeliharaan rutin dan berkala. d. Belum optimalnya sistem manajemen aset jalan berbasis data.
	Sistem drainase perkotaan belum berfungsi efektif	Masih rendahnya sistem drainase secara terpadu	a. Perencanaan drainase belum berbasis tata ruang dan topografi daerah. b. Keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan drainase. c. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga saluran drainase.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			d. Belum optimalnya integrasi drainase dengan sistem pengendalian banjir perkotaan.
Perkim	Akses terhadap rumah layak huni masih terbatas	Belum optimalnya rumah tinggal layak huni	a. Belum terpenuhinya target rumah layak huni berdasarkan data RTLH. b. Keterbatasan dukungan anggaran program perbaikan rumah tidak layak huni. c. Masih rendahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat penerima bantuan.
	Kualitas sanitasi perumahan masih rendah	Belum optimalnya rumah tinggal bersanitasi	a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi sehat. b. Keterbatasan infrastruktur sanitasi di kawasan padat penduduk. c. Belum maksimalnya integrasi program sanitasi lingkungan dengan program perumahan.
	Penataan permukiman belum terencana dengan baik	Belum optimalnya penataan permukiman	a. Belum tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan permukiman secara menyeluruh. b. Keterbatasan pengawasan terhadap pembangunan kawasan permukiman baru. c. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap rencana tata ruang wilayah.
	Akses air bersih masyarakat belum merata	Masih rendahnya rumah tinggal pengguna air bersih	a. Keterbatasan cakupan pelayanan PDAM di wilayah perdesaan. b. Infrastruktur air bersih di beberapa kecamatan belum berfungsi optimal.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			c. Kualitas sumber air menurun akibat pencemaran lingkungan.
Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Sistem kesiapsiagaan bencana daerah belum optimal	Masih rendahnya jumlah desa/kelurahan/ kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana	a. Belum optimalnya sistem peringatan dini berbasis masyarakat. b. Keterbatasan alat dan sarana pendukung informasi bencana di tingkat desa. c. Minimnya koordinasi antarinstansi terkait kebencanaan.
	Kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana masih rendah	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana	a. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana di wilayah rawan. b. Kurangnya kegiatan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana. c. Keterbatasan peran relawan dan lembaga masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan.
	Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum memadai	Masih terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana	a. Keterbatasan anggaran daerah untuk pengadaan peralatan tanggap darurat. b. Sebagian peralatan dan logistik tanggap bencana sudah tidak layak pakai. c. Distribusi sarana prasarana belum merata di seluruh wilayah rawan bencana.
	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum masih rendah	Masih rendahnya kesadaran masyarakat menjaga ketertiban umum yang menyebabkan tingginya gangguan ketertiban umum	a. Rendahnya peran tokoh masyarakat dalam penegakan norma sosial. b. Belum optimalnya penegakan Perda tentang ketertiban umum.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			c. Minimnya kegiatan pembinaan dan sosialisasi ketertiban umum di masyarakat.
	Pengawasan dan penegakan hukum daerah belum efektif	Kurangnya integrasi data Perda tentang Keamanan dan Ketertiban setiap tahunnya	a. Sistem pelaporan dan pengawasan pelaksanaan Perda belum terintegrasi. b. Koordinasi antar perangkat daerah penegak Perda masih lemah. c. Keterbatasan SDM pengawas dan penegak perda di lapangan.
	Perlindungan masyarakat di tingkat lokal belum berjalan optimal	Belum maksimalnya desa/kelurahan yang memiliki perlindungan masyarakat melalui pos kamling	a. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pos kamling. b. Minimnya dukungan anggaran untuk revitalisasi pos kamling. c. Kurangnya koordinasi antara Satpol PP dan perangkat desa.
	Kelembagaan perlindungan masyarakat belum efektif	Belum adanya kepastian kelembagaan yang menyebabkan keterbatasan fungsi dari Kesbangpol	a. Struktur kelembagaan perlindungan masyarakat belum terstandarisasi. b. Belum jelasnya pembagian kewenangan antarunit dalam perlindungan masyarakat. c. Keterbatasan kapasitas aparatur dalam manajemen kelembagaan.
Sosial	Penanganan PMKS belum tepat sasaran dan belum berbasis data valid	Penanganan PMKS yang belum tepat sasaran karena belum adanya pendataan yang valid	a. Basis data PMKS belum terintegrasi dengan sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). b. Belum rutin dilakukan pembaruan data penerima manfaat. c. Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam verifikasi dan validasi data.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Tingkat kemandirian PMKS masih rendah	Masih tingginya PMKS yang belum mandiri	a. Minimnya program pemberdayaan sosial berkelanjutan. b. Bantuan sosial masih bersifat karitatif, belum produktif. c. Kurangnya monitoring pasca pemberian bantuan sosial.
	Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan belum signifikan	Rendahnya jumlah peningkatan derajat kesejahteraan bagi Fakir Miskin dan rentan	a. Belum optimalnya integrasi program penanggulangan kemiskinan antarperangkat daerah. b. Rendahnya kemampuan ekonomi keluarga penerima manfaat. c. Terbatasnya akses ke program pelatihan dan lapangan kerja.
	Koordinasi kelembagaan sosial belum efektif	Sinergitas PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial menurun	a. Lemahnya koordinasi antarorganisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan. b. Minimnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pembinaan PSKS. c. Kurangnya forum komunikasi dan kemitraan sosial di tingkat daerah.
	Pemberdayaan sosial berbasis keluarga miskin belum optimal	Rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga miskin	a. Terbatasnya pelatihan keterampilan produktif bagi keluarga miskin. b. Rendahnya dukungan akses modal dan sarana usaha kecil keluarga miskin. c. Minimnya pendamping sosial di tingkat desa.
	Kelembagaan PSKS belum berfungsi maksimal	Rendahnya PSKS Kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	a. Kelembagaan PSKS belum memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat. b. Kurangnya dukungan operasional dan pembinaan dari dinas sosial.

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			c. Belum optimalnya pelibatan PSKS dalam kegiatan sosial daerah.
	SDM sosial belum kompeten dan berdaya saing	Kurangnya SDM yang berkompeten dalam Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	a. Kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas pekerja sosial. b. Minimnya tenaga kesejahteraan sosial di lapangan. c. Belum adanya mekanisme sertifikasi kompetensi bagi SDM sosial daerah.
Tenaga Kerja	Penempatan tenaga kerja belum efektif dan sesuai kebutuhan	Masih belum maksimalnya pencari kerja yang ditempatkan	a. Belum optimalnya sistem informasi ketenagakerjaan daerah. b. Kurangnya kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam penyerapan tenaga kerja. c. Rendahnya kompetensi pencari kerja terhadap kebutuhan industri lokal.
	Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja dan belum optimal	Belum optimalnya norma kerja (BPJS, Upah, Cuti, Lembur)	a. Pengawasan norma kerja belum efektif di sektor informal. b. Kurangnya kesadaran pengusaha terhadap penerapan norma kerja. c. Belum optimalnya penegakan hukum ketenagakerjaan.
	Kualitas pelatihan dan pengembangan kompetensi belum memadai	Belum adanya instruktur tetap untuk Balai Tenaga Kerja	a. Keterbatasan SDM pelatih yang bersertifikasi. b. Minimnya alokasi anggaran untuk pelatihan vokasi. c. Kurangnya kerja sama dengan lembaga pelatihan eksternal dan industri.
	Kesesuaian antara regulasi dan praktik hubungan industrial belum harmonis	Tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	a. Pemahaman pekerja dan pengusaha terhadap regulasi hubungan industrial masih rendah. b. Belum efektifnya forum komunikasi tripartit di tingkat daerah.

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			c. Keterbatasan pembinaan dan mediasi dari instansi tenaga kerja.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Keterlibatan perempuan dalam pembangunan belum optimal	Rendahnya Partisipasi perempuan dalam pengarusutamaan gender	a. Minimnya program peningkatan kapasitas perempuan dalam perencanaan pembangunan. b. Rendahnya dukungan kelembagaan dalam penerapan PUG di perangkat daerah. c. Masih kuatnya budaya patriarki yang membatasi peran perempuan di ranah publik.
	Ketahanan keluarga belum kuat	Rendahnya kesadaran kualitas pola asuh keluarga	a. Lemahnya edukasi keluarga dalam pola asuh positif. b. Kurangnya program peningkatan ketahanan keluarga di tingkat desa. c. Minimnya kolaborasi antara lembaga perempuan dan lembaga keluarga.
	Tingkat kesejahteraan perempuan masih rendah	Tingkat ekonomi yang kurang/kemiskinan	a. Keterbatasan akses perempuan terhadap modal dan pelatihan usaha. b. Rendahnya partisipasi perempuan dalam ekonomi produktif. c. Minimnya fasilitasi pemerintah terhadap UMKM perempuan.
	Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan belum optimal	Masih rendahnya perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan karena pengetahuan masyarakat serta kurangnya keterbukaan komunikasi antar lingkungan	a. Layanan pengaduan kekerasan belum tersedia di seluruh wilayah. b. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isu kekerasan berbasis gender. c. Terbatasnya tenaga pendamping perempuan dan anak.

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pemenuhan hak anak belum maksimal	Kurangnya pemenuhan hak anak	a. Program Kabupaten Layak Anak belum menyentuh seluruh indikator pemenuhan hak anak. b. Minimnya sarana ramah anak di ruang publik. c. Belum optimalnya peran satuan pendidikan dalam perlindungan anak.
	Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi belum optimal	Unmet need masih di atas 5 %	a. Kurangnya tenaga penyuluh KB dan tenaga medis perempuan. b. Persepsi masyarakat terhadap program KB masih rendah. c. Belum optimalnya distribusi alat kontrasepsi di daerah rural.
	Pemahaman gizi keluarga masih rendah	Pemahaman Stunting yang masih rendah	a. Minimnya edukasi gizi seimbang bagi keluarga. b. Rendahnya keterlibatan ayah dalam pencegahan stunting. c. Kurangnya program komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa.
	Representasi perempuan di lembaga publik belum memadai	Menurunnya Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah disebabkan karena adanya tradisi atau perspektif perempuan yang hanya sebagai ibu rumah tangga (kodrat perempuan)	a. Keterbatasan peran tokoh perempuan dalam organisasi publik. b. Budaya patriarki masih membatasi ruang partisipasi perempuan. c. Kurangnya pelatihan kepemimpinan bagi calon pemimpin perempuan.
Pangan	Ketersediaan cadangan pangan pemerintah belum optimal	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	a. Pengelolaan cadangan pangan daerah belum terencana dengan baik. b. Keterbatasan gudang penyimpanan pangan. c. Belum efektifnya koordinasi antarinstansi dalam pengadaan dan distribusi pangan cadangan.

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Ketahanan pangan masyarakat menurun	Menurunnya skor PPH Konsumsi	a. Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman. b. Kurangnya edukasi gizi masyarakat. c. Keterbatasan akses masyarakat terhadap pangan berkualitas.
	Perlindungan terhadap kelompok rentan pangan belum maksimal	Penanganan untuk desa rentan pangan belum optimal	a. Belum optimalnya sistem pemantauan desa rawan pangan. b. Minimnya intervensi program bantuan pangan di daerah rawan. c. Keterbatasan anggaran untuk ketahanan pangan desa.
	Pengawasan keamanan pangan belum efektif	Masih tingginya desa rawan pangan	a. Pengawasan keamanan pangan segar belum konsisten di pasar lokal. b. Rendahnya kapasitas petugas pengawas pangan daerah. c. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor pangan dan kesehatan.
	Kelembagaan pangan daerah belum berfungsi optimal	Peran dan Fungsi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) belum optimal	a. Kelembagaan OKKPD belum diperkuat secara regulatif dan struktural. b. Kurangnya SDM teknis di bidang pengawasan pangan. c. Minimnya dukungan anggaran untuk kegiatan pengujian pangan.
	Pola konsumsi dan pengelolaan pangan belum ideal	Pola Pangan Harapan Konsumsi belum ideal karena Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan	a. Edukasi diversifikasi pangan lokal belum masif. b. Produksi pangan lokal belum mendukung diversifikasi konsumsi. c. Koordinasi antar pelaku pangan daerah masih lemah.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Akses pangan masyarakat belum merata	Ketersediaan pangan bagi masyarakat masih belum optimal	a. Ketimpangan distribusi pangan antar wilayah. b. Infrastruktur transportasi ke sentra pangan masih terbatas. c. Fluktuasi harga pangan yang tinggi menghambat akses kelompok rentan.
Pertanahan	Kepemilikan dan legalitas tanah belum tertata optimal	Kurang optimalnya tanah yang memiliki sertifikat, sehingga dapat menimbulkan potensi konflik pertanahan	a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan sertifikasi tanah. b. Proses administrasi sertifikasi tanah yang panjang dan terbatasnya petugas pengukuran. c. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah dan BPN dalam percepatan sertifikasi aset tanah. d. Keterbatasan data dan peta bidang tanah yang terintegrasi antarinstansi.
Lingkungan Hidup	Pengelolaan sampah belum efektif dan berkelanjutan	Volume sampah yang semakin meningkat	a. Peningkatan volume sampah rumah tangga seiring pertumbuhan penduduk dan konsumsi. b. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah. c. Kapasitas TPA dan armada pengangkutan sampah belum mencukupi.
	Sistem pengelolaan sampah berbasis 3R belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan sampah melalui 3R	a. Keterbatasan fasilitas pendukung daur ulang dan pemilahan sampah. b. Minimnya peran masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah 3R. c. Kurangnya edukasi publik mengenai pengurangan dan pemanfaatan sampah.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pengelolaan limbah domestik belum memadai	Pencemaran limbah domestik (sampah) akibat sarana dan prasarana sanitasi persampahan yang kurang memadai	a. Keterbatasan sarana sanitasi dan sistem pembuangan air limbah rumah tangga. b. Kelemahan koordinasi antara dinas teknis terkait persampahan dan sanitasi. c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
	Pelaksanaan pengendalian dan perlindungan lingkungan belum optimal	Masih rendahnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	a. Kelembagaan pengelola lingkungan hidup di tingkat daerah masih lemah. b. Penegakan hukum lingkungan belum konsisten. c. Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran di bidang pengawasan lingkungan.
	Kualitas lingkungan menurun	Menurunnya indeks kualitas lahan	a. Alih fungsi lahan produktif menjadi permukiman dan industri. b. Pengelolaan tata ruang belum memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. c. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan.
	Pelestarian keanekaragaman hayati belum menjadi prioritas pembangunan	Pelestarian keanekaragaman hayati belum menjadi perhatian utama dalam pembangunan	a. Minimnya integrasi isu keanekaragaman hayati dalam perencanaan daerah. b. Kurangnya data dan riset keanekaragaman hayati lokal. c. Rendahnya alokasi anggaran untuk konservasi lingkungan.
	Pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha belum sesuai ketentuan	Kurang optimalnya pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan	a. Kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha penghasil limbah B3. b. Fasilitas pengolahan limbah B3 di tingkat daerah masih terbatas.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			c. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan limbah B3.
	Proses perizinan dan teknis limbah B3 belum efisien	Belum optimalnya proses pembuatan persetujuan teknis (rincian teknis) penyimpanan sementara Limbah B3	a. Kurangnya tenaga teknis bersertifikat dalam penilaian dokumen lingkungan. b. Proses administrasi perizinan yang masih manual dan memakan waktu lama. c. Belum ada sistem terintegrasi antara dinas teknis dan pelaku usaha.
	Pengelolaan kualitas air belum maksimal	Belum optimalnya kinerja dalam peningkatan kualitas air	a. Terbatasnya sarana monitoring kualitas air permukaan dan tanah. b. Rendahnya kepatuhan industri terhadap baku mutu air limbah. c. Kurangnya penegakan hukum terhadap pencemaran air.
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan administrasi kependudukan belum inklusif	Masih rendahnya penduduk yang memiliki akte kematian	a. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kematian masih rendah. b. Akses pelayanan pencatatan sipil belum menjangkau seluruh wilayah. c. Pelayanan pencatatan kematian masih bersifat pasif dan manual.
	Pemanfaatan data kependudukan belum optimal	Pemanfaatan Data Kependudukan belum optimal	a. Data kependudukan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perencanaan daerah. b. Belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah pengguna data kependudukan.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			c. Keterbatasan SDM dalam pengelolaan dan analisis data kependudukan.
	Basis data kependudukan belum lengkap dan akurat	Belum tersedianya profil perkembangan kependudukan secara Lengkap	a. Pembaruan data penduduk belum dilakukan secara berkala. b. Kurangnya dukungan anggaran untuk pengembangan profil kependudukan daerah. c. Lemahnya integrasi data antarinstansi pengguna data kependudukan.
	Transformasi digital layanan adminduk belum terintegrasi	Transformasi digital pada pelayanan adminduk tidak terintegrasi	a. Sistem pelayanan adminduk berbasis digital belum terkoneksi antar kecamatan. b. Infrastruktur TIK di beberapa daerah masih terbatas. c. Kurangnya pelatihan SDM pelayanan digital adminduk.
	Kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat belum universal	Masih adanya masyarakat yang belum memiliki dokumen	a. Kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman data kependudukan masih rendah. b. Lokasi pelayanan belum menjangkau wilayah terpencil. c. Belum optimalnya pelayanan jemput bola oleh Disdukcapil.
	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan adminduk menurun	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan adminduk menurun	a. Kualitas pelayanan belum konsisten antar unit kerja. b. Waktu pelayanan masih relatif lama. c. Fasilitas pelayanan belum sepenuhnya ramah masyarakat.
	Efisiensi waktu pelayanan adminduk belum tercapai	Masih lamanya rata-rata waktu penyelesaian KTP	a. Proses pencetakan dan distribusi KTP masih tersentralisasi. b. Keterbatasan jumlah perangkat cetak dan petugas di daerah. c. Belum optimalnya sistem antrean dan pengendalian antrian pelayanan.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kemandirian desa belum optimal	Belum optimalnya klasifikasi desa kategori swasembada	a. Ketergantungan desa terhadap dana transfer pemerintah masih tinggi. b. Kapasitas kelembagaan desa belum kuat. c. Belum maksimalnya peran BUMDes dalam mendukung ekonomi desa.
	Kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan belum memadai	Kurangnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kerjasama desa	a. Minimnya pelatihan teknis dan manajerial bagi aparatur desa. b. Lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan antar desa. c. Kurangnya pendampingan dalam penyusunan kerja sama antar desa.
	Akses informasi dan komunikasi desa masih terbatas	Minimnya akses informasi dan komunikasi Masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat	a. Infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet di desa belum merata. b. Rendahnya literasi digital masyarakat desa. c. Kurangnya kerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan akses digital di perdesaan.
	Lembaga ekonomi masyarakat desa belum berkembang	Berkurangnya lembaga ekonomi yang Aktif	a. Banyaknya lembaga ekonomi mikro yang tidak aktif akibat manajemen lemah. b. Kurangnya pendampingan dari dinas teknis terkait. c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelembagaan ekonomi kolektif.
	Pembinaan dan pendampingan masyarakat belum merata	Minimnya pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan kemandirian masyarakat	a. Terbatasnya tenaga pendamping masyarakat di tingkat desa. b. Anggaran pemberdayaan belum proporsional antarwilayah. c. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pendamping lokal desa.

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pengelolaan dana desa belum efektif dan transparan	Masih belum efektifnya penggunaan dana bantuan keuangan desa	a. Kapasitas pengelolaan keuangan desa belum memadai. b. Minimnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan desa. c. Pengawasan dari pemerintah daerah belum optimal.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemahaman masyarakat terhadap program KB masih rendah	Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana menyebabkan tingginya TFR	Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana menyebabkan tingginya TFR
	Cakupan peserta KB aktif belum optimal	Masih rendahnya prevalensi peserta KB aktif	Masih rendahnya prevalensi peserta KB aktif
	Rasio petugas lapangan KB belum ideal	Belum optimalnya rasio petugas lapangan KB/PKB	Belum optimalnya rasio petugas lapangan KB/PKB
Perhubungan	Sarana dan prasarana transportasi belum memadai	Masih rendahnya rasio sarana prasarana perhubungan yang ada dalam kondisi baik	a. Umur teknis sarana transportasi banyak yang sudah melewati batas usia pakai. b. Keterbatasan anggaran untuk perawatan dan pengadaan sarana baru. c. Kurangnya kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pengembangan transportasi umum.
	Minat masyarakat terhadap transportasi umum menurun	Jumlah penumpang dan angkutan darat semakin menurun	a. Rendahnya kenyamanan dan ketepatan waktu layanan transportasi umum. b. Peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi. c. Kurangnya promosi dan integrasi antar moda transportasi.
	Keselamatan transportasi belum optimal	Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas	a. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah. b. Pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas belum konsisten.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			c. Keterbatasan sarana keselamatan di titik rawan kecelakaan.
Komunikasi dan Informasi	Sistem pemerintahan berbasis elektronik belum terintegrasi	Belum optimalnya penggunaan aplikasi <i>e-Government</i> yang terintegrasi	a. Aplikasi antarperangkat daerah belum saling terhubung. b. Infrastruktur jaringan dan server masih terbatas. c. Keterbatasan SDM pengelola sistem aplikasi digital.
	Implementasi SPBE belum maksimal	Implementasi SPBE belum optimal	a. Belum adanya standar implementasi SPBE di semua OPD. b. Rendahnya literasi digital ASN. c. Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas SPBE.
	Pemanfaatan TIK masyarakat belum optimal	Belum optimalnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang mengaplikasikan TIK dalam aktivitasnya	a. Minimnya pelatihan dan pendampingan KIM dalam penggunaan teknologi informasi. b. Infrastruktur jaringan internet di desa belum merata. c. Kurangnya dukungan kolaborasi pemerintah daerah dengan komunitas digital.
	Pelayanan digital publik belum memuaskan	Masih rendahnya IKM terhadap pelayanan digital masyarakat	a. Akses layanan publik digital belum mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. b. Minimnya sosialisasi penggunaan layanan digital pemerintah. c. Belum optimalnya integrasi layanan digital lintas sektor.
	Pengelolaan data sektoral belum terpadu	Belum optimalnya tata kelola statistik sektoral Skala Kabupaten/Kota	a. Koordinasi antarperangkat daerah dalam penyediaan data belum efektif. b. Kualitas dan validitas data belum seragam antarinstansi. c. Belum adanya pusat data daerah yang terintegrasi.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kapasitas SDM pengelola teknologi informasi masih rendah	Masih rendahnya kapabilitas SDM aparatur dalam mengoperasikan internet	a. Kurangnya pelatihan teknis penggunaan TIK bagi ASN daerah. b. Minimnya regenerasi SDM digital di pemerintahan daerah. c. Infrastruktur pelatihan dan sertifikasi digital ASN masih terbatas.
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Diversifikasi produk dan usaha kecil belum berkembang	Kurangnya variasi jenis usaha	a. Minimnya inovasi dan diversifikasi produk usaha kecil. b. Kurangnya pendampingan kewirausahaan berbasis potensi lokal. c. Terbatasnya akses terhadap pelatihan dan pembiayaan usaha baru.
	Pertumbuhan usaha mikro belum signifikan	Usaha mikro tidak mengalami kenaikan omset dan aset	a. Daya saing produk usaha mikro masih rendah. b. Terbatasnya akses pasar dan promosi produk lokal. c. Minimnya dukungan teknologi dalam pengembangan usaha mikro.
	Tata kelola kelembagaan koperasi belum optimal	Adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT disebabkan Tingkat kesadaran SDM KSP/USP koperasi yang rendah terhadap penilaian kesehatan koperasi	a. Kesadaran anggota koperasi terhadap prinsip tata kelola koperasi masih rendah. b. Kurangnya pendampingan dan pembinaan dari dinas terkait. c. Keterbatasan SDM koperasi dalam manajemen keuangan dan administrasi.
	Basis data UMKM belum mutakhir	Belum tersedianya data usaha mikro yang up to date dan akurat	a. Belum terbangunnya sistem pendataan terpadu untuk UMKM daerah. b. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pemutakhiran data.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			c. Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan perkembangan usaha.
	Kelembagaan koperasi belum efektif	Kelembagaan koperasi belum optimal	a. Struktur organisasi koperasi belum berjalan sesuai AD/ART. b. Keterbatasan SDM pengurus koperasi. c. Kurangnya pelatihan manajemen kelembagaan koperasi.
	Transformasi usaha mikro menjadi kecil belum maksimal	Belum optimalnya jumlah usaha mikro yang mengalami perubahan status menjadi kecil karena standarisasi produk yang masih kurang	a. Belum adanya sistem pembinaan berkelanjutan bagi usaha mikro. b. Kurangnya fasilitas sertifikasi dan standardisasi produk. c. Minimnya sinergi antara pembina usaha mikro dan pelaku pasar modern.
	Keberlangsungan usaha mikro dan kecil belum terjaga	Menurunnya jumlah usah mikro dan kecil	a. Daya tahan usaha terhadap fluktuasi ekonomi masih lemah. b. Keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan usaha. c. Rendahnya regenerasi pelaku usaha muda.
Penanaman Modal	Penyerapan tenaga kerja dari sektor investasi belum maksimal	Belum optimalnya rasio daya serap tenaga kerja karena Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem OSS	a. Rendahnya literasi pelaku usaha terhadap sistem OSS. b. Kurangnya pendampingan teknis bagi calon investor lokal. c. Belum optimalnya promosi kemudahan berusaha.
	Proses pelayanan investasi belum efisien	Integrasi aplikasi perizinan yang masih belum lancar	a. Sistem perizinan masih terpisah antar perangkat daerah. b. Infrastruktur jaringan dan server OSS belum stabil. c. Keterbatasan SDM operator perizinan.
	Efektivitas pelayanan perizinan belum optimal	Proses pelayanan penanaman modal masih kurang efektif	a. Prosedur pelayanan perizinan masih panjang dan manual. b. Kurangnya koordinasi antara dinas teknis dengan DPMPSTP. c. Monitoring perizinan belum berbasis digital.

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Promosi dan sosialisasi investasi belum menarik	Sosialisasi, Informasi, dan promosi penanaman modal masih kurang, media promosi yang masih kurang (kurang menarik)	a. Kegiatan promosi investasi belum terencana secara strategis. b. Minimnya kerja sama promosi dengan investor dan media nasional. c. Belum optimalnya pemanfaatan kanal digital untuk promosi investasi.
	Validasi data dan akses informasi investasi belum terintegrasi	Belum optimalnya investor karena validitas dan akses data investasi terkait dengan OSS kurang optimal	a. Belum sinkronnya data perizinan antara OSS dengan database daerah. b. Kurangnya pembaruan data investasi secara real time. c. Lemahnya sistem evaluasi kinerja investasi.
Kepemudaan dan Olahraga	Prestasi olahraga daerah belum meningkat signifikan	Minimnya prestasi pemuda di tingkat Provinsi dan Nasional	a. Pembinaan atlet berprestasi belum berkelanjutan. b. Fasilitas latihan belum memadai. c. Kurangnya tenaga pelatih profesional di berbagai cabang olahraga.
	Partisipasi atlet daerah di ajang nasional masih rendah	Minimnya Prestasi atlet, Sedikitnya atlet yang dapat mengikuti event multi event tingkat provinsi maupun nasional	a. Seleksi dan regenerasi atlet belum sistematis. b. Keterbatasan anggaran pembinaan olahraga. c. Minimnya kompetisi lokal untuk menjaring atlet berbakat.
	Penjaringan atlet berbakat usia dini belum optimal	Kurangnya event penjaringan atlet berbakat usia dini (<17 th)	a. Kurangnya kerja sama antara sekolah dan KONI dalam penjaringan atlet muda. b. Minimnya turnamen olahraga pelajar tingkat kabupaten. c. Keterbatasan sarana olahraga di sekolah.
	Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan olahraga menurun	Menurunnya persentase lapangan olahraga per jumlah penduduk	a. Kurangnya program olahraga masyarakat yang rutin. b. Fasilitas olahraga umum belum tersebar merata. c. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Organisasi kepemudaan belum berdaya	Organisasi kepemudaan bersifat pasif	a. Kelembagaan organisasi kepemudaan belum kuat dan berjejaring. b. Kurangnya pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan bagi pemuda. c. Dukungan pembinaan dari pemerintah masih terbatas.
	Pembinaan prestasi olahraga daerah belum optimal	Rendahnya sarana-prasaran penunjang bidang olahraga	a. Infrastruktur olahraga banyak yang rusak atau belum memenuhi standar nasional. b. Keterbatasan anggaran pemeliharaan fasilitas olahraga. c. Kurangnya koordinasi antara KONI dan dinas terkait dalam pengelolaan sarana olahraga.
Statistik	Kualitas dan integrasi data sektoral belum optimal	Data statistik sektoral yang diperoleh dari Perangkat Daerah masih belum terjamin kevalidan datanya dan belum terintegrasi	a. Belum adanya sistem integrasi data lintas perangkat daerah. b. Perangkat daerah belum memiliki standar verifikasi dan validasi data. c. Keterbatasan SDM pengelola data di masing-masing OPD.
	Standarisasi metodologi statistik belum seragam	Data belum konsisten karena adanya perbedaan konsep dan metodologi. Mekanisme pengumpulan data statistik sektoral menggunakan metode yang tidak baku	a. Belum diterapkannya pedoman baku pengumpulan data daerah. b. Perbedaan persepsi antarperangkat daerah dalam penyusunan indikator statistik. c. Kurangnya koordinasi teknis antara BPS dan perangkat daerah.
Persandian	Sistem keamanan informasi pemerintahan daerah belum berjalan optimal	Masih rendahnya operasionalisasi sandi pemerintah daerah	a. Infrastruktur keamanan informasi masih terbatas. b. SDM pengelola sistem sandi belum tersertifikasi. c. Kurangnya monitoring keamanan siber secara berkala.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pelayanan keamanan informasi digital belum maksimal	Penyediaan pelayanan keamanan informasi masih rendah	a. Anggaran penguatan sistem keamanan siber masih terbatas. b. Belum adanya kebijakan perlindungan data pemerintah daerah yang menyeluruh. c. Rendahnya kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya keamanan data.
Kebudayaan	Nilai budaya lokal mulai tergerus modernisasi	Terkikisnya nilai nilai luhur budaya dan kearifan lokal di masyarakat Kabupaten Ngawi	a. Globalisasi dan kemajuan teknologi memengaruhi pola hidup masyarakat. b. Minimnya kegiatan pelestarian budaya daerah di tingkat desa/kelurahan. c. Kurangnya peran lembaga adat dan tokoh budaya.
	Pelestarian kebudayaan belum berjalan optimal	Pelestarian Kebudayaan yang menurun dan tidak optimal	a. Anggaran kegiatan pelestarian budaya masih terbatas. b. Kurangnya dokumentasi dan digitalisasi budaya lokal. c. Minimnya sinergi antarinstitusi kebudayaan dan pendidikan.
	Adaptasi pelaku seni terhadap kemajuan teknologi belum maksimal	Masih adanya pelaku seni yang enggan beradaptasi dengan kemajuan teknologi	a. Minimnya literasi digital di kalangan pelaku seni dan budaya. b. Keterbatasan fasilitas pelatihan adaptasi teknologi bagi pelaku budaya. c. Kurangnya platform pemasaran digital untuk karya budaya lokal.
	Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan budaya menurun	Minimnya minat masyarakat dalam pelestarian budaya	a. Rendahnya kesadaran generasi muda terhadap pentingnya budaya daerah. b. Kegiatan promosi dan edukasi budaya kurang masif. c. Keterbatasan ruang kreatif dan festival budaya di tingkat kabupaten.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perpustakaan	Kualitas layanan perpustakaan belum merata	Belum maksimalnya kualitas perpustakaan baik perpustakaan sekolah, perpustakaan desa sehingga masih banyak yang belum ber-SNP	a. Fasilitas perpustakaan belum memenuhi standar nasional. b. Kurangnya tenaga pustakawan profesional di tingkat desa/sekolah. c. Belum optimalnya pembinaan dan monitoring perpustakaan desa.
	Ketersediaan fasilitas perpustakaan belum mencukupi	Ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan yang kurang representatif	a. Anggaran pembangunan dan perawatan gedung perpustakaan masih terbatas. b. Koleksi buku dan bahan pustaka belum terdiversifikasi. c. Kurangnya inovasi layanan berbasis digital.
	Pelestarian koleksi naskah kuno belum optimal	Rendahnya pelestarian koleksi naskah kuno	a. Belum adanya sistem konservasi dan restorasi dokumen kuno yang modern. b. Minimnya tenaga ahli konservasi naskah daerah. c. Kurangnya kerja sama dengan lembaga kebudayaan dan universitas.
	Koleksi budaya etnis daerah belum lengkap	Masih rendahnya koleksi budaya etnis nusantara	a. Dokumentasi koleksi budaya etnis belum terintegrasi antar lembaga. b. Kurangnya kegiatan riset dan pengumpulan bahan pustaka budaya. c. Terbatasnya ruang pameran literasi budaya di daerah.
Kearsipan	Penerapan sistem arsip belum seragam di seluruh perangkat daerah	Menurunnya jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku disebabkan rendahnya kualitas arsiparis	a. SDM arsiparis masih terbatas dan belum tersertifikasi. b. Sistem pengarsipan manual masih dominan. c. Kurangnya pelatihan pengelolaan arsip elektronik.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kualitas penyelenggaraan arsip belum memadai	Masih rendahnya Perangkat Daerah yang menyelenggarakan arsip secara baku	a. Belum ada kebijakan daerah yang mewajibkan digitalisasi arsip. b. Kurangnya infrastruktur penyimpanan arsip daerah. c. Belum optimalnya fungsi pengawasan oleh lembaga kearsipan.
	Keamanan arsip daerah belum terjamin	Masih rendahnya arsip yang terjamin keamanannya	a. Belum adanya sistem keamanan arsip digital berbasis enkripsi. b. Lemahnya tata kelola backup dan pemulihan data arsip. c. Kurangnya kesadaran perangkat daerah akan pentingnya keamanan dokumen publik.
Perikanan dan Kelautan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat masih rendah	Kurangnya masyarakat untuk konsumsi ikan	a. Sosialisasi gemar makan ikan belum merata. b. Persepsi masyarakat terhadap harga ikan masih tinggi. c. Distribusi ikan segar belum merata antarwilayah.
	Produksi perikanan tangkap belum optimal	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas produksi perikanan tangkap	a. Alat tangkap nelayan tradisional masih sederhana. b. Modal usaha nelayan kecil masih terbatas. c. Cuaca ekstrem memengaruhi hasil tangkapan.
	Akses pembiayaan dan modal pelaku usaha perikanan rendah	Akses permodalan belum optimal	a. Persyaratan kredit usaha perikanan belum ramah bagi nelayan kecil. b. Minimnya lembaga keuangan mikro sektor kelautan. c. Kurangnya sosialisasi program bantuan modal usaha perikanan.
	Pengelolaan sumber daya perairan darat belum maksimal	Sumber daya ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) semakin berkurang	a. Pencemaran air di perairan umum meningkat. b. Penangkapan ikan belum memperhatikan prinsip berkelanjutan.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			c. Pengawasan terhadap kegiatan penangkapan belum ketat.
	Produktivitas perikanan budidaya belum optimal	Produktifitas Perikanan Budidaya belum optimal	a. Kualitas benih dan pakan belum memenuhi standar. b. Kurangnya pelatihan teknis budidaya modern. c. Infrastruktur pendukung (saluran air, listrik, dan irigasi) belum memadai.
Pariwisata	Daya tarik dan promosi pariwisata belum optimal	Masih rendahnya destinasi wisata yang berkembang dan promosi wisata yang masih rendah	a. Promosi destinasi wisata belum terintegrasi secara digital. b. Aksesibilitas dan infrastruktur pendukung wisata belum memadai. c. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengembangan wisata belum kuat.
	Kapasitas SDM sektor pariwisata masih terbatas	Kurangnya kemampuan SDM dalam pengelolaan usaha wisata	a. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja pariwisata belum rutin dilakukan. b. Minimnya lembaga pendidikan vokasi pariwisata di daerah. c. Belum terbentuknya sistem pembinaan SDM wisata berbasis kompetensi.
	Infrastruktur wisata belum memadai	Minimnya ketersediaan akomodasi wisata	a. Investasi sektor perhotelan dan homestay masih rendah. b. Pengembangan amenities wisata belum berbasis kebutuhan wisatawan. c. Keterbatasan fasilitas umum di sekitar destinasi wisata.
	Potensi wisata desa belum tergarap maksimal	Belum optimalnya pengembangan desa wisata	a. Desa wisata belum memiliki kelembagaan pengelola yang kuat. b. Kurangnya pendampingan pemerintah terhadap pengelolaan wisata berbasis masyarakat.

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			c. Akses ke lokasi wisata desa masih terbatas.
Ekonomi Kreatif	Sarana pendukung kegiatan ekonomi kreatif belum memadai	Minimnya sarana prasarana untuk menunjang kegiatan ekonomi kreatif	a. Ruang kreatif dan inkubasi bisnis kreatif belum tersedia di daerah. b. Minimnya kolaborasi antara komunitas kreatif dan pemerintah. c. Kurangnya dukungan infrastruktur teknologi informasi.
	Promosi produk kreatif daerah masih lemah	Masih minimnya media promosi	a. Promosi digital ekonomi kreatif belum masif. b. Terbatasnya kerja sama dengan marketplace nasional. c. Minimnya kegiatan pameran dan festival kreatif tahunan.
Pertanian	Infrastruktur irigasi pertanian belum memadai	Kurangnya ketersediaan air untuk irigrasi pertanian	a. Banyak jaringan irigasi yang rusak atau tidak berfungsi optimal. b. Perubahan tata guna lahan mengurangi sumber air pertanian. c. Keterbatasan anggaran rehabilitasi irigasi pertanian.
	Pemanfaatan teknologi pertanian masih rendah	Kurangnya pemanfaatan teknologi di bidang pertanian	a. Minimnya pelatihan penggunaan alat dan mesin pertanian modern. b. Kurangnya fasilitas percontohan teknologi pertanian. c. Rendahnya minat petani muda dalam inovasi pertanian.
	Produktivitas pertanian belum optimal	Belum optimalnya produktivitas pertanian	a. Kualitas benih dan pupuk belum sesuai standar. b. Pola tanam belum disesuaikan dengan kondisi lahan. c. Dukungan penyuluh lapangan belum merata.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Intensifikasi lahan pertanian belum maksimal	Belum optimalnya intensifikasi pertanian	a. Lahan pertanian banyak yang tidak tergarap maksimal. b. Keterbatasan sarana produksi seperti alat pertanian. c. Minimnya penerapan sistem pertanian berkelanjutan.
	Produksi hasil pertanian menurun	Menurunnya capaian produksi pertanian	a. Perubahan iklim memengaruhi pola tanam. b. Hama dan penyakit tanaman meningkat. c. Biaya produksi pertanian semakin tinggi.
	Nilai tambah hasil pertanian rendah	Nilai tambah produksi pertanian masih kurang	a. Minimnya pengolahan pascapanen di tingkat petani. b. Akses pasar produk pertanian olahan masih terbatas. c. Lemahnya kelembagaan petani dalam rantai pasok.
		Menurunnya capaian produksi pertanian	
	Alih fungsi lahan pertanian masih terjadi	Penyusutan lahan produktif pertanian diakibatkan alih fungsi lahan untuk pemukiman, tol, dan industri	a. Lemahnya pengawasan terhadap lahan pertanian produktif. b. Peningkatan nilai jual tanah untuk nonpertanian. c. Belum efektifnya penerapan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).
Perindustrian	Regenerasi dan pembinaan industri baru belum optimal	Penurunan jumlah industri baru disebabkan oleh faktor jumlah pelatihan yang berkurang	a. Anggaran pelatihan tenaga kerja industri masih terbatas. b. Minimnya pelatihan kewirausahaan industri bagi masyarakat. c. Kurangnya kerja sama pemerintah dengan sektor swasta dalam pembinaan industri.
	Pengembangan sentra industri belum efektif	Pengembangan sentra industri belum maksimal	a. Infrastruktur kawasan industri belum memadai. b. Keterbatasan akses bahan baku dan energi di sentra industri. c. Minimnya promosi dan kerja sama antar pelaku industri lokal.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Adaptasi teknologi industri kecil dan menengah belum optimal	UKM belum memaksimalkan informasi dan teknologi	a. Rendahnya literasi digital pelaku UKM. b. Kurangnya fasilitas inkubator industri kecil berbasis teknologi. c. Belum adanya insentif bagi UKM yang menerapkan inovasi teknologi.
	Legalitas dan perizinan industri belum tuntas	Legalisasi izin usaha yang masih rendah	a. Prosedur perizinan industri masih dianggap rumit oleh pelaku usaha. b. Sosialisasi OSS belum menjangkau seluruh pelaku industri kecil. c. Kurangnya pendampingan bagi pelaku industri mikro dalam pengurusan izin.
	Perlindungan tenaga kerja industri belum maksimal	Belum maksimalnya pekerja/buruh yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan	a. Pengawasan ketenagakerjaan belum intensif. b. Kurangnya kesadaran pelaku industri terhadap penerapan K3. c. Minimnya koordinasi antara dinas tenaga kerja dan dinas perindustrian.
Perdagangan	Distribusi dan pemasaran produk lokal belum optimal	Belum maksimalnya distribusi/pemasaran produk lokal Ngawi	a. Rantai distribusi produk lokal belum terintegrasi. b. Minimnya kerja sama dengan retail modern dan e-commerce. c. Kurangnya promosi produk unggulan daerah.
	Pengembangan produk unggulan daerah belum signifikan	Produk ekspor belum berkembang	a. Kualitas produk belum memenuhi standar ekspor. b. Minimnya dukungan fasilitas sertifikasi dan pengemasan. c. Kurangnya akses informasi pasar luar negeri.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kelembagaan pelaku usaha perdagangan belum kuat	Belum adanya fasilitasi dari pemerintah untuk pembentukan asosiasi eksportir	a. Lemahnya koordinasi antar pelaku usaha perdagangan. b. Minimnya wadah komunikasi antara eksportir dan pemerintah daerah. c. Kurangnya program pembinaan asosiasi ekspor lokal.
	Cinta produk dalam negeri belum mengakar	Penggunaan produk dalam negeri masih kurang	a. Rendahnya kampanye penggunaan produk lokal di masyarakat. b. Harga dan kualitas produk lokal belum kompetitif. c. Minimnya kebijakan afirmatif penggunaan produk daerah di sektor publik.
	Pembinaan pedagang informal belum merata	Masih rendahnya pengawasan mutu dagang PKL dan asongan disebabkan oleh faktor data PKL masih mencakup kota saja	a. Pendataan pedagang kaki lima belum komprehensif. b. Pengawasan dan penertiban PKL masih bersifat reaktif. c. Kurangnya pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi PKL.
Transmigrasi	Koordinasi lintas sektor dalam pengembangan transmigrasi belum efektif	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama pembangunan transmigrasi	a. Belum terbangunnya forum koordinasi antar lembaga terkait transmigrasi. b. Keterbatasan anggaran untuk program pemberdayaan transmigran. c. Kurangnya pendampingan pasca penempatan transmigran.
	Pengetahuan masyarakat terhadap transmigrasi rendah	Masih rendahnya pengetahuan transmigrasi lokal	a. Sosialisasi program transmigrasi belum menyeluruh hingga desa. b. Persepsi masyarakat masih negatif terhadap transmigrasi. c. Kurangnya insentif dan jaminan bagi calon transmigran.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perencanaan	Penggunaan indikator kinerja belum akurat	Penggunaan indikator kinerja belum sepenuhnya mencerminkan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan konsep Kinerja Berjenjang	a. Belum optimalnya sinkronisasi indikator antar dokumen perencanaan. b. SDM perencana belum terlatih dalam penyusunan indikator kinerja logis. c. Kurangnya evaluasi periodik atas indikator kinerja daerah.
	Sistem perencanaan daerah belum terintegrasi	Belum optimalnya pengelolaan Satu Data Kabupaten Ngawi	a. Belum adanya sistem integrasi data antarperangkat daerah. b. Data sektoral belum diperbarui secara periodik. c. Belum ada regulasi teknis tentang manajemen data perencanaan daerah.
	Kapasitas perencana perangkat daerah masih terbatas	Minimnya pemahaman internal Perangkat Daerah terkait penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja yang baik	a. Kurangnya pelatihan teknis dan bimbingan penyusunan dokumen perencanaan. b. Rotasi pegawai menyebabkan ketidakkonsistenan perencana di OPD. c. Kurangnya supervisi dan review dari Bappeda.
	Konsistensi dokumen perencanaan antar perangkat daerah belum terjaga	Belum optimalnya konsistensi antara Dokumen Perencanaan Daerah dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	a. Penyusunan dokumen tidak berpedoman pada RPJMD secara penuh. b. Kurangnya monitoring dan asistensi oleh Bappeda. c. Keterbatasan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
	Pelaksanaan program prioritas belum sesuai target	Pelaksanaan Progran Prioritas Daerah yang belum optimal sesuai Dokumen Perencanaan Daerah karena kendala Kemampuan Keuangan Daerah	a. Keterbatasan fiskal daerah untuk mendanai prioritas strategis. b. Banyaknya kegiatan nonprioritas yang masih dianggarkan. c. Kurangnya koordinasi antara perencana dan pengelola anggaran.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Keuangan	Kapasitas perencana anggaran perangkat daerah masih rendah	Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam memahami peraturan perundang-undangan yang baru tentang penyusunan anggaran daerah	a. SDM keuangan daerah belum mendapatkan pelatihan reguler tentang kebijakan fiskal baru. b. Seringnya perubahan regulasi menyebabkan keterlambatan adaptasi. c. Kurangnya koordinasi antara BPKAD dan OPD teknis dalam penyusunan RKA.
	Sistem informasi keuangan daerah belum sepenuhnya terintegrasi	Aplikasi Pengelolaan Keuangan (SP2D dengan Bank, SISMIOP di kecamatan) belum terlaksana secara online	a. Jaringan internet dan infrastruktur sistem keuangan masih terbatas. b. Integrasi antar aplikasi masih manual dan terpisah. c. Kurangnya tenaga operator sistem informasi keuangan di OPD.
	Pengelolaan aset daerah belum tertib administrasi	Penyampaian laporan BMD yang tidak tepat waktu	a. Belum tertibnya penatausahaan aset di beberapa OPD. b. Kurangnya SDM pengelola barang milik daerah. c. Belum maksimalnya sistem pelaporan aset berbasis elektronik.
Kepegawaian	Penataan dan manajemen ASN belum optimal	Kualitas penataan ASN yang tidak sesuai Standar	a. Belum seluruh perangkat daerah melaksanakan analisis jabatan dan beban kerja secara komprehensif. b. Kurangnya pengawasan pelaksanaan penataan ASN oleh BKPSDM. c. Masih terdapat ASN yang tidak sesuai dengan formasi jabatan.
	Kompetensi dan kualifikasi ASN belum sesuai kebutuhan jabatan	ASN yang tersedia tidak sesuai kompetensi dan kualifikasi kebutuhan jabatan	a. Pemetaan kompetensi ASN belum diperbarui secara berkala. b. Kurangnya pelatihan berbasis kebutuhan jabatan. c. Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi ASN.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Sistem pengembangan karier ASN belum berjalan optimal	Belum optimalnya PNS mengikuti uji kompetensi	a. Belum adanya jadwal rutin pelaksanaan uji kompetensi jabatan. b. Kurangnya minat ASN dalam mengikuti uji kompetensi. c. Belum terintegrasinya hasil uji kompetensi dengan promosi jabatan.
	Disiplin ASN masih perlu ditingkatkan	Masih adanya pelanggaran disiplin ASN	a. Kurangnya sosialisasi peraturan kedisiplinan ASN. b. Sistem penegakan sanksi belum tegas dan konsisten. c. Pengawasan internal masih bersifat administratif.
	Akurasi data kepegawaian belum maksimal	Ketidakkuratan data kepegawaian terutama PNS yang telah mengikuti diklat	a. Belum terintegrasinya data kepegawaian antar instansi. b. Belum ada sistem pembaruan data kepegawaian berbasis elektronik yang real-time. c. Kurangnya koordinasi antar unit pengelola data kepegawaian.
Penelitian dan Pengembangan	Pemanfaatan hasil penelitian belum terintegrasi dalam perencanaan	Belum optimalnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi Bahan Perencanaan Pembangunan	a. Hasil penelitian belum tersampaikan ke OPD perencanaan secara efektif. b. Kurangnya kolaborasi antara peneliti dan perencanaan daerah. c. Belum ada mekanisme integrasi hasil riset ke dalam dokumen perencanaan.
	Agenda penelitian daerah belum terarah	Masih minimnya agenda-agenda penelitian dan pengembangan yang menunjang pembangunan daerah	a. Belum tersusunnya roadmap penelitian daerah berbasis isu strategis. b. Keterbatasan dana riset daerah. c. Kurangnya koordinasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kajian penelitian pada urusan perangkat daerah belum optimal	Belum optimalnya kajian penelitian yang berada pada setiap urusan di Perangkat Daerah	a. Tidak semua OPD memiliki SDM yang mampu melakukan kajian berbasis data. b. Belum ada panduan metodologi penelitian terapan untuk OPD. c. Kegiatan penelitian masih bersifat ad hoc.
Pengawasan	Evaluasi internal pemerintah daerah belum berjalan efektif	Belum optimalnya evaluasi internal secara berkala	a. Mekanisme evaluasi internal belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. b. SDM auditor internal masih terbatas dan belum tersertifikasi. c. Laporan hasil evaluasi belum dimanfaatkan secara optimal dalam perbaikan kinerja OPD.
	Pengawasan internal pemerintah belum optimal	Perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah Kabupaten Ngawi belum memberikan kinerja secara optimal	a. Pengawasan internal masih berfokus pada kepatuhan administrasi, belum pada kinerja. b. Koordinasi antara APIP dan Bappeda belum optimal. c. Sistem monev berbasis hasil belum diterapkan secara konsisten.
	Sistem pengendalian intern belum berjalan efektif	Belum tercapainya pemerintahan yang bersih melalui pendekatan SPIP	a. Pemahaman perangkat daerah terhadap SPIP masih rendah. b. Keterbatasan auditor internal yang tersertifikasi. c. Belum semua perangkat daerah mengimplementasikan SPIP secara utuh.
	Pengelolaan keuangan daerah belum diawasi secara menyeluruh	Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum optimal	a. Pengawasan keuangan masih terfokus pada tahap akhir pelaksanaan anggaran. b. Kurangnya sinergi antara Inspektorat dan BPKAD. c. Minimnya penggunaan sistem audit berbasis risiko.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Ketersediaan auditor internal masih kurang	Jumlah APIP yang belum memadai	a. Rasio APIP terhadap jumlah OPD belum ideal. b. Belum ada rekrutmen auditor baru secara periodik. c. Beban kerja auditor tinggi karena terbatasnya SDM.
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum efektif	Mekanisme monev kinerja belum memperlihatkan hasil yang ingin dicapai	a. Belum adanya integrasi sistem monev antarperangkat daerah. b. Pengukuran hasil program belum berbasis indikator outcome. c. Kurangnya laporan umpan balik dari hasil evaluasi.
Sekretariat Daerah	Reformasi birokrasi belum berdampak signifikan pada peningkatan kinerja	Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi	a. Implementasi reformasi birokrasi belum menyeluruh pada semua aspek tata kelola. b. Budaya kerja birokratis masih kuat. c. Monitoring capaian RB belum dilakukan secara sistematis.
	Kualitas kebijakan daerah belum optimal	Data Capaian Indeks Reformasi Hukum belum mampu meningkatkan kualitas kebijakan daerah serta belum mewujudkan diregulasi peraturan perundang-undangan secara maksimal	a. Harmonisasi regulasi daerah masih lemah. b. Kurangnya evaluasi terhadap peraturan daerah yang tidak relevan. c. Belum adanya unit analisis kebijakan daerah yang aktif.
	Pelayanan publik belum terstandarisasi	Implementasi Standar Pelayanan Publik belum dilaksanakan secara maksimal	a. Belum semua perangkat daerah memiliki SOP pelayanan publik. b. Kurangnya pelatihan petugas pelayanan publik. c. Minimnya monitoring terhadap kepatuhan pelaksanaan SPM.
	Tata kelola dan fungsi koordinasi belum berjalan optimal	Masih tumpang tindihnya tugas fungsi dalam Perangkat Daerah sehingga kinerja belum maksimal	a. Struktur organisasi belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas fungsi koordinasi. b. Kurangnya sinkronisasi antar bagian sekretariat daerah.

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			c. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi manajemen kinerja.
Sekretariat DPRD	Peningkatan kapasitas dan peran DPRD belum optimal	Kurang optimalnya peningkatan kapasitas anggota DPRD	a. Program peningkatan kapasitas anggota DPRD belum berkelanjutan dan tematik. b. Keterbatasan fasilitasi pendidikan politik dan legislasi bagi anggota DPRD. c. Kurangnya kolaborasi antara sekretariat DPRD dan lembaga pelatihan pemerintahan.
	Fungsi pengawasan DPRD belum efektif	Ketidakefektifan mekanisme pengawasan	a. Mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan belum sistematis. b. Koordinasi antara alat kelengkapan DPRD dan OPD pelaksana masih lemah. c. Keterbatasan data dukung dan hasil kajian dalam proses pengawasan.
Kecamatan	Kinerja dan status pembangunan wilayah belum merata	Masih rendahnya status desa	a. Perbedaan kemampuan desa dalam mengelola potensi dan program pembangunan. b. Kurangnya pembinaan dan pendampingan dari kecamatan terhadap desa tertinggal. c. Keterbatasan akses terhadap program pemberdayaan masyarakat desa.
	Kompetensi aparatur desa belum memadai	Minimnya tingkat pemahaman SDM aparatur desa	a. Belum ada pelatihan teknis berkala untuk perangkat desa. b. Kualifikasi pendidikan perangkat desa masih rendah di beberapa wilayah. c. Kurangnya supervisi dan evaluasi kinerja aparatur desa oleh kecamatan.



Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Infrastruktur pendukung digital di wilayah pedesaan masih terbatas	Minimnya jaringan akses internet di wilayah desa	a. Cakupan jaringan internet belum menjangkau seluruh desa terutama di daerah perbatasan. b. Belum adanya program kerja sama dengan penyedia layanan jaringan untuk perluasan akses. c. Keterbatasan anggaran pemerintah desa untuk mendukung transformasi digital.
	Budaya kerja aparatur kecamatan dan desa belum optimal	Masih rendahnya budaya kinerja	a. Pengawasan terhadap disiplin kerja aparatur masih lemah. b. Motivasi dan insentif kinerja aparatur belum memadai. c. Kurangnya penerapan sistem penilaian kinerja berbasis hasil (performance-based).

Tahap selanjutnya, setelah identifikasi isu strategis yang telah ditentukan kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Isu strategis RPJMD tersebut telah dipetakan berdasarkan pilihan Tema Pembangunan Prioritas Kabupaten Ngawi, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan Kebijakan Prioritas dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2025-2029.

Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasar Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Ngawi berdasarkan Urusan Pembangunan Kabupaten Ngawi, kemudian dilakukan penapisan menggunakan kriteria tersebut di atas. Penapisan isu strategis dilakukan untuk menentukan isu yang paling strategis di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi dasar penentuan Kebijakan dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026. Apabila isu tersebut memiliki persentase pemenuhan keenam kriteria tersebut, maka isu tersebut merupakan yang paling strategis dibandingkan yang lain.

Pada tahapan pembobotan akan menghasilkan daftar pendek terhadap isu strategis terpilih yang mana berdasarkan penilaian tingkat prioritas. Proses pemilihan isu pembangunan ini diselenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertujuan



untuk penajaman terhadap isu-isu strategis dan upaya penapisan atau membuat daftar pendek dari isu strategis pembangunan terpilih. Proses penapisan isu pembangunan daftar panjang menjadi daftar pendek dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Verifikasi Daftar Panjang Isu Pembangunan

Verifikasi ini dimaksudkan untuk *cross-check* ulang identifikasi yang sudah tim temukan pada tahap penentuan isu strategis berdasar tema pembangunan prioritas dan urusan pembangunan daerah yang melibatkan pemangku kepentingan yang telah disepakati, sebagaimana yang tersaji pada tabel 4.2.

2. Penilaian Daftar Panjang (*Long list*)

Penilaian daftar panjang Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Ngawi berdasarkan Urusan Pembangunan Kabupaten Ngawi tersebut menggunakan metode rating. Metode rating yang akan dilakukan adalah dengan menilai tingkat pengaruh dari masing-masing isu terhadap kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria tersebut meliputi :

- 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
- 4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Metode penilaian rating menggunakan interval penilaian dari angka 1 hingga 10. Semakin tinggi penilaian yang diberikan dapat diartikan bahwa isu tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kriteria yang ditentukan. Nilai skala pengukuran terhadap kriteria dapat dilihat pada tabel berikut ini :





Tabel 2.57 Skala Penilaian Metode Rating

Level Pengaruh	Skala Penilaian (Range Scale)
Tidak Berpengaruh	1-2
Kurang Berpengaruh	3-4
Cukup Berpengaruh	5-6
Berpengaruh	7-8
Sangat Berpengaruh	9-10

Sumber : Diolah Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Ngawi

Berikut ini adalah tabel Pembobotan dengan metode rating yang dilakukan terhadap Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Ngawi :

Tabel 2.58 Pembobotan Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Ngawi

No	Rumusan Isu Strategis	Kriteria I (Urgensi)	Kriteria II (Dampak)	Kriteria III (Relevansi Visi/Misi)	Kriteria IV (Kemudahan Implementasi)	Kriteria V (Dukungan)	Kriteria VI (Keberlanjutan)	Total Skor	Urutan Prioritas	Urusan
1	Terwujudnya Kualitas Lingkungan yang Optimal dan Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian di Kabupaten Ngawi secara Berkelanjutan.	10	10	10	7	9	10	56	1	Pertanian & Lingkungan Hidup
2	Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan Sektor Pertanian serta Peningkatan Akses Sumber Daya di Kabupaten Ngawi.	9	9	10	7	9	10	54	2	Pertanian
3	Terjaminnya Ketahanan Pangan, Ketersediaan Pangan, dan Peningkatan Kualitas Konsumsi Masyarakat di Kabupaten Ngawi.	9	9	9	7	8	9	51	3	Pangan
4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Optimalisasi Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Komprehensif di Kabupaten Ngawi.	9	9	8	7	8	9	50	4	Kesehatan
5	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Pendidikan, Kesehatan, dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat.	9	9	8	7	8	9	50	4	Pendidikan, Kesehatan, Sosial

No	Rumusan Isu Strategis	Kriteria I (Urgensi)	Kriteria II (Dampak)	Kriteria III (Relevansi Visi/Misi)	Kriteria IV (Kemudahan Implementasi)	Kriteria V (Dukungan)	Kriteria VI (Keberlanjutan)	Total Skor	Urutan Prioritas	Urusan
6	Optimalisasi Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Ngawi.	8	9	8	7	8	9	49	6	Koperasi & UMKM
7	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Perikanan Tangkap dan Budidaya serta Peningkatan Minat Konsumsi Ikan di Kabupaten Ngawi.	8	8	9	7	8	9	49	6	Perikanan dan Kelautan
8	Optimalisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ngawi.	9	9	8	6	8	8	48	8	Sosial
9	Optimalisasi Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa, serta Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa di Kabupaten Ngawi.	8	9	8	7	8	8	48	8	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Terwujudnya Kualitas Hidup, Perlindungan, dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan di Kabupaten Ngawi.	8	9	8	6	8	8	47	10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rumusan Isu Strategis	Kriteria I (Urgensi)	Kriteria II (Dampak)	Kriteria III (Relevansi Visi/Misi)	Kriteria IV (Kemudahan Implementasi)	Kriteria V (Dukungan)	Kriteria VI (Keberlanjutan)	Total Skor	Urutan Prioritas	Urusan
11	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terintegrasi, Akurat, dan Aksesibel di Kabupaten Ngawi.	8	8	7	7	8	8	46	11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Peningkatan Pengembangan Pariwisata dan Daya Saing Destinasi di Kabupaten Ngawi.	8	8	8	6	8	8	46	11	Pariwisata
13	Optimalisasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pengelolaan Informasi Daerah yang Terintegrasi di Kabupaten Ngawi.	7	8	7	6	7	8	43	13	Komunikasi dan Informatika
14	Optimalisasi Hubungan Industrial dan Peningkatan Perlindungan Ketenagakerjaan di Kabupaten Ngawi.	8	8	7	6	7	7	43	13	Tenaga Kerja
15	Optimalisasi Pengembangan Potensi Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Ngawi.	7	8	7	6	7	7	42	15	Kepemudaan dan Olahraga
16	Optimalisasi Kualitas Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur di Tingkat Kecamatan.	7	7	6	6	7	7	40	16	Kecamatan

No	Rumusan Isu Strategis	Kriteria I (Urgensi)	Kriteria II (Dampak)	Kriteria III (Relevansi Visi/Misi)	Kriteria IV (Kemudahan Implementasi)	Kriteria V (Dukungan)	Kriteria VI (Keberlanjutan)	Total Skor	Urutan Prioritas	Urusan
17	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peningkatan Kualitas Aset Daerah.	7	8	7	7	8	8	45	12	Pengelolaan Keuangan Daerah
18	Terwujudnya Infrastruktur Irigasi dan Drainase yang Berkualitas dan Berkelanjutan.	8	9	8	6	8	8	47	10	Infrastruktur

Keterangan Kriteria :

- I = Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- II = Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- III = Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
- IV = Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- V = Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- VI = Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Adapun setelah dilakukan pembobotan setiap poin Daftar Panjang Isu Strategis, terpilihlah Isu Strategis Pilihan Prioritas yang memiliki nilai pembobotan tertinggi dilihat dari enam kriteria yang sudah ada yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu kunci utama dalam pembangunan suatu negara, karena SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu pendekatan yang sangat penting adalah melalui perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peningkatan standar hidup yang lebih baik.

Akses pendidikan yang lebih luas menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas SDM. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Hal ini mencakup pendidikan dasar yang harus dijangkau oleh seluruh anak di Indonesia, tanpa terkecuali. Selain itu, akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi juga sangat penting untuk mempersiapkan generasi muda agar dapat bersaing di dunia kerja global. Pemerintah harus memastikan bahwa kualitas pendidikan tidak terbatas pada kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil. Selain itu, program pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja juga sangat dibutuhkan untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dan siap pakai.

Layanan kesehatan yang lebih baik juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Akses yang lebih mudah dan merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas harus dipastikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas dan klinik, serta rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

kesehatan preventif, seperti vaksinasi dan gaya hidup sehat, guna mengurangi angka penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kesehatan mental, yang seringkali terlupakan, juga harus menjadi perhatian serius dengan menyediakan akses layanan psikologis bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan kesehatan fisik dan mental yang terjaga, masyarakat akan lebih produktif dan mampu berkontribusi lebih baik dalam pembangunan negara.

Peningkatan standar hidup yang lebih baik merupakan faktor terakhir yang mendukung peningkatan kualitas SDM. Hal ini melibatkan penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat, seperti perumahan yang layak, akses terhadap air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang sehat. Standar hidup yang lebih baik juga terkait dengan peningkatan kesejahteraan sosial, yang dapat dicapai dengan menciptakan lapangan kerja yang layak, memberikan bantuan sosial bagi yang membutuhkan, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap fasilitas dasar yang dapat mendukung kehidupan mereka dengan lebih baik. Dengan adanya peningkatan ini, masyarakat akan lebih sejahtera dan memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi.

2. Penguatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian

Penguatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian merupakan strategi yang penting untuk menciptakan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan dan merata. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat vital, terutama di daerah-daerah yang masih mengandalkan kegiatan pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Untuk itu, perlu adanya upaya peningkatan nilai tambah dari produk pertanian agar sektor ini tidak hanya menjadi penyedia bahan baku, tetapi juga mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi daerah tersebut.

Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan



mengoptimalkan proses pengolahan hasil pertanian. Misalnya, produk pertanian yang sebelumnya hanya dijual dalam bentuk mentah, seperti buah, sayuran, atau biji-bijian, dapat diproses lebih lanjut menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Contohnya, produk pangan lokal yang diolah menjadi produk makanan olahan atau minuman tradisional yang khas dari daerah tersebut dapat meningkatkan daya saing dan permintaan pasar. Hal ini tidak hanya akan memberikan keuntungan ekonomi bagi petani, tetapi juga membuka peluang bagi industri pengolahan yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Selain itu, penguatan infrastruktur pertanian yang mendukung proses produksi dan distribusi juga sangat penting. Infrastruktur yang baik, seperti irigasi yang efisien, akses jalan yang memadai, serta fasilitas penyimpanan dan distribusi yang baik, akan mengurangi pemborosan dan kerugian hasil pertanian, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Hal ini juga akan membantu mengurangi ketergantungan pada pasar yang tidak stabil dan meningkatkan kemampuan daerah untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional.

Selanjutnya, peran teknologi dan inovasi dalam sektor pertanian juga tak kalah penting. Penggunaan teknologi pertanian yang lebih modern, seperti mesin pertanian yang efisien, sistem pemupukan yang tepat, serta pemanfaatan data dan analitik untuk memprediksi musim tanam dan hasil pertanian, dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Inovasi dalam teknik budidaya, seperti pertanian organik atau teknologi pertanian presisi, juga dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian serta memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik melalui digitalisasi proses administrasi dan layanan publik

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik merupakan salah satu langkah penting untuk



menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Salah satu cara yang efektif untuk mewujudkan hal ini adalah melalui digitalisasi proses administrasi dan layanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi digital, berbagai proses pemerintahan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat disederhanakan dan dipercepat, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi terjadinya kesalahan administratif

Digitalisasi memungkinkan proses administrasi yang lebih cepat dan mudah, baik bagi pegawai pemerintahan maupun masyarakat. Misalnya, sistem manajemen data yang berbasis teknologi memungkinkan informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang tepat waktu. Selain itu, digitalisasi layanan publik memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah, seperti pengurusan dokumen, izin, atau pembayaran pajak, yang sebelumnya memerlukan waktu dan biaya tinggi. Melalui aplikasi atau platform digital, masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan dari mana saja, tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah

Dengan digitalisasi, transparansi juga dapat lebih terjaga, karena setiap transaksi atau proses administrasi tercatat dengan jelas dan dapat diaudit. Hal ini mengurangi kemungkinan adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu, digitalisasi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pemerintahan, seperti melalui sistem e-participation atau e-feedback yang memungkinkan mereka memberikan masukan atau melaporkan masalah secara langsung.

Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi juga berdampak pada peningkatan kapasitas dan kualitas kepemimpinan. Pemimpin pemerintahan yang mampu memanfaatkan teknologi digital akan lebih cepat dalam merespon dinamika dan permasalahan yang ada, serta lebih efektif dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Kepemimpinan yang baik tidak hanya terlihat dari keputusan



yang diambil, tetapi juga dari kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh stakeholder dalam proses pengambilan keputusan.

4. Pemerataan infrastruktur layanan dasar dan konektivitas wilayah untuk mendukung pengurangan kemiskinan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta ekonomi masyarakat

Pemerataan infrastruktur layanan dasar dan konektivitas wilayah merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung pengurangan kemiskinan di suatu daerah. Infrastruktur yang memadai adalah fondasi penting bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu cara untuk mewujudkan pemerataan ini adalah dengan fokus pada perbaikan sarana dan prasarana di sektor-sektor dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, misalnya, dapat membuka akses yang lebih luas bagi anak-anak di daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dengan membangun atau merenovasi sekolah-sekolah yang layak, serta menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, kita dapat memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial dan geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan yang merata akan mencetak generasi muda yang lebih terampil, yang pada gilirannya dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah.

Di sektor kesehatan, pemerataan infrastruktur juga sangat penting untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan membangun fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, seperti puskesmas dan rumah sakit, serta menyediakan sarana kesehatan yang lengkap, kita dapat mengurangi angka



kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap perawatan medis. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mengurangi beban ekonomi akibat pengeluaran kesehatan yang tinggi, yang seringkali menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan.

Selain itu, perbaikan infrastruktur di sektor ekonomi, seperti pembangunan pasar, jalan, dan jaringan distribusi barang, akan memperkuat konektivitas antar wilayah. Konektivitas yang baik memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik untuk membeli kebutuhan sehari-hari maupun untuk menjual produk lokal mereka. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur ekonomi tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi barang, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah yang sebelumnya terisolasi.

Pemerataan infrastruktur layanan dasar yang didukung oleh konektivitas yang baik akan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Akses yang lebih baik ke pendidikan, layanan kesehatan, dan pasar ekonomi akan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah, serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan. Dengan perbaikan infrastruktur yang merata, pembangunan ekonomi yang inklusif akan terwujud, dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan kemiskinan secara keseluruhan.

5. Penguatan Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian dan perlindungan budaya dan kearifan lokal dengan Pemanfaatan digitalisasi dan Teknologi

Penguatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian dan perlindungan budaya serta kearifan lokal menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga identitas dan kekayaan budaya suatu bangsa. Budaya dan kearifan lokal merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang mencerminkan



nilai-nilai, tradisi, serta cara hidup yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi, banyak budaya dan kearifan lokal yang mulai terancam punah. Oleh karena itu, penguatan kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan melindungi budaya dan kearifan lokal sangat diperlukan

Salah satu cara efektif untuk mencapai hal ini adalah dengan memanfaatkan digitalisasi dan teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mendokumentasikan, mempromosikan, dan melestarikan berbagai bentuk budaya lokal yang ada. Misalnya, penggunaan platform digital seperti website, aplikasi, atau media sosial dapat membantu memperkenalkan dan menyebarkan kebudayaan lokal kepada audiens yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, masyarakat yang lebih muda, yang mungkin kurang terpapar pada budaya tradisional, dapat lebih mudah mengakses dan mengenal warisan budaya mereka sendiri.

Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk mendokumentasikan kearifan lokal dalam bentuk digital, sehingga memudahkan generasi mendatang untuk mempelajari dan memeliharanya. Misalnya, arsip digital dari seni tradisional, cerita rakyat, tarian, musik, atau kerajinan tangan dapat disimpan dalam format yang mudah diakses dan dipelajari. Penggunaan teknologi dalam pelestarian ini juga dapat mencakup pengembangan aplikasi berbasis Augmented Reality (AR) atau Virtual Reality (VR) yang memungkinkan masyarakat untuk "mengalami" kebudayaan lokal secara langsung meskipun berada di lokasi yang jauh dari asal budaya tersebut.

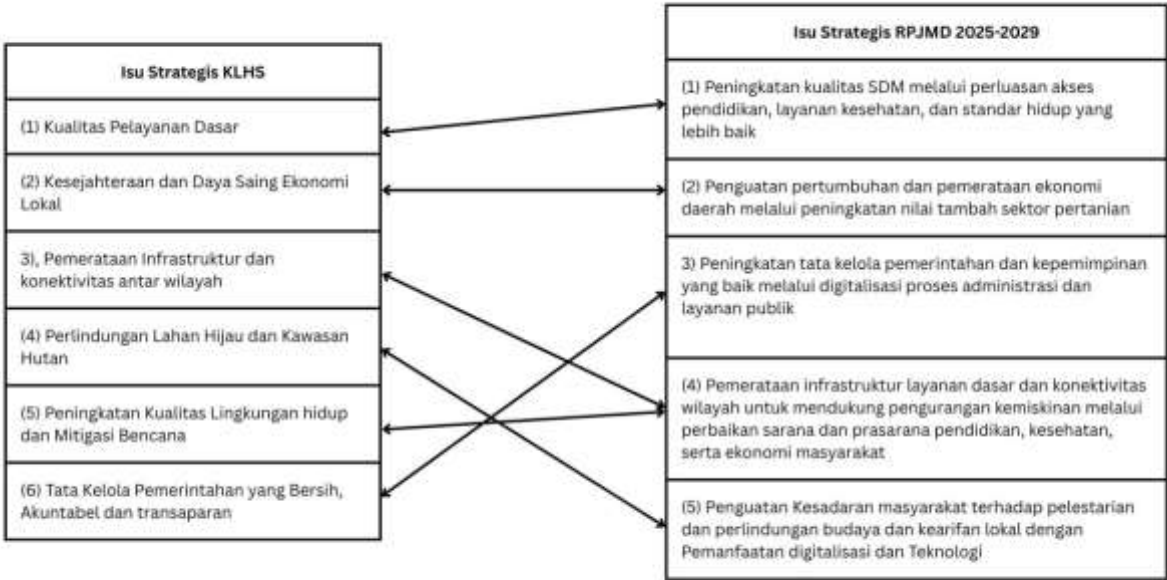
Tidak hanya itu, digitalisasi juga memungkinkan adanya platform edukasi dan pelatihan online yang mengajarkan keterampilan tradisional dan pengetahuan lokal kepada generasi muda. Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga agar kearifan lokal tetap relevan dan berkembang seiring dengan waktu, bahkan di tengah kemajuan teknologi. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital tidak hanya



berperan sebagai alat pelestarian, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap pentingnya melindungi budaya dan kearifan lokal.

Penguatan kesadaran ini, yang didorong oleh pemanfaatan digitalisasi dan teknologi, dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk terlibat aktif dalam melestarikan warisan budaya mereka. Dengan melibatkan generasi muda dan memanfaatkan teknologi, pelestarian budaya dan kearifan lokal tidak hanya akan bertahan, tetapi juga akan terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, sehingga bisa memberikan manfaat bagi masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 2.66 Kesesuaian Isu Strategis KLHS RPJMD terhadap Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029



Tabel di atas menunjukkan keterkaitan antara isu strategis KLHS RPJMD dengan isu strategis RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029. Dari tabel tersebut terlihat bahwa seluruh isu strategis dalam KLHS telah terakomodasi dalam arah kebijakan RPJMD, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Misalnya, isu *Kualitas Pelayanan Dasar* dalam KLHS selaras dengan fokus RPJMD dalam peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Begitu juga isu



Kesejahteraan dan Daya Saing Ekonomi Lokal sejalan dengan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor pertanian bernilai tambah.

Isu terkait lingkungan hidup, seperti *Perlindungan Lahan Hijau, Kualitas Lingkungan*, serta *Mitigasi Bencana*, terintegrasi dalam strategi pembangunan berkelanjutan dan pelestarian budaya lokal yang didukung teknologi. Sementara itu, isu *Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan* diperkuat melalui kebijakan digitalisasi layanan publik dan peningkatan kepemimpinan yang akuntabel.

Dengan demikian, terdapat konsistensi dan kesinambungan antara KLHS dan RPJMD, yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah berwawasan lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.67 Kesesuaian Isu KLHS dan Kondisi Daerah Kabupaten Ngawi

Potensi Daerah	Permasalahan	ISU KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Laju Perumbuhan Penduduk yang Meningkat dan Tersedianya lembaga pendidikan dasar hingga menengah serta program PAUD yang tersebar di pedesaan	Kualitas Pendidikan yang harus di tingkatkan, Belum optimalnya pemerataan pendidikan, Akreditasi PAUD yang Masih rendah	Kualitas Pelayanan Pendidikan	Megatren Global 2045: Demografi global,Perkembangan teknologi	Rendahnya kualitas SDM, Rendahnya produktivitas	Pengembangan SDM berkualitas	Peningkatan kualitas SDM melalui perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik. Penguatan Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian dan perlindungan budaya dan kearifan lokal dengan Pemanfaatan digitalisasi dan Teknologi



Potensi Daerah	Permasalahan	ISU KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Tersedianya fasilitas kesehatan dasar seperti Puskesmas dan Posyandu serta kader kesehatan aktif di desa	Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Masih Rendah, Kapasitas dan Kompetensi SDM Kesehatan Masih Terbatas dan Cakupan Program Kesehatan Masyarakat Belum Maksimal	Akses Pelayanan Kesehatan		Pergeseran struktur kelas masyarakat	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Pemerataan infrastruktur layanan dasar dan konektivitas wilayah untuk mendukung pengurangan kemiskinan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta ekonomi masyarakat

Potensi Daerah	Permasalahan	ISU KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Terdapat komunitas perempuan aktif dan dukungan kelembagaan pemberdayaan perempuan serta BKB, PIK-R, dan Kader KB	Lemahnya Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, Rendahnya Kualitas dan Ketahanan Keluarga, Permasalahan Sosial Ekonomi dan Perencanaan Kependudukan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persaingan sumber daya alam Perubahan iklim	Pergeseran struktur kelas masyarakat		Pemerataan infrastruktur layanan dasar dan konektivitas wilayah untuk mendukung pengurangan kemiskinan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta ekonomi masyarakat
Basis kelembagaan sosial berbasis desa dan PKK yang cukup aktif	Pendataan dan Pelayanan PMKS Belum Optimal, Lemahnya Sinergi dan Kapasitas Lembaga Sosial, Rendahnya Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Berbasis Keluarga	Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan	Pertumbuhan Kelas Menengah dan Urbanisasi	Pemberdayaan Ekonomi Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial	



Potensi Daerah	Permasalahan	ISU KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Produksi komoditas jagung, kedelai, dan padi dalam skala besar, Lumbung pangan dan sentra produksi pertanian nasional	Ketahanan Pangan Belum Tercapai Secara Merata, Pola Konsumsi dan Pemanfaatan Sumber Pangan Kurang Efisien, Pengawasan dan Koordinasi Keamanan Pangan masih Lemah	Ketahanan Pangan	Perubahan Iklim	Perubahan Iklim dan Persaingan Sumber Daya Alam	Lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Penguatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian
Pertumbuhan UMKM, sentra batik, anyaman bambu, dan produk ekonomi kreatif desa	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi Kreatif, Lemahnya Kelembagaan Koperasi dan Legalitas Usaha Mikro, Pertumbuhan UMKM Lambat dan Minim Diversifikasi Produk	Pengembangan Daya Saing Ekonomi Lokal	Konteslasi Perdagangan Global	Persaingan Sumber Daya Alam dan Konteslasi Perdagangan Global	Kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani	Penguatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian
Keberadaan kawasan hutan rakyat, DAS Bengawan Solo, serta potensi	Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Masih Terbatas, Lemahnya Kepatuhan dan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengendalian	Urbanisasi dan Konteslasi Perdagangan Global	menjaga lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim, dimana beberapa	Lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Pemerataan infrastruktur layanan dasar dan konektivitas wilayah untuk



Potensi Daerah	Permasalahan	ISU KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
ekowisata dan pertanian berkelanjutan	Pengawasan terhadap Regulasi Lingkungan, Rendahnya Kesadaran dan Perhatian terhadap Kelestarian Alam	Alih Fungsi Lahan Hijau, Persampahan		wilayah di Indonesia mengalami bencana alam yang mempengaruhi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan masyarakat		mendukung pengurangan kemiskinan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta ekonomi masyarakat
potensi pengembangan layanan publik digital di kecamatan	Belum Optimalnya Kualitas Layanan Publik Dasar, Transformasi Digital Pelayanan Publik Belum Terintegrasi, Kualitas SDM dan Budaya Kerja Aparatur Belum Sepenuhnya Profesional	Peningkatan Pelayanan Publik	Perkembangan Teknologi dan Demografi Global	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Kualitas Pelayanan Publik dan Integrasi Antar Layanan Berbasis Teknologi	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik melalui digitalisasi proses administrasi dan layanan publik



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGAWI
2025-2029





BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Berpijak pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi 2025-2045, yaitu ***“Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan nasional yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan”***. Selanjutnya memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, yaitu ***“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”*** dan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dengan visi, yaitu ***“Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan”***, maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis dengan menata Kabupaten Ngawi untuk menjadi lebih baik dan lebih sejahtera.

Visi pembangunan Kabupaten Ngawi yang ingin diwujudkan pada periode 2025-2029 adalah :

“SEMESTA BERENCANA”

***TERWUJUDNYA LUMBUNG PANGAN NASIONAL YANG MAJU,
MANDIRI, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT
KABUPATEN NGAWI SEJAHTERA, BERAKHLAK DENGAN
SEMANGAT GOTONG ROYONG***



Visi tersebut memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Penjelasan Pokok-Pokok Visi Pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1	Lambung Pangan Nasional	Visi ini menekankan Suatu kondisi pada cita-cita Kabupaten Ngawi sebagai lambung pangan nasional, dimana aspek Pangan yang meliputi pertanian sebagai sektor unggulan dapat menjadi sektor yang mampu menopang aspek pangan utama di Kabupaten Ngawi. Dengan pertanian sebagai sektor unggulan yang menopang ketahanan pangan daerah dan nasional. Dengan luas lahan pertanian yang dominan dan potensi sumber daya alam yang mendukung, Ngawi memiliki keunggulan dalam produksi padi, jagung, tebu, serta hortikultura, menjadikannya salah satu daerah penyumbang pangan utama di Indonesia
2	Maju	Kabupaten Ngawi mampu menciptakan dan menekankan pada semangat budaya kerja yang, progresif, inovatif, dan berfokus pada peningkatan kualitas, efisiensi, serta pencapaian tujuan bersama, namun tetap memelihara dan memajukan kekayaan budaya dan nilai-nilai lokal di Kabupaten Ngawi.
3	Mandiri	Mampu menyediakan pangan yang cukup, bergizi, dan stabil secara lokal, serta dapat mengatasi krisis pangan tanpa bergantung pada impor atau sumber luar





No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
4	Berkelanjutan	Visi ini menggambarkan cita-cita terwujudnya keseimbangan kebutuhan manusia dengan kelestarian alam, sehingga seluruh kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar berlangsung tanpa merusak ekosistem lingkungan. Keseimbangan ekosistem mencakup keberlanjutan sumber daya keanekaragaman hayati, dan kualitas lingkungan dengan menciptakan masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Sebagai daerah dengan sektor pertanian yang dominan, pembangunan berkelanjutan di Ngawi harus memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, termasuk pengelolaan lahan pertanian, sumber daya air, dan kawasan hutan agar tetap produktif tanpa merusak ekosistem.
5	Sejahtera	Merujuk pada lingkungan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh kehidupan layak melalui kemudahan akses terhadap sumber daya dan layanan yang sama bagi seluruh masyarakat, termasuk tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta terhapusnya ketidaksetaraan dan diskriminasi. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat diwujudkan tidak hanya secara materi, tetapi juga secara lahir batin.
6	Berakhlak	Masyarakat Kabupaten Ngawi yang dijiwai oleh penghayatan nilai-nilai agama, budi pekerti luhur dan berbudaya dalam suasana yang kondusif dan nyaman. Perwujudan dari berkepribadian secara sosial budaya Kabupaten Ngawi mencerminkan komitmen untuk membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama, budi pekerti luhur, dan budaya lokal dalam kehidupan sosial yang harmonis. Penguatan akhlak dan moralitas menjadi dasar dalam membangun





No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
		karakter masyarakat yang berintegritas, toleran, dan memiliki kesadaran sosial tinggi.
7	Semangat Gotong Royong	Perwujudan dari <i>guyub rukun</i> , menumbuhkembangkan nilai-nilai kebersamaan dalam pembangunan antara pemerintah, rakyat dan swasta. Mengembangkan semangat kebersamaan dalam melaksanakan dan mengisi pembangunan serta memanfaatkan dan merawat hasil pembangunan. Semangat kebersamaan ini akan diperkuat dengan pemberdayaan desa sebagai pusat pembangunan, memastikan bahwa setiap inisiatif pembangunan melibatkan partisipasi aktif warga dalam mengisi dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Pemerintah daerah akan berperan sebagai fasilitator yang mendukung inisiatif masyarakat, mendorong partisipasi publik, serta membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

3.2 Misi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1, ayat (13) telah dinyatakan bahwa Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan. Rumusan misi, idealnya mengandung makna adanya: (i) Tuntutan Stabilitas; (ii) Tuntutan akan Perubahan; (iii) Kondisi Nilai-nilai yang ada; serta (iv) Filosofi Manajemen dan Nilai-nilai.





Misi dapat berperan sebagai pedoman (*guidence*) dalam: (i) Membantu dalam memfokuskan pencapaian tujuan; (ii) Memberi dasar dalam pengalokasian sumber daya; (iii) Menetapkan kerangka tanggung jawab dalam organisasi; dan (iv) sebagai dasar bagi pengembangan tujuan organisasi. Rumusan Misi juga dapat berperan sebagai alat motivasi (*motivator*), yaitu sebagai sumber inspirasi kepada pihak-pihak terkait. Rumusan Misi juga dapat berfungsi sebagai alat promosi (*billboard*), yaitu mampu menarik stakeholder tertentu (Donatur, Pemerintah, Masyarakat, dll).

Misi disusun berdasarkan visi yang telah dirumuskan, karena misi merupakan penjabaran secara operasional dalam rangka perwujudan Visi. Misi untuk RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bagi masyarakat

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya Visi Kabupaten Ngawi. Keberhasilan pencapaian misi ini dengan ditandainya menciptakan masyarakat yang lebih berdaya saing melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penguatan pendidikan vokasi untuk mencetak SDM yang siap menghadapi tantangan dunia kerja. Selain itu, digitalisasi dalam pembelajaran dan penguatan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil juga menjadi prioritas guna mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan di berbagai wilayah.

Di bidang kesehatan, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan ketersediaan tenaga medis, serta memperkuat program preventif seperti stunting, imunisasi, dan kesehatan ibu-anak. Jaminan sosial diperkuat melalui bantuan sosial yang tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, serta penguatan





akses terhadap pekerjaan layak. Dengan strategi ini, diharapkan kualitas SDM di Kabupaten Ngawi meningkat secara signifikan, mendorong produktivitas masyarakat, dan mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan.

2. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Melalui Diversifikasi Pertanian, Industrialisasi, dan Penguatan Sektor-Sektor Ekonomi dalam Penciptaan Lapangan Pekerjaan

Pengembangan ekonomi melalui diversifikasi diarahkan tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas usaha rakyat, tetapi juga memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan inklusif. Misi ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam, melakukan diversifikasi usaha, serta penguatan sektor-sektor utama berbasis pertanian yang ramah lingkungan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Ngawi secara adil dan merata.

Melalui optimalisasi potensi pertanian, peningkatan nilai tambah hasil produksi, dan penerapan teknologi modern yang berkelanjutan, sektor pertanian diharapkan dapat bertransformasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan. Sasaran strategis yang ingin dicapai meliputi meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, terbukanya kesempatan kerja, serta meningkatnya kualitas tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan iklim dan perkembangan teknologi hijau.

Dengan fokus pada pengembangan industri pengolahan hasil pertanian yang ramah lingkungan, pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan berkelanjutan, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular, diharapkan tercipta lapangan kerja baru yang kompetitif sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Dengan demikian, Kabupaten Ngawi





dapat menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sosial dan ekologis, sehingga pembangunan daerah benar-benar berorientasi pada kesejahteraan generasi masa kini maupun mendatang

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi antar layanan pemerintah dan publik berbasis Teknologi Informasi

Aparatur pemerintah sebagai aktor utama pembangunan harus memiliki kompetensi tinggi dan didukung oleh sistem tata kelola yang baik. Prinsip good governance menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas birokrasi, mempercepat layanan, serta memastikan keterbukaan dalam pengelolaan administrasi dan pengambilan keputusan.

Pencapaian tujuan ini akan difokuskan pada dua sasaran utama. Pertama, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas aparatur, dan penerapan sistem informasi terintegrasi antar PERANGKAT DAERAH. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi layanan, optimalisasi pusat layanan terpadu, serta penerapan inovasi dalam e-government. Dengan langkah ini, diharapkan aparatur yang profesional, sistem yang transparan, dan pelayanan yang efisien dapat mendorong efektivitas pemerintahan serta meningkatkan kepuasan masyarakat di era digital.

4. Meningkatkan akses dan konektivitas antar daerah yang menunjang keberlangsungan aktivitas ekonom

Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ngawi, sehingga kualitas dan keberlanjutannya harus terus ditingkatkan. Peningkatan kualitas, pemerataan, serta pengelolaan infrastruktur yang ramah lingkungan menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang dan jasa,





pengembangan kawasan strategis, serta akses yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan membangun dan memperbaiki jaringan jalan, jembatan, sarana transportasi publik, serta memperhatikan efisiensi energi dan aspek lingkungan, diharapkan konektivitas antarwilayah semakin optimal dan tetap menjaga daya dukung lingkungan hidup.

Sasaran pembangunan ini adalah mewujudkan infrastruktur yang tidak hanya mendukung konektivitas wilayah secara menyeluruh—termasuk akses menuju sentra pertanian, industri, pariwisata, dan pelayanan dasar—tetapi juga memperhatikan pemerataan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah akan fokus pada pengembangan sarana transportasi hijau, pemanfaatan jalur strategis, serta integrasi infrastruktur digital untuk mendukung aktivitas ekonomi yang inovatif dan rendah emisi. Dengan konektivitas yang baik dan berkelanjutan, daya saing daerah akan meningkat, investasi dapat berkembang lebih pesat, kualitas lingkungan tetap terjaga, dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin dalam jangka panjang.

5. Meningkatkan kondusifitas yang mendukung keberlanjutan pembangunan

Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Ngawi yang agamis, ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Ngawi ke depan. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum akan dilakukan secara komprehensif melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparaturnya keamanan, serta optimalisasi peran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang



aman dan tertib akan menjadi prioritas utama guna menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang kondusif.

Selain itu, terwujudnya revolusi mental dan harmoni sosial akan didorong melalui penguatan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kesadaran hukum di masyarakat. Program edukasi sosial, peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan, serta pelestarian budaya dan tradisi lokal akan menjadi strategi utama dalam memperkuat identitas daerah dan membangun masyarakat yang toleran, berdaya, serta siap menghadapi tantangan pembangunan. Dengan terciptanya lingkungan yang aman dan harmonis, pembangunan di Kabupaten Ngawi dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat.



Gambar 3.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ngawi 2025-2029

**Tabel 3.2 Penyandingan Visi dan Misi RPJMD
Kabupaten Ngawi, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN
Tahun 2025-2029**

RPJMD Kab Ngawi Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029	RPJMN Nasional Tahun 2025-2029
Visi : "Semesta Berencana" Terwujudnya Lumbung Pangan Nasional yang Maju dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Kabupaten Ngawi Sejahtera, Berakhlak dengan Semangat Gotong Royong	Visi : Bersama Jawa Timur maju yang adil, Makmur, unggul dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045	Visi : Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bagi masyarakat	Misi 4 : Jatim Cerdas, Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Asta Cita 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) , sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran serta perempuan, pemuda (generasi milenial, generasi Z) dan penyandang disabilitas
	Misi 5 : Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC).	Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, da Hak Asasi Manusia

RPJMD Kab Ngawi Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029	RPJMN Nasional Tahun 2025-2029
	Misi 1 : Jatim Sejahtera, Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan di antaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu	Asta Cita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Melalui Diversifikasi Pertanian, Industrialisasi, dan Penguatan Sektor -Sektor Ekonomi Dalam Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Misi 2 : Jatim Kerja, Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-up) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st century skills) Misi 9 : Jatim Lestari Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral	Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri





RPJMD Kab Ngawi Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029	RPJMN Nasional Tahun 2025-2029
	Misi 7 : Jatim Agro, Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.	Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomisvariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi antar layanan pemerintah dan publik berbasis Teknologi Informasi	Misi 6 : Jatim Berkah Amanah, Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila.	Asta Cita 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dna pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
Misi 4 : Meningkatkan akses dan konektivitas antar daerah yang menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi	Misi 3 : Jatim Akses, Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan Misi 9 : Jatim Lestari Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong	Asta Cita 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi



RPJMD Kab Ngawi Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029	RPJMN Nasional Tahun 2025-2029
	pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral	
Misi 5 : Meningkatkan kondusifitas daerah yang mendukung keberlanjutan pembangunan	Misi 8 : Jatim Harmoni, Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga.	Sta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur

3.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Ngawi tahun 2025-2029 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

3.3.1 Tujuan

Tujuan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Ngawi 2025-2029 merupakan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, serta isu-isu strategis daerah. Tujuan ini menjadi pedoman dalam merancang





kebijakan dan program pembangunan guna menciptakan arah pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen pembangunan daerah, tujuan pembangunan dirumuskan untuk mewujudkan prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi dalam lima tahun ke depan. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran pembangunan yang lebih spesifik sebagai indikator keberhasilan, sehingga dapat mengarahkan kebijakan dan program pembangunan secara lebih efektif dan terstruktur dalam mendukung pencapaian visi daerah.

3.3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Keterkaitan Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 5.2. berikut ini :



Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ngawi 2025-2030

Visi/Misi		Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline (2024)	Target						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Visi : “SEMESTA BERENCANA” TERWUJUDNYA LUMBUNG PANGAN NASIONAL YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN NGAWI SEJAHTERA, BERAKHLAK DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bagi masyarakat	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pembangunan manusia		Indeks Pembangunan Manusia	73,91	74,67	75,02	75,55	76,12	76,97	78,45	
			Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,850	0,851	0,852	0,853	0,854	0,855	0,856	
			Meningkatnya pengentasan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	13,81	13,08	12,66	12,10	11,69	10,99	9,60	
			Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Pemuda	NA	54,60	56,20	58,00	60,00	62,20	64,60	
			Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,176	0,168	0,159	0,154	0,150	0,145	0,140	

Visi/Misi		Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline (2024)	Target						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Melalui Diversifikasi Pertanian, Industrialisasi, dan Penguatan Sektor-Sektor Ekonomi dalam Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,430	0,378	0,333	0,293	0,258	0,227	0,200	
				Pertumbuhan Ekonomi	4,64	5,00	5,22	5,44	5,66	5,88	6,02	
				Rasio Gini	0,289	0,280	0,270	0,260	0,250	0,240	0,220	
			Meningkatnya Laju Ekonomi Sektor Utama	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum.	2,94	2,99	3,06	3,12	3,18	3,25	3,32	
				Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,12	10,15	10,18	10,21	10,24	10,27	10,30	
				Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Kehutanan Perikanan	32,04	32,20	32,43	32,72	33,05	33,39	33,74	
				Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0,0053	0,0064	0,0077	0,0093	0,0113	0,0137	0,0165	
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	87,53	87,65	87,80	87,95	88,10	88,20	88,30	

Visi/ Misi		Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline (2024)	Target					Ket	
						2025	2026	2027	2028	2029		2030
			Pangan Masyarakat									
			Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Tamu Wisatawan	753.550	805.000	850.000	900.000	950.000	996.000	1.040.000	
			Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa	NA	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	89,00	
			Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,40	2,23	2,12	2,00	1,92	1,87	1,70	
			Meningkatnya realisasi investasi daerah	Realisasi Investasi	2.046.000.000	2.100.000.000.000	2.200.000.000.000	2.300.000.000.000	2.400.000.000.000	2.500.000.000.000	2.600.000.000.000	
				ICOR	4,72	4,70	4,68	4,66	4,64	4,62	4,60	
			Meningkatnya pertumbuhan UMKM naik kelas/ status	Persentase UMKM yang naik Kelas/ Status	88.13	88,50	90,35	91,56	92,12	93,14	93,50	
	Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi antar layanan pemerintah dan publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	89,20	89,30	89,38	89,55	89,78	89,97	90,55	
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	73,406	73,493	73,787	74,082	74,378	74,676	74,975	
				Nilai SAKIP	83,06	83,26	83,51	83,81	84,16	84,56	85,00	

Visi/Misi		Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline (2024)	Target						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	berbasis Teknologi Informasi			Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	74,05	74,10	74,15	74,20	74,25	74,30	74,35	
			Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	13.11	13,70	14,00	14,30	14,70	15,00	15,20	
				Rasio kapasitas fiskal daerah	0,985	1,000	1,050	1,080	1,120	1,150	1,180	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,31	3,50	3,70	3,90	4,10	4,30	4,50	
				Indeks Pemerintahan Digital	NA	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pembkab. Ngawi	96,47	97,09	97,65	98,15	98,60	99,01	99,38	
	Misi 4 : Meningkatnya akses dan konektivitas antar daerah yang menunjang keberlangsung an aktivitas ekonomi	Meningkatnya Infrastruktur Berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	76,34	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	
			Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97	
				Indeks Konektivitas Transportasi	NA	0,52	0,53	0,53	0,54	0,55	0,55	

Visi/Misi		Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline (2024)	Target						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,85	72,08	72,15	72,23	72,31	72,39	73,19	
				Penurunan emisi GRK Kumulatif	61505,98	67645,36	79965,59	92285,83	104606,06	116926,29	129246,53	
				Indeks Risiko Bencana (IRB)	90,99	84,91	77,14	69,38	61,66	53,85	46,09	
	Misi 5 : Meningkatnya kondusifitas daerah yang mendukung keberlanjutan pembangunan	Meningkatnya Harmoni Sosial		Indeks Kesalehan Sosial	81,73	84,49	86,78	88,23	90,31	92,01	94,19	
			Meningkatnya pelestarian budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	NA	45,11	47,19	49,22	51,00	52,50	54,01	
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	Indeks Penyelenggara n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	68,14	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	
				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	NA	78,12	79,34	81,02	82,89	84,17	85,60	

3.4 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

3.4.1 Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Pendekatan dengan komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak aja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Capaian pembangunan yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Ngawi harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui adaptasi terhadap perkembangan internal maupun eksternal Kabupaten Ngawi. Disamping itu, lingkungan internal juga menjadi hal penting karena didalamnya berisi sumber daya yang dimiliki sehingga sasaran, tujuan, misi, dan visi yang dirumuskan harus berdasarkan kondisi riil.

3.4.2 Pentahapan Pembangunan RPJMD

Pentahapan pembangunan merupakan bagian dari strategi RPJMD yang berfungsi mengarahkan prioritas tahunan secara sistematis untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Dengan penahapan yang terstruktur, proses perencanaan jangka menengah dapat tersambung secara konsisten dengan perencanaan tahunan (RKPD), sehingga pembangunan berjalan sinergis, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam RPJMD Kabupaten Ngawi 2025–2029, penahapan pembangunan disusun untuk mendukung terwujudnya visi *“Semesta Berencana : Terwujudnya Lumbung Pangan Nasional yang Maju, dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Kabupaten Ngawi Sejahtera, Berakhlak dengan Semangat Gotong Royong.”* Setiap tahapan dirancang dengan pendekatan bertahap, mulai dari penguatan infrastruktur dasar dan daya saing daerah, transformasi ekonomi berbasis pertanian dan digitalisasi, pemerataan dan



investasi, hingga konsolidasi keberlanjutan pembangunan menuju visi jangka panjang.

Penahapan ini menjadi dasar dalam penetapan tema dan prioritas pembangunan tahunan, serta menjadi pijakan transisi strategis menuju arah pembangunan jangka panjang dalam RPJPD 2025–2045, menjadikan Ngawi sebagai Lumbung Pangan Nasional yang tangguh dan berdaya saing.

Tabel 3.4 Pentahapan Pembangunan RPJMD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kapasitas dan Implementasi Inovatif untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Ekspansi Program Unggulan dan Integrasi Sistem Menuju Kemandirian Ekonomi Berbasis Keberlanjutan	Pemantapan Capaian dan Inovasi Berkelanjutan untuk Daya Saing Daerah	Pematangan Capaian dan Proyeksi Keberlanjutan Pembangunan Jangka Menengah	Penguatan Keberlanjutan dan Persiapan Visi Jangka Panjang Daerah

3.4.3 Arah Kebijakan

Setelah penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta perumusan Penahapan Pembangunan yang telah menguraikan fokus dan prioritas per tahun selama periode RPJMD tahun 2025-2029, langkah krusial berikutnya adalah merumuskan strategi pembangunan yang efektif dan adaptif. Strategi ini menjadi penentu "bagaimana" seluruh target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam konteks perencanaan ini, perumusan strategi pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam terhadap kondisi internal dan eksternal daerah. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis ini memungkinkan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk mengidentifikasi :

- a. Kekuatan (*Strengths*) : Kapabilitas internal dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan;
- b. Kelemahan (*Weaknesses*) : Faktor internal yang menjadi hambatan atau keterbatasan dan perlu diatasi;
- c. Peluang (*Opportunities*) : Faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pencapaian tujuan;
- d. Ancaman (*Threats*) : Faktor-faktor eksternal yang berpotensi menghambat atau merusak upaya pembangunan, dan perlu dimitigasi.

Proses perumusan strategi melalui Analisis SWOT ini dilakukan secara komprehensif dan mempertimbangkan karakteristik setiap tahapan pembangunan. Dengan demikian, strategi yang dihasilkan akan relevan dengan tantangan dan peluang spesifik pada setiap fase pembangunan, serta selaras dengan fokus pembangunan di Kabupaten Ngawi.

3.4.3.1. Analisis SWOT Pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029

Goal (Sasaran Utama Pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029) adalah **“SEMESTA BERENCANA” TERWUJUDNYA LUMBUNG PANGAN NASIONAL YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN NGAWI SEJAHTERA, BERAKHLAK DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG**

Strengths (Kekuatan) :

- **S1** : Komitmen politik dan dukungan kuat dari pimpinan daerah terhadap pembangunan SDM, ekonomi berkelanjutan (khususnya pertanian ramah lingkungan), digitalisasi, dan peningkatan infrastruktur.
- **S2** : Potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama lahan pertanian yang subur dan cocok untuk pengembangan pertanian ramah lingkungan dan organik.



- **S3** : Keberadaan SDM lokal yang cukup besar dan memiliki fondasi pengalaman dalam sektor pertanian serta responsif terhadap program peningkatan kapasitas.
- **S4** : Adanya inisiatif awal dan potensi pengembangan infrastruktur TIK serta sistem pelayanan publik digital yang bisa diperluas.
- **S5** : Struktur pemerintahan dan aparat keamanan yang ada serta elemen masyarakat yang siap bersinergi dalam menjaga kondusifitas dan ketertiban.
- **S6** : Basis infrastruktur dasar (jalan, jembatan) yang mulai terbangun dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

Weaknesses (Kelemahan) :

- **W1** : Kompetensi SDM (guru, tenaga kesehatan, petani, aparat) yang belum merata atau belum sepenuhnya relevan dengan tuntutan pembangunan modern dan ekonomi hijau.
- **W2** : Cakupan dan kualitas layanan dasar (pendidikan kejuruan, kesehatan primer, jaminan sosial) yang belum optimal dan merata di seluruh wilayah.
- **W3** : Keterbatasan pengetahuan, adopsi teknologi, dan akses terhadap input (bibit, pupuk organik) serta pasar modern/ekspor bagi petani.
- **W4** : Belum optimalnya integrasi dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) lintas PERANGKAT DAERAH serta celah keamanan siber.
- **W5** : Kesenjangan infrastruktur konektivitas (jalan, jembatan) di beberapa wilayah pedesaan dan jaringan irigasi tersier yang belum memadai.
- **W6** : Mekanisme partisipasi masyarakat dan resolusi konflik lokal yang belum sepenuhnya terlembaga dan optimal.

Strategic Issues/ Problems (Isu/Masalah Strategis) :

- a. Transformasi kualitas dan relevansi SDM dalam menghadapi tantangan pembangunan.
- b. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian ramah lingkungan untuk daya saing ekonomi.





- c. Akselerasi digitalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara terintegrasi dan aman.
- d. Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur penunjang ekonomi dan konektivitas wilayah.
- e. Pemeliharaan stabilitas sosial dan keamanan untuk iklim pembangunan yang kondusif.

Opportunity (Peluang) :

- **O1** : Adanya program, regulasi, dan potensi pendanaan dari pemerintah pusat/provinsi terkait pembangunan SDM, pertanian berkelanjutan, digitalisasi, dan infrastruktur.
- **O2** : Peningkatan kesadaran dan permintaan pasar global maupun nasional terhadap produk pangan sehat dan praktik pertanian ramah lingkungan/organik.
- **O3** : Perkembangan teknologi digital dan inovasi yang pesat, dapat diadaptasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pelayanan.
- **O4** : Potensi pengembangan sektor ekonomi non-pertanian (misal : pariwisata, ekonomi kreatif) yang dapat menjadi sumber pertumbuhan baru.
- **O5** : Adanya peluang kolaborasi dengan pihak swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk percepatan pembangunan.

Threats (Ancaman) :

- **T1** : Perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang berdampak langsung pada sektor pertanian dan berpotensi memicu bencana.
- **T2** : Fluktuasi harga komoditas pertanian dan input produksi yang tidak menentu, mempengaruhi kesejahteraan petani.
- **T3** : Persaingan produk dari daerah lain atau negara tetangga di pasar nasional dan internasional.
- **T4** : Potensi gangguan keamanan, ketertiban sosial, atau potensi konflik yang dapat menghambat investasi dan pembangunan.
- **T5** : Keterbatasan anggaran daerah dan kapasitas fiskal yang dapat membatasi skala program dan investasi besar.



- **T6** : Isu keamanan siber dan kesenjangan digital yang berpotensi menghambat transformasi digital.

Strategic Action/Themes (Strategi Aksi) :

1) ***Build on Strengths (Membangun Kekuatan) - (Strategi SO) :***

- a) Memanfaatkan komitmen kepemimpinan dan potensi lahan untuk mengembangkan Kabupaten Ngawi sebagai pusat pertanian ramah lingkungan berkelanjutan.
- b) Mengintegrasikan pengembangan agrowisata berbasis potensi alam dan budaya lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
- c) Memperluas pemanfaatan infrastruktur TIK yang ada untuk mendukung program pembangunan SDM dan ekonomi digital.

2) ***Overcome Weaknesses (Mengatasi Kelemahan) - (Strategi WO) :***

- a) Meningkatkan kompetensi SDM secara holistik melalui pendidikan kejuruan yang relevan, pelatihan berkelanjutan, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar.
- b) Mengembangkan sistem fasilitasi akses petani terhadap input pertanian berkelanjutan dan kemitraan pasar modern/ekspor untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan dan akses.
- c) Mengoptimalkan integrasi sistem pelayanan publik digital antar PERANGKAT DAERAH dan meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data.
- d) Mempercepat pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur konektivitas (jalan, jembatan, irigasi tersier) serta infrastruktur digital di wilayah strategis.

3) ***Block Threats (Menghalau Ancaman) - (Strategi ST & WT) :***

- a) **Strategi ST** : Memanfaatkan kekuatan sinergi aparat dan masyarakat untuk memperkuat sistem keamanan



dan ketertiban wilayah serta mengembangkan mekanisme adaptasi terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga.

- Penguatan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif dan adaptif.
- Pengembangan varietas tanaman tahan iklim dan sistem informasi harga pasar untuk stabilisasi ekonomi pertanian.

b) **Strategi WT** : Mengatasi kelemahan dalam digitalisasi dan infrastruktur dengan strategi pengembangan yang efisien dan bertahap, sekaligus memitigasi risiko keamanan siber dan keterbatasan anggaran.

- Pengembangan SPBE yang aman dan bertahap, serta inovasi dalam pencarian alternatif pendanaan pembangunan.
- Peningkatan kesadaran dan literasi digital masyarakat untuk mengurangi kesenjangan dan risiko siber.

Strategi keseluruhan Pembangunan Kabupaten Ngawi Periode 2025-2029 adalah **"Transformasi Menuju Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Pertanian Ramah Lingkungan melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul, Percepatan Digitalisasi Tata Kelola dan Pelayanan Publik, Pengembangan Infrastruktur Konektivitas dan Digital, serta Pemantapan Kondusifitas Wilayah Guna Mencapai Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat."**

Selanjutnya, Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ngawi ke depan perlu memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Timur. Kawasan ini memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, sehingga kebijakan tata ruang harus diarahkan pada perlindungan lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian agar lebih efisien, sekaligus mendorong optimalisasi serta



revitalisasi lahan pertanian yang ada. Selain itu, penggunaan pupuk, pestisida, dan pakan organik juga harus diperluas untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Selain aspek ketahanan pangan, arah kebijakan pembangunan Ngawi juga harus mengakomodasi pengelolaan kawasan Geopark Kabupaten Ngawi yang memiliki potensi geologi sekaligus risiko bencana alam. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana menjadi hal penting, mengingat wilayah ini rentan terhadap ancaman bencana geologi dan bencana alam lainnya. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, baik melalui edukasi, penyediaan sarana mitigasi, maupun peningkatan koordinasi antar-lembaga terkait.

Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ngawi ke depan harus berjalan seimbang antara penguatan sektor pertanian berkelanjutan dan pengelolaan kawasan geopark. Kedua aspek ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta memperkuat ketahanan daerah terhadap tantangan perubahan iklim dan risiko bencana. Integrasi kebijakan yang mengakomodasi kedua kepentingan ini akan menjadikan Ngawi sebagai daerah yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

3.4.4 Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

Setelah perumusan strategi pembangunan daerah yang komprehensif, yang telah diidentifikasi melalui Analisis SWOT untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan strategi makro tersebut ke dalam panduan yang lebih operasional dan spesifik. Inilah peran dari Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.

Arah kebijakan merupakan penjabaran misi pembangunan daerah ke dalam langkah-langkah operasional yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Disusun secara selaras dengan strategi pembangunan, arah kebijakan menjadi pedoman





teknis bagi perangkat daerah dalam merancang program dan kegiatan prioritas yang terarah, terukur, dan berdampak nyata.

Dalam RPJMD Kabupaten Ngawi 2025–2029, arah kebijakan dirumuskan berdasarkan visi “*Semesta Berencana*” untuk mewujudkan Ngawi sebagai Lumbung Pangan Nasional yang maju dan berkelanjutan. Selain mendasar dari visi, arah kebijakan juga mendasar dari arah kebijakan kewilayahan yang tertuang di dalam dokumen RPJMN 2025 sampai 2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Dimana mendasar dokumen tersebut arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Ngawi adalah merupakan wilayah komoditas unggulan dan swasembada pangan, air, dan energi. Setiap misi dijabarkan ke dalam arah kebijakan tematik yang responsif terhadap isu strategis daerah, mengedepankan keunggulan lokal, serta mendukung transformasi pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan ini menjadi dasar integrasi antara rencana jangka menengah dan rencana tahunan, serta mengarahkan pembangunan daerah menuju sasaran jangka panjang dalam RPJPD 2025–2045.



Tabel 3.5 Arah Kebijakan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029

No	Tahapan Pembangunan	Misi	Arah Kebijakan
1	Tahap 1 (2026) : Peningkatan Kapasitas & Implementasi Inovatif untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bagi masyarakat	Implementasi program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kesehatan, perluasan cakupan layanan kesehatan primer, optimalisasi penyaluran jaminan sosial.
		Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Melalui Diversifikasi Pertanian, Industrialisasi, dan Penguatan Sektor-Sektor Ekonomi dalam Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Peningkatan skala program pertanian ramah lingkungan berkelanjutan melalui fasilitasi akses input (bibit unggul, pupuk organik), pelatihan ekstensif bagi petani, dan pendampingan sertifikasi lahan organik.
		Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi antar layanan pemerintah dan publik berbasis Teknologi Informasi	Pengembangan modul-modul aplikasi layanan publik terintegrasi tahap awal, peningkatan keamanan siber pada sistem pemerintahan.
		Misi 4 : Meningkatkan akses dan konektivitas antar daerah yang menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi	Pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan prioritas yang mendukung logistik pertanian dan akses pasar serta pengembangan infrastruktur digital di pusat-pusat ekonomi.



No	Tahapan Pembangunan	Misi	Arah Kebijakan
		Misi 5 : Meningkatkan kondusifitas yang mendukung keberlanjutan pembangunan	Penguatan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan sinergi aparat penegak hukum dan elemen masyarakat, serta inisiasi program pencegahan potensi gangguan ketentraman sosial
2	Tahap II (2027) : Ekspansi Program Unggulan & Integrasi Sistem Menuju Kemandirian Ekonomi Berbasis Keberlanjutan	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bagi masyarakat	Perluasan akses pendidikan yang relevan dengan kebutuhan daerah, penguatan program gizi masyarakat dan penurunan angka stunting.
		Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Melalui Diversifikasi Pertanian, Industrialisasi, dan Penguatan Sektor-Sektor Ekonomi dalam Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Penguatan area pertanian ramah lingkungan dan organik, fasilitasi kemitraan strategis antara petani dengan pasar (modern dan ekspor), serta pengembangan klaster agrowisata berbasis pertanian berkelanjutan. Selain itu, peningkatan nilai tambah komoditas melalui pengembangan sentra pengolahan dan branding produk.
		Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi antar layanan pemerintah dan publik berbasis Teknologi Informasi	Integrasi layanan publik lintas Perangkat Daerah, pengembangan platform Satu Data Ngawi, peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan data dan analisis kebijakan.



No	Tahapan Pembangunan	Misi	Arah Kebijakan
		Misi 4 : Meningkatkan akses dan konektivitas antar daerah yang menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier pada sektor pertanian, pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi perdesaan
		Misi 5 : Meningkatkan kondusifitas yang mendukung keberlanjutan pembangunan	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan ketertiban umum, serta pengembangan mekanisme resolusi konflik berbasis kearifan lokal untuk menjaga harmoni sosial.
3	Tahap III (2028) : Pemantapan Capaian & Inovasi Berkelanjutan untuk Daya Saing Daerah	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bagi masyarakat	Penguatan kualitas pendidikan karakter dan keterampilan, pengembangan program inovatif dalam pelayanan kesehatan berbasis komunitas.
		Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Melalui Diversifikasi Pertanian, Industrialisasi, dan Penguatan Sektor-Sektor Ekonomi dalam Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Pengembangan pusat inovasi dan riset terapan di bidang pertanian ramah lingkungan, fasilitasi adopsi teknologi smart farming, serta penguatan jejaring pemasaran produk pertanian berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional.
		Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi antar layanan pemerintah dan publik berbasis Teknologi Informasi	Optimalisasi penggunaan big data untuk perumusan kebijakan berbasis bukti, pengembangan layanan publik proaktif berbasis kecerdasan buatan (AI) sederhana.



No	Tahapan Pembangunan	Misi	Arah Kebijakan
		Misi 4 : Meningkatkan akses dan konektivitas antar daerah yang menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi	Pemantapan konektivitas jalan utama yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi regional, pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi non pertanian.
		Misi 5 : Meningkatkan kondusifitas yang mendukung keberlanjutan pembangunan	Pemantapan penegakan hukum dan keadilan, serta penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam mitigasi bencana dan penanggulangan dampak gangguan keamanan, guna menciptakan iklim yang aman bagi investasi dan pembangunan.
4	Tahap IV (2029) : Pematangan Capaian & Proyeksi Keberlanjutan Pembangunan Jangka Menengah	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bagi masyarakat	Pemantapan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan holistik, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan primer dan rujukan, serta penguatan sistem jaminan sosial yang inklusif dan merata untuk memastikan perlindungan sosial masyarakat
		Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Melalui Diversifikasi Pertanian, Industrialisasi, dan Penguatan Sektor-Sektor Ekonomi dalam Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Penguatan daya saing produk pertanian ramah lingkungan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas produk, fasilitasi akses pasar yang lebih luas (nasional dan internasional), dan pengembangan rantai nilai terintegrasi



No	Tahapan Pembangunan	Misi	Arah Kebijakan
		Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi antar layanan pemerintah dan publik berbasis Teknologi Informasi	Pemantapan dan perluasan jangkauan layanan publik digital yang terintegrasi penuh antar PERANGKAT DAERAH, memastikan efisiensi maksimal, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan transparansi tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik.
		Misi 4 : Meningkatkan akses dan konektivitas antar daerah yang menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi	Peningkatan kualitas infrastruktur strategis, terutama jaringan jalan dan jembatan, yang menunjang konektivitas antar sentra produksi pertanian, kawasan ekonomi, dan pusat-pusat pelayanan.
		Misi 5 : Meningkatkan kondusifitas yang mendukung keberlanjutan pembangunan	Pelembagaan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang kolaboratif dan adaptif terhadap dinamika sosial, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mendukung iklim investasi dan keberlanjutan pembangunan.
5	Tahap V (2030) : Penguatan Keberlanjutan dan Persiapan Visi Jangka Panjang Daerah	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bagi masyarakat	Mengidentifikasi tren dan kebutuhan SDM ke depan, khususnya yang terkait dengan perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan sektor pertanian modern, guna merumuskan strategi pengembangan kapasitas SDM jangka panjang yang relevan.



No	Tahapan Pembangunan	Misi	Arah Kebijakan
		Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Melalui Diversifikasi Pertanian, Industrialisasi, dan Penguatan Sektor-Sektor Ekonomi dalam Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Mengkonsolidasi seluruh elemen ekosistem pertanian ramah lingkungan berkelanjutan (mulai dari hulu hingga hilir, termasuk riset, produksi, pengolahan, hingga pemasaran) sebagai pilar ekonomi daerah dan Mendorong diversifikasi ekonomi secara lebih mendalam ke sektor-sektor non-pertanian yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan nilai tambah (misal : pariwisata, ekonomi kreatif, industri pengolahan lanjutan), namun tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.
		Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi antar layanan pemerintah dan publik berbasis Teknologi Informasi	Memastikan seluruh layanan publik telah terdigitalisasi secara optimal, terintegrasi penuh, dan beroperasi dengan efisien, transparan, serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali serta Mendorong inovasi berkelanjutan dalam penyediaan pelayanan publik berbasis teknologi
		Misi 4 : Meningkatkan akses dan konektivitas antar daerah yang menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi	Memastikan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap infrastruktur yang telah terbangun untuk menjaga kualitas dan keberlanjutannya, serta merumuskan rencana pengembangan infrastruktur strategis baru yang mendukung konektivitas regional dan nasional, terutama untuk jalur distribusi produk unggulan daerah



No	Tahapan Pembangunan	Misi	Arah Kebijakan
		Misi 5 : Meningkatkan kondusifitas yang mendukung keberlanjutan pembangunan	Memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan sebagai prasyarat utama pembangunan jangka panjang, serta mendorong budaya sadar hukum dan kepedulian sosial yang tinggi di kalangan masyarakat.



Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ngawi tahun 2025–2029 yang tercantum dalam tabel di atas menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah berbasis inovasi, produktivitas ekonomi, dan kualitas pelayanan publik. Fokus kebijakan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diversifikasi ekonomi, serta penguatan infrastruktur dan digitalisasi layanan publik mencerminkan upaya untuk membangun sistem pemerintahan dan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global. Pendekatan ini juga menegaskan orientasi pembangunan Ngawi yang menempatkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai satu kesatuan arah pembangunan jangka menengah.

Keterpaduan arah kebijakan tersebut menjadi landasan penting bagi Kabupaten Ngawi dalam mengintegrasikan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di wilayahnya. Dengan basis kebijakan yang telah menekankan penguatan sektor ekonomi produktif, peningkatan konektivitas, serta transformasi digital layanan publik, pelaksanaan PSN dapat lebih mudah disinergikan dengan prioritas daerah. Hal ini termasuk dukungan terhadap pengembangan infrastruktur strategis, peningkatan daya saing kawasan pertanian dan industri, serta konektivitas logistik antarwilayah yang sejalan dengan arah kebijakan nasional. Dengan demikian, kebijakan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan lokal, tetapi juga sebagai penggerak percepatan capaian target PSN di tingkat regional dan nasional. Adapun Kebijakan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional (PSN) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

1. Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah

- Peningkatan kualitas pembelajaran melalui empat prioritas utama: Pembelajaran Mendalam (PM), Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA), Tes Kompetensi Akademik (TKA), serta penguatan literasi numerasi dan sains (scientek).



- Pendanaan kegiatan pendidikan bersumber dari DAK Non Fisik (BOS Reguler dan Kinerja) serta DAU; kegiatan yang tidak terdani melalui DAK akan dialokasikan dari DAU, terutama untuk Bimtek PM dan KKA pada jenjang SD/SMP.

2. Kebijakan Sekolah Rakyat

- Lokasi pembangunan Sekolah Rakyat direncanakan di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngudal, Kabupaten Ngawi, pada lahan milik Pemerintah Kabupaten Ngawi seluas 7,8 Hae dari total 12,5 Hae (NIB: 00424).
- Usulan pembangunan Sekolah Rakyat mencakup pembangunan gedung dan ruang kelas, gedung penunjang belajar mengajar, fasilitas asrama, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- Pelaksanaan Sekolah Rakyat Kabupaten Ngawi telah masuk *Tahap 2*, dengan progres meliputi : a. Pengukuran tanah oleh Kementerian PUPR (Dirjen Sarana Strategis); b. Penyelidikan tanah oleh Kementerian PUPR (Dirjen Sarana Strategis); c. Perencanaan jenjang pendidikan meliputi SD, SMP, dan SMA dengan total 8 rombongan belajar (2 rombel SD, 2 rombel SMP, dan 2 rombel SMA).
- Beberapa tahapan yang belum dilaksanakan meliputi : a. Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal); b. Penyediaan sumber daya manusia (guru, tenaga kependidikan, dan tenaga administrasi); c. Penetapan kebijakan terkait pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan gedung.

3. Kebijakan Penanganan TBC di Kabupaten Ngawi

- Pemerintah Kabupaten Ngawi telah memiliki dasar hukum penanggulangan TBC melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- Penanganan TBC menjadi salah satu indikator RPJMD 2025–2029 dan Renstra Perangkat Daerah dengan fokus pada :
 - a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (%);



- b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*);
- c) Persentase pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar.
- Anggaran penanganan TBC telah dialokasikan dalam APBD melalui beberapa sub kegiatan, antara lain pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga TBC, pengelolaan pelayanan bagi penderita TBC, serta pengadaan obat dan bahan medis habis pakai.
- Pelaksanaan penemuan kasus baru dilakukan secara aktif dan cepat dengan melibatkan kader kesehatan dalam kegiatan investigasi kontak, pendampingan pengobatan, pelacakan kasus mangkir, serta penemuan kasus di lokasi berisiko.
- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) TBC didukung dengan ketersediaan SDM kesehatan, fasilitas, dan logistik diagnostik. Terdapat 5 site TCM di Kabupaten Ngawi dan tim layanan TBC di fasyankes telah terlatih.
- Penguatan jejaring layanan TBC dilakukan melalui kerja sama dengan RS Widodo, RSI Attin-Husada, serta 18 klinik swasta dan 2 klinik pemerintah yang telah terhubung dalam jejaring layanan TBC.
- Pemerintah melakukan pemantauan dan pelaporan TBC secara real-time melalui sistem SITB, termasuk fitur *Alert & Reminder* untuk memastikan tindak lanjut setiap kasus.
- Didorong inovasi eliminasi TBC melalui program *Pena Berlapis Emas* (Penemuan Aktif TBC pada Anak Berbasis Masyarakat) dengan melibatkan kader kesehatan dan posyandu.
- Pemantauan rutin capaian program TBC dilakukan setiap minggu oleh Kemendagri, Kemenkes, dan Dinas Kesehatan Provinsi, serta setiap Senin di tingkat kabupaten melalui koordinasi puskesmas dan rumah sakit.
- Pemerintah Kabupaten Ngawi berkolaborasi dengan Yayasan Bhanu Yasa Sejahtera (Yabhysa) dalam kegiatan skrining dan penemuan penderita TBC.



4. Kebijakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)

- Pemerintah Kabupaten Ngawi melaksanakan tiga jenis program PKG, yaitu : a. PKG Ulang Tahun (mulai Februari 2025) bagi masyarakat usia 0–6 tahun dan 18 tahun ke atas, dilakukan satu bulan setelah ulang tahun di puskesmas dan klinik. b. PKG Sekolah (mulai Juli 2025) bagi siswa usia 7–17 tahun pada awal tahun ajaran baru di sekolah. c. PKG Khusus bagi ibu hamil dan balita, dilaksanakan sesuai jadwal di puskesmas dan posyandu.
- Dukungan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan PKG di seluruh puskesmas. Saat ini 24 puskesmas telah melaksanakan PKG secara penuh (100%).
- Pemanfaatan APBD dan DAK difokuskan untuk pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) dalam pelaksanaan PKG.
- Supervisi pelaksanaan PKG telah dilakukan di 10 puskesmas sampel sebagai bagian dari evaluasi rutin.
- Penguatan SDM dan sarana prasarana dilakukan agar tata laksana PKG berjalan optimal, termasuk pengaturan SDM sesuai tatalaksana *Integrasi Layanan Primer (ILP)* dan pelatihan *on the job training* bagi tenaga kesehatan.
- Pemerintah juga melakukan sosialisasi masif dan perluasan jangkauan layanan ke masyarakat yang sulit mengakses puskesmas melalui kegiatan FGD di 5 puskesmas bersama tokoh masyarakat dan kepala desa.

PKG Sekolah :

- Program ini menargetkan siswa sekolah usia 7–17 tahun, termasuk santri pondok pesantren dan siswa SLB di seluruh Kabupaten Ngawi.
- Pemeriksaan meliputi pengukuran antropometri (tinggi dan berat badan), pemeriksaan gigi, penglihatan, status gizi, hemoglobin, serta verifikasi imunisasi HPV bagi siswi kelas 9.
- Pelaksanaan dilakukan oleh puskesmas secara bergilir ke masing-masing sekolah.



5. Kebijakan BPJS Kesehatan

- Pemerintah daerah menargetkan Universal Health Coverage (UHC) dengan tingkat kepesertaan sebesar 98% dari total penduduk.
- Pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran data kepesertaan dan meningkatkan sosialisasi kepatuhan pembayaran iuran, terutama bagi peserta segmen mandiri, guna menjaga keberlanjutan status keaktifan UHC di Kabupaten Ngawi.

6. Kebijakan Pembangunan Rumah Sakit yang Berkualitas

1. RSUD Geneng

- Telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Izin 13022300067780001, diterbitkan pada Juli 2023.
- Luas bangunan RSUD Geneng mencapai 9.985 m² di atas lahan sekitar 15.800 m², dengan rencana pengembangan menuju fasilitas berstandar modern yang mencakup gedung rawat inap, gedung perkantoran, serta fasilitas penunjang pelayanan kesehatan.
- Selain itu, terdapat gedung lama eks-Puskesmas seluas sekitar 1.335 m² yang turut dimanfaatkan untuk mendukung operasional rumah sakit.
- RSUD Geneng diklasifikasikan sebagai Rumah Sakit Kelas D sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2014.
- Tujuan pembangunan RSUD Geneng adalah memperkuat layanan kesehatan dan rujukan di wilayah Ngawi bagian selatan, agar masyarakat memiliki akses layanan yang lebih dekat dan merata.

2. RSUD Mantingan

- Bangunan rumah sakit baru memiliki luas sekitar 2.760 m² di atas lahan seluas 5.421 m².
- RSUD Mantingan juga diklasifikasikan sebagai Rumah Sakit Kelas D berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2014.



- Rumah sakit ini diharapkan berperan sebagai pusat rujukan bagi puskesmas-puskesmas di wilayah timur Kabupaten Ngawi untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan.

7. Kebijakan Perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Ngawi

- Legalitas Badan : Seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Ngawi telah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebanyak 217 unit, dengan akta pendirian dan SK AHU telah terbit 100%.
- Integrasi Digital : Sebanyak 199 KDKMP (92%) telah terdaftar dan memiliki akun pada Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan (SIMKOPDES) atau Microsite Merah Putih, namun baru 96 KDKMP (44%) yang telah memperbarui profil secara aktif.
- Aktivitas Usaha : Saat ini terdapat 4 KDKMP yang sudah memiliki unit usaha, yaitu :
 1. KDKMP Kedungputri – Toko Sembako
 2. KDKMP Tambakromo – Toko Sembako
 3. KDKMP Sidolaju – Jasa Pembayaran BRILink
 4. KDKMP Ngawi – Jasa Pembayaran PLN
- Kemitraan dan Kolaborasi : Terdapat 11 KDKMP yang telah mengajukan permohonan kemitraan dengan BUMN melalui platform SIMKOPDES untuk memperluas jaringan usaha.
- Pendampingan dan Pemberdayaan : Pemerintah Kabupaten Ngawi bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM melalui penugasan 21 tenaga Bisnis Asisten dan 2 Project Management Officer (PMO) yang bertugas mendampingi proses pemberdayaan, pembinaan, dan pengembangan usaha koperasi desa.

8. Progres dan Arah Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ngawi

- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari upaya nasional dalam memperkuat ketahanan pangan



- keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi anak usia sekolah dan kelompok rentan gizi.
- Pemerintah Kabupaten Ngawi berkomitmen untuk mendukung implementasi MBG dengan mengintegrasikan program ini ke dalam kebijakan daerah di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
 - Tahap awal pelaksanaan MBG diarahkan pada pemetaan sasaran prioritas, meliputi siswa PAUD, SD, dan SMP negeri serta swasta, dengan penekanan pada wilayah yang memiliki prevalensi stunting dan tingkat kemiskinan tinggi.
 - Dukungan pelaksanaan MBG akan memanfaatkan sinergi lintas sektor, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta TP PKK Kabupaten Ngawi dalam penyediaan bahan pangan lokal bergizi.
 - Pemerintah daerah juga akan mendorong penguatan rantai pasok pangan lokal melalui kemitraan dengan kelompok tani, UMKM pengolahan pangan, serta koperasi desa untuk memastikan kontinuitas dan kualitas bahan pangan.
 - Dalam jangka menengah, MBG akan menjadi bagian dari strategi penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan status gizi anak sekolah, mendorong konsumsi pangan bergizi seimbang, serta memperkuat budaya makan sehat di lingkungan pendidikan dan keluarga.
 - Pemerintah Kabupaten Ngawi berencana menyusun rencana aksi daerah MBG yang akan menjadi acuan lintas perangkat daerah, termasuk pengaturan sumber pendanaan melalui APBD, DAK, dan potensi dukungan CSR.

9. Kebijakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1) Penguatan Kapasitas UMKM

- Peningkatan kompetensi pelaku usaha melalui pelatihan manajemen, produksi, dan digital marketing.
- Fasilitasi sertifikasi produk (halal, PIRT, dan SNI) untuk meningkatkan daya saing.



- Pendampingan usaha dan inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM potensial agar mampu naik kelas.
- 2) Akses Permodalan
- Penyediaan fasilitas pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana bergulir daerah.
 - Pembentukan lembaga keuangan mikro daerah untuk memperluas akses permodalan.
 - Pemberian subsidi bunga serta penjaminan kredit bagi UMKM produktif.
- 3) Hilirisasi dan Inovasi Produk
- Pengembangan produk olahan berbasis komoditas unggulan lokal.
 - Penyediaan rumah produksi bersama dan pembentukan klaster UMKM sektoral.
 - Peningkatan kualitas kemasan, desain, dan branding produk lokal agar mampu bersaing di pasar regional dan nasional.
- 4) Akses Pasar dan Promosi
- Penguatan pemasaran produk melalui pembangunan galeri dan pusat oleh-oleh UMKM Ngawi.
 - Kerja sama dengan ritel modern serta platform digital untuk memperluas jangkauan distribusi produk.
 - Partisipasi aktif dalam pameran dan promosi produk unggulan daerah, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
- 5) Kelembagaan dan Ekosistem UMKM
- Penguatan peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pusat layanan terpadu bagi pelaku usaha mikro.
 - Pembentukan forum komunikasi UMKM untuk memperkuat kolaborasi dan jejaring antar pelaku usaha.
 - Integrasi data UMKM berbasis digital guna mempercepat transformasi ekonomi lokal.



10. Kebijakan Hilirisasi

a. Penguatan Basis Produksi dan Ketersediaan Bahan Baku

- Peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan konsep Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan.
- Adopsi teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- Penguatan kemitraan antara petani dan industri pengolahan lokal guna menjamin stabilitas pasokan bahan baku dengan standar kualitas industri.
- Revitalisasi kelembagaan kelompok tani dan koperasi untuk memperkuat posisi tawar petani dalam rantai nilai pertanian.
- Pengembangan kawasan sentra komoditas unggulan daerah seperti padi, jagung, tebu, tembakau, dan sapi potong sebagai basis utama hilirisasi.

b. Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi)

- Mendorong investasi industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, mencakup :
 - a. Beras premium, tepung jagung, dan pakan ternak;
 - b. Gula merah tebu dan olahan tembakau bernilai tambah;
 - c. Daging olahan serta produk hasil perikanan.
- Pengembangan kawasan industri berbasis agro (Agro-Industrial Estate) di wilayah strategis Kabupaten Ngawi.
- Pemberian insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan perizinan, akses pembiayaan KUR, dan insentif pajak daerah bagi UMKM hilir agro.
- Fasilitasi alih teknologi dan inkubasi bisnis antara pelaku usaha kecil dengan perguruan tinggi maupun lembaga riset untuk mendorong inovasi produk olahan lokal.

c. Penguatan Rantai Pasok dan Akses Pasar

- Digitalisasi rantai pasok pertanian dan peternakan untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan transparansi transaksi.



- Peningkatan infrastruktur logistik seperti cold storage, rumah kemas, dan gudang bahan baku guna menjaga kualitas produk.
 - Penguatan branding dan sertifikasi produk lokal agar mampu bersaing di pasar domestik dan ekspor.
 - Promosi dan perluasan akses pasar regional maupun ekspor melalui pameran, kerja sama antar daerah, serta integrasi dengan platform perdagangan digital.
- d. Kebijakan Pembiayaan dan Kelembagaan
- Skema pembiayaan inklusif untuk UMKM hilirisasi melalui dana bergulir, KUR klaster, dan kemitraan BUMD.
 - Kemitraan pemerintah-swasta dalam pengelolaan kawasan industri pertanian dan logistik.
 - Pelatihan dan pendampingan SDM di bidang pengolahan, manajemen bisnis, dan pemasaran digital untuk memperkuat kapasitas pelaku hilirisasi.
- e. Kebijakan Lingkungan dan Keberlanjutan
- Penerapan konsep green industry dan circular economy dalam industri pengolahan hasil bumi untuk mengurangi limbah produksi.
 - Pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan menjadi energi biomassa atau pupuk organik guna mendukung ekonomi sirkular.
 - Kebijakan konservasi sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku jangka panjang.

11. Kebijakan Jaminan Produk Halal

- Pemerintah Kabupaten Ngawi mendorong percepatan pelaksanaan sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM daerah, khususnya pada sektor pangan, minuman, serta obat dan jamu tradisional.
- Fasilitasi sertifikasi halal dilakukan melalui pendampingan teknis dan administratif bagi pelaku UMKM agar mampu memenuhi standar proses produk halal sesuai ketentuan nasional.



- Pemerintah daerah menjalin kerja sama strategis dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dalam rangka mempercepat proses sertifikasi dan menurunkan biaya sertifikasi bagi pelaku usaha mikro kecil.
- Program ini juga diintegrasikan dengan kegiatan pelatihan UMKM dan penguatan kualitas produk agar sertifikasi halal dapat berjalan beriringan dengan peningkatan mutu produksi.

12. Kebijakan Lumbung Pangan

Menjaga ketersediaan pangan melalui optimalisasi hasil produksi pertanian menjadi fokus utama Kabupaten Ngawi. Dengan potensi pertanian yang besar, pemerintah daerah berupaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi hasil pertanian lokal melalui penerapan teknologi tepat guna, pengelolaan panen dan pascapanen yang efektif, serta manajemen distribusi pangan yang terintegrasi agar pasokan pangan dari dalam daerah tetap terjaga.

1) Penguatan Produksi Pangan

- a. Peningkatan produktivitas komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lokal dengan teknologi pertanian modern.
- b. Penggunaan benih unggul, pupuk organik, dan penerapan sistem irigasi efisien.
- c. Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal (ubi, umbi, ketela, jagung, dan kacang-kacangan).
- d. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan produksi pangan.

2) Pengembangan Infrastruktur dan Cadangan Pangan

- a. Pembangunan dan revitalisasi lumbung pangan desa sebagai pusat cadangan pangan lokal.
- b. Penguatan sistem distribusi dan logistik pangan, meliputi pembangunan jalan tani, alat angkut, dan cold storage.
- c. Optimalisasi peran BUMDes dan Gapoktan dalam pengelolaan dan operasional lumbung pangan.



- 3) Pengelolaan Stok dan Ketahanan Pangan
 - a. Pembentukan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi musim paceklik dan krisis.
 - b. Monitoring harga dan stok pangan secara digital dan terintegrasi.
 - c. Fasilitasi kerja sama dengan Bulog dan sektor swasta dalam penyimpanan serta distribusi bahan pangan pokok.
- 4) Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Pangan
 - a. Penguatan kelembagaan kelompok tani, gapoktan, dan koperasi pangan sebagai aktor utama pengelolaan pangan daerah.
 - b. Pelatihan pengelolaan pascapanen, penyimpanan, serta manajemen lumbung pangan berbasis efisiensi dan keberlanjutan.
- 5) Hilirisasi dan Nilai Tambah Pangan
 - a. Pengembangan industri olahan pangan lokal seperti beras kemasan, tepung jagung, dan olahan kedelai bernilai tambah.
 - b. Promosi produk pangan lokal sebagai bagian dari branding “Ngawi Lumbung Pangan Jawa Timur.”
 - c. Dukungan teknologi pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk pangan untuk memperluas akses pasar.
- 6) Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Berkelanjutan
 - a. Pengembangan sistem pangan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi
 - b. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak dan pupuk organik untuk mendukung ekonomi sirkular dan mengurangi ketergantungan pada input kimia.

13. Kebijakan Pekerjaan Umum

Arah kebijakan program pekerjaan umum Kabupaten Ngawi sejalan dengan RPJMN 2025–2029, yang menitikberatkan pada penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan dasar masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pembangunan jalan, jembatan, serta



pengelolaan sumber daya air (SDA) secara berkelanjutan dan terintegrasi, termasuk penguatan tata ruang perkotaan dan kawasan industri yang mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

1) Infrastruktur Jalan dan Jembatan

- a. Preservasi jalan : Peningkatan kualitas infrastruktur melalui pemeliharaan rutin, perbaikan konstruksi, dan pemenuhan kelengkapan fasilitas jalan.
- b. Pembangunan jalan dan jembatan : Pembangunan jaringan jalan utama yang menghubungkan kawasan industri, pariwisata, simpul transportasi, serta wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan kawasan perbatasan.
- c. Penataan jalan perkotaan : Revitalisasi jaringan jalan perkotaan dengan konsep jalan lingkar, simpang sebidang, dan pengembangan transportasi massal; termasuk pembangunan jalan baru seperti *elevated road* atau *submerged road* untuk mengurangi kemacetan dan meminimalkan pembebasan lahan.

2) Sumber Daya Air (SDA)

- a. Pendayagunaan SDA : Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sarana prasarana air baku guna menjamin ketersediaan air bagi rumah tangga, industri, dan pertanian.
- b. Pengelolaan irigasi : Optimalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung produktivitas pertanian.
- c. Cakupan pengelolaan air : Peningkatan kapasitas tampungan air, perluasan lahan sawah beririgasi fungsional, dan perlindungan kawasan prioritas dari kerusakan sumber daya air.

3) Pembangunan Perkotaan dan Lingkungan

- a. Infrastruktur kota : Pembangunan infrastruktur perkotaan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).



- b. Pengelolaan drainase dan trotoar : Peningkatan sistem drainase untuk mencegah banjir serta pembangunan trotoar ramah pejalan kaki.
 - c. Pemanfaatan teknologi : Penerapan teknologi *smart living* dan *smart mobility* untuk mendukung hunian cerdas dan sistem lalu lintas modern, termasuk optimalisasi simpang tak sebidang.
- 4) Dukungan terhadap Pembangunan Nasional
- a. Pengembangan wilayah : Kabupaten Ngawi diarahkan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi yang berperan dalam mendukung struktur ekonomi nasional yang kuat, mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, serta meningkatkan konektivitas antar pusat ekonomi dan kawasan strategis nasional.

14. Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Ngawi

- Pengembangan kawasan industri diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur.
- Kawasan Industri Ngawi dikelola oleh PT SIER dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta kementerian/lembaga terkait.
- Lokasi pengembangan kawasan industri masuk dalam jaringan ekonomi strategis yang terhubung dengan kawasan Gresik–Surabaya–Mojokerto–Sidoarjo–Lamongan dan Bromo–Tengger–Semeru–Selingkar Wilis–Lintas Selatan.

Arah kebijakan pembangunan kawasan industri diarahkan pada :

- 1) Fokus pengembangan lahan hutan dan non hutan :
 - a. Optimalisasi area penggunaan lahan hutan dengan izin resmi dari Kementerian Kehutanan.
 - b. Pengembangan diarahkan ke lahan nonhutan sesuai peruntukan kawasan industri.



- c. Pemerintah daerah bersama pengelola kawasan mendorong percepatan Rencana Kegiatan Kawasan Peruntukan Ruang (RKKPR) dan penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).
- 2) Peningkatan konektivitas dan infrastruktur penunjang :
 - a. Pengembangan kawasan industri didukung oleh Exit Tol Walikukun sebagai akses strategis ruas Tol Solo–Ngawi, yang menghubungkan kawasan industri dengan pelabuhan, bandara, dan jalur nasional.
 - b. Infrastruktur ini memperkuat daya tarik investasi dan memperlancar distribusi logistik kawasan industri.
- 3) Pengembangan industri prioritas yang ramah lingkungan dan padat karya :
 - a. Fokus pada industri pengolahan pangan berbasis agro, industri manufaktur padat karya, serta pengolahan limbah berbasis teknologi ramah lingkungan.
 - b. Mendorong penciptaan lapangan kerja lokal dan pengembangan industri berkelanjutan yang berdaya saing tinggi.

15. Tahapan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Daerah (Dinas PUPR)

- Tahap I (2026) : Peningkatan kapasitas dan implementasi inovatif untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta infrastruktur digital yang mendukung logistik pertanian dan akses pasar.
- Tahap II (2027) : Ekspansi program unggulan dan integrasi sistem menuju kemandirian ekonomi berbasis keberlanjutan melalui pengembangan jaringan irigasi tersier dan infrastruktur penunjang ekonomi perdesaan.
- Tahap III (2028) : Pemantapan capaian dan inovasi berkelanjutan untuk daya saing daerah melalui konektivitas jalan utama penghubung pusat pertumbuhan ekonomi regional dan penguatan infrastruktur ekonomi nonpertanian.



- Tahap IV (2029) : Pemantapan capaian dan proyeksi keberlanjutan pembangunan jangka menengah dengan peningkatan kualitas infrastruktur strategis, khususnya jalan dan jembatan penghubung sentra produksi, kawasan ekonomi, dan pusat pelayanan.
- Tahap V (2030) : Penguatan keberlanjutan dan persiapan visi jangka panjang daerah melalui pemeliharaan berkala infrastruktur yang telah terbangun serta perencanaan infrastruktur strategis baru untuk konektivitas regional dan nasional, khususnya jalur distribusi produk unggulan daerah.

16. Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Progres Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di Kabupaten Ngawi

- Kabupaten Ngawi berkomitmen mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah untuk memperluas akses kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
- Pemerintah Kabupaten Ngawi berpartisipasi aktif melalui berbagai bentuk dukungan dan kolaborasi lintas sektor, antara lain :
 - 1) Alokasi APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3,7 miliar untuk bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi 185 penerima manfaat, yang saat ini telah masuk tahap penyerahan buku tabungan dan dropping material.
 - 2) Sebanyak 213 pemerintah desa memberikan dukungan minimal 2 unit RTLH per desa per tahun, melalui APBDes sebesar Rp10 juta per unit, sesuai Surat Edaran Bupati Ngawi Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Dana Desa.
 - 3) Kabupaten Ngawi menerima bantuan APBN melalui Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 151 unit RTLH, dilaksanakan oleh BP3KP Jawa Timur.
 - 4) Baznas Kabupaten Ngawi turut menyalurkan bantuan untuk 12 unit RTLH.



- 5) Instruksi Bupati Ngawi telah diterbitkan kepada seluruh kepala desa untuk melakukan pendataan rumah tidak layak huni dalam rangka mendukung target program 3 juta rumah.
- 6) Dalam RPJMD 2026–2030, Pemerintah Kabupaten Ngawi menargetkan 2.000 penerima bantuan BPRTLH, yang juga dituangkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2026–2030.

B. Implikasi Kebijakan untuk Pengelolaan Persampahan di Daerah

- Pemerintah daerah perlu menyiapkan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS/RISPAM) secara komprehensif sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional.
- Fokus pengelolaan tidak hanya pada pengumpulan, tetapi juga mencakup desain sistem pengolahan dan pemilahan di sumber, dengan dukungan fasilitas TPS-3R, TPST, PDU, dan pusat olah organik.
- Penerapan teknologi modern (Waste to Energy/WTE, Refuse Derived Fuel/RDF) menjadi opsi strategis bagi TPA besar di wilayah urban.
- Model pembiayaan dan bisnis pengelolaan sampah perlu diperkuat melalui pengaturan tarif/retribusi, pemanfaatan dana CSR, keterlibatan sektor swasta, serta skema insentif dan disinsentif.
- Edukasi dan perubahan perilaku masyarakat menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah, terutama untuk pemilahan di sumber dan pemanfaatan kembali.
- Monitoring terhadap indikator nasional persampahan perlu diperhatikan, seperti :
 - a. Persentase rumah tangga terlayani;
 - b. Persentase sampah terolah;
 - c. Pengurangan residu sampah;



- d. Pengelolaan sampah perlu diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan lain seperti kota cerdas, ekonomi hijau, dan adaptasi perubahan iklim.

3.4.3.2. Arah Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045

Setelah mencermati visi dan lima misi pembangunan Kabupaten Ngawi untuk periode 2025-2029, dengan penetapan Kabupaten Ngawi sebagai Lumbung Pangan sebagai visi utama Bupati, langkah berikutnya adalah menerjemahkan arah pembangunan tersebut ke dalam kerangka tata kelola ruang yang terencana dan terukur. Visi strategis ini tidak hanya menuntut perumusan program kerja yang inovatif, namun juga mensyaratkan penataan ruang yang sistematis, efisien, dan berkelanjutan, guna mengoptimalkan potensi wilayah sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

Oleh karena itu, arah kebijakan penataan ruang Kabupaten Ngawi menjadi fondasi fundamental dalam merealisasikan tujuan pembangunan daerah. Kebijakan ini akan memandu alokasi dan pengembangan setiap wilayah di Ngawi, memastikan bahwa pemanfaatan ruang selaras dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas dan keberlanjutan sektor pangan, kualitas pelayanan publik, konektivitas antarwilayah, serta terjaganya kondusivitas yang mendukung keberlanjutan pembangunan. Melalui kebijakan ini, komitmen terhadap keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya pangan, dan pemerataan kesejahteraan menjadi prioritas utama. Arah strategis inilah yang selanjutnya akan dieksplisitkan dalam Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Kabupaten Ngawi.

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Kabupaten Ngawi merupakan kerangka strategis yang menguraikan distribusi sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana sebagai fondasi pengembangan wilayah. Struktur ruang ini dirancang untuk mengoptimalkan konektivitas, efisiensi logistik, dan pemerataan



akses terhadap layanan, yang secara fundamental mendukung visi Ngawi sebagai Lumbung Pangan serta akselerasi misi pembangunan daerah.

Beberapa komponen utama dari Rencana Struktur Ruang meliputi :

1) Jaringan Jalan Tol :

- Ruas Jalan Tol Solo – Ngawi.
- Ruas Jalan Tol Ngawi – Kertosono.
- Ruas Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro.

Implikasi : Memperkuat posisi Ngawi sebagai simpul transportasi strategis, krusial untuk distribusi hasil pertanian dan akses pasar.

2) Sistem Terminal :

- Terminal Tipe A di Kabupaten Ngawi (Kertonegoro).
- Empat Terminal Tipe C di Kecamatan Widodaren, Kwadungan, Pangkur, dan Bringin.

Implikasi : Mendukung mobilitas lokal dan regional, serta memfasilitasi pergerakan barang dan jasa.

3) Jaringan Jalan Lainnya : Meliputi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, hingga jalan lingkungan sekunder, menjamin konektivitas hingga ke sentra-sentra produksi.

4) Jaringan Jalur Kereta Api : Berupa jaringan jalur kereta api antar kota dengan jalur Surabaya – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Madiun – Ngawi – Solo.

Implikasi : Meningkatkan kapasitas angkutan barang dan penumpang, mendukung efisiensi logistik pertanian skala besar.

5) Pelabuhan Sungai dan Danau : Terdapat di Kecamatan Widodaren, Kwadungan, Pangkur, dan Bringin.

Implikasi : Memanfaatkan potensi perairan lokal untuk transportasi alternatif, terutama dalam mendukung pengangkutan hasil bumi.

6) Sistem Pusat Permukiman :

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ngawi, meliputi Kecamatan Ngawi, Pitu, Kasreman, Geneng, dan Paron.



- PKL Karangjati, meliputi Kecamatan Karangjati, Bringin, dan Padas.
- PKL Widodaren, meliputi Kecamatan Widodaren, Kedunggalar, Mantingan, dan Karanganyar.

Implikasi : Pusat-pusat ini berperan sebagai simpul pelayanan publik dan potensi pengembangan klaster ekonomi, termasuk pengolahan hasil pertanian, selaras dengan Misi 2 (Peningkatan Produktivitas Ekonomi) dan Misi 4 (Peningkatan Akses dan Konektivitas).

B. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Kabupaten Ngawi menggambarkan distribusi peruntukan ruang dalam bentuk kawasan lindung dan kawasan budidaya, dengan proporsi yang secara tegas mendukung visi Lumbung Pangan. Data menunjukkan dominasi signifikan kawasan budidaya yang mencapai 97% dari total luas wilayah, sementara kawasan lindung sebesar 3%, mencerminkan orientasi pembangunan yang berfokus pada produktivitas dengan tetap memperhatikan aspek konservasi.

Pola Ruang ini dialokasikan sebagai berikut :

1) Kawasan Lindung (3% dari total luas) :

- Badan Air.
- Kawasan Cagar Budaya.
- Kawasan Hutan Lindung.
- Kawasan Keunikan Batuan dan Fossil.
- Kawasan Lindung lainnya.

Implikasi : Meskipun kecil, alokasi ini vital untuk menjaga keseimbangan ekosistem, kualitas sumber daya air, dan keberlanjutan lingkungan yang menopang pertanian.

2) Kawasan Budidaya (97% dari total luas) :

- Kawasan Tanaman Pangan : 53.218,63 Ha (38,13%) – Proporsi terbesar dari seluruh kawasan budidaya.

Implikasi : Penegasan kuat terhadap visi Lumbung Pangan dan prioritas pengembangan sektor pertanian. Ini menjadi fondasi spasial untuk implementasi kebijakan dan program



yang mendorong produktivitas dan praktik pertanian berkelanjutan.

- Kawasan Permukiman Perkotaan : 17.635,29 Ha (12,63%).
- Kawasan Permukiman Perdesaan : 13.905,22 Ha (9,68%).
- Kawasan Hutan Produksi Tetap : 41.282,68 Ha (29,58%).
- Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Peruntukan Industri : 1.214,05 Ha (0,87%).
- Kawasan Perkebunan Rakyat : 4.385,86 Ha (3,14%).
- Kawasan Perindustrian : 2.072,66 Ha (1,49%).
- Kawasan Transportasi : 13,85 Ha (0,01%).
- Kawasan Pariwisata : 13,91 Ha (0,01%).
- Kawasan Perlindungan dan Keamanan : 128,09 Ha (0,09%).
- Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan : 40,18 Ha (0,03%).

Implikasi : Alokasi ini menunjukkan diversifikasi penggunaan lahan yang mendukung berbagai sektor ekonomi dan kebutuhan sosial, sejalan dengan Misi 2 (Peningkatan Produktivitas Ekonomi) dan Misi 5 (Peningkatan Kondusifitas Pembangunan).

C. Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Ngawi

Dalam rangka memperkuat struktur perekonomian daerah, pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Ngawi merupakan salah satu prioritas strategis yang selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan serta Kawasan Bromo–Tengger–Semeru dan Selingkar Wilis–Lintas Selatan. Kawasan Industri Ngawi telah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan



pengelolaan oleh PT SIER dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Kementerian/Lembaga terkait

Arah kebijakan pembangunan Kawasan Industri Ngawi diarahkan pada :

1) Fokus Pengembangan Lahan Hutan dan Non Hutan.

Pengembangan tahap pertama Kawasan Industri difokuskan pada optimalisasi Area Penggunaan Lahan Hutan yang memerlukan izin resmi dari Kementerian Kehutanan. Proses perolehan izin ini menjadi langkah awal penting untuk memastikan keberlanjutan dan legalitas pengelolaan kawasan tersebut. Setelah izin kehutanan diperoleh, pengembangan akan diarahkan pada lahan non hutan seluas yang telah ditetapkan peruntukannya sebagai kawasan industri. Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama pengelola kawasan mendorong percepatan proses Rencana Kegiatan Kawasan Peruntukan Ruang (RKKPR) dan Persetujuan Lingkungan sebagai dasar penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).

2) Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur Penunjang.

Pengembangan Kawasan Industri Ngawi didukung oleh pembangunan infrastruktur strategis berupa Exit Tol Walikukun pada ruas tol Solo–Ngawi. Keberadaan exit tol ini menjadi akses utama yang menghubungkan kawasan industri dengan jaringan jalan nasional, pelabuhan, dan bandar udara, sehingga memperkuat daya tarik investasi.

3) Pengembangan Industri Prioritas yang Ramah Lingkungan dan Padat Karya

Kebijakan pengembangan industri di kawasan ini diarahkan pada sektor-sektor yang ramah lingkungan dan berdaya saing, meliputi industri pengolahan pangan berbasis agro, industri manufaktur padat karya, serta industri pengolahan limbah dengan teknologi ramah lingkungan. Fokus ini sejalan dengan komitmen



pembangunan berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja lokal.

4) Dukungan Investasi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan kepastian regulasi, dukungan perizinan, dan promosi investasi dalam rangka menarik minat investor. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang *link and match* dengan kebutuhan industri menjadi bagian integral dari strategi pengembangan kawasan.

5) Sinkronisasi Kebijakan dan Percepatan Implementasi PSN.

Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mendukung penuh percepatan proses perizinan, sinkronisasi kebijakan tata ruang, serta koordinasi dengan pemerintah pusat. Pengelola kawasan diharapkan menyusun rencana aksi dan milestone secara terukur, sehingga pembangunan Kawasan Industri Ngawi dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3.4.5 Program Prioritas Daerah

Program prioritas pembangunan daerah adalah serangkaian program strategis yang disusun untuk mencapai visi dan misi kepala daerah, serta menyelesaikan isu-isu utama yang dihadapi Kabupaten Ngawi. Program ini menggabungkan dimensi politik dan teknokratik, dimana dalam dimensi politik, program-program tersebut mencerminkan janji politik kepala daerah yang harus terealisasi melalui kegiatan nyata. Sementara dalam dimensi teknokratik, program prioritas disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.



Program prioritas ini mencakup langkah-langkah operasional yang memiliki relevansi tinggi terhadap permasalahan yang ada, serta bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas layanan publik.



Tabel 3.6 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(07)
"SEMESTA BERENCANA" TERWUJUDNYA LUMBUNG PANGAN NASIONAL YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN NGAWI SEJAHTERA, BERAKHLAK DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG - Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bagi masyarakat - Meningkatnya produktivitas ekonomi melalui diversifikasi pertanian, industrialisasi, dan penguatan sektor-sektor ekonomi dalam penciptaan lapangan pekerjaan - Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui integrasi antar layanan pemerintah dan publik berbasis Teknologi Informasi - Meningkatnya akses dan konektivitas antar daerah yang menunjang keberlangsungan aktivitas	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks)			
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat		Indeks Pendidikan (Indeks)			
			Meningkatnya Mutu Pendidikan	Nilai assesment SMP (Numerasi) (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan Kesenjangan dan Inklusi	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Nilai assesment SD (Literasi) (Angka)		Peningkatan Sekolah Adiwiyata dan Ramah Anak secara Merata	
				Nilai assesment SMP (Literasi) (Angka)		Peningkatan Kapasitas Guru TPA/TPQ dan Sekolah Minggu	
				Nilai assesment SD (Numerasi) (Angka)			
			Meningkatnya partisipasi pendidikan masyarakat	Angka partisipasi sekolah (7-15) (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan Kesenjangan dan Inklusi	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Angka partisipasi sekolah (7-18) (Angka)		Peningkatan Sekolah Adiwiyata dan Ramah Anak secara Merata	
				Angka partisipasi sekolah (5-6) (Angka)			



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
ekonomi - Meningkatkan kondusifitas daerah yang mendukung keberlanjutan pembangunan		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Indeks Kesehatan (Indeks)			
			Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Fasilitas dan Integrasi Layanan Primer Kesehatan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
				Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)			
				Persentase RS Pemerintah dengan Akreditasi Paripurna (%)			
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)			
				Persentase Labkesmas yang terakreditasi (%)			
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana alkes dan perbekalan kesehatan layanan kesehatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana alkes dan perbekalan kesehatan layanan kesehatan	Proporsi fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Fasilitas dan Integrasi Layanan Primer Kesehatan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
				Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar (Angka)			
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Fasilitas dan Integrasi Layanan Primer Kesehatan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
				Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)			
				Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)			
				Insidensi HIV (Angka)			
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)			

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
				Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria (Per 1000 Penduduk)			
				Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)			
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)			
				Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)			
				Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)			
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	"Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN" (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Fasilitas dan Integrasi Layanan Primer Kesehatan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
			Meningkatnya status kesehatan sesuai siklus hidup	Angka Kematian Balita (Per 1000)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Zero Stunting	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
				Prevalensi Depresi pada usia lebih dari sama dengan 15 tahun (Angka)			
				Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)			
				Prevalensi Stunting (%)			
			Terwujudnya UHC (Universal Health Coverege) di Kabupaten Ngawi	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan kemanfaatan Kartu Semesta Berkeadilan untuk Jaminan Kesehatan Gratis	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Optimalisasi PHBS Masyarakat	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Peningkatan Fasilitas dan Integrasi Layanan Primer Kesehatan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
				Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)			
		Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan (%)			
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Peningkatan kemanfaatan Kartu Semesta Berkeadilan untuk beasiswa Pendidikan Mahasiswa Miskin	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberdayaan Disabilitas Bantuan Permakanan bagi Masyarakat Non Produktif	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
		Meningkatnya kualitas Pemuda yang Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Pemuda (Indeks)			
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Peningkatan Fasilitas Olahraga yang Representatif	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kebudayaan dan prestasi olah raga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga Provinsi dan nasional (Medali)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Fasilitas Olahraga yang Representatif	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
		Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)			
			Meningkatnya Kualitas Data Keluarga	Persentase Data Keluarga yang valid (%)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Zero Stunting	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga memiliki ketahanan keluarga yang aktif (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Zero Stunting	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Zero Stunting	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)			
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan		Rasio Gini (%)			
				Pertumbuhan Ekonomi (%)			
		Meningkatnya Laju Ekonomi Sektor Utama		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (Rp)			
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)			
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)			
				Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Kehutanan Perikanan (Angka)			



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan usaha pariwisata (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengembangan Destinasi Wisata berbasis Potensi Lokal	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas SDM Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan pelatihan / pendampingan (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Destinasi Wisata berbasis Potensi Lokal	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata	Persentase pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan pengembangan pelatihan / pendampingan (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Destinasi Wisata berbasis Potensi Lokal	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
			Meningkatnya kualitas kelembagaan petani	Persentase kelompok tani yang meningkat nilai kelembagaannya (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Petani Millenial dan Modernisasi Pertanian	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
			Meningkatnya produktifitas pertanian tanaman pangan	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Jagung (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Petani Millenial dan Modernisasi Pertanian	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
			Meningkatnya produktifitas pertanian tanaman perkebunan dan hortikultura	Produktivitas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Alpukat (Ton/Ha) Produktivitas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Melon (Ton/Ha) Produktivitas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Bawang Merah (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
				Produktivitas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Tembakau (Ton/Ha)		Petani Millenial dan Modernisasi Pertanian	
				Produktivitas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Cabai (Ton/Ha)			
				Produktivitas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Kopi (Ton/Ha)			
			Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian untuk budidaya tanaman pangan	Indek Pertanaman Tanaman Pangan (Angka)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
			Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian untuk budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura	Indek Pertanaman Perkebunan dan Hortikultura (Angka)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
						Peningkatan Kemudahan Akses Permodalan bagi Petani	
			Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Peternakan	Persentase pelaku obat hewan yang mendapatkan pembinaan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Petani Millenial dan Modernisasi Pertanian	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
				Jumlah produksi komoditas unggulan peternakan (Kg)			
Meningkatnya kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengolahan sarana distribusi perdagangan yang layak (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Revitalisasi Pasar Tradisional dan Pasar Hewan Terpadu	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian			



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan budidaya (Kg)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Perikanan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)			
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Coefisien variasi (CV) harga pangan (Angka)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Petani Millenial dan Modernisasi Pertanian	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
				Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) (%)			
		Meningkatnya keamanan pangan segar		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Petani Millenial dan Modernisasi Pertanian	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
		Meningkatnya ketersediaan pangan		Persentase Ketersediaan Pangan (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Petani Millenial dan Modernisasi Pertanian	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
		Meningkatnya kemandirian desa		Indeks Desa Membangun (Indeks)			
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Capaian Status Desa Mandiri	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				Persentase Aparatur Desa dan anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya (%)			



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata		Jumlah Tamu Wisatawan (Angka)			
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan usaha pariwisata (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengembangan Destinasi Wisata berbasis Potensi Lokal	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas SDM Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan pelatihan / pendampingan (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Destinasi Wisata berbasis Potensi Lokal	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata	Persentase pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan pengembangan pelatihan / pendampingan (%)			
		Meningkatnya realisasi investasi daerah		ICOR (%)			
				Realisasi Investasi (Rp)			
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Kemudahan Layanan Perijinan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
			Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-rata waktu pelayanan perizinan dan non perizinan (Hari)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Kemudahan Layanan Perijinan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Kemudahan Layanan Perijinan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
			Meningkatnya pengendalian penanaman modal	Persentase investor yang taat pelaporan LKPM (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Investasi melalui Kawasan Industri Ramah Lingkungan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
			Meningkatnya keterampilan dan produktifitas tenaga kerja	Persentase peningkatan keterampilan dan produktifitas tenaga kerja (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Berstandar Nasional dan Visioner mengikuti Perkembangan Zaman	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
		Meningkatkan pertumbuhan UMKM naik kelas/status		Persentase UMKM yang naik Kelas/Status (%)			
			Meningkatnya Kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundangan	Persentase koperasi yang taat peraturan perundangan (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Penguatan kelembagaan Koperasi	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			Meningkatnya Kualitas Produk UMKM	Persentase UMKM yang memiliki produk unggulan (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Kemudahan Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM (%)			
			Meningkatnya volume usaha koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Peningkatan Kemudahan Akses Permodalan bagi Petani	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
		Meningkatkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)			
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah		% kontribusi PAD terhadap APBD (%)			
				Rasio kapasitas fiskal daerah (Rasio)			



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
						Penyesuaian NJOP PBB (standar harga pasar) kecuali lahan pertanian berkelanjutan (LP2B)	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		Indeks Pemerintah Digital (Indeks)			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pemkab. Ngawi (Indeks)			
				Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)			
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Transformasi Perpustakaan dan Kearsipan Digital Peningkatan Akses Layanan Teknologi Informasi di Desa secara Merata	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Transformasi Perpustakaan dan Kearsipan Digital Peningkatan Akses Layanan Teknologi Informasi di Desa secara Merata	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase penduduk dengan akta pencatatan sipil (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan Kemudahan Akses Layanan Kependudukan Gratis di Tiap Kecamatan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Peningkatan Kemudahan Akses Layanan Kependudukan Gratis di Tiap Kecamatan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pengukuran kinerja daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan Pembangunan Semesta Berencana berbasis TI	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra-PD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Program Satu Data berbasis Geo – AI	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Transformasi Perpustakaan dan Kearsipan Digital	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
				Persentase perpustakaan Yang terakreditasi minimal B (%)			
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Kearsipan Secara Baku (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Transformasi Perpustakaan dan Kearsipan Digital	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)			
				Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) (Nilai)			
				Nilai SAKIP (Nilai)			
			Meningkatnya akurasi data kepegawaian	Persentase ASN dengan data kepegawaian yang akurat (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Kesejahteraan ASN berbasis Kinerja	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
			Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Kesejahteraan ASN berbasis Kinerja	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
			Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Kesejahteraan ASN berbasis Kinerja	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
			Meningkatnya kualitas Penataan ASN	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Kesejahteraan ASN berbasis Kinerja	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
				Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya (%)			
			meningkatkan Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Peningkatan Inovasi guna Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
			Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai pelaporan kinerja daerah pada hasil Nilai AKIP Daerah (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Layanan Publik predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih melayani (WBBM)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
	Meningkatnya Infrastruktur Berkelanjutan		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi, serta perumusan kebijakan	Persentase Pendampingan, Asistensi dan Konsultasi, serta Perumusan Kebijakan yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai prosedur (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Peningkatan Kualitas Layanan Publik predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih melayani (WBBM)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
				Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)			
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur		Indeks Pembangunan Infrastruktur (Indeks)			
				Indeks Konektivitas Transportasi (Indeks)			
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman yang Sehat	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukim
			Meningkatnya kemandapan jalan	Tingkat Kemandapan Jalan (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Kualitas dan Volume Jalan dan Jembatan Integrasi Pelayanan Infrastruktur Paripurna/Mantap	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase panjang Irigasi dalam kondisi baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Peningkatan Infrastruktur Pertanian	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Ruas Jalan yang sesuai Standard keselamatan lalu Lintas (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian untuk budidaya tanaman pangan	Indek Pertanaman Tanaman Pangan (Angka)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Infrastruktur Pertanian	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian untuk budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura	Indek Pertanaman Perkebunan dan Hortikultura (Angka)			
			Meningkatnya rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rehabilitasi menuju Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM	Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman yang Sehat	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
						Integrasi Pelayanan Infrastruktur Paripurna/Mantap	
						Percepatan Pemenuhan Air Bersih Masyarakat	
			Menurunnya luasan Kawasan Kumuh	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rehabilitasi menuju Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TON CO2 EQ)			



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)			
				Indeks Resiko Bencana (Indeks)			
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Optimalisasi Penanggulangan Bencana Integrasi Pelayanan Infrastruktur Paripurna/Mantap	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Optimalisasi Penanggulangan Bencana	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)			
				Prosentase Penyelamatan Non Kebakaran (%)			
			Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Optimalisasi Penanggulangan Bencana Integrasi Pelayanan Infrastruktur Paripurna/Mantap	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Optimalisasi Penanggulangan Bencana	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya kualitas penanganan pasca bencana	Persentase Sistem Pemulihan Pasca Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Optimalisasi Penanggulangan Bencana	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN	
						Integrasi Pelayanan Infrastruktur Paripurna/Mantap	Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
			Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kabupaten	IKL (Indeks Kualitas Lahan) (Indeks)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Integrasi Pelayanan Infrastruktur Paripurna/Mantap	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	
				Persentase RTH (Persentase)				
			Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Persentase koevisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Mandiri Energi Gas LPG	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan Fasilitas TPA dan TPS 3R	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	
						Integrasi Pelayanan Infrastruktur Paripurna/Mantap		
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (%)		Uji Coba TPS3R minimal 1 Kelurahan 2 TPS3R		
						Program Pilah Sampah dari Rumah <i>Punishment : Jika tidak dipilah sampah tidak diangkat</i> <i>Reward : Gratis Wood Pallet, Prog Pengelolaan Persampahan</i>		
			Meningkatnya Harmoni Sosial			Indek kesalehan Sosial (Indeks)		
		Meningkatnya pelestarian budaya		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)				



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase seni budaya yang dilindungi (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Ngawi Berbudaya melalui Peningkatan Seni Tradisi dan Budaya Lokal	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (Indeks)			
				Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Indeks)			
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kebangsaan	Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Ngawi Zero Konflik melalui Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase konflik Sosial yang ditangani (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Ngawi Zero Konflik melalui Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas aktif yang mendorong wawasan kebangsaan (%)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Ngawi Zero Konflik melalui Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Penurunan konflik Agama, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Ngawi Zero Konflik melalui Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaika	Persentase konflik Sosial yang ditangani (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Ngawi Zero Konflik melalui Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Meningkatnya Kualitas Kegiatan-kegiatan Pembinaan Mental Spiritual Bagi Masyarakat dan Aparatus Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Koordinasi Keagamaan yang ditindaklanjuti (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Ngawi Zero Konflik melalui Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Hasil Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat Yang ditindaklanjuti (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Ngawi Zero Konflik melalui Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Ngawi Zero Konflik melalui Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya partisipasi pendidikan masyarakat	Angka partisipasi sekolah (7-15) (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Kapasitas Guru TPA/TPQ dan Sekolah Minggu	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Angka partisipasi sekolah (7-18) (Angka)			
				Angka partisipasi sekolah (5-6) (Angka)			



Pada program-program prioritas di atas yang dicanangkan Kabupaten Ngawi dirancang secara cermat untuk sejalan dan mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keselarasan ini memastikan bahwa alokasi sumber daya, baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN, dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar dan berkesinambungan. Sinergi ini tidak hanya mempercepat realisasi target-target pembangunan di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan, menciptakan dampak yang lebih luas dan merata bagi kesejahteraan masyarakat.

Adapun program prioritas ekonomi Kabupaten Ngawi yang mendukung Program Prioritas ekonomi Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Dewi Cemara (Desa Wisata Cerdas, Mandiri, Sejahtera) : Program Dewi Cemara merupakan inisiatif strategis Kabupaten Ngawi untuk mengembangkan potensi desa melalui konsep pariwisata yang cerdas dan berkelanjutan. Dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat desa, pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi dan pengelolaan wisata, serta peningkatan kemandirian ekonomi lokal, Dewi Cemara secara langsung berkontribusi pada pengembangan ekonomi kreatif perdesaan yang menjadi salah satu prioritas Jawa Timur.
- 2) Pariwisata : Geopark : Pengembangan Geopark di Kabupaten Ngawi adalah langkah ambisius dalam menonjolkan kekayaan geologi dan warisan alam daerah sebagai daya tarik pariwisata kelas dunia. Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga pada konservasi alam, edukasi geologi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar melalui pariwisata berkelanjutan. Inisiatif Geopark ini sangat sejalan dengan upaya Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan destinasi pariwisata unggulan dan berbasis konservasi.

- 3) Ekosistem Halal (Pariwisata, Industri, Koperasi UMKM) : Kabupaten Ngawi tengah membangun ekosistem halal yang komprehensif, mencakup sektor pariwisata, industri, hingga pengembangan Koperasi dan UMKM. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan produk dan layanan yang memenuhi standar halal, sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Pengembangan ekosistem halal merupakan agenda strategis Provinsi Jawa Timur dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah.
- 4) Koperasi Sektor Riil : Program penguatan Koperasi Sektor Riil di Ngawi bertujuan untuk merevitalisasi peran koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, pengolahan, dan perdagangan. Dengan mendorong koperasi untuk berorientasi pada kegiatan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan, Kabupaten Ngawi berkontribusi pada penciptaan nilai tambah, pemerataan kesejahteraan, dan pemberdayaan ekonomi akar rumput. Hal ini sejalan dengan fokus Provinsi Jawa Timur dalam penguatan ekonomi kerakyatan.
- 5) YC2 (Youth Creativepreneur) : YC2 adalah program yang berfokus pada pengembangan jiwa kewirausahaan dan kreativitas di kalangan generasi muda Ngawi. Melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi, YC2 mendorong munculnya *creativepreneur* yang mampu menciptakan inovasi dan lapangan kerja baru, terutama di era ekonomi digital. Inisiatif ini sangat relevan dengan prioritas Provinsi Jawa Timur dalam mempersiapkan bonus demografi dan menciptakan ekosistem inovasi bagi generasi muda.
- 6) Peti Koin Bermantra : Meskipun dengan nama yang unik, "Peti Koin Bermantra" mencerminkan program inovatif Kabupaten Ngawi yang kemungkinan besar berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema partisipatif, seperti penggalangan dana swadaya, pengelolaan aset komunitas, atau literasi keuangan mikro. Inisiatif ini



bertujuan untuk mendorong kemandirian finansial dan kolaborasi di tingkat akar rumput, yang merupakan pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan kolektif.

Selanjutnya, terdapat beberapa program prioritas Kemendikdasmen yang akan di dukung oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, antara lain :

- a. Penerapan 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
- b. Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- c. Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan.
- d. Digitalisasi Sekolah.
- e. Pembelajaran Mendalam (Deep Learning).
- f. Sekolah Model Transformatif.
- g. Penguatan Bimbingan Konseling di Sekolah.
- h. Wajib Belajar 13 Tahun.
- i. Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RPJMD
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGAWI
2025-2029





BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah yang mencakup seluruh program yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah serta program penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Program-program ini merupakan bagian dari strategi implementasi RPJMD yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kabupaten Ngawi selama periode 2025–2029. Selain itu, bab ini juga menyajikan kerangka pendanaan yang bersumber dari hasil analisis gambaran keuangan daerah dalam Bab III. Kerangka pendanaan ini menjelaskan sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai program-program prioritas daerah dan penunjangnya.

Penyusunan program perangkat daerah Kabupaten Ngawi dalam RPJMD 2025–2029 telah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan potensi unggulan wilayah. Salah satu strategi yang menjadi acuan adalah penguatan kelembagaan koperasi berbasis potensi lokal, sebagaimana ditunjukkan dalam upaya mendukung Koperasi Merah Putih. Program-program yang disusun perangkat daerah diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas kelembagaan, tetapi juga integrasi dengan berbagai sumber pendanaan, termasuk APBD dan Dana Desa, sehingga peran koperasi dapat lebih nyata sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, penyusunan program ini juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam memperkuat ekosistem pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemanfaatan Dana Desa secara optimal diposisikan sebagai instrumen penting untuk mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi desa, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan yang partisipatif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program yang dirumuskan dalam RPJMD tidak hanya berorientasi pada pencapaian target makro pembangunan, tetapi





juga diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi lokal melalui kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU merupakan indikator yang mengukur pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan, sementara IKD mengukur efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU dan IKD ini akan berlaku selama periode 2025–2030, dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi, yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Seluruh hasil evaluasi kinerja pada periode 2025–2029 akan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan dan kebijakan di periode selanjutnya, guna memastikan kesinambungan pembangunan dan pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Ngawi.

4.1 Program Perangkat Daerah 2026-2030

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					730.662.214.481,00		713.096.886.633,00		786.417.207.435,00		900.985.977.332,00		1.017.944.352.071,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					626.548.030.481,00		574.674.678.823,00		635.251.912.358,00		728.789.751.603,00		837.356.686.577,00	
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	626.548.030.481,00	100	574.674.678.823,00	100	635.251.912.358,00	100	728.789.751.603,00	100	837.356.686.577,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					101.181.790.000,00		132.567.207.810,00		145.699.427.077,00		166.146.225.729,00		172.967.665.494,00	
Meningkatnya partisipasi pendidikan masyarakat	Angka partisipasi sekolah (5-6) (Angka)	84,70	84,70	85,10	95.985.214.000,00	85,50	125.149.416.280,00	85,75	134.031.927.077,00	86,25	152.857.694.531,00	86,70	155.006.356.094,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah (7-15) (Angka)	99,49	99,49	99,51		99,55		99,65		99,70		99,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah (7-18) (Angka)	27,00	27,64	28,50		28,75		29.		29,25		29,50		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Pendidikan
Meningkatnya Mutu Pendidikan	Nilai assesment SD (Literasi) (Angka)	85,79	80,48	84,26	5.196.576.000,00	85,35	7.417.791.530,00	86,50	11.667.500.000,00	86,75	13.288.531.198,00	87,05	17.961.309.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Nilai assesment SD (Numerasi) (Angka)	75,31	80,48	80,65		81,00		82,05		82,75		83,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Nilai assesment SMP (Literasi) (Angka)	78,79	71,70	72,50		72,95		73,25		74,50		75,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Nilai assesment SMP (Numerasi) (Angka)	76,28	80,70	81,15		81,25		81,75		82,10		82,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					98.230.000,00		105.000.000,00		310.000.000,00		300.000.000,00		370.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar yang terpenuhi (%)	100	100	100	98.230.000,00	100	105.000.000,00	100	310.000.000,00	100	300.000.000,00	100	370.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					2.834.164.000,00		5.750.000.000,00		5.155.868.000,00		5.750.000.000,00		7.250.000.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase pendidik yang bersertifikasi (%)	90	91	92	2.834.164.000,00	95	5.750.000.000,00	97	5.155.868.000,00	98	5.750.000.000,00	100	7.250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					400.874.726.923 ,00		499.769.978.691 ,00		586.208.227.014 ,00		739.624.607.955 ,00		847.199.705.676 ,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					344.576.883.587 ,00		379.816.443.647 ,00		459.926.949.955 ,00		556.895.956.427 ,00		687.368.288.146 ,00	
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	100	100	100	141.434.451.499 ,00	100	131.419.098.223 ,00	100	137.010.400.899 ,00	100	137.104.442.655 ,00	100	141.639.321.002 ,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada RSUD Dr. Soeroto	Persentase Realisasi Anggaran (Kerja) dan Kinerja (%)	91	80	81	107.783.010.000 ,00	82	133.445.632.320 ,00	83	173.479.322.016 ,00	84	225.523.118.620 ,00	85	293.180.054.207 ,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada RSUD Mantingan	Persentase Realisasi Anggaran (Kerja) dan Kinerja (%)	93	94	95	10.000.000.000,00	96,5	9.100.000.000,00	96,8	11.830.000.000,00	97	15.379.000.000,00	98	19.992.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten /	Persentase Realisasi Anggaran (Kerja) dan Kinerja (%)	96,6	100	100	1.600.000.000,00	100	1.690.000.000,00	100	2.197.000.000,00	100	2.856.100.000,00	100	3.712.930.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kota pada LABKESDA														
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada RSUD Geneng	Persentase Realisasi Anggaran (Kerja) dan Kinerja (%)	82	80	81	11.500.000.000,00	82	9.750.000.000,0	83	12.675.000.000,00	84	16.477.500.000,00	85	21.420.750.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Kendal	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	97,18	98	98	3.764.341.000,0	98	4.715.219.896,0	98	6.129.785.865,0	98	7.968.721.624,0	98	10.359.338.112,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Ngrambe	Persentase Realisasi Anggaran (%)	89,08	95	95	3.993.546.700,0	95	5.002.323.343,0	95	6.503.020.346,0	95	8.453.926.450,0	95	10.990.104.385,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Bringin	Persentase Realisasi Anggaran (%)	95	100	100	3.262.322.400,0	100	4.423.240.446,0	100	5.750.212.580,0	100	7.475.276.355,0	100	9.717.859.261,0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten /	Persentase Realisasi Anggaran (%)	100	100	100	2.310.000.000,0	100	3.221.691.545,0	100	4.188.199.009,0	100	5.444.658.711,0	100	7.078.056.325,0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kota pada Puskesmas Ngawi Purba														
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Gemarang	Persentase Realisasi Anggaran (%)	87,57	87,58	87,59	3.459.827.200,0 0	87,60	4.147.364.584,0 0	87,61	5.391.573.960,0 0	87,62	7.009.046.148,0 0	87,63	9.111.759.992,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Jogorogo	Persentase Realisasi Anggaran (%)	87,49	89,5	92,5	3.758.802.000,0 0	94	5.197.062.070,0 0	96	6.756.180.691,0 0	96	8.783.034.898,0 0	98	11.417.945.367,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Karanganyar	Persentase Realisasi Anggaran (%)	91,60	100	100	2.575.800.000,0 0	100	3.288.079.435,0 0	100	4.274.503.265,0 0	100	5.556.854.245,0 0	100	7.223.910.518,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Karangjati	Persentase Realisasi Anggaran (%)	93,76	98	100	3.909.500.000,0 0	100	4.925.856.144,0 0	100	6.403.612.987,0 0	100	8.324.696.883,0 0	100	10.822.105.948,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan	Persentase Realisasi Anggaran (%)	100	100	100	2.822.886.000,0 0	100	3.723.842.026,0 0	100	4.840.994.634,0 0	100	6.293.293.024,0 0	100	8.181.280.931,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Kedunggalar														
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Kwadungan	Persentase Realisasi Anggaran (%)	92,40	92	100	2.130.872.982,0 0	100	2.794.395.266,0 0	100	3.632.713.846,0 0	100	4.722.528.000,0 0	100	6.139.286.400,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Widodaren	Persentase Realisasi Anggaran (%)	89,85	100	100	3.078.207.000,0 0	100	4.012.326.902,0 0	100	5.216.024.973,0 0	100	6.780.832.465,0 0	100	8.815.082.204,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Ngawi	Persentase Realisasi Anggaran (%)	95,19	100	100	3.383.937.500,0 0	100	4.238.725.829,0 0	100	5.510.343.578,0 0	100	7.163.446.652,0 0	100	9.312.480.647,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Walikukun	Persentase Realisasi Anggaran (%)	85,10	90	98	4.083.183.980,0 0	98	5.321.233.119,0 0	98	6.917.603.055,0 0	98	8.992.883.971,0 0	98	11.690.749.163, 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan	Persentase Realisasi Anggaran (%)	75,64	78	80	1.814.875.000,0 0	82	2.273.316.305,0 0	84	2.955.311.197,0 0	86	3.841.904.556,0 0	88	4.994.475.923,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Tambakboyo														
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Teguhan	Persentase Realisasi Anggaran (%)	98	100	100	2.712.158.900,0 0	100	3.473.672.417,0 0	100	4.515.774.142,0 0	100	5.870.506.384,0 0	100	7.631.658.299,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Sine	Persentase Realisasi Anggaran (%)	94,03	92	93	3.763.591.650,0 0	93	4.905.699.982,0 0	93	6.377.409.977,0 0	93	8.290.632.970,0 0	93	10.777.822.861, 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Pitu	Persentase Realisasi Anggaran (%)	92,67	100	100	2.268.194.498,0 0	100	2.869.662.423,0 0	100	3.730.561.150,0 0	100	4.849.729.495,0 0	100	6.304.648.344,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Paron	Persentase Realisasi Anggaran (%)	82,67	100	100	3.819.925.316,0 0	100	4.784.844.904,0 0	100	6.220.298.376,0 0	100	8.086.387.888,0 0	100	10.512.304.255, 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Mantingan	Persentase Realisasi Anggaran (%)	63,47	69	75	1.700.000.000,0	77	2.172.011.329,0	80	2.823.614.728,0	82	3.670.699.147,0	85	4.771.908.891,0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Padas	Persentase Realisasi Anggaran (%)	95	100	100	3.497.145.000,0	100	4.818.582.709,0	100	6.264.157.521,0	100	8.143.404.778,0	100	10.586.426.211,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Pangkur	Persentase Realisasi Anggaran (%)	97,72	98	98	3.061.451.089,0	98	4.661.197.605,0	98	6.059.556.887,0	98	7.877.423.953,0	98	10.240.651.139,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Puskesmas Geneng	Persentase Realisasi Anggaran (%)	93,71	95	98	2.970.000.000,0	98	3.883.065.237,0	98	5.047.984.808,0	98	6.562.380.251,0	98	8.531.094.326,0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada	Persentase Realisasi Anggaran (%)	87,86	100	100	2.097.603.873,0	100	2.627.462.155,0	100	3.415.700.802,0	100	4.440.411.042,0	100	5.772.534.355,0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Puskesmas Kasreman														
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kotah pada Puskesmas Kauman	Persentase Realisasi Anggaran (%)	100	100	95	2.021.250.000,0 0	95	2.930.837.433,0 0	95	3.810.088.663,0 0	95	4.953.115.262,0 0	95	6.439.049.080,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					46.850.902.648, 00		104.971.204.501 ,00		109.034.934.799 ,00		165.036.458.892 ,00		143.366.223.712 ,00	
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA DINAS KESEHATAN	Angka Kematian Balita (Per 1000)	70	70	70	370.939.642,00	65	2.800.000.000,0 0	60	2.375.000.000,0 0	55	2.300.000.000,0 0	50	1.805.000.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	37,25	36,16	35,16		34,16		33,16		32,16		31,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	-	36	46		55		61		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥%¥ 15 tahun" (Angka)	1,18	1,19	1,19		1,20		1,20		1,20		1,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	90	90	90	52.757.500,00	90	2.525.000.000,0 0	90	1.550.000.000,0 0	90	1.550.000.000,0 0	90	1.025.000.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	85	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	0,1	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria (Per 1000 Penduduk)	<1	<1	<1		<1		<1		<1		<1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	36	46		55		61		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	12,9	16,58	19,35		25,35		35,94		48,85		59,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	-	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	-	20	25		30		35		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	68	70	72		74		76		78		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	10,5	10,6	10,6		10,7		10,8		10,9		10,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN	Persentase Labkesmas yang terakreditasi (%)	100	100	100	198.807.000,00	100	1.071.267.115,00	100	875.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi (%)	89	90	90		91		91		92		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	96	96	96		96		96		96		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase RS Pemerintah dengan Akreditasi Paripurna (%)	60	60	80		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (Angka)	90	90	91		92		93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA PRASARANA , ALKES DAN PERBEKALAN KESEHATAN LAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar (Angka)	75	76	77	1.529.521.250,00	78	16.225.228.440,00	79	12.810.558.626,00	79,5	60.222.412.503,00	80	30.480.553.842,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Proporsi fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Angka)	79	79	83		88		92		96		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGA RAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI PADA DINAS KESEHATAN	"Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN" (Angka)	55	55	55,5	31.039.256,00	56	125.000.000,00	56,5	200.000.000,00	57	200.000.000,00	57,5	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TERWUJUDNYA UHC (UNIVERSAL HEALTH COVEREGE) DI KABUPATEN NGAWI PADA DINAS KESEHATAN	Cakupan Kepesertaan JKN (Angka)	97,1	98	98	44.657.838.000,00	98	54.498.585.076,00	98	59.919.443.583,00	98	65.882.387.941,00	98	72.441.626.735,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD Dr. SOEROTO	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Angka)	89,90	80	80,10	10.000.000,00	80,20	3.277.500.000,00	80,30	3.604.725.000,00	80,40	3.964.646.250,00	80,50	4.361.110.875,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA LABKESDA	Persentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasyankes (%)	91,77	91,85	91,95	0,00	92,10	100.000.000,00	92,25	100.000.000,00	92,40	100.000.000,00	92,50	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD MANTINGAN	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Angka)	95,1	95,2	95,3	0,00	95,4	1.000.000.000,00	95,5	1.500.000.000,00	95,6	1.500.000.000,00	95,7	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasyankes (%)	87	88	89	0,00	90	1.350.000.000,00	91	1.900.000.000,00	92	1.750.000.000,00	93	1.600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PADA RSUD GENENG														
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS NGRAMBE	Angka Kematian Balita (Per 1000)	0	0	0	0,00	0	421.317.000,00	0	469.864.000,00	0	523.156.000,00	0	600.290.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥%¥ 15 tahun" (Angka)	1,19	1,19	1,20		1,21		1,22		1,23		1,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS NGRAMBE	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	90	90	90	0,00	90	172.815.000,00	90	187.095.000,00	90	217.835.000,00	90	268.675.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	95	95	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	0,1	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	-	36	46		55		61		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	7	21	30		30		30		30		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	-	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	-	20	25		30		35		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	75	76	78		78		78		78		78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	17	16	15		14		13		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Per 1000)	<1	<1	<1		<1		<1		<1		<1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS NGRAMBE	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	93	94	95	0,00	97	292.102.240,00	98	322.430.424,00	98	340.869.127,00	98	325.612.599,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS BRINGIN	Angka Kematian Balita (Per 1000)	4	3	2	0,00	2	350.734.500,00	2	379.200.500,00	2	396.800.500,00	2	423.300.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia 15 tahun" (Angka)	55	10	15		20		25		30		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS BRINGIN	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	90	90	90	0,00	90	239.412.500,00	90	268.162.500,00	90	316.662.500,00	90	355.162.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	0,1	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	36	46	55		61		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	25	30	30		30		30		40		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	20	20	25		30		35		40		45		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	70	70	70		70		70		70		70		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Per 1000)	<1	<1	<1		<1		<1		<1		<1		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS BRINGIN	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	99,71	99,97	99,97	0,00	99,97	262.035.438,00	99,97	291.086.649,00	99,97	320.542.580,00	99,97	360.135.906,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS NGAWI PURBA	Angka Kematian Balita (Per 1000)	4	4	4	0,00	4	421.600.000,00	4	403.700.000,00	4	494.200.000,00	4	537.400.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥%¥ 15 tahun" (Angka)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		Dinas /Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS NGAWI PURBA	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	90	90	90	0,00	90	256.650.000,00	90	308.800.000,00	90	318.400.000,00	90	360.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	0,05	0,05	0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	-	36	46		55		61		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	25	25	30		30		30		40		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5		20		22,5		25		27,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	15	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB			
				2026		2027		2028		2029		2030					
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan			
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	23,40	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan			
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	1	1	1		1				1				1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS NGAWI PURBA	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	76,6	77	78	0,00	79	240.000.000,00	79,5	299.000.000,00	80	300.000.000,00	80,5	328.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan			
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS GEMARANG	Angka Kematian Balita (Per 1000)	0	22	22	0,00	22	588.369.000,00	22	627.467.000,00	22	694.600.000,00	22	765.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan			
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	0	0-163	0-149		0-144				0-129				0-114		0-109	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥%¥ 15 tahun" (Angka)	1,19	1,19	1,19		1,20				1,21				1,22		1,23	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10				11,00				10,90		10,80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	50	90	90	0,00	90	196.200.000,00	90	242.300.000,00	90	265.200.000,00	90	290.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS GEMARANG														Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	85		90		92		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	0,04	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1				
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	36	46		55		61		70		75		
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	16	16		32		32		50		50		
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5		20		22,5		25		25		
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	20	20	25		30		35		40		45		
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	70	70	72		74		76		78		80		
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	10,6	10,6	10,6		10,7		10,8		10,9		10,10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS GEMARANG	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	99,02	99,02	99,02	0,00	99,02	306.918.828,00	99,02	332.542.896,00	99,02	364.809.172,00	99,02	406.358.375,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS JOGOROGO	Angka Kematian Balita (Per 1000)	1	1	1	0,00	1	511.500.000,00	1	525.700.000,00	1	542.988.000,00	1	571.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥15 tahun" (Angka)	1,19	1,19	1,19		1,20		1,21		1,22		1,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS JOGOROGO	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	42	42	40	0,00	40	249.720.003,00	35	292.600.001,00	35	321.112.000,00	30	314.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	2	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	36	46		55		61		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	30	35	40		45		50		55		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5		20		22,5		22,5		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	5	5	5		15		25		32		38		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	60	70	73		76		79		82		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	23	23	23		23		23		23		23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Per 1000)	<1	<1	<1		<1		<1		<1		<1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	96	97,47		98		0,00		98		232.602.707,00		98



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KESEHATAN PADA PUSKESMAS JOGOROGO														Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS KARANGANYAR	Angka Kematian Balita (Per 1000)	1	1	1	0,00	1	419.804.000,00	1	489.093.000,00	1	504.122.000,00	1	524.022.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥15 tahun" (Angka)	1,19	1,19	1,19		1,20		1,21		1,22		1,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS KARANGANYAR	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	100	100	100	0,00	100	208.100.000,00	100	219.200.000,00	100	235.900.000,00	100	264.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Insidensi HIV (Angka)	1	1	1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase Cakupan Pemeriksaan	-	35	35		35		35		35		Dinas/Badan yang menangani		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Kesehatan Gratis (%)													Bidang Kesehatan		
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	14	14	28				28				28			28	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5				20				22,5			25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	20	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	74,66	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KARANGANYAR	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	76,6	76,6	76,6	0,00	76,6	257.264.203,00	76,6	265.907.260,00	76,6	324.113.522,00	76,6	379.442.312,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS KARANGJATI	Angka Kematian Balita (Per 1000)	-	75	70	0,00	65	632.803.000,00	60	740.687.376,00	55	859.360.191,00	50	989.900.286,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥%¥ 15 tahun" (Angka)	5	5	5		10		15		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS KARANGJATI	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	93,94	90	90	0,00	90	153.000.000,00	90	153.000.000,00	90	153.000.000,00	90	153.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	87,82	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	0,1	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	36	46		55		61		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	5,80	11,80	17,64		23,53		29,41		35,29		41,18		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	20	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	60,56	70	70		70		70		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	90	90	90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KARANGJATI	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	90,75	91,30	91,48	0,00	91,48	268.772.268,00	91,48	268.772.268,00	91,48	268.772.268,00	91,48	268.772.268,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS KEDUNGKALAR	Angka Kematian Balita (Per 1000)	-	75	70	0,00	65	460.500.000,00	60	505.129.000,00	55	559.379.000,00	50	616.164.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	0	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥% 15 tahun" (Angka)	1,19	1,19	1,19		1,20		1,21		1,22		1,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS KEDUNGALAR	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	90	90	90	0,00	90	257.141.000,00	90	285.471.000,00	90	313.621.000,00	90	352.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	0,1	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	36	37		38		38		38		38		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	16,58	16,58	19,35		25,35		35,94		48,84		59,44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	20	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Per 1000)	<1	<1	<1		<1		<1		<1		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KEDUNGGALEAR	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	96	97,4	98	0,00	98	222.332.872,00	98	248.940.445,00	98	278.086.676,00	98	305.258.930,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS KENDAL	Angka Kematian Balita (Per 1000)	0	75	70	0,00	65	459.080.000,00	60	526.567.000,00	55	592.280.298,00	50	676.614.893,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥15 tahun" (Angka)	1,19	1,19	1,19		1,20		1,21		1,22		1,23		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	90	90	90	0,00	90	159.900.000,00	90	190.512.666,00	90	233.900.000,00	90	271.900.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PUSKESMAS KENDAL														
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	0,1	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1				
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	11	36	46		55		61		70		75		
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	30	35	40		45		50		55		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	20	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	60	70	73		76		79		82		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KENDAL	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	96	97,47	98	0,00	98	253.760.023,00	98	261.260.023,00	98	268.319.023,00	98	273.760.023,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS KWADUNGAN	Angka Kematian Balita (Per 1000)	-	75	70	0,00	65	463.100.000,00	60	487.936.000,00	55	532.436.000,00	50	579.936.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥15 tahun" (Angka)	5	10	15		20		25		30		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS KWADUNGAN	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	90	90	90	0,00	90	334.600.000,00	90	373.800.000,00	90	426.500.000,00	90	477.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	4	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	36	46		55		61		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	20	20		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	40	50	60		65		66		68		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	30	40	50		60		65		66		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	70	70	70		70		70		70		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	40	40	40		35		35		35		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KWADUNGAN	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	96	97,47	98	0,00	98	80.000.000,00	98	98.000.000,00	98	100.000.000,00	98	110.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA	Angka Kematian Balita (Per 1000)	-	75	70	0,00	65	461.675.000,00	60	503.050.000,00	55	548.196.000,00	50	613.140.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PUSKESMAS WIDODAREN														
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥%¥ 15 tahun" (Angka)	1,19	1,19	1,19		1,20		1,21		1,22		1,23		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS WIDODAREN	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	90	90	90	0,00	90	259.750.000,00	90	298.300.000,00	90	349.400.000,00	90	396.700.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	85		90		93		95		95		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	4	1	1		1		1		1		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	36	46		55		61		70		75		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa /Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	14	14	20		20		20		20		20		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	20	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Per 1000)	<1	<1	<1		<1		<1		<1		<1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS WIDODAREN	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	100	100	100	0,00	100	240.000.000,00	100	250.000.000,00	100	262.000.000,00	100	270.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS NGAWI	Angka Kematian Balita (Per 1000)	0	75	70	0,00	65	396.138.000,00	60	429.778.000,00	55	459.948.000,00	50	499.048.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥15 tahun" (Angka)	1,19	1,19	1,19		1,20		1,21		1,22		1,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS NGAWI	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	90	90	90	0,00	90	238.801.000,00	90	267.161.000,00	90	310.600.000,00	90	371.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	36	46		55		61		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	16,58	16,58	19,35		25,35		35,94		48,84		59,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	20	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	0	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Per 1000)	<1	<1	<1		<1		<1		<1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS NGAWI	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	96	97,47	98	0,00	98	273.551.729,00	98	290.098.278,00	98	299.930.481,00	98	308.675.805,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS WALIKUKUN	Angka Kematian Balita (Per 1000)	0	75	70	0,00	65	432.230.000,00	60	432.230.000,00	55	432.230.000,00	50	432.230.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥15 tahun" (Angka)	1,19	1,19	1,19		1,20		1,21		1,22		1,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	90	90	90	0,00	90	140.350.000,00	90	140.350.000,00	90	140.350.000,00	90	140.350.000,00	Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS WALIKUKUN														Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	1	1	1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	36	46		55		61		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	16,58	16,58	18,35		25,35		35,94		48,84		59,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	20	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	90	90	90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Per 1000)	<1	<1	<1		<1		<1		<1		<1		Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS WALIKUKUN	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	100	100	100	0,00	100	391.122.443,00	100	487.624.210,00	100	593.776.154,00	100	710.543.292,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS TEGUHAN	Angka Kematian Balita (Per 1000)	0	75	70	0,00	65	499.182.000,00	60	522.282.000,00	55	566.282.000,00	50	613.282.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥60 & 15 tahun" (Angka)	1,19	1,19	1,19		1,20		1,21		1,22		1,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS TEGUHAN	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	90	90	90	0,00	90	300.600.000,00	90	338.800.000,00	90	388.800.000,00	90	439.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Insidensi HIV (Angka)	2	1	1		1		1		1		1		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	-	36	45		55		62		72		80		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	16,58	16,58	19,35		25,35		35,94		48,84		59,45		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	20	20	25		30		35		40		45		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	45	50	56		62		70		78		80		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	14	15	15		15		15		15		15		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS TEGUHAN	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	90	94	95	0,00	95	275.795.411,00	96	293.613.065,00	96	295.682.729,00	97	305.649.359,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS TAMBAKBOYO	Angka Kematian Balita (Per 1000)	-	75	70	0,00	65	524.698.381,00	60	577.718.500,00	55	622.547.886,00	50	682.149.454,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun" (Angka)	1,19	1,19	1,19		1,20		1,21		1,22		1,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS TAMBAKBOYO	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	90	90	90	0,00	90	244.841.000,00	90	250.300.000,00	90	274.300.000,00	90	301.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	0	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	0,1	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	36	46		55		61		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total	75	75	75		75		75		75		75		Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	berbasis masyarakat (%)													Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	0	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	0	20	25		30		35		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	60	70	70		70		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	0	10,6	10,6		10,7		10,8		10,9		10,10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS TAMBAKBOYO	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	92,72	90,5	91	0,00	92	57.461.000,00	93	78.652.598,00	94	97.461.000,00	95	107.461.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS SINE	Angka Kematian Balita (Per 1000)	0	75	70	0,00	65	500.921.050,00	60	525.225.050,00	55	565.332.522,00	50	615.036.208,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥15 tahun" (Angka)	1,19	1,19	1,19		1,20		1,21		1,22		1,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS SINE	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	100	100	100	0,00	100	386.740.000,00	100	444.959.858,00	100	511.924.700,00	100	591.603.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	0,1	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	36	46		55		61		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	16,58	19,35		25,35		35,94		48,48		59,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	0	20	20		20		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	20	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	52,78	60	60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	0	10,5	10,6		10,7		10,8		10,9		10,10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS SINE	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	98,4	96,9	97	0,00	97	180.000.000,00	98	200.000.000,00	98	200.000.000,00	98	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS PITU	Angka Kematian Balita (Per 1000)	0	75	70	0,00	65	474.433.446,00	60	500.833.976,00	55	548.324.558,00	50	583.364.198,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥%¥ 15 tahun" (Angka)	1,19	1,19	1,19		1,20		1,21		1,22		1,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS PITU	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	0	80	80	0,00	80	204.500.000,00	80	246.000.000,00	80	278.000.000,00	80	317.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	0	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	1	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	42	42		42		42		42		42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	20	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	73,68	75	77		79		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	5,80	5,70	5,60		5,50		5,40		5,30		5,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS PITU	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	89,05	95,52	95,53	0,00	95,54	250.000.000,00	95,55	270.000.000,00	95,56	290.000.000,00	95,57	330.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS PARON	Angka Kematian Balita (Per 1000)	0	75	70	0,00	65	358.706.000,00	60	430.071.000,00	55	507.806.000,00	50	566.509.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥%¥ 15 tahun" (Angka)	5	5	10		15		20		25		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS PARON	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	95	95	95	0,00	95	183.800.000,00	95	203.500.000,00	95	227.653.500,00	95	264.153.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	3	2	2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	36	46		55		61		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	30	40	60		70		80		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	19	20	20		25		30		35		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	40	50	60		70		80		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	40	40	40		35		35		35		25		Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Kesehatan
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS PARON	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	94,9	97,5	97,5	0,00	97,5	206.163.322,00	98	208.300.398,00	98	209.177.082,00	98	226.215.783,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS MANTINGAN	Angka Kematian Balita (Per 1000)	0	75	70	0,00	65	371.062.700,00	60	391.800.000,00	55	409.300.000,00	50	426.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	0	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia 18-64 tahun" (Angka)	5	10	15		20		25		30		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS MANTINGAN	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	90	90	90	0,00	90	233.506.800,00	90	243.400.000,00	90	257.050.000,00	90	272.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	3	2	2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	38	46		55		63		72		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	40	40	45		45		50		55		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	0	20	20		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	0	10	10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	50	55	55		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	90	60	60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	0	0	0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS MANTINGAN	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	91,62	95,03	95,1	0,00	95,2	46.712.641,00	95,3	93.821.705,00	95,4	148.775.085,00	95,5	210.463.803,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS PADAS	Angka Kematian Balita (Per 1000)	0	75	70	0,00	65	409.070.000,00	60	453.136.582,00	55	500.291.948,00	50	555.141.350,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥15 tahun" (Angka)	1,19	1,19	1,19		1,20		1,21		1,22		1,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS PADAS	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	90	90	90	0,00	90	263.219.000,00	90	289.350.901,00	90	317.300.050,00	90	349.578.570,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	94	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	0	3	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	36	36	36		36		36		36		36		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/ Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	20	20		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	10	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	60	70	71		72		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	10,6	10,6	10,6		10,7		10,8		10,9		10,10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS PADAS	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	97,34	97,34	97,34	0,00	97,34	203.413.169,00	97,34	232.420.042,00	97,34	263.577.341,00	97,34	300.475.766,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN	Angka Kematian Balita (Per 1000)	0	75	70	0,00	65	531.968.000,00	60	594.110.000,00	55	609.215.000,00	50	683.115.000,00	Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS PANGKUR														Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥15 tahun" (Angka)	5	5	10		15		20		25		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS PANGKUR	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	90	90	90	0,00	90	182.250.000,00	90	208.300.000,00	90	226.900.000,00	90	274.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	2	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	36	46		55		61		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total	20	20	20		20		20		20		20		20



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	berbasis masyarakat (%)													Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	20	20	20		20		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	10	10	10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	70	70	70		70		70		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	40	40	40		35		35		35		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS PANGKUR	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	100	100	100	0,00	100	257.845.548,00	100	257.845.604,00	100	257.718.866,00	100	258.256.255,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS GENENG	Angka Kematian Balita (Per 1000)	0	75	70	0,00	65	540.540.000,00	60	547.440.000,00	55	600.240.000,00	50	655.540.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥15 tahun" (Angka)	5	5	10		15		20		25		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS GENENG	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	90	90	90	0,00	90	200.550.000,00	90	264.150.000,00	90	314.450.000,00	90	370.550.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	80		85		85		85		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	0,1	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	1,19	1,19	1,19		1,20		1,21		1,22		1,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	20	20		20		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	20	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	70	75	75		75		75		75		75		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	40	60	55		50		45		40		35		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS GENENG	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	0	98,21	99,43	0,00	99,44	241.502.537,00	99,45	270.079.818,00	99,46	274.200.827,00	99,47	280.719.937,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS KASREMAN	Angka Kematian Balita (Per 1000)	0	75	70	0,00	65	322.670.000,00	60	360.337.000,00	55	398.592.000,00	50	443.120.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥%¥ 15 tahun" (Angka)	5	5	10		15		20		25		30		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS KASREMAN	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	90	90	90	0,00	90	382.098.000,00	90	418.000.000,00	90	452.800.000,00	90	484.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	90	95	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV (Angka)	3	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	36	46		55		61		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	20	20		20		30		40		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	20	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	4,8	15	15		15		15		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KASREMAN	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	96	98	98	0,00	98	196.413.278,00	98	209.209.851,00	98	232.836.983,00	98	263.909.327,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN SESUAI SIKLUS HIDUP PADA PUSKESMAS KAUMAN	Angka Kematian Balita (Per 1000)	0	75	70	0,00	65	360.900.000,00	60	388.800.000,00	55	427.000.000,00	50	472.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	37,25	0-163	0-149		0-144		0-129		0-114		0-109		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	"Prevalensi Depresi pada usia ≥15 tahun" (Angka)	1,19	1,19	1,19		1,20		1,21		1,22		1,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevelensi Stunting (%)	11,40	11,30	11,20		11,10		11,00		10,90		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS KAUMAN	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Angka)	98	98	98	0,00	98	205.000.000,00	98	236.300.000,00	98	268.000.000,00	98	300.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	85		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Insidensi HIV (Angka)	3	2	2		2		2		2		2		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	36	46		55		61		70		75		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	25	25	50		50		75		75		100		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian (%)	15	15	17,5		20		22,5		25		25		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	20	20	25		30		35		40		45		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	60	70	70		70		70		75		75		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas >18 tahun (Angka)	10,6	10,6	10,7		10,8		10,9		10,10		10,11		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Puskesmas dengan eliminasi malaria (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KAUMAN	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Puskesmas (%)	97	98	98	0,00	98	196.307.833,00	98	210.000.000,00	98	215.000.000,00	98	225.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					515.600.000,00		2.775.000.000,00		3.995.000.000,00		4.145.000.000,00		3.550.000.000,00	
MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	70	70	70	15.600.000,00	75	1.125.000.000,00	80	1.395.000.000,00	85	1.395.000.000,00	85	650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	3.2:1000	3.2:1000	3.4:1000		3.4:1000		3.5:1000		3.5:1000		3.6:1000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN PADA RSUD MANTINGAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	70	70	70	500.000.000,00	75	1.000.000.000,00	80	1.500.000.000,00	85	1.500.000.000,00	85	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	2.1:1000	2.2:1000	2.3:1000		2.4:1000		2.5:1000		2.6:1000		2.6:1000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN PADA RSUD GENENG	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	70	70	70	0,00	75	650.000.000,00	80	1.100.000.000,00	85	1.250.000.000,00	85	1.400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	2.1:1000	2.2:1000	2.3:1000		2.4:1000		2.5:1000		2.6:1000		2.6:1000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					8.312.784,00		784.871.340,00		863.358.474,00		949.694.321,00		1.044.663.753,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi,alat farmasi,alat kesehatan, dan makanan minuman pada Dinas Kesehatan	Persentase Cakupan Persediaan Farmasi,alat kesehatan dan makanan dan minuman (%)	83	85	86	8.312.784,00	89	784.871.340,00	92	863.358.474,00	95	949.694.321,00	98	1.044.663.753,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Angka)	83	84	85		88		92		96		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					8.923.027.904,00		11.422.459.203,00		12.387.983.786,00		12.597.498.315,00		11.870.530.065,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	50	60	8.923.027.904,00	70	10.000.000.000,00	80	10.825.000.000,00	90	10.825.000.000,00	100	10.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Ngrambe Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bringin	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	60	70	0,00	80	53.010.000,00	90	53.010.000,00	100	53.010.000,00	100	53.010.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	50	60	0,00	70	38.400.000,00	80	39.400.000,00	90	39.838.000,00	100	40.838.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	50	60	0,00	70	96.765.713,00	80	105.839.082,00	90	117.294.789,00	100	128.306.066,00	Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
bidang kesehatan pada Puskesmas Ngawi Purba														Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang keschatan pada Puskesmas Gemarang	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	50	60	0,00	70	5.750.000,00	80	7.200.000,00	90	8.400.000,00	100	9.600.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang keschatan pada Puskesmas Jogorogo	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	50	60	0,00	70	94.000.000,00	80	102.000.000,00	90	110.000.000,00	100	125.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang keschatan pada Puskesmas Karanganyar	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	50	60	0,00	70	20.000.000,00	80	20.000.000,00	90	28.000.000,00	100	32.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang keschatan pada Puskesmas Karangjati	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	50	60	0,00	70	6.400.000,00	80	6.400.000,00	90	6.400.000,00	100	6.400.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang keschatan pada Puskesmas Kedunggalar	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	50	60	0,00	70	72.341.000,00	80	74.771.000,00	90	75.421.000,00	100	76.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang keschatan pada	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	50	60	0,00	70	169.353.000,00	80	169.353.000,00	90	169.353.000,00	100	169.353.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Puskesmas Kendal														
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Kwadungan	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	100	100	100	0,00	100	41.899.859,00	100	50.642.115,00	100	51.298.197,00	100	53.139.887,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Widodaren	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	50	60	0,00	70	57.743.932,00	80	70.644.832,00	90	75.507.322,00	100	79.682.661,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Ngawi	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	50	60	0,00	70	12.500.000,00	80	24.900.000,00	90	41.500.000,00	100	42.900.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Walikukun	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	50	60	0,00	70	3.200.000,00	80	3.200.000,00	90	3.200.000,00	100	3.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Tambakboyo	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	50	60	0,00	70	800.000,00	80	800.000,00	90	800.000,00	100	800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	50	60	0,00	70	16.600.000,00	80	49.142.115,00	90	75.898.197,00	100	103.039.887,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Puskesmas Teguhan														
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Sine	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	50	60	0,00	70	26.597.300,00	80	35.985.000,00	90	52.015.400,00	100	58.045.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Pitu	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	100	100	100	0,00	100	33.000.000,00	100	41.000.000,00	100	47.000.000,00	100	49.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Paron	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	50	60	0,00	70	207.814.000,00	80	209.853.000,00	90	211.853.000,00	100	214.853.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Mantingan	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	100	100	100	0,00	100	174.361.399,00	100	176.053.999,00	100	177.303.999,00	100	178.753.999,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Padas	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	100	100	100	0,00	100	182.943.000,00	100	191.340.084,00	100	203.440.953,00	100	209.613.558,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Pangkur	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	100	100	100	0,00	100	29.470.000,00	100	41.970.000,00	100	119.153.000,00	100	119.153.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Geneng	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	100	100	100	0,00	100	25.100.000,00	100	27.460.000,00	100	31.820.000,00	100	36.640.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Kasreman	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	100	100	100	0,00	100	13.355.000,00	100	17.155.000,00	100	19.655.000,00	100	21.555.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Kauman	Persentase Masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	100	100	100	0,00	100	41.055.000,00	100	44.864.559,00	100	54.336.458,00	100	59.646.307,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					191.014.131.595,00		424.017.832.241,00		440.760.438.295,00		368.092.720.618,00		429.854.644.942,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.944.576.566,00		18.780.274.920,00		19.887.908.194,00		19.998.770.468,00		20.189.084.036,00	
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	19.944.576.566,00	100	18.780.274.920,00	100	19.887.908.194,00	100	19.998.770.468,00	100	20.189.084.036,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					42.718.717.000, 00		52.913.921.180, 00		55.779.173.298, 00		72.759.450.627, 00		73.562.930.690, 00	
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase panjang Irigasi dalam kondisi baik (%)	74,5	75,38	76,05	42.718.717.000, 00	76,68	52.913.921.180, 00	77,43	55.779.173.298, 00	78,16	72.759.450.627, 00	78,82	73.562.930.690, 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					6.480.000.000,0 0		37.623.145.401, 00		28.426.672.225, 00		30.344.462.947, 00		43.512.909.242, 00	
Meningkatnya Rumah Tangga yang terakses Air Minum	Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan (%)	36,65	39,08	39,15	6.480.000.000,0 0	39,22	37.623.145.401, 00	39,29	28.426.672.225, 00	39,36	30.344.462.947, 00	39,43	43.512.909.242, 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGA N SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					0,00		573.000.000,00		730.000.000,00		703.330.000,00		793.663.000,00	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	-	-	-	0,00	54	573.000.000,00	56	730.000.000,00	58	703.330.000,00	60	793.663.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN					1.922.200.000,0 0		18.108.936.870, 00		18.362.330.557, 00		18.972.063.612, 00		20.210.269.973, 00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGEMBANGA N SISTEM AIR LIMBAH														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	87,25	87,28	87,33	1.922.200.000,0 0	87,38	18.108.936.870, 00	87,43	18.362.330.557, 00	87,48	18.972.063.612, 00	87,53	20.210.269.973, 00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM DRAINASE					6.300.627.000,0 0		6.300.000.000,0 0		6.500.000.000,0 0		6.700.000.000,0 0		6.900.000.000,0 0	
Meningkatnya kualitas sistem drainase jalan	Persentase Drainase jalan dalam Kondisi Baik (%)	20	20	25	6.300.627.000,0 0	30	6.300.000.000,0 0	35	6.500.000.000,0 0	40	6.700.000.000,0 0	45	6.900.000.000,0 0	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					4.375.000.029,0 0		25.000.000.000, 00		16.500.000.000, 00		10.000.000.000, 00		17.500.000.000, 00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	0,55	1,26	1,46	4.375.000.029,0 0	1,68	25.000.000.000, 00	1,88	16.500.000.000, 00	2,09	10.000.000.000, 00	2,30	17.500.000.000, 00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A					43.570.000.000, 00		104.410.000.000 ,00		95.363.956.451, 00		20.000.000.000, 00		43.000.000.000, 00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan pemda	Persentase Bangunan dan lingkungan milik pemda yang tertata sesuai kebutuhan (%)	20	24	27	43.570.000.000,00	31	104.410.000.000,00	34	95.363.956.451,00	38	20.000.000.000,00	41,4	43.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN					64.208.873.000,00		157.408.553.870,00		196.210.397.570,00		185.564.642.964,00		200.985.788.001,00	
Meningkatnya kemandapan jalan	Tingkat Kemandapan Jalan (%)	96,1	96,63	97,16	64.208.873.000,00	97,83	157.408.553.870,00	98,23	196.210.397.570,00	98,63	185.564.642.964,00	99,04	200.985.788.001,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					280.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	27	33	39	280.000.000,00	45	750.000.000,00	51	800.000.000,00	57	850.000.000,00	63	900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG					1.214.138.000,00		2.150.000.000,00		2.200.000.000,00		2.200.000.000,00		2.300.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang (%)	95	95	95	1.214.138.000,00	95	2.150.000.000,00	95	2.200.000.000,00	95	2.200.000.000,00	95	2.300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					33.716.167.950, 00		27.554.725.030, 00		38.139.064.998, 00		48.303.509.526, 00		58.544.698.623, 00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					5.657.577.167,0 0		5.923.522.309,0 0		5.981.145.805,0 0		6.040.498.006,0 0		6.142.385.951,0 0	
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Setahun (%)	100	100	100	5.657.577.167,0 0	100	5.923.522.309,0 0	100	5.981.145.805,0 0	100	6.040.498.006,0 0	100	6.142.385.951,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN					25.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	-	100	100	25.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	50	55.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					5.029.800.000,0 0		9.080.843.050,0 0		9.288.927.355,0 0		9.517.820.090,0 0		9.769.602.099,0 0	
Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh (%)	-	-	20	5.029.800.000,0 0	40	9.080.843.050,0 0	60	9.288.927.355,0 0	80	9.517.820.090,0 0	100	9.769.602.099,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					20.635.300.000, 00		10.035.000.000, 00		20.353.000.000, 00		30.230.000.000, 00		40.117.000.000, 00	
Menurunnya rumah tidak layak huni	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten (%)	77,27	71	71	20.635.300.000, 00	71,42	10.035.000.000, 00	71,72	20.353.000.000, 00	72,02	30.230.000.000, 00	72,33	40.117.000.000, 00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					2.368.490.783,0 0		2.460.359.671,0 0		2.460.991.838,0 0		2.460.191.430,0 0		2.460.710.573,0 0	
Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	67	74,21	74,21	2.368.490.783,0 0	76,19	2.460.359.671,0 0	78,17	2.460.991.838,0 0	80,16	2.460.191.430,0 0	82,14	2.460.710.573,0 0	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					19.145.151.736, 00		28.286.817.849, 00		20.650.393.503, 00		20.920.552.247, 00		31.493.818.368, 00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					17.210.602.440, 00		16.816.237.412, 00		17.373.541.684, 00		17.432.565.085, 00		17.533.888.591, 00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Setahun (%)	100	100	100	12.286.589.665,00	100	11.809.837.590,00	100	12.333.783.158,00	100	12.358.447.094,00	100	12.400.786.851,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Setahun (%)	100	100	100	4.924.012.775,00	100	5.006.399.822,00	100	5.039.758.526,00	100	5.074.117.991,00	100	5.133.101.740,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					800.125.000,00		1.564.256.309,00		1.612.711.485,00		1.663.139.810,00		1.757.597.691,00	
Meningkatnya Penegakan terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	75	75	80	320.700.000,00	85	982.109.954,00	90	1.001.377.814,00	95	1.021.323.454,00	100	1.072.419.758,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	65	70	70	418.880.000,00	75	409.824.401,00	80	429.565.621,00	85	450.543.902,00	100	500.098.293,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	65	65	65	35.545.000,00	70	85.000.000,00	75	90.000.000,00	85	95.000.000,00	90	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (*)	25	25	25	25.000.000,00	25	87.321.954,00	25	91.768.050,00	25	96.272.454,00	25	85.079.640,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA					679.999.296,00		1.611.499.727,00		1.144.574.713,00		1.279.303.449,00		1.602.233.793,00	
Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana (%)	80	60	82	369.999.296,00	83	996.037.157,00	84	554.112.143,00	85	840.000.000,00	86	827.233.793,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	46	48	48	200.000.000,00	52	475.000.000,00	54	475.000.000,00	56	230.000.000,00	58	520.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kualitas penanganan pasca bencana	Persentase Sistem Pemulihan Pasca Bencana (%)	69	66	70	110.000.000,00	72	140.462.570,00	73	115.462.570,00	74	209.303.449,00	76	255.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATA N KEBAKARAN DAN PENYELAMATA N NON KEBAKARAN					454.425.000,00		8.294.824.401,00		519.565.621,00		545.543.903,00		10.600.098.293,00	
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100	100	100	403.268.000,00	100	2.254.824.401,00	100	474.565.621,00	100	479.565.622,00	100	545.098.293,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenterama n Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1,07	1,07	1,07	51.157.000,00	1,07	6.040.000.000,00	1,62	45.000.000,00	1,62	65.978.281,00	2,15	10.055.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenterama n Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					16.042.220.672,00		28.227.218.344,00		33.969.459.718,00		34.874.140.333,00		35.932.859.444,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					5.408.822.672,00		5.430.639.444,00		5.463.410.873,00		5.497.165.446,00		5.555.110.796,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	5.408.822.672,00	100	5.430.639.444,00	100	5.463.410.873,00	100	5.497.165.446,00	100	5.555.110.796,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					115.000.000,00		120.000.000,00		135.000.000,00		145.000.000,00		155.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS Aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (%)	60	65	65	115.000.000,00	65	120.000.000,00	67	135.000.000,00	68	145.000.000,00	70	155.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					8.540.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani (%)	100	100	100	8.540.000,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					5.680.018.000,00		6.214.198.900,00		11.755.588.845,00		12.354.273.287,00		13.038.560.616,00	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial (%)	100	100	100	5.680.018.000,00	100	6.214.198.900,00	100	11.755.588.845,00	100	12.354.273.287,00	100	13.038.560.616,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					4.509.380.000,00		16.123.380.000,00		16.246.460.000,00		16.468.701.600,00		16.735.188.032,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	-	-	80	4.509.380.000,0 0	90	16.123.380.000, 00	100	16.246.460.000, 00	100	16.468.701.600, 00	100	16.735.188.032, 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					261.460.000,00		272.000.000,00		302.000.000,00		337.000.000,00		372.000.000,00	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang ditangani tepat waktu (%)	100	100	100	261.460.000,00	100	272.000.000,00	100	302.000.000,00	100	337.000.000,00	100	372.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					59.000.000,00		59.000.000,00		59.000.000,00		64.000.000,00		69.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Cakupan Makam Pahlawan dalam kondisi baik (%)	100	100	100	59.000.000,00	100	59.000.000,00	100	59.000.000,00	100	64.000.000,00	100	69.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					300.000.000,00		4.073.752.925,0 0		4.205.052.925,0 0		3.519.402.925,0 0		3.823.752.925,0 0	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Prosentase kegiatan yang dilaksanakan dan mengacu ke rencana kerja (%)	100	-	-	0,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA S TENAGA KERJA					32.034.000,00		2.440.000.000,0 0		2.470.000.000,0 0		1.680.000.000,0 0		1.680.000.000,0 0	
Meningkatnya keterampilan dan produktifitas tenaga kerja	Persentase peningkatan keterampilan dan produktifitas tenaga kerja (%)	100		100	32.034.000,00	100	2.440.000.000,0 0	100	2.470.000.000,0 0	100	1.680.000.000,0 0	100	1.680.000.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					242.316.000,00		243.102.925,00		240.402.925,00		243.102.925,00		243.102.925,00	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (%)	79,6	-	85,7	242.316.000,00	85,8	243.102.925,00	85,9	240.402.925,00	86,05	243.102.925,00	86,10	243.102.925,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					25.650.000,00		1.380.650.000,0 0		1.484.650.000,0 0		1.586.300.000,0 0		1.890.650.000,0 0	
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Prosentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial Sesuai Aturan (%)	100	100	100	25.650.000,00	100	1.380.650.000,0 0	100	1.484.650.000,0 0	100	1.586.300.000,0 0	100	1.890.650.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					7.898.938.761,0 0		9.800.294.184,0 0		10.179.395.753, 00		11.040.525.128, 00		12.062.496.609, 00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					6.300.338.761,0 0		6.330.840.814,0 0		6.362.253.546,0 0		6.394.608.661,0 0		6.450.151.609,0 0	
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	-	-	100	6.300.338.761,0 0	100	6.330.840.814,0 0	100	6.362.253.546,0 0	100	6.394.608.661,0 0	100	6.450.151.609,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN					143.000.000,00		328.958.370,00		337.000.000,00		458.071.467,00		870.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Anggaran Pemerintah Daerah yang Responsif Gender	Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD (%)	65,63	65,85	66	143.000.000,00	66,50	328.958.370,00	67	337.000.000,00	67,50	458.071.467,00	68	870.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					348.546.000,00		680.000.000,00		721.000.000,00		904.000.000,00		1.231.000.000,00	
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk perempuan) (Rasio)	2,10000	2,10000	2,10000	348.546.000,00	2,10000	680.000.000,00	2,10000	721.000.000,00	1,10000	904.000.000,00	1,10000	1.231.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					550.000.000,00		1.051.000.000,00		1.130.297.207,00		1.369.000.000,00		1.488.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Prosentase Kelompok Perempuan yang Berdaya secara Ekonomi (%)	-	-	10,59	550.000.000,00	14,28	1.051.000.000,00	18,43	1.130.297.207,00	23,24	1.369.000.000,00	28,11	1.488.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					56.275.000,00		221.000.000,00		260.000.000,00		327.000.000,00		343.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase data gender dan anak yang valid (%)	100	100	100	56.275.000,00	100	221.000.000,00	100	260.000.000,00	100	327.000.000,00	100	343.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					175.345.000,00		414.345.000,00		463.345.000,00		574.345.000,00		601.345.000,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase desa layak anak (%)	60,8	61,5	61,9	175.345.000,00	62,7	414.345.000,00	63,5	463.345.000,00	64,1	574.345.000,00	65	601.345.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					325.434.000,00		774.150.000,00		905.500.000,00		1.013.500.000,00		1.079.000.000,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	-	-	72,55	325.434.000,00	72,60	774.150.000,00	72,65	905.500.000,00	72,66	1.013.500.000,00	72,68	1.079.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.500.000.000,00		3.595.000.000,00		3.770.420.126,00		3.770.420.126,00		3.770.420.126,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					875.000.000,00		875.000.000,00		925.000.000,00		925.000.000,00		925.000.000,00	
Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (%)	125,78	126	126,5	875.000.000,00	127	875.000.000,00	128	925.000.000,00	129	925.000.000,00	130	925.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.825.000.000,00		1.900.000.000,00		2.025.420.126,00		2.025.420.126,00		2.025.420.126,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Coefisien variasi (CV) harga pangan (Angka)	7,75	7,30	7,20	1.825.000.000,00	7,1	1.900.000.000,00	7	2.025.420.126,00	6,9	2.025.420.126,00	6,8	2.025.420.126,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) (%)	106,34	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					325.000.000,00		335.000.000,00		335.000.000,00		335.000.000,00		335.000.000,00	
Menurunnya kerawanan pangan	Persentase daerah rawan pangan (%)	1,84	1,80	1,60	325.000.000,00	1,50	335.000.000,00	1,40	335.000.000,00	1,30	335.000.000,00	1,20	335.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					475.000.000,00		485.000.000,00		485.000.000,00		485.000.000,00		485.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya keamanan pangan segar	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	100	100	100	475.000.000,00	100	485.000.000,00	100	485.000.000,00	100	485.000.000,00	100	485.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					17.226.920.000,00		950.000.000,00		355.000.000,00		6.330.000.000,00		20.550.000.000,00	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					16.916.920.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		6.180.000.000,00		20.400.000.000,00	
Terpenuhinya realisasi penggunaan tanah yang sesuai dengan perencanaan penggunaan tanah	Persentase tahapan pelaksanaan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	-	-	100	16.916.920.000,00	100	10.000.000,00	100	5.000.000,00	100	6.180.000.000,00	100	20.400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH					310.000.000,00		940.000.000,00		350.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Terpenuhinya realisasi penggunaan tanah yang sesuai dengan perencanaan penggunaan tanah	Persentase realisasi penggunaan tanah sesuai dengan perencanaan penggunaan tanah (%)	87,5	75	75	310.000.000,00	78	940.000.000,00	80	350.000.000,00	82	150.000.000,00	83	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					20.613.806.062,00		32.472.942.530,00		26.780.478.521,00		21.804.710.653,00		34.739.832.284,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					14.668.172.882,00		13.855.380.376,00		13.937.600.759,00		14.022.287.753,00		14.167.667.094,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KABUPATEN/K OTA														
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	-	100	100	14.668.172.882, 00	100	13.855.380.376, 00	100	13.937.600.759, 00	100	14.022.287.753, 00	100	14.167.667.094, 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					198.943.000,00		320.000.000,00		370.000.000,00		190.000.000,00		170.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	-	-	75,6	198.943.000,00	75,6	320.000.000,00	80	370.000.000,00	80	190.000.000,00	80	170.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					408.500.000,00		1.650.900.000,0 0		1.516.711.000,0 0		1.691.384.440,0 0		1.875.476.891,0 0	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	51,38	56,77	69,85	408.500.000,00	69,95	1.650.900.000,0 0	70,05	1.516.711.000,0 0	70,15	1.691.384.440,0 0	70,25	1.875.476.891,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	81,71	84,77	79,24		79,34		79,44		79,54		79,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)					1.222.607.000,0 0		10.022.550.000, 00		3.568.850.000,0 0		1.170.455.280,0 0		8.687.870.000,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragama n Hayati	IKL (Indeks Kualitas Lahan) (Indeks)	52,21	0	63,01	1.222.607.000,0 0	63,01	10.022.550.000, 00	63,01	3.568.850.000,0 0	63,01	1.170.455.280,0 0	63,01	8.687.870.000,0 0	Dinas /Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase RTH (Persentase)	0	0	31,54		31,54		31,54		31,54		31,54		Dinas /Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					50.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	-	50	55	50.000.000,00	55	85.000.000,00	55	100.000.000,00	58	100.000.000,00	60	110.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					63.500.000,00		180.000.000,00		135.000.000,00		129.000.000,00		150.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	-	40	46,67	63.500.000,00	53,33	180.000.000,00	56,25	135.000.000,00	57,89	129.000.000,00	60	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					30.840.000,00		30.000.000,00		25.734.000,00		30.000.000,00		32.500.000,00	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	-	-	20	30.840.000,00	40	30.000.000,00	60	25.734.000,00	80	30.000.000,00	100	32.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					177.340.000,00		345.000.000,00		370.000.000,00		400.000.000,00		428.000.000,00	
Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup	Persentase lembaga masyarakat/kelompok masyarakat dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup (%)	0	40	35,47	177.340.000,00	47,57	345.000.000,00	60,53	370.000.000,00	72,63	400.000.000,00	84,74	428.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					65.320.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	-	-	15,73	65.320.000,00	17,55	100.000.000,00	19,37	110.000.000,00	21,79	120.000.000,00	24,21	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					34.000.000,00		36.950.000,00		38.000.000,00		39.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	0	100	100	34.000.000,00	100	36.950.000,00	100	38.000.000,00	100	39.000.000,00	100	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					3.694.583.180,0 0		5.847.162.154,0 0		6.608.582.762,0 0		3.912.583.180,0 0		8.948.318.299,0 0	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	39,1	39,5	39,8	3.694.583.180,0 0	40	5.847.162.154,0 0	40,5	6.608.582.762,0 0	41	3.912.583.180,0 0	41,5	8.948.318.299,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (%)	39,1	39,5	39,8		40		40,5		41		41,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N DAN					10.424.902.021, 00		13.806.164.415, 00		14.152.627.795, 00		14.528.323.314, 00		15.033.175.906, 00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENCATATAN SIPIL														
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					9.248.607.571,0 0		9.094.333.200,0 0		9.120.818.290,0 0		9.148.097.932,0 0		9.194.927.985,0 0	
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	9.248.607.571,0 0	100	9.094.333.200,0 0	100	9.120.818.290,0 0	100	9.148.097.932,0 0	100	9.194.927.985,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependuduk an Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					746.003.450,00		3.836.734.590,0 0		4.115.068.255,0 0		4.406.958.853,0 0		4.751.647.921,0 0	
Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaranÂ pend uduk (%)	87,01	89	90	746.003.450,00	91	3.835.734.590,0 0	92	4.114.068.255,0 0	93	4.405.958.853,0 0	94	4.750.147.921,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependuduk an Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait layanan administrasi kependudukan dan potensi KKN	Persentase pengaduan masyarakat terkait layanan dan potensi KKN (pungli, dll) yang terselesaikan (%)	100	100	100	0,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependuduk an Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM					182.392.000,00		514.346.625,00		543.500.000,00		580.000.000,00		644.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENCATATAN SIPIL														
Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase penduduk dengan akta pencatatan sipil (%)	99,51	93	99,52	182.392.000,00	99,54	514.346.625,00	99,56	543.500.000,00	99,58	580.000.000,00	99,60	644.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependuduk an Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N					126.588.000,00		270.750.000,00		281.075.000,00		295.466.529,00		332.600.000,00	
Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Persentase Data dan informasi kependudukan yang valid (%)	100	100	100	81.618.000,00	100	210.500.000,00	100	217.075.000,00	100	224.700.000,00	100	250.600.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependuduk an Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya implementasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Persentase Data dan informasi kependudukan yang valid (%)	-	99	99	44.970.000,00	99,1	60.250.000,00	99,2	64.000.000,00	99,3	70.766.529,00	99,4	82.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependuduk an Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKA N					121.311.000,00		90.000.000,00		92.166.250,00		97.800.000,00		110.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyusunan profil kependudukan	Cakupan data profil kependudukan (Angka)	100	100	100	121.311.000,00	100	90.000.000,00	100	92.166.250,00	100	97.800.000,00	100	110.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependuduk an Dan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA					29.031.490.476, 00		38.284.005.003, 00		35.409.573.055, 00		35.540.797.448, 00		35.804.088.139, 00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					5.193.215.376,0 0		5.109.430.568,0 0		5.140.533.654,0 0		5.172.569.832,0 0		5.227.565.271,0 0	
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Setahun (%)	100	100	100	5.193.215.376,0 0	100	5.109.430.568,0 0	100	5.140.533.654,0 0	100	5.172.569.832,0 0	100	5.227.565.271,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					178.300.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00		285.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas penataan fasilitas umum desa	persentase desa yang fasilitas umum tertata dengan baik (%)	-	83	85	178.300.000,00	87	200.000.000,00	89	220.000.000,00	92	240.000.000,00	94	285.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					271.700.000,00		315.000.000,00		321.000.000,00		326.000.000,00		355.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi kerjasama Desa (%)	-	16	20	271.700.000,00	40	315.000.000,00	60	321.000.000,00	80	326.000.000,00	100	355.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.897.275.100,00		6.975.818.435,00		4.014.643.401,00		4.076.471.616,00		4.166.752.868,00	
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya (%)	-	0,5	0,5	3.897.275.100,00	0,10	6.975.818.435,00	0,15	4.014.643.401,00	0,20	4.076.471.616,00	0,25	4.166.752.868,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
	Persentase Pemerintah Desa dengan tata kelola baik (%)	-	40	45		50		55		60		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					19.491.000.000,00		25.683.756.000,00		25.713.396.000,00		25.725.756.000,00		25.769.770.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dalam pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa dan lembaga masyarakat Hukum Adat yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa (%)	-	21,65	21,65	19.491.000.000,00	27	25.683.756.000,00	32,35	25.713.396.000,00	37,69	25.725.756.000,00	43,04	25.769.770.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					620.000.000,00		12.076.401.910,00		13.098.231.401,00		13.772.954.541,00		14.522.801.108,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					100.000.000,00		827.000.000,00		1.175.000.000,00		1.422.000.000,00		1.716.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Data Keluarga	Persentase Data Keluarga yang valid (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	827.000.000,00	100	1.175.000.000,00	100	1.422.000.000,00	100	1.716.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					310.000.000,00		5.713.401.910,00		6.267.231.401,00		6.613.954.541,00		7.000.801.108,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	73,94	71,00	71,00	310.000.000,00	71,20	5.713.401.910,00	71,35	6.267.231.401,00	71,50	6.613.954.541,00	71,65	7.000.801.108,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					210.000.000,00		5.536.000.000,00		5.656.000.000,00		5.737.000.000,00		5.806.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang memiliki ketahanan Keluarga tang aktif (%)	-	-	62	210.000.000,00	62,5	5.536.000.000,00	63	5.656.000.000,00	64	5.737.000.000,00	65	5.806.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					47.250.888.511,00		70.467.087.298,00		66.046.043.910,00		66.633.248.316,00		74.913.607.815,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					17.262.601.871,00		23.311.284.343,00		18.419.757.343,00		18.337.386.243,00		25.626.101.815,00	
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun (%)	100	100	100	17.262.601.871,00	100	23.311.284.343,00	100	18.419.757.343,00	100	18.337.386.243,00	100	25.626.101.815,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubunga n
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					29.988.286.640,00		47.135.802.955,00		47.601.286.567,00		48.270.862.073,00		49.207.506.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Prosentase Ruas Jalan yang sesuai Standard keselamatan lalu Lintas (%)	56,5	56,55	56,55	29.988.286.640,00	56,60	47.135.802.955,00	56,65	47.601.286.567,00	56,70	48.270.862.073,00	56,75	49.207.506.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					0,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Sungai dan Danau	Persentase penumpang yang terlayani angkutan (%)	10	0	0	0,00	15	20.000.000,00	20	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					11.418.840.170,00		12.306.128.603,00		12.410.745.284,00		12.502.933.640,00		12.767.480.338,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.938.651.170,00		7.985.536.103,00		8.033.886.860,00		8.083.688.140,00		8.169.180.338,00	
Tercapainya pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	7.938.651.170,00	100	7.985.536.103,00	100	8.033.886.860,00	100	8.083.688.140,00	100	8.169.180.338,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.008.925.500,00		1.720.592.500,00		1.736.858.424,00		1.759.245.500,00		1.898.300.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	1.008.925.500,0 0	100	1.720.592.500,0 0	100	1.736.858.424,0 0	100	1.759.245.500,0 0	100	1.898.300.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.471.263.500,0 0		2.600.000.000,0 0		2.640.000.000,0 0		2.660.000.000,0 0		2.700.000.000,0 0	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	2.471.263.500,0 0	100	2.600.000.000,0 0	100	2.640.000.000,0 0	100	2.660.000.000,0 0	100	2.700.000.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					6.993.858.874,0 0		9.105.267.426,0 0		9.318.746.615,0 0		9.556.479.818,0 0		9.944.729.320,0 0	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.748.358.874,0 0		5.617.741.663,0 0		5.643.410.295,0 0		5.669.848.987,0 0		5.715.235.406,0 0	
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun (%)	100	100	100	5.748.358.874,0 0	100	5.617.741.663,0 0	100	5.643.410.295,0 0	100	5.669.848.987,0 0	100	5.715.235.406,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					45.500.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00	
Meningkatnya legalitas izin usaha koperasi	Persentase penerbitan izin usaha koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten (%)	70	-	74	45.500.000,00	75	50.000.000,00	80	55.000.000,00	85	60.000.000,00	90	65.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					193.000.000,00		200.000.000,00		207.000.000,00		215.000.000,00		230.000.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundangan	Persentase koperasi yang taat peraturan perundangan (%)	75,6	-	76	193.000.000,00	78	200.000.000,00	80	207.000.000,00	82	215.000.000,00	84	230.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					42.500.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase Koperasi dengan kualifikasi sehat dan cukup sehat (%)	40		43	42.500.000,00	46	50.000.000,00	49	55.000.000,00	52	60.000.000,00	55	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N					120.000.000,00		567.430.710,00		624.173.781,00		686.591.159,00		755.250.275,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas pengelola koperasi	Persentase koperasi yang memiliki pengelola bersertifikat (%)	100	100	100	120.000.000,00	100	567.430.710,00	100	624.173.781,00	100	686.591.159,00	100	755.250.275,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					319.000.000,00		485.000.000,00		504.000.000,00		525.000.000,00		597.000.000,00	
Meningkatnya volume usaha koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya (%)	58	66	55	319.000.000,00	58	485.000.000,00	61	504.000.000,00	64	525.000.000,00	67	597.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAA N USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					313.006.000,00		1.666.254.670,00		1.755.380.137,00		1.863.018.150,00		1.979.819.965,00	
Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM (%)	52,39	52,39	53	213.006.000,00	54	644.000.000,00	55	652.500.000,00	56	674.000.000,00	57	690.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Meningkatnya UMKM Unggulan Daerah	Persentase UMKM yang memiliki produk unggulan (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	1.022.254.670,00	100	1.102.880.137,00	100	1.189.018.150,00	100	1.289.319.965,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM					212.494.000,00		468.840.383,00		474.782.402,00		477.021.522,00		532.423.674,00	
Meningkatnya akses pasar UMKM	Persentase UMKM yang terakses pasar (%)	100		100	212.494.000,00	100	468.840.383,00	100	474.782.402,00	100	477.021.522,00	100	532.423.674,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					8.002.037.522,0 0		9.445.368.966,0 0		9.590.634.343,0 0		9.194.938.155,0 0		10.301.518.904, 00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					6.726.137.522,0 0		6.861.648.123,0 0		6.895.671.174,0 0		6.930.714.915,0 0		7.290.873.339,0 0	
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	6.726.137.522,0 0	100	6.861.648.123,0 0	100	6.895.671.174,0 0	100	6.930.714.915,0 0	100	7.290.873.339,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM PENANAMAN MODAL					308.900.000,00		343.595.153,00		365.724.910,00		179.961.156,00		350.000.000,00	
Meningkatnya realisasi perencanaan penanaman modal	Persentase rencana penanaman modal yang terealisasi (%)	100	100	100	308.900.000,00	100	343.595.153,00	100	365.724.910,00	100	179.961.156,00	100	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					250.000.000,00		545.000.000,00		545.000.000,00		500.000.000,00		666.957.272,00	
Meningkatnya minat investasi	Persentase penanam modal yang berminat berinvestasi (%)	100	100	100	250.000.000,00	100	545.000.000,00	100	545.000.000,00	100	500.000.000,00	100	666.957.272,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					251.250.000,00		414.000.000,00		434.000.000,00		400.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-rata waktu pelayanan perizinan dan non perizinan (Hari)	2		2	251.250.000,00	2	414.000.000,00	2	434.000.000,00	2	400.000.000,00	2	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					225.750.000,00		1.041.125.690,0 0		1.110.238.259,0 0		944.262.084,00		1.153.688.293,0 0	
Meningkatnya pengendalian penanaman modal	Persentase investor yang taat peraturan investasi (%)	-	80	85	225.750.000,00	87	1.041.125.690,0 0	90	1.110.238.259,0 0	95	944.262.084,00	100	1.153.688.293,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian pengaduan perizinan dan non perizinan	Persentase pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terselesaikan (%)	-	80	85	240.000.000,00	85	240.000.000,00	90	240.000.000,00	90	240.000.000,00	95	240.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					6.100.000.000,00		6.565.000.000,00		6.680.000.000,00		6.730.000.000,00		6.805.000.000,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					450.000.000,00		500.000.000,00		555.000.000,00		570.000.000,00		605.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas kepemudaan	Persentase Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	9,57	-	1	450.000.000,00	1	500.000.000,00	1	555.000.000,00	1	570.000.000,00	1	605.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan (%)	39,52	2	1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N					5.250.000.000,00		5.625.000.000,00		5.695.000.000,00		5.725.000.000,00		5.765.000.000,00	
Meningkatnya prestasi atlet olahraga	Jumlah Atlet yang memperoleh prestasi dalam multi event maupun single event (Orang)	188	193	198	5.250.000.000,00	203	5.625.000.000,00	208	5.695.000.000,00	213	5.725.000.000,00	218	5.765.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					400.000.000,00		440.000.000,00		430.000.000,00		435.000.000,00		435.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Prosentase gugus kepramukaan yang aktif dalam kegiatan kepramukaan (%)	97,78	98,71	98,76	400.000.000,00	98,81	440.000.000,00	98,86	430.000.000,00	98,91	435.000.000,00	98,96	435.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					404.445.950,00		560.000.000,00		580.000.000,00		590.000.000,00		654.383.066,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL					404.445.950,00		560.000.000,00		580.000.000,00		590.000.000,00		654.383.066,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Berkualitas (%)	100	100	100	404.445.950,00	100	560.000.000,00	100	580.000.000,00	100	590.000.000,00	100	654.383.066,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					287.187.000,00		500.032.975,00		530.032.975,00		588.995.469,00		600.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					287.187.000,00		500.032.975,00		530.032.975,00		588.995.469,00		600.000.000,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	45,10	45,30	45,32	287.187.000,00	45,42	500.032.975,00	45,42	530.032.975,00	45,53	588.995.469,00	45,64	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.460.000.000,00		5.445.078.900,00		5.139.586.790,00		4.712.045.469,00		8.203.250.015,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N KEBUDAYAAN					1.925.000.000,0 0		3.250.000.000,0 0		3.215.000.000,0 0		2.210.000.000,0 0		3.895.000.000,0 0	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase seni budaya yang dilindungi (%)	50	60	80	1.925.000.000,0 0	85	3.250.000.000,0 0	85	3.215.000.000,0 0	90	2.210.000.000,0 0	90	3.895.000.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					10.000.000,00		150.000.000,00		50.000.000,00		40.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase sejarah lokal yang terupdate (%)	20	23	25	10.000.000,00	30	150.000.000,00	30	50.000.000,00	40	40.000.000,00	45	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					318.800.000,00		1.250.000.000,0 0		1.000.000.000,0 0		1.500.000.000,0 0		3.150.000.000,0 0	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya yang ditetapkan (%)	50	50	50	318.800.000,00	50	1.250.000.000,0 0	50	1.000.000.000,0 0	60	1.500.000.000,0 0	80	3.150.000.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase cagar budaya yang menjadi objek wisata (%)	10	30	30		30		30		30		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					206.200.000,00		795.078.900,00		874.586.790,00		962.045.469,00		1.058.250.015,0 0	
Meningkatnya tata kelola museum	Jumlah Pengunjung museum (Angka)	17,275	17,75 0	18,000	206.200.000,00	19,000	795.078.900,00	20,000	874.586.790,00	21,000	962.045.469,00	22,000	1.058.250.015,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.368.142.825,0 0		6.680.877.357,0 0		6.798.307.226,0 0		6.955.681.063,0 0		7.193.138.968,0 0	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					5.146.620.773,0 0		5.169.805.632,0 0		5.193.681.915,0 0		5.218.274.486,0 0		5.275.491.733,0 0	
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Setahun (%)	100	100	100	5.146.620.773,0 0	100	5.169.805.632,0 0	100	5.193.681.915,0 0	100	5.218.274.486,0 0	100	5.275.491.733,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaa n
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					196.523.052,00		1.495.321.725,0 0		1.588.087.811,0 0		1.534.818.761,0 0		1.899.414.640,0 0	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	72,25	72,26	72,30	196.523.052,00	72,35	1.495.321.725,0 0	72,40	1.588.087.811,0 0	72,45	1.534.818.761,0 0	72,50	1.899.414.640,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaa n
	Persentase perpustakaan Yang terakreditasi minimal B (%)	-	-	72		73		74		75		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaa n
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					24.999.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		202.587.816,00		18.232.595,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Lokal yang Dilestarikan (%)	-	-	100	24.999.000,00	100	15.750.000,00	100	16.537.500,00	100	202.587.816,00	100	18.232.595,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					589.026.000,00		550.000.000,00		620.000.000,00		665.000.000,00		710.000.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					367.513.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Kearsipan Secara Baku (%)	85	80	81,75	367.513.000,00	82	300.000.000,00	82,20	350.000.000,00	82,35	375.000.000,00	82,50	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					221.513.000,00		250.000.000,00		270.000.000,00		290.000.000,00		310.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	-	-	66	221.513.000,00	67	250.000.000,00	68	270.000.000,00	69	290.000.000,00	70	310.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					8.646.964.562,00		10.640.437.353,00		10.854.074.871,00		11.115.653.217,00		11.804.516.791,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					7.991.964.632,0 0		7.713.628.763,0 0		7.753.277.068,0 0		7.794.114.824,0 0		7.864.219.637,0 0	
Tercapainya pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun (%)	100	100	100	7.991.964.632,0 0	100	7.713.628.763,0 0	100	7.753.277.068,0 0	100	7.794.114.824,0 0	100	7.864.219.637,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					55.000.000,00		450.000.000,00		450.308.354,00		460.000.000,00		660.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan Tangkap (%)	-	-	0,5	55.000.000,00	0,5	450.000.000,00	0,5	450.308.354,00	0,5	460.000.000,00	0,5	660.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					347.914.430,00		2.026.808.590,0 0		2.200.489.449,0 0		2.411.538.393,0 0		2.830.297.154,0 0	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi Perikanan Budidaya (%)	-	-	1	347.914.430,00	1	2.026.808.590,0 0	1	2.200.489.449,0 0	1	2.411.538.393,0 0	1	2.830.297.154,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya kelestarian perairan umum daratan dan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
keanekaragama n hayati														
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					252.085.500,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi hasil perikanan (%)	-	-	2	252.085.500,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					12.155.752.077, 00		13.336.716.981, 00		13.478.165.657, 00		13.700.041.044, 00		14.095.869.864, 00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					10.011.752.077, 00		9.749.466.981,0 0		9.800.753.157,0 0		9.853.577.919,0 0		9.944.260.427,0 0	
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	10.011.752.077, 00	100	9.749.466.981,0 0	100	9.800.753.157,0 0	100	9.853.577.919,0 0	100	9.944.260.427,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					675.000.000,00		1.075.000.000,0 0		1.100.000.000,0 0		1.050.000.000,0 0		1.125.000.000,0 0	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah daya tarik destinasi (Lokasi)	64	65	66	675.000.000,00	67	1.075.000.000,0 0	68	1.100.000.000,0 0	69	1.050.000.000,0 0	70	1.125.000.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					250.000.000,00		355.000.000,00		355.000.000,00		393.000.000,00		483.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Frekuensi promosi / pemasaran pariwisata (Kali)	10	10	10	250.000.000,00	10	355.000.000,00	10	355.000.000,00	10	393.000.000,00	10	483.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah pengunjung / viewer pemasaran pariwisata (Orang)	-	8.800	10.000				18.000				25.000		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGA N EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					804.000.000,00		1.155.000.000,0 0		1.075.000.000,0 0		1.185.000.000,0 0		1.260.000.000,0 0	
Meningkatnya kualitas daya saing produk Ekraf	Persentase pelaku ekraf yang meningkat penjualan produknya (%)	8,85	12	12,2	804.000.000,00	13	1.155.000.000,0 0	14	1.075.000.000,0 0	16	1.185.000.000,0 0	18	1.260.000.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					415.000.000,00		1.002.250.000,0 0		1.147.412.500,0 0		1.218.463.125,0 0		1.283.609.437,0 0	
Meningkatnya kuapasitas SDM Pariwisata	Persentase SDM pariwisata yang tersertifikasi (%)	16,35	17,99	19,62	315.000.000,00	21,26	852.250.000,00	22,89	897.412.500,00	24,53	978.463.125,00	26,16	1.028.609.437,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
Meningkatnya kuapasitas SDM Ekonomi Kreatif	Persentase pertumbuhan Pelaku Usaha	2	2	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	3	250.000.000,00	3	240.000.000,00	2	255.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Ekonomi Kreatif (%)													Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					36.425.110.324,00		69.367.371.254,00		77.527.249.696,00		82.814.123.947,00		85.662.538.311,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.283.883.504,00		22.114.192.018,00		27.203.297.593,00		27.295.076.335,00		27.452.629.847,00	
Tercapainya pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah dalam setahun	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	27.283.883.504,00	100	22.114.192.018,00	100	27.203.297.593,00	100	27.295.076.335,00	100	27.452.629.847,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					4.661.221.840,00		9.394.340.576,00		9.494.340.577,00		11.119.222.701,00		10.226.524.075,00	
Meningkatnya produktifitas pertanian tanaman pangan	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Jagung (Ton/Ha)	7,71	7,73	7,73	2.489.594.240,00	7,75	2.795.000.000,00	7,76	2.895.000.000,00	7,77	4.395.000.000,00	7,79	3.502.301.374,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Padi (Ton/Ha)	6,44	6,45	6,47		6,49		6,51		6,52		6,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya produktifitas pertanian tanaman perkebunan dan hortikultura	Produtivitas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Alpukat (Ton/Ha)	0,06	0,065	0,07	950.000.000,00	0,07	5.203.173.500,00	0,07	5.203.173.500,00	0,07	5.203.173.500,00	0,08	5.203.173.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produtivitas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	5,31	6	6,31		6,88		7,49		8,17		8,9		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bawang Merah (Ton/Ha)													Bidang Pertanian
	Produktivitas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Cabai (Ton/Ha)	5,07	5,15	5,27		5,37		5,47		5,58		5,69		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Kopi (Ton/Ha)	1,19	1,23	1,25		1,23		1,28		1,3		1,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Melon (Ton/Ha)	18,74	19,0	19,74		20,25		20,78		21,32		21,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Tembakau (Ton/Ha)	1,78	1,80	1,82		1,84		1,85		1,87		1,89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya populasi peternakan	Persentase pelaku obat hewan yang mendapatkan pembinaan (%)	-	-	50	1.221.627.600,0 0	60	1.396.167.076,0 0	70	1.396.167.077,0 0	80	1.521.049.201,0 0	90	1.521.049.201,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan populasi peternakan (%)	-	-	1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N PRASARANA PERTANIAN					2.291.927.460,0 0		33.494.450.000, 00		36.212.784.000, 00		39.668.814.633, 00		43.170.773.083, 00	
Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian untuk budidaya tanaman pangan	Indek Pertanaman Tanaman Pangan (Angka)	2,86	2,54	2,59	1.500.000.000,0 0	2,64	27.198.450.000, 00	2,69	29.551.295.000, 00	2,74	32.428.615.633, 00	2,79	35.275.558.083, 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian	Indek Pertanaman Perkebunan dan	-	-	0,1	50.000.000,00	0,11	1.700.000.000,0 0	0,12	1.750.889.000,0 0	0,13	1.983.539.000,0 0	0,14	2.257.889.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
untuk budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura	Hortikultura (Angka)													Bidang Pertanian
Meningkatnya nilai tambah peternakan	Persentase pelayanan pemotongan hewan di RPH (%)	100	100	100	741.927.460,00	100	4.596.000.000,00	100	4.910.600.000,00	100	5.256.660.000,00	100	5.637.326.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase peningkatan produk unggulan hasil peternakan (%)	-	-	0,5		0,5		0,5		0,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					443.422.270,00		515.000.000,00		700.000.000,00		715.000.000,00		715.000.000,00	
Menurunnya kematian ternak	Angka Kematian Ternak (%)	-	-	2	443.422.270,00	2	515.000.000,00	2	700.000.000,00	2	715.000.000,00	2	715.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					597.660.250,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	3	3	3	597.660.250,00	3	625.000.000,00	3	625.000.000,00	3	625.000.000,00	3	625.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					16.650.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kelembagaan peternak	Jumlah Usaha Kesehatan Hewan yang mempunyai izin (Izin)	24	-	30	16.650.000,00	32	20.000.000,00	35	20.000.000,00	39	30.000.000,00	44	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase kelompok ternak yang meningkat skala produksinya (%)	-	-	1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.130.345.000,00		3.204.388.660,00		3.271.827.526,00		3.361.010.278,00		3.442.611.306,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM di bidang peternakan	Cakupan Kelompok Tani yang mendapatkan penyuluhan peternakan (%)	-	-	1,34	130.345.000,00	2,67	135.000.000,00	4,01	135.000.000,00	5,35	150.000.000,00	6,68	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya kualitas kelembagaan petani	Persentase kelompok tani yang meningkat nilai kelembagaannya (%)	78,07	78,07	78,97	1.000.000.000,00	79,86	3.069.388.660,00	80,75	3.136.827.526,00	81,64	3.211.010.278,00	82,53	3.292.611.306,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					23.146.698.431,00		21.527.421.055,00		23.602.695.132,00		23.676.428.994,00		23.701.125.912,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					20.380.979.931,00		18.576.836.055,00		20.646.844.561,00		20.718.953.323,00		20.842.740.032,00	
Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun (%)	100		100	20.380.979.931,00	100	18.576.836.055,00	100	20.646.844.561,00	100	20.718.953.323,00	100	20.842.740.032,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					5.450.000,00		5.450.000,00		16.450.000,00		5.450.000,00		5.450.000,00	
Meningkatnya kepatuhan dan ketaatan tentang persyaratan perdagangan	Persentase Pelaku Usaha yang tertib pendaftaran perdagangannya (%)	96,17	-	97	5.450.000,00	97,5	5.450.000,00	97,6	16.450.000,00	97,7	5.450.000,00	97,8	5.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.740.660.000,0 0		1.600.000.000,0 0		1.600.000.000,0 0		1.740.660.000,0 0		1.600.000.000,0 0	
Meningkatnya kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengolahan sarana distribusi perdagangan yang layak (%)	100	-	100	1.740.660.000,0 0	100	1.600.000.000,0 0	100	1.600.000.000,0 0	100	1.740.660.000,0 0	100	1.600.000.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					512.825.000,00		858.485.000,00		857.485.000,00		712.825.000,00		712.825.000,00	
Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Persentase koevisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok (%)	14,44		14	512.825.000,00	16	858.485.000,00	17	857.485.000,00	18	712.825.000,00	20	712.825.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGA N EKSPOR					166.000.000,00		91.650.000,00		91.915.571,00		93.615.671,00		100.185.880,00	
Meningkatnya volume Perdagangan	Nilai Ekspor Barang (Rp)	623.140.000 .000		630.000.000 .000	166.000.000,00	635.000.000 .000	91.650.000,00	640.000.000 .000	91.915.571,00	645.000.000 .000	93.615.671,00	650.000.000 .000	100.185.880,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISAS I DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					325.058.500,00		245.000.000,00		240.000.000,00		254.925.000,00		289.925.000,00	
Meningkatnya kepatuhan dan ketaatan tentang persyaratan perdagangan	Persentase alat ukur ,takar, timbangan dan perlengkapannya yang ditera/ tera ulang pada tahun berjalan (%)	100	-	100	325.058.500,00	100	245.000.000,00	100	240.000.000,00	100	254.925.000,00	100	289.925.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					15.725.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya volume Perdagangan	Prosentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/ dilaksa nakan (%)	-	-	80	15.725.000,00	82	150.000.000,00	84	150.000.000,00	86	150.000.000,00	88	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIA N					650.000.000,00		1.320.133.500,0 0		1.313.758.500,0 0		1.329.483.500,0 0		1.490.793.500,0 0	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					600.000.000,00		1.280.133.500,0 0		1.267.758.500,0 0		1.280.133.500,0 0		1.420.793.500,0 0	
Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Persentase Laju Pertumbuhan Industri (%)	76,47		76,47	600.000.000,00	76,47	1.280.133.500,0 0	76,47	1.267.758.500,0 0	76,47	1.280.133.500,0 0	76,47	1.420.793.500,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustria n
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		30.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya sistem pengelolaan sektor industri	Prosentase Industri yang tertib Izin Usahanya (%)	-	-	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustria n
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					40.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00		39.350.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya sistem pengelolaan sektor industri	Persentase Data Informasi Sistem Informasi Industri Nasional yang Valid (%)	85	-	85	40.000.000,00	85	30.000.000,00	85	36.000.000,00	85	39.350.000,00	85	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustria n
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					55.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					55.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya calon Transmigran yang memenuhi persyaratan	Persentase calon Transmigran yang memenuhi persyaratan (%)	100	100	100	55.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					47.207.822.959,00		45.425.741.169,00		49.754.382.726,00		49.611.755.061,00		52.668.412.145,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					36.765.304.445,00		35.396.207.673,00		38.523.934.089,00		38.498.733.735,00		39.674.979.367,00	
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	31.857.414.945,00	100	30.292.001.911,00	100	33.215.560.097,00	100	33.057.650.394,00	100	34.016.252.693,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	daerah dalam setahun (%)													Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase PD dengan nilai IKM >80 (%)	80,4	80,5	80,6	593.325.000,00	81	646.381.918,00	82	646.381.918,00	83	646.381.918,00	84	676.509.758,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Indeks Kematangan Kelembagaan mendasar Permendagri (Indeks)	-	43,50	43,75	188.727.500,00	44,00	188.727.500,00	44,25	243.906.694,00	44,50	279.773.170,00	44,75	278.338.510,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai pelaporan kinerja daerah pada hasil Nilai AKIP Daerah (Nilai)	12	12	12	544.370.000,00	12,10	544.370.440,00	12,20	544.370.440,00	12,30	544.370.440,00	12,40	574.498.280,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Komunikasi Pimpinan	Persentase layanan yang terfasilitasi sesuai SOP (%)	100	100	100	3.581.467.000,00	100	3.724.725.904,00	100	3.873.714.940,00	100	3.970.557.813,00	100	4.129.380.126,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					6.589.385.754,00		5.844.472.508,00		6.897.362.009,00		6.687.162.058,00		8.403.759.141,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase Data LPPD yang Valid (%)	100	100	100	556.120.500,00	100	557.246.000,00	100	577.246.000,00	100	591.246.000,00	100	616.666.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Bidang Tata Pemerinthanan yang Terpenuhi (%)	-	-	100	850.726.500,00	100	895.460.756,00	100	923.154.626,00	100	940.155.641,00	100	965.577.307,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	3.964.435.500,00	100	3.103.812.982,00	100	4.036.365.502,00	100	3.740.024.639,00	100	5.328.025.625,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Refomasi Hukum dan Bantuan Hukum	Nilai IRH Berdasarkan Penilaian Instansi Vertikal (Indeks)	-	98	98,06	1.218.103.254,00	98,10	1.287.952.770,00	98,15	1.360.595.881,00	98,20	1.415.735.778,00	98,25	1.493.490.209,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNAN					3.853.132.760,00		4.185.060.988,00		4.333.086.628,00		4.425.859.268,00		4.589.673.637,00	
Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti. (%)	100	100	100	1.182.201.000,00	100	1.437.569.461,00	100	1.486.749.039,00	100	1.518.715.765,00	100	1.578.061.196,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti. (%)	100	100	100	1.011.540.000,00	100	1.033.540.891,00	100	1.075.645.728,00	100	1.099.569.845,00	100	1.143.552.637,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kematangan UKPBJ	Nilai Tingkap Kematangan UKPBJ (Indeks)	-	-	40	1.083.630.200,00	40	1.028.370.382,00	40	1.062.415.117,00	40	1.084.544.195,00	40	1.120.835.882,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Pengelola PBJ Yang Kompeten	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM UKPBJ (Nilai)	-	-	23,25	520.750.500,00	23,25	428.487.659,00	23,25	442.672.965,00	23,30	451.893.414,00	23,30	467.014.951,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Nilai Tingkat Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan (Nilai)	-	-	25,85	55.011.060,00	26,8	257.092.595,00	27,25	265.603.779,00	27,7	271.136.049,00	27,7	280.208.971,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					65.583.498.919, 00		66.416.053.086, 00		67.758.349.779, 00		69.539.586.715, 00		72.690.036.742, 00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					36.038.831.919, 00		37.673.023.526, 00		38.038.316.943, 00		38.660.139.703, 00		39.344.144.738, 00	
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun (%)	75,22	100	100	36.038.831.919, 00	100	37.673.023.526, 00	100	38.038.316.943, 00	100	38.660.139.703, 00	100	39.344.144.738, 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					29.544.667.000, 00		28.743.029.560, 00		29.720.032.836, 00		30.879.447.012, 00		33.345.892.004, 00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persidangan dan penyusunan perda	Persentase fasilitasi penyusunan perda yang sesuai standart (kajian perda, naskah akademik) (%)	100	100	100	4.734.275.500,0 0	100	4.382.638.060,0 0	100	4.820.901.866,0 0	100	5.302.992.052,0 0	100	5.833.291.257,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi persidangan sesuai dengan standart (risalah, pendokumentasian , iadwal rapat) (%)	96,50	96,50	97		97,50		98		99		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan fasilitasi pengawasan dan penganggaran	Persentase fasilitasi pembahasan anggaran yang sesuai standart (pembahasan APBD, KUA PPAS) (%)	96,5	96,5	97	24.810.391.500, 00	97,5	24.360.391.500, 00	98	24.899.130.970, 00	99	25.576.454.960, 00	100	27.512.600.747, 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai standart (aspirasi masyarakat, kerjasama daerah) (%)	96,5	96,5	97		97,5		98		99		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)	82	83	84		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) yang tersusun dan terintegrasi (%)	96,5	96,5	97		97,5		98		99		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					16.746.424.891,00		18.498.065.399,00		18.941.639.085,00		19.565.465.133,00		21.087.764.704,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.365.117.527,00		8.816.887.126,00		8.860.651.899,00		8.989.678.587,00		9.605.399.503,00	
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	8.365.117.527,00	100	8.816.887.126,00	100	8.860.651.899,00	100	8.989.678.587,00	100	9.605.399.503,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten / Kota														
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					3.585.465.364,0 0		4.221.178.273,0 0		4.440.987.186,0 0		4.795.786.546,0 0		5.262.365.201,0 0	
Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pengukuran kinerja daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100	100	100	3.585.465.364,0 0	100	4.221.178.273,0 0	100	4.440.987.186,0 0	100	4.795.786.546,0 0	100	5.262.365.201,0 0	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra-PD (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					4.795.842.000,0 0		5.460.000.000,0 0		5.640.000.000,0 0		5.780.000.000,0 0		6.220.000.000,0 0	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan perangkat daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	1.130.842.000,0 0	100	1.560.000.000,0 0	100	1.610.000.000,0 0	100	1.670.000.000,0 0	100	1.880.000.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan perangkat daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja-PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100	1.230.000.000,0 0	100	1.450.000.000,0 0	100	1.530.000.000,0 0	100	1.610.000.000,0 0	100	1.790.000.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan perangkat daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja-PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100	2.435.000.000,00	100	2.450.000.000,00	100	2.500.000.000,00	100	2.500.000.000,00	100	2.550.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					507.716.588.733,00		463.897.711.804,00		481.166.259.360,00		509.777.850.843,00		532.506.141.466,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					34.864.700.833,00		26.773.999.664,00		29.514.947.046,00		33.046.719.026,00		37.656.252.384,00	
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	34.864.700.833,00	100	26.773.999.664,00	100	29.514.947.046,00	100	33.046.719.026,00	100	37.656.252.384,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					469.093.953.900,00		432.806.257.770,00		447.063.244.353,00		471.153.992.688,00		488.403.418.517,00	
MENINGKATNYA TATA KELOLA ANGGARAN	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	-	33	37	467.032.478.900,00	40	429.225.415.800,00	40	443.273.402.383,00	40	467.169.150.718,00	40	484.059.576.547,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERBENDAHARAAN	Persentase Penurunan SILPA (%)	-	39	42	1.026.200.000,00	45	1.750.568.000,00	48	1.879.568.000,00	51	1.962.568.000,00	54	2.121.568.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Belanja Daerah (%)	-	96,3	96,44		96,58		96,72		96,86		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA TATA KELOLA AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu (%)	100	100	100	1.035.275.000,0 0	100	1.830.273.970,0 0	100	1.910.273.970,0 0	100	2.022.273.970,0 0	100	2.222.273.970,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.190.800.000,0 0		1.827.000.000,0 0		1.900.000.000,0 0		2.011.511.700,0 0		2.380.186.277,0 0	
MENINGKATNYA TATA KELOLA ASET	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5	5	5	1.190.800.000,0 0	5	1.827.000.000,0 0	5	1.900.000.000,0 0	5	2.011.511.700,0 0	5	2.380.186.277,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.567.134.000,0 0		2.490.454.370,0 0		2.688.067.961,0 0		3.565.627.429,0 0		4.066.284.288,0 0	
MENINGKATNYA UPAYA EKSTENSIFIKAS I DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	12,66	13,70	14,00	1.662.506.500,0 0	14,30	1.318.070.000,0 0	14,70	1.334.850.000,0 0	15,00	1.856.761.000,0 0	15,20	1.883.375.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN DAN PELAPORAN	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	-	90	91	904.627.500,00	92	1.172.384.370,0 0	93	1.353.217.961,0 0	94	1.708.866.429,0 0	95	2.182.909.288,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					10.346.361.598, 00		10.217.934.393, 00		10.339.561.598, 00		10.521.363.344, 00		10.656.989.231, 00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					7.535.958.098,0 0		7.579.094.393,0 0		7.623.561.598,0 0		7.669.363.344,0 0		7.747.989.231,0 0	
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun (%)	100	100	100	7.535.958.098,0 0	100	7.579.094.393,0 0	100	7.623.561.598,0 0	100	7.669.363.344,0 0	100	7.747.989.231,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten / Kota														
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.810.403.500,00		2.638.840.000,00		2.716.000.000,00		2.852.000.000,00		2.909.000.000,00	
meningkatkan kualitas Penataan ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan (%)	-	-	100	1.607.072.500,00	100	1.385.000.000,00	100	1.395.000.000,00	100	1.395.000.000,00	100	1.395.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
meningkatkan akurasi data kepegawaian	Persentase ASN dengan data kepegawaian yang akurat (%)	90	90	91	134.650.000,00	92	135.000.000,00	93	145.000.000,00	94	145.000.000,00	95	145.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase pegawai yang penilaian SKP tepat waktu (%)	-	-	99,87	494.775.000,00	99,88	504.000.000,00	99,90	541.000.000,00	99,92	547.000.000,00	99,95	549.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai jabatan (%)	-	-	84,20	573.906.000,00	84,40	614.840.000,00	84,60	635.000.000,00	84,90	765.000.000,00	85,20	820.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					3.057.377.000,00		3.518.991.553,00		3.746.347.618,00		3.930.088.956,00		4.544.546.309,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					3.057.377.000,00		3.518.991.553,00		3.746.347.618,00		3.930.088.956,00		4.544.546.309,00	
Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memenuhi pengembangan kompetensi 20 Jam Pelajaran (%)	-	75	75,5	3.057.377.000,00	76	3.518.991.553,00	76,5	3.746.347.618,00	77	3.930.088.956,00	77,5	4.544.546.309,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase jabatan fungsional yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	41,84	41,84	41,84		43,20		44,54		45,78		47		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase pejabat struktural yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial (%)	54,48	54,48	54,48		58,25		58,67		59,97		61,22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.435.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.100.000.000,00		2.250.000.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					2.435.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.600.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)			50	2.435.000.000,00	55	1.500.000.000,00	60	1.500.000.000,00	65	1.500.000.000,00	70	1.600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase Penelitian yang sesuai dengan Kebutuhan /Isu strategis (%)	90	91	92		94		96		98		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. (%)			50		55		60		65		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00	
meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	0	0	0	0,00	77	500.000.000,00	78	500.000.000,00	79	600.000.000,00	80	650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembang an
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					20.299.870.209, 00		20.738.938.889, 00		21.196.366.669, 00		21.672.963.675, 00		22.600.730.507, 00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					15.112.830.209, 00		15.292.546.889, 00		15.477.655.069, 00		15.668.316.495, 00		15.995.618.609, 00	
Meningkatnya pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Setahun (%)	100	100	89,6	15.112.830.209, 00	89,7	15.292.546.889, 00	89,8	15.477.655.069, 00	89,9	15.668.316.495, 00	90	15.995.618.609, 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN					2.810.660.000,0 0		3.421.392.000,0 0		3.592.461.600,0 0		3.772.084.680,0 0		4.098.920.398,0 0	
Meningkatnya efektifitas pengawasan keuangan	Persentase temuan pengawasan keuangan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	1.361.164.000,0 0	100	1.926.392.000,0 0	100	2.022.711.600,0 0	100	2.123.847.180,0 0	100	2.329.345.898,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya efektifitas evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Persentase Rekomendasi hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	964.664.000,00	100	800.000.000,00	100	840.000.000,00	100	882.000.000,00	100	951.025.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya efektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	484.832.000,00	100	695.000.000,00	100	729.750.000,00	100	766.237.500,00	100	818.549.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					2.376.380.000,00		2.025.000.000,00		2.126.250.000,00		2.232.562.500,00		2.506.191.500,00	
Meningkatnya efektifitas revidan evaluasi pengelolaan risiko	Persentase Rekomendasi hasil revidan evaluasi pengelolaan risiko yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	472.950.000,00	100	725.000.000,00	100	761.250.000,00	100	799.312.500,00	100	893.279.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya efektivitas pemantauan program anti korupsi	Nilai/Indeks MCSP (Nilai)	100	100	100	289.430.000,00	100	450.000.000,00	100	472.500.000,00	100	496.125.000,00	100	547.931.250,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Komitmen Perangkat Daerah dalam pembangunan Zona Integritas	Persentase Perangkat Daerah yang berhasil diusulkan ke penilaian ZI nasional (%)	-	-	-	0,00	100	450.000.000,00	100	472.500.000,00	100	496.125.000,00	100	547.931.250,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya kualitas layanan pendampingan pengawasan dan QA	Persentase layanan konsultasi pengawasan yang sesuai standar (%)	100	100	100	1.614.000.000,00	100	400.000.000,00	100	420.000.000,00	100	441.000.000,00	100	517.050.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					71.687.355.524,00		71.861.076.870,00		72.801.213.298,00		77.044.374.635,00		74.081.168.918,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					64.338.148.429,00		63.697.315.870,00		64.359.276.048,00		64.522.935.124,00		64.813.862.530,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas pelayanan perkantoran pada Kecamatan Paron	Persentase pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	3.598.780.337,0 ₀	100	3.614.101.108,0 ₀	100	3.611.957.713,0 ₀	100	3.620.050.015,0 ₀	100	3.633.941.802,0 ₀	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan Bringin	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	2.459.322.023,0 ₀	100	2.515.172.409,0 ₀	100	2.521.925.486,0 ₀	100	2.528.881.156,0 ₀	100	2.540.821.723,0 ₀	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan Geneng	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	3.310.540.935,0 ₀	100	3.303.204.715,0 ₀	100	3.311.475.903,0 ₀	100	3.319.995.227,0 ₀	100	3.334.620.067,0 ₀	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan Gerih	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	2.850.286.945,0 ₀	100	2.870.808.393,0 ₀	100	2.877.693.116,0 ₀	100	2.884.784.383,0 ₀	100	2.896.957.722,0 ₀	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan Jogorogo	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun (%)	100	100	100	3.566.018.584,0 ₀	100	3.464.088.829,0 ₀	100	3.471.371.182,0 ₀	100	3.478.872.005,0 ₀	100	3.491.748.419,0 ₀	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan Karanganyar	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	2.848.757.603,0 0	100	2.822.210.151,0 0	100	2.829.349.080,0 0	100	2.836.702.177,0 0	100	2.849.324.993,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan Karangjati	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun (%)	100	100	100	3.827.846.927,0 0	100	3.850.601.187,0 0	100	3.858.588.332,0 0	100	3.866.815.092,0 0	100	3.880.937.697,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan Kasreman	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Setahun (%)	100	100	100	2.866.600.825,0 0	100	2.852.164.034,0 0	100	2.859.615.991,0 0	100	2.867.291.506,0 0	100	2.880.467.808,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan Kedunggalar	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	2.970.796.578,0 0	100	2.963.605.180,0 0	100	2.970.617.783,0 0	100	2.977.840.763,0 0	100	2.990.240.214,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan Kendal	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	2.514.939.977,0 0	100	2.666.170.772,0 0	100	2.684.289.494,0 0	100	2.695.182.777,0 0	100	2.740.265.122,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan Kwadungan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	3.536.806.930,0 0	100	3.416.047.282,0 0	100	3.423.692.821,0 0	100	3.431.567.725,0 0	100	3.445.086.312,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan Mantingan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	2.734.006.849,0 0	100	2.748.811.014,0 0	100	2.757.036.534,0 0	100	2.765.508.818,0 0	100	2.780.052.907,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan Ngawi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	7.446.800.594,0 0	100	6.860.906.825,0 0	100	7.372.859.790,0 0	100	7.385.167.536,0 0	100	7.406.295.834,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan Ngrambe	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun (%)	100	100	100	3.540.806.796,0 0	100	3.578.002.071,0 0	100	3.601.161.205,0 0	1.001	3.619.328.013,0 0	100	3.634.111.478,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan Padas	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	3.236.602.090,0 0	100	3.209.538.850,0 0	100	3.216.683.609,0 0	100	3.224.042.712,0 0	100	3.236.675.839,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan Pangkur	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	3.319.737.308,0 0	100	3.326.371.343,0 0	100	3.333.200.536,0 0	100	3.340.234.606,0 0	100	3.352.309.758,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan pitu	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun (%)	100	100	100	2.431.157.710,0 0	100	2.491.850.007,0 0	100	2.498.602.993,0 0	100	2.505.558.569,0 0	100	2.517.498.975,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan Sine	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	3.493.449.229,0 0	100	3.356.245.528,0 0	100	3.363.986.544,0 0	100	3.371.959.792,0 0	100	3.385.647.198,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan widodaren	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	3.784.890.189,0 0	100	3.787.416.172,0 0	100	3.795.167.936,0 0	100	3.803.152.252,0 0	100	3.816.858.662,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.204.433.000,0 0		1.457.518.000,0 0		1.540.021.500,0 0		4.703.797.562,0 0		1.778.524.724,0 0	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan ke Kecamatan pada Kecamatan Bringin	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	100	100	100	71.673.000,00	100	80.000.000,00	100	85.050.000,00	100	285.677.500,00	100	95.145.250,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan ke Kecamatan pada Kecamatan Geneng	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	99,72	99,72	99,72	108.543.000,00	99,72	115.500.000,00	99,72	119.000.000,00	99,72	321.000.000,00	99,72	126.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan ke Kecamatan pada Kecamatan Gerih	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	98,33	98,40	98,50	52.670.000,00	98,60	54.000.000,00	98,70	56.000.000,00	98,80	258.000.000,00	99	62.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan ke Kecamatan pada Kecamatan Jogorogo	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	99,55	99,56	99,57	56.000.000,00	99,59	91.950.000,00	99,61	95.547.500,00	99,63	299.824.875,00	99,65	110.807.362,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan ke Kecamatan pada Kecamatan Karanganyar	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	77	77,5	99,57	44.000.000,00	99,59	50.000.000,00	99,61	55.000.000,00	99,63	260.000.000,00	99,66	85.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	97,75	97,75	97,75	48.510.000,00	97,80	52.510.000,00	97,83	61.510.000,00	97,88	261.510.000,00	98	102.650.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dilimpahkan ke Kecamatan pada Kecamatan Karangjati														
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan ke Kecamatan pada Kecamatan Kedunggalar	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	100	100	100	66.710.500,00	100	62.710.500,00	100	66.837.500,00	100	240.000.000,00	100	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan ke Kecamatan pada Kecamatan Kendal	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	100	100	100	37.291.000,00	100	48.000.000,00	100	48.000.000,00	100	110.000.000,00	100	48.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan ke Kecamatan pada Kecamatan Kwadungan	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	87,50	100	100	54.800.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	220.000.000,00	100	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan ke Kecamatan pada Kecamatan Mantingan	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	77	77,5	98,5	32.132.000,00	99	36.183.500,00	99,5	42.265.000,00	100	225.465.000,00	100	35.465.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan ke Kecamatan pada Kecamatan Ngrambe	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	78	98,15	98,50	119.000.000,00	99,00	119.000.000,00	99,15	119.000.000,00	99,56	319.000.000,00	99,59	119.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan ke Kecamatan pada Kecamatan Padas	Jumlah aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik (Angka)	87,5	87,5	89	61.000.000,00	89	96.000.000,00	90	100.000.000,00	92	104.000.000,00	94	76.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan ke Kecamatan pada Kecamatan Pangkur	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	99,54	99,65	99,69	65.660.000,00	99,72	85.000.000,00	99,75	85.000.000,00	99,90	269.103.812,00	100	92.314.194,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan ke Kecamatan pada Kecamatan Paron	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	75	87,5	100	85.000.000,00	100	97.900.000,00	100	110.000.000,00	100	280.000.000,00	100	120.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan ke Kecamatan pada Kecamatan Pitu	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	80	90	100	95.264.000,00	100	95.264.000,00	100	97.264.000,00	100	298.391.500,00	100	106.859.250,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan ke Kecamatan pada Kecamatan Sine	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	100	100	100	45.905.000,00	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	250.000.000,00	100	105.300.531,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan ke Kecamatan pada Kecamatan Sine	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	100	100	100	74.000.000,00	100	101.950.000,00	100	110.547.500,00	100	299.824.875,00	100	115.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kecamatan Widodaren														
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan ke Kecamatan pada Kec. Kasreman	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	80,35	100	100	36.862.000,00	100	56.550.000,00	100	59.000.000,00	100	262.000.000,00	100	68.483.137,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan ke Kecamatan pada kec.ngawi	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	87,5	87,5	87,5	49.412.500,00	89	85.000.000,00	90	95.000.000,00	92	140.000.000,00	94	140.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.404.606.095,0 0		3.536.520.500,0 0		3.583.098.000,0 0		4.027.695.762,0 0		3.745.164.291,0 0	
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Bringin	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (%)	100	100	100	23.595.000,00	100	25.000.000,00	100	27.500.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan Kelurahan pada kecamatan Geneng	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (%)	100	100	100	31.975.000,00	100	36.000.000,00	100	37.000.000,00	100	39.000.000,00	100	42.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan Kelurahan pada	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat	100	100	100	11.975.000,00	100	16.000.000,00	100	17.000.000,00	100	18.000.000,00	100	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kecamatan Gerih	desa/kelurahan (%)													
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Jogorogo	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (%)	100	100	100	12.000.000,00	100	40.000.000,00	100	42.000.000,00	100	44.000.000,00	100	46.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Karanganyar	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (%)	83,33	83,33	91,66	75.000.000,00	100	54.575.000,00	100	50.000.000,00	100	47.956.437,00	100	41.652.081,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Karangjati	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (%)	88,24	94,12	100	15.350.000,00	100	17.350.000,00	100	20.350.000,00	100	20.350.000,00	100	20.350.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Kasreman	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (%)	100	100	100	11.458.000,00	100	14.000.000,00	100	15.000.000,00	100	16.530.125,00	100	18.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Kedunggalar	Persentase Masyarakat Desa yang diberikan pelatihan dan pengembangan ketrampilan (%)	100	83,33	91,67	21.302.500,00	100	20.302.500,00	100	22.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat	Persentase Masyarakat Desa yang diberikan pelatihan dan	94,28	94,28	94,75	87.682.595,00	95,20	10.000.000,00	95,75	10.000.000,00	96,20	90.000.000,00	96,75	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Desa dan Kelurahan pada kecamatan Kendal	pengembangan ketrampilan (%)													Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Kwadungan	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (%)	92,85	92,85	100	25.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	20.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Mantingan	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (%)	7,43	86	86	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Ngawi	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (%)	100	100	100	2.849.366.000,00	100	2.901.836.000,00	100	2.935.116.000,00	100	3.129.727.200,00	100	3.015.722.848,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Ngrambe	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (%)	71,43	99,56	99,57	32.000.000,00	99,59	32.000.000,00	99,61	32.000.000,00	99,63	32.000.000,00	99,65	32.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Padas	Persentase Masyarakat Desa yang diberikan pelatihan dan pengembangan ketrampilan (%)	91,66	100	100	20.000.000,00	100	50.950.000,00	100	55.000.000,00	100	200.000.000,00	100	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan	100	100	100	25.585.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kelurahan pada kecamatan Pangkur	masyarakat desa/kelurahan (%)													
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Paron	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (%)	92,86	92,86	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Pitu	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik" (%)	80	90	100	35.132.000,00	100	35.132.000,00	100	37.132.000,00	100	40.132.000,00	100	44.132.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Sine	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (%)	100	100	100	10.185.000,00	100	68.375.000,00	100	68.000.000,00	100	80.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Widodaren	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (%)	100	100	100	32.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	44.807.362,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					2.740.168.000,00		3.169.722.500,00		3.318.817.750,00		3.789.946.187,00		3.743.617.373,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik" (%)	100	100	100	184.026.000,00	100	156.000.000,00	100	160.000.000,00	100	164.000.000,00	100	180.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kecamatan Bringin														
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Kecamatan Geneng	Persentase Pemerintahan Desa yang Tata Kelola Pemerintahan " baik " (%)	76,92	76,92	76,92	132.615.500,00	84,62	170.925.000,00	92,31	181.046.250,00	100	192.398.562,00	100	216.138.418,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Kecamatan Gerih	Persentase Pemerintahan Desa yang Tata Kelola Pemerintahan " baik " (%)	80	100	100	81.685.000,00	100	88.625.000,00	100	92.056.250,00	100	95.809.062,00	100	103.989.968,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Kecamatan Jogorogo	Persentase Pemerintahan Desa yang Tata Kelola Pemerintahan " baik " (%)	83,33	83,33	91,66	92.000.000,00	100	170.000.000,00	100	178.000.000,00	100	186.000.000,00	100	203.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Kecamatan Karanganyar	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik" (%)	83,33	83,33	83,33	119.000.000,00	83,33	95.000.000,00	91,66	103.053.750,00	91,66	109.000.000,00	100	109.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Kecamatan Karangjati	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik" (%)	88,24	88,24	88,24	317.640.000,00	88,28	334.465.000,00	94,12	341.181.250,00	94,12	360.833.313,00	100	360.962.644,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Kecamatan Kasreman	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik" (%)	83,33	100	100	121.008.000,00	100	149.500.000,00	100	155.552.500,00	100	161.000.000,00	100	173.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Pemerintahan Desa yang Tata Kelola	100	100	100	166.987.000,00	100	203.937.000,00	100	226.710.000,00	100	249.824.875,00	100	229.807.363,00	Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Desa pada Kecamatan Kedunggalar	Pemerintahan " baik " (%)													Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Kecamatan Kendal	Persentase Pemerintahan Desa yang Tata Kelola Pemerintahan " baik " (%)	100	100	100	127.880.000,00	100	81.000.000,00	100	81.000.000,00	100	147.000.000,00	100	81.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Kecamatan Kwadungan	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik" (%)	92	100	100	100.017.500,00	100	202.900.000,00	100	218.545.000,00	100	334.972.250,00	100	269.469.475,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Kecamatan Mantingan	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik" (%)	85,71	85,71	100	96.142.500,00	100	113.391.500,00	100	115.788.750,00	100	141.491.438,00	100	150.187.081,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Kecamatan Ngawi	Persentase Pemerintahan Desa yang Tata Kelola Pemerintahan " baik " (%)	85,71	85,71	100	179.787.500,00	100	258.850.000,00	100	266.542.500,00	100	280.119.625,00	100	269.131.587,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Kecamatan Ngrambe	Persentase Pemerintahan Desa yang Tata Kelola Pemerintahan " baik " (%)	85,71	99,56	99,57	124.000.000,00	99,59	129.000.000,00	99,61	129.000.000,00	99,63	135.000.000,00	99,65	168.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Kecamatan Padas	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik" (%)	85,71	100	100	154.000.000,00	100	155.000.000,00	100	160.547.500,00	100	225.824.875,00	100	203.807.362,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola	75	80	89	119.255.000,00	91,66	125.525.000,00	95,50	136.051.250,00	100	158.000.000,00	100	158.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Desa pada Kecamatan Pangkur	Pemerintahan "baik" (%)													Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Kecamatan Paron	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik (%)	85,71	92,86	100	185.693.000,00	100	200.000.000,00	100	213.545.000,00	100	244.972.250,00	100	239.469.475,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Kecamatan Pitu	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik" (%)	80	90	100	153.740.000,00	100	130.604.000,00	100	138.154.000,00	100	146.154.000,00	100	159.154.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Kecamatan Sine	Persentase Pemerintahan Desa yang Tata Kelola Pemerintahan " baik " (%)	100	100	100	126.691.000,00	100	245.000.000,00	100	257.043.750,00	100	267.545.937,00	100	269.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Kecamatan Widodaren	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%)	100	100	100	158.000.000,00	100	160.000.000,00	100	165.000.000,00	100	190.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					11.145.845.006,00		10.893.828.424,00		10.979.033.062,00		11.067.886.189,00		11.242.400.928,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.364.932.006,00		4.394.628.774,00		4.425.215.930,00		4.456.720.700,00		4.510.803.890,00	
Meningkatnya pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun (%)	100	100	100	4.364.932.006,00	100	4.394.628.774,00	100	4.425.215.930,00	100	4.456.720.700,00	100	4.510.803.890,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
daerah Kabupaten/Kota														Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.350.000.000,0 0		1.317.500.000,0 0		1.335.875.500,0 0		1.355.052.750,0 0		1.390.502.250,0 0	
Meningkatnya Perluasan Pengetahuan Wawasan Kebangsaan Masyarakat	Persentase Wilayah yang diintervensi pemahamn Ideologi Pancasila dan Kebangsaan (%)	70	75	80	1.350.000.000,0 0	85	1.317.500.000,0 0	85	1.335.875.500,0 0	90	1.355.052.750,0 0	90	1.390.502.250,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					4.069.933.000,0 0		3.750.410.650,0 0		3.758.316.632,0 0		3.768.025.239,0 0		3.787.631.788,0 0	
Meningkatnya Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partai Politik yang Aktif dalam Pendidikan Politik Masyarakat (%)	100	100	100	4.069.933.000,0 0	100	3.750.410.650,0 0	100	3.758.316.632,0 0	100	3.768.025.239,0 0	100	3.787.631.788,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKA TAN					260.000.000,00		270.000.000,00		280.000.000,00		286.750.000,00		310.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Peran Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Wawasan Kebangsaan dan Politik	Persentase Ormas aktif yang mendorong wawasan kebangsaan (%)	85	85	85	260.000.000,00	85	270.000.000,00	90	280.000.000,00	90	286.750.000,00	95	310.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					540.130.000,00		577.626.500,00		582.962.500,00		590.400.000,00		605.400.000,00	
Meningkatnya Harmoni Kehidupan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Persentase Peningkatan Harmoni Kehidupan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (Aduan)	100	100	100	540.130.000,00	100	577.626.500,00	100	582.962.500,00	100	590.400.000,00	100	605.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					560.850.000,00		583.662.500,00		596.662.500,00		610.937.500,00		638.063.000,00	
Meningkatnya Deteksi Dini dan Penanganan Potensi Konflik	Persentase Potensi Konflik yang teridentifikasi dan yang tertangani/ ditindaklanjuti (%)	100	100	100	560.850.000,00	100	583.662.500,00	100	596.662.500,00	100	610.937.500,00	100	638.063.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					2.407.250.767.762,00		2.787.397.283.010,00		2.997.368.764.733,00		3.248.805.029.329,00		3.634.552.789.975,00	

4.2 Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah

Berdasarkan Program Prioritas pada Bab III, ditetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Ngawi diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Ngawi. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,67	75,02	75,55	76,12	76,97	78,45	
2	Tingkat kemiskinan	%	13,08	12,66	12,10	11,69	10,99	9,60	
3	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,168	0,159	0,154	0,150	0,145	0,140	
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00	5,22	5,44	5,66	5,88	6,02	
5	Rasio Gini	Angka	0,280	0,270	0,260	0,250	0,240	0,220	
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,23	2,12	2,00	1,92	1,87	1,70	
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	89,30	89,38	89,55	89,78	89,97	90,55	
8	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Angka	0,87	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72,08	72,15	72,23	72,31	72,39	73,19	
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	84,91	77,14	69,38	61,66	53,85	46,09	
11	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 eq	67645,36	79965,59	92285,83	104606,06	116926,29	129246,53	
12	Indeks Kesalehan Sosial	Angka	84,49	86,78	88,23	90,31	92,01	94,19	

Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Ngawi

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,43	0,378	0,333	0,293	0,258	0,227	0,200	BPS dan DP3AKB
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,40	2,23	2,12	2,00	1,92	1,87	1,70	BPS dan DPPTK
3	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	87,53	87,65	87,80	87,95	88,10	88,20	88,30	DKPP
4	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	9,4	9,10	8,80	8,50	8,20	7,90	7,60	DKPP
5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	76,34	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	Bappeda (Litbang)
6	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Angka	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97	Bappeda (Litbang)
7	Indeks Konektivitas Transportasi	%	NA	0,52	0,53	0,53	0,54	0,55	0,55	DISHUB
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63,85	72,08	72,15	72,23	72,31	72,39	73,19	DLH
9	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 eq	61505,98	67645,36	79965,59	92285,83	104606,06	116926,29	129246,53	DLH DAN BAPPEDA (BIDANG PRASWIL)
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	26,67	29,95	32,85	35,70	38,55	41,40	44,25	DLH
11	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	37,26	39,70	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00	DLH

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	NA	71,00	71,52	73,29	75,08	76,73	78,53	DPRKP
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,76	8,94	9,68	10,43	11,17	11,91	12,66	DPRKP
14	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	28,70	28,56	28,42	28,28	28,14	28,00	27,86	DPRKP
15	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Layanan Air Siap Minum Perpipaan	%	NA	88,75	89,32	89,87	90,44	90,95	91,56	DPRKP
16	Indeks Resiko Bencana	Angka	90,99	84,91	77,14	69,38	61,66	53,85	46,09	BPBD
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
17	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,91	74,67	75,02	75,55	76,12	76,97	78,45	BPS
18	Tingkat Kemiskinan	%	13,81	13,08	12,66	12,10	11,69	10,99	9,60	BPS DAN BAPPEDA (BIDANG PPM)
19	Indeks Pendidikan	Angka	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	DINDIKBUD
20	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : - Literasi Membaca	%	85,40	86,00	86,60	87,20	87,80	88,40	89,00	DINDIKBUD
21	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : - Numerasi	%	78,18	81,10	77,00	77,50	78,00	78,50	79,00	DINDIKBUD

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan tinggi	%	7,64	8,95	9,04	9,17	9,31	9,65	10,82	DINDIKBUD
23	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,84	8,10	8,21	8,33	8,51	8,61	8,67	DINDIKBUD
24	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,89	12,90	12,92	12,99	13,08	13,14	13,18	DINDIKBUD
25	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	NA	45,11	47,19	49,22	51,00	52,50	54,01	DINDIKBUD
26	Indeks Kesehatan	Indeks	0,850	0,851	0,852	0,853	0,854	0,855	0,856	DINKES
27	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,39	75,34	75,60	75,86	76,11	76,37	76,63	DINKES
28	Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	per 100,000 kelahiran hidup	37,25	36,16	35,16	34,16	33,16	32,16	31,16	DINKES
29	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,40	11,30	11,20	11,10	11,00	10,90	10,80	DINKES
30	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	59	90	90	90	90	90	90	DINKES
31	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	88	90	90	90	90	90	90	DINKES

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	97,1	98,00	98,13	98,26	98,40	98,53	98,66	DINKES
33	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	%	NA	36,00	36,80	37,60	38,40	39,20	40,00	DPPTK
34	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	22,41	31,48	32,99	35,48	36,99	39,48	41,27	DPPTK
35	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	1,55	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	DPPTK dan DINSOS
36	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	NA	61,08	62,23	63,37	64,89	65,97	67,02	DINSOS
37	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,176	0,168	0,159	0,154	0,150	0,145	0,140	BPS dan DP3AKB
38	Indeks Pembangunan Gender	%	93,13	93,15	93,25	93,35	93,45	93,55	93,65	BPS dan DP3AKB
39	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	NA	67,25	67,45	67,65	67,85	68,05	68,25	DP3AKB
40	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	71,60	71,70	71,80	71,90	72,00	72,10	72,20	DP3AKB
41	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	NA	54,60	56,20	58,00	60,00	62,20	64,60	DISPARPORA
42	Indeks Kesalehan Sosial	Angka	81,73	84,49	86,78	88,23	90,31	92,01	94,19	BAPPEDA (LITBANG)
43	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	NA	78,12	79,34	81,02	82,89	84,17	85,60	BAKESBANGPOL
44	Indeks Zakat Nasional	Angka	NA	0,42	0,46	0,5	0,54	0,58	0,62	SETDA (BAGIAN KESRA)

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
45	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	5,00	5,22	5,44	5,66	5,88	6,02	BPS
46	Rasio Gini	%	0,289	0,280	0,270	0,260	0,250	0,240	0,220	BPS
47	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	29,35	30,50	31,50	32,00	32,50	33,00	33,50	BPS
48	Tingkat Inflasi	%	1,31	2,20	2,19	2,15	2,11	2,07	2,03	BPS
49	ICOR	%	4,72	4,70	4,68	4,66	4,64	4,62	4,60	BPS
50	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Kabupaten	Angka	NA	12,00	12,70	13,30	14,00	14,58	15,11	BPS
51	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	22,04	22,12	22,20	22,28	22,36	22,44	22,54	BPS
52	Kontribusi PDRB Kabupaten Ngawi Terhadap Provinsi	%	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	BPS DAN BAPPEDA (Bidang Perekonomian)
53	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum,	%	2,94	2,99	3,06	3,12	3,18	3,25	3,32	BPS DAN DISPARPORA
54	Jumlah Tamu Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara)(Hotel Berbintang)	Angka	753.550	805.000	850.000	900.000	950.000	996.000	1.040.000	DISPARPORA
55	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Kehutanan Perikanan	Angka	32,04	32,2	32,43	32,72	33,05	33,39	33,74	BPS DAN DKPP
56	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Kehutanan Perikanan	%	1,02	0,50	0,70	0,90	1,01	1,03	1,05	BPS DAN DKPP
57	Realisasi Investasi	Rupiah	2.046.000.000	2.100.000.000.000	2.200.000.000.000	2.300.000.000.000	2.400.000.000.000	2.500.000.000.000	2.600.000.000.000	DPM PTSP

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Persentase UMKM yang naik Kelas/Status	%	88,13	88,50	90,35	91,56	92,12	93,14	93,50	DINKOP UKM
59	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	NA	10,01	11,24	13,33	14,98	16,50	18,50	DINKOP UKM
60	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	%	99,90	99,85	99,76	99,67	99,57	99,47	99,35	DINKOP UKM
61	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	16,2	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9	17,0	DINKOP UKM
62	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	DINKOP UKM
63	Return on Aset (ROA) BUMD	%	0,98	1,42	1,54	1,63	1,80	1,87	1,98	SETDA (Bagian Perekonomian)
64	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,12	10,15	10,18	10,21	10,24	10,27	10,30	BPS DAN DPPTK
65	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	65,64	66,18	66,72	67,26	67,8	68,34	68,88	DPPTK
66	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	0,0053	0,0064	0,0077	0,0093	0,0113	0,0137	0,0165	DPPTK
67	Indeks Desa	%	NA	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	89,00	DPMDES
68	Persentase Desa Mandiri	%	24,41	32,86	37,56	39,91	42,26	44,60	47,17	DPMDES
69	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,333	0,576	0,581	0,665	0,806	0,982	1,200	BADAN KEUANGAN
70	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	13,11	13,70	14,00	14,30	14,70	15,00	15,20	BADAN KEUANGAN

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Rasio kapasitas fiskal daerah	%	0,985	1,000	1,050	1,080	1,120	1,150	1,180	BADAN KEUANGAN
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
72	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	89,20	89,30	89,38	89,55	89,78	89,97	90,55	SETDA (Bagian Organisasi)
73	Nilai SAKIP	%	83,06	83,26	83,51	83,81	84,16	84,56	85,00	SETDA (Bagian Organisasi)
74	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,31	3,50	3,70	3,90	4,10	4,30	4,50	SETDA (Bagian Organisasi)
75	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pemkab. Ngawi	Angka	96,47	97,09	97,65	98,15	98,60	99,01	99,38	SETDA (Bagian Organisasi)
76	Indeks Reformasi Hukum	Angka	98,06	98,08	98,10	98,12	98,14	98,16	98,18	SETDA (Bagian Hukum)
77	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	4,26	4,30	4,33	4,35	4,38	4,40	4,41	SETDA (Bagian Perekonomian)
78	Indeks Pemerintahan Digital	Angka	NA	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	DISKOMINFO
79	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	NA	5,30	5,39	5,48	5,57	5,66	5,75	DISKOMINFO
80	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,61	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	DISKOMINFO
81	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	73,406 (2023)	73,493	73,787	74,082	74,378	74,676	74,975	BADAN KEUANGAN
82	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	%	74,05	74,10	74,15	74,20	74,25	74,30	74,35	INSPEKTORAT
83	Indeks Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Angka	68,14	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	SATPOL PP

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Indikator Kinerja Kunci										
Urusan Pendidikan										
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	94,65	94,75	94,85	94,95	95,00	95,15	95,25	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan / jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan x 100%
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,51	99,52	99,53	99,54	99,55	99,56	99,57	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan / jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan x 100%
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	22,45	27,64	28,5	28,75	29,00	29,25	29,50	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan / Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah x 100%
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	86,01	86,15	86,30	86,45	86,50	86,75	87,05	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	78,00	80,48	80,65	81,00	82,05	82,75	83,85	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	78,79	80,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	76,28	77,75	78,50	79,00	80,25	80,50	81,25	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	78,40	79,25	79,50	79,95	80,50	81,00	81,75	Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/DIV	%	77,56	78,75	79,00	79,50	80,00	80,75	81,50	Persentase jumlah guru PAUD formal berijazah S1/D4 di kota/kabupaten
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	73,71	74,50	75,00	76,50	77,75	77,95	78,00	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	68,37	68,45	68,55	68,65	68,75	68,85	69,00	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	74,82	75,12	75,25	75,40	75,65	75,80	75,96	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	72,81	73,15	73,30	73,45	73,65	73,75	73,85	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	57,40	57,75	58,15	58,45	59,00	59,50	60,00	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	56,17	56,45	56,75	57,00	57,50	57,95	58,00	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar
Urusan Kesehatan										
1	Jumlah Kematian Ibu	Angka	37,25	164	150	145	130	115	110	Jumlah Kematian Ibu / Jumlah Kelahiran Hidup x 100.000
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	11,40	11,30	11,20	11,10	11,00	10,90	10,80	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar Deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu / Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama x 100%
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator) / Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 / Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran / Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama x 100%

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun x 100%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97,38	100	100	100	100	100	100	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator) / Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator) x 100%
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah perkiraan orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota		86	87	88	89	90	91	92	Luas Kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Kewenangan Kab/Kota (ha) / Luas kawasan rawan banjir Kewenangan Kab/Kota (ha) x 100%
2	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	83,24	83,34	83,86	84,51	85,17	85,86	86,53	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dioperasikan dan dipelihara (Ha) / Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)
3	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	75,46	75,70	76,05	76,68	77,43	78,16	78,82	Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik (Ha) / Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) x 100%
4	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	88,50	88,20	88,50	89,30	90,30	91,50	92,80	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N / Jumlah total penduduk kabupaten/kota x 100%

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	87,2511874	87,28	87,33	87,38	87,43	87,48	87,53	Jumlah penduduk yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar + jumlah rumah tangga yang tersambung pada jaringan perpipaan PALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/ permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional pada tahun N + Jumlah penduduk yang tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional + jumlah rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja pada tahun N / Jumlah penduduk di kabupaten/kota x 100%
6	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Permohonan PBG & SLF yang diproses terhadap permohonan PBG & SLF yang masuk / Kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung terhadap PBG & SLF yang telah diterbitkan x 100%
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	96,1	96,63	97,16	97,83	98,23	98,63	99,04	Panjang Jalan Kondisi Baik + Panjang Jalan Kondisi Sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (km) / Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (km) x 100%
8	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi	%	98	100	100	100	100	100	100	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis yang bekerja pada tahun berjalan / Jumlah target sertifikasi yang tercantum dalam rencana kerja kab/kota x 100%

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	operator/teknisi/ analisis									
9	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	Rasio pengawasan tertib usaha + rasio pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi + rasio pengawasan tertib pemanfaatan produk / 3 x 100%
10	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari Kerja	10	10	10	10	10	10	10	Rata-rata jumlah hari layanan penerbitan KKPR yang telah dibayarkan PNBK KKPR- nya oleh pemohon
11	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terselesaikan dalam waktu 1 tahun / Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun x 100%
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun-N / Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten yang akan ditangani pada tahun-N x 100%

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha) / target luas kawasan kumuh dibawah10 Ha pada tahun N x 100%
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	6,89	7,96	20,14	29,26	45,19	76,68	100	jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun-N / jumlah RTLH pada Tahun-N x 100%
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	100	Realisasi jumlah permukiman yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N / Target jumlah permukiman yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N x 100%
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum										
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang di tangani / Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang dilaporkan x 100%
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	4	4	5	5	6	6	6	Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	60	65	70	80	90	100	100	Jumlah SOP yang tersedia / Jumlah SOP yang dibutuhkan = 10 X 100%

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	25	30	50	50	75	75	100	Jumlah sarana prasarana yang tersedia / Jumlah sarana Prasarana yang di butuhkan = 4 X 100%
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	33,70	35,70	35,70	38,00	38,00	40,00	40,00	Jumlah anggota ASN Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar / Jumlah Keseluruhan ASN Satpol PP X 100%
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	79	80	85	90	95	95	100	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap / Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota x 100%
8	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	48	50	59	69	78	88	100	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana / Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana X 100%
9	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	45	50	55	70	80	90	100	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana / Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana X 100%

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana / Jumlah warga yang menjadi korban bencana X 100%
11	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	0	100	100	100	100	100	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun pada tahun n / Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun pada tahun n X 100%
12	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah unit Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana di kabupaten/kota pada tahun n / Jumlah total rencana penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah di kabupaten/kota pada tahun n x 100%
Urusan Sosial										
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya /

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti x 100%
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti x 100%
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	jumlah gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / populasi gelandangan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti x 100%
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah sarana prasarana yang disediakan untuk pelayanan sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sesuai standar / Jumlah sarana prasarana untuk pelayanan sosial di luar panti yang disediakan x 100%
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar / Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti x 100%

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	70	80	85	85	90	95	100	jumlah sarana prasarana bagi korban bencana yang sesuai standar / jumlah sarana prasarana bagi korban bencana x 100%
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah pekerja sosial professional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar / Jumlah pekerja sosial professional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana x 100%
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	(jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya) /

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar) / populasi potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan x 100%
12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar) / Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota x 100%
13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	NA	50	50	55	55	60	60	(Jumlah penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi) /
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Kali	9	12	12	12	12	12	12	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun, Pemutakhiran dilakukan minimal setiap bulan sesuai SK pengesahan oleh pejabat berwenang daerah kabupaten/kota 1 kali setiap bulan, walaupun update di aplikasi bisa dilakukan setiap hari, Pengesahan oleh daerah menjadi dasar dalam penetapan SK DTKS yang diterbitkan setiap bulan
Urusan Tenaga Kerja										
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	76,47	76,60	76,70	76,80	76,90	77,10	77,11	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	20,43	20,50	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Orang	2.820.735.02 3,8	2.820.735.0 23,87	2.820.735.0 23,88	2.820.735.0 23,89	2.820.735.0 23,90	2.820.735.0 23,91	2.820.735.0 23,92	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) / Jumlah tenaga kerja x 100%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	35,71	35,80	35,90	36,10	36,11	36,12	36,13	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah Perusahaan x 100%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	93,5	93,6	93,65	93,7	93,75	93,8	93,85	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan / Jumlah pencaker yang terdaftar
Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak										
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,13	93,15	93,25	93,35	93,45	93,55	93,65	$IPM = \sqrt[3]{(I \text{ Kesehatan} \times I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Pengeluaran})} \times 100$ $IPG = (IPM \text{ Perempuan}) / (IPM \text{ Laki-laki}) \times 100$ $I \text{ Kesehatan} = \text{Umur Harapan Hidup Saat Lahir}$ $I \text{ Pendidikan} = \text{Pengabungan 2 Indikator (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah)}$ $I \text{ Pengeluaran} = \text{Rata-rata pengeluaran riil yang disesuaikan}$ $IPM = \text{Indeks Pembangunan Manusia}$

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										IPM Perempuan = Indeks Pembangunan Manusia Perempuan IPM Laki-laki = Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki IPG = Indeks Pembangunan Gender

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,176	0,168	0,159	0,154	0,15	0,145	0,14	IKG=1- (HARM(G_F,G_M))/G_(F,M) Keterangan : HARM (GF ,GM) : Agregasi harmonis indeks laki-laki dan perempuan G_(F,M)= $\sqrt[3]{\text{Kesehatan} \cdot \text{Pemberdayaan} \cdot \text{IPK}}$ GF, M : Indeks dimensi Rumus Indeks Kesehatan adalah : Kesehatan= $((\sqrt[3]{0,01/\text{faskes} \cdot 0,01/\text{ULP}}))/2$ Rumus Indeks pemberdayaan adalah : Pemberdayaan= $(\sqrt[3]{([\text{PR}]_{\text{F}} \cdot \text{S}_{\text{F}}) + ([\text{PR}]_{\text{M}} \cdot \text{S}_{\text{M}})})/2$ Rumus indeks pasar tenaga kerja adalah : IPK= $(([\text{TPAK}]_{\text{F}} + [\text{TPAK}]_{\text{M}}))/2$ Dimana : Kesehatan : Indeks kesehatan reproduksi Pemberdayaan : indeks pemberdayaan IPK : Indeks Pasar Kerja Indeks Perempuan dihitung dengan formula : G_F= $\sqrt[3]{((0,01/\text{faskes} \cdot 0,01/\text{ULP})^{(1/2)} \cdot ([\text{PR}]_{\text{F}} \cdot \text{S}_{\text{F}}) \cdot [\text{TPAK}]_{\text{F}})}$ formula untuk Indeks Laki-laki : G_M= $\sqrt[3]{(1 + (([\text{PR}]_{\text{M}} \cdot \text{S}_{\text{M}} \cdot [\text{SE}]_{\text{M}})^{(1/2)} \cdot [\text{TPAK}]_{\text{M}}))}$

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Keterangan : GF : Indeks Perempuan GM : Indeks Laki-laki Faskes : Proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan ULP : Proporsi wanita berusia 15-49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PRF : Persentase perempuan yang duduk di parlemen PRM : Persentase perempuan yang duduk di parlemen SEF : Persentase perempuan dengan pendidikan minimal SMA SEM : Persentase laki-laki dengan pendidikan minimal SMA TPAKF : Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja Persentase laki-laki yang duduk di parlemen TPAKM : Persentase laki - laki terhadap penduduk kerja
3	Persentase ARG Daerah	Persen	69,66	69,7	69,75	69,85	69,95	70,05	70,15	% Anggaran Responsif Gender dibandingkan Belanja Operasi (Barang Jasa dan Bansos) dan Belanja Modal OPD yang dibuktikan dengan adanya dokumen GBS / KAK RG

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif / Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus x 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) Layanan komprehensif sesuai hasil asesmen mencakup: a. Pengaduan masyarakat; b. Penjangkauan korban; c. Pengelolaan kasus; d. Penampungan sementara; e. Mediasi; dan f. Pendampingan korban,
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif / Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO x 100%
Urusan Pangan										
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	NA	3,42	4,89	5,37	5,86	6,35	6,84	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota / Target Jumlah Cadangan Pangan berdasarkan Perbadan 15/2023) x 100%

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Skor	97,9	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	1, Pengelompokkan pangan 2, Konversi bentuk, jenis dan satuan 3, Menghitung sub total kandungan energi menurut kelompok pangan 4, Menghitung total energi aktual seluruh kelompok pangan 5, Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual (dalam bentuk persen) 6, Menghitung kontribusi energi setiap kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (% AKE) 7, Menghitung skor aktual berdasarkan kontribusi aktual dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan, 8, Menghitung skor AKE 9, Menghitung Skor PPH 10, Menghitung Total Skor Pola Pangan Harapan
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	1,84	1,84	1,75	1,5	1	0,5	0	Jumlah desa dan/atau kelurahan rentan rawan pangan / Jumlah total desa dan/atau kelurahan di kota/kabupaten x 100%
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	85	86	87	88	89	90	91	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu pangan dan keamanan pangan dihitung berdasarkan capaian kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan post market (pengambilan contoh dan pengujian) dengan bobot sebesar 60% dan pre market (registrasi/sertifikasi/surveilan) sebesar 40%
Urusan Lingkungan Hidup										

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	63,85	72,08	72,15	72,23	72,31	72,39	73,19	Nilai IKLH yang dihitung berdasarkan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 Lampiran VII Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	39,1	39,5	39,8	40	40,5	41	41,5	1, Kebijakan Pengelolaan Sampah 2, SDM Pengelola Sampah 3, Sarana dan Prasarana (Pengangkutan dan Pengolahan Sampah) 4, Anggaran Pengelolaan Sampah 5, Sosialisasi dan Pemahaman Pengelolaan Sampah 6, ACCEPTABILITY & IMPLEMENTASI 7, Capaian terhadap Target dan Kapasitas 8, Efisiensi Anggaran (Rasio Incremental Capaian dan Target per kelas Anggaran) 9, Kota Bersih (Penilaian Adipura) 10, Nilai IKA (Indeks Kualitas Air) Komponen dari IKLH
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	38,7	40,00	46,67	53,33	56,25	57,89	60,00	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota / Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung x 100%
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Akta kematian yang diterbitkan / Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan x 100%

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	akta perkawinan yang diterbitkan / Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan x 100%
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	akta perceraian yang diterbitkan / Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan x 100%
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	99	99,05	99,10	99,20	99,25	99,30	99,50	akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-17 tahun / Jumlah anak usia 0 – 17 tahun x 100%
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	61	65	70	75	85	95	100	Jumlah Anak yang Memiliki KIA / Jumlah anak wajib KIA x 100%
6	Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun / 2 Dokumen x 100%
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	2,9	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	Jumlah Penduduk yang memiliki Identitas Kependudukan Digital / Total Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP x 100%
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5,16	5,63	6,10	6,57	7,04	7,51	7,98	Jumlah desa mandiri tahun n – jumlah desa mandiri tahun n-1 / Jumlah desa mandiri tahun n-1 x 100% Untuk tahun 2024 masih menggunakan IDM, sementara untuk tahun 2025 pakai indeks desa, jika mau dipisahkan menggunakan output Jumlah Bumdes
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	9,39	18,78	28,17	32,86	37,56	42,25	46,95	Jumlah Desa yang telah terfasilitasi / Jumlah Desa x 100%
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	12	16	20	40	60	80	100	Jumlah Kerjasama Desa yang telah ditetapkan dan berlaku / Jumlah Kerjasama Desa yang ditangani x 100%

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	21,40	21,42	21,65	27,00	32,35	37,69	43,04	Jumlah LKD yang terfasilitasi / jumlah LKD x 100%
5	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	18,43	23,04	27,65	32,26	36,87	41,47	46,08	Jumlah LAD dan LMHA yang terfasilitas / jumlah LAD dan LMHA x 100%
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	Total Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota / Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan x 100%
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	73,94	73,95	73,96	73,97	73,98	73,99	74,00	Banyaknya Peserta KB aktif modern / Banyaknya pasangan usia subur x 100% (PUS) PA Modern : Peserta KB Aktif modern PUS : Pasangan Usia Subur usia 15-49 tahun
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota / Target Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan x 100%

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 - 19 tahun	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Persen	62,79	62,89	63,00	63,15	63,30	63,45	63,60	Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu: (a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; dan (5) keharmonisan keluarga; (b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan kelaurga; (4) akses informasi; (c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) interaksi keluarga; (2) interaksi sosial Formula iBangga: $iBangga = \frac{1}{3} (\text{Indeks ketentraman} + \text{Indeks kemandirian} + \text{Indeks kebahagiaan}) \times 100$
Urusan Perhubungan										

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,52	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	KTD = Konektivitas Transportasi Darat WTD = Bobot Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) KTL = Konektivitas Transportasi Laut WTL = Bobot Konektivitas Transportasi Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) Jumlah WTD + WTL = 100%
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%	35,39	47,14	48,13	48,33	48,5	48,64	48,75	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terpasang / Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan x 100%
Urusan Komunikasi dan Informatika										
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah x 100%
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Perangkat Daerah tingkat kab/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah / Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah tingkat Kab/kota x 100%
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan SPLPD / Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah x 100%

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemerintah Daerah (SPLPD)									
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil										
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	0,021	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	Σ Volume usaha Koperasi tahun berjalan -
2	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	41,70	41,90	42,00	42,10	42,20	42,30	42,40	Σ usaha Mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) / Σ Jumlah UMKM x 100%
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	(Σ Wirausaha tahun berjalan - Σ Wirausaha tahun sebelumnya) / Σ Wirausaha tahun sebelumnya x 100%
Urusan Penanaman Modal										
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	17,34	2,6	4,8	4,5	4,3	4,2	4	(Jumlah nilai investasi tahun n- jumlah nilai investasi tahun n-1) di kab/kota / Jumlah nilai investasi tahun n-1 di kab/kota x 100%
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Total Realisasi Investasi Kab/Kota / Target Investasi Kab/Kota yang ditetapkan oleh BKPM Provinsi kepada Kab/Kota yang bersangkutan x 100%
Urusan Kepemudaan dan Olahraga										
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,247	0,270	0,297	0,324	0,351	0,378	0,405	Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun di kab/kota yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat / Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun di kab/kota x 100%
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota	%	0,26	0,29	1,16	1,43	1,69	1,82	2,05	Jumlah Atlet daerah di Kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi / Jumlah Atlet

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	yang masuk Pelatda Provinsi									daerah yang dibina ditingkat kab/kota (KONI, PPLD, Induk Cabor) x 100%
Urusan Statistik										
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	2,64	2,64	2,69	2,74	2,79	2,84	2,89	5 Domain: Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, Statistik Nasional, Setiap Domain terdiri dari beberapa aspek dan setiap aspek terdiri dari beberapa indikator
Urusan Persandian										
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	46,67	45,21	45,21	45,32	45,42	45,42	45,53	Nilai Indeks KAMI hasil verifikasi / Nilai Optimal Indeks KAMI (918) x 100%
Urusan Kebudayaan										
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	19,55	26,41	29,40	36,05	40,63	45,40	50,07	Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan / Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan x 100%
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	4,85	6,01	8,78	11,65	14,32	17,95	19,40	Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi penetapan WBTb / Jumlah rekomendasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi WBTb x 100%

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	%	6,95	7,98	11,04	14,05	17,00	19,90	22,74	Jumlah tenaga kebudayaan yang disertifikasi dan lulus sertifikasi / Jumlah Tenaga Kebudayaan x 100%
Urusan Perpustakaan										
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	72,25	72,26	72,30	72,35	72,40	72,45	72,50	TGM= 0,3 TFM + 0,3 TDM + 0,3 TJB + 0,05 FAI + 0,05 DAI (Keterangan: TFM= Tingkat Frekuensi Membaca TDM= Tingkat Durasi Membaca TJB = Jumlah buku dibaca FAI = Frekuensi Akses Internet DAI= Durasi Akses Internet
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	61,37	64,00	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	Keterangan: UPLM1 = Pemerataan Layanan Perpustakaan; UPLM2 = Ketercukupan Koleksi Perpustakaan; UPLM3 = Ketercukupan Tenaga Perpustakaan; UPLM4 =Tingkat Kunjungan masyarakat ke Perpustakaan; UPLM5 = Perpustakaan yang dibina sesuai standar; UPLM6 = Keterlibatan Masyarakat dalam Perpustakaan; UPLM7 = Anggota Perpustakaan; AM = Aspek Masyarakat
Urusan Kearsipan										
1	indeks hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	80,13	81,5	81,75	82	82,2	82,35	82,5	IHPKpd = 0,6 NHPe+0,4 NHPi IHPKpd = Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah, NHPe = Nilai Hasil Pengawasan dan Kearsipan Eksternal,

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										NHPi = Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal
Urusan Kelautan Perikanan										
1	Produksi Perikanan Tangkap	%	97,5	100	100	100	100	100	100	Produksi Perikanan Tangkap / Target Produksi Perikanan Tangkap x 100%
2	Produksi Perikanan Budi Daya	%	97	100	100	100	100	100	100	Produksi Perikanan Budi Daya / Target Produksi Perikanan Budi Daya x 100%
Urusan Pariwisata										
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	NA	2	4	6	8	10	12	Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Tahun N – Investasi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun N-1 / Investasi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun N-1 x 100%
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	NA	2	5	7	9	11	12	(Jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel berbintang dan Non Bintang Tahun N) - (Jumlah tamu wisatawan mancanegara di setiap hotel berbintang Tahun N-1) / (Jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel berbintang Tahun N-1) x 100%
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	2,32	2,63	2,96	3,29	3,62	3,95	4,28	Identifikasi Pelaku Ekraf yang sudah memiliki KI berdasarkan Sub-sektor Ekonomi Kreatif (Data dapat diperoleh dari Kanwil Kemenkumham) / Jumlah pelaku ekonomi kreatif x 100%
Urusan Pertanian										

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	NA	0,025	0,025	0,092	0,165	0,048	0,287	Produksi Tanaman Pangan Tahun ini - Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin / Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin x 100% (Komoditas unggulan padi dan jagung)
2	Peningkatan produksi komoditas Hortikultura	%	NA	0,97	2,24	2,34	2,43	2,53	2,63	Produksi Holtikultura Tahun ini- Produksi hortikultura Tahun Kemarin / Produksi hortikultura tahun kemarin x 100% (Komoditas unggulan cabe, bawang merah, alpukat, dan melon)
3	Peningkatan Produksi komoditas perkebunan	%	NA	6,55	6,28	6,01	5,78	5,56	5,21	Produksi Tanaman Pangan Tahun N – Produksi PerkebunanTahun N-1 / Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin-Produksi Perkebunan tahun N-1 x 100% (Komoditas unggulan tembakau dan kopi)
4	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	NA	11.080	10.955	10.437	9.842	9.339	8.875	luas terkena DPI yang ditangani tahun ini / luas terkena DPI total x 100% (Komoditas Tanaman Pangan)
5	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	1	1	1	1	1	1	1	Produksi komoditas Peternakan Tahun ini - Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin / Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	5	5	5	5	5	5	5	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini / Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis x 100%
Urusan Perdagangan										

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	25	30	35	40	45	50	55	Realisasi Jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah) / Target jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah) x 100%
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	98,03	100	100	100	100	100	100	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku / Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota x 100%
Urusan Perindustrian										
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 30%, misalnya: - Capaian 100 % --> Bobot maksimal 30% - Capaian 90 % --> Bobot (90% x 30 %) = 27% - Capaian 80 % --> Bobot (80% x 30 %) = 24% dan seterusnya

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota									Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal 30%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 30% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 30%) = 27% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 30%) = 24% dan seterusnya
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota									Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 15 %, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 15% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 15%) = 13,5% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 15%) = 12% dan seterusnya

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota									Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 5%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 5% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 5%) = 4,5% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 5%) = 4% dan seterusnya
	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota									Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 20% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 20%) = 18% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 20%) = 16% dan seterusnya
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	4,61	4,64	4,67	4,70	4,73	4,76	4,79	Nilai investasi sektor industri dan kawasan industri / total investasi seluruh sektor x 100%

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	%	74	75	76	77	78	79	80	Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan / dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan x 100%
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	%	74	75	76	77	78	79	80	Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' / seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan x 100%
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100	Laporan informasi industri dan informasi lain sektor industri secara akurat, lengkap, dan tepat waktu dengan ketentuan: - Jika laporan disampaikan dari tanggal 1 Januari sampai 31 7Maret maka berbobot 100% - Jika laporan disampaikan setelah tanggal 31 Maret maka berbobot 0%
Urusan Perencanaan										

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Presentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	NA	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	Jumlah program prioritas yang di dukung program daerah / Jumlah Program Prioritas Nasional x 100 %
Urusan Keuangan										
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	33,75	36	33	30	30	30	30	Anggaran Belanja Pegawai di Luar Tunjangan uru yang dialokasikan Melalui TKD / Anggaran Belanja dalam APBD x 100%
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	13,11	13,7	14	14,3	14,7	15	15,2	Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan Daerah x 100%
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	96,28	96,54	96,79	97,04	97,29	97,54	97,79	Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N / Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N x 100%
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	5	5	5	5	5	5	5	Nilai Aset Tetap Tahun N dikurang Nilai Aset Tetap Tahun N - 1 / Nilai Aset Tetap Tahun N-1 x 100%
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	36,02	34,7	37	40	40,5	41	41,5	Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik / Total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa x 100%
6	Persentase Penurunan SILPA	%	39,27	39	42	45	48	51	54	Nilai SILPA Tahun N dikurangi Nilai SILPA Tahun N - 1 / Nilai SILPA Tahun N - 1 x 100%
Urusan Pengawasan										

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	1, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, 2, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, 3, Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,239	3,25	3,26	3,28	3,3	3,32	3,34	Tingkatan Maturitas SPIP sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; - Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5, Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3,13	3,15	3,17	3,19	3,21	3,23	Tingkatan Kapabilitas APIP sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5 Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3,10	3,10	3,12	3,14	3,16	3,18	3,20	Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) MR, nilai capaian 1; - Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5, Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat capaian MRI,
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	96,69	97,34	97,50	97,57	98,00	98,25	98,50	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1 / Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1 x 100%
Urusan Pelayanan Publik										
1,	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	98,43	98,43	98,45	98,45	98,5	98,5	98,52	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N
Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan										
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	87,38	87,4	87,6	87,7	87,8	87,9	88	Kategori penilaian : A= 80,01 - 100, B = 60,01-80, C=40,01-60, D=20,01-40, E=0-20

NO,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET,
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Penelitian dan Pengembangan										
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	87	90	91	92	93	94	95	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah / Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan terkait dengan pembangunan daerah X 100%
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	NA	74	75	76	77	78	80	Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri, dan badan usaha di daerah / Jumlah produk inovasi yang dihasilkan x 100%
Urusan Pengadaan Barang dan Jasa										
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	25,45	25,45	25,46	25,49	25,57	25,67	25,77	Skor Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	23,08	23,08	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	Skor Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40	40	40	40	40	40	40	Skor Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ
Urusan Hukum										
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat / Tidak Tepat	NA	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	1, Tepat 2, Tidak Tepat
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	NA	100	100	100	100	100	100	Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N / Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun N x 100%

Tabel 4.4 Definisi Operasional Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Ngawi

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu	Tahun	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack	BPS (proyeksi penduduk)
2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan komplikasi obstetrik atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.	Kematian per 100.000 Kelahiran Hidup	$KI = \frac{JKI}{JKL} \times 100.000$ Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH: Jumlah kelahiran hidup	BPS (Long Form SP), Kemenkes
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks panjang badan/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U). Data panjang badan/tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi, di mana panjang	Persentase (%)	Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P \text{ Stunting} = \frac{JKI \text{ JAB (5) } P \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$	Dinkes (SSGI/SKI), Posyandu

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
		badan digunakan untuk anak berusia 0-2 tahun dan tinggi badan digunakan untuk anak usia 2-5 tahun. Panjang badan/tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z- score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi indikator PB/U atau TB/U yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Sangat pendek: Zscore < -3,0 SD Pendek: Zscore ≥ -3,0 SD s/d Zscore < -2,0 SD		Keterangan : PAB(5) P stunting : Prevalensi anak balita yang masuk kategori pendek dan sangat pendek (stunting) JAB(5)P stunting : Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek (stunting) pada waktu diukur JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu diukur	
4	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata- rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: Tidak punya ijazah = 0 tahun; SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun;		$\text{Rata - rata Lama Sekolah 15+} = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P15+= Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke- i	

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
		D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun; S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: Tidak pernah sekolah = 0 tahun; Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1			
5	Harapan Lama Sekolah	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.	Tahun	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren Et= Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada i tahun t Pt = Jumlah penduduk usia i pada tahun t	BPS, Susenaas

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
				i $i = \text{Usia (7, 8, ..., n)}$	
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	Persentase jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan di perguruan tinggi serta memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB); berbanding jumlah seluruh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada seluruh kondisi partisipasi sekolah (tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, maupun tidak bersekolah lagi). Indikator diproyeksikan dengan melihat capaian Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi dari tahun ke tahun (time series/berkala) dengan mempertimbangkan: intervensi kebijakan peningkatan akses dan partisipasi pendidikan tinggi, proyeksi jumlah penduduk, dan proyeksi jumlah mahasiswa.	Persentase (%)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi = (Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki Ijazah,STTB Perguruan Tinggi / Jumlah penduduk 15 tahun ke atas pada tahun T) x 100%	
7	Tingkat Kemiskinan (%)	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.	Persentase (%)	Rumus Perhitungan: $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ $\alpha = 0$ $z = \text{garis kemiskinan}$	BPS, Susenas

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
		Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran dibawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk.		$yi = \text{rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan } (i = 1,2,3, \dots, q), yi < z$ $q = \text{banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan}$ $n = \text{jumlah penduduk}$	
8	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.	Persentase (%)	Cakupan Jamsos Naker = Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan / Jumlah semesta penduduk bekerja $\times 100\%$ Dimana: Peserta = Pekerja Penerima Upah (PPU) + Jasa Konstruksi + Pekerja Bukan Penerima Upah; Semesta penduduk bekerja = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun dikurangi dengan jumlah ASN dan TNI/POLRI"	BPJS Ketenagakerjaan, BPS
9	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Menunjukkan kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) dari sektor industri pengolahan terhadap PDB Nasional. Semakin besar nilai PDRB adhb sektor industri pengolahan, maka nilai Rasio PDRB Industri Pengolahan akan semakin tinggi (ceteris paribus)		Rasio PDRB Industri Pengolahan = (PDRB ADHB industri pengolahan/PDRB ADHB total) $\times 100\%$	
10	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persentase perubahan atau pertumbuhan nilai tambah bruto sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dibandingkan periode sebelumnya dalam suatu periode waktu tertentu.		$\text{Pertumbuhan} = ((\text{PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun } n - \text{PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun } n-1) / \text{PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun } n-1) \times 100\%$	

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
11	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Rasio PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) adalah persentase kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman terhadap total PDRB suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.		Rasio PDRB Penyedia Akmamin = $\frac{\text{PDRB ADHB Penyedia Akmamin}}{\text{Total PDRB ADHB}} \times 100\%$	
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	Persentase (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka = $\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan	Persentase (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan = $\frac{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}}{\text{jumlah penduduk usia kerja perempuan}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
		pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.			
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PDRB di masing-masing daerah	Persentase (%)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) = $\frac{\text{PMTB}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$ Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHB = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	BPS
15	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:	Persentase (%)	Metode Perhitungan pada kondisi pertama : Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100\%$	

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
		Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ Memiliki akses air minum layak Memiliki akses sanitasi layak;		Metode Perhitungan pada kondisi kedua : Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $PHLTB \text{ proksi} = \frac{JRTHLTB \text{ proksi}}{JRT} \times 100\%$ Keterangan : PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB (proksi) = jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga Catatan : Perhitungan exercise Provinsi menggunakan data presentase rumah tangga dengan akses hunian layak yang dirilis oleh BPS	
16	Persentase Desa Mandiri (%)	Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.	Persentase (%)	$\% \text{ Desa Mandiri} = \frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa Keseluruhan}} \times 100\%$ Keterangan: Desa mandiri berdasarkan indeks desa	

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. SPBE terdiri dari 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator, meliputi: domain 1 kebijakan SPBE (Aspek kebijakan internal tata kelola SPBE); domain 2 Tata Kelola SPBE (Aspek perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE); domain 3 manajemen SPBE (Aspek penerapan manajemen SPBE, audit TIK); domain 4 Layanan SPBE (Aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, layanann publik). Mengacu pada Surat Kementerian PANRB tanggal 21 April 2025 Nomor: B/66/PD.02/2025 Perihal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE, bahwa mulai tahun 2026 dilakukan penguatan Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) dengan kerangka indikator baru		Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j. Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) dihitung berdasarkan skor tingkat kematangan disetiap indikator, selanjutnya dari skor disetiap indikator dilakukan pembobotan. Hasil dari pembobotan disetiap indikator dilakukan Pehitungan Rata-rata dari seluruh indikator untuk menghasilkan skor/nilai Indeks. Adapun Komponen Indeks Pemerintah Digital beserta bobot di setiap indikator sesuai dengan Surat Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenpanRB tanggal 21 April 2025 Nomor B/66/PD.02/2025 Perihal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE. Perhitungan Indeks Pemerintah Digital dengan Skala 5: 1 s.d < 1,8 = Predikat "Kurang" 1,8 s.d < 2,6 = Predikat "Cukup" 2,6 s.d < 3,5 = Predikat "Baik" 3,5 s.d < 4,2 = Predikat "Sangat Baik" 4,2 s.d 5 = Predikat "Sangat Memuaskan"	

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
		dimana memiliki 35 indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek. Selanjutnya sebagaimana target pembangunan nasional pada Lampiran Perpres RPJMN 2025-2029, target Indeks SPBE di tahun 2025 masih menggunakan indikator lama dan pada tahun 2029 telah tetulis target yang telah disesuaikan. 9 aspek pemerintah digital meliputi: strategi dan rencana, tata kelola dan manajemen, teknologi digital, audit teknologi digital, keamanan siber, kapabilitas dan budaya digital, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi, keterpaduan layanan digital Pemerintah, dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah.			
18	Realisasi Investasi	Realisasi investasi adalah nilai investasi yang diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).	Miliar/ Triliun Rupiah	Rilis data topdown dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).	BKPM, DPMPSTP
19	ICOR	ICOR (Incremental Capital Output Ratio) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).	Rasio	Nilai PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tahun berkenaan dibagi perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tahun berkenaan dikurangi tahun sebelumnya.	BPS

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
20	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu Dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), Dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta Dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.		Langkah-langkah metode perhitungan IKG dan formula yang digunakan adalah sebagai berikut: Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-Laki: $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_l = \sqrt[3]{1 \times (PR_l \times SE_l)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_l}$ Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik: $HARM(GP, Gl) = \frac{(Gp)^{-1} + (Gl)^{-1}}{2}$ Menghitung indeks masing-masing dimensi: $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1\right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_l}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_l \times SE_l})}{2}$ Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric: $GP,L = 3\sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$	

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
				Menghitung indeks kesetaraan gender: $\text{Indeks Kesetaraan Gender} = \frac{HARM(GP, GI)}{GP, L}$ Menghitung Indeks Ketimpangan Gender adalah: $IKG = 1 - \text{Indeks Kesetaraan Gender}$ IKG bernilai antara 1 - 0 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi atau sebaliknya.	
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	Indeks (skala 0-100)	Penghitungan IKLH dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan/atau IKAL) yang dikalikan dengan masing-masing bobot indeks sesuai dengan rumus penghitungan IKLH Nasional. Perhitungan IKLH Nasional dilakukan dengan cara menghitung masing-masing komponen indeks secara nasional (IKA, IKU, IKL, dan IKAL) yang dikalikan dengan bobot (koefisien) masing-masing provinsi dan penjumlahan proporsi masing-masing komponen indeks di semua provinsi.	KLHK, DLH Daerah
22	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dengan: Bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau	Persentase (%)	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTST = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = jumlah rumah tangga seluruhnya	Badan Pusat Statistik

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
		Tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)			
23	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu	Persentase (%)	Langkah-Langkah menghitung Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) adalah sebagai berikut: ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah dengan Rumus: $\%SO = \frac{SO}{TS} \times 100\%$ Keterangan: %SO: Tingkat Sampah Terolah (%) SO: Sampah terolah (ton/hari) TS: Timbulan Sampah (ton/hari)	

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
		sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan daur ulang adalah pengolahan sampah anorganik high value untuk dikembalikan ke siklus manufaktur, pengemasan, dan/atau distribusi produk. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Material dan energy recovery adalah pengolahan sampah organik, anorganik low- value, dan residu menjadi; (1) produk seperti; kompos, pakan, perkakas rumah, material konstruksi, dsb. dan (2) energi dan/atau bahan bakar lainnya seperti; PLTSa, pirolisis, insinerasi, gasifikasi, Refuse Derived Fuel (RDF), dll. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), PLTSa, RDF Plant atau fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah, swasta dan/atau lembaga non pemerintah berbadan hukum (koperasi, KSM, dan lainnya).			

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
24	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah didefinisikan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) dan dikumpulkan dalam 3 (tiga) atau lebih jenis yang terpisah (contoh: basah (organik), daur ulang, dan residu) dengan syarat: (1) dari pintu ke pintu; atau (2) memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m tanpa membuang sampah sembarangan. Namun, untuk menuju tingkat layanan penuh pada tahun 2045 diperlukan pentahapan sehingga untuk RPJMN periode awal terdapat penyesuaian menjadi indikator menjadi rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah (dalam hal ini tingkat layanan dasar), dan dapat didefinisikan: Rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) baik dengan metode pengumpulan tercampur maupun terpilah sesuai jenis sampah, dengan syarat: dari pintu ke pintu (door to door); atau memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m tanpa membuang sampah sembarangan.	Persentase (%)	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah = $\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan pengumpulan sampah}}{\text{Jumlah rumah tangga seluruhnya}} \times 100\%$	BPS, Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
25	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah sampai level kabupaten/kota yang mengonsumsi kalori kurang dari yang dibutuhkan berdasarkan standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase.	Persentase (%)	$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER: Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietary Energy Requirement). $f(x)$: Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata- rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu	BPS, Susenas
26	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (on premises); Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023.	Persentase (%)	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan = Jumlah rumah tangga dengan akses Perpipaan di Perkotaan / Jumlah Rumah Tangga Perkotaan x 100%	

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
27	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	Alat ukur yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menilai tingkat risiko bencana di Indonesia. Tingkat Risiko diukur melalui tiga komponen utama yaitu, bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Adapun Definisi Operasional dari tiga komponen utama tersebut: Bahaya: Potensi ancaman bencana yang dapat terjadi di suatu wilayah. Kerentanan: Kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan kerusakan akibat bencana. Kapasitas: Kemampuan individu, komunitas, dan institusi dalam mengurangi atau mengatasi dampak bencana.	Indeks (skala 0-100)	IRB Provinsi = rata-rata IRB Kab/Kota $IRB = H \times V / C$ Keterangan: H : Bahaya V : Kerentanan C : Kapasitas Catatan: IRB Provinsi menggunakan data IRB dengan basis data (H&V) 2021 yang dirilis oleh BNPB (IRBI)	BNPB, BPBD
28	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah	Persentase (%)	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO₂ Eq) dapat diakses secara langsung pada website Aksara http://pprk.bappenas.go.id/aksara	

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
		akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu.			
29	Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk adalah tingkat perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, yang umumnya dinyatakan dalam persentase per tahun. Indikator ini mencerminkan dinamika populasi yang dipengaruhi oleh tiga komponen utama demografi : kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi (perpindahan penduduk)	Persen (%)	Pertumbuhan Total=(Jumlah Kelahiran-Jumlah Kematian)+(Jumlah Migrasi Masuk-Jumlah Migrasi Keluar) Kemudian, laju pertumbuhan dihitung dengan membagi pertumbuhan total dengan rata-rata jumlah penduduk pada periode tersebut, dikalikan 100%.	BPS
30	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	Persen (%)	(Rumus : (Jumlah Pengangguran / Jumlah Angkatan Kerja) x 100% Simulasi : Misal, Pengangguran = 15.000 orang dan Angkatan Kerja = 300.000 orang. TPT = (15.000 / 300.000) x 100% = 5%.	BPS, Susenaas
31	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah atau populasi. Indeks ini mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aksesibilitas pangan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta pemanfaatan pangan yang optimal untuk memenuhi	Indeks (skala 0-100)	Perhitungan Indeks Ketahanan Pangan umumnya menggunakan metode komposit dengan menggabungkan beberapa indikator penyusun dari dimensi ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan IKP = (Bobot Ketersediaan x Nilai Indeks Ketersediaan) + (Bobot Akses x Nilai Indeks Akses) + (Bobot Pemanfaatan x Nilai Indeks Pemanfaatan)	BPS, Badan Ketahanan Pangan

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
		kebutuhan gizi dan hidup sehat. IKP dihitung berdasarkan beberapa dimensi atau pilar ketahanan pangan yang relevan, seperti ketersediaan, akses, dan pemanfaatan			
32	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran kuantitatif yang merefleksikan tingkat kepuasan masyarakat atau pengguna terhadap kualitas dan kinerja layanan infrastruktur dasar yang tersedia di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan persepsi publik terhadap berbagai aspek layanan infrastruktur, seperti keandalan, aksesibilitas, responsivitas penyedia layanan, kenyamanan, dan keamanan. Berbeda dengan indikator berbasis ketersediaan fisik, indeks ini berfokus pada pengalaman dan evaluasi subjektif dari pihak pengguna layanan	Indeks (skala 0-100)	Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur umumnya dilakukan melalui survei terhadap sampel representatif dari masyarakat atau pengguna layanan infrastruktur. Metode perhitungannya melibatkan beberapa tahapan kunci : Penentuan Ruang Lingkup Layanan Infrastruktur : Menetapkan jenis-jenis layanan infrastruktur yang akan dievaluasi kepuasannya (misalnya, jalan, jembatan, penerangan jalan umum, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, transportasi publik, telekomunikasi, listrik). Penyusunan Kuesioner Survei : Mendesain kuesioner yang mencakup pertanyaan-pertanyaan terstruktur mengenai berbagai atribut kualitas layanan (misalnya, kebersihan, ketepatan waktu, kemudahan akses, responsivitas petugas, keandalan fasilitas, keamanan) untuk setiap jenis infrastruktur yang dinilai. Skala Likert (misalnya 1-5 : Sangat Tidak Puas - Sangat Puas) sering digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan. Penentuan Sampel dan Pelaksanaan Survei : Memilih sampel responden yang representatif dari populasi pengguna layanan melalui metode sampling yang sah (misalnya simple random sampling, stratified random sampling) dan melaksanakan pengumpulan data. Pengolahan dan Skoring Data : Mengolah data hasil survei, memberikan skor pada setiap jawaban	Survei Kepuasan Masyarakat/Pengguna, BPS

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
				responden, dan mengkalkulasi rata-rata skor kepuasan untuk setiap atribut dan jenis layanan. Pembobotan (Opsional/Jika Diperlukan) : Apabila ada atribut atau jenis layanan infrastruktur yang dianggap lebih penting dari yang lain, dapat diberikan bobot yang berbeda dalam perhitungan indeks akhir. Agregasi Indeks : Menggabungkan skor rata-rata dari berbagai atribut dan jenis layanan infrastruktur untuk menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur secara keseluruhan untuk daerah tersebut.	
33	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur adalah ukuran komposit yang merefleksikan tingkat ketersediaan, kualitas, dan pemerataan fasilitas infrastruktur dasar serta pendukung ekonomi di suatu wilayah administrasi. Indikator ini mencakup berbagai jenis infrastruktur seperti transportasi, energi, sumber daya air, telekomunikasi, dan fasilitas publik, yang esensial untuk menunjang aktivitas ekonomi, sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin baik tingkat pembangunan infrastruktur di daerah tersebut	Indeks (skala 0-100)	Perhitungan Indeks Pembangunan Infrastruktur umumnya menggunakan metode komposit dengan menggabungkan beberapa sub-indikator yang mewakili berbagai dimensi infrastruktur. Setiap sub-indikator diberikan bobot tertentu yang merefleksikan tingkat kepentingannya dalam mendukung pembangunan daerah Indeks Infrastruktur = (Bobot Transportasi x Indeks Transportasi) + (Bobot Energi x Indeks Energi) + (Bobot Air x Indeks Air) + (Bobot TI x Indeks TI) + ...	BPS, Dinas PUPR
34	Indeks Konektivitas Transportasi	Indeks Konektivitas Transportasi adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keterhubungan dan kemudahan aksesibilitas antarwilayah atau antar-pusat aktivitas ekonomi dan sosial dalam suatu sistem transportasi. Indikator ini tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan	Indeks (skala 0-100)	Perhitungan Indeks Konektivitas Transportasi umumnya melibatkan analisis jaringan transportasi dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Meskipun metode dapat bervariasi, prinsip dasarnya adalah menilai seberapa baik simpul-simpul dalam jaringan terhubung. Komponen yang sering dipertimbangkan dalam perhitungannya meliputi :	BPS, Dinas Perhubungan

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
		infrastruktur transportasi (seperti jalan, jembatan, terminal, stasiun, atau pelabuhan), tetapi juga kualitas, kapasitas, dan integrasi antar-moda transportasi yang ada. Semakin tinggi nilai indeks, semakin efisien pergerakan orang, barang, dan jasa, yang berkorelasi langsung dengan potensi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di suatu daerah		Panjang dan Kepadatan Jaringan Transportasi : Total panjang jalan (berdasarkan jenis : tol, arteri, kolektor, lokal), rel kereta api, dan jalur air yang dapat dilayari per luasan wilayah. Kualitas Infrastruktur Transportasi : Persentase kondisi jalan dalam kondisi baik/sedang, kapasitas jalan, serta kondisi jembatan dan fasilitas pendukung lainnya. Ketersediaan Fasilitas Intermoda : Keberadaan dan kapasitas terminal penumpang/barang, stasiun kereta api, pelabuhan sungai/penyeberangan yang memfasilitasi perpindahan antar-moda transportasi. Aksesibilitas : Waktu tempuh rata-rata antara pusat-pusat kegiatan utama, atau jumlah pusat kegiatan yang dapat dijangkau dalam waktu tertentu. Ketersediaan Layanan Angkutan Umum : Frekuensi dan cakupan rute angkutan umum (jika relevan). Indeks Konektivitas Transportasi = $(\text{Bobot\_Jalan} \times \text{Indeks\_Jalan}) + (\text{Bobot\_Terminal} \times \text{Indeks\_Terminal}) + (\text{Bobot\_KeretaApi} \times \text{Indeks\_KeretaApi}) + \dots$	
35	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif adalah ukuran progresif dalam mengurangi jumlah emisi GRK per unit produk domestik regional bruto (PDRB) suatu wilayah, dihitung secara akumulatif dari tahun dasar hingga periode pelaporan. Intensitas emisi GRK merefleksikan efisiensi ekonomi dalam menghasilkan output dengan jejak karbon yang lebih rendah. Penurunan kumulatif ini menunjukkan total kontribusi daerah dalam mitigasi perubahan iklim selama periode waktu tertentu, dibandingkan	Ton CO2 Eq	Perhitungan Penurunan Emisi GRK Kumulatif merupakan proses yang kompleks, melibatkan inventarisasi emisi GRK dari berbagai sektor dan data ekonomi. Penurunan Kumulatif (%) = $\frac{(\text{Proyeksi Intensitas GRK Skenario BAU} - \text{Intensitas GRK Aktual})}{\text{Proyeksi Intensitas GRK Skenario BAU}} \times 100\%$	KLHK, Bappenas



No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
		dengan skenario business as usual atau tahun dasar yang ditetapkan			
	Kapasitas Air Baku (m3/detik)				
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit yang mengukur capaian rata-rata pembangunan manusia dalam 3 dimensi : Umur Panjang & Hidup Sehat, Pengetahuan, dan Standar Hidup Layak.	Indeks (0-100)	Rumus : $IPM = (IKesehatan \times IPendidikan \times IPengeluaran)^{1/3}$ Merupakan rata-rata geometrik dari 3 indeks dimensi yang telah dinormalisasi. Simulasi : Misal, $IKesehatan=80.77$, $IPendidikan=64.45$, dan $IPengeluaran=70.00$. Maka, $IPM = (80.77 \times 64.45 \times 70.00)^{(1/3)} = 71.38$.	BPS
2	Indeks Pendidikan	Indeks komposit dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk mengukur dimensi pengetahuan dalam IPM.	Indeks (0-100)	Rumus : $Indeks Pendidikan = (Indeks HLS + Indeks RLS) / 2$ $Indeks HLS = (HLS / 18) \times 100$ $Indeks RLS = (RLS / 15) \times 100$ Simulasi : Misal, $HLS = 13$ tahun dan $RLS = 8,5$ tahun. $I-HLS = (13/18) \times 100 = 72,22$ $I-RLS = (8,5/15) \times 100 = 56,67$ $Indeks Pendidikan = (72,22 + 56,67) / 2 = 64,45$.	BPS, Susenas
3	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : - Literasi Membaca	Persentase satuan pendidikan (SD/SMP/SMA sederajat) yang proporsi peserta didiknya telah mencapai kompetensi minimum literasi membaca.	Persen (%)	Rumus : $(Jml\ satuan\ pendidikan\ capai\ standar\ literasi / Total\ satuan\ pendidikan) \times 100\%$ Simulasi : Misal, dari 150 sekolah, 90 sekolah mencapai standar. $Persentase = (90 / 150) \times 100\% = 60\%$.	Kemendikbudristek (Rapor Pendidikan)

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : - Numerasi	Persentase satuan pendidikan (SD/SMP/SMA sederajat) yang proporsi peserta didiknya telah mencapai kompetensi minimum numerasi.	Persen (%)	Rumus : $(\text{Jml satuan pendidikan capai standar numerasi} / \text{Total satuan pendidikan}) \times 100\%$ Simulasi : Misal, dari 150 sekolah, 75 sekolah mencapai standar. $\text{Persentase} = (75 / 150) \times 100\% = 50\%$.	Kemendikbud ristek (Rapor Pendidikan)
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal.	Tahun	Dihitung dengan merata-ratakan lama pendidikan dari seluruh penduduk usia 25+. Simulasi Konseptual : Jika total tahun sekolah dari penduduk 25+ adalah 1.700.000 tahun dan jumlah penduduk 25+ adalah 200.000 jiwa, maka RLS = $1.700.000 / 200.000 = 8,5$ tahun.	BPS, Susenaas
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks komposit yang mengukur kemajuan kebudayaan dalam 7 dimensi, termasuk Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Literasi, dan Pendidikan.	Indeks (0-100)	Dihitung sebagai rata-rata dari 7 indeks dimensi yang telah dinormalisasi. Simulasi : Jika rata-rata dari ketujuh skor dimensi adalah 65,5, maka itulah nilai IPK.	BPS, Lembaga Survei
6	Indeks Kesehatan	Indeks komposit dari Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) untuk mengukur dimensi kesehatan dalam IPM.	Indeks (0-100)	Rumus Normalisasi : $\text{IKesehatan} = [(UHH - UHH_{\min}) / (UHH_{\max} - UHH_{\min})] \times 100$ Simulasi : Misal, UHH = 72,5 tahun. Batas min=20, maks=85. Maka, $\text{IKesehatan} = [(72,5 - 20) / (85 - 20)] \times 100 = 80,77$.	BPS
7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	Persentase estimasi kasus baru tuberkulosis (TBC) dalam setahun yang berhasil ditemukan, didiagnosis, dan memulai pengobatan sesuai standar.	Persen (%)	Rumus : $(\text{Jumlah kasus TBC baru yang diobati} / \text{Estimasi jumlah insiden kasus TBC}) \times 100\%$	Dinas Kesehatan, Kemenkes

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
				Simulasi : Misal, estimasi insiden TBC 1.200 kasus, yang diobati 1.080 kasus. $TC = (1.080 / 1.200) \times 100\% = 90\%$.	
8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persentase pasien TBC baru yang memulai pengobatan dan dinyatakan sembuh atau menyelesaikan pengobatan secara lengkap pada akhir periode pengobatan.	Persen (%)	Rumus : $(\text{Jml pasien sembuh \& pengobatan lengkap} / \text{Jml pasien terdaftar}) \times 100\%$ Simulasi : Misal, dari 1.000 pasien, 920 sembuh/lengkap. $TSR = (920 / 1.000) \times 100\% = 92\%$.	Dinas Kesehatan, Kemenkes
9	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Persentase penduduk yang telah menjadi peserta aktif program JKN-KIS (baik PBI maupun non-PBI).	Persen (%)	Rumus : $(\text{Jumlah penduduk peserta JKN aktif} / \text{Jumlah total penduduk}) \times 100\%$ Simulasi : Misal, 480.000 peserta JKN dari total 500.000 penduduk. $\text{Cakupan} = (480.000 / 500.000) \times 100\% = 96\%$.	BPJS Kesehatan, Dispendukcapil
10	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	Persentase tenaga kerja berpendidikan menengah ke atas yang bekerja pada jenis pekerjaan keahlian menengah-tinggi (manajerial, profesional, teknisi).	Persen (%)	Rumus : $(\text{Jumlah pekerja lulusan} \geq \text{SMA/SMK di KBJI 1-3} / \text{Jumlah total pekerja lulusan} \geq \text{SMA/SMK}) \times 100\%$ Simulasi : Misal, dari 150.000 pekerja lulusan menengah+, 90.000 orang bekerja di bidang keahlian menengah+. $\text{Maka, Persentase} = (90.000 / 150.000) \times 100\% = 60\%$.	BPS, Sakernas
11	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persentase penyandang disabilitas usia kerja yang bekerja pada sektor formal (sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan status tetap).	Persen (%)	Rumus : $(\text{Jumlah penyandang disabilitas bekerja formal} / \text{Jumlah total penyandang disabilitas usia kerja}) \times 100\%$ Simulasi : Misal, 500 dari 5.000 penyandang disabilitas usia kerja bekerja formal.	BPS (Sakernas), Dinsos, Disnaker

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
				Persentase = $(500 / 5.000) \times 100\% = 10\%$.	
12	Indeks Kesejahteraan Sosial				
13	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks yang mengukur hilangnya capaian pembangunan akibat ketidaksetaraan gender dalam 3 dimensi : Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan, dan Pasar Tenaga Kerja.	Indeks (0-1)	Rumus Konseptual : Menghitung persentase "kerugian" pembangunan akibat ketimpangan gender. Perhitungan matematisnya kompleks dan melibatkan rata-rata geometrik dan harmonik. Simulasi Konseptual : Jika IPM suatu daerah 75,0, namun karena ketimpangan, capaian potensialnya turun menjadi 65,0. Kerugiannya adalah $(75-65)/75 = 13,3\%$. Nilai IKG akan merefleksikan ini sebagai 0,133.	BPS, Bappenas
14	Indeks Pembangunan Gender	Indeks yang mengukur perbandingan (rasio) capaian IPM Perempuan terhadap IPM Laki-laki. Mengukur kesetaraan capaian, bukan ketimpangan.		Rumus : $IPG = (IPM \text{ Perempuan} / IPM \text{ Laki-laki}) \times 100$ IPM per gender dihitung terlebih dahulu dengan metode IPM standar. Simulasi : Misal, IPM Perempuan = 72,5 dan IPM Laki-laki = 75,0. Maka, $IPG = (72,5 / 75,0) \times 100 = 96,67$.	BPS
15	Indeks Perlindungan Anak	Indeks komposit yang mengukur pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam 5 klaster : Hak Sipil, Lingkungan Keluarga, Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Khusus.	Indeks (0-100)	Rumus : $IPA = (\sum \text{Indeks Klaster}) / 5$ Simulasi : Misal, nilai indeks 5 klaster : 80, 75, 85, 78, 70. Maka, $IPA = (80+75+85+78+70) / 5 = 77,6$.	KemenPPPA & BPS
16	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
17	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks komposit pembangunan pemuda (16-30 tahun) pada 5 domain : Pendidikan, Kesehatan, Lapangan Kerja, Partisipasi, serta Gender & Diskriminasi.	Indeks (0-100)	Rumus IPP Final : $IPP = (\text{Indeks Pendidikan} + \text{Indeks Kesehatan} + \text{Indeks Lapangan Kerja} + \text{Indeks Partisipasi} + \text{Indeks Gender}) / 5$ Simulasi : Indeks Domain Pendidikan = 72,50 Indeks Domain Kesehatan dan Kesejahteraan = 81,30 Indeks Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja = 65,75 Indeks Domain Partisipasi dan Kepemimpinan = 58,20 Indeks Domain Gender dan Diskriminasi = 92,10 Maka, perhitungan IPP akhirnya (Langkah 4) adalah : $IPP = (72,50 + 81,30 + 65,75 + 58,20 + 92,10) / 5$ $IPP = (369,85) / 5$ $IPP = 73,97$	Kemenpora, BPS
18	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks yang mengukur tingkat kepedulian, kedermawanan, dan gotong royong dalam masyarakat.	Indeks (0-100)	Dihitung berdasarkan survei persepsi dan perilaku sosial. Simulasi Konseptual : Jika rata-rata skor dari beberapa indikator (partisipasi sosial, filantropi, dll) setelah dinormalisasi adalah 72, maka itulah nilai indeksnya.	BPS, Lembaga Survei
19	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks komposit yang mengukur tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat beragama.	Indeks (0-100)	Dihitung sebagai rata-rata skor dari tiga dimensi berdasarkan survei. Simulasi : Misal, skor : Toleransi=80, Kesetaraan=75, Kerja Sama=78. $IKUB = (80+75+78) / 3 = 77,67$.	Kemenag
	Indeks Zakat Nasional				

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase kenaikan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) pada suatu periode dibandingkan periode sebelumnya.	Persen (%)	Rumus : $[(PDRB_t - PDRB_{t-1}) / PDRB_{t-1}] \times 100\%$ Simulasi : Jika PDRB ADHK 2024 = 105 T dan 2023 = 100 T, maka Pertumbuhan = $[(105-100)/100] \times 100\% = 5\%$.	BPS
2	Rasio Gini	Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk. Nilai berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna).	Rasio (0-1)	Dihitung berdasarkan kurva Lorenz. Semakin besar area antara garis diagonal dan kurva Lorenz, semakin tinggi nilai Rasio Gini. Simulasi Konseptual : Jika 20% penduduk teratas menguasai 50% pengeluaran, akan menghasilkan nilai misal 0,380.	BPS (Susenas)
3	PDRB per Kapita	PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk.	Juta Rupiah	Rumus : $PDRB \text{ ADHB} / \text{Jumlah Penduduk}$ Simulasi : Jika PDRB ADHB = 55 T dan Penduduk = 1,1 juta jiwa, maka PDRB Perkapita = $55T / 1,1jt = \text{Rp } 50 \text{ Juta}$.	BPS
4	Tingkat Inflasi Daerah	Persentase kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu.	Persen (%)	Rumus : $[(IHK_t - IHK_{t-1}) / IHK_{t-1}] \times 100\%$ Simulasi : Jika IHK Des 2024 = 115 dan Des 2023 = 110, maka Inflasi = $[(115-110)/110] \times 100\% = 4,54\%$.	BPS
5	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah (50)	Ukuran statistik disparitas harga suatu komoditas pokok antar pasar di dalam satu kabupaten.	Koefisien (%)	Rumus : $(\text{Standar Deviasi Harga} / \text{Rata-rata Harga}) \times 100\%$ Simulasi : Harga beras di 3 pasar : 12rb, 12.5rb, 13rb. Rata-rata=12.5rb, StDev=408. KV = $(408/12.500) \times 100\% = 3,26\%$.	BPS

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persentase kontribusi Nilai Tambah Bruto (NTB) dari seluruh kegiatan ekonomi di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kategori I dalam KBLI) terhadap total PDRB. Indikator ini secara langsung mencerminkan peran sektor pariwisata, perhotelan, dan kuliner dalam perekonomian.	Persen (%)	(NTB Sektor Akomodasi & Makan Minum / Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku) x 100% Simulasi : Misal, NTB dari sektor ini adalah Rp 2,5 Triliun, dan total PDRB daerah adalah Rp 50 Triliun. Maka, Rasio = $(2,5 / 50) \times 100\% = 5\%$	BPS
7	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Kehutanan Perikanan	Persentase kontribusi Nilai Tambah Bruto (NTB) dari seluruh kegiatan ekonomi di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Kategori A dalam KBLI) terhadap total PDRB suatu daerah. Indikator ini menunjukkan tingkat kebergantungan ekonomi pada sektor primer/agraris.	Persen (%)	(NTB Sektor Pertanian, dsk. / Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku) x 100% Simulasi : Misal, NTB dari sektor Pertanian, dsk. adalah Rp 15 Triliun, dan total PDRB daerah adalah Rp 50 Triliun. Maka, Rasio = $(15 / 50) \times 100\% = 30\%$	BPS
	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Kehutanan Perikanan				
8	Persentase UMKM yang Naik Kelas/Status	Persentase UMKM yang berhasil meningkatkan statusnya (dari mikro ke kecil, kecil ke menengah) dalam satu tahun.	Persen (%)	Rumus : (Jumlah UMKM naik kelas / Jumlah total UMKM awal tahun) x 100% Simulasi : Jika 1.000 UMKM naik kelas dari total 50.000 UMKM, maka Persentase = $(1.000/50.000) \times 100\% = 2\%$.	Dinas Koperasi & UKM
9	Proporsi Jumlah UKM Non-Pertanian	Persentase jumlah unit usaha skala Kecil dan Menengah yang bergerak di luar sektor pertanian (seperti perdagangan, industri, jasa) terhadap total jumlah unit Usaha Kecil dan Menengah di suatu daerah.	Persen (%)	(Jumlah UKM Non-Pertanian / Jumlah Total UKM) x 100% Simulasi : Misal, jumlah UKM Non-Pertanian adalah 60.000 unit, dari total 98.000 unit UKM.	BPS (Sensus Ekonomi), Dinas Koperasi & UKM

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
				Maka, Proporsi = $(60.000 / 98.000) \times 100\% = 61,22\%$.	
10	Proporsi Industri Kecil dan Menengah	Persentase jumlah unit industri (usaha pengolahan/manufaktur) skala Kecil dan Menengah terhadap total jumlah unit industri di suatu daerah. Indikator ini mengukur struktur industri berdasarkan skala usahanya.	Persen (%)	(Jumlah Industri Kecil & Menengah / Jumlah Total Industri) x 100% Simulasi : Misal, jumlah IKM adalah 4.950 unit, dari total 5.000 unit industri. Maka, Proporsi = $(4.950 / 5.000) \times 100\% = 99\%$	BPS (Sensus Ekonomi), Dinas Perindustrian
11	Jumlah Tamu Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara)(Hotel Berbintang)	Total jumlah pengunjung/wisatawan (nusantara dan mancanegara) yang datang ke destinasi wisata atau menginap di akomodasi komersial.	Orang/Jiwa	Dihitung melalui agregasi data kunjungan di objek wisata dan data tamu yang menginap di hotel. Simulasi : Total kunjungan di semua objek = 500.000, total tamu hotel = 100.000. Jumlah (setelah penyesuaian) bisa jadi 550.000 orang.	Dispar, BPS
12	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persentase penduduk berstatus wirausaha terhadap total populasi usia kerja.	Persen (%)	Rumus : $(\text{Jumlah Wirausaha} / \text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}) \times 100\%$ Simulasi : Jika Wirausaha = 35.000 dan Penduduk Usia Kerja = 700.000, maka Rasio = $(35.000/700.000) \times 100\% = 5\%$.	BPS (Sakernas)
13	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persentase kontribusi Nilai Tambah Bruto (NTB) dari seluruh kegiatan ekonomi di sektor Industri Pengolahan (Kategori C dalam KBLI) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Indikator ini mengukur peran dan pentingnya sektor manufaktur dalam struktur perekonomian.	Persen (%)	$(\text{NTB Sektor Industri Pengolahan} / \text{Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku}) \times 100\%$ Simulasi : Misal, NTB dari sektor Industri Pengolahan adalah Rp 12 Triliun, dan total PDRB daerah adalah Rp 50 Triliun. Maka, Rasio = $(12 / 50) \times 100\% = 24\%$	BPS

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
14	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Rasio nilai total ekspor barang dan jasa dari suatu daerah terhadap total PDRB daerah tersebut.	Persen (%)	Rumus : $(\text{Nilai Ekspor} / \text{Nilai PDRB ADHB}) \times 100\%$ Simulasi : Jika Ekspor = 5 T dan PDRB = 50 T, maka Hasil = $(5/50) \times 100\% = 10\%$.	BPS, Bea Cukai
15	Indeks Desa	Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan. Indeks ini dibangun dari 6 dimensi, yaitu: Layanan Dasar Sosial Ekonomi Lingkungan Aksesibilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Indeks (0 – 100%)	Indeks Desa dihitung dengan menjumlahkan skor dari 48 indikator yang terbagi dalam 13 sub-dimensi dan 6 dimensi. Setiap indikator memiliki skor 1–5 yang ditransformasikan ke dalam nilai indeks. Formulasi dasar: $ID = DLD + DS + DE + DL + DA + DTPD$ Keterangan: DLD = Dimensi Layanan Dasar (26,77%) DS = Dimensi Sosial (13,39%) DE = Dimensi Ekonomi (25,20%) DL = Dimensi Lingkungan (14,17%) DA = Dimensi Aksesibilitas (7,87%) DTPD = Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa (12,60%) Klasifikasi Status Desa (berdasarkan skor ID): Desa Sangat Tertinggal: 0 – 49,48% Desa Tertinggal: 49,49% – 57,38 Desa Berkembang: 57,39% – 69,34% Desa Maju: 69,35% – 79,62% Desa Mandiri: 79,63% – 100%	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT)
16	Persentase Desa Mandiri	Persentase jumlah desa dengan status "Mandiri" (skor IDM > 0.8155) terhadap jumlah total desa.	Persen (%)	Rumus : $(\text{Jumlah Desa Mandiri} / \text{Jumlah Total Desa}) \times 100\%$ Simulasi : Jika 20 desa mandiri dari total 200 desa, maka Persentase = $(20/200) \times 100\% = 10\%$.	Kemendesa

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
	Kontribusi PDRB Kabupaten Ngawi Terhadap Provinsi				
17	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Perbandingan antara total volume usaha (omzet) seluruh koperasi aktif terhadap total PDRB.	Persen (%)	Rumus : $(\text{Total Volume Usaha Koperasi} / \text{PDRB ADHB}) \times 100\%$ Simulasi : Jika Volume Usaha = 1 T dan PDRB = 50 T, maka Rasio = $(1/50) \times 100\% = 2\%$.	BUMD terkait, Bagian Perekonomian Setda
18	Return on Aset (ROA) BUMD	Ukuran profitabilitas yang menunjukkan kemampuan BUMD dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya.	Persen (%)	Rumus : $(\text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Total Aset}) \times 100\%$ Simulasi : Jika Laba = 5 Miliar dan Total Aset = 100 Miliar, maka ROA = $(5/100) \times 100\% = 5\%$.	BUMD terkait, Bagian Perekonomian Setda
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Perbandingan antara total penerimaan pajak daerah terhadap total PDRB. Mengukur upaya pemungutan pajak daerah (tax effort).	Persen (%)	Rumus : $(\text{Total Penerimaan Pajak Daerah} / \text{PDRB ADHB}) \times 100\%$ Simulasi : Jika Pajak Daerah = 150 Miliar dan PDRB = 50 Triliun (50.000 M), maka Rasio = $(150/50.000) \times 100\% = 0,3\%$.	BAKEU, BPS
20	% kontribusi PAD terhadap APBD	Persentase sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dalam APBD. Mengukur kemandirian fiskal.	Persen (%)	Rumus : $(\text{Realisasi PAD} / \text{Realisasi Total Pendapatan}) \times 100\%$ Simulasi : Jika PAD = 300 Miliar dan Total Pendapatan = 2 Triliun (2.000 M), maka Kontribusi = $(300/2.000) \times 100\% = 15\%$.	BAKEU
21	Rasio kapasitas fiskal daerah	Ukuran kemampuan keuangan daerah, dihitung dari PAD dan Dana Transfer Umum (DTU) dikurangi Belanja Pegawai.	Indeks/Kategori	Rumus : PAD + DTU - Belanja Pegawai. Hasilnya dikelompokkan ke dalam kategori (Sangat Tinggi s.d Sangat Rendah) oleh Kemenkeu.	Kemenkeu (DJPK)

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
				Simulasi : Jika PAD=300M, DTU=1.500M, Belanja Pegawai=800M. Kapasitas = $300+1500-800 = 1.000$ Miliar.	
ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Ukuran kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup 8 area perubahan (mental aparatur, kelembagaan, SDM, akuntabilitas, dll).	Indeks (0-100)	Dihitung berdasarkan hasil evaluasi (LKE) oleh KemenPAN-RB. Penilaian dilakukan pada komponen Pengungkit (bobot 60%) dan Hasil (bobot 40%). Simulasi : Jika skor rata-rata tertimbang Pengungkit = 50 dan Hasil = 35, maka IRB = $50 + 35 = 85$.	KemenPAN-RB, Inspektorat
2	Nilai SAKIP	Nilai yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi	Poin/Predikat	Dihitung oleh KemenPAN-RB atau Inspektorat berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) AKIP. Simulasi : Jika hasil evaluasi menunjukkan instansi sangat akuntabel, nilainya bisa 85 (Predikat A).	KemenPAN-RB
3	Indeks Pelayanan Publik	Ukuran persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Mencakup aspek kebijakan, profesionalisme SDM, sarpras, sistem informasi, dan pengaduan.	Indeks (1-5) & Predikat	Dihitung oleh Kementerian PANRB RI melalui survei observasi dan wawancara di unit-unit layanan. Simulasi Konseptual : Jika skor rata-rata adalah 4.2 (skala 5), maka akan masuk dalam Zona Hijau (Kualitas Tinggi).	KemenPAN-RB
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pemkab. Ngawi	Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan aparatur penyelenggara pelayanan publik.	Indeks (0-100)	Dihitung dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mencakup 9 unsur pelayanan. Nilai rata-rata tertimbang dikonversi ke skala 0-100. Simulasi : Jika nilai rata-rata tertimbang setelah konversi adalah 88,5, maka itulah nilai IKM-nya.	Bagian Organisasi Setda
5	Indeks Reformasi Hukum	Ukuran untuk memetakan kondisi reformasi hukum di Pemda, mencakup variabel penataan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas SDM hukum.	Indeks (0-100)	Dihitung berdasarkan penilaian mandiri dan verifikasi terhadap variabel yang telah ditetapkan. Simulasi Konseptual : Jika skor rata-rata dari seluruh	Kemenkumham

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
				variabel yang dinilai oleh verifikator mencapai 88, maka itulah nilai IRH-nya.	
6	Indeks Akses Keuangan Daerah	Persentase penduduk dewasa (15+) yang memiliki akses dan menggunakan produk/layanan jasa keuangan formal (perbankan, asuransi, dll). Lebih dikenal sebagai Indeks Inklusi Keuangan.	Persen (%)	Dihitung melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Simulasi : Jika 920.000 dari 1.000.000 penduduk dewasa menggunakan layanan keuangan, maka Indeks = 92%	OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
7	Indeks Pemerintahan Digital	Ukuran tingkat kematangan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi digital untuk efisiensi internal dan pelayanan publik. (Sering menjadi bagian dari SPBE).	Indeks	Dihitung melalui evaluasi terhadap komponen seperti ketersediaan layanan online, interoperabilitas data, dan adopsi teknologi. Simulasi Konseptual : Jika rata-rata skor dari puluhan indikator digitalisasi adalah 3.5 dari skala 5, maka itulah nilainya.	Kemen PAN-RB, Kemenkominfo
8	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ukuran standar tingkat pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) suatu wilayah, mencakup aspek akses & infrastruktur, penggunaan, dan keahlian TIK.	Indeks (0-10)	Dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari 11 indikator komponen (misal : pengguna internet, kepemilikan gawai). Simulasi Konseptual : Jika skor subindeks Akses=5.5, Penggunaan=6.0, Keahlian=6.5, maka IP-TIK adalah gabungan ketiganya, misal 6.0.	BPS, Kemenkominfo
9	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Ukuran kemajuan implementasi SPBE yang mencakup 4 domain : Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan SPBE.	Indeks (1-5)	Dihitung dari hasil evaluasi mandiri dan verifikasi oleh evaluator eksternal terhadap 47 indikator. Simulasi Konseptual : Jika skor rata-rata tertimbang dari 47 indikator adalah 3.8, maka itulah nilai Indeks SPBE.	KemenPAN-RB
10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks komposit yang mengukur kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah dari berbagai dimensi, seperti kepatuhan, efisiensi, dan transparansi.	Indeks (0-100)	Dihitung oleh Kemendagri dengan mengagregasikan data (Opini BPK, realisasi APBD, implementasi transaksi non-tunai, dll).	Kemendagri

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Metode Perhitungan	Sumber Data
				Simulasi Konseptual : Jika rata-rata skor dari berbagai dimensi adalah 90, maka itulah nilai IPKD-nya	
11	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Ukuran persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan mengenai risiko korupsi dan kondisi integritas di suatu instansi	Indeks (0-100)	Dihitung oleh KPK berdasarkan hasil survei daring kepada responden (internal, eksternal, ahli). Semakin tinggi nilainya, semakin rendah risiko korupsi. Simulasi : Nilai SPI adalah skor akhir dari analisis statistik, misal 82,5.	KPK
12	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks yang mengukur efektivitas penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat oleh pemerintah daerah.	Indeks (0-100)	Dihitung berdasarkan penilaian terhadap variabel seperti ketersediaan regulasi (Perda), kelembagaan (Satpol PP), kualitas SDM, sarpras, dan penanganan gangguan. Simulasi Konseptual : Jika skor rata-rata variabel adalah 78, maka itulah nilai Indeksnya.	Kemendagri

BAB V

PENUTUP

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGAWI
2025-2029



BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 ini hendaknya dilakukan secara konsisten, transparan, partisipatif, dan penuh tanggungjawab. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Ngawi serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 ini sebaik-baiknya;
2. RPJMD ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Program sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2025-2029, nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah);
4. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2025-2029;
5. Program beserta indikasi anggaran yang telah ditetapkan merupakan acuan, dan apabila terdapat perubahan tidak berimplikasi dalam mewujudkan sasaran sub agenda/agenda pembangunan.
6. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2025-2029 sangat tergantung dari peran seluruh *stakeholder* yang terlibat di dalamnya;
7. Masyarakat Kabupaten Ngawi memiliki ruang dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2025-2029. Keterlibatan masyarakat tersebut merupakan wujud penguatan peran (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan;



8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029.

5.2 Pedoman Transisi

Untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah dan menghindari kekosongan arah kebijakan pada masa peralihan pemerintahan, RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan *pedoman transisi*. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama masa jabatan kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum berikutnya.

Sebagaimana diatur dalam berbagai dokumen RPJMD sebelumnya, termasuk yang diterapkan di beberapa daerah, pedoman transisi ini bertujuan untuk :

- a. Menjaga kesinambungan pembangunan dengan menyelesaikan program dan kegiatan yang belum tuntas pada periode sebelumnya.
- b. Menjadi dasar penyusunan RKPD dan RAPBD pada tahun pertama masa jabatan kepala daerah baru, sebelum RPJMD yang baru disusun dan ditetapkan
- c. Mengakomodasi penyusunan RPJPD 2025-2045, serta mendukung pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bersifat transisional.
- d. Menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta memfasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah dan sektor dalam pelaksanaan program strategis.

Dengan adanya pedoman transisi ini, diharapkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ngawi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah.



5.3 Kesimpulan Penting Substansial

Kesimpulan substansial dari dokumen RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 adalah penegasan komitmen untuk melakukan sebuah transformasi fundamental, yaitu memantapkan visi **“SEMESTA BERENCANA”**. Visi ini bertujuan untuk mewujudkan **Kabupaten Ngawi sebagai Lumbung Pangan Nasional yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan menuju Masyarakat Kabupaten Ngawi Sejahtera, Berakhlak dengan Semangat Gotong Royong**. Terobosan utama yang diusung bukanlah sekadar peningkatan produksi, melainkan pergeseran paradigma menuju Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan yang menjadi jiwa dari seluruh arah kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk menerjemahkan visi besar tersebut ke dalam langkah-langkah yang terukur, dokumen ini meletakkan landasan strategis yang kokoh dan holistik. Kerangka kerja untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan secara komprehensif melalui lima misi pembangunan yang saling bersinergi, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bagi masyarakat;
- 2) Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Melalui Diversifikasi Pertanian, Industrialisasi, dan Penguatan Sektor-Sektor Ekonomi dalam Penciptaan Lapangan Pekerjaan;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi antar layanan pemerintah dan publik berbasis Teknologi Informasi;
- 4) Meningkatkan akses dan konektivitas antar daerah yang menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi;
- 5) Meningkatkan kondusifitas yang mendukung keberlanjutan pembangunan.

Pada akhirnya, dokumen RPJMD ini dirancang tidak hanya sebagai kumpulan target, tetapi juga sebagai jawaban strategis atas tantangan utama dalam implementasi. Perencanaan ini menjadi instrumen untuk memastikan adanya konsistensi dari dokumen hingga pelaksanaan, mendorong inovasi sebagai solusi di tengah keterbatasan finansial, serta mengamankan sinergi kinerja antar Perangkat Daerah. Dengan demikian, RPJMD ini menjadi panduan esensial untuk mengarahkan seluruh sumber daya daerah secara efektif demi mewujudkan masyarakat Ngawi yang sejahtera, berakhlak, dengan semangat gotong royong.

5.4 Pedoman Pengendalian dan Evaluasi

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan *pedoman pengendalian dan evaluasi* sebagai alat monitoring terhadap konsistensi pelaksanaan program, capaian indikator kinerja, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

A. Pedoman Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029 merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan secara berkelanjutan agar setiap hambatan atau permasalahan yang muncul di lapangan dapat segera diantisipasi dan dicarikan solusi yang tepat. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang direncanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara umum, pengendalian RPJMD dilaksanakan melalui upaya pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut atas capaian program dan kegiatan. Melalui proses ini, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan

pelaksanaan pembangunan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Hasil pengendalian kemudian menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian kebijakan maupun perbaikan strategi agar pelaksanaan pembangunan semakin efektif.

Dengan adanya pedoman pengendalian ini, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu menjalankan program dan kegiatannya secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, pedoman ini juga menjadi instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di Kabupaten Ngawi.

B. Pedoman Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029 merupakan upaya untuk menilai sejauh mana pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini tidak hanya menekankan pada capaian angka atau target, tetapi juga memperhatikan efektivitas, keberlanjutan, serta dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya evaluasi, pemerintah daerah dapat mengetahui kekuatan maupun kelemahan dalam pelaksanaan program, sekaligus memperoleh masukan yang berguna untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala agar dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai perkembangan pembangunan daerah. Proses ini juga penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah, karena hasil evaluasi akan menjadi dasar pertanggungjawaban kepada publik serta menjadi pijakan dalam menyusun langkah strategis selanjutnya.





Dengan demikian, pedoman evaluasi berperan sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu menjawab tantangan yang ada, serta mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Ngawi secara berkelanjutan.

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO





Pemerintah
Kabupaten Ngawi